



PEMERINTAH KOTA
PADANG PANJANG

PERATURAN WALIKOTA
PADANG PANJANG NOMOR 10
TAHUN 2025

TENTANG

PERUBAHAN
RENCANA KERJA
PEMERINTAH DAERAH
TAHUN 2025

BADAN PERENCANAAN,
PENELITIAN DAN
PENGEMBANGAN DAERAH
KOTA PADANG PANJANG



WALI KOTA PADANG PANJANG
PROVINSI SUMATERA BARAT

PERATURAN WALI KOTA PADANG PANJANG
NOMOR 10 TAHUN 2025
TENTANG
PERUBAHAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2025

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA PADANG PANJANG,

- Menimbang : a. bahwa Rencana Kerja Pemerintah Daerah merupakan penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang memuat rancangan ekonomi Daerah, prioritas pembangunan Daerah, serta rencana kerja dan pendanaan untuk jangka waktu 1 (satu) tahun yang disusun dengan berpedoman pada rencana kerja pemerintah dan program strategis nasional yang ditetapkan oleh pemerintah pusat;
- b. bahwa berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2025 dalam tahun berjalan menunjukkan adanya ketidaksesuaian yang meliputi penghapusan kegiatan, penambahan atau pengurangan target kinerja dan pagu kegiatan, serta perubahan lokasi dan kelompok sasaran kegiatan dengan penyesuaian kerangka ekonomi daerah yang berdampak pada penambahan atau pengurangan pagu anggaran kegiatan;
- c. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 355 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, dinyatakan bahwa Rancangan Perkada tentang Perubahan RKPD disampaikan kepada Kepala Daerah melalui Sekretaris Daerah guna memperoleh persetujuan untuk ditetapkan menjadi Peraturan Kepala Daerah tentang Perubahan RKPD;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2025;

Mengingat...

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Undang-Undang Nomor 54 Tahun 2024 tentang Kota Padang Panjang di Provinsi Sumatera Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 160, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6975);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
5. Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2025 tentang Percepatan Pembentukan KOperasi Desa/Kelurahan Merah Putih;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2024 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2025;
7. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 7 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Provinsi Sumatera Barat Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2008 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 27);
8. Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kota Padang Panjang Tahun 2025-2045 (Lembaran Daerah Kota Padang Panjang Tahun 2024 Nomor 4);
9. Peraturan Wali Kota Nomor 6 Tahun 2023 tentang Rencana Pembangunan Daerah Kota Padang Panjang Tahun 2024-2026;

MEMUTUSKAN...

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA TENTANG PERUBAHAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2025.

Pasal 1

Dalam Peraturan Wali Kota ini yang dimaksud dengan;

1. Daerah adalah Kota Padang Panjang.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Padang Panjang.
3. Wali Kota adalah Wali Kota Padang Panjang.
4. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Padang Panjang.
5. Perangkat Daerah adalah Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kota Padang Panjang.
6. Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat RKPD adalah dokumen perencanaan Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
7. Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2025 yang selanjutnya disingkat Perubahan RKPD adalah perubahan perencanaan Daerah tahun 2025 dengan berpedoman pada Peraturan Wali Kota tentang Rencana Pembangunan Daerah dan hasil evaluasi pelaksanaan RKPD tahun 2025 sampai triwulan I.
8. Kebijakan Umum APBD yang selanjutnya disingkat KUA adalah dokumen yang memuat kebijakan bidang pendapatan, belanja, dan pembiayaan serta asumsi yang mendasari untuk periode 1 (satu) tahun.
9. Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara yang selanjutnya disingkat PPAS adalah program prioritas dan patokan batas maksimal anggaran yang diberikan kepada Perangkat Daerah untuk setiap program sebagai acuan dalam penyusunan rencana kerja dan anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah.

Pasal 2

- (1) Perubahan RKPD disusun karena adanya ketidaksesuaian dengan perkembangan keadaan yang meliputi penghapusan kegiatan, penambahan kegiatan baru/kegiatan alternatif, penambahan atau pengurangan target kinerja dan pagu kegiatan, serta perubahan lokasi dan kelompok sasaran kegiatan.
- (2) Perubahan RKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dijadikan:
 - a. dasar penetapan perubahan rencana kerja Perangkat Daerah Tahun; dan
 - b. pedoman penyusunan perubahan KUA dan perubahan PPAS Tahun.
- (3) Perubahan KUA dan perubahan PPAS sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b disampaikan Pemerintah Daerah kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah untuk dibahas sebagai landasan penyusunan rancangan perubahan APBD tahun 2025.

Pasal 3...

Pasal 3

- (1) Perubahan RKPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) disusun dengan sistematika yang terdiri atas :
 - a. bab I memuat pendahuluan;
 - b. bab II memuat evaluasi hasil triwulan I tahun berkenaan;
 - c. bab III memuat kerangka ekonomi dan keuangan Daerah;
 - d. bab IV memuat sasaran dan prioritas pembangunan Daerah;
 - e. bab V memuat rencana kerja dan pendanaan Daerah; dan
 - f. bab VI memuat penutup.
- (2) Perubahan RKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.

Pasal 4

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Padang Panjang.

Ditetapkan di Padang Panjang
pada tanggal 31 Mei 2025

WALI KOTA PADANG PANJANG,



HENDRI ARNIS

Diundangkan di Padang Panjang
pada tanggal 31 Mei 2025

SEKRETARIS DAERAH KOTA PADANG PANJANG,

A handwritten signature in blue ink, belonging to Sonny Budaya Putra, is written over the text of the Secretary of the Region.

SONNY BUDAYA PUTRA

BERITA DAERAH KOTA PADANG PANJANG TAHUN 2025 NOMOR 10

LAMPIRAN
PERATURAN WALI KOTA PADANG PANJANG
NOMOR 10 TAHUN 2025
TENTANG
PERUBAHAN RENCANA KERJA PEMERINTAH
DAERAH TAHUN 2025

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Padang Panjang Tahun 2025, yang telah ditetapkan melalui Peraturan Walikota Padang Panjang Nomor 9 Tahun 2024, merupakan dokumen perencanaan tahunan yang menjadi dasar pelaksanaan pembangunan daerah pada tahun anggaran 2025. RKPD ini dirancang untuk memberikan kontribusi signifikan terhadap pencapaian tujuan dan sasaran pembangunan daerah yang lebih luas. Sebagai instrumen perencanaan, RKPD menjabarkan prioritas pembangunan daerah, program-program, kegiatan-kegiatan, serta indikator kinerja yang terukur. Semua itu disusun untuk memastikan keterpaduan dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD), serta memperhatikan arah kebijakan pembangunan nasional.

Namun, dinamika lingkungan strategis yang terus berubah, baik di tingkat global, nasional, maupun regional, dapat mempengaruhi asumsi dasar, prioritas, dan program pembangunan yang telah ditetapkan dalam RKPD 2025. Perubahan-perubahan ini, yang mencakup perkembangan ekonomi, sosial, politik, teknologi, dan lingkungan, memerlukan pengelolaan yang fleksibel dan adaptif terhadap ketidakpastian eksternal. Oleh karena itu, diperlukan mekanisme yang dapat menanggapi perubahan yang tak terduga dan memastikan RKPD tetap relevan dengan keadaan yang berkembang.

Perubahan yang terjadi setelah Pemilihan Kepala Daerah Serentak Tahun 2024, yang menghasilkan kepala daerah dan wakil kepala daerah terpilih, membawa dampak langsung terhadap arah kebijakan pembangunan daerah. Perubahan kepemimpinan ini mengharuskan penyesuaian dalam RKPD 2025 agar sejalan dengan visi, misi, dan program yang telah ditetapkan oleh kepala daerah terpilih. Dengan demikian, penyusunan perubahan RKPD 2025 menjadi sangat penting untuk memastikan keselarasan antara kebijakan pembangunan daerah dan kepemimpinan baru, serta untuk memperkuat pencapaian tujuan pembangunan nasional yang telah ditetapkan.

Selain itu, penyusunan perubahan RKPD juga diperlukan untuk mengintegrasikan program-program prioritas yang telah ditetapkan oleh pemerintah pusat, yaitu Asta Cita Presiden dan Wakil Presiden. Asta Cita mencakup penguatan sumber daya manusia, pendidikan, kesehatan, program makan bergizi gratis, pencegahan *stunting* dan kemiskinan ekstrem, pengendalian inflasi daerah, peningkatan pertumbuhan ekonomi daerah, percepatan pembentukan koperasi desa/kelurahan Merah Putih, dukungan

swasembada pangan, serta pengembangan industri kerajinan dan memfasilitasi dalam mempromosikan dan memasarkan hasil industri kerajinan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM). Program-program tersebut harus tercermin dalam kebijakan daerah agar pembangunan daerah dapat berjalan seiring dengan kebijakan nasional. Oleh karena itu, perubahan RKPD berfungsi sebagai sarana untuk mengakomodasi kebijakan nasional yang relevan dengan tantangan lokal yang ada.

Pentingnya penyusunan perubahan RKPD Tahun 2025 juga tidak lepas dari Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2025 tentang Efisiensi Belanja dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Instruksi ini mendorong pemerintah daerah untuk melakukan efisiensi anggaran dengan membatasi belanja yang tidak memberikan dampak langsung pada pencapaian Asta Cita Presiden dan Wakil Presiden. Dalam hal ini, RKPD harus mencerminkan langkah-langkah efisiensi anggaran, seperti pengurangan belanja seremonial dan perjalanan dinas, serta memfokuskan anggaran pada bidang pendidikan, kesehatan, infrastruktur dan sanitasi, optimalisasi penanganan pengendalian inflasi, stabilitas harga makanan dan minuman, penyediaan cadangan pangan dan prioritas lainnya yang berorientasi pada peningkatan kesejahteraan masyarakat, penciptaan lapangan kerja dan pertumbuhan ekonomi.

Berdasarkan Pasal 343 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, RKPD dapat diubah apabila berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaannya dalam tahun berjalan menunjukkan adanya ketidaksesuaian dengan perkembangan keadaan, yang meliputi: (1). Perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi prioritas pembangunan daerah, kerangka ekonomi daerah dan keuangan daerah, rencana program dan kegiatan RKPD Tahun berkenaan.

Berdasarkan Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 0900.1.1/640/SJ tentang Penyesuaian Arah Kebijakan Pembangunan Daerah Melalui Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah dan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2025, perubahan RKPD Tahun 2025 ini dilakukan dalam rangka :

1. Menyesuaikan arah kebijakan pembangunan daerah dengan visi, misi, dan program kepala daerah dan wakil kepala daerah, serta program Asta Cita Presiden dan Wakil Presiden karena penyusunan RKPD Tahun 2025 dilakukan sebelum pelaksanaan pemilihan kepala daerah serentak;

2. Menyesuaikan tema pembangunan atau isu yang menjadi prioritas nasional terakomodir dalam perubahan RKPD;
3. Mengakomodir Pergeseran 1 pada Februari 2025, dalam rangka menjalankan Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2025 tentang Efisiensi Belanja dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun 2025.

Dengan demikian, penyusunan perubahan RKPD ini sangat penting untuk memastikan agar perencanaan pembangunan daerah tetap adaptif terhadap perubahan, serta tetap berfokus pada pencapaian tujuan pembangunan yang lebih luas dan berkelanjutan.

1.2. Dasar Hukum

Adapun dasar hukum penyusunan Perubahan RKPD Kota Padang Panjang Tahun 2024 adalah sebagai berikut :

- a. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
- b. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
- c. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Tahun 2022 Nomor 4);
- d. Undang-Undang Nomor 54 Tahun 2024 tentang Kota Padang Panjang di Provinsi Sumatera Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 160, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6975);
- e. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
- f. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
- g. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan

- Keuangan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6322);
- h. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 Tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
 - i. Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2000 tentang Pengarusutamaan Gender dalam Pembangunan Nasional;
 - j. Peraturan Presiden Nomor 153 Tahun 2014 tentang Grand Design Pembangunan Kependudukan (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 310);
 - k. Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2021 tentang Kebijakan Kabupaten/Kota Layak Anak (Lembaran Negara Tahun 2021 Nomor 96);
 - l. Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2021 tentang Percepatan Penurunan Stunting (Lembaran Negara Tahun 2021 Nomor 172);
 - m. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
 - n. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Tahun 2019 Nomor 1114);
 - o. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 59 Tahun 2021 Tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Berita Negara Tahun 2021 Nomor 1419);
 - p. Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2025 Tentang Efisiensi Belanja Dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara Dan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025;
 - q. Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2025 tentang Percepatan Pembentukan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih;
 - r. Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.1/640/SJ Tentang Penyesuaian Arah Kebijakan Pembangunan Daerah Melalui Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah dan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Tahun Anggaran;
 - s. Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.1/833/SJ Tentang Penyesuaian Pendapatan Dan Efisiensi Belanja Daerah Dalam Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025;
 - t. Peraturan Daerah Kota Padang Panjang Nomor 2 Tahun 2013 tentang

Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kota Padang Panjang Tahun 2012-2032 (Lembaran Daerah Kota Padang Panjang Tahun 2013 Nomor 2 Seri E.1);

- u. Peraturan Daerah Kota Padang Panjang Nomor 4 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Daerah Kota Padang Panjang Tahun 2025-2045 (Lembaran Daerah Kota Padang Panjang Tahun 2024 Nomor 4);
- v. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Lembaran Daerah Kota Padang Panjang Tahun 2024 Nomor 5);
- w. Peraturan Walikota Padang Panjang Nomor 11 Tahun 2024 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Padang Panjang Tahun 2025 (Berita Daerah Kota Padang Panjang Tahun 2024 Nomor 11);
- x. Peraturan Walikota Padang Panjang Nomor 49 Tahun 2024 Tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Berita Daerah Kota Padang Panjang Tahun 2024 Nomor 49);
- y. Peraturan Walikota Padang Panjang Nomor 9 Tahun 2025 Tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota Nomor 49 Tahun 2024 Tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Berita Daerah Kota Padang Panjang Tahun 2025 Nomor 9).

1.3. Maksud dan Tujuan

Maksud Penyusunan perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Padang Panjang Tahun 2025 adalah untuk menyesuaikan dokumen perencanaan tahunan dengan perkembangan dinamika sosial, ekonomi, politik, dan teknologi yang terjadi setelah penetapan RKPD 2025. Perubahan ini diharapkan dapat memastikan bahwa kebijakan dan prioritas pembangunan daerah tetap relevan, responsif, dan adaptif terhadap perubahan lingkungan strategis baik di tingkat lokal, nasional, maupun global.

Selain itu, perubahan RKPD ini juga dimaksudkan untuk mengakomodasi arah kebijakan penyelenggaraan pemerintahan sesuai dengan visi, misi, dan program prioritas kepala daerah terpilih dan Asta Cita Presiden dan Wakil Presiden terpilih.

Adapun tujuan Perubahan RKPD Tahun 2025 ditujukan sebagai berikut :

- a. Menyesuaikan kebijakan pembangunan daerah dengan visi, misi, dan program yang telah ditetapkan oleh kepala daerah terpilih pasca Pemilihan Kepala Daerah Serentak 2024;
- b. Menyelaraskan arah kebijakan pembangunan daerah dengan Asta Cita Presiden dan Wakil Presiden dalam rangka mendukung program Pemeriksaan Kesehatan Gratis dan pembentukan Koperasi Merah Putih di tingkat kelurahan sesuai kondisi dan kebutuhan daerah, guna menciptakan

- pembangunan yang berkelanjutan;
- c. Mengakomodir tema dan isu pembangunan yang menjadi prioritas nasional;
 - d. Memastikan keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan serta evaluasi hasil pembangunan.
 - e. Memberikan gambaran atas perubahan asumsi-asumsi kebijakan umum APBD Tahun 2025.
 - f. Menyesuaikan perubahan terhadap kerangka keuangan daerah tahun 2025 yang akan dijadikan pedoman dalam penyusunan Kebijakan Umum Anggaran Perubahan dan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara APBD Perubahan Tahun 2025.
 - g. Melakukan perubahan kebijakan penganggaran terkait dinamika permasalahan yang timbul di masyarakat yang perlu ditangani secara cepat dengan memperhatikan prioritas nasional dan daerah.
 - h. Menjadi pedoman penyusunan Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2025.

1.4. Sistematika Penulisan

Perubahan RKPD Kota Padang Panjang Tahun 2025 disusun dengan sistematika sebagai berikut :

Bab I Pendahuluan yang memuat tentang latar belakang, dasar hukum, hubungan antar dokumen, maksud dan tujuan serta sistematika penulisan.

Bab II Evaluasi Hasil Triwulan I (Triwulan Satu) Tahun Berkenaan, yang memuat kompilasi hasil evaluasi kinerja program dan kegiatan berdasarkan OPD sampai dengan Triwulan I berjalan tahun 2025.

Bab III Kerangka Ekonomi dan Keuangan Daerah, yang memuat penjelasan tentang perubahan asumsi ekonomi makro daerah, arah kebijakan daerah dan proyeksi perubahan kerangka keuangan daerah tahun 2025.

Bab IV Sasaran dan Prioritas Pembangunan Daerah tahun 2025 yang memuat sasaran dan prioritas pembangunan daerah, serta rencana program dan prioritas daerah dalam perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2025.

Bab V Rencana Kerja dan Pendanaan Daerah memuat kegiatan lanjutan tahun sebelumnya, pergeseran kegiatan antar Perangkat Daerah, penghapusan kegiatan, penambahan kegiatan baru/kegiatan alternatif, penambahan atau pengurangan target kegiatan, pagu indikatif, lokasi, kelompok sasaran yang mengalami perubahan dan yang tidak mengalami perubahan.

Bab VI Penutup.

BAB II

EVALUASI HASIL TRIWULAN I TAHUN 2025

Evaluasi terhadap hasil pelaksanaan RKPD meliputi evaluasi terhadap pelaksanaan program dan kegiatan yang bersumber dari hasil evaluasi pelaksanaan Renja Perangkat Daerah, yang bertujuan untuk mengetahui realisasi capaian indikator kinerja dari program, kegiatan dan sub kegiatan, serta realisasi penyerapan dana yang telah direncanakan dalam dokumen RKPD dengan realisasi APBD. Hasil evaluasi ini dijadikan sebagai dasar dalam menentukan kebijakan percepatan pencapaian target kinerja pembangunan sebagaimana telah ditetapkan dalam RPD Tahun 2024-2026 dan RKPD Tahun 2024.

Dalam menilai hasil evaluasi tersebut dikelompokkan berdasarkan rata-rata capaian kinerja dengan menggunakan skala kriteria sebagai berikut :

Tabel 2.1
Skala Nilai Peringkat Kinerja

No	Interval Nilai Realisasi Kinerja	Kriteria Penilaian Realisasi Kinerja
1.	$91\% \leq 100\%$	Sangat Tinggi
2.	$76\% \leq 90\%$	Tinggi
3.	$66\% \leq 75\%$	Sedang
4.	$51\% \leq 65\%$	Rendah
5.	$\leq 50\%$	Sangat Rendah

Dalam penilaian kinerja tersebut, gradasi nilai (skala intensitas) kinerja suatu indikator dapat dimaknai sebagai berikut:

1. Hasil Sangat Tinggi dan Tinggi, artinya pencapaian/realisasi kinerja capaian telah memenuhi target dan berada di atas persyaratan minimal kelulusan penilaian kinerja.
2. Hasil Sedang, artinya pencapaian/realisasi kinerja capaian telah memenuhi persyaratan minimal.
3. Hasil Rendah dan Sangat Rendah, artinya pencapaian/realisasi kinerja capaian belum memenuhi/masih di bawah persyaratan minimal pencapaian kinerja yang diharapkan.

2.1 Capaian Kinerja Triwulan I Tahun 2025

Mengacu kepada Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor: 900.1.1/640/SJ tanggal 11 Februari 2025 tentang Penyesuaian Arah Kebijakan Pembangunan Daerah Melalui Perubahan Rencana Kerja Pemerintah

Daerah dan Perubahan Anggaran dan Pendapatan Daerah Tahun Anggaran 2025, maka untuk penyusunan rancangan Perubahan RKPD digunakan laporan evaluasi hasil pelaksanaan RKPD tahun 2025 sampai dengan triwulan I.

2.1.1 Capaian Indikator Makro Sampai Dengan Triwulan I Tahun 2025

Data-data capaian kinerja makro RKPD tahun 2025 sampai dengan triwulan I tahun 2025 belum dapat disajikan karena belum tersedianya data-data indikator makro sampai dengan triwulan I yang telah dipublikasikan secara resmi oleh lembaga yang berwenang. Oleh karena itu, maka capaian kinerja indikator makro yang dapat disajikan adalah capaian tahun 2024 dan proyeksi capaian indikator makro pada tahun 2025.

Capaian indikator makro Kota Padang Panjang pada tahun 2024 dan target tahun 2025 serta proyeksi capaian indikator makro tahun 2025 dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 2.2
Capaian Kinerja Indikator Makro Kota Padang Panjang
Tahun 2024 dan Target Tahun 2025

No	Indikator Makro	Satuan	Target Tahun 2025		Realisasi Tahun 2024	Proyeksi Ketercapaian
			RPD	RKPD		
1.	Indeks Pembangunan Manusia	Indeks	79,38	80,78	80,60	Tercapai
2.	Tingkat Kemiskinan	%	3,79	4,86	5,31	Dapat Tercapai
3.	Tingkat Pengangguran	%	4,48	4,48	4,94	Dapat Tercapai
4.	Pertumbuhan EKonomi	%	5,60	5,60	4,52	Tidak Tercapai
5.	PDRB ADHK Per Kapita	Rp.Juta	52,56	52,56	50,62	Dapat Tercapai
6.	PDRB ADHB Per Kapita	Rp.Juta	78,06	89,32	80,01	Dapat Tercapai
7.	Gini Rasio	Indeks	0,290	0,269	0,266	Tercapai

Sumber : BPS Kota Padang Panjang, 2024

Berdasarkan tabel di atas, hasil capaian kinerja indikator makro tahun 2024 dapat dijelaskan sebagai berikut :

A. Pertumbuhan Ekonomi

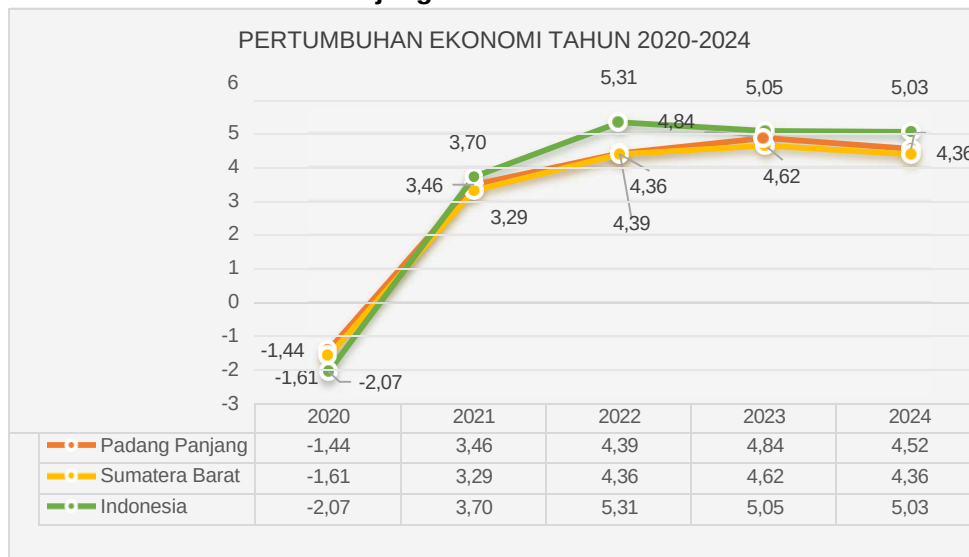
Pertumbuhan ekonomi dapat dilihat dari pertumbuhan PDRB ADHK. Gambaran pertumbuhan ekonomi Kota Padang Panjang, Provinsi Sumatera Barat dan Nasional Tahun 2020-2024 dapat dilihat pada tabel dan gambar berikut:

Tabel 2.3
Pertumbuhan Ekonomi Nasional, Provinsi Sumatera Barat dan Kota Padang Panjang Tahun 2020-2024

No	Uraian	Pertumbuhan Ekonomi (%)				
		2020	2021	2022	2023	2024
1	Nasional	-2,07	3,70	5,31	5,05	5,03
2	Provinsi Sumatera Barat	-1,60	3,29	4,36	4,62	4,36
3	Kota Padang Panjang	-1,44	3,46	4,39	4,84	4,52

Sumber: BPS Provinsi Sumatera Barat, 2025

Gambar 2.1
Pertumbuhan Ekonomi Nasional, Provinsi Sumatera Barat dan Kota Padang Panjang Tahun 2020-2024



Sumber: BPS Provinsi Sumatera Barat, 2025

Berdasarkan tabel dan grafik yang tersedia, dapat dilihat tren pertumbuhan ekonomi di tingkat nasional, Provinsi Sumatera Barat, dan Kota Padang Panjang dari tahun 2020 hingga 2024. Pada tahun 2020, seluruh wilayah mengalami kontraksi ekonomi, dengan pertumbuhan nasional sebesar -2,07%, Sumatera Barat -1,60%, dan Kota Padang Panjang -1,44%. Pada tahun 2021, mulai terjadi pemulihan meskipun masih terbatas. Pertumbuhan ekonomi nasional mencapai 3,70%, sedangkan Sumatera Barat dan Kota Padang Panjang masing-masing mencatat 3,29% dan 3,46%. Pemulihan terus berlanjut pada tahun 2022 dengan pertumbuhan yang lebih kuat: nasional 5,31%, Sumatera Barat 4,36%, dan Kota Padang Panjang 4,39%. Tren positif ini berlanjut pada tahun 2023, di mana pertumbuhan ekonomi nasional mencapai 5,05%, Sumatera Barat 4,62%, dan Kota Padang Panjang 4,84%. Pada tahun 2024, pertumbuhan ekonomi Kota Padang Panjang sedikit menurun menjadi 4,52%. Meskipun angka ini masih lebih tinggi dari rata-rata pertumbuhan Provinsi Sumatera Barat yang sebesar 4,36%, namun masih berada di bawah tingkat pertumbuhan nasional yang mencapai 5,03%. Penurunan pertumbuhan ini antara lain disebabkan oleh meningkatnya angka kemiskinan, dari 5,24% pada tahun 2023 menjadi 5,31% pada tahun 2024. Kenaikan ini berdampak pada menurunnya daya beli masyarakat dan konsumsi domestik, yang merupakan komponen utama dalam pertumbuhan ekonomi. Selain itu, beberapa bencana alam seperti erupsi Gunung Marapi pada Desember 2023 dan banjir bandang pada April dan Mei 2024 turut menyebabkan kerusakan infrastruktur, kawasan lumbung pangan, permukiman, dan sumber penghidupan masyarakat. Dampak dari kejadian tersebut menghambat aktivitas ekonomi dan memperlambat pemulihan ekonomi daerah.

B. Perkembangan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB)

Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) merupakan nilai tambah bruto seluruh barang dan jasa yang tercipta atau dihasilkan di wilayah domestik suatu negara yang timbul akibat berbagai aktifitas ekonomi dalam suatu periode. Pertumbuhan PDRB merupakan indikator untuk mengetahui kondisi perekonomian secara makro, yang meliputi tingkat pertumbuhan ekonomi serta struktur perekonomian suatu wilayah dalam jangka waktu tertentu. Pertumbuhan ekonomi ditunjukkan melalui PDRB atas dasar harga konstan (ADHK), sedangkan struktur ekonomi ditunjukkan melalui PDRB atas dasar harga berlaku (ADHB).

PDRB Kota Padang Panjang atas dasar harga berlaku pada tahun 2024 mengalami pertumbuhan yang signifikan menjadi sebesar 4.756,96 miliar rupiah dari tahun sebelumnya yang hanya mencapai 4.474,08 miliar rupiah. Berdasarkan atas dasar harga konstan tahun 2010, PDRB tahun 2023 dengan nilai 2.879,85 miliar rupiah mengalami kenaikan dengan bertambah sebesar 130,08 miliar rupiah menjadi 3.009,93 miliar rupiah pada 2024 atau dengan kata lain terjadi pertumbuhan sebesar 4,52 persen. Hal ini dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel 2.4
Perkembangan PDRB ADHB dan ADHK Kota Padang Panjang 2020-2024

PDRB	2020	2021	2022	2023	2024
ADHK (Rp. Milyar)	2.543,40	2.631,38	2.746,84	2.879,85	3.009,93
ADHB (Rp. Milyar)	3.473,23	3.651,12	4.086,55	4.474,08	4.756,96
Pertumbuhan Ekonomi (%)	-1,44	3,46	4,39	4,84	4,52

Sumber: BPS Kota Padang Panjang, 2025

Jika dilihat dari sektor lapangan usaha, maka dapat dijelaskan bahwa sektor dari 17 lapangan usaha yang mengalami peningkatan kontribusinya terhadap PDRB adalah Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor, Jasa Keuangan dan Asuransi, Real Estate, Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib, dan Jasa Lainnya, mengalami pertumbuhan pada tahun 2024, yakni masing-masingnya secara detail laju pertumbuhan PDRB ADHK menurut lapangan usaha di Kota Padang Panjang Tahun 2023 - 2024 dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2.5
Perkembangan PDRB ADHB Menurut Lapangan Usaha di Kota Padang Panjang (miliar rupiah) Tahun 2023-2024

No	Lapangan Usaha	Laju Pertumbuhan PDRB ADHB(%)	
		2023	2024
1	A. Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	5,08	4,99
2	B. Pertambangan dan Penggalian	0,26	0,25
3	C. Industri Pengolahan	8,34	8,30
4	D. Pengadaan Listrik dan Gas	0,06	0,06
5	E. Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	0,24	0,24
6	F. Konstruksi	9,67	9,67

No	Lapangan Usaha	Laju Pertumbuhan PDRB ADHB(%)	
		2023	2024
7	G. Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	18,15	18,28
8	H. Transportasi dan Pergudangan	12,20	11,77
9	I. Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	2,82	2,89
10	J. Informasi dan Komunikasi	9,88	9,88
11	K. Jasa Keuangan dan Asuransi	4,26	4,31
12	L. Real Estate	3,61	3,65
13	M, N. Jasa Perusahaan	0,08	0,08
14	O. Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	9,29	9,52
15	P. Jasa Pendidikan	9,59	9,52
16	Q. Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	1,59	1,59
17	R,S,T,U. Jasa Lainnya	4,91	5,10

Sumber: BPS Kota Padang Panjang, 2025

C. Indeks Pembangunan Manusia (IPM)

Keberhasilan pembangunan pada suatu daerah, tidak hanya diukur dari pertumbuhan ekonomi saja, tetapi juga dari segi kualitas manusianya. Secara umum, keberhasilan pembangunan kualitas manusia pada suatu daerah dapat dilihat dari Indeks Pembangunan Manusia (IPM). Pertumbuhan IPM Kota Padang Panjang pada tahun 2024 mengalami kenaikan sebesar 0,84 persen dibandingkan dengan tahun 2023.

Jika dibandingkan IPM Sumatera Barat pada tahun 2024 yang mencapai 75,64, maka capaian IPM Kota Padang Panjang lebih tinggi 4,17 poin dari IPM Provinsi Sumatera Barat. Ini menunjukkan bahwa pergerakan IPM Kota Padang Panjang melebihi kondisi rata-rata IPM Kabupaten/Kota yang ada di Sumatera Barat, dan menduduki peringkat keempat di Sumatera Barat. Perkembangan capaian Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kota Padang Panjang kurun waktu 2020-2024 dapat dilihat pada gambar berikut :

Tabel 2.6
IPM Nasional, Sumatera Barat dan Kota Padang Panjang Tahun 2020-2024

No	IPM	2020	2021	2022	2023	2024
1	Padang Panjang	78,43	78,52	79,28	79,76	80,6
2	Sumatera Barat	74,29	74,56	75,16	75,64	76,43
3	Nasional	72,81	73,16	73,77	74,39	75,02

Sumber: BPS Provinsi Sumatera Barat, 2025

D. Tingkat Pengangguran

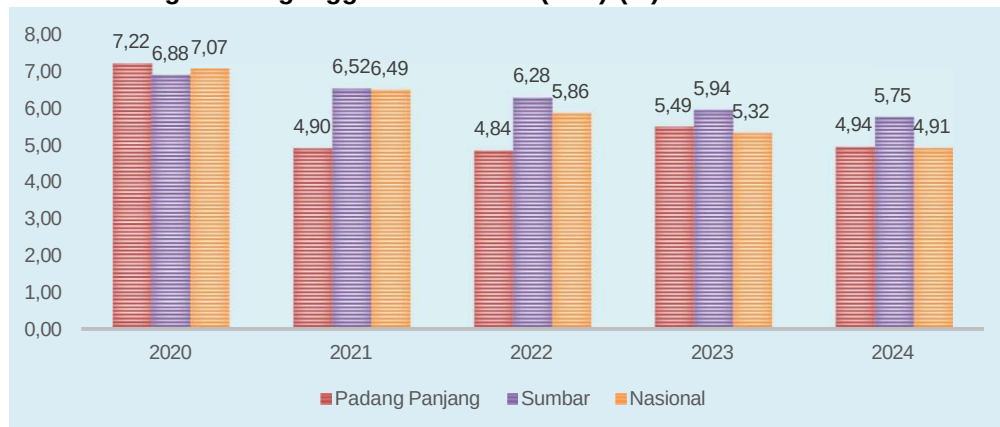
Tingkat pengangguran diukur melalui angka tingkat pengangguran terbuka (TPT). Tahun 2023 tingkat pengangguran di Kota Padang Panjang mengalami kenaikan dari tahun 2022 4,84 persen naik menjadi 5,49. Selanjutnya tahun 2024 mengalami penurunan menjadi 4,94 persen dimana angka cukup jauh dari target yang ditetapkan pada RPD Tahun 2024-2026. Gambaran tingkat pengangguran terbuka di Kota Padang Panjang 2020-2024 dapat dilihat pada tabel dan gambar berikut.

Tabel 2.7
Tingkat Pengangguran di Sumatera Barat dan Kota Padang Panjang Tahun 2020-2024

No	Pengangguran (TPT)	2020	2021	2022	2023	2024
1	Kota Padang Panjang	7,22	4,9	4,84	5,49	4,94
2	Sumatera Barat	6,88	6,52	6,28	5,94	5,75
3	Nasional	7,57	6,49	5,86	5,32	4,91

Sumber: BPS Provinsi Sumatera Barat, 2025

Gambar 2.2
Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) (%) Tahun 2020-2024



Sumber: BPS Provinsi Sumatera Barat, 2025

Berdasarkan tren Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) di Kota Padang Panjang selama periode 2020 - 2024, terdapat dinamika yang menarik pada tahun 2023 dan 2024. Pada tahun 2023, TPT mengalami peningkatan menjadi 5,49% dari 4,84% di tahun sebelumnya. Kenaikan ini bertolak belakang dengan tren provinsi dan nasional yang justru mengalami penurunan. Lonjakan pengangguran di Padang Panjang kemungkinan disebabkan oleh sejumlah faktor, seperti terbatasnya penyerapan tenaga kerja baru, ketidaksesuaian kompetensi pencari kerja dengan kebutuhan pasar, serta dampak dari bencana alam yang terjadi di akhir 2023, yang mempengaruhi sektor-sektor ekonomi utama. Meski demikian, pada tahun 2024 terjadi perbaikan, di mana TPT menurun menjadi 4,94%. Hal ini menunjukkan adanya perbaikan dalam kondisi pasar kerja dan kemungkinan keberhasilan program-program pemulihan ekonomi serta peningkatan kapasitas tenaga kerja lokal.

E. Tingkat Kemiskinan

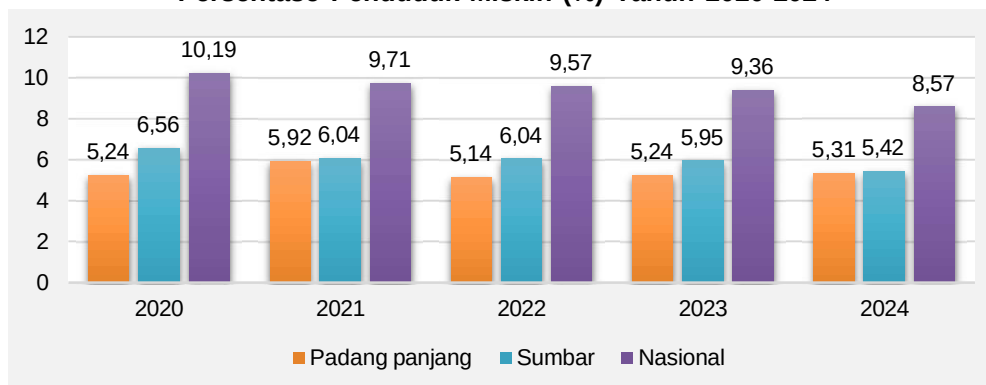
Perkembangan tingkat kemiskinan di Kota Padang Panjang selama tahun 2020-2024 berfluktuatif, dimana pada tahun 2020 dan 2022 mengalami penurunan dari 5,24 persen menjadi 5,14 persen, namun tahun 2023 mengalami kenaikan menjadi 5,24 persen dan naik lagi pada tahun 2024 menjadi 5,31 namun sebagaimana dapat dilihat pada tabel dan gambar berikut ini:

Tabel 2.8
Tingkat Kemiskinan Nasional, Provinsi Sumatera Barat dan Kota Padang Panjang Tahun 2020-2024

NO	KEMISKINAN	2020	2021	2022	2023	2024
1	Kota Padang Panjang	5,24	5,92	5,14	5,24	5,31
2	Sumatera Barat	6,56	6,04	6,04	5,95	5,42
3	Nasional	10,19	9,71	9,57	9,36	8,57

Sumber: BPS Provinsi Sumatera Barat, 2025

Gambar 2.3
Persentase Penduduk Miskin (%) Tahun 2020-2024



Sumber: BPS Provinsi Sumatera Barat, 2025

Jika dilihat dari gambar di atas Tren Capaian Kinerja Penanganan Kemiskinan Kota Padang Panjang berfluktuasi dalam lima tahun terakhir. Capaian persentase Penduduk miskin Kota Padang Panjang Tahun 2024 sebesar 5,31% berada di bawah Provinsi (5,42%) dan Nasional (8,57%).

Kemiskinan di Kota Padang Panjang terjadi penurunan pada 2022, namun kembali meningkat pada 2023 dan 2024. Angka kemiskinan 2024 (5,31%) lebih tinggi dari 2022 (5,14%) hal ini menunjukkan belum pulihnya kondisi sosial ekonomi masyarakat bawah. Kenaikan ini bertolak belakang dengan tren provinsi dan nasional yang terus menurun. Untuk provinsi menunjukkan tren penurunan yang konsisten dari 6,56% (2020) ke 5,42% (2024). hal ini menandakan keberhasilan provinsi dalam menjaga daya beli dan memperkuat jaring pengaman sosial, meskipun perlahan. Begitu juga halnya dengan angka kemiskinan nasional Penurunan konsisten dan signifikan, dari 10,19% (2020) ke 8,57% (2024) ini mencerminkan upaya nasional dalam pemulihan ekonomi, penyaluran bansos, dan pengendalian inflasi cukup efektif secara umum.

Upaya percepatan penanggulangan kemiskinan di Kota Padang Panjang dilakukan melalui kebijakan dan strategi berikut:

- a. Pengurangan beban sosial ekonomi masyarakat miskin yang dilaksanakan melalui sektor yang vital seperti pemenuhan kebutuhan dan akses terhadap pangan, kesehatan dan pendidikan (Pemberian Bantuan Sosial Masyarakat Miskin dan miskin Ekstrem

- b. Mendorong pemutakhiran data untuk mendukung Satu Data Kemiskinan Kota Padang Panjang
- c. Pemberdayaan potensi sosial ekonomi masyarakat miskin yang dilaksanakan melalui sektor lain yang memiliki daya ungkit signifikan seperti peningkatan aktivitas ekonomi kerakyatan didukung dengan pemantapan infrastruktur dasar
- d. Penguatan sinergi dan kemitraan multipihak yang dilaksanakan melalui pelibatan berbagai komponen pembangunan seperti pemerintah, masyarakat, perguruan tinggi, dunia usaha (Corporate Social Responsibility) dalam melaksanakan program penanggulangan kemiskinan.

F. Indeks Gini

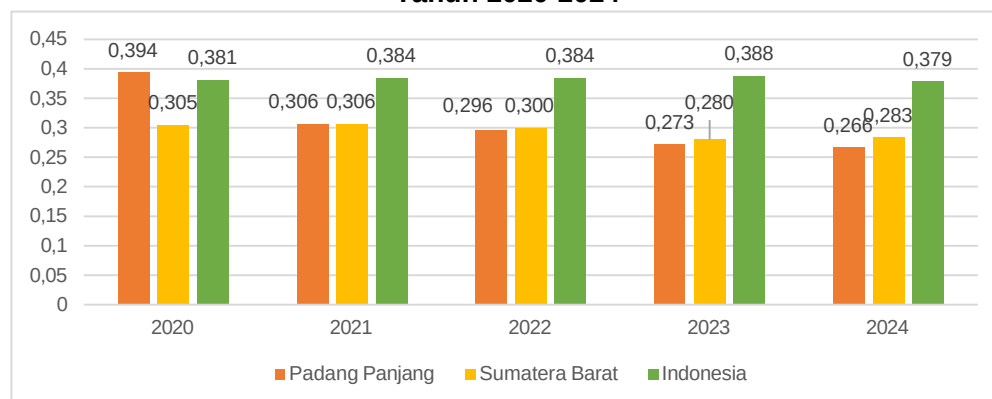
Pada tahun 2020 Indeks Gini Kota Padang Panjang tercatat sebesar 0,394, mengalami penurunan secara bertahap seiring dengan peningkatan pertumbuhan ekonomi, Indeks Gini Kota Padang Panjang pada tahun 2023 turun menjadi 0,273 dan terus membaik menjadi 0,266 di tahun 2024 secara lebih terperinci dapat dilihat sebagaimana tabel dan gambar berikut ini:

Tabel 2.9
Indeks Gini Ratio Nasional, Provinsi Sumatera Barat dan Kota Padang Panjang Tahun 2020-2024

No	Gini Ratio	2020	2021	2022	2023	2024
1	Padang Panjang	0,394	0,306	0,296	0,273	0,266
2	Sumatera Barat	0,305	0,306	0,300	0,280	0,283
3	Indonesia	0,381	0,384	0,384	0,388	0,379

Sumber: BPS Provinsi Sumatera Barat, 2025

Gambar 2.4
Gini Ratio Kota Padang Panjang, Provinsi Sumatera Barat dan Indonesia Tahun 2020-2024



Sumber: BPS Provinsi Sumatera Barat, 2025

Dari Tabel dan grafik di atas dapat kita lihat bahwa gini ratio Kota Padang Panjang mengalami penurunan signifikan dari 0,394 (2020) ke 0,266 (2024). Ini berarti ketimpangan pendapatan semakin membaik dan semakin merata.

Penurunan drastis dari 2020 ke 2021 menunjukkan adanya efektivitas program sosial yang menyasar kelompok bawah, pemulihan ekonomi yang inklusif, kinerja pemerintah kota dalam menjaga keseimbangan distribusi pendapatan. Ada hal yang menarik disini meskipun kemiskinan naik sedikit di 2024, ketimpangan justru menurun artinya bantuan ekonomi atau distribusi pendapatan lebih merata, namun jumlah masyarakat miskin sedikit bertambah.

2.1.2 Capaian Indikator Kinerja Utama Triwulan I Tahun 2025

Indikator Kinerja Utama (IKU) merupakan indikator yang digunakan untuk mengukur pencapaian dari tujuan dan sasaran pembangunan. Capaian kinerja Indikator Kinerja Utama Kota Padang Panjang sampai dengan Triwulan I Tahun 2025 belum dapat disajikan, karena pengukuran kinerja IKU dilakukan pada akhir tahun perencanaan. Oleh karena belum tersedianya data capaian IKU sampai dengan Triwulan I tahun 2025, maka capaian kinerja IKU yang dapat ditampilkan adalah capaian pada tahun 2024 dan proyeksi capaian IKU pada Triwulan I tahun 2025.

Tabel 2.10
Target Indikator Kinerja Utama Kota Padang Panjang Tahun 2025 dan
Capaian Tahun 2024

No	Indikator Kinerja Utama	Target Tahun 2025		Capaian Tahun 2024	Proyeksi Ketercapaian
		RPD	RKPD		
I.	Indeks Pembangunan Manusia	79,38	80,78	80,60	Tercapai
1	Rata-rata Lama Sekolah	11,96	12,14	12	Tercapai
2	Harapan Lama Sekolah	15,10	15,42	15,47	Tercapai
3	Umur Harapan Hidup	73,05	74,64	74,48	Tercapai
4	Prevelansi Stunting	12,60	12,60	9,49	Tercapai
5	Indeks Pemberdayaan Gender	73,05	73,05	na	Tercapai
6	Predikat Kota Layak Anak	Utama	Utama	Utama	Tercapai
7	Status Kota Layak Pemuda	Menuju Pratama	Menuju Pratama	Menuju Pratama	Tercapai
8	Rasio Daya Saing Keolahragaan	0,25	0,25	0,5	Tercapai
II.	Indeks Reformasi Birokrasi (IRB)	63,00	70,10 (BB)	77,66	Tercapai
9	Nilai SAKIP	64,86	64,86 (B)	64,22 (B)	Tercapai
10	Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah	71,50	71,5	63,2	Tercapai

No	Indikator Kinerja Utama	Target Tahun 2025		Capaian Tahun 2024	Proyeksi Ketercapaian
		RPD	RKPD		
11	Nilai Sistem Merit	Sangat Baik (335)	Sangat Baik (335)	-	
12	Maturitas SPIP	3 (3,2)	3 (3,2)	3 (3,000)	Tercapai
13	Nilai penyelenggaraan pelayanan publik	93	93	94,46 (Tertinggi)	Tercapai
14	Indeks SPBE	2,85	3,10	3,16	Tercapai
III	Laju Pertumbuhan Ekonomi	5,60	5,60	4,52	Perlu perhatian khusus
	Gini Rasio	0,290	0,269	0,266	Tercapai
15	LPE sektor Perdagangan	6,90	6,90	3,98	Perlu perhatian khusus
16	LPE sektor pertanian	5,69	5,69	0,15	Perlu perhatian khusus
17	LPE sektor akomodasi makan dan minum	11,19	11,19	7,45	Perlu perhatian khusus
18	Persentase pertumbuhan nilai investasi	6,0	6,0	38,6	Tercapai
19	Tingkat Kemiskinan	3,79	4,86	5,31	Perlu perhatian khusus
20	Tingkat Pengangguran Terbuka	4,48	4,52	4,94	Tercapai
21	Pengeluaran perkapita	11.378	12,010	11,840	Tercapai
IV.	Indeks Rasa Aman	Aman (89,09)	Aman (92,57)	79,29	Perlu perhatian khusus
22	Persentase Pemajuan Kebudayaan	74	78	66,16	Perlu perhatian khusus
23	Persentase masjid yang aktif melaksanakan aktifitas keagamaan	90	100	71,42	Perlu perhatian khusus
24	Persentase penyelesaian pelanggaran ketertiban umum	100	100	100	Tercapai
25	Angka PPKS	4,49	4,49	3,69	Tercapai
V	Indeks Kualitas Layanan Infrastruktur (IKLI)	91,56	92,9	95,5	Tercapai
	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)	66,88	74,71	62.62	Perlu perhatian khusus

No	Indikator Kinerja Utama	Target Tahun 2025		Capaian Tahun 2024	Proyeksi Ketercapaian
		RPD	RKPD		
26	IKLI kePUan	90,26	98	96,71	Tercapai
27	IKLI Perkim	96,92	100	94,56	Tercapai
28	IKLI Perhubungan	96,83	98	95,22	Tercapai
29	Persentase kesesuaian pemanfaatan ruang	83,50	83,50	83	Tercapai
30	Indeks Kualitas Air	46,50	48,5	34,65	Perlu perhatian khusus
31	Indeks Kualitas Udara	90,10	92	89,08	Tercapai
32	Indeks Kualitas Tutupan Lahan	57,50	63	61,7	Tercapai

Dari capaian tahun 2024, terdapat beberapa indikator kinerja utama yang tidak dapat mencapai target dan ada yang belum dirilis oleh kementerian/lembga berwenang, yaitu :

1. Indikator Indeks Pemberdayaan Gender belum dirilis oleh Kementerian terkait. Sehingga tidak dapat diukur pencapaian kinerjanya.
2. Nilai Sistem Merit Kota Padang Panjang Tahun 2024 belum dikeluarkan oleh Lembaga terkait. Hal ini sebagai dampak kebijakan pemerintah pusat yang tertuang dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara (UU ASN), yang mengatur pembubaran Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN). Fungsi dan tugas KASN kemudian dialihkan ke Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kementerian PANRB) serta Badan Kepegawaian Negara (BKN), sebagaimana diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 91 Tahun 2024 dan Peraturan Presiden Nomor 92 Tahun 2024. Dengan kebijakan tersebut, hingga saat ini belum ada nilai Sistem Merit Pemerintah Kota Padang Panjang yang dirilis oleh Lembaga terkait.
3. Pencapaian Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah (IPKD) tidak berhasil mencapai target dikarenakan berdasarkan 6 dimensi yang menjadi penilaian terhadap Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah, masih ada dimensi yang capaiannya berada di bawah target, yaitu dimensi 1 (Dimensi kesesuaian Dokumen Perencanaan dan Penganggaran), dimana poin penting penilaian adalah kesesuaian nomenklatur dan penganggaran dari RPJMD sampai menjadi APBD, dan dimensi 4 yang mengukur serapan anggaran terhadap APBD yang telah dianggarkan dengan realisasi yang wajib di atas 80%.
4. Indikator Maturitas SPIP secara level sebenarnya telah mencapai target, yaitu Level 3, akan tetapi dari hasil simpulan entitas, skor penilaian mandiri

kapabilitas APIP adalah 3,000. Skor ini diperoleh dari penilaian atas 6 elemen kapabilitas APIP yang telah terimplementasikan secara baik dan terus menerus.

5. Laju pertumbuhan ekonomi tahun 2024 sebesar 4,52% dengan tingkat capaian kinerja tahun 2024 sebesar 86,92% dari target 5,20%. Capaian tahun 2024 ini turun dari tahun 2023 yang mencapai 4,84%.
6. Laju pertumbuhan ekonomi sektor perdagangan tahun 2024 sebesar 3,98% dengan tingkat capaian kinerja sebesar 76,39% dari target 5,21%. Capaian tahun 2024 ini menurun dari tahun sebelumnya yang mencapai 4,29%.
7. Laju pertumbuhan sektor pertanian pada tahun 2024 sebesar 0,15% dengan tingkat capaian kinerja sebesar 2,98% dari target 5,03%. Capaian tahun 2024 ini turun dibandingkan dengan capaian tahun 2023 yang mencapai angka 1,87%. Faktor Bencana alam banjir aliran lahar dingin erupsi gunung marapi dan serangan hama tikus ini ditengarai menjadi faktor utama yang menyebabkan melambatnya LPE Sektor Pertanian di Kota Padang Panjang. Bencana ini mengakibatkan kerusakan lahan produksi sebanyak lebih kurang 21 hektar lahan sepanjang aliran sungai yang berlokasi di kelurahan Ganting, Sigando, Ekor Lubuk, Koto Katik, Guguk Malintang, Pasar Usang dan Silaing Bawah.
8. Belum tercapainya Laju Pertumbuhan Ekonomi Sektor Perdagangan dan sektor akomodasi dan makan minum tahun 2024 sesuai target merupakan dampak negatif dari bencana alam lahar dingin akibat erupsi Gunung Marapi yang terjadi pada 11 Mei 2024. Bencana ini menyebabkan terputusnya akses jalan nasional yang menghubungkan Padang dan Bukittinggi, serta jalan kota yang menghubungkan Padang Panjang dengan daerah sekitarnya. Akibatnya, terjadi hambatan dalam rantai pasok distribusi barang dan pangan, penurunan jumlah kunjungan wisatawan, serta terganggunya aktivitas perdagangan, bahkan banyak usaha yang terpaksa tutup
9. Tingkat kemiskinan Kota Padang Panjang tahun 2024 sebesar 5,31% mengalami kenaikan dibandingkan dengan tahun 2023 yang mencapai angka 5,24%, dengan tingkat capaian kinerja sebesar 87,38%.

Faktor penghambat keberhasilan penanganan kemiskinan di Kota Padang Panjang antara lain adalah perilaku dan mentalitas penduduk miskin yang kurang mendukung kemandirian ekonomi, seperti rendahnya motivasi kerja, kecenderungan memilih-milih pekerjaan, serta sikap pasif yang lebih mengandalkan bantuan dibandingkan usaha sendiri. Selain itu minimnya lapangan usaha juga berkontribusi pada rendahnya serapan tenaga kerja. Hal ini menyebabkan keterbatasan pilihan pekerjaan bagi masyarakat miskin.

Masih belum optimalnya koordinasi dan integrasi program penanggulangan kemiskinan, mulai dari pendataan sasaran, penetapan penerima bantuan, realisasi program, hingga kesinambungan dan keterpaduan sektor-sektor terkait seperti pendidikan, kesehatan, ketenagakerjaan, dan perumahan.

10. Tingkat pengangguran terbuka Kota Padang Panjang tahun 2024 sebesar 4,94%, turun jika dibandingkan dengan tahun 2023, akan tetapi tidak berhasil mencapai target 4,64% dengan tingkat capaian kinerja tahun 2024 sebesar 97,17%.

Tidak tercapainya target tingkat pengangguran terbuka ini antara lain disebabkan oleh meingkatnya jumlah penduduk usia kerja, ketidaksesuaian antara keahlian yang dimiliki pencari kerja dengan yang dibutuhkan dunia usaha, minimnya pengalaman kerja bagi lulusan baru atau fresh graduate, sertanya kurangnya investasi dan lapangan kerja baru untuk menampung angkatan kerja yang terus bertambah.

11. Indeks Rasa Aman, dengan realisasi 79,29, belum mencapai target 86,80 (Aman) dengan tingkat capaian sebesar 91,35%. Indikator Rasa Aman ini diukur dari 4 dimensi, yaitu Persentase Pemajuan Budaya (30%), Persentase masjid yang Aktif Melaksanakan Aktivitas Keagamaan (35%), Persentase Penyelesaian Pelanggaran Ketentraman dan Ketertiban Umum (20%) dan Angka Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) (15%). Tidak tercapainya target dari 2 dimensi, yaitu Persentase Pemajuan Budaya dan Persentase masjid yang Aktif Melaksanakan Aktivitas Keagamaan, sehingga mengurangi nilai dari Indeks Rasa Aman.
12. Persentase pemajuan kebudayaan pada tahun 2024 adalah 66,16 dari target yang telah ditetapkan 71.00 sehingga capaian kinerjanya 93.18%. Tidak tercapainya target tahun 2024 ini disebabkan karena dari 6 langkah pengelolaan pemajuan kebudayaan yang dilakukan, masih terdapat 3 langkah pengelolaan yang belum optimal pelaksanaannya, yakni langkah internalisasi, dokumentasi dan literasi. Pada langkah internalisasi yang merupakan upaya menanamkan nilai budaya sehingga menjadi kesadaran dan keyakinan yang diwujudkan dalam sikap perilaku, masih belum secara menyeluruh tertanam di dalam masyarakat. Pada langkah dokumentasi yang merupakan pencatatan informasi secara sistematis tentang objek pemajuan kebudayaan, sehingga dengan adanya dokumentasi tersebut dapat teridentifikasi objek pemajuan kebudayaan yang ada di Kota Padang Panjang.
13. Persentase masjid yang aktif melaksanakan aktivitas keagamaan mencapai 71,42% tidak berhasil mencapai target 85%, dengan tingkat capaian kinerja sebesar 84,02%. Salah satu penyebab tidak tercapainya target ini disebabkan antara lain masih belum semua masjid aktif melakukan kegiatan wirid remaja.

Dari 49 masjid terdapat 17 masjid yang aktif melaksanakan kegiatan wirid remaja. Belum maksimalnya kegiatan remaja masjid ini dipengaruhi oleh beberapa hal diantaranya masih rendahnya animo para remaja serta keterbatasan anggaran.

14. Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) tidak berhasil mencapai target dengan tingkat capaian kinerja tahun 2024 sebesar 84,39%. Hal ini disebabkan karena 2 variabel penilaian IKLH yaitu Indeks Kualitas Air, dan Tutupan Lahan, tidak mencapai target yang ditetapkan sehingga berpengaruh kepada nilai IKLH, terutama pada nilai Indeks Kualitas Air.
15. IKLI KePUan tidak berhasil mencapai target dengan tingkat capaian kinerja tahun 2024 sebesar 99,90%. Meskipun 13 unsur penilaian IKLI KePUan mendapatkan penilaian sangat baik, akan tetapi masih ada 3 unsur yang memiliki nilai paling rendah dibandingkan unsur-unsur lainnya, yang memerlukan peningkatan di masa mendatang yaitu kesesuaian pemanfaatan jalan arteri/beraspal, kenyamanan penggunaan trotoar di sepanjang jalan, dan ketersediaan trotoar jalan bagi penyandang disabilitas.
16. IKLI Perkim tahun 2024 tidak mencapai target dengan tingkat capaian kinerja sebesar 95,94%. Dari 17 unsur pelayanan yang dinilai, sebanyak 16 unsur mendapatkan penilaian sangat baik, dan 1 unsur mendapatkan penilaian baik, yaitu unsur ketersediaan sarana pada ruang hijau publik bagi penyandang disabilitas.
17. IKLI Perhubungan tidak mencapai target tahun 2024 dengan tingkat capaian kinerja sebesar 97,16%. Dari 21 unsur yang dinilai, sebanyak 19 unsur mendapatkan nilai sangat baik dan 2 unsur mendapatkan nilai baik, yaitu unsur keberadaan petugas Dishub dalam membantu masyarakat pada jam padat aktivitas publik dan kepedulian petugas Dishub di area padat aktivitas publik.
18. Indeks Kualitas Air tidak mencapai target tahun 2024 dengan tingkat capaian kinerja tahun 2024 sebesar 47,81%. Hal ini antara lain disebabkan karena secara geografis seluruh ruas sungai yang berada di Kota Padang Panjang merupakan rentang sungai yang berada pada Kabupaten Tanah Datar, sehingga permasalahan di hulu sungai Kota Padang Panjang, masih rendahnya kesadaran masyarakat yang menyebabkan pencemaran air seperti masih banyaknya masyarakat yang langsung membuang limbah domestik khususnya limbah tinja ke sungai sehingga menyebabkan tingginya angka parameter e coli hampir di semua sungai di Kota Padang Panjang, dan terjadinya bencana erupsi gunung merapi dan banjir bandang yang melintasi sungai yang berada di Kota Padang Panjang.

Indeks Kualitas Tutupan Lahan tidak mencapai target tahun 2024 dengan tingkat capaian kinerja sebesar 88,84%. Hal ini disebabkan karena pada Tahun 2024 terjadi penambahan delineasi pada beberapa kategori RTH sesuai dg kategori yg tercantum pada Permenlhk No. 27 Tahun 2021 ttg IKLH, yang dilakukan dengan mematuhi batasan tajuk yg terlihat pada program pemroses data, sehingga menurunkan nilai dari Indeks Kualitas Tutupan Lahan Kota Padang Panjang.

2.1.3 Capaian Kinerja Indikator Kinerja Daerah Sampai Dengan Triwulan I Tahun 2025

Capaian kinerja indikator daerah sampai dengan triwulan I tahun 2025 belum dapat disajikan karena pengukuran indikator kinerja daerah dilakukan pada akhir tahun dan sebagian data indikator daerah merupakan data yang dipublikasikan oleh lembaga yang berwenang seperti BPS dan Kementerian/Lembaga pusat. Oleh sebab itu, data yang dapat disajikan adalah data capaian tahun 2024 sebagaimana terlihat pada tabel berikut ini.

Tabel 2.11
Target Indikator Kinerja Daerah (IKD) Kota Padang Panjang Tahun 2025 dan Realisasi Tahun 2024

No	Indikator Kinerja Utama	Target Tahun 2025		Capaian Tahun 2024	Proyeksi Ketercapaian
		RPD	RKPD		
A	URUSAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR				
I	PENDIDIKAN				
1	Tingkat partisipasi warga negara usia 5-6 tahun yang berpartisipasi dalam PAUD	%	80,539	80,539	80,539
2	Tingkat partisipasi warga negara usia 7-12 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan dasar pertama	%	104,782	104,782	104,782
3	Tingkat partisipasi warga negara usia 13-15 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan menengah	%	154,838	154,838	154,838
4	Tingkat partisipasi warga negara usia 7-18 tahun yang belum menyelesaikan pendidikan dasar dan menengah yang berpartisipasi dalam pendidikan kesetaraan	%	100	100	100
5	Angka Partisipasi Sekolah PAUD	%	99,7	99,7	99,7
6	Harapan lama sekolah	Tahun	15,11	15,11	15,47
7	Rata-rata lama sekolah	Tahun	11,96	11,96	12
8	Angka Kesiapan Sekolah (AKS) PAUD	%	61	61	62,95
9	Angka Partisipasi Sekolah (APS) SD sederajat	%	99,7	99,7	99,05
10	Angka Partisipasi Sekolah (APS) SMP sederajat	%	97,5	99,73	98,53
11	APK PAUD (3-6 tahun)	%	49	49	42,28
12	APK SD sederajat	%	106,1	106,1	105,5
13	APK SMP sederajat	%	107	107	109,31

No	Indikator Kinerja Utama	Target Tahun 2025		Capaian Tahun 2024	Proyeksi Ketercapaian
		RPD	RKPD		
14	Keamanan, kebhinekaan dan inklusifitas SD sederhana	%	2,41/2,28/2,3	75 / 75 / 60	76.37 / 75.38 / 60.71
15	Keamanan, kebhinekaan dan inklusifitas SMP sederhana	%	2,50/2,42/2,09	73 / 73 / 60	73.15 / 74.71 / 60.82
II	KESEHATAN				
1	Rasio daya tampung RS terhadap Jumlah Penduduk	%	3,031	3,031	2,81
2	Persentase RS Rujukan Tingkat kabupaten/kota yang terakreditasi	%	100	100	100
3	Persentase ibu hamil mendapatkan pelayanan kesehatan ibu hamil	%	85,311	100	100
4	Persentase ibu bersalin mendapatkan pelayanan persalinan	%	84,916	100	100
5	Persentase bayi baru lahir mendapatkan pelayanan kesehatan bayi baru lahir	%	86,651	100	100
6	Cakupan pelayanan kesehatan balita sesuai standar	%	78,154	100	100,00
7	Persentase anak usia pendidikan dasar yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	%	83,598	100	142,42
8	Persentase orang usia 15-29 tahun mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar	%	67,323	67,323	118,57
9	Persentase warga negara usia 60 tahun ke atas mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar	%	94,756	100	100
10	Persentase penderita hipertensi yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	%	100	100	100
11	Persentase penderita DM yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	%	100	100	108,71
12	Persentase ODGJ berat yang mendapatkan pelayanan kesehatan jiwa sesuai standar	%	100	100	108,59
13	Persentase orang terduga TBC mendapatkan pelayanan TBC sesuai standar	%	100	100	116,00
14	Persentase orang dengan resiko terinfeksi HIV mendapatkan pelayanan deteksi dini HIV sesuai standar	%	88,071	100	127,53
15	Prevalensi Stunting	%	10,03	10,03	10,57
16	Literasi dan Numerasi SD sederhana	%	2,04 dan 1,74	92 / 73	89.34 dan 78.57
17	Literasi dan Numerasi SMP sederhana	%	2,25 dan 1,89	73 / 60	91.09 dan 86.45
18	Persentase objek pemajuan kebudayaan	%	59	78	53,25
19	Persentase cagar budaya yang dilestarikan	%	55	100	50
20	Persentase kelompok seni/komunitas budaya yang diberdayakan	%	60	60	54
21	Persentase pelestarian kebudayaan berbasis nagari	%	65	65	60

No	Indikator Kinerja Utama	Target Tahun 2025		Capaian Tahun 2024	Proyeksi Ketercapaian
		RPD	RKPD		
22	Persentase warisan budaya yang dilestarikan	%	55	55	49
23	Rasio guru/ murid sekolah pendidikan dasar	%	18,89	18,89	
24	Rasio guru terhadap murid pendidikan menengah	%	12,72	12,72	
25	Persentase upaya kesehatan bersumber masyarakat yang aktif	%	98.125	98.125	100%
26	Rasio puskesmas, poliklinik, pustu persatuan penduduk	%	0,27	0,27	0,23
27	Rasio dokter persatuan penduduk	%	0,84	0,84	0,25
28	Rasio tenaga medis per satuan penduduk	%	1,47	1,47	1,12
29	Indek Keluarga Sehat	indek	0,49	0,49	0,46
III	PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG				
1	Rasio luas daerah irigasi kewenangan kabupaten/kota yang dilayani oleh jaringan irigasi	%	48,311	48,311	58,36
2	Persentase jumlah rumah tangga yang mendapatkan akses terhadap air minum melalui SPAM jaringan perpipaan dan bukan jaringan perpipaan terlindungi terhadap rumah tangga di seluruh kabupaten/kota	%	87,15	87,15	100
3	Persentase jumlah rumah tangga yang memperoleh layanan pengolahan air limbah domestik	%	91	91	99,1
4	Rasio kepatuhan IMB kab/ kota	Rasio	46,39	46,39	46,8
5	Tingkat Kemantapan Jalan kabupaten/kota	%	93,3	93,3	89,34
6	Rasio tenaga operator/teknisi/analisis yang memiliki sertifikat kompetensi	Rasio	66	66	61
7	Rasio proyek yang menjadi kewenangan pengawasannya tanpa kecelakaan konstruksi	Rasio	100	100	100
8	IKLI KePUan	Indeks	90,63	90,63	96,71
9	Persentase kesesuaian tata ruang	%	83,5	83,5	83
10	Persentase Sarana Infrastruktur Dasar Perkotaan dalam Kondisi Baik	%	74,35	74,35	78,96
11	Indeks Penilaian Pemanfaatan Ruang	%	3	3	3
12	Persentase sertifikat aset tanah dan bangunan pemko	%	85	85	
13	Persentase trotoar dalam kondisi baik	%	83,40	83,40	100
14	Persentase Tenaga Konstruksi Yang Bersertifikat	%	81,40	100,00	61
15	Persentase drainase dalam kondisi baik	%	92	100	93,19
16	Persentase rumah tinggal bersanitasi	%	90,70	90,70	99,10
17	Persentase irigasi Kota dalam kondisi baik	%	79	79	81,31

No	Indikator Kinerja Utama	Target Tahun 2025		Capaian Tahun 2024	Proyeksi Ketercapaian
		RPD	RKPD		
18	Luas kawasan kumuh	%	5,25	1	2,14
IV	PERUMAHAN RAKYAT				
1	Persentase kawasan permukiman kumuh di bawah 10 ha di kab/ kota yang ditangani	%	95,74	95,74	95,52
2	Berkurangnya jumlah unit RTLH (Rumah Tidak Layak Huni)	%	2,74	4	7,75
3	Jumlah perumahan yang sudah dilengkapi PSU (Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum)	%	100	100	79,31
4	IKLI Perkim	Indeks	96,92	96,92	94,56
5	Persentase permukiman layak huni	%	99,52	99,52	99,48
6	Persentase Rumah korban bencana atau relokasi program pemerintah yang tertangani	%	100	100	100
V	KETENTRAMAN, KETERTIBAN UMUM DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT				
1	Persentase Gangguan Trantibum yang dapat diselesaikan	%	100	100	100
2	Persentase Perda dan Perkada yang ditegakkan	%	85	85	100
3	Jumlah warga negara yang memperoleh layanan informasi rawan bencana	%	100	100	100
4	Persentase pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran	%	100	100	100
5	Tingkat Waktu Tanggap (Respon Time Rate) daerah layanan WMK	%	100	100	100
6	Waktu tanggap (response time) penanganan kebakaran	Menit	2 menit	15 menit	4 menit
7	Tingkat penyelesaian pelanggaran ketentraman dan ketertiban umum	%	100	100	100
8	Persentase Penegakan PERDA	%	100	100	100
9	Jumlah warga negara yang memperoleh layanan informasi rawan bencana	%	100	100	100
10	Jumlah warga negara yang memperoleh layanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana	%	100	100	100
11	Persentase penanganan bencana yang tertangani sesuai SOP-	%	100	100	100
12	Respon time tanggap darurat	Menit	9 menit	9 menit	4 menit
VI	SOSIAL				
1	Persentase (%) penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gelandangan pengemis yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di luar panti (Indikator SPM)	%	92,71	100	100
2	Persentase korban bencana alam dan sosial yang terpenuhi kebutuhan dasarnya pada saat dan setelah tanggap darurat	%	100	100	100

No	Indikator Kinerja Utama	Target Tahun 2025		Capaian Tahun 2024	Proyeksi Ketercapaian
		RPD	RKPD		
	bencana daerah kabupaten/kota				
3	Angka PPKS	%	5,06	4	3,69
4	Persentase lembaga sosial yang aktif	%	100	100	100
5	Persentase PPKS yang tertangani	%	82,5	100	97
6	Persentasi sumber kesejahteraan sosial dan kelembagaan sosial yang aktif	%	80	100	100
B	URUSAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR				
VII	TENAGA KERJA				
1	Persentase kegiatan yang dilaksanakan yang mengacu ke rencana tenaga kerja	%	100	100	100
2	Persentase Tenaga Kerja yang ditempatkan (dalam dan luar negeri)	%	0,08	0,08	0,02
3	Tingkat Produktivitas Tenaga Kerja	%	14,78	14,78	12,56
4	Persentase Perusahaan yang menerapkan tata kelola kerja yang layak (PP/PKB, LKS Bipartit, Struktur Skala Upah, dan terdaftar peserta BPJS Ketenagakerjaan).	%	58,44	58,44	75
5	Persentase Tenaga kerja yang ditempatkan (dalam dan luar negeri) melalui mekanisme layanan Antar Kerja dalam wilayah	%	33,11	33,11	47,6
6	Tingkat Pengangguran	%	4,61	4,61	4,94
7	Persentase Peningkatan Partisipasi Angkatan Kerja	%	64,07	66,02	66,33
8	Persentase Peningkatan Kepesertaan BPJS Tenaga Kerja Sektor Informal Bukan Penerima Upah yang Masuk Kategori Miskin	%	2,78	2,78	1,27
VIII	PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK				
1	Persentase ARG pada belanja langsung APBD	%	8,752	8,752	4,83
2	Persentase anak korban kekerasan yang ditangani instansi terkait kabupaten	%	100	100	100
3	Rasio kekerasan terhadap perempuan, termasuk TPPO (per 100.000 penduduk perempuan)	%	26,173	26,173	31,54
4	IDG	Indeks	73,05	73,05	67,58
5	Predikat KLA	Predikat	Utama	Utama	Utama
6	Proporsi kursi yang diduduki perempuan di DPRD	%	20	20	20
IX	PANGAN				
1	Persentase ketersediaan pangan (Tersedianya cadangan beras/ jagung sesuai kebutuhan)	%	33.478	33.478	27,00
2	LPE Sektor Pertanian	%	5,69	5,69	0,15
3	Skor Pola Pangan Harapan (PPH)	indeks	86,2	86,2	86,18
4	Ketersediaan pangan untuk dikonsumsi penduduk	Kkal/kapita/hari	2400	2400	2844,17
X	PERTANAHAN				

No	Indikator Kinerja Utama	Target Tahun 2025		Capaian Tahun 2024	Proyeksi Ketercapaian
		RPD	RKPD		
1	Persentase sertifikat aset tanah dan bangunan pemko	%	85	85	
XI	LINGKUNGAN HIDUP				
1	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) Kab/Kota	%	66,57	66,57	62,62
2	Indeks kualitas air	Indeks	46,5	46,5	34,65
3	Indeks kualitas tutupan lahan	Indeks	57,50	57,50	61,7
4	Indeks kualitas udara	Indeks	90,10	90,10	89,08
5	Terlaksananya pengelolaan sampah di wilayah Kab/Kota	%	98	98	99,19
6	Ketaatan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan terhadap izin lingkungan, izin PPLH dan PUU LH yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kab/Kota	%	60	60	55,17
7	Persentase upaya pengelolaan lingkungan hidup yang dilakukan	%	90	90	85
8	Persentase luas RTH Publik	%	4,23	4,23	4,19
9	Persentase pengelolaan sampah	%	98	98	99,19
10	Persentase ketaatan pelaku usaha/kegiatan yang memiliki persetujuan lingkungan terhadap dokumen persetujuan lingkungan	%	55	55	55,17
XII	ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL				
1	Perekaman KTP elektronik	%	97,85	97,85	99,50
2	Persentase anak usia 01-7 tahun kurang 1 (satu) hari yang memiliki KIA	%	98,64	98,64	99,18
3	Kepemilikan akta kelahiran	%	100	100	101,65
4	Jumlah OPD yang telah memanfaatkan data kependudukan berdasarkan perjanjian kerja sama	%	95,83	95,83	100,00
XIII	PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA				
1	Kinerja Lalu Lintas (V/C Ratio)	angka	0,339	0,339	0,39
2	Rasio Konektivitas Kota	%	38,84	38,84	77,77
3	Indeks Kualitas Layanan Infrastruktur Perhubungan	angka	96,83	96,83	95,52
4	Indeks Pembangunan Keluarga	Indeks	58,5	58,5	66,46
5	Persentase pasangan usia subur yang mendapatkan fasilitas dan pembinaan 1000 HP Kehidupan	%	72,5	72,5	74
6	Rata rata jumlah anak perkeluarga	orang	2,3	2,3	1,52
7	Ratio akseptor KB	%	58,5	70	63,38
XIII	PERHUBUNGAN				
1	Kinerja Lalu Lintas (V/C Ratio)	angka	0,339	0,339	0,39
2	Rasio Konektivitas Kota	%	38,84	38,84	77,77
3	Indeks Kualitas Layanan Infrastruktur Perhubungan	angka	96,83	96,83	95,52
XIV	KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA				
1	Persentase Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang terhubung dengan	%	100	100	100

No	Indikator Kinerja Utama	Target Tahun 2025		Capaian Tahun 2024	Proyeksi Ketercapaian
		RPD	RKPD		
	akses internet yang disediakan oleh Dinas Kominfo				
2	Persentase Layanan Publik yang diselenggarakan secara online dan terintegrasi	%	60,05	60,05	78,6
3	Persentase masyarakat yang menjadi sasaran penyebaran informasi publik, mengetahui kebijakan dan program prioritas pemerintah dan pemerintah daerah kabupaten/kota	%	44,5	44,5	99,80%
4	Indeks domain layanan SPBE	indeks	2,90	3,4	3,82
5	Indeks Sistim Pemerintahan Berbasis Elektronik	indeks	3,10	3	3,16
6	Informasi tentang sumber daya yang tersedia untuk pelayanan (Information on resources available to frontline service delivery units)	%	89,42	89,42	na
7	Akses publik terhadap informasi keuangan daerah (Public access to fiscal information)	%	100	100	na
XV	KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH				
1	Meningkatnya Koperasi yang berkualitas	%	78,07	78,07	75,55
2	Meningkatnya Usaha Mikro yang menjadi wirasausaha	%	1,25	1,25	6,38
3	Persentase koperasi aktif	%	75,81	100	73,77
4	Persentase Peningkatan Koperasi sehat	%	0,27	0,27	0,36
5	jumlah koperasi yang memiliki usaha / jumlah koperasi yang ada	%	26,31	26,31	24
6	Persentase peningkatan omset usaha	%	0,15	0,15	0,1
7	Persentase UMKM yang di fasilitasi bantuan usaha	%	0,15	0,15	0,1
8	Persentase koefisien variasi harga antar waktu barang kebutuhan pokok	%	8,8 %	8,8 %	9
9	Persentase IKM yang Dapat Meningkatkan Akses Pemasaran Produknya melalui digital	%	0,2	0,2	0,15
XVI	PENANAMAN MODAL				
1	Persentase Kenaikan Investasi	%	6	8	38,6
2	Jumlah investor berskala nasional (PMDN/PMA)	investor	24	60	24
3	Nilai Penyelenggaraan Pelayanan Publik	nilai	93	93	90
4	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	%	96,88	96,88	97,9
XVII	KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA				
1	Tingkat partisipasi pemuda dalam kegiatan ekonomi mandiri	%	0,18	0,7	0,67
2	Tingkat partisipasi pemuda dalam organisasi	%	0,81	0,81	0,56

No	Indikator Kinerja Utama	Target Tahun 2025		Capaian Tahun 2024	Proyeksi Ketercapaian
		RPD	RKPD		
	kepemudaan dan organisasi sosial kemasyarakatan				
3	Rasio daya saing keolahragaan	rasio	0,25	0,25	0,5
4	Jumlah atlit berprestasi tingkat nasional/provinsi	Prestasi	3 prestasi nasional 50 prestasi provinsi	3 prestasi nasional 50 prestasi provinsi	9 prestasi nasional 33 prestasi provinsi
5	Jumlah pemuda berprestasi tingkat nasional/provinsi	Prestasi	2 prestasi nasional 4 prestasi provinsi	2 prestasi nasional 4 prestasi provinsi	0 prestasi nasional 0 prestasi provinsi
6	Status Padang Panjang sebagai Kota Layak Pemuda	Tingkatan	Menuju pratama	Menuju pratama	Menuju pratama
XVIII	STATISTIK				
1	Persentase Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang menggunakan data statistik dalam menyusun perencanaan pembangunan daerah	%	100	100	100
2	Persentase OPD yang menggunakan data statistik dalam melakukan evaluasi pembangunan daerah	%	100	100	100
3	Indeks Pembangunan Statistik	Indeks	3,00	3,00	1,94
XIX	PERSANDIAN				
1	Tingkat keamanan informasi pemerintah	%	77,52	77,52	34
XX	KEBUDAYAAN				
1	Terlestarikannya Cagar Budaya	%	78,59	100	
XXI	PERPUSTAKAAN				
1	Nilai tingkat kegemaran membaca masyarakat	Nilai	60	60	72,47
2	Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat	Indeks	87,05	87,05	96,78
XXII	KEARSIPAN				
1	Tingkat ketersediaan arsip sebagai bahan akuntabilitas kinerja, alat bukti yang sah dan pertanggungjawaban nasional (Ps40 dan 59 U 43/2009)	%	61,85	61,85	81,72
2	Tingkat keberadaan dan keutuhan arsip sebagai bahan pertanggungjawaban setiap aspek kehidupan berbangsa dan bernegara untuk kepentingan negara, pemerintahan, pelayanan publik dan kesejahteraan rakyat	%	70,33	70,33	83,33
3	Nilai LAKE	nilai	84,5	84,5	91,51
4	Rata-rata Nilai LAKI OPD	%	71	71	83,03
C	URUSAN PILIHAN				
XXIII	KELAUTAN DAN PERIKANAN				
1	Jumlah Total Produksi Perikanan (Tangkap dan Budidaya) kabupaten/kota (sumber data: one data KKP)	Ton/Thn	752	752	751,03
2	Peningkatan Produksi Perikanan	%	0,13	0,13	0,13
XXIV	PARIWISATA				

No	Indikator Kinerja Utama	Target Tahun 2025		Capaian Tahun 2024	Proyeksi Ketercapaian
		RPD	RKPD		
1	Persentase pertumbuhan jumlah wisatawan mancanegara per kebangsaan	%	4.582	4.582	27,02
2	Persentase peningkatan perjalanan wisatawan nusantara yang datang ke Kabupaten/Kota	%	50.464	50.464	19,72
3	Tingkat hunian akomodasi	%	25.752	25.752	34,17
4	Kontribusi sektor pariwisata terhadap PDRB harga berlaku	%	2.822	2.822	2,89
5	Kontribusi sektor pariwisata terhadap PAD	%	2,44	2,44	2,42
6	LPE Sektor akomodasi dan makan minum	%	8,33	8,33	3,98
7	PAD sektor pariwisata	rupiah	350.000.000	350.000.000	2.283.382.152
8	Persentase pemanfaatan dan perlindungan hak kekayaan intelektual	%	12	12	11,5
XXV	PERTANIAN				
1	Produktivitas pertanian per hektar per tahun Produktivitas pertanian per tahun	ton/ha	6,60	6,60	7,2
2	Persentase Penurunan kejadian dan jumlah kasus penyakit hewan menular / Persentase kasus zoonosis kab/ kota	%	9,00	9,00	11
3	Persentase Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian yang Tertangani	%	80	80	75
4	Persentase jumlah Kelompok tani yang mendapatkan penyuluhan tentang penerapan inovasi teknologi pertanian	%	13,8	13,8	13,8
5	Produktivitas Padi	Ton/ha	6,6	6,6	7,2
6	Produktivitas Susu Sapi Perah	Liter / ekor / hari	11,85	11,85	11,8
7	Persentase penerapan inovasi teknologi	%	66,7	100	33,3
8	Persentase peningkatan pendapatan petani penerima bansos	%	8,5	8,5	8,5
XXVI	PERDAGANGAN				
1	Persentase pelaku usaha yang memperoleh izin sesuai dengan ketentuan (IUPP/SIUP Pusat Perbelanjaan dan IUTM/IUTS/SIUP Toko Swalayan)	%	37,00	37,00	36
2	Persentase alat – alat ukur, takar, timbang dan perlengkapannya (UTTP) bertanda tera sah yang berlaku	%	65,00	65,00	50
3	LPE sektor Perdagangan	%	5,33	5,33	3,98
XXVII	PERINDUSTRIAN				
1	Persentase jumlah hasil pemantauan dan pengawasan dengan jumlah Izin Usaha Industri (IUI) Kecil dan Industri Menengah yang	%	100	100	100

No	Indikator Kinerja Utama	Target Tahun 2025		Capaian Tahun 2024	Proyeksi Ketercapaian
		RPD	RKPD		
	dikeluarkan oleh instansi terkait				
2	Tersedianya informasi industri secara lengkap dan terkini	%	0,27	0,27	0,26
3	Persentase kenaikan omset dan aset pelaku usaha	%	65	65	33
4	Persentase kenaikan pendapatan pelaku usaha miskin	%	50	50	40
5	Persentase pengawasan alat UTTT yang bertanda tera sah	%	10	10	5
6	Persentase pelaku usaha perdagangan yang menggunakan aplikasi digital	%	20	20	14
7	Kenaikan volume perdagangan	%	35	35	30
8	Persentase peningkatan produktivitas industri	%	35	35	30
XXVIII	SEKRETARIAT DAERAH DAN SEKRETARIAT DPRD				
1	Persentase kebijakan pembangunan yang dilaksanakan	%	100	100	100
2	Nilai LPPD	indeks	Sangat Tinggi	Sangat Tinggi	NA
3	Persentase pemenuhan layanan keuangan perangkat daerah	%	90	90	90
4	Kualitas penyelenggaraan sektor bidang perekonomian	%	100	100	100
5	Kinerja proses pengadaan barang/jasa pemerintah	%	90	90	90
6	Indeks Kepuasan Masyarakat	indeks	96,00	96,00	95,26 (Sangat Baik)
7	Nilai RB	nilai	63,00	63,00	77,66
8	Nilai SAKIP Sekretariat Daerah	nilai	64,86	64,86	na
9	Persentase masjid yang aktif melaksanakan aktifitas keagamaan	%	90	100	100
10	Persentase terselenggaranya kebijakan umum sektor perekonomian dan Pembangunan	%	100	100	100
11	Persentase pemberian pelayanan kerumahtanggaan Sekretariat Daerah	%	95	95	95
12	Nilai Penyelenggaraan Pelayanan Publik	nilai	93	93	94,46 (Tertinggi)
13	Persentase Partisipasi Masyarakat Dalam Pembangunan Kecamatan dan Kelurahan pada Kecamatan Padang Panjang Timur	%	39,5	39,5	38,78
14	Nilai Survey Kepuasan Masyarakat Kecamatan Padang Panjang Timur	nilai	97,82	97,9	94,37 (Sangat Baik)
15	Persentase partisipasi masyarakat dalam pembangunan kecamatan dan kelurahan pada Kecamatan Padang Panjang Barat	%	39,5	39,5	38,36
16	Nilai Survey Kepuasan Masyarakat pada	%	97,9	97,9	97,75 (Sangat Baik)

No	Indikator Kinerja Utama	Target Tahun 2025		Capaian Tahun 2024	Proyeksi Ketercapaian
		RPD	RKPD		
	Kecamatan Padang Panjang Barat				
17	Persentase kualitas tata kelola Sekretariat DPRD	%	100	100	96,46
18	Persentase terfasilitasinya tugas dan fungsi DPRD secara kelembagaan sebagai fungsi anggaran, fungsi pengawasan dan fungsi legalisasi	%	90	100	91,88
19	Persentase perda yang ditetapkan/ dihasilkan	%	77	77	93,49
20	Indeks Kepuasan DPRD terhadap pelayanan Sekretariat DPRD	indeks	77	77	94,17
21	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) terhadap DPRD	indeks	77	77	94,17
22	Persentase jumlah total proyek konstruksi yang dibawa ke tahun berikutnya. Yang ditandatangani pada kuartal pertama	%	12,82	12,82	NA
23	Persentase jumlah pengadaan yang dilakukan dengan metode kompetitif	%	4,16	4,16	68,61
24	Rasio nilai belanja yang dilakukan melalui pengadaan	%	52,60	52,60	37,28
25	Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri dan Produk Usaha Mikro, Usaha Kecil, dan Koperasi pada Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Daerah	%	8,73	8,73	52,18
E	UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN				
XXIX	PERENCANAAN				
1	Indeks Kualitas Perencanaan	indeks	71,00	71,00	72,2
2	Indeks Inovasi Daerah	indeks	Sangat Inovatif Indeks	Sangat Inovatif Indeks	Sangat Inovatif Indeks (81,35)
3	Nilai Komponen Perencanaan Kinerja Dalam SAKIP Kota	nilai	22,90	22,90	22,93
XXX	KEUANGAN				
1	Rasio PAD	%	15,96	21,86	18,22
2	Rasio Belanja Urusan Pemerintahan Umum (dikurangi transfer expenditures)	%	89.771	89.771	83,98
3	Opini Laporan Keuangan	opini	WTP	WTP	
4	Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah	indeks	71,5	71,5	63,2
5	Budget execution: Deviasi realisasi belanja terhadap belanja total dalam APBD	%	8,902	8,902	2,52
6	Revenue mobilization: Deviasi realisasi PAD terhadap anggaran PAD dalam APBD	%	7,1014	7,1014	13,9
7	Manajemen Aset	%	100	100	100
8	Rasio anggaran sisa terhadap total belanja dalam APBD tahun sebelumnya	%	2,93	2,93	7,77
E	UNSUR PENGAWASAN				
XXXI	PENGAWASAN				

No	Indikator Kinerja Utama	Target Tahun 2025		Capaian Tahun 2024	Proyeksi Ketercapaian
		RPD	RKPD		
1	Maturitas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP)	%	3 (3,2) Level	3 (3,2) Level	3 (3,000) Level
2	Kapabilitas Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP)	%	3 (3,2) Level	3 (3,2) Level	3 (3,000) Level
3	Presentase OPD yang Menyatakan Puas atas Pelayanan Inspektorat	%	97	97	96
4	Indeks Kualitas Pengawasan	indeks	3	3	3
XXXII	KEPEGAWAIAN				
1	Rasio Pegawai Pendidikan Tinggi dan Menengah/Dasar (%) (PNS tidak termasuk guru dan tenaga kesehatan)	%	368.726	368.726	7.991
2	Rasio pegawai Fungsional (%) (PNS tidak termasuk guru dan tenaga kesehatan)	%	20.459	20.459	23
3	Rasio Jabatan Fungsional bersertifikat Kompetensi (%) (PNS tidak termasuk guru dan tenaga kesehatan)	%	20.192	20.192	24
4	Rasio Belanja Pegawai di luar guru dan tenaga kesehatan	%	22,92	22,92	
5	Indeks Profesionalitas ASN	indeks	76,85	76,85	77,59
6	Persentase ASN yang mendapatkan pelayanan administrasi kepegawaian	%	100	100	100
7	Persentase ASN yang mendapatkan perlindungan kepegawaian	%	100	100	100
8	Indeks Sistem Merit	indeks	0,84	325	na
F	UNSUR KEWILAYAHAN				
XXXIII	KECAMATAN				
1	Tingkat partisipasi dan pemberdayaan masyarakat Kecamatan/kelurahan	%	27	27	28
2	Persentase partisipasi masyarakat dalam pembangunan kecamatan dan kelurahan	%	39,5	39,5	39,8
3	Persentase penyelenggaraan urusan pemerintah daerah yang dilaksanakan	%	100	100	100
G	UNSUR PEMERINTAHAN UMUM				
XXXIV	KESATUAN BANGSA DAN POLITIK				
1	Persentase pemahaman terhadap Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	%	80	80	80
2	Persentase Peningkatan Stabilitas Daerah	%	100	100	100
3	Persentase Konflik yang tertangani	%	100	100	100

Berdasarkan data capaian kinerja indikator makro tahun 2024 di atas, maka proyeksi capaian terhadap beberapa target indikator makro Kota Padang Panjang tahun 2025 dapat dijelaskan dengan asumsi sebagai berikut :

1. Target Tingkat Kemiskinan Kota Padang Panjang pada RKPD tahun 2025 sebesar 4,86%, diproyeksikan Dapat Tercapai. Hal ini didasarkan kepada

asumsi bahwa penurunan tingkat kemiskinan sebesar 0,45 poin dari 5,31% di tahun 2024 menjadi 4,86% bisa dilakukan jika dalam perubahan RKPD tahun 2025 ditetapkan strategi dan arah kebijakan yang dapat memberdayakan masyarakat miskin seperti pengembangan infrastruktur yang mendukung pertumbuhan ekonomi lokal serta penguatan program perlindungan sosial yang tepat sasaran.

2. Target Pertumbuhan Ekonomi sebesar 5,60% diproyeksikan Tidak Tercapai, dan sebaiknya dilakukan penyesuaian target. Hal ini didasarkan kepada asumsi turunnya pertumbuhan ekonomi kota Padang Panjang tahun 2024 menjadi 4,52%, turun dibandingkan dengan tahun 2023 yang sebesar 4,84%.

Selain itu, dengan adanya surat edaran dari pemerintah pusat agar pemerintah daerah melakukan efisiensi belanja daerah tahun 2025, hal ini secara tidak langsung akan berdampak terhadap tingkat perekonomian Kota Padang Panjang, karena dalam 5 tahun terakhir sektor Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib, merupakan salah satu dari 5 sektor yang memiliki share tertinggi dalam struktur perekonomian Kota Padang Panjang.

3. Target PDRB ADHB per Kapita sebesar Rp.89,32 juta diproyeksikan Dapat Tercapai meskipun capaian tahun 2024 melebihi target. Hal ini didasarkan kepada asumsi bahwa rata-rata pertumbuhan PDRB per Kapita Kota Padang Panjang dalam 5 tahun terakhir sebesar 6,74%, sedangkan rata-rata pertumbuhan PDRD ADHB per Kapita yang direncanakan dalam dokumen RPD hanya sebesar 3,22% per tahun.
4. Target Gini Rasio Kota Padang Panjang tahun 2025 sebesar 0,269 berada di bawah capaian tahun 2024 yang telah mencapai 0,266, sehingga sebaiknya dilakukan penyesuaian untuk target Gini Rasio tahun 2025.

2.2 Capaian Kinerja Pelaksanaan Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan RKPD Sampai Dengan Triwulan I

Secara umum hasil evaluasi pelaksanaan RKPD Tahun 2025 sampai dengan Triwulan I berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaan Renja Perangkat Daerah menunjukkan bahwa realisasi anggaran sampai dengan triwulan I sebesar Rp.108.513.937.111,- atau sebesar 18,16 persen dari pagu anggaran Rp.597.656.518.317,- dengan rata-rata capaian kinerja sampai dengan triwulan I sebesar 45,74 persen. Berdasarkan penilaian tersebut dapat dikategorikan bahwa capaian kinerja pelaksanaan hasil RKPD Kota Padang Panjang sampai dengan Triwulan I berada pada kriteria penilaian “sangat rendah”. Berikut capaian kinerja dan keuangan dari masing-masing Perangkat Daerah :

1. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan

Dinas Pendidikan dan Kebudayaan dengan anggaran sebesar Rp.121.927.793.342,- melaksanakan 3 (tiga) program, 12 (dua belas) kegiatan dan 93 (sembilan puluh tiga) sub kegiatan, dengan realisasi kinerja sebesar 32,37 persen (Sangat Rendah), dengan realisasi keuangan sebesar Rp. 46.587.092.599,75,- atau 38,21 persen.

2. Dinas Kesehatan

Dinas Kesehatan dengan anggaran sebesar Rp. 179.494.056.928,- melaksanakan 5 (lima) program, 18 (delapan belas) kegiatan dan 62 (enam puluh dua) sub kegiatan, dengan realisasi kinerja sebesar 44,14 persen (Sangat Rendah), realisasi keuangan sebesar Rp. 76.087.390.707,90 atau 44,12 persen.

3. Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang dengan anggaran sebesar Rp.17.695.408.094,- melaksanakan 9 (sembilan) program, 18 (delapan belas) kegiatan dan 39 (tiga puluh sembilan) sub kegiatan, dengan realisasi kinerja sebesar 35,67 persen (Sangat Rendah), realisasi keuangan sebesar Rp. 6.362.753.206,23,- atau 35,96 persen.

4. Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup

Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup dengan anggaran sebesar Rp. 32.448.327.088,- melaksanakan 15 (lima belas) program, 24 (dua puluh empat) kegiatan dan 42 (empat puluh dua) sub kegiatan, dengan realisasi kinerja sebesar 36,39 persen (Sangat Rendah), realisasi keuangan sebesar Rp.9.859.313.940,- atau 30,38 persen.

5. Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran

Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran dengan anggaran sebesar Rp. 11.849.050.967,- melaksanakan 3 (tiga) program, 10 (sepuluh) kegiatan dan 19 (sembilan belas) sub kegiatan, dengan realisasi kinerja sebesar 56,02 (Rendah), realisasi keuangan sebesar Rp. 6.156.995.777,- atau sebesar 51,96 persen.

6. Dinas Sosial, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

Dinas Sosial, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dengan anggaran sebesar Rp. 13.548.136.447,- melaksanakan 13 (tiga belas) program, 32 (tiga puluh dua) kegiatan, 73 (tujuh puluh tiga) sub kegiatan, dengan realisasi kinerja

mencapai 43,11 persen (Sangat Rendah), realisasi keuangan sebesar Rp. 6.039.254.176,- atau 44,58 persen.

7. Dinas Pangan dan Pertanian

Dinas Pangan dan Pertanian dengan anggaran sebesar Rp. 11.750.644.182,- melaksanakan 10 (sepuluh) program, dengan 23 (dua puluh tiga) kegiatan dan 38 (tiga puluh delapan) sub kegiatan, dengan realisasi kinerja sebesar 39,73 persen (Sangat Rendah), realisasi keuangan sebesar Rp. 5.082.946.449,- atau 43,26 persen.

8. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil dengan anggaran sebesar Rp.4.264.054.624,- melaksanakan 5 (lima) program, 13 (tiga belas) kegiatan dan 22 (dua puluh dua) sub kegiatan, dengan realisasi kinerja sebesar 38,99 persen (Sangat Rendah) dan realisasi keuangan Rp. 2.153.966.197,- atau sebesar 50,51 persen.

9. Dinas Perhubungan

Dinas Perhubungan dengan anggaran sebesar Rp.11.798.671.684,- melaksanakan 2 (dua) program, 12 (dua belas) kegiatan dan 25 (dua puluh lima) sub kegiatan, dengan realisasi kinerja sebesar 53,45 persen (Rendah) dan realisasi keuangan sebesar Rp. 6.080.257.459,- atau 51,53 persen.

10. Dinas Komunikasi dan Informatika

Dinas Komunikasi dan Informatika dengan anggaran sebesar Rp.8.169.258.781,- melaksanakan 5 (lima) program, 10 (sepuluh) kegiatan dan 20 (dua puluh) sub kegiatan, dengan realisasi kinerja mencapai 36,82 persen (Sangat Rendah) dan realisasi keuangan sebesar Rp. 4.047.133.842,- atau 49,54 persen.

11. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu dengan anggaran sebesar Rp. 6.720.137.773,- melaksanakan 7 (tujuh) program, 12 (dua belas) kegiatan, dan 27 (dua puluh tujuh) sub kegiatan dengan realisasi kinerja sebesar 48,89 persen (Sangat Rendah) dan realisasi keuangan sebesar Rp. 2.914.866.200,- atau sebesar 43,38 persen.

12. Dinas Perpustakaan dan Kearsipan

Dinas Perpustakaan dan Kearsipan dengan anggaran sebesar Rp.5.045.436.413,- melaksanakan 5 (lima) program, 11 (sebelas) kegiatan dan 20 (dua puluh) sub kegiatan dengan capaian kinerja 44,36 persen (Sangat

Rendah) dan realisasi keuangan mencapai Rp. 2.609.401.961,- atau 51,72 persen.

13. Dinas Pemuda, Olahraga dan Pariwisata

Dinas Pemuda, Olahraga dan Pariwisata dengan anggaran sebesar Rp.9.652.478.723,- melaksanakan 8 (delapan) program dengan 17 (tujuh belas) kegiatan dan 35 (tiga puluh lima) sub kegiatan, dengan realisasi kinerja 46,07 persen (Sangat Rendah) dan realisasi keuangan sebesar Rp. 4.229.403.645,- atau 43,82 persen.

14. Dinas Perdagangan, Koperasi dan Usaha Kecil Menengah

Dinas Perdagangan, Koperasi dan Usaha Kecil Menengah dengan anggaran sebesar Rp. 21.033.524.866,- melaksanakan 10 (sepuluh) Program dengan 16 (enam belas) kegiatan dengan 28 (dua puluh delapan) sub kegiatan, dengan realisasi kinerja sebesar 36,29 persen (Sangat Rendah) dan realisasi keuangan sebesar Rp.8.516.526.558,46,- atau sebesar 40,49 persen.

15. Inspektorat Daerah

Inspektorat Daerah dengan anggaran sebesar Rp.7.006.773.433,- melaksanakan 3 (tiga) program, 9 (sembilan) kegiatan dan 28 (dua puluh delapan) sub kegiatan, dengan realisasi kinerja mencapai 50,04 persen (Sangat Rendah) dan realisasi keuangan sebesar Rp. 3.576.994.694,- atau 51,05 persen.

16. Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah

Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah dengan anggaran sebesar Rp. 6.439.796.914,- melaksanakan 4 (empat) program, 17 (tujuh belas) kegiatan dan 27 (dua puluh tujuh) sub kegiatan, capaian kinerja adalah sebesar 38,47 persen (Sangat Rendah) dan realisasi keuangan sebesar Rp. 3.115.413.036,- atau 48,38 persen.

17. Badan Pengelola Keuangan Daerah

Badan Pengelola Keuangan Daerah dengan anggaran sebesar Rp. 12.678.845.845,- melaksanakan 4 (empat) program, 12 (dua belas) kegiatan dan 33 (tiga puluh tiga) sub kegiatan, capaian kinerja adalah sebesar 44,31 persen (Sangat Rendah) dengan realisasi keuangan sebesar Rp. 4.988.173.189,- atau 39,34 persen.

18. Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia

Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia dengan

anggaran sebesar Rp. 10.035.103.584,- melaksanakan 3 (tiga) program, 11 (sebelas) kegiatan dan 21 (dua puluh satu) sub kegiatan dengan capaian kinerja sebesar 44,31 persen (Sangat Rendah) dan realisasi keuangan sebesar Rp.3.538.845.608,- atau 35,26 persen.

19. Sekretariat Daerah

Sekretariat Daerah dengan anggaran sebesar Rp. 40.570.479.573,- melaksanakan 3 (tiga) program, 16 (enam belas) kegiatan dan 43 (empat puluh tiga) sub kegiatan, dengan realisasi kinerja 41,77 persen (Sangat Rendah), realisasi keuangan sebesar Rp. 18.566.085.255,- atau sebesar 45,76 persen.

20. Sekretariat DPRD

Sekretariat DPRD dengan anggaran sebesar Rp. 42.383.053.447,- melaksanakan 2 (dua) program dengan 15 (lima belas) kegiatan dan 43 (empat puluh tiga) sub kegiatan dengan capaian kinerja mencapai 47,11 persen (Sangat Rendah) dan realisasi keuangan sebesar Rp. 18.605.564.683,- atau sebesar 43,90 persen.

21. Kecamatan Padang Panjang Timur

Kecamatan Padang Panjang Timur dengan anggaran sebesar Rp.18.645.154.293,- melaksanakan 5 (lima) program, 12 (dua belas) kegiatan dan 22 (dua puluh dua) sub kegiatan, dengan capaian kinerja mencapai 45,56 persen (Sangat Rendah) dengan realisasi keuangan sebesar Rp. 9.011.768.857,- atau 48,33 persen.

22. Kecamatan Padang Panjang Barat

Kecamatan Padang Panjang Barat dengan anggaran sebesar Rp.19.101.738.494,- melaksanakan 5 (lima) program dengan 12 (dua belas) kegiatan dan 23 (dua puluh tiga) sub kegiatan, dengan realisasi kinerja adalah sebesar 45,95 persen (Sangat Rendah) dan realisasi keuangan Rp. 9.124.933.454,- atau 47,77 persen.

23. Badan Penanggulangan Bencana Daerah dan Kesatuan Bangsa dan Politik

Badan Penanggulangan Bencana Daerah dan Kesatuan Bangsa dan Politik dengan anggaran sebesar Rp. 20.335.132.105,- melaksanakan 7 (tujuh) program, 15 (lima belas) kegiatan dan 27 (dua puluh tujuh) sub kegiatan dengan realisasi kinerja mencapai 45,68 persen (Sangat Rendah) dan realisasi keuangan sebesar Rp.13.085.887.522,- atau sebesar 64,35 persen.

Berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaan RKPD Tahun 2025 sampai dengan

Triwulan I tersebut, dapat diambil kesimpulan sebagai berikut :

1. Berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaan RKPD Tahun 2025 keadaan Triwulan I, rata-rata realisasi kinerja RKPD pada Triwulan I mencapai 16,88 persen dengan predikat kinerja Sangat Rendah dengan realisasi keuangan sebesar Rp.106.044.484.875,- atau 17,75 persen dari anggaran APBD Tahun 2025 sebesar Rp. 597.542.962.218,-
2. Rendahnya capaian kinerja sampai dengan Triwulan I tahun 2025 antara lain disebabkan adanya refocusing anggaran pada Triwulan I dan efisiensi anggaran belanja daerah, sehingga Perangkat Daerah harus melakukan pergeseran dan efisiensi anggaran kegiatan yang berdampak pada jadwal pelaksanaan kegiatan yang seharusnya sudah dilaksanakan pada triwulan I.
3. Adanya surat edaran Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor : 900/833/SJ tentang Penyesuaian Pendapatan dan Efisiensi Belanja Daerah Dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025, menyebabkan Perangkat Daerah harus melakukan penyesuaian kembali terhadap jadwal pelaksanaan kegiatan yang berdampak terhadap pencapaian target kinerja masing-masing Perangkat Daerah.
4. Rata-rata capaian kinerja Perangkat Daerah berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaan Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah Triwulan I Tahun 2025 masih berada di bawah 50 persen, dengan predikat kinerja Sangat Rendah, dimana sebanyak 3 (tiga) PD capaian kinerjanya di atas 50 persen, 12 (dua belas) PD memiliki capaian kinerja di atas 40 persen, 8 (delapan) PD memiliki capaian kinerja di atas 30 persen.
5. Pada beberapa Perangkat Daerah yang mempunyai kegiatan pembangunan fisik, progres pelaksanaan kegiatan masih dalam tahapan perencanaan, dan masih ada yang menunggu petunjuk teknis dari kementerian terkait, sehingga kegiatan tersebut belum bisa dilaksanakan sesuai dengan jadwal yang telah direncanakan.

Berdasarkan permasalahan tersebut, secara umum perlu dilakukan langkah-langkah yang konkrit dalam upaya percepatan pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan tahun 2025, antara lain sebagai berikut :

1. Dengan diberlakukannya efisiensi belanja daerah tahun 2025 oleh pemerintah pusat dan memperhatikan capaian kinerja makro tahun 2024, perlu dilakukan penyesuaian kembali terhadap target-target RKPD tahun 2025, baik target makro maupun target-target prioritas pembangunan agar kinerja pemerintah daerah dapat terlaksana dengan baik.
2. Sesuai dengan Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor : 900/833/SJ tentang Penyesuaian Pendapatan dan Efisiensi Belanja Daerah Dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran

2025, disarankan kepada Perangkat Daerah untuk melakukan penyesuaian target program, kegiatan dan sub kegiatan yang akan dilaksanakan dengan tetap memperhatikan ketersediaan anggaran agar kinerja Perangkat Daerah dapat tercapai.

3. Mengacu kepada Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor: 900.1.1/640/SJ tanggal 11 Februari 2025 tentang Penyesuaian Arah Kebijakan Pembangunan Daerah Melalui Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah dan Perubahan Anggaran dan Pendapatan Daerah Tahun Anggaran 2025, maka perlu dilakukan perubahan dokumen RKPD Tahun 2025 untuk menampung visi, misi, program dan prioritas pembangunan tahun 2025, serta program Asta Cita, sehingga terwujud keselarasan antara dokumen RPJMD tahun 2025-2029 dengan RKPD tahun 2025.

Capaian kinerja pelaksanaan RKPD Kota Padang Panjang berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaan Renja Perangkat Daerah sampai dengan Triwulan I Tahun 2025 dapat dilihat pada tabel 2.12 berikut ini.

EVALUASI HASIL PERENCANAAN DAERAH SAMPAI DENGAN TAHUN BERJALAN
KOTA PADANG PANJANG
TRIWULAN I TAHUN 2025

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (output)	Target RPD pada akhir periode Akhir RPD (2026)		Realisasi Capaian Kinerja RPD Sampai Dengan RKPD Tahun Lalu		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun Berjalan (Tahun n-1 = 2024) yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPD s/d Tahun lalu		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPD s/d Tahun lalu (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
4	5	6	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
		K															K
TOTAL BELANJA LANGSUNG		-	1.556.795.146.782,00	97,65%	625.785.134.503,60		597.542.962.218,00	16,88%	106.044.484.875,00	16,88%	106.044.484.875,00	97,65%	625.785.134.503,60				
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN			236.514.482.557,00	99,24%	115.444.454.614,86	100,00%	109.274.348.959,00	11,25%	16.629.761.284,00	11,25%	16.629.761.284,00	99,24%	115.444.454.614,86				
URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR																	
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN			100,00%	235.505.154.557,00	98,47%	115.110.987.619,86	100,00%	108.537.572.959,00	22,50%	16.629.761.284,00	22,50%	16.629.761.284,00	98,47%	115.110.987.619,86			
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Persentase pemenuhan urusan penunjang yang dipenuhi	100,00%	167.481.176.033,00	100,00%	76.353.339.173,00	100,00%	77.131.784.257,00	25,00%	15.041.357.303,00	25,00%	15.041.357.303,00	100%	76.353.339.173,00				
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan layanan administrasi keuangan perangkat daerah	1tahun		100,00%	74.335.947.072,00	100,00%	74.166.140.209,00	25,00%	14.791.030.035,00	25,00%	14.791.030.035,00	100%	74.335.947.072,00				
Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	553 Orang/bulan		580 Orang / bulan	74.335.947.072,00	580 Orang/bulan	74.166.140.209,00	580 orang	14.791.030.035,00	580 orang	14.791.030.035,00	580 Orang / bulan	74.335.947.072,00			Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	
Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah		-		0,00%	0,00		494.530.000,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0%	0,00				
Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	580 Paket				580 Paket	494.530.000,00		0,00	-	0,00					Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	
Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan layanan administrasi umum perangkat daerah	1tahun		100,00%	419.595.702,00	100,00%	526.696.464,00	25,00%	40.190.145,00	25,00%	40.190.145,00	100%	419.595.702,00				
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	4 Paket		4 Paket	13.387.600,00	4 Paket	20.663.500,00	0,00		-	0,00	4 Paket	13.387.600,00			Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	
Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	4 Paket		4 Paket	116.603.900,00	4 Paket	129.047.314,00	0,00		-	0,00	4 Paket	116.603.900,00			Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	
Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	5 Paket		5 Paket	31.363.100,00	5 Paket	76.986.650,00	1 Paket	4.593.850,00	1 Paket	4.593.850,00	5 Paket	31.363.100,00			Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	
Penyelenggaraan Rapat dan Koordinasi SKPD	Jumlah Laporan Rapat Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	30 Laporan		30 Laporan	258.241.102,00	30 Laporan	299.999.000,00	5 Laporan	35.596.295,00	5 Laporan	35.596.295,00	30 Laporan	258.241.102,00			Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	
Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase pemenuhan Barang Milik Daerah sesuai dengan perencanaan	1tahun		100,00%	293.970.000,00	100,00%	169.540.300,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	100%	293.970.000,00				
Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan			9 Unit	252.970.000,00	10 Unit	99.680.000,00	0,00		-	0,00	9 Unit	252.970.000,00			Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	
Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan			5 Unit	41.000.000,00	5 Unit	49.931.800,00			-	0,00	5 Unit	41.000.000,00				
Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	1 Unit				1 Unit	19.928.500,00	0,00		-	0,00						
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Penyediaan Jasa Penunjang Pemerintahan Daerah yang terpenuhi	1 Tahun		100,00%	979.078.449,00	90 Persen	1.050.191.284,00	25,00%	192.796.623,00	25,00%	192.796.623,00	100%	979.078.449,00				
Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	15 Laporan		1 Laporan	5.750.000,00	15 Laporan	6.023.700,00	0,00		-	0,00	1 Laporan	5.750.000,00			Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (output)	Target RPD pada akhir periode Akhir RPD (2026)		Realisasi Capaian Kinerja RPD Sampai Dengan RKPD Tahun Lalu		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun Berjalan (Tahun n-1 = 2024) yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPD s/d Tahun lalu		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPD s/d Tahun lalu (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab					
								I													
4	5	6	Rp	7	Rp	8	Rp	9	Rp	10	Rp	11	Rp	12	Rp	13					
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	3 Laporan		3 Laporan	100.253.033,00	3 Laporan	149.999.584,00	3 Laporan	21.451.507,00	3 Laporan	21.451.507,00	3 Laporan	100.253.033,00			Dinas Pendidikan dan Kebudayaan					
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan		12 Laporan	873.075.416,00	12 Laporan	894.168.000,00	3 Laporan	171.345.116,00	3 Laporan	171.345.116,00	12 Laporan	873.075.416,00			Dinas Pendidikan dan Kebudayaan					
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase ketersediaan Barang Milik Daerah berkondisi baik	1 Tahun		100,00%	324.747.950,00	90 Persen	724.686.000,00	25,00%	17.340.500,00	25,00%	17.340.500,00	100%	324.747.950,00								
Penyediaan Pemeliharaan, Biaya Perorangan dan Pajak Kendaraan Dinas Jabatan atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Jasa Kendaraan atau Kendaraan Dinas yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	17 Unit		17 Unit	153.118.950,00	17 Unit	189.992.000,00	2 unit	16.630.500,00	2 unit	16.630.500,00	17 Unit	153.118.950,00			Dinas Pendidikan dan Kebudayaan					
Pemeliharaan Mebel	Jumlah Mebel yang Dipelihara	10 Unit				10 Unit	25.000.000,00	1 unit	710.000,00	1 unit	710.000,00					Dinas Pendidikan dan Kebudayaan					
Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	13 Unit		6 Unit	25.144.000,00	13 Unit	9.740.000,00	0,00		-	0,00	6 Unit	25.144.000,00			Dinas Pendidikan dan Kebudayaan					
Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	3 Unit		1 Unit	146.485.000,00	1 Unit	499.954.000,00	0,00		-	0,00	1 Unit	146.485.000,00			Dinas Pendidikan dan Kebudayaan					
PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Persentase capaian Standar Pelayanan Minimal Kependidikan	100%	68.023.978.524,00		3.875.764.844.686,00	100,00%	31.405.788.702,00	20,00%	1.588.403.981,00	20,00%	1.588.403.981,00		3.875.764.844.686,00								
Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	Sekolah yang mencapai Standar Nasional Pendidikan	38 Satuan Pendidikan		38 Satuan Pendidikan	1.813.641.037.118,00	38 Satuan Pendidikan	14.399.903.402,00	25,00%	595.247.980,00	25,00%	595.247.980,00	38 Satuan Pendidikan	1.813.641.037.118,00								
Pembangunan Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU yang Telah Dibangun	Jumlah Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU yang Telah Dibangun			3 Ruang	49.277.152.291,00	4 ruang			-	-	0,00	3 Ruang	49.277.152.291,00			Dinas Pendidikan dan Kebudayaan					
Pembangunan Ruang Unit Kesehatan Sekolah	Jumlah Ruang Unit Kesehatan Sekolah yang Telah Dibangun	7 Ruang		3 Ruang	187.718.582,00	1 Ruang			-	-	0,00	3 Ruang	187.718.582,00			Dinas Pendidikan dan Kebudayaan					
Pembangunan Perpustakaan Sekolah	Jumlah Perpustakaan Sekolah yang Telah Dibangun	3 Ruang		1 Ruang	189.250.668,00	1 Ruang			-	-	0,00	1 Ruang	189.250.668,00			Dinas Pendidikan dan Kebudayaan					
Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Dibangun	6 Unit		3 Unit	301.049.963.011,00	2 Unit	2.435.900.000,00	0,00		-	0,00	3 Unit	301.049.963.011,00			Dinas Pendidikan dan Kebudayaan					
Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	Jumlah Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat			3 Ruang	239.574.500,00				-	-	0,00	3 Ruang	239.574.500,00			Dinas Pendidikan dan Kebudayaan					
Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Unit Kesehatan Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	Jumlah Ruang Unit Kesehatan Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat			3 Ruang	135.582.750,00				-	-	0,00	3 Ruang	135.582.750,00			Dinas Pendidikan dan Kebudayaan					
Rehabilitasi Sedang/Berat Perpustakaan Sekolah	Jumlah Perpustakaan Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat			3 Ruang	189.337.200,00				-	-	0,00	3 Ruang	189.337.200,00			Dinas Pendidikan dan Kebudayaan					
Pengadaan Mebel Sekolah		4 paket		14 paket	700.245.000,00	2 paket	120.000.000,00		0,00	-	0,00	14 paket	700.245.000,00			Dinas Pendidikan dan Kebudayaan					
Pengadaan Perlengkapan Sekolah	Jumlah Perlengkapan Sekolah yang Tersedia	4 paket		5 paket	525.281.300,00	2 paket	250.000.000,00		0,00	-	0,00	5 paket	525.281.300,00								
Pemeliharaan Rutin Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Dilaksanakan Pemeliharaan	32 unit		32 Unit	679.597.001,00	32 unit	305.000.000,00	5 unit	39.857.000,00	5 unit	39.857.000,00	32 Unit	679.597.001,00			Dinas Pendidikan dan Kebudayaan					

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (output)	Target RPD pada akhir periode Akhir RPD (2026)		Realisasi Capaian Kinerja RPD Sampai Dengan RKPD Tahun Lalu		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun Berjalan (Tahun n-1 = 2024) yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPD s/d Tahun lalu		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPD s/d Tahun lalu (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
								I										
4	5	6	Rp	7	Rp	8	Rp	9	Rp	10	Rp	11	Rp	12	13	14=7x13	15=146 x 100%	16
Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Dasar	Jumlah Peserta Didik Sekolah Menengah Atas yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik			54 Peserta Didik	99.000.000,00	380 Peserta Didik	401.930.000,00		0,00	-	0,00	54 Peserta Didik	99.000.000,00					Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa	Jumlah Siswa yang Mengikuti Ajang Kompetisi/Lomba Akademik dan Non Akademik	3000 Peserta Didik		1000 Peserta Didik	285.692.040,00	1000 Peserta Didik	150.000.000,00		0,00	-	0,00	1000 Peserta Didik	285.692.040,00					Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Sekolah Dasar	Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Tersedia pada Satuan Pendidikan Sekolah Dasar	104 Orang		104 Orang	2.690.378.321,00	104 Orang	2.856.504.000,00	104 Orang	543.625.630,00	104 Orang	543.625.630,00	104 Orang	2.690.378.321,00					Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Sekolah Dasar	Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitas Kenaikan Pangkat/Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi	1200 Orang		400 Orang	365.360.225,00	350 Orang	527.288.000,00		1.205.000,00	-	1.205.000,00	400 Orang	365.360.225,00					Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah	Jumlah Sekolah Menengah Dasar yang Dilaksanakan Pembinaan Kelembagaan dan manajemen sekolah	38 Satuan Pendidikan		38 Satuan Pendidikan	48.339.840,00	38 Satuan Pendidikan	30.000.000,00		0,00	-	0,00	38 Satuan Pendidikan	48.339.840,00					Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	Jumlah sekolah yang mengelola dana Bos			42 sekolah	5.583.784.641,00	32 Satuan Pendidikan	5.618.000.000,00	32 Satuan Pendidikan	0,00	32 Satuan Pendidikan	0,00	42 sekolah	5.583.784.641,00					
Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	Jumlah Tenaga Pengelola yang Meningkatkan Kapasitasnya dalam Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	570 Orang		190 Orang	28.200.000	190 Orang	30.000.000,00	190 Orang	5.664.750,00	190 Orang	5.664.750,00	190 Orang	28.200.000,00					Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
Pembangunan Laboratorium Sekolah Dasar	Jumlah Ruang Laboratorium Sekolah Dasar yang Telah Dibangun			2 Ruang	63.423.467.757,00					-	0,00	2 Ruang	63.423.467.757,00					Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
Rehabilitasi Sedang/Berat Laboratorium Sekolah Dasar	Jumlah Laboratorium Sekolah Dasar yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat			0	0,00					-	0,00	0%	0,00					
Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan	38 Dokumen		38 Dokumen	237.754.755,00	38 Dokumen	20.000.000,00	38 Dokumen	1.732.500,00	38 Dokumen	1.732.500,00	38 Dokumen	237.754.755,00					
Pengadaan Perlengkapan Peserta Didik	Jumlah Perlengkapan Peserta Didik yang Tersedia	3000 Paket		273 Paket	173.232.150,00	1000 Paket	300.000.000,00		0,00	-	0,00	273 Paket	173.232.150,00					
Pembangunan Ruang Kelas Baru	Jumlah Ruang Kelas Baru yang Bertambah			7 Ruang	106.972.152.709,00					-	0,00	7 Ruang	106.972.152.709,00					
Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	9 Unit		3 Unit	340.206.470,00	3 Unit	1.255.281.402,00		0,00	-	0,00	3 Unit	340.206.470,00					
Penyelenggaraan Proses Belajar Bagi Peserta Didik	Jumlah Satuan Pendidikan yang Menyelenggarakan Proses Belajar	38 Satuan Pendidikan		38 Satuan Pendidikan	41.060.900,00	38 Satuan Pendidikan	100.000.000,00	38 Satuan Pendidikan	3.163.100,00	38 Satuan Pendidikan	3.163.100,00	38 Satuan Pendidikan	41.060.900,00					
Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah	Jumlah Ruang Kelas Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat			4 Ruang	1.895.866.705,00					-	0,00	4 Ruang	1.895.866.705,00					

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (output)	Target RPD pada akhir periode Akhir RPD (2026)		Realisasi Capaian Kinerja RPD Sampai Dengan RKPD Tahun Lalu		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun Berjalan (Tahun n-1 = 2024) yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPD s/d Tahun lalu		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPD s/d Tahun lalu (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
								I										
4	5	6	Rp	7	Rp	8	Rp	9	Rp	10	Rp	11	Rp	12	13	14	15=14/6 x 100%	16
Pengelolaan Pendidikan Menengah Pertama	Jumlah Satuan Pendidikan Sekolah menengah pertama yang dikelola	15 Satuan Pendidikan		15 Satuan Pendidikan	1.227.080.803.968,00	13 Satuan Pendidikan	7.838.668.400,00	25,00%	265.486.751,00	25,00%	265.486.751,00	15 Satuan Pendidikan	1.227.080.803.968,00					
Pembangunan Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU	Jumlah Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU yang Telah Dibangun			1 Ruang	63.963.013.547,00					-	0,00	1 Ruang	63.963.013.547,00					Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
Pembangunan Ruang Unit Kesehatan Sekolah	Jumlah Ruang Unit Kesehatan Sekolah yang Telah Dibangun			1 Ruang	187.852.660,00					-	0,00	1 Ruang	187.852.660,00					Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
Pembangunan Perpustakaan Sekolah	Jumlah Perpustakaan Sekolah yang Telah Dibangun	1 Ruang		1 Ruang	88.733.926.346,00	1 Ruang				-	0,00	1 Ruang	88.733.926.346,00					Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
Pembangunan Laboratorium	Jumlah Ruang Laboratorium yang Telah Dibangun	1 Ruang		1 Ruang	23.258.269.291,00	1 Ruang				-	0,00	1 Ruang	23.258.269.291,00					Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Dibangun	6 Unit		2 Unit	1.177.039.220,00	2 Unit	123.305.000,00	0,00		-	0,00	2 Unit	1.177.039.220,00					Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah	Jumlah Ruang kelas sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	6 Unit		2 Ruang	87.087.564.199,00	1 Unit				-	0,00	2 Ruang	87.087.564.199,00					Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Unit Kesehatan Sekolah	Jumlah Ruang Unit Kesehatan Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat				0,00					-	0,00		0,00					Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
Rehabilitasi Sedang/Berat Perpustakaan Sekolah	Jumlah Perpustakaan Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat			3 Ruang	22.968.204.325,00					-	0,00	3 Ruang	22.968.204.325,00					Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
Rehabilitasi Sedang/Berat Laboratorium	Jumlah Laboratorium yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat			2 Ruang	16.029.484.692,00					-	0,00	2 Ruang	16.029.484.692,00					Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	6 Unit		3 Unit	25.218.196.432,00	1 Unit	560.180.000,00	0,00		-	0,00	3 Unit	25.218.196.432,00					Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
Pengadaan Mebel Sekolah	Jumlah Mebel Sekolah yang Tersedia	7 Paket		3 Paket	539.606.100,00	2 Paket				-	0,00	3 Paket	539.606.100,00					Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
Pengadaan Perlengkapan Sekolah	Jumlah Perlengkapan Sekolah yang Tersedia	6 Paket		2 Paket	578.720.000,00	3 Paket	450.000.000,00	0,00		-	0,00	2 Paket	578.720.000,00					Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
Pemeliharaan Rutin Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Dilaksanakan Pemeliharaan	6 Unit		6 Unit	179.353.875,00	6 Unit	300.000.000,00	0,00		-	0,00	6 Unit	179.353.875,00					
Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Menengah Pertama	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Menengah Pertama	1050 Peserta Didik		32 Peserta Didik	72.500.000,00	50 Peserta Didik	200.490.000,00	0,00		-	0,00	32 Peserta Didik	72.500.000,00					
Perlengkapan Belajar Peserta Didik	Jumlah Perlengkapan Peserta Didik yang Tersedia			226 Paket	59.295.300,00					-	0,00	226 Paket	59.295.300,00					
Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa	Jumlah Alat Praktik dan Peraga Siswa yang Tersedia			2 Paket	183.913.303,00	2 Paket	30.000.000,00	0,00		-	0,00	2 Paket	183.913.303,00					
Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa	Jumlah Siswa yang Mengikuti Ajang Kompetisi/Lomba Akademik dan Non Akademik	3000 Peserta Didik		1000 Peserta Didik	342.460.185,00	500 Peserta Didik	160.000.000,00		1.264.200,00	-	1.264.200,00	1000 Peserta Didik	342.460.185,00					
Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Tersedia pada Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	168 Orang		56 Orang	1.264.749.550,00	56 Orang	1.369.418.400,00	56 Orang	245.385.801,00	56 Orang	245.385.801,00	56 Orang	1.264.749.550,00					

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (output)	Target RPD pada akhir periode Akhir RPD (2026)		Realisasi Capaian Kinerja RPD Sampai Dengan RKPD Tahun Lalu		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun Berjalan (Tahun n-1 = 2024) yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPD s/d Tahun lalu		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPD s/d Tahun lalu (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
								I									
4	5	6	Rp	7	Rp	8	Rp	9	Rp	10	Rp	11	Rp	12	13	14=10/6 x 100%	15
Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitas Kenaikan Pangkat/Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi	1050 Orang		350 Orang	265.026.575,00	350 Orang	300.000.000,00		14.303.600,00	-	14.303.600,00	350 Orang	265.026.575,00				
Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah	Jumlah Sekolah Menengah Pertama yang Dilaksanakan Pembinaan			15 Satuan Pendidikan an	29.107.260,00					-	0,00	15 Satuan Pendidikan	29.107.260,00				
Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama	Jumlah sekolah yang mengelola dana Bos			15 Satuan Pendidikan an	3.662.148.931,00	6 Satuan Pendidikan	3.865.275.000,00	6 Satuan Pendidikan	0,00	6 Satuan Pendidikan	0,00	15 Satuan Pendidikan	3.662.148.931,00				
Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama	Jumlah Tenaga yang Meningkatkan Kapasitasnya dalam Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama	75 Orang		75 Orang	21.210.000,00	75 Orang	30.000.000,00	75 Orang	3.591.300,00	75 Orang	3.591.300,00	75 Orang	21.210.000,00				
Pemeliharaan Mebel Sekolah	Jumlah Mebel Sekolah yang Dilaksanakan Pemeliharaan					6 unit	40.000.000,00		0,00	-	0,00						
Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan	15 Satuan Pendidikan		15 Dokumen	14.985.000,00	14 Dokumen	20.000.000,00		941.850,00	-	941.850,00	15 Dokumen	14.985.000,00				
Penyelenggaraan Proses Belajar bagi Peserta Didik	Jumlah Peserta Didik yang Mengikuti Proses Belajar			15 Satuan Pendidikan an	12.976.200,00					-	0,00	15 Satuan Pendidikan	12.976.200,00				
Pengadaan Perlengkapan Peserta Didik	Jumlah Perlengkapan Peserta Didik yang Tersedia	1500 Paket		226 Paket	183.802.350,00	500 Paket	390.000.000,00		0,00	-	0,00	226 Paket	183.802.350,00				
Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU	Jumlah Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat			3 Ruang	22.347.494.236,00					-	0,00	3 Ruang	22.347.494.236,00				
Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)	Jumlah Satuan Pendidikan anak usia dini yang dikelola	62Satuan Pendidikan		62 Satuan Pendidikan an	6.656.276.348,00	58Satuan Pendidikan an	6.916.579.000,00	20,00%	714.305.750,00	20,00%	714.305.750,00	62 Satuan Pendidikan an	6.656.276.348,00				
Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD				2 Unit	353.906.860,00					-	0,00	2 Unit	353.906.860,00				Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung/Ruang Kelas/Ruang Guru PAUD	Jumlah Gedung/Ruang Kelas/Ruang Guru PAUD yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat			2 Unit	45.941.123,00	2 ruang				-	0,00	2 Unit	45.941.123,00				Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
Rehabilitasi Sedang/Berat Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat			2 Unit	139.045.877,00					-	0,00	2 Unit	139.045.877,00				Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
Pengadaan Mebel PAUD	Jumlah Mebel PAUD yang Tersedia	2 Paket		2 Paket	27.820.000,00	2 Paket				-	0,00	2 Paket	27.820.000,00				Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
Pengadaan Perlengkapan PAUD	Jumlah perlengkapan PAUD yang Tersedia	2 Paket		2 Paket	35.000.000,00	2 Paket	669.099.000,00		0,00	-	0,00	2 Paket	35.000.000,00				Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik PAUD	Jumlah Peserta Didik PAUD yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik					12 Peserta Didik	40.000.000,00		0,00	-	0,00						Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa PAUD	Jumlah Alat Praktik dan Peraga PAUD yang Tersedia			2 Paket	189.365.020,00	2 Paket	20.000.000,00		0,00	-	0,00	2 Paket	189.365.020,00				Dinas Pendidikan dan Kebudayaan

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (output)	Target RPD pada akhir periode Akhir RPD (2026)		Realisasi Capaian Kinerja RPD Sampai Dengan RKPd Tahun Lalu		Target Kinerja dan Anggaran RKPd Tahun Berjalan (Tahun n-1 = 2024) yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPd yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPD s/d Tahun lalu		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPD s/d Tahun lalu (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								I								
4	5	6	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	16
Penyelenggaraan Proses Belajar PAUD	Jumlah Peserta Didik PAUD yang Mengikuti Proses Belajar			500 Peserta Didik	86.957.405,00	58 Satuan Pendidikan	80.000.000,00		0,00	-	0,00	500 Peserta Didik	86.957.405,00			Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan PAUD	Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Tersedia pada PAUD	250 Orang		250 Orang	3.885.950.000,00	250 Orang	4.021.200.000,00		697.600.000,00	-	697.600.000,00	250 Orang	3.885.950.000,00			Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan PAUD	Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitas Kenaikan Pangkat/Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi	325 Orang		300 Orang	344.598.000,00	325 Orang	251.480.000,00		11.428.750,00	-	11.428.750,00	300 Orang	344.598.000,00			Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen PAUD	Jumlah PAUD yang Dilaksanakan Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen	62 Satuan Pendidikan		60 Satuan Pendidikan	72.504.346,00	61 Satuan Pendidikan	75.000.000,00		300.000,00	-	300.000,00	60 Satuan Pendidikan	72.504.346,00			Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
Pengelolaan Dana BOP PAUD	Jumlah sekolah yang mengelola dana BOP			60 Satuan Pendidikan	1.416.553.767,00	58 Satuan Pendidikan	1.363.800.000,00		0,00	-	0,00	60 Satuan Pendidikan	1.416.553.767,00			
Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOP PAUD	Jumlah Tenaga yang Meningkatkan Kapasitasnya dalam Pengelolaan Dana BOP PAUD			120 Orang	16.718.100,00	120 Orang	15.000.000,00		4.977.000,00	-	4.977.000,00	120 Orang	16.718.100,00			Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan	62 Satuan Pendidikan		60 Dokumen	22.079.850,00	61 Satuan Pendidikan	30.000.000,00		0,00	-	0,00	60 Dokumen	22.079.850,00			Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
Pengadaan Perlengkapan Peserta Didik	Jumlah Perlengkapan Peserta Didik yang Tersedia	150 Paket		150 Paket	19.836.000,00	150 Paket	20.000.000,00		0,00	-	0,00	150 Paket	19.836.000,00			Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
Pemeliharaan Rutin Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Dilaksanakan Pemeliharaan					2 unit	331.000.000,00		0,00	-	0,00					Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
Pengelolaan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	Jumlah Satuan Pendidikan Non Formal/kesetaraan yang dikelola	3 Satuan Pendidikan		3 Satuan Pendidikan	1.694.153.688,00	3 Satuan Pendidikan	2.250.637.900,00	10,00%	13.363.500,00	10,00%	13.363.500,00	3 Satuan Pendidikan	1.694.153.688,00			
Pembangunan Gedung/Ruang Guru Nonformal/Kesetaraan	Jumlah Gedung/Ruang Kelas/Ruang Guru Nonformal/Kesetaraan yang Telah Dibangun			1 Unit	182.728.965,00					-	0,00	1 Unit	182.728.965,00			Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa Nonformal / Kesetaraan	Jumlah Alat Praktik dan Peraga Siswa Nonformal/ Kesetaraan yang Tersedia			1 Paket	120.379.215,00					-	0,00	1 Paket	120.379.215,00			
Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Tersedia bagi Satuan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	4 Orang		4 Orang	27.434.813,00	5 Orang	112.000.000,00		9.450.000,00	-	9.450.000,00	4 Orang	27.434.813,00			Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitas Kenaikan Pangkat/Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi			30 Orang	11.281.750,00	30 Orang	62.000.000,00		0,00	-	0,00	30 Orang	11.281.750,00			

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (output)	Target RPD pada akhir periode Akhir RPD (2026)		Realisasi Capaian Kinerja RPD Sampai Dengan RKPd Tahun Lalu		Target Kinerja dan Anggaran RKPd Tahun Berjalan (Tahun n-1 = 2024) yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPd yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPD s/d Tahun lalu		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPD s/d Tahun lalu (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
								I										
4	5	6	Rp	7	Rp	8	Rp	9	Rp	10	Rp	11	Rp	12	13	14	15=14/6 x 100%	16
Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Nonformal/Kesetaraan	Jumlah Sekolah Nonformal/Kesetaraan yang Dilaksanakan Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen					3 Satuan Pendidikan	15.000.000,00		2.488.500,00	-	2.488.500,00							
Pengelolaan Dana BOP Sekolah Nonformal/Kesetaraan	Jumlah Sekolah Nonformal/Kesetaraan yang Mengelola Dana BOP			3 Satuan Pendidikan	570.333.000,00	3 Satuan Pendidikan	437.900.000,00		0,00	-	0,00	3 Satuan Pendidikan	570.333.000,00					
Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOP Sekolah Nonformal/Kesetaraan	Jumlah Tenaga yang Meningkatkan Kapasitasnya dalam Pengelolaan Dana BOP Sekolah Nonformal/Kesetaraan			30 Orang	3.649.700,00	30 Orang	15.000.000,00		900.000,00	-	900.000,00	30 Orang	3.649.700,00					Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan					14 Dokumen	20.000.000,00		0,00	-	0,00							Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
Pembangunan Ruang Kelas Baru						6 ruang	1.457.737.900,00		0,00	-	0,00							Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
Pengadaan Perlengkapan Peserta Didik	Jumlah Perlengkapan Peserta Didik yang Tersedia			1 Paket	19.992.000,00					-	0,00	1 Paket	19.992.000,00					Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat			1 Unit	48.209.535,00					-	0,00	1 Unit	48.209.535,00					Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
Penyelenggaraan Proses Belajar bagi Peserta Didik	Jumlah Satuan Pendidikan yang Penyelenggarakan Proses Belajar	3 Satuan Pendidikan		60 Peserta Didik	126.095.225,00	3 Peserta Didik	131.000.000,00		525.000,00	-	525.000,00	60 Peserta Didik	126.095.225,00					Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
Pengadaan Mebel Sekolah	Jumlah Mebel Sekolah yang Tersedia			1 Paket	40.975.600,00	6 Paket				-	0,00	1 Paket	40.975.600,00					
Pemeliharaan Rutin Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Dilaksanakan Pemeliharaan			1 Unit	77.246.830,00					-	0,00	1 Unit	77.246.830,00					Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah	Jumlah Ruang Kelas Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat			1 Unit	465.827.055,00					-	0,00	1 Unit	465.827.055,00					
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN		100%	1.009.328.000,00	100,00%	333.466.995,00	100,00%	736.776.000,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	100%	333.466.995,00					
PROGRAM PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN	Persentase pelestarian objek pemajuan kebudayaan yang dilindungi, dikembangkan, dimanfaatkan dan dibina	4 Objek	1.009.328.000,00	100,00%	333.466.995,00	4 Objek	736.776.000,00		0,00	0,00%	0,00	100%	333.466.995,00					
Pengelolaan Kebudayaan yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah kebudayaan dengan masyarakat pelakunya yang dikelola	20Objek		2 Objek	247.357.820,00	2 Objek	175.000.000,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	2 Objek	247.357.820,00					
Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Kebudayaan	Jumlah Objek Pemajuan Kebudayaan yang Dilakukan Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan	10 Objek		2 Objek	247.357.820,00	4 Objek	175.000.000,00		0,00	-	0,00	2 Objek	247.357.820,00					Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
Pelestarian Kesenian Tradisional yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah kesenian tradisional dengan masyarakat pelakunya yang dilestarikan	3nagari		3 nagari	73.629.175,00	3 nagari	132.000.000,00		0,00	0,00%	0,00	3 nagari	73.629.175,00					

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (output)	Target RPD pada akhir periode Akhir RPD (2026)		Realisasi Capaian Kinerja RPD Sampai Dengan RKPD Tahun Lalu		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun Berjalan (Tahun n-1 = 2024) yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPD s/d Tahun lalu		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPD s/d Tahun lalu (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
								I									
4	5	6	Rp	7	Rp	8	Rp	9	Rp	10	Rp	11	Rp	12	Rp	13=14/6 x 100%	14
Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Tradisi Budaya	Jumlah Objek Pemajuan Tradisi Budaya yang Dilakukan Pelindungan, Pengembangan dan Pemanfaatan	3 Objek		3 Objek	43.852.175,00	3 Objek	41.000.000,00		0,00	-	0,00	3 Objek	43.852.175,00				Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Tradisional	Jumlah Laporan Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Tradisional	2 Laporan		2 Laporan	29.777.000,00	2 Laporan	91.000.000,00		0,00	-	0,00	2 Laporan	29.777.000,00				
Pembinaan Lembaga Adat yang Penganutnya dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Lembaga Adat yang dibina	3lembaga		3 lembaga	12.480.000,00	3 lembaga	429.776.000,00		0,00	0,00%	0,00	3 lembaga	12.480.000,00				
Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Lembaga Adat		3 Objek				3 Objek	365.000.000,00		0,00	-	0,00						Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Adat		90 Orang				60 Orang	45.000.000,00		0,00	-	0,00						Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
Penyediaan Sarana dan Prasarana Pembinaan Lembaga Adat yang Disediakan/Difasilitasi	Jumlah Sarana dan Prasarana Lembaga Adat yang Disediakan/Difasilitasi	3 Unit		3 Unit	12.480.000,00	3 Unit	19.776.000,00		0,00	-	0,00	3 Unit	12.480.000,00				Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
DINAS KESEHATAN			424.151.712.408,00	95,54%	167.225.424.920,13		164.982.580.049,00	11,67%	35.751.775.052,00	11,67%	35.751.775.052,00	96%	167.225.424.920,13				
URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR																	
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN		221,80%	424.151.712.408,00	95,54%	167.225.424.920,13	96,85%	164.982.580.049,00	11,67%	35.751.775.052,00	11,67%	35.751.775.052,00	96%	167.225.424.920,13				
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN / KOTA	Persentase pemenuhan urusan penunjang yang dipenuhi	100,00%	376.711.333.207,00	96,43%	143.288.401.649,00	100,00%	143.208.949.110,00	25,00%	31.129.879.902,00	25,00%	31.129.879.902,00	96%	143.288.401.649,00				
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan layanan administrasi keuangan perangkat daerah	100%		100	75.989.283.794,00	100%	71.437.345.942,00	25,00%	18.722.372.668,00	25,00%	18.722.372.668,00	100%	75.989.283.794,00				
Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	1493 Orang/bulan		487 Orang	75.989.283.794,00	493 Orang/bulan	71.437.345.942,00		18.722.372.668,00	-	18.722.372.668,00	487 Orang	75.989.283.794,00				Dinas Kesehatan
Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan layanan administrasi kepegawaian perangkat daerah			100	237.695.000,00		0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	100%	237.695.000,00				
Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan			487	237.695.000,00					-	0,00	48700%	237.695.000,00				Dinas Kesehatan
Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan layanan administrasi umum perangkat daerah	100%		100%	395.753.575,00	95%	358.848.603,00	25,00%	32.842.791,00	25,00%	32.842.791,00	100%	395.753.575,00				
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi listrik/ penerangan bangunan kantor yang disediakan	60 Paket		5 paket	16.307.523,00	5 Paket	7.995.700,00	1 Paket	0,00	1 Paket	0,00	5 paket	16.307.523,00				Dinas Kesehatan
Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah paket bahan logistik kantor yang disediakan	75 Paket		5 paket	87.522.955,00	5 Paket	38.607.091,00	1 Paket	4.945.000,00	1 Paket	4.945.000,00	5 paket	87.522.955,00				Dinas Kesehatan
Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah paket barang cetakan dan Penggandaan yang disediakan	180 Paket		5 paket	30.205.867,00	5 Paket	24.999.550,00	1 Paket	125.000,00	1 Paket	125.000,00	5 paket	30.205.867,00				Dinas Kesehatan
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	24 Laporan		100 laporan	261.717.230,00	100 Laporan	287.246.262,00	20 Laporan	27.772.791,00	20 Laporan	27.772.791,00	100 laporan	261.717.230,00				Dinas Kesehatan

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (output)	Target RPD pada akhir periode Akhir RPD (2026)		Realisasi Capaian Kinerja RPD Sampai Dengan RKPD Tahun Lalu		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun Berjalan (Tahun n-1 = 2024) yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPD s/d Tahun lalu		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPD s/d Tahun lalu (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								I								
4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16				
		K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pemenuhan Barang Milik Daerah sesuai dengan perencanaan	85%		1	1.392.920.000,00	80%	169.099.500,00	25,00%	5.000.000,00	25,00%	5.000.000,00	100%	1.392.920.000,00			
Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan	1 Unit		1 Unit	86.400.000,00	1 Unit	90.000.000,00			-	0,00	1 Unit	86.400.000,00			Dinas Kesehatan
Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau lapangan yang disediakan			12 Unit	863.970.000,00	1 Unit				-	0,00	12 Unit	863.970.000,00			Dinas Kesehatan
Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	21 Unit		9 Unit	442.550.000,00	9 Unit	79.099.500,00	2 Unit	5.000.000,00	2 Unit	5.000.000,00	9 Unit	442.550.000,00			Dinas Kesehatan
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang terpenuhi	100%		100	1.268.428.239,00	100,00%	1.372.315.028,00	25,00%	254.556.925,00	25,00%	254.556.925,00	100%	1.268.428.239,00			
Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	180 Laporan		12 Laporan	5.380.000,00	12 Laporan	2.000.000,00	3 Laporan	0,00	3 Laporan	0,00	12 Laporan	5.380.000,00			Dinas Kesehatan
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	540 Laporan		12 Laporan	179.732.076,00	12 Laporan	234.226.228,00	3 Laporan	36.105.849,00	3 Laporan	36.105.849,00	12 Laporan	179.732.076,00			Dinas Kesehatan
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	226 Laporan		12 Laporan	1.083.316.163,00	12 Laporan	1.136.088.800,00	3 Laporan	218.451.076,00	3 Laporan	218.451.076,00	12 Laporan	1.083.316.163,00			Dinas Kesehatan
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase ketersediaan Barang Milik Daerah berkategori baik	100%		100%	858.075.181,00	95,00%	567.802.800,00	25,00%	61.327.941,00	25,00%	61.327.941,00	100%	858.075.181,00			
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Dinas Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	1 Unit		1 Unit	11.527.200,00	1 Unit	17.008.000,00	1 Unit	1.552.500,00	1 Unit	1.552.500,00	1 Unit	11.527.200,00			Dinas Kesehatan
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	75 Unit		75 Unit	328.378.667,00	75 Unit	450.794.800,00	25 Unit	49.565.441,00	25 Unit	49.565.441,00	75 Unit	328.378.667,00			Dinas Kesehatan
Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	50 Unit		50 Unit	18.255.000,00	50 Unit	50.000.000,00	10 Unit	3.525.000,00	10 Unit	3.525.000,00	50 Unit	18.255.000,00			Dinas Kesehatan
Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	3 Unit		3 Unit	499.914.314,00	3 Unit	50.000.000,00	1 Unit	6.685.000,00	1 Unit	6.685.000,00	3 Unit	499.914.314,00			Dinas Kesehatan
Peningkatan Pelayanan BLUD	Jumlah BLUD yang menyediakan pelayanan dan penunjang pelayanan			75,00%	63.146.245.860,00	1 BLUD	69.303.537.237,00	25,00%	12.053.779.577,00	25,00%	12.053.779.577,00	75%	63.146.245.860,00			
Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan			5 BLUD	63.146.245.860,00	5 Blud	69.303.537.237,00	4 blud	12.053.779.577,00	4 blud	12.053.779.577,00	5 BLUD	63.146.245.860,00			Dinas Kesehatan
PROGRAM PEMENUHAN UPAJA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAJA KESEHATAN MASYARAKAT	Capaian Kinerja UKP dan UKM pada Fasilitas Kesehatan	94%	45.852.379.201,00	87,50%	2.230.358.730.913,00	88%	20.603.765.889,00	25,00%	4.612.295.150,00	25,00%	4.612.295.150,00	87,50%	2.230.358.730.913,00			
Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten / Kota	Persentase Kelengkapan Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan (SPA)	85,00%		75,00%	806.745.931.913,00	80,00%	6.151.685.000,00	25,00%	150.606.100,00	25,00%	150.606.100,00	75%	806.745.931.913,00			

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (output)	Target RPD pada akhir periode Akhir RPD (2026)		Realisasi Capaian Kinerja RPD Sampai Dengan RKPD Tahun Lalu		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun Berjalan (Tahun n-1 = 2024) yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPD s/d Tahun lalu		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPD s/d Tahun lalu (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab			
								I											
4	5	6	Rp	7	Rp	8	Rp	9	Rp	10	Rp	11	Rp	12	Rp	13	14=7/13	15=10/6 x 100%	16
Pembangunan Puskesmas	Jumlah Pusat Kesehatan Masyarakat (Puskesmas) yang Dibangun			0	9.421.400,00	1 Unit	936.000.000,00			-	0,00	0%	9.421.400,00						Dinas Kesehatan
Rehabilitasi dan Pemeliharaan Fasilitas Kesehatan Lainnya	Jumlah Sarana , Prasarana dan Alat Kesehatan yang Telah Dilakukan Rehabilitasi dan Pemeliharaan oleh Fasilitas Kesehatan Lainnya			1 Unit	22.888.000,00					-	0,00	1 Unit	22.888.000,00						Dinas Kesehatan
Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang Disediakan			12 Unit	624.100.000,00					-	0,00	12 Unit	624.100.000,00						Dinas Kesehatan
Pemeliharaan Rutin dan berkala alat kesehatan / alat penunjang medik fasilitas pelayanan kesehatan	Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang terpelihara sesuai standar			0%	80.995.000,00	114 Unit				-	0,00	0%	80.995.000,00						Dinas Kesehatan
pengembangan rumah sakit				0%	5.985.997.500,00		4.261.349.000,00	1 unit		1 unit	0,00	0%	5.985.997.500,00						Dinas Kesehatan
Pengadaan Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai,, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan	Jumlah Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan yang disediakan	1 Paket		5 Paket	132.657.956.913,00	2 Paket	954.336.000,00	1 paket	150.606.100,00	1 paket	150.606.100,00	5 Paket	132.657.956.913,00						Dinas Kesehatan
Distribusi Alat Kesehatan, Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai, Vaksin, Makanan dan Minuman ke Fasilitas Kesehatan	Jumlah distribusi Alat Kesehatan, Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai, Vaksin, Makanan dan Minuman ke Fasilitas Kesehatan			7 paket	17.477.850,00					-	0,00	7 paket	17.477.850,00						Dinas Kesehatan
Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Pencapaian Standar Pelayanan Minimal	82,00%		100,00%	14.236.127.990,00	100,00%	14.431.880.889,00	25,00%	4.461.689.050,00	25,00%	4.461.689.050,00	100%	14.236.127.990,00						
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	3387 Orang		768 Orang	14.437.050,00	935	208.839.800,00	84	0,00	84	0,00	768 Orang	14.437.050,00						Dinas Kesehatan
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	3231 Orang		767 orang	15.827.500,00	935	20.000.100,00	86	0,00	86	0,00	767 orang	15.827.500,00						
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir	Jumlah Bayi Baru Lahir yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	3078 Orang		766 Orang	25.447.000,00	822	20.000.000,00	74	0,00	74	0,00	766 Orang	25.447.000,00						
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita	Jumlah Balita yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	3957 Orang		3234 Orang	14.904.000,00	3501	19.999.700,00	298	0,00	298	0,00	3234 Orang	14.904.000,00						
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	12241 Orang		18479 Orang	20.335.450,00	12975	166.450.000,00	396	0,00	396	0,00	18479 Orang	20.335.450,00						
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif	Jumlah Penduduk Usia Produktif yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	41185 Orang		25224 Orang	12.590.000,00	21274	29.979.000,00	980	0,00	980	0,00	25224 Orang	12.590.000,00						
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut	Jumlah Penduduk Usia Lanjut yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	4928 Orang		4695 Orang	410.254.300,00	5890	381.320.100,00	633	38.200.000,00	633	38.200.000,00	4695 Orang	410.254.300,00						
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi	Jumlah Penderita Hipertensi yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	12234 Orang		4624	30.616.500,00	5904	34.998.800,00	474	0,00	474	0,00	4624	30.616.500,00						

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (output)	Target RPD pada akhir periode Akhir RPD (2026)		Realisasi Capaian Kinerja RPD Sampai Dengan RKPD Tahun Lalu		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun Berjalan (Tahun n-1 = 2024) yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPD s/d Tahun lalu		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPD s/d Tahun lalu (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								I								
								K	Rp							
4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
		K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus	Jumlah Penderita Diabetes Melitus yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	950 Orang		1261 Orang	76.839.190,00	1160	19.997.100,00	137	0,00	137	0,00	1261 Orang	76.839.190,00			Dinas Kesehatan
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar	117 Orang		139 Orang	8.036.100,00	128	42.594.600,00	101	0,00	101	0,00	139 Orang	8.036.100,00			
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	2331 Orang		1624 Orang	204.221.750,00	1400	60.198.100,00	412	0,00	412	0,00	1624 Orang	204.221.750,00			Dinas Kesehatan
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV	Jumlah Orang Terduga Menderita HIV yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	1533 Orang		1955 Orang	22.352.300,00	1533 Orang	25.381.800,00	353	0,00	353	0,00	1955 Orang	22.352.300,00			
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB)	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB) Sesuai Standar	36 Dokumen			0,00	12 Dokumen	10.556.400,00	3	0,00	3	0,00		0,00			
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	60 Dokumen		45 dokumen	873.402.953,00	60 Dokumen	1.370.638.150,00	12	67.952.250,00	12	67.952.250,00	45 dokumen	873.402.953,00			
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	36 Dokumen		12 dokumen	16.009.200,00	4 Dokumen	99.898.400,00		0,00	0	0,00	12 dokumen	16.009.200,00			Dinas Kesehatan
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	36 Dokumen		12 Dokumen	212.223.838,00	12 Dokumen	97.550.000,00		1.010.000,00	0	1.010.000,00	12 Dokumen	212.223.838,00			
Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan			5 Dokumen	100.327.600,00	5 Dokumen	117.156.000,00	3 dokumen	0,00	3 dokumen	0,00	5 Dokumen	100.327.600,00			
Pengelolaan Kesehatan Surveilans	Jumlah dokumen Pengelolaan Surveilans Kesehatan			2	8.114.700,00	12 Dokumen	70.110.000,00	3 dokumen	0,00	3 dokumen	0,00	200%	8.114.700,00			
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK)	Jumlah dokumwnePengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK)					12 Dokumen	25.600.000,00	3 dokumen		3 dokumen	0,00					
Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	48 Dokumen		12 Dokumen	663.798.720,00	12 Dokumen	694.005.600,00	3 dokumen	21.000.000,00	3 dokumen	21.000.000,00	12 Dokumen	663.798.720,00			
Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	180 Dokumen		15 Dokumen	8.419.583.216,00	15 Dokumen	8.631.176.692,00	4 dokumen	4.196.686.800,00	4 dokumen	4.196.686.800,00	15 Dokumen	8.419.583.216,00			Dinas Kesehatan
pengambilan dan Pengiriman Spesimen Penyakit Potensila KLB ke Laboratorium Rujukan / Nasional				4 spec	779.380,00	12 Dokumen	5.380.000,00	3 dokumen	0,00	3 dokumen	0,00	4 spec	779.380,00			
Penyelenggaraan Kabupaten/Kota Sehat	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Kabupaten/Kota Sehat	1 Dokumen		1 Dokumen	27.054.838,00	1 Dokumen	50.000.000,00		0,00	0	0,00	1 Dokumen	27.054.838,00			
Operasional Pelayanan Puskesmas	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	36 Dokumen		48 Dokumen	2.066.631.275,00	48 Dokumen	715.796.000,00	12 dokumen		12 dokumen	0,00	48 Dokumen	2.066.631.275,00			

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (output)	Target RPD pada akhir periode Akhir RPD (2026)		Realisasi Capaian Kinerja RPD Sampai Dengan RKPD Tahun Lalu		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun Berjalan (Tahun n-1 = 2024) yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPD s/d Tahun lalu		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPD s/d Tahun lalu (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								I								
4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14=7x11	15=14/6 x 100%	16				
		K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya	4 Unit		8 Dokumen	65.917.250,00	8 Dokumen	132.272.000,00	2 dokumen	1.819.000,00	2 dokumen	1.819.000,00	8 Dokumen	65.917.250,00			Dinas Kesehatan
Pelaksanaan Akreditasi Fasilitas Kesehatan di Kabupaten/Kota	Jumlah Fasilitas Kesehatan yang Terakreditasi di Kabupaten/Kota			12 Faskes	34.633.150,00	12 Faskes	10.000.100,00		0,00	0	0,00	12 Faskes	34.633.150,00			
Investigasi Awal Kejadian Tidak diharapkan (kejadian Ikutan pasca imunisasi dan pemberian obat masal)					7.900.000,00					0	0,00		7.900.000,00			
Penyediaan dan Pengelolaan Sistem Penanganan Gawat Darurat Terpadu (SPGDT)	Jumlah Public Safety Center (PSC 119) Tersediaan, Terkelolaan dan Terintegrasi Dengan Rumah Sakit Dalam Satu Sistem Penanganan Gawat Darurat Terpadu (SPGDT)	1 Unit		1 Unit	849.893.480,00	1 Unit	918.691.447,00	1 Unit	135.021.000,00	1 Unit	135.021.000,00	1 Unit	849.893.480,00			
Pengelolaan pelayanan kesehatan malaria				0	1.704.000,00					0	0,00	0%	1.704.000,00			
Pengelolaan pelayanan kesehatan Reproduksi						12 Dokumen	40.576.000,00	3 Dokumen		3 Dokumen	0,00					
Pengelolaan upaya kesehatan ibu dan anak				0	32.293.250,00	12 Dokumen	280.415.000,00	3 Dokumen	0,00	3 Dokumen	0,00	0%	32.293.250,00			
Pengelolaan Pelayanan Kelanjutan						12 Dokumen	37.000.000,00	3 Dokumen		3 Dokumen	0,00					
Pengelolaan Layanan Imunisasi						12 Dokumen	95.300.000,00	3 Dokumen		3 Dokumen	0,00					
Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan Secara Terintegrasi				0,00%	0,00	1Dokumen	20.200.000,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0%	0,00			
Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan				0		1Dokumen	20.200.000,00		0,00	0	0,00					Dinas Kesehatan
PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN	Indeks Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan	725,00%	94.000.000,00	100%	921.366.912,00	65 Indeks	380.252.800,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	100%	921.366.912,00			
Kegiatan Pemberian Izin Praktik Tenaga Kesehatan di Wilayah Kabupaten/Kota	Persentase pemberian rekomendasi izin praktik Tenaga Kesehatan			100%	1.188.600,00	90,00%	10.000.300,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	100%	1.188.600,00			
Pembinaan dan Pengawasan Tenaga Kesehatan serta Tindak Lanjut Perizinan Praktik Tenaga Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan dan Pengawasan Tenaga Kesehatan serta Tindak Lanjut Perizinan Praktik Tenaga Kesehatan	111 Dokumen		61 Dokumen	1.188.600,00	37 Dokumen	10.000.300,00		0,00	0	0,00	61 Dokumen	1.188.600,00			Dinas Kesehatan
Perencanaan kebutuhan dan pendayagunaan sumber daya manusia kesehatan untuk UKP dan UKM di wilayah kabupaten / kota				100,00%	38.351.300,00	90,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	100%	38.351.300,00			
pembinaan dan pengawasan sumber daya manusia kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan dan Pengawasan Sumber Daya Manusia Kesehatan			12 Dokumen	38.351.300,00					0	0,00	12 Dokumen	38.351.300,00			Dinas Kesehatan
Kegiatan Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten / Kota	Persentase Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan			1	881.827.012,00	40,00%	370.252.500,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	100%	881.827.012,00			

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (output)	Target RPD pada akhir periode Akhir RPD (2026)		Realisasi Capaian Kinerja RPD Sampai Dengan RKPD Tahun Lalu		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun Berjalan (Tahun n-1 = 2024) yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPD s/d Tahun lalu		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPD s/d Tahun lalu (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								I								
4	5	6		7		8		9		11		12	13	14=7x11	15=14/6 x 100%	16
		K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota yang ditingkatkan Mutu dan Kompetensinya	Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota yang ditingkatkan Mutu dan Kompetensinya	150 Orang		51 orang	881.827.012,00	80 Orang	370.252.500,00		0,00	0	0,00	51 orang	881.827.012,00			Dinas Kesehatan
PROGRAM SEDIAAN FARMASI, ALAT KESEHATAN DAN MAKANAN MINUMAN	Indeks pembinaan dan pengawasan izin dan sertifikasi sediaan Farmasi alat kesehatan dan makan minum	90,00%	114.000.000,00	94%	347.799.550,00	767 indeks	415.250.250,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	94%	347.799.550,00			
Pemberian Izin Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)	Persentase pemberian rekomendasi izin Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)			100,00%	48.417.650,00	85,00%	70.641.300,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	100%	48.417.650,00			
Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Perizinan Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan, dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)	Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Perizinan Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan, dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)	90 Dokumen		80 Dokumen	48.417.650,00	80 sarana	70.641.300,00		0,00	0	0,00	80 Dokumen	48.417.650,00			Dinas Kesehatan
Penerbitan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga	Persentase Rekomendasi Penerbitan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga			83,57%	144.944.700,00	85,00%	132.963.500,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	83,57%	144.944.700,00			
Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga	Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang Dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga	90 Dokumen		45 P-IRT	144.944.700,00	70 P-IRT	132.963.500,00		0,00	0	0,00	45 P-IRT	144.944.700,00			Dinas Kesehatan
Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Post Market pada Produksi dan Produk Makanan Minuman Industri Rumah Tangga	Persentase Pelaksanaan Pemeriksaan Produk dan Sarana Produk Makanan minuman Industri Rumah Tangga			98%	154.437.200,00	70,00%	211.645.450,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	98%	154.437.200,00			
Pemeriksaan Post Market pada Produk Makanan-Minuman Industri Rumah Tangga yang Beredar dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan	Jumlah Produk dan Sarana Produksi Makanan-Minuman Industri Rumah Tangga yang Beredar dan Pemeriksaan Post Market dalam rangka Tindak Lanjut Pengawasan	90 Dokumen		68 Sampel	154.437.200,00	30 Sampel, 70 sasaran	211.645.450,00		0,00	0	0,00	68 Sampel	154.437.200,00			Dinas Kesehatan
PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	Persentase upaya kesehatan bersumber masyarakat yang aktif	100%	1.380.000.000,00	100,00%	364.269.500,00	96,25%	374.362.000,00	8,33%	9.600.000,00	8,33%	9.600.000,00	100%	364.269.500,00			

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (output)	Target RPD pada akhir periode Akhir RPD (2026)		Realisasi Capaian Kinerja RPD Sampai Dengan RKPd Tahun Lalu		Target Kinerja dan Anggaran RKPd Tahun Berjalan (Tahun n-1 = 2024) yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPd yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPD s/d Tahun lalu		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPD s/d Tahun lalu (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
								I									
								K	Rp								
4	5	6	Rp	7	Rp	8	Rp	9	Rp	10	Rp	11	Rp	12	13	14=12/6 x 100%	15
Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan peran serta Masyarakat dan Lintas sektor tingkat daerah Kabupaten/ Kota	Jumlah Kegiatan Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Kota			5 Kegiatan	256.466.450,00	5 Kegiatan	238.400.000,00	25,00%	9.600.000,00	25,00%	9.600.000,00	5 Kegiatan	256.466.450,00				
Peningkatan upaya promosi kesehatan, advokasi, kemitraan dan pemberdayaan masyarakat	Jumlah Dokumen Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat	36 Dokumen		12 Dokumen	256.466.450,00	12 Dokumen	238.400.000,00		9.600.000,00	0	9.600.000,00	12 Dokumen	256.466.450,00				
Pelaksanaan Sehat dalam rangka Promotif Preventif Tingkat Kabupaten/Kota	Jumlah Kelurahan yg mengikuti Germas			16 Kelurahan	12.513.050,00	16 Kelurahan	25.000.000,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	16 Kelurahan	12.513.050,00				
Penyelenggaraan Promosi Kesehatan dan Gerakan Hidup Bersih dan Sehat	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Promosi Kesehatan dan Gerakan Hidup Bersih dan Sehat	36 Dokumen		1 Dokumen	12.513.050,00	1 Dokumen	25.000.000,00		0,00	0	0,00	1 Dokumen	12.513.050,00				Dinas Kesehatan
Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota	Jumlah Kelurahan yg mengikuti Germas			16 Kelurahan	95.290.000,00	16 Kelurahan	110.962.000,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	16 Kelurahan	95.290.000,00				
Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	Jumlah Dokumen Hasil dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)			4 Dokumen	95.290.000,00	1 dokumen	110.962.000,00		0,00	0	0,00	4 Dokumen	95.290.000,00				Dinas Kesehatan
DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG			81.826.147.175,00	93,73%	21.368.287.487,47	100,00%	18.920.888.286,00	2,50%	2.041.928.615,00	2,50%	2.041.928.615,00	93,73%	21.368.287.487,47				
URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR																	
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG		1105,11%	81.826.147.175,00	93,73%	21.368.287.487,47	100,00%	18.908.238.286,00	5%	2.041.928.615,00	5,00%	2.041.928.615,00	93,73%	21.368.287.487,47				
Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Pemenuhan urusan Penunjang yang dipenuhi	100,00%	18.954.939.375,00	100,00%	7.523.111.575,00	100,00%	7.420.743.606,00	25,00%	1.777.911.115,00	25,00%	1.777.911.115,00	100%	7.523.111.575,00				
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan layanan keuangan Perangkat Daerah			1	6.446.985.362,00	100,00%	6.187.243.606,00	25,00%	1.596.911.855,00	25,00%	1.596.911.855,00	100%	6.446.985.362,00				
Penyediaan Gaji dan Tunjangan	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	1974 Orang/bulan		423 orang / bulan	6.446.985.362,00	658 Orang/bulan	6.187.243.606,00	147	1.596.911.855,00	147	1.596.911.855,00	423 orang / bulan	6.446.985.362,00				Dinas PUPR
Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan layanan administrasi kepegawaian perangkat daerah			100%	20.650.000,00		0,00		0,00	0,00%	0,00	100%	20.650.000,00				
Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	141 Paket		59 Paket	20.650.000,00	47 Paket			0	0,00	0,00	59 Paket	20.650.000,00				Dinas PUPR
Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan layanan administrasi umum perangkat daerah			100,00%	284.682.434,00	100,00%	327.000.000,00	25,00%	49.819.972,00	25,00%	49.819.972,00	100%	284.682.434,00				
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	12 Paket		4 Paket	3.252.100,00	4 Paket	6.500.000,00	1	0,00	1	0,00	4 Paket	3.252.100,00				Dinas PUPR
Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	12 Paket		4 Paket	34.545.400,00	4 Paket	50.000.000,00	1	170.000,00	1	170.000,00	4 Paket	34.545.400,00				Dinas PUPR
Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	36 Paket		12 Paket	9.813.900,00	12 Paket	20.500.000,00	0	180.000,00	0	180.000,00	12 Paket	9.813.900,00				Dinas PUPR

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (output)	Target RPD pada akhir periode Akhir RPD (2026)		Realisasi Capaian Kinerja RPD Sampai Dengan RKPD Tahun Lalu		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun Berjalan (Tahun n-1 = 2024) yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPD s/d Tahun lalu		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPD s/d Tahun lalu (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								I								
								K	Rp							
4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14=7x13	15=14/6 x 100%	16				
		K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp			
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	72 Laporan		24 Laporan	237.071.034,00	24 Laporan	250.000.000,00	0	49.469.972,00	0	49.469.972,00	24 Laporan	237.071.034,00			Dinas PUPR
Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pemenuhan Barang Milik Daerah sesuai dengan perencanaan			100,00%	154.642.850,00		0,00		0,00	0,00%	0,00	100%	154.642.850,00			
Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan			6 unit	154.642.850,00				0		0,00	6 unit	154.642.850,00			Dinas PUPR
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang Terpenuhi			100,00%	300.401.716,00	100,00%	317.000.000,00	25,00%	79.416.788,00	25,00%	79.416.788,00	100%	300.401.716,00			
Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	36 Laporan		12 Laporan	3.740.000,00	12 Laporan	4.000.000,00		250.000,00	0	250.000,00	12 Laporan	3.740.000,00			Dinas PUPR
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	108 Laporan		36 Laporan	20.161.684,00	36 Laporan	20.500.000,00		4.626.788,00	0	4.626.788,00	36 Laporan	20.161.684,00			Dinas PUPR
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	13 Laporan		13 Laporan	276.500.032,00	13 Laporan	292.500.000,00		74.540.000,00	0	74.540.000,00	13 Laporan	276.500.032,00			Dinas PUPR
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase ketersediaan Barang Milik Daerah berkategori baik	90,00%		100,00%	315.749.213,00	90,00%	589.500.000,00	25,00%	51.762.500,00	25,00%	51.762.500,00	100%	315.749.213,00			
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaran Dinas Perorangan Dinas atau Kendaran Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	1 Unit		1 Unit	47.289.900,00	1 Unit	45.500.000,00		7.258.000,00	0	7.258.000,00	1 Unit	47.289.900,00			Dinas PUPR
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaran Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	30 Unit		30 Unit	250.091.221,00	30 Unit	250.000.000,00		43.493.500,00	0	43.493.500,00	30 Unit	250.091.221,00			Dinas PUPR
Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	6 Unit		6 Unit	12.943.842,00	6 Unit	40.000.000,00		1.011.000,00	0	1.011.000,00	6 Unit	12.943.842,00			Dinas PUPR
Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya	Jumlah Aset Tetap Lainnya yang Dipelihara	1 Unit		1 Unit	2.730.000,00	1 Unit	4.000.000,00		0,00	0	0,00	1 Unit	2.730.000,00			Dinas PUPR
Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit		1 Unit	2.694.250,00	1 Unit	250.000.000,00		0,00	0	0,00	1 Unit	2.694.250,00			Dinas PUPR
Program Pengelolaan Sumber Daya Air (SDA)	Persentase jaringan irigasi dengan kondisi baik	23,61%	1.350.000.000,00	98,57%	367.925.297.865,00	22,82 %	2.491.358.910,00	5,00%	43.859.000,00	5,00%	43.859.000,00	9856694%	367.925.297.865,00			
	Persentase panjang sungai yang dikonservasi	75,52%		25,00%	0,00	72,96 %				0,00%	0,00	25%	0,00			
Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai (WS) dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Panjang Sungai yang Dinormalisasi/Direstorasi	0,45km		0,72 km	242.919.100,00	0,2 km	935.000.000,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,72 km	242.919.100,00			
Normalisasi/Restorasi Sungai	Panjang Sungai yang Dinormalisasi/Direstorasi	0,45 KM		0,72 km	242.919.100,00	1,2 KM	935.000.000,00		0,00	0	0,00	072 km	242.919.100,00			Dinas PUPR

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (output)	Target RPD pada akhir periode Akhir RPD (2026)		Realisasi Capaian Kinerja RPD Sampai Dengan RKPD Tahun Lalu		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun Berjalan (Tahun n-1 = 2024) yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPD s/d Tahun lalu		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPD s/d Tahun lalu (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								I								
								K	Rp							
4	5	6	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	16
Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Primer dan Sekunder pada Daerah Irigasi yang Luasnya di Bawah 1000 Ha dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah panjang Irigasi yang ditingkatkan dan dipelihara	7,5km		343.633.387.865,00		2,5 km	1.556.358.910,00	3,00%	43.859.000,00	3,00%	43.859.000,00		343.633.387.865,00			
Peningkatan Jaringan Irigasi Permukaan	Panjang Jaringan Irigasi Permukaan yang Ditingkatkan	1,5 KM		163.479.127.265,00		0,6 KM				0	0,00	1,8 KM	163.479.127.265,00			Dinas PUPR
Rehabilitasi Jaringan Irigasi Permukaan	Panjang Jaringan Irigasi Permukaan yang Direhabilitasi	6 KM		1.720.874.856,00		0,8 KM	1.556.358.910,00		43.859.000,00	0	43.859.000,00	1,5 KM	1.720.874.856,00			Dinas PUPR
Penyusunan Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Irigasi dan Rawa	Jumlah Dokumen Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Irigasi dan Rawa yang Disusun			80.667.750,00						0	0,00	1 Dokumen	80.667.750,00			Dinas PUPR
Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum	Persentase Rumah Tangga dengan Akses Berkelanjutan Terhadap Air Minum Layak	8772,00%	650.000.000,00	100,00%	156.821.000,00	100,00%	200.500.000,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	100%	156.821.000,00			
Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Kabupaten/Kota	Jumlah Sambungan Rumah Tangga dari Unit Spam yang dibangun	300SR		68 SR	156.821.000,00	100SR	200.500.000,00	0,00%	0,00	68 SR	0,00	68 SR	156.821.000,00			
Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM)	Jumlah Dokumen Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) yang disusun	1 Dokumen		0	0,00					0	0,00	0%	0,00			Dinas PUPR
Perluasan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan	Jumlah Sambungan Rumah yang terlayani oleh perluasan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan	300 SR		68 SR	156.821.000,00	100 SR	200.500.000,00		0,00	0	0,00	68 SR	156.821.000,00			
Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Limbah	Persentase rumah tinggal yang bersantitas layak	913,00%	1.497.355.500,00	99,38%	418.292.450,00	100,00%	872.731.600,00	5,00%	20.218.500,00	5,00%	20.218.500,00	99,38%	418.292.450,00			
Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah sambungan rumah Dilayani dengan sistem pengelolaan air limbah domestik	60RUMAH TANGGA		20 rumah tangga	418.292.450,00	20 RUMAH TANGGA	872.731.600,00	5,00%	20.218.500,00	20 rumah tangga	20.218.500,00	20 rumah tangga	418.292.450,00			
Peningkatan Instalasi Pengolahan Lumpur Tinja (IPLT)	Kapasitas Instalasi Pengolahan Lumpur Tinja (IPLT) yang ditingkatkan	15 M³/Hari				0 M³/Hari	177.500.000,00			0	0,00					Dinas PUPR
Pembangunan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) Terpusat Skala Permukiman	Kapasitas Sistem Pengelola an Air Limbah Domestik (SPALD) Terpusat Skala Permukiman yang dibangun	7,5 M³/Hari		5 M³/Hari	223.231.400,00	2,5 M³/Hari	411.920.000,00			0	0,00	5 M³/Hari	223.231.400,00			Dinas PUPR
Pembangunan Instalasi Pengolahan Lumpur Tinja (IPLT) Terbangun	Kapasitas Instalasi Pengolahan Lumpur Tinja (IPLT) Terbangun			2,5 M³/Hari	97.122.000,00	0 M³/Hari				0	0,00	2,5 M³/Hari	97.122.000,00			Dinas PUPR
Operasi dan Pemeliharaan Sistem Pengolahan Air Limbah Domestik (SPALD)	Jumlah Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) yang Dioperasikan dan Dipelihara	1 Unit		1 Unit	97.939.050,00	1 Unit	283.311.600,00		20.218.500,00	0	20.218.500,00	1 Unit	97.939.050,00			

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (output)	Target RPD pada akhir periode Akhir RPD (2026)		Realisasi Capaian Kinerja RPD Sampai Dengan RKPD Tahun Lalu		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun Berjalan (Tahun n-1 = 2024) yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPD s/d Tahun lalu		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPD s/d Tahun lalu (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								I								
4	5	6	Rp	7	Rp	8	Rp	9	Rp	10	Rp	11	Rp	12=10/6 x 100%	13	16
Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD)	Jumlah Dokumen Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) yang disusun	1 Dokumen		1 Dokumen	0,00	0 Dokumen				0	0,00	1 Dokumen	0,00			Dinas PUPR
Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase	Persentase Drainase Dalam Kondisi Baik	87,92 %	9.670.424.650,00	94%	3.078.503.638,00	87,92 %	3.940.773.850,00	5,00%	105.082.000,00	5,00%	105.082.000,00	94%	3.078.503.638,00			
Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase yang Terhubung Langsung dengan Sungai dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Panjang drainase perkotaan yang ditingkatkan dan dipelihara	6Sistem Drainase		2100 meter	3.078.503.638,00	2 Sistem Drainase	3.940.773.850,00	5,00%	105.082.000,00	2100 meter	105.082.000,00	2100 meter	3.078.503.638,00			
Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Drainase Lingkungan	Jumlah Dokumen Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Drainase Lingkungan yang disusun	1 Dokumen								0	0,00					Dinas PUPR
Peningkatan Sistem Drainase Perkotaan	Jumlah Sistem Drainase Perkotaan yang Ditingkatkan	1 Sistem Drainase Perkotaan		1 Sistem Drainase	1.424.649.275,00	6 Sistem Drainase Perkotaan	2.157.224.600,00		0,00	0	0,00	1 Sistem Drainase	1.424.649.275,00			Dinas PUPR
Operasi dan Pemeliharaan Sistem Drainase Perkotaan	Jumlah Sistem Drainase Perkotaan yang Beroperasi dan Terpelihara	1 Sistem Drainase Perkotaan		1 Sistem Drainase	1.653.854.363,00	1 Sistem Drainase Perkotaan	1.783.549.250,00		105.082.000,00	0	105.082.000,00	1 Sistem Drainase	1.653.854.363,00			Dinas PUPR
Program Penataan Bangunan Gedung	Persentase Bangunan Ber IMB	46,67%	27.300.000.000,00	97,00%	447.303.000,00	46,39 %	557.500.000,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	97%	447.303.000,00			
Penyelenggaraan Bangunan Gedung di Wilayah Daerah Kabupaten/Kota, Pemberian Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dan Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung	Jumlah Penyelenggaraan Bangunan Gedung serta Pemberian PBG sesuai dengan standar yang berlaku	150unit		39 unit	447.303.000,00	50 unit	557.500.000,00	0,00%	0,00	39 unit	0,00	39 unit	447.303.000,00			
Pemeliharaan, Perawatan, dan Pemeriksaan Berkala Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Kabupaten/Kota yang Dipelihara, Dirawat, dan Diperiksa Berkala	6 Bangunan Gedung		2 Bangunan Gedung	436.605.000,00	2 Bangunan Gedung	507.500.000,00		0,00	0	0,00	2 Bangunan Gedung	436.605.000,00			Dinas PUPR
Penyelenggaraan Penerbitan Persetujuan Bangunan Gedung (PBG), Sertifikat Laik Fungsi (SLF), Surat Bukti Kepemilikan Bangunan Gedung (SBKBG), Rencana Teknis Pembongkaran Bangunan Gedung (RTB), Tim Profesi Ahli (TPA), Tim Penilai Teknis (TPT), Penilik, dan Pendataan Bangunan Gedung melalui SIMBG	Jumlah Penerbitan Persetujuan Bangunan Gedung (PBG), Sertifikat Laik Fungsi (SLF), Surat Bukti Kepemilikan Bangunan Gedung (SBKBG), Rencana Teknis Pembongkaran Bangunan Gedung (RTB), Tim Profesi Ahli (TPA), Tim Penilai Teknis (TPT), Penilik, dan Pendataan Bangunan Gedung melalui SIMBG	150 Dokumen		50 Dokumen	10.698.000,00	50 Dokumen	50.000.000,00		0,00	0	0,00	50 Dokumen	10.698.000,00			Dinas PUPR
Program Penyelenggaraan Jalan	Persentase jalan dan jembatan dalam kondisi baik	95,00%	21.221.025.000,00	76,22%	557.191.602.581,00	95,87 %	2.762.428.370,00	5,00%	94.858.000,00	5,00%	94.858.000,00	76,22%	557.191.602.581,00			

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (output)	Target RPD pada akhir periode Akhir RPD (2026)		Realisasi Capaian Kinerja RPD Sampai Dengan RKPd Tahun Lalu		Target Kinerja dan Anggaran RKPd Tahun Berjalan (Tahun n-1 = 2024) yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPd yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPD s/d Tahun lalu		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPD s/d Tahun lalu (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								I								
4	5	6	Rp	7	Rp	8	Rp	9	Rp	10	Rp	11	Rp	12=7x13	13=14/6 x 100%	14
Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Tata Ruang Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah dokumen RRTR yang disusun	2 Dokumen		1 Dokumen	36.015.899.501,00	0 dokumen	303.164.000,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	1 Dokumen	36.015.899.501,00			
Penyusunan RDRD Kabupaten/Kota	Jumlah materi teknis dan ranperkada RDRD Kabupaten/Kota	1 Dokumen		1 Dokumen	36.015.899.501,00	0 Dokumen	303.164.000,00	0,00	0	0,00	0,00	1 Dokumen	36.015.899.501,00			Dinas PUPR
Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah dokumen data dan informasi yang dihasilkan sistem informasi tata ruang	4 Dokumen		1 Dokumen	79.242.450,00	1 dokumen	52.900.000,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	1 Dokumen	79.242.450,00			
Pelaksanaan Sinkronisasi Program Pemanfaatan Ruang	Jumlah dokumen sinkronisasi program pemanfaatan ruang	1 Dokumen		1 Dokumen	16.425.350,00	0 Dokumen			0	0,00	0,00	1 Dokumen	16.425.350,00			Dinas PUPR
Sistem informasi dan komunikasi penataan ruang	Jumlah sistem informasi dan komunikasi penataan ruang			1 Dokumen	62.817.100,00	1 Sistem Informasi	52.900.000,00	0,00	0	0,00	0,00	1 Dokumen	62.817.100,00			Dinas PUPR
Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah dokumen penertiban dan penegakan hukum bidang tata ruang yang dilaksanakan	10 Dokumen		1 Dokumen	7.346.875,00	3 dokumen	39.137.950,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	1 Dokumen	7.346.875,00			
Koordinasi Pelaksanaan Penataan Ruang	Jumlah Dokumen Koordinasi Pelaksanaan Penataan Ruang			1 Dokumen	7.346.875,00				0	0,00	0,00	1 Dokumen	7.346.875,00			Dinas PUPR
Operasionalisasi Tugas dan Fungsi Forum Penataan Ruang	Jumlah Laporan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Forum Penataan Ruang	6 Laporan				2 Laporan	16.827.950,00		0,00	0	0,00					Dinas PUPR
Pengawasan TURBINLAK dan Pengawasan Fungsi dan Manfaat	Dokumen hasil Penilaian kinerja Pengaturan, Pembinaan dan Pelaksanaan Penataan Ruang dan Penilaian Kinerja Fungsi dan Manfaat	3 Dokumen				1 Dokumen	22.310.000,00	0,00	0	0,00	0,00					Dinas PUPR
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANAHAN		0,00%	0,00			100,00%	12.650.000,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0%				
PROGRAM PENATAGUNAAN TANAH	Persentase sertifikat aset tanah dan bangunan pemerintah kota	0,00%	0,00			85,00%	12.650.000,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0%				
Penggunaan Tanah yang Hamparannya dalam satu Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah sertifikat infrastruktur ke-PU an yang diterbitkan					50 sertifikat	12.650.000,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0%				
Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Penggunaan Tanah	Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Penggunaan Tanah dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota					5 laporan	12.650.000,00		0,00	0	0,00					Dinas PUPR
DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PEMUKIMAN DAN LINGKUNGAN HIDUP			45.162.024.928,00	95%	28.988.237.175,00	100,00%	27.186.922.319,00	14,20%	4.195.614.539,00	14,20%	4.195.614.539,00	95%	28.988.237.175,00			
URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR																
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN			19.816.913.105,00	99%	18.023.629.188,00	100%	15.835.087.697,00	11%	2.011.466.834,00	11,25%	2.011.466.834,00	99%	18.023.629.188,00			
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA	Persentase pemenuhan urusan penunjang yang dipenuhi	90,00%	17.865.567.265,00	100,00%	7.747.048.145,00	100,00%	7.409.333.081,00	20%	1.966.159.212,00	20,00%	1.966.159.212,00	100%	7.747.048.145,00			
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan layanan administrasi keuangan perangkat daerah	100%		100%	6.286.406.537,00	100%	5.856.711.547,00	25,00%	1.505.234.765,00	25,00%	1.505.234.765,00	100%	6.286.406.537,00			
Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Persentase pembayaran gaji dan penyusunan laporan keuangan yang tepat waktu	2016 Orang/bulan		188 orang / bulan	6.286.406.537,00	658 Orang/bulan	5.856.711.547,00	188	1.505.234.765,00	188	1.505.234.765,00	188 orang / bulan	6.286.406.537,00			Dinas Perkim LH

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (output)	Target RPD pada akhir periode Akhir RPD (2026)		Realisasi Capaian Kinerja RPD Sampai Dengan RKPD Tahun Lalu		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun Berjalan (Tahun n-1 = 2024) yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPD s/d Tahun lalu		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPD s/d Tahun lalu (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
								I						15=146 x 100%			
								K	Rp					K	Rp		K
4	5	6	Rp	7	Rp	8	Rp	9	Rp	10	Rp	11	Rp	12	13	14	16
Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan layanan administrasi kepegawaian perangkat daerah			100%	23.500.000,00		0,00		0,00	0,00%	0,00	100%	23.500.000,00				
Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan			48 paket	23.500.000,00					0	0,00	48 paket	23.500.000,00				Dinas Perkim LH
Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan layanan administrasi umum perangkat daerah	90%		100%	515.247.389,00	90%	479.642.034,00	25,00%	46.087.283,00	25,00%	46.087.283,00	100%	515.247.389,00				
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	24 Paket		21 paket	7.308.300,00	8 Paket	8.632.700,00		0,00	0	0,00	21 paket	7.308.300,00				Dinas Perkim LH
Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	24 Paket		60 paket	69.595.745,00	14 Paket	82.782.684,00	3 Paket	10.712.200,00	3 Paket	10.712.200,00	60 paket	69.595.745,00				Dinas Perkim LH
Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	72 Paket		15 paket	17.623.650,00	24 Paket	21.372.650,00	6 Paket	2.565.950,00	6 Paket	2.565.950,00	15 paket	17.623.650,00				Dinas Perkim LH
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	72 Laporan		1 laporan	420.719.694,00	24 Laporan	366.854.000,00	6 Laporan	32.809.133,00	6 Laporan	32.809.133,00	1 laporan	420.719.694,00				Dinas Perkim LH
Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase pemenuhan barang milik daerah sesuai dengan perencanaan	90%		100%	133.575.000,00	90%	118.483.400,00		0,00	0,00%	0,00	100%	133.575.000,00				
Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	9 Unit		3 unit	133.575.000,00	7 Unit	118.483.400		0,00	0	0,00	3 unit	133.575.000,00				Dinas Perkim LH
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	persentase penyediaan jasa penunjang urusan pemerintah daerah yang terpenuhi	90%		100%	555.244.426,00	90%	629.065.100,00	25,00%	119.146.964,00	25,00%	119.146.964,00	100%	555.244.426,00				
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	180 Laporan		1 laporan	42.362.979,00	60 Laporan	60.587.500,00	15 Laporan	13.681.603,00	15 Laporan	13.681.603,00	1 laporan	42.362.979,00				Dinas Perkim LH
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	72 Laporan		1 laporan	512.881.447,00	24 Laporan	568.477.600,00	6 Laporan	105.465.361,00	6 Laporan	105.465.361,00	1 laporan	512.881.447,00				Dinas Perkim LH
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase ketersediaan barang milik Daerah berkondisi baik	95%		100%	233.074.793,00	95%	325.431.000,00	25,00%	295.690.200,00	25,00%	295.690.200,00	100%	233.074.793,00				
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Perorangan Dinas atau Kendaraan Perorangan Dinas yang Dipelihara dan atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Dinas Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	1 Unit		1 unit	28.310.400,00	1 Unit	41.690.000,00	1 Unit	3.690.900,00	1 Unit	3.690.900,00	1 unit	28.310.400,00				Dinas Perkim LH
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Perorangan Dinas atau Kendaraan Perorangan Dinas yang Dipelihara dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	12 Unit		10 unit	121.124.800,00	14 Unit	173.525.000,00	14 Unit	181.783.300,00	14 Unit	181.783.300,00	10 unit	121.124.800,00				Dinas Perkim LH
Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	30 Unit		5 unit	9.500.660,00	65 Unit	35.320.000,00	4 Unit	35.320.000,00	4 Unit	35.320.000,00	5 unit	9.500.660,00				Dinas Perkim LH
Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	3 Unit		2 unit	74.138.933,00	3 Unit	74.896.000,00		74.896.000,00	0	74.896.000,00	2 unit	74.138.933,00				Dinas Perkim LH

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (output)	Target RPD pada akhir periode Akhir RPD (2026)		Realisasi Capaian Kinerja RPD Sampai Dengan RKPD Tahun Lalu		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun Berjalan (Tahun n-1 = 2024) yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPD s/d Tahun lalu		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPD s/d Tahun lalu (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
								I										
4	5	6	Rp	7	Rp	8	Rp	9	Rp	10	Rp	11	Rp	12=10/6 x 100%	13=10/6 x 100%	14	15	16
PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN	Persentase rumah korban bencana atau relokasi program pemerintah yang tertangani	100,00%	901.305.840	100,00%	435.172.992,00	100,00%	438.265.500,00	25,00%	45.307.622,00	25,00%	45.307.622,00	100%	435.172.992,00					
Pendataan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota	Jumlah dokumen penyediaan hunian dan rehabilitasi rumah korban bencana atau relokasi program pemerintah	6 dokumen				2 dokumen	51.723.450,00		0,00	0,00%	0,00							
Identifikasi Perumahan di Lokasi Rawan Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Data Rumah di Lokasi Rawan Bencana Kabupaten/Kota	3 Dokumen				1 Dokumen	51.723.450,00		0,00	0	0,00							Dinas Perkim LH
Pembangunan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota	Jumlah rumah korban bencana dan terkena relokasi program pemerintah	12 unit		0	0,00	4 unit	43.030.000,00		0,00	0,00%	0,00	0%	0,00					
Rehabilitasi Rumah bagi Korban Bencana	Jumlah Rumah Korban Bencana Kabupaten/Kota yang Terehabilitasi	6 Unit Rumah		0	0,00	2 Unit Rumah	43.030.000,00		0,00	0	0,00	0%	0,00					Dinas Perkim LH
Pembangunan Rumah Khusus beserta PSU bagi Masyarakat yang Terkena Relokasi Program Kabupaten/Kota	Jumlah Rumah Khusus beserta PSU bagi Masyarakat yang Terkena Relokasi Program Kabupaten/Kota	6 Unit Rumah		0	0,00	0 Unit Rumah				0	0,00	0%	0,00					
Pembinaan Pengelolaan Rumah Susun Umum dan/atau Rumah Khusus	Jumlah laporan hasil fasilitasi pengelolaan kelembagaan bagi pemilik/penghuni rumah susun	3 dokumen		1 Laporan	435.172.992,00	1 dokumen	343.512.050,00		45.307.622,00	0,00%	45.307.622,00	1 Laporan	435.172.992,00					
Fasilitasi Pengelolaan Kelembagaan dan Pemilik/Penghuni Rumah Susun	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Pengelolaan Kelembagaan bagi Pemilik/Penghuni Rumah Susun	3 Laporan		1 Laporan	435.172.992,00	1 Laporan	343.512.050,00		45.307.622,00	0	45.307.622,00	1 Laporan	435.172.992,00					Dinas Perkim LH
PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN	Persentase pengurangan kawasan kumuh	100,00%	405.000.000,00	95,00%	81.462.350,00		0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	95%	81.462.350,00					
Penataan dan Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha	Jumlah dokumen kebijakan kawasan kumuh yang tersedia			1 dokumen	81.462.350,00		0,00		0,00	0,00%	0,00	1 dokumen	81.462.350,00					
Penyusunan/Review/Legalisasi Kebijakan Bidang PKP	Jumlah Dokumen Kebijakan PKP yang Tersusun/Tereview/Terlegalisasi			1 Dokumen	81.462.350,00					0	0,00	1 Dokumen	81.462.350,00					Dinas Perkim LH
Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha	Jumlah laporan hasil koordinasi dan sinkronisasi pengendalian penyelenggaraan pemugaran/peremajaan permukiman kumuh			0,00%	0,00		0,00		0,00	0,00%	0,00	0%	0,00					

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (output)	Target RPD pada akhir periode Akhir RPD (2026)		Realisasi Capaian Kinerja RPD Sampai Dengan RKPD Tahun Lalu		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun Berjalan (Tahun n-1 = 2024) yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPD s/d Tahun lalu		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPD s/d Tahun lalu (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
								I										
								K	Rp									
4	5	6	Rp	7	Rp	8	Rp	9	Rp	10	Rp	11	Rp	12	13	14=7+13	15=106 x 100%	16
Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Penyelenggaraan Pemugaran/Peremajaan Permukiman Kumuh	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Penyelenggaraan Pemugaran/Peremajaan Permukiman Kumuh			0	0,00					0	0,00	0%	0,00					Dinas Perkim LH
PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU)	Persentase ketersediaan PSU kawasan permukiman dalam kondisi baik	87,11 %	495.040.000,00	100,00%	6.758.232.801,00	87,11 %	5.309.257.196,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	100%	6.758.232.801,00					
Urusan Penyelenggaraan PSU Perumahan	Jumlah lokasi perumahan yang disediakan prasarana, sarana dan utilitas umum yang menuunjang fungsi hunian	2kecamatan		2 kecamatan	6.758.232.801,00	2kecamatan	5.309.257.196,00		0,00	0,00%	0,00	2 kecamatan	6.758.232.801,00					
Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Perumahan untuk Menunjang Fungsi Hunian	Jumlah Lokasi Perumahan yang Disediakan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum yang Menunjang Fungsi Hunian	2 Lokasi		2 kecamatan	6.758.232.801,00	2 Lokasi	5.309.257.196,00		0,00	0	0,00	2 kecamatan	6.758.232.801,00					Dinas Perkim LH
PROGRAM PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN KUMUH	Persentase Rumah Layak Huni	97,26 %	150.000.000,00	100,00%	3.001.712.900,00	97,26 %	2.678.231.920,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	100%	3.001.712.900,00					
Pencegahan Perumahan dan Kawasan Permukiman Kumuh pada Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah rumah tidak layak huni yang direhab	210unit		144 unit	3.001.712.900,00	70 unit	2.678.231.920,00		0,00	0,00%	0,00	144 unit	3.001.712.900,00					
Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni untuk Pencegahan Terhadap Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman Kumuh di Luar Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha	Jumlah Rumah Tidak Layak Huni untuk Pencegahan Terhadap Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman Kumuh di Luar Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha yang Diperbaiki	210 Unit Rumah		144 unit	3.001.712.900,00	70 Unit Rumah	2.678.231.920,00		0,00	0	0,00	144 unit	3.001.712.900,00					Dinas Perkim LH
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP		83,00%	25.345.111.823,00	90,76%	10.964.607.987,00	100,00%	11.351.834.622,00	17,16%	2.184.147.705,00	17,16%	2.184.147.705,00	90,76%	10.964.607.987,00					
PROGRAM PERENCANAAN LINGKUNGAN HIDUP	Persentase dokumen perencanaan lingkungan	100,00%	350.000.000,00	100%	116.392.730,00	100,00%	221.840.500,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	100%	116.392.730,00					
Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) Kabupaten/Kota	Jumlah dokumen KLHS yang disusun	3 Dokumen		1 dokumen	116.392.730,00	1 Dokumen	221.840.500,00		0,00	0,00%	0,00	1 dokumen	116.392.730,00					
Pembuatan dan Pelaksanaan KLHS RPJPD/RPJMD Kabupaten/Kota yang Disusun	Jumlah Dokumen KLHS RPJPD/RPJMD Kabupaten/Kota yang Disusun			1 Dokumen	116.392.730,00					0	0,00	1 Dokumen	116.392.730,00					Dinas Perkim LH
Penyelenggaraan Rencana Tata Ruang	Jumlah Dokumen KLHS Rencana Tata Ruang Kabupaten/Kota yang Disusun	1 Dokumen		0	0,00	1 Dokumen	221.840.500,00		0,00	0	0,00	0%	0,00					
PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP	Persentase kegiatan pencegahan dan penanggulangan pencemaran dan atau kerusakan lingkungan hidup	100,00%	1.036.592.120,00	99,95%	357.068.145,00	100,00%	474.432.800,00	25,00%	48.923.335,00	25,00%	48.923.335,00	99,95%	357.068.145,00					

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (output)	Target RPD pada akhir periode Akhir RPD (2026)		Realisasi Capaian Kinerja RPD Sampai Dengan RKPD Tahun Lalu		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun Berjalan (Tahun n-1 = 2024) yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPD s/d Tahun lalu		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPD s/d Tahun lalu (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								I								
4	5	6	Rp	7	Rp	8	Rp	9	Rp	10	Rp	11	Rp	12=7x13	13=14x100%	16
Pencegahan dan/atau Kerusakan Lingkungan Kabupaten/Kota	Jumlah jenis pemantauan kualitas air, udara dan tanah yang dilakukan	2 Jenis			337.379.345,00	2 jenis	444.433.000,00	2 jenis	48.923.335,00	0,00%	48.923.335,00		337.379.345,00			
Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pencegahan Pencemaran Lingkungan Hidup Dilaksanakan Terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut	Jumlah Dokumen Uji Kualitas Lingkungan Hidup Dilaksanakan Terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut			1 Dokumen	8.468.550,00					0	0,00	1 Dokumen	8.468.550,00			Dinas Perkim LH
Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pengendalian Emisi Gas Rumah Kaca Mitigasi dan Adaptasi Perubahan Iklim	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Inventarisasi Gas Rumah Kaca dari Sektor Lingkungan Hidup yang Dilaksanakan	3 Dokumen		1 Dokumen	15.072.945,00	1 Dokumen	29.990.000,00		1.250.550,00	0	1.250.550,00	1 Dokumen	15.072.945,00			Dinas Perkim LH
Pengelolaan Laboratorium Lingkungan Hidup kabupaten/kota	Jumlah pengujian yang dilaksanakan oleh laboratorium lingkungan	6 Dokumen		2 Dokumen	313.837.850,00	2 Dokumen	414.443.000,00		47.672.785,00	0	47.672.785,00	2 Dokumen	313.837.850,00			Dinas Perkim LH
Penanggulangan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota	Jumlah jenis penanggulangan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup yang dilakukan	1 Jenis		1	19.688.800,00	1 jenis	29.999.800,00		0,00	0,00%	0,00	100%	19.688.800,00			
Pemberian Informasi Pencekaman dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup pada Masyarakat	Jumlah Laporan Sosialisasi Informasi Peringatan dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup pada Masyarakat di Kabupaten/Kota yang Dilaksanakan	12 Laporan		4 Laporan	19.688.800,00	4 Laporan	29.999.800,00		0,00	0	0,00	4 Laporan	19.688.800,00			Dinas Perkim LH
PROGRAM PENGELOLAAN KEANEKARAGAMAN HAYATI (KEHATI)	Presentase Luas RTH Publik	4,23 %	5.339.634.303,00	92%	1.999.651.732,00	4,23 %	2.000.506.370,00	17,27%	345.497.627,00	17,27%	345.497.627,00	92%	1.999.651.732,00			
Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Kabupaten/Kota	Jumlah lokasi RTH publik yang dikelola	2kecamatan		1	1.999.651.732,00	2 kecamatan	2.000.506.370,00	2 kecamatan	345.497.627,00	0,00%	345.497.627,00	100%	1.999.651.732,00			
Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH)	Luas RTH yang Dikelola Lingkup Kewenangan Kabupaten/Kota	53 Ha		53 Ha	1.975.310.537,00	53 Ha	2.000.506.370,00	53 Ha	345.497.627,00	53 Ha	345.497.627,00	53 Ha	1.975.310.537,00			Dinas Perkim LH
Pengembangan Kapasitas Kelembagaan dan SDM dalam Pengelolaan Keanekaragaman Hayati	Jumlah Orang yang Meningkatkan Kapasitasnya dalam Pengelolaan Keanekaragaman Hayati	40 Orang		40 Orang	24.341.195,00	40 Orang				0	0,00	40 Orang	24.341.195,00			Dinas Perkim LH
PROGRAM PENGENDALIAN BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (B3) DAN LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (LIMBAH B3)	Persentase pembinaan/verifikasi lapangan terhadap pemenuhan komitmen Persetujuan/tzin Penyimpanan sementara dan Pengumpulan Limbah B3	32,00%	125.000.000,00	93%	15.782.375,00	32,00%	31.197.760,00		0,00	0,00%	0,00	93%	15.782.375,00			
Penyimpanan sementara Limbah B3	Jumlah penghasil limbah B3 yang dibina/diverifikasi lapangan	74 fasyankes		24 fasyankes	7.432.500,00	24 fasyankes	14.791.310,00		0,00	0,00%	0,00	24 fasyankes	7.432.500,00			

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (output)	Target RPD pada akhir periode Akhir RPD (2026)		Realisasi Capaian Kinerja RPD Sampai Dengan RKPD Tahun Lalu		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun Berjalan (Tahun n-1 = 2024) yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPD s/d Tahun lalu		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPD s/d Tahun lalu (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								I								
4	5	6	Rp	7	Rp	8	Rp	9	Rp	10	Rp	11	Rp	12=14/6 x 100%	13=14/6 x 100%	14
Verifikasi Lapangan untuk Memastikan Pemenuhan Persyaratan Administrasi dan Teknis Penyimpanan sementara Limbah B3	Jumlah Laporan Kegiatan Verifikasi Lapangan Pemenuhan Komitmen Persetujuan/Izin Penyimpanan sementara dan Pengumpulan Limbah B3	3 Laporan		1 Laporan	7.432.500,00	1 Laporan	14.791.310,00		0,00	0	0,00	1 Laporan	7.432.500,00			Dinas Perkim LH
Pengumpulan Limbah B3 dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah koordinasi dan sinkronisasi pengelolaan limbah B3	2 kali		2 kali	8.349.875,00	2 kali	16.406.450,00		0,00	0,00%	0,00	2 kali	8.349.875,00			
Koordinasi dan Sinkronisasi Pengelolaan Limbah B3 dengan Pemerintah Provinsi dalam rangka Pengangkutan, Pemanfaatan, Pengolahan, dan/atau Penimbunan	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi & Sinkronisasi Pengelolaan Limbah B3 dengan Pemerintah Provinsi dalam rangka Pengangkutan, Pemanfaatan, Pengolahan, dan/atau Penimbunan yang Bukan Menjadi Kewenangan Pemda Kabupaten/Kota serta Pelaksanaan Pengumpulan dan Penyimpanan sementara Limbah B3 yang Sesuai dengan Kewenangannya	3 Dokumen		1 Dokumen	8.349.875,00	1 Dokumen	16.406.450,00		0,00	0	0,00	1 Dokumen	8.349.875,00			Dinas Perkim LH
PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN TERHADAP IZIN LINGKUNGAN DAN IZIN PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP (PPLH)	Persentase ketaatan pelaku usaha/kegiatan yang memiliki persetujuan lingkungan terhadap dokumen persetujuan lingkungan	100,00%	180.000.000,00	96,67%	16.738.805,00	100,00%	22.543.250,00	6,00%	0,00	6,00%	0,00	96,67%	16.738.805,00			
Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Usaha dan/atau Kegiatan yang Izin Lingkungan dan Izin PPLH Diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Persentase usaha/kegiatan yang diawasi	100%			16.738.805,00	100%	22.543.250,00	6,00%	0,00	6,00%	0,00		16.738.805,00			
Pengawasan Perizinan Berusaha atau Persetujuan Pemerintah terkait Persetujuan Lingkungan yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Provinsi dan Peraturan Perundang-undangan di bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup	Jumlah Badan usaha dan/atau kegiatan yang diawasi			30 badan usaha	16.738.805,00	35 Badan Usaha	22.543.250,00	2 Badan Usaha	0,00	2 Badan Usaha	0,00	30 badan usaha	16.738.805,00			Dinas Perkim LH
PROGRAM PENGAKUAN KEBERADAAN MASYARAKAT HUKUM ADAT (MHA), KEARIFAN LOKAL DAN HAK MHA YANG TERKAIT DENGAN PPLH	Persentase cakupan fasilitasi MHA terkait PPLH	100,00%	100.000.000,00	0,00%	0,00		0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0%	0,00			

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (output)	Target RPD pada akhir periode Akhir RPD (2026)		Realisasi Capaian Kinerja RPD Sampai Dengan RKPd Tahun Lalu		Target Kinerja dan Anggaran RKPd Tahun Berjalan (Tahun n-1 = 2024) yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPd yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPD s/d Tahun lalu		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPD s/d Tahun lalu (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
								I									
4	5	6	Rp	7	Rp	8	Rp	9	Rp	10	Rp	11	Rp	12=10/13	13=14/6 x 100%	14	15
Pengakuan MHA, Kearifan Lokal, Pengetahuan Tradisional, dan Hak MHA yang Terkait dengan PPLH	Jumlah dokumen hasil koordinasi, sinkronisasi, penyediaan data dan informasi pengakuan keberadaan MHA kearifan lokal atau pengetahuan tradisional da hak kearifan lokal atau pengetahuan tradisional dan hak MHA terkait dengan PPLH			0	0,00		0,00		0,00	0,00%	0,00	0%	0,00				
Koordinasi, Sinkronisasi, Penyediaan Data, dan Informasi Pengakuan Keberadaan MHA Kearifan Lokal atau Pengetahuan Tradisional dan Hak Kearifan Lokal atau Pengetahuan Tradisional dan Hak MHA yang Terkait dengan PPLH	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, Penyediaan Data dan Informasi Pengakuan Keberadaan MHA Kearifan Lokal atau Pengetahuan Tradisional dan Hak Kearifan Lokal atau Pengetahuan Tradisional dan Hak MHA yang Terkait dengan PPLH			0	0,00					0	0,00	0%	0,00				Dinas Perkim LH
PROGRAM PENINGKATAN PENDIDIKAN, PELATIHAN, DAN PENYULUHAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT	Persentase Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk Masyarakat	100,00%	240.000.000,00	100,00%	131.700.525,00	100,00%	154.416.800,00	25,00%	2.663.050,00	25,00%	2.663.050,00	100%	131.700.525,00				
Penyelenggaraan Pendidikan, Pelatihan, dan Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah jenis penyelenggaraan pendidikan, pelatihan, dan penyuluhan lingkungan hidup untuk lembaga kemasyarakatan tingkat daerah kabupaten/kota yang terlaksana	3 jenis kegiatan		3 jenis kegiatan	131.700.525,00	3 jenis kegiatan	154.416.800,00	1 jenis kegiatan	2.663.050,00	0,00%	2.663.050,00	3 jenis kegiatan	131.700.525,00				
Pendampingan Gerakan Peduli Lingkungan Hidup	Jumlah Pendampingan Pembinaan Gerakan Peduli dan Berbudaya Lingkungan Hidup yang Dilaksanakan	3 Dokumen		3 kali pendam pingan	11.352.825,00	3 Dokumen	19.999.850,00		0,00	0	0,00	3 kali pendam pingan	11.352.825,00				Dinas Perkim LH
Penyelenggaraan Penyuluhan dan Kampanye Lingkungan Hidup	Jumlah Masyarakat/Kelompok Masyarakat/Pelaku Usaha/Kegiatan yang terlibat	16 Orang		16 kelompok masyarakat/pelaku rakat	9.827.600,00	16 Orang	9.999.400,00		0,00	0	0,00	16 kelompok pok masya rakat	9.827.600,00				Dinas Perkim LH
Peningkatan Kapasitas dan Kompetensi Sumber Daya Manusia Bidang lingkungan hidup untuk Lembaga pendidikan formal/lembaga masyarakat/komunitas/kelompok masyarakat	Jumlah jenis penghargaan lingkungan hidup untuk masyarakat	1 Lembaga		4 lembaga	110.520.100,00	1 Lembaga	124.417.550,00	1 Lembaga	2.663.050,00	1 Lembaga	2.663.050,00	4 lembaga	110.520.100,00				Dinas Perkim LH
PROGRAM PENGHARGAAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT	Jumlah jenis penghargaan lingkungan hidup untuk masyarakat	1 Jenis	122.400.000,00	75,00%	70.875.750,00	1 Jenis	93.300.000,00	25,00%	0,00	25,00%	0,00	75%	70.875.750,00				
Pemberian Penghargaan Lingkungan Hidup Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah masyarakat/lembaga masyarakat/dunia usaha/dunia pendidikan/filantropi yang dinilai kinerja nya	1 kelompok		1 kelompok	70.875.750,00	1 kelompok	93.300.000,00	1 kelompok	0,00	0,00%	0,00	1 kelompok	70.875.750,00				

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (output)	Target RPD pada akhir periode Akhir RPD (2026)		Realisasi Capaian Kinerja RPD Sampai Dengan RKPD Tahun Lalu		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun Berjalan (Tahun n-1 = 2024) yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPD s/d Tahun lalu		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPD s/d Tahun lalu (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								I						15=743		
								K	Rp					K	Rp	
4	5	6	Rp	7	Rp	8	Rp	9	Rp	10	Rp	11	Rp	12=743	13=743 x 100%	14
Penilaian Kinerja Masyarakat/Lembaga Masyarakat/Dunia Usaha/Dunia Pendidikan/Filantropi dalam Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup	Jumlah Masyarakat/Lembaga Masyarakat/Dunia Usaha/Dunia Pendidikan/Filantropi yang Dinilai Kinerjanya dalam rangka PPLH	3 Entitas		1 kelompok	70.875.750,00	1 Entitas	93.300.000,00	1 Entitas		1 Entitas	0,00	1 kelompok	70.875.750,00			Dinas Perkim LH
	Jumlah dokumen informasi pengelolaan kinerja lingkungan hidup			0	0,00					0	0,00	0%	0,00			
PROGRAM PENANGANAN PENGADUAN LINGKUNGAN HIDUP	Persentase pengaduan masyarakat terhadap PPLH yang tertangani	100,00%	135.000.000,00	60,00%	427.000,00	100,00%	12.679.950,00	20,00%	323.820,00	20,00%	323.820,00	60%	427.000,00			
Penyelesaian Pengaduan Masyarakat di Bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) Kabupaten/Kota	Jumlah dokumen penyelesaian pengaduan masyarakat di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup (PPLH)	5 dokumen		5 dokume n	427.000,00	5 dokumen	12.679.950,00	1 Pengadua n	323.820,00	0,00%	323.820,00	5 dokumen	427.000,00			
Pengelolaan Pengaduan permasalahan Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup tingkat Kabupaten/Kota	Jumlah pengaduan permasalahan Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup tingkat Kabupaten/Kota yang ditindaklanjuti/ditangani	15 Pengaduan		5 Pengadu an	427.000,00	5 Pengadua n	12.679.950,00	1 Pengadua n	323.820,00	1 Pengaduan	323.820,00	5 Pengadua n	427.000,00			Dinas Perkim LH
Penyelesaian sengketa lingkungan hidup yang ditangani yang menjadi kewenangan kabupaten/kota	Jumlah sengketa lingkungan hidup yang ditangani yang menjadi kewenangan kabupaten/kota	15 Perkara		0	0,00	5 Perkara				0	0,00	0%	0,00			Dinas Perkim LH
PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN	Persentase pengelolaan sampah	98,00%	17.716.485.400,00	100,00%	8.255.970.925,00	98,00%	8.340.917.192,00	25%	1.786.739.873,00	25,00%	1.786.739.873,00	100%	8.255.970.925,00			
Pengelolaan Sampah	Persentase penanganan sampah	78%		1	8.255.970.925,00	79%	8.340.917.192,00		1.786.739.873,00	0,00%	1.786.739.873,00	100%	8.255.970.925,00			
Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Pengelolaan Persampahan	Jumlah Masyarakat, Kelompok Masyarakat atau Para Pihak Lainnya yang Terlibat Aktif dalam Kegiatan Pengelolaan Sampah Berbasis Masyarakat	7 Kelompok		11095 KK	35.118.935,00	7 Kelompok	45.202.500,00		0,00	0	0,00	11095 KK	35.118.935,00			Dinas Perkim LH
Koordinasi dan Sinkronisasi Penyediaan Prasarana dan Sarana Pengelolaan Persampahan	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Penyediaan Prasarana dan Sarana Bersama Pemerintah Pusat, Provinsi maupun Pihak Lain di Luar Kabupaten/Kota untuk Pengelolaan Sampah Kabupaten/Kota Pengelolaan Persampahan Sesuai dengan Rencana Induk Pengelolaan Sampah dan Mengacu pada Jakstrada			1 doku men	8.750.595,00					0	0,00	1 doku men	8.750.595,00			Dinas Perkim LH

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (output)	Target RPD pada akhir periode Akhir RPD (2026)		Realisasi Capaian Kinerja RPD Sampai Dengan RKPD Tahun Lalu		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun Berjalan (Tahun n-1 = 2024) yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPD s/d Tahun lalu		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPD s/d Tahun lalu (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								I								
								/								
4	5	6	Rp	7	Rp	8	Rp	9	Rp	10	Rp	11	Rp	12=7x13	13=14/6 x 100%	14
Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Persampahan di TPA/TPST/SPA Kabupaten/Kota	Jumlah Sarana dan Prasarana Penanganan Sampah untuk Kegiatan Pemilahan, Pengumpulan, Pengangkutan, Pengolahan, dan Pemrosesan Akhir	23 Unit		21 unit	2.223.900.616,00	22 Unit	2.487.731.452,00	22 Unit	472.448.724,00	22 Unit	472.448.724,00	21 unit	2.223.900.616,00			
Penanganan sampah melalui pemrosesan akhir sampah di TPA/TPST kabupaten/kota atau TPA/TPST Regional	Jumlah sampah yang tertangani melalui pemrosesan akhir sampah di TPA/TPSTkabupaten/kota atau TPA/TPST Regional	15000-20000 Ton		18508,71 ton/tahun	5.988.200.779,00	15000-20000 Ton	5.807.983.240,00	3722.94 Ton	1.314.291.149,00	3722.94 Ton	1.314.291.149,00	18508,71 ton/tahun	5.988.200.779,00			Dinas Perkim LH
SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN			29.364.777.780,00	100,00%	11.932.322.299,00		12.367.084.245,00	21,67%	2.606.147.309,00	21,67%	2.606.147.309,00	100,00%	11.932.322.299,00			
URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR																
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT		100,00%	29.364.777.780,00	100,00%	11.932.322.299,00	100,00%	12.367.084.245,00	21,67%	2.606.147.309,00	21,67%	2.606.147.309,00	100,00%	11.932.322.299,00			
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Persentase pemenuhan urusan penunjang yang dipenuhi	100,00%	15.729.618.580,00	100,00%	6.595.194.649,00	100,00%	7.538.537.145,00	35,00%	1.690.653.509,00	35,00%	1.690.653.509,00	100,00%	6.595.194.649,00			
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan layanan administrasi keuangan perangkat daerah			100,00%	5.654.678.751,00	90,00%	6.029.567.805,00	35,00%	1.564.864.772,00	35,00%	1.564.864.772,00	100,00%	5.654.678.751,00			
Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN			688 Orang / bulan	5.654.678.751,00	574 Orang/bulan	6.029.567.805,00	242 Orang/bulan	1.564.864.772,00	242 Orang/bulan	1.564.864.772,00	688 Orang / bulan	5.654.678.751,00			Satpol PP & Damkar
Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan layanan administrasi kepegawaian perangkat daerah			100,00%	98.685.000,00	100,00%	0,00	-	0,00	0,00%	0,00	100%	98.685.000,00			
Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan			221 paket	98.685.000,00	174 Paket		-		-	0,00	221 paket	98.685.000,00			Satpol PP & Damkar
Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan pelayanan administrasi perkantoran			100,00%	238.345.864,00	90,00%	280.704.740,00	30,00%	40.008.762,00	30,00%	40.008.762,00	100%	238.345.864,00			
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan			4 paket	2.968.400,00	4 paket	2.715.400,00	1 paket	315.900,00	1 paket	315.900,00	4 paket	2.968.400,00			Satpol PP & Damkar
Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan			4 paket	16.748.500,00	12 paket	14.739.340,00	1 paket	2.622.000,00	1 paket	2.622.000,00	4 paket	16.748.500,00			Satpol PP & Damkar
Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan			5 paket	11.110.300,00	5 paket	15.007.000,00	1 paket	2.436.100,00	1 paket	2.436.100,00	5 paket	11.110.300,00			Satpol PP & Damkar
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD			41 laporan	207.518.664,00	15 laporan	248.243.000,00	16 laporan	34.634.762,00	16 laporan	34.634.762,00	41 laporan	207.518.664,00			Satpol PP & Damkar
Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah						90,00%	149.349.600,00	-	0,00	0,00%	0,00	0%				
Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya						2 unit	149.349.600,00	-	0,00	-	0,00					Satpol PP & Damkar

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (output)	Target RPD pada akhir periode Akhir RPD (2026)		Realisasi Capaian Kinerja RPD Sampai Dengan RKPD Tahun Lalu		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun Berjalan (Tahun n-1 = 2024) yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPD s/d Tahun lalu		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPD s/d Tahun lalu (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
								I									
								/									
4	5	6	Rp	7	Rp	8	Rp	9	Rp	11	Rp	12	Rp	13	14=7/13	15=16/6 x 100%	16
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang terpenuhi				120.838.284,00	90,00%	136.655.200,00	30,00%	24.415.475,00	30,00%	24.415.475,00		120.838.284,00				
Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat			7 Laporan	2.950.000,00	12 Laporan	3.880.000,00	-	0,00	-	0,00	7 Laporan	2.950.000,00				Satpol PP & Damkar
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan			29 Laporan	20.560.076,00	36 Laporan	35.384.000,00	9 Laporan	4.549.675,00	9 Laporan	4.549.675,00	29 Laporan	20.560.076,00				Satpol PP & Damkar
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan			14 Laporan	97.328.208,00	12 Laporan	97.391.200,00	3 Laporan	19.865.800,00	3 Laporan	19.865.800,00	14 Laporan	97.328.208,00				Satpol PP & Damkar
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase ketersediaan Barang Milik Daerah berkondisi baik			100,00%	482.646.750,00	90,00%	942.259.800,00	30,00%	61.364.500,00	30,00%	61.364.500,00	100%	482.646.750,00				
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Operasional atau Lapangan Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya			69 Unit	397.602.750,00	26 Unit	864.847.000,00	7 Unit	50.465.500,00	7 Unit	50.465.500,00	69 Unit	397.602.750,00				Satpol PP & Damkar
Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara			26 Unit	13.909.000,00	30 Unit	29.252.800,00	6 Unit	2.000.000,00	6 Unit	2.000.000,00	26 Unit	13.909.000,00				Satpol PP & Damkar
Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi			2 Unit	71.135.000,00	2 Unit	48.160.000,00	2 Unit	8.899.000,00	2 Unit	8.899.000,00	2 Unit	71.135.000,00				Satpol PP & Damkar
PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase warga negara yang terlindungi dari dampak pelanggaran perda dan trantibum	100%	9.476.818.000,00		4.252.673.364,00	100,00%	3.888.261.100,00	30,00%	815.530.600,00	30,00%	815.530.600,00		4.252.673.364,00				
Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum dalam 1 Daerah (Satu Kabupaten/Kota)	Jumlah operasi pencegahan dan penanganan gangguan trantibum				4.024.098.364,00	3 operasi	3.670.296.300,00	3 operasi	786.545.600,00	0,00%	786.545.600,00		4.024.098.364,00				
Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat dalam rangka Ketentraman dan Ketertiban Umum	Jumlah Dokumen yang Memuat Hasil Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat dalam rangka Ketenteraman dan Ketertiban Umum			3 dokumen	297.663.230,00	0		0,00%	0	0	0,00	3 dokumen	297.663.230,00				Satpol PP & Damkar
Pencegahan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Pelaksanaan Patroli, Pengamanan, dan Pengawasan	Jumlah Laporan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum yang Dicegah Melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Patroli, Pengamanan, dan Pengawasan			60 laporan	3.726.435.134,00	55 laporan	3.605.527.400,00	18 laporan	786.545.600,00	18 laporan	786.545.600,00	60 laporan	3.726.435.134,00				Satpol PP & Damkar
Penyediaan Layanan dasar dalam rangka Dampak Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan kepala daerah	Jumlah Laporan Penyediaan Layanan Dampak Penegakan Perda dan Perkada yang TerlayaniLaporan pemberian pelayanan dasar kepada warga Layanan yang ter Dampak Penegakan Perda dan Perkada yang Terlayani			8 laporan	0,00	8 laporan	5.432.400,00	2 laporan	0,00	2 laporan	0,00	8 laporan	0,00				Satpol PP & Damkar

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (output)	Target RPD pada akhir periode Akhir RPD (2026)		Realisasi Capaian Kinerja RPD Sampai Dengan RKPD Tahun Lalu		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun Berjalan (Tahun n-1 = 2024) yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPD s/d Tahun lalu		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPD s/d Tahun lalu (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								I								
								/								
4	5	6	Rp	7	Rp	8	Rp	9	Rp	11	Rp	12	Rp	15=12/6 x 100%	16	
Pengadaan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Ketentraman dan Ketertiban Umum						5 unit	59.336.500,00	-	0,00	-	0,00					Satpol PP & Damkar
Penegakan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan Bupati/Wali Kota	Jumlah operasi penegakan Perda			100,00%	228.575.000,00	2 operasi	217.964.800,00	1 operasi	28.985.000,00	0,00%	28.985.000,00	100%	228.575.000,00			
Sosialisasi Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah						1 Laporan	27.504.800,00	-	0,00	-	0,00					Satpol PP & Damkar
Penanganan Atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala daerah	Jumlah Laporan Pelaksanaan Penanganan Atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan kepala daerah Sesuai SOP			8 laporan	228.575.000,00	8 Laporan	190.460.000,00	2 Laporan	28.985.000,00	2 Laporan	28.985.000,00	8 laporan	228.575.000,00			Satpol PP & Damkar
PROGRAM PENCEGAHAN, PENANGGULANGAN, PENYELAMATAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN KEBAKARAN	Waktu Tanggap (Respon Time Rate) daerah	10 menit	4.158.341.200,00	10 Menit	1.084.454.286,00	10 Menit	940.286.000,00	4 Menit	99.963.200,00	0,00%	99.963.200,00	10 Menit	1.084.454.286,00			
Pencegahan, Pengendalian, Pemadaman, Penyelamatan, dan Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Jenis kegiatan pencegahan, penyelamatan, dan pemadaman kebakaran			1 kegiatan	1.029.018.186,00	2 kegiatan	789.346.600,00	1 kegiatan	99.963.200,00	0,00%	99.963.200,00	1 kegiatan	1.029.018.186,00			
Pemadaman dan Pengendalian Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Kegiatan Kesiapsiagaan Petugas Piket dan Pemadaman Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota			12 laporan	1.029.018.186,00	15 Laporan	537.876.600,00	4 Laporan	99.963.200,00	4 Laporan	99.963.200,00	12 laporan	1.029.018.186,00			Satpol PP & Damkar
Pengadaan Sarana dan Prasarana Pencegahan, Penanggulangan Kebakaran dan Alat Pelindung Diri						15 unit	251.470.000,00	-	0,00	-	0,00					Satpol PP & Damkar
Pemberdayaan Masyarakat dalam Pencegahan Kebakaran	Jumlah kegiatan pemberdayaan			100%	49.586.100,00	2 kegiatan	66.515.150,00	-	0,00	0,00%	0,00	100%	49.586.100,00			
Pemberdayaan Masyarakat dalam Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran Melalui Sosialisasi dan Edukasi Masyarakat						50 orang	25.728.350,00	-	0,00	-	0,00					
Pembentukan dan Pembinaan Relawan Pemadam Kebakaran	Jumlah Desa/Kelurahan yang Terbentuk dan Terbina Relawan Pemadam Kebakaran pada Lingkup Sistem Ketahanan Kebakaran Lingkungan (SKKL) Setiap Tahunnya			16 keluraha n	49.586.100,00	16 Desa/Kel urahn	40.786.800,00	-	0,00	-	0,00	16 kelurahan	49.586.100,00			
Penyelenggaraan Operasi Pencarian dan Pertolongan Terhadap Kondisi Membahayakan Manusia	Persentase pencarian dan pertolongan terhadap kondisi membahayakan manusia			100%	5.850.000,00	100%	84.424.250,00	25,00%	0,00	25,00%	0,00	100%	5.850.000,00			

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (output)	Target RPD pada akhir periode Akhir RPD (2026)		Realisasi Capaian Kinerja RPD Sampai Dengan RKPD Tahun Lalu		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun Berjalan (Tahun n-1 = 2024) yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPD s/d Tahun lalu		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPD s/d Tahun lalu (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								I								
4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
		K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
Penyelenggaraan Operasi Pencarian dan Pertolongan pada Peristiwa yang Menimpa, Membahayakan, dan/atau Mengancam Keselamatan Manusia	Jumlah Laporan Hasil Penyelenggaraan Operasi Penyelamatan yang Mengancam Keselamatan Manusia			134 Laporan	5.850.000,00	12 Laporan	17.740.000,00	3 Laporan	0,00	3 Laporan	0,00	134 Laporan	5.850.000,00			
Pengadaan Sarana dan Prasarana Pencarian dan Pertolongan Terhadap Kondisi Membahayakan Manusia/Penyelamatan dan Evakuasi						5 unit	66.684.250,00	-	0,00	-	0,00					
DINAS SOSIAL PPKB PPPA			27.863.929.099,00	95,63%	12.624.516.828,00	81,39%	12.602.173.454,00	20,60%	2.120.082.153,00	20,60%	2.120.082.153,00	95,63%	12.624.516.828,00			
URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR																
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL		94,17%	23.333.198.099,00	97,70%	9.524.645.263,00	94,17%	9.128.626.643,00	32,64%	1.942.353.413,00	32,64%	1.942.353.413,00	97,70%	9.524.645.263,00			
Program penunjang urusan pemerintah kabupaten / kota	Persentase pemenuhan urusan penunjang yang dipenuhi	100,00%	15.883.884.786,00	99,99%	6.707.350.978,00	100,00%	6.464.715.625,00	20,83%	1.506.758.584,00	20,83%	1.506.758.584,00	99,99%	6.707.350.978,00			
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan layanan administrasi keuangan perangkat daerah			100,00%	5.486.289.035,00	100,00%	5.115.796.725,00	25,00%	1.229.496.302,00	25,00%	1.229.496.302,00	100,00%	5.486.289.035,00			
Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN			560 orang / bulan	5.486.289.035,00	144	5.115.796.725,00	144	1.229.496.302,00	144	1.229.496.302,00	560 orang / bulan	5.486.289.035,00			Dinas Sosial PPKB PPPA
Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan layanan administrasi kepegawaian perangkat daerah			100,00%	17.850.000,00		0,00		0,00	0,00%	0,00	100%	17.850.000,00			
Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan			40 Paket	17.850.000,00					0	0,00	40 Paket	17.850.000,00			Dinas Sosial PPKB PPPA
Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan layanan administrasi umum perangkat daerah			100%	290.706.177,00	100%	287.592.235,00	25,00%	55.193.192,00	25,00%	55.193.192,00	100%	290.706.177,00			
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan			4 Jenis	5.354.000,00	4	5.391.700,00	4	255.000,00	4	255.000,00	4 Jenis	5.354.000,00			Dinas Sosial PPKB PPPA
Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan			7 Paket	42.705.250,00	4	73.132.145,00	4	4.572.000,00	4	4.572.000,00	7 Paket	42.705.250,00			Dinas Sosial PPKB PPPA
Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan			4 Paket	7.951.100,00	1	20.013.390,00	1	2.969.800,00	1	2.969.800,00	4 Paket	7.951.100,00			Dinas Sosial PPKB PPPA
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD			15 Laporan	234.695.827,00	3	189.055.000,00	3	47.396.392,00	3	47.396.392,00	15 Laporan	234.695.827,00			Dinas Sosial PPKB PPPA
Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Pemenuhan Barang Milik Daerah sesuai dengan perencanaan			100,00%	67.046.000,00	100,00%	38.742.100,00	25,00%	0,00	25,00%	0,00	100%	67.046.000,00			
Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan				67.046.000,00	13	38.742.100,00	13	0,00	13	0,00		67.046.000,00			Dinas Sosial PPKB PPPA
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Penyediaan Jasa Penunjang Pemerintahan Daerah yang terpenuhi			100%	674.145.930,00	100%	758.893.165,00	25,00%	191.855.901,00	25,00%	191.855.901,00	100%	674.145.930,00			

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (output)	Target RPD pada akhir periode Akhir RPD (2026)		Realisasi Capaian Kinerja RPD Sampai Dengan RKPD Tahun Lalu		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun Berjalan (Tahun n-1 = 2024) yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPD s/d Tahun lalu		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPD s/d Tahun lalu (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								I								
4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14=7x13	15=14/6 x 100%	16	17	18	19	
		K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan			3 Laporan	30.612.930,00	3 Laporan	47.893.165,00	3 Laporan	7.723.901,00	3 Laporan	7.723.901,00	3 Laporan	30.612.930,00			Dinas Sosial PPKB PPPA
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan			4 Laporan	643.533.000,00	3 Laporan	711.000.000,00	3 Laporan	184.132.000,00	3 Laporan	184.132.000,00	4 Laporan	643.533.000,00			Dinas Sosial PPKB PPPA
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase ketersediaan Barang Milik Daerah kondisi baik			100%	171.313.836,00	100%	263.691.400,00	25,00%	30.213.189,00	25,00%	30.213.189,00	100%	171.313.836,00			
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Dinas Perorangan atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya			21 Unit	109.757.436,00	21 Unit	125.685.600,00	21 Unit	20.105.689,00	21 Unit	20.105.689,00	21 Unit	109.757.436,00			Dinas Sosial PPKB PPPA
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya			27 Unit	33.299.400,00	27 Unit	77.205.800,00	27 Unit	5.727.500,00	27 Unit	5.727.500,00	27 Unit	33.299.400,00			Dinas Sosial PPKB PPPA
Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara			55 Unit	8.790.000,00	55 Unit	20.800.000,00	55 Unit	4.030.000,00	55 Unit	4.030.000,00	55 Unit	8.790.000,00			Dinas Sosial PPKB PPPA
Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi			6 Unit	19.467.000,00	6 Unit	40.000.000,00	6 Unit	350.000,00	6 Unit	350.000,00	6 Unit	19.467.000,00			Dinas Sosial PPKB PPPA
Program Pemberdayaan Sosial	Persentase sumber kesejahteraan sosial dan kelembagaan sosial yang aktif	85,00%	3.609.039.100,00	75,00%	1.363.089.575,00	75,00%	1.210.700.100,00	75,00%	110.686.453,00	75,00%	110.686.453,00	75,00%	1.363.089.575,00			
Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah potensi sumber kesejahteraan sosial yang dibina			60 lembaga	1.363.089.575,00	60 lembaga	1.210.700.100,00	60 lembaga	110.686.453,00	0,00%	110.686.453,00	60 lembaga	1.363.089.575,00			
Peningkatan Kemampuan Potensi Pekerja Sosial Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Orang Mendapat Peningkatan Kapasitas Pekerja Sosial Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota			92 Orang	279.579.650,00	92 Orang	315.404.300,00	92 Orang	47.520.000,00	92 Orang	47.520.000,00	92 Orang	279.579.650,00			Dinas Sosial PPKB PPPA
Peningkatan Kemampuan Potensi Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan Kewenangan Kabupaten/Kota yang Meningkatkan Kapasitasnya Kewenangan Kabupaten/Kota			2 Orang	4.800.000,00	2 Orang	5.700.000,00	2 Orang	0,00	2 Orang	0,00	2 Orang	4.800.000,00			
Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Kelembagaan Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Lembaga Kesejahteraan Sosial yang Meningkatkan Kapasitasnya Kewenangan Kabupaten/Kota			60 Lembaga	981.356.148,00	60 Lembaga	791.207.500,00	60 Lembaga	45.666.453,00	60 Lembaga	45.666.453,00	60 Lembaga	981.356.148,00			

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (output)	Target RPD pada akhir periode Akhir RPD (2026)		Realisasi Capaian Kinerja RPD Sampai Dengan RKPD Tahun Lalu		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun Berjalan (Tahun n-1 = 2024) yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPD s/d Tahun lalu		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPD s/d Tahun lalu (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								I								
4	5	6	Rp	7	Rp	8	Rp	9	Rp	10	Rp	11	Rp	12=10/6 x 100%	13	14
Peningkatan Kemampuan Sumber Daya Manusia dan Penguatan Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga (LK3)	Jumlah Sertifikat yang dari Hasil Peningkatan Sumber Daya Manusia dan Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga (LK3) Kewenangan Kabupaten/Kota			2 Sertifikat	97.353.777,00	2 Sertifikat	98.388.300,00	2 Sertifikat	17.500.000,00	2 Sertifikat	17.500.000,00	2 Sertifikat	97.353.777,00			Dinas Sosial PPKB PPPA
PROGRAM REHABILITASI SOSIAL	Persentase PPKS yang tertangani	90,00%	2.620.675.456,00	100,00%	800.960.807,00	90,00%	1.079.811.249,00	25,00%	297.553.126,00	25,00%	297.553.126,00	100,00%	800.960.807,00			
Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial	Jumlah penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gelandangan pengemis yang terpenuhi kebutuhan dasarnya diluar panti			100,00%	492.033.690,00		646.099.545,00	25,00%	236.719.376,00	25,00%	236.719.376,00	100,00%	492.033.690,00			
Penyediaan Permakanan	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Permakanan Sesuai dengan Standar Gizi Minimal Kewenangan Kabupaten/Kota			283 orang	144.729.544,00	210 orang	376.199.545,00	210 orang	121.847.626,00	210 orang	121.847.626,00	283 orang	144.729.544,00			Dinas Sosial PPKB PPPA
Penyediaan Sandang	Jumlah Orang yang Menerima Pakaian dan Kelengkapan Lainnya yang Tersedia dalam 1 Tahun Kewenangan Kabupaten/Kota			497 orang	216.659.600,00	210 orang	150.000.000,00	210 orang	84.646.500,00	210 orang	84.646.500,00	497 orang	216.659.600,00			Dinas Sosial PPKB PPPA
Penyediaan Alat Bantu	Jumlah Orang yang Mendapatkan Alat Bantu dan Alat Bantu Peraga Sesuai kebutuhan Kewenangan Kabupaten/Kota			3 orang	62.906.500,00	9 orang	55.900.000,00	9 orang	22.590.750,00	9 orang	22.590.750,00	3 orang	62.906.500,00			
Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual, dan Sosial	Jumlah Peserta Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial Kewenangan Kabupaten/Kota			12 orang	25.683.796,00	7 orang	44.000.000,00	7 orang	2.159.500,00	7 orang	2.159.500,00	12 orang	25.683.796,00			Dinas Sosial PPKB PPPA
Pemberian Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis dan Masyarakat	Jumlah Peserta Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis dan Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota			36 orang	42.054.250,00	63 orang	20.000.000,00	63 orang	5.475.000,00	63 orang	5.475.000,00	36 orang	42.054.250,00			
Rehabilitasi Sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA di Luar Panti Sosial	Jumlah PPKS terpenuhi kebutuhan dasarnya diluar panti			100,00%	308.927.117,00	100,00%	433.711.704,00	25,00%	60.833.750,00	25,00%	60.833.750,00	100%	308.927.117,00			
Penyediaan Permakanan	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Permakanan Sesuai dengan Standar Gizi Minimal Kewenangan Kabupaten/Kota			40 orang	26.213.713,00	25 orang	55.000.000,00	25 orang	13.493.750,00	25 orang	13.493.750,00	40 orang	26.213.713,00			Dinas Sosial PPKB PPPA

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (output)	Target RPD pada akhir periode Akhir RPD (2026)		Realisasi Capaian Kinerja RPD Sampai Dengan RKPD Tahun Lalu		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun Berjalan (Tahun n-1 = 2024) yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPD s/d Tahun lalu		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPD s/d Tahun lalu (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								I								
								/								
4	5	6	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	16
Penyediaan Sandang	Jumlah orang yang Menerima pakaian dan kelengkapan lainnya yang Tersedia dalam 1 tahun Kewenangan Kabupaten/Kota			39 orang	49.342.179,00	19 orang	55.000.000,00	19 orang	12.320.000,00	19 orang	12.320.000,00	39 orang	49.342.179,00			Dinas Sosial PPKB PPPA
Penyediaan Alat Bantu	Jumlah Orang yang Mendapatkan Alat Bantu dan Alat Bantu Peraga sesuai Kebutuhan Kewenangan Kabupaten/Kota			4 Orang	7.847.000,00	4 Orang	10.000.000,00	4 Orang	5.700.000,00	4 Orang	5.700.000,00	4 Orang	7.847.000,00			Dinas Sosial PPKB PPPA
Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual, dan Sosial	Jumlah Peserta Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial Kewenangan Kabupaten/Kota			30 Orang	134.072.525,00	150 Orang	220.000.000,00	150 Orang	6.590.000,00	150 Orang	6.590.000,00	30 Orang	134.072.525,00			
Kerja Sama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Pelaksanaan Rehabilitasi Sosial Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Kerja Sama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Pelaksanaan Rehabilitasi Sosial Kabupaten/Kota			2 Dokumen	91.451.700,00	0	93.711.704,00	0	22.730.000,00	0	22.730.000,00	2 Dokumen	91.451.700,00			
PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL	Persentase masyarakat miskin yang mendapatkan perlindungan dan jaminan sosial	90,00%	684.088.800,00		463.563.903,00	100,00%	221.614.050,00	25,00%	16.789.000,00	25,00%	16.789.000,00		463.563.903,00			
Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah layanan data yang mendukung pengelolaan data fakir miskin cakupan daerah kabupaten/kota				463.563.903,00		221.614.050,00		16.789.000,00	0,00%	16.789.000,00		463.563.903,00			
Pendataan Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota yang Didata			1749 orang	79.548.600,00		79.895.000,00		3.037.000,00	0	3.037.000,00	1749 orang	79.548.600,00			Dinas Sosial PPKB PPPA
Fasilitasi Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga	Jumlah Keluarga Penerima Manfaat (KPM) yang Mendapatkan Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota			1142 Keluarga	384.015.303,00	1142	133.709.600,00	1142	13.752.000,00	1142	13.752.000,00	1142 Keluarga	384.015.303,00			Dinas Sosial PPKB PPPA
Fasilitasi Bantuan Pengembangan Masyarakat	Jumlah Orang Mendapatkan Bantuan Pengembangan Ekonomi Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota			0	0,00		8.009.450,00		0,00	0	0,00	0%	0,00			Dinas Sosial PPKB PPPA
PROGRAM PENANGANAN BENCANA	Persentase korban bencana yang tertangani	100,00%	460.509.957,00		165.138.000,00	100,00%	99.999.719,00	25,00%	10.566.250,00	25,00%	10.566.250,00		165.138.000,00			
Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Kabupaten/Kota	Persentase pemenuhan makanan, sandang dan dukungan psikososial kepada korban bencana			100%	25.782.950,00		26.500.000,00		6.400.000,00	0,00%	6.400.000,00	100%	25.782.950,00			
Penyediaan Makanan	Jumlah Orang yang Mendapatkan Permakanan 3x1 Hari dalam Masa Tanggap Darurat (Pengungsian) Kewenangan Kabupaten/Kota			460 orang	15.218.950,00					0	0,00	460 orang	15.218.950,00			Dinas Sosial PPKB PPPA

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (output)	Target RPD pada akhir periode Akhir RPD (2026)		Realisasi Capaian Kinerja RPD Sampai Dengan RKPd Tahun Lalu		Target Kinerja dan Anggaran RKPd Tahun Berjalan (Tahun n-1 = 2024) yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPd yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPD s/d Tahun lalu		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPD s/d Tahun lalu (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								I								
4	5	6	Rp	7	Rp	8	Rp	9	Rp	10	Rp	11	Rp	12=10/11	13=12/11 x 100%	14
		K		K		K		K		K		K		K		
Penyediaan Sandang	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pakaian dan Kelengkapan Lainnya yang Tersedia pada Masa Tanggap Darurat (Pengungsian) dan Pasca Bencana Kewenangan Kabupaten/Kota			300 orang	6.096.000,00		20.000.000,00		6.400.000,00	0	6.400.000,00	300 orang	6.096.000,00			Dinas Sosial PPKB PPPA
Pelayanan Dukungan Psikososial	Jumlah Korban Bencana yang Mendapatkan Layanan Dukungan Psikososial Kewenangan Kabupaten/Kota			460 orang	4.468.000,00		6.500.000,00		0,00	0	0,00	460 orang	4.468.000,00			Dinas Sosial PPKB PPPA
Penyelenggaraan Pemberdayaan Masyarakat Terhadap Kesiapsiagaan Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah anggota TAGANA yang dibina			83%	139.355.050,00	100%	73.499.719,00	25,00%	4.166.250,00	25,00%	4.166.250,00	83%	139.355.050,00			
Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Taruna Siaga Bencana	Jumlah Orang yang Melaksanakan Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Taruna Siaga Bencana Kewenangan Kabupaten/Kota			30 Orang	139.355.050,00	30	73.499.719,00	30	4.166.250,00	30	4.166.250,00	30 Orang	139.355.050,00			Dinas Sosial PPKB PPPA
	Pemeliharaan dan rehap bangunan markas komando TAGANA			0	0,00					0	0,00	0%	0,00			
PROGRAM PENGELOLAAN TAMAN MAKAM PAHLAWAN	Persentase TMP yang dipelihara	100,00%	75.000.000,00	100,00%	24.542.000,00	100,00%	51.785.900,00	25,00%	0,00	25,00%	0,00	100%	24.542.000,00			
Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota	Jumlah makam yang dipelihara			100%	24.542.000,00		51.785.900,00		0,00	0,00%	0,00	100%	24.542.000,00			
Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota	Jumlah Makam yang Terpenuhi Pemeliharaannya pada Taman Makam Pahlawan Kabupaten/Kota			98 makam	24.542.000,00	98	51.785.900,00	98,00%	0,00	98%	0,00	98 makam	24.542.000,00			Dinas Sosial PPKB PPPA
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK		77,00%	4.530.731.000,00	93,56%	3.099.871.565,00	50,00%	1.124.318.200,00	12,50%	87.861.920,00	12,50%	87.861.920,00	93,56%	3.099.871.565,00			
PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN	Proporsi kursi yang diduduki perempuan di DPRD	20,00%	648.740.000,00	100,00%	161.100.162,00	100,00%	253.580.000,00	16,67%	11.297.850,00	16,67%	11.297.850,00	100%	161.100.162,00			
	Persentase organisasi perempuan yang aktif	100,00%		100,00%	0,00					0,00%	0,00	100%	0,00			
Pelembagaan Pengarusutamaan Gender (PUG) pada Lembaga Pemerintah Kewenangan	Jumlah OPD yang memiliki data terpilah			100%	53.069.251,00		74.000.000,00	25,00%	9.795.350,00	25,00%	9.795.350,00	100%	53.069.251,00			
	Jumlah OPD yang menyusun GAP dan GBS			100%	0,00					0,00%	0,00	100%	0,00			
Sosialisasi Kebijakan Pelaksanaan PUG Termasuk PPRG	Jumlah Perangkat Daerah yang Mengikuti Sosialisasi Kebijakan Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender (PUG) Termasuk Perencanaan Pembangunan Responsif Gender (PPRG) Kewenangan Kabupaten/Kota			23 Perangkat Daerah	53.069.251,00	23	74.000.000,00	23	9.795.350,00	23	9.795.350,00	23 Perangkat Daerah	53.069.251,00			Dinas Sosial PPKB PPPA
Pemberdayaan Perempuan Bidang Politik, Hukum, Sosial, dan Ekonomi pada Organisasi Kemasyarakatan Kewenangan Kabupaten/Kota	Persentase perempuan partai politik yang memperoleh advokasi dan pendampingan kebijakan partisipasi perempuan di bidang politik, hukum, sosial dan ekonomi kewenangan kabupaten/kota			100%	6.759.200,00	50%	30.000.000,00		0,00	0,00%	0,00	100%	6.759.200,00			

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (output)	Target RPD pada akhir periode Akhir RPD (2026)		Realisasi Capaian Kinerja RPD Sampai Dengan RKPD Tahun Lalu		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun Berjalan (Tahun n-1 = 2024) yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPD s/d Tahun lalu		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPD s/d Tahun lalu (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								I								
4	5	6	Rp	7	Rp	8	Rp	9		11	Rp	12	Rp	13=12/6 x 100%	16	
Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Peningkatan Partisipasi Perempuan dalam Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi	Jumlah organisasi kemasyarakatan/ profesi/ dunia usaha/ media yg diadvokasi dan didampingi dalam rangka peningkatan partisipasi perempuan di bidang politik, hukum, sosial dan ekonomi			26 Lembaga	6.759.200,00	26 Lembaga	30.000.000,00		0,00	0	0,00	26 Lembaga	6.759.200,00			Dinas Sosial PPKB PPPA
Penguatan dan Pengembangan Lembaga Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	Persentase lembaga penyedia layanan yang telah mengikuti sosialisasi tentang penanganan kasus			100%	101.271.711,00	100%	149.580.000,00	25,00%	1.502.500,00	25,00%	1.502.500,00	100%	101.271.711,00			
Pengembangan Komunikasi Informasi dan Edukasi (KIE) Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Komunikasi Informasi dan Edukasi (KIE) Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota yang Tersedia			15 Dokumen	101.271.711,00	3 Dokumen	149.580.000,00	3 Dokumen	1.502.500,00	3 Dokumen	1.502.500,00	15 Dokumen	101.271.711,00			Dinas Sosial PPKB PPPA
PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN	Cakupan perempuan korban kekerasan yang mendapatkan penanganan dan pengaduan oleh petugas terlatih didalam unit pelayanan terpadu	100 BTJ	463.566.000,00	100,00%	262.779.926,00	100,00%	202.390.300,00	8,33%	18.172.500,00	8,33%	18.172.500,00	100%	262.779.926,00			
Pencegahan Kekerasan Terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah lembaga penyedia layanan perlindungan perempuan yang mendukung perlindungan perempuan			100,00%	60.142.125,00	100,00%	68.345.300,00		0,00	0,00%	0,00	100%	60.142.125,00			
Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Kebijakan, Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan Terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Kebijakan, Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan Terhadap Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota			6 Dokumen	60.142.125,00	1 Dokumen	68.345.300,00		0,00	0	0,00	6 Dokumen	60.142.125,00			Dinas Sosial PPKB PPPA
Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan yang Memerlukan Koordinasi Kewenangan Kabupaten/Kota	Persentase kasus yang ditindaklanjuti			100%	83.717.801,00	100%	95.000.000,00	25,00%	18.172.500,00	25,00%	18.172.500,00	100%	83.717.801,00			
Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Layanan Tindak Lanjut Pengaduan yang Memerlukan Koordinasi dan Sinkronisasi bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota			10 Layanan	83.717.801,00	12 Layanan	95.000.000,00	12 Layanan	18.172.500,00	12 Layanan	18.172.500,00	10 Layanan	83.717.801,00			Dinas Sosial PPKB PPPA
Penguatan dan Pengembangan Lembaga Layanan Penyediaan Perlindungan Perempuan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah layanan perlindungan perempuan tingkat daerah Kabupaten/ Kota		0,00		118.920.000,00	100%	39.045.000,00		0,00	0,00%	0,00		118.920.000,00			

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (output)	Target RPD pada akhir periode Akhir RPD (2026)		Realisasi Capaian Kinerja RPD Sampai Dengan RKPD Tahun Lalu		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun Berjalan (Tahun n-1 = 2024) yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPD s/d Tahun lalu		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPD s/d Tahun lalu (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
								I									
4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	
		K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp
Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Penanganan Bagi Perempuan Korban Kekerasan Kabupaten/Kota					35.128.500,00		29.045.000,00		0,00	0	0,00		35.128.500,00				Dinas Sosial PPKB PPPA
Penguatan Jejaring antar Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Penguatan Jejaring Antar Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota			15 Dokumen	83.791.500,00		10.000.000,00		0,00	0	0,00	15 Dokumen	83.791.500,00				Dinas Sosial PPKB PPPA
Program Pemenuhan Hak Anak	Persentase indikator KLA yang terpenuhi	85,00%	353.005.000,00	100,00%	141.884.885,00		270.375.600,00		36.539.000,00	0,00%	36.539.000,00	100%	141.884.885,00				
Pelembagaan PHA pada Lembaga Pemerintah, Nonpemerintah, dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah lembaga yang berpartisipasi dalam PHA			100%	49.428.250,00	100%	135.587.400,00		0,00	0,00%	0,00	100%	49.428.250,00				
Koordinasi dan Sinkronisasi Pelembagaan Pemenuhan Hak Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pelembagaan Pemenuhan Hak Anak Kewenangan Kabupaten/Kota			15 Dokumen	49.428.250,00	1 Dokumen	135.587.400,00		0,00	0	0,00	15 Dokumen	49.428.250,00				Dinas Sosial PPKB PPPA
Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	Persentase forum anak aktif Persentase lembaga pendidikan yang telah mengembangkan SRA Persentase lembaga kesehatan yang telah mengembangkan PRA			100% 100% 100%	92.456.635,00 0,00 0,00	100% 0,00 0,00	134.788.200,00	25,00% 0,00% 0,00%	36.539.000,00 0,00 0,00	25,00% 0,00% 100%	36.539.000,00 0,00 0,00	100% 100% 100%	92.456.635,00 0,00 0,00				
Penyediaan Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Anak yang Mendapatkan Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota			1 dokumen	92.456.635,00					0	0,00	1 dokumen	92.456.635,00				Dinas Sosial PPKB PPPA
Penguatan Jejaring antar Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Penguatan Jejaring Antar Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota (Dokumen)			1 dokumen	134.788.200,00				36.539.000,00	0	36.539.000,00						Dinas Sosial PPKB PPPA
PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK	Cakupan anak korban kekerasan yang mendapatkan penanganan dan pengaduan oleh petugas terlatih didalam unit pelayanan terpadu	100 BTJ	0,00		257.745.387,00		397.972.300,00	25,00%	21.852.570,00	25,00%	21.852.570,00		257.745.387,00				
Pencegahan Kekerasan Terhadap Anak yang Melibatkan para Pihak Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	Persentase kasus yang ditindak lanjuti			100,00%	117.395.340,00	100,00%	147.857.300,00	25,00%	6.375.320,00	25,00%	6.375.320,00	100%	117.395.340,00				
Advokasi dan pendampingan Perangkat Daerah dalam pelaksanaan kebijakan /program/ kegiatan pencegahan KTA	Jumlah SDM yang memperoleh advokasi dan Pendampingan dalam pelaksanaan kebijakan /program/ penceaahan KTA			1 orang	87.593.790,00	5 orang	61.500.000,00		4.843.320,00	0	4.843.320,00	1 orang	87.593.790,00				Dinas Sosial PPKB PPPA

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (output)	Target RPD pada akhir periode Akhir RPD (2026)		Realisasi Capaian Kinerja RPD Sampai Dengan RKPd Tahun Lalu		Target Kinerja dan Anggaran RKPd Tahun Berjalan (Tahun n-1 = 2024) yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPd yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPD s/d Tahun lalu		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPD s/d Tahun lalu (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
								I									
4	5	6	Rp	7	Rp	8	Rp	9	Rp	11	Rp	12	Rp	13	14=12/6 x 100%	15	16
Penyusunan kebijakan perlindungan khusus anak kewenangan kab/ kota	Jumlah kebijakan perlindungan khusus anak di tingkat kab/ kota			2 Dokumen	29.801.550,00	1 Dokumen	86.357.300,00	1 Dokumen	1.532.000,00	1 Dokumen	1.532.000,00	2 Dokumen	29.801.550,00				
Penyediaan Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus yang Memerlukan Koordinasi Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase monitoring dan evaluasi kasus yang telah ditangani			100%	98.449.300,00	100%	210.140.000,00	25,00%	15.477.250,00	25,00%	15.477.250,00	100%	98.449.300,00				
Penyediaan Layanan Pengaduan Masyarakat bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah AMPK yang mendapatkan layanan pengaduan			4 orang	26.256.000,00	12 orang	25.000.000,00	10 orang	0,00	10 orang	0,00	4 orang	26.256.000,00				Dinas Sosial PPKB PPPA
Koordinasi Pelaksanaan Layanan AMPK	Jumlah AMPK yang mendapatkan layanan			4 Orang	72.193.300,00		185.140.000,00		15.477.250,00	0	15.477.250,00	4 Orang	72.193.300,00				Dinas Sosial PPKB PPPA
PENGUATAN DAN PENGEMBANGAN LEMBAGA PENYEDIA LAYANAN BAGI ANAK YANG MEMERLUKAN PERLINDUNGAN KHUSUS TINGKAT DAERAH KABUPATEN/KOTA			0,00		41.900.747,00	100%	39.975.000,00	25,00%	0,00	25,00%	0,00		41.900.747,00				
PENINGKATAN KAPASITAS SDM LEMBAGA PENYEDIA LAYANAN PERLINDUNGAN DAN PENANGANAN BAGI AMPK TINGKAT DAERAH KABUPATEN/KOTA	Jumlah SDM Penyedia Layanan yang terlatih dan mendapatkan sertifikat dan Penanganan AMPK			10 orang	41.900.747,00	5 orang	39.975.000,00	5 orang	0,00	5 orang	0,00	10 orang	41.900.747,00				Dinas Sosial PPKB PPPA
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA				93,56%	2.276.361.205,00	100,00%	2.349.228.611,00	16,67%	89.866.820,00	16,67%	89.866.820,00	93,56%	2.276.361.205,00				
Program Pengendalian Penduduk	Persentase kepemilikan dokumen kependudukan	100%	452.100.000,00	87,50%	86.664.235,00	100,00%	85.501.746,00	12,50%	3.193.500,00	12,50%	3.193.500,00	87,50%	86.664.235,00				
Pemaduan dan Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Daerah Provinsi dengan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka Pengendalian Kuantitas Penduduk	Jumlah dokumen kependudukan yang dihasilkan			75	15.279.950,00	100%	12.302.050,00		0,00	0,00%	0,00	75%	15.279.950,00				
Implementasi Pendidikan Kependudukan Pendidikan Formal dan Nonformal	Jumlah Pelaksanaan Pendidikan Kependudukan Jalur Pendidikan Formal dan Nonformal			3 laporan	15.279.950,00	1 laporan	12.302.050,00		0,00	0	0,00	3 laporan	15.279.950,00				Dinas Sosial PPKB PPPA
Pemetaan Pengendalian Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah rumah dataku yang dikembangkan	0,00	100%		71.384.285,00	100%	73.199.696,00	25,00%	3.193.500,00	25,00%	3.193.500,00	100%	71.384.285,00				

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (output)	Target RPD pada akhir periode Akhir RPD (2026)		Realisasi Capaian Kinerja RPD Sampai Dengan RKPD Tahun Lalu		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun Berjalan (Tahun n-1 = 2024) yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPD s/d Tahun lalu		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPD s/d Tahun lalu (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab			
								I											
4	5	6	Rp	7	Rp	8	Rp	9	Rp	10	Rp	11	Rp	12	Rp	13	14=7x13	15=14/6 x 100%	16
Pencatatan Dan Pengumpulan Data Keluarga	Jumlah Laporan Pencatatan dan PengumpulanData Keluarga			9 laporan	19.400.000,00	3	19.200.000,00	3	0,00	3	0,00	9 laporan	19.400.000,00						Dinas Sosial PPKB PPPA
Pengolahan Dan Pelaporan Data Pengendalian Lapangan Dan Pelayanan KB	Jumlah Dokumen Pengolahan dan Pelaporan Data Pengendalian Lapangan dan Pelayanan KB			6 Dokume n	21.055.720,00	3	24.000.000,00	3	3.193.500,00	3	3.193.500,00	6 Dokumen	21.055.720,00						Dinas Sosial PPKB PPPA
Pembentukan dan operasionalisasi Rumah Data Kependudukan di Kampung KB Untuk Memperkuat Integrasi Program Bangsa Kencana di Sektor Lain	Jumlah Rumah Data Kependudukan di Kampung KB yang aktif Untuk Memperkuat Integrasi Program Bangsa Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) di Sektor Lain yang dibentuk			16 Unit	30.928.565,00	16	29.999.696,00	16	0,00	16	0,00	16 Unit	30.928.565,00						Dinas Sosial PPKB PPPA
Program Pembinaan Keluarga Berencana (KB)	Persentase CPR	67,00%	780.640.000,00	84,79%	1.171.506.159,00	100%	1.107.417.465,00	12,50%	30.782.395,00	12,50%	30.782.395,00	84,79%	1.171.506.159,00						
Pelaksanaan Advokasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk dan KB Sesuai Kearifan Budaya Lokal	Jumlah Peserta KB Baru dan Pembinaan Peserta KB Aktif		0,00	100%	479.389.112,00	100%	477.997.465,00	25,00%	27.177.895,00	25,00%	27.177.895,00	100%	479.389.112,00						
Pengendalian Program KKBPK	Jumlah Laporan Hasil Pengendalian Program KKBPK			4 Laporan	139.779.915,00	1 laporan	60.000.000,00	1 laporan	8.942.520,00	1 laporan	8.942.520,00	4 Laporan	139.779.915,00						Dinas Sosial PPKB PPPA
Pengelolaan Operasional Dan Sarana Di Balai Penyuluhan Bangsa Kencana				0	70.339.950,00		97.997.465,00		10.911.150,00	0	10.911.150,00	0%	70.339.950,00						Dinas Sosial PPKB PPPA
Pelaksanaan Mekanisme Operasional Program Bangsa Kencana Melalui Rapat Koordinasi Kecamatan (Rakorcam), Rapat Koordinasi Desa (Rakordes), Dan Mini Lokakarya (Minilok)				0	28.211.827,00		40.000.000,00		3.794.225,00	0	3.794.225,00	0%	28.211.827,00						Dinas Sosial PPKB PPPA
Promosi Dan Kie Program Bangsa Kencana Melalui Media Massa Cetak Dan Elektronik Serta Media Luar Ruang				0	89.315.000,00		125.000.000,00		3.530.000,00	0	3.530.000,00	0%	89.315.000,00						Dinas Sosial PPKB PPPA
Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) ProgramBangga Kencana sesuai Kearifan Budaya Lokal							40.000.000,00		0,00	0	0,00								Dinas Sosial PPKB PPPA
Advokasi Program Bangsa Kencana Oleh Pokja Advokasi Kepada Stakeholders Dan Mitra Kerja				0	151.742.420,00	30	115.000.000,00		0,00	0	0,00	0%	151.742.420,00						Dinas Sosial PPKB PPPA
Pendayagunaan Tenaga Penyuluh KB/Petugas Lapangan KB (PKB/PLKB)	Jumlah PKB, Kader IMP yang dibina		0,00	100%	250.449.997,00	100%	355.880.000,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	100%	250.449.997,00						
Penggerakan Kader Institusi Masyarakat Pedesaan (IMP)				0	46.200.000,00	88	128.000.000,00		0,00	0	0,00	0%	46.200.000,00						Dinas Sosial PPKB PPPA

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (output)	Target RPD pada akhir periode Akhir RPD (2026)		Realisasi Capaian Kinerja RPD Sampai Dengan RKPD Tahun Lalu		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun Berjalan (Tahun n-1 = 2024) yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPD s/d Tahun lalu		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPD s/d Tahun lalu (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								I								
								/								
4	5	6		7		8		9		11		12		13		16
		K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
Pembinaan IMP dan Program Bangga Kencana di Lini Lapangan oleh PKB/PLKB	Jumlah Organisasi yang Mengikuti Pembinaan IMP dan Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) di Lini Lapangan oleh PKB/PLKB			40 organisas i	204.249.997,00	40	227.880.000,00		0,00	0	0,00	40 organisasi	204.249.997,00			Dinas Sosial PPKB PPPA
Pengendalian Dan Pendistribusian Kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi serta Pelaksanaan Pelayanan KB di Daerah Kabupaten/ Kota				0,00	249.515.400,00	100%	127.940.000,00	25,00%	3.604.500,00	25,00%	3.604.500,00		249.515.400,00			
Pengendalian Pendistribusian Alat Dan Obat Kontrasepsi Dan Sarana Penunjang Pelayanan KB Ke Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan Dan Jejaringnya				0	1.275.000,00		7.184.000,00		0,00	0	0,00	0%	1.275.000,00			Dinas Sosial PPKB PPPA
Peningkatan Kesertaan Penggunaan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)				0	56.707.500,00		103.659.000,00		3.604.500,00	0	3.604.500,00	0%	56.707.500,00			Dinas Sosial PPKB PPPA
Penyediaan Sarana Penunjang Pelayanan KB				0	182.350.000,00					0	0,00	0%	182.350.000,00			Dinas Sosial PPKB PPPA
Pembinaan Pelayanan Keluarga Berencana Dan Kesehatan Reproduksi Di Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan Dan Jejaringnya				0	9.182.900,00		17.097.000,00		0,00	0	0,00	0%	9.182.900,00			Dinas Sosial PPKB PPPA
Pemberdayaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota dalam Pelaksanaan Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB	Persentase OPD yang berpartisipasi dalam program kampung KB			0,00	192.151.650,00	100%	145.600.000,00		0,00	0,00%	0,00		192.151.650,00			
Penguatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan dan Mitra Kerja Lainnya dalam Pelaksanaan Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB	Jumlah Organisasi yang Mendapatkan Penguatan Peran Serta Organisasi dalam Pelaksanaan Kerja Lainnya dalam Pelaksanaan Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB			40 Organisa si	0,00		56.000.000,00		0,00	0	0,00	40 Organisasi	0,00			Dinas Sosial PPKB PPPA
Integrasi Pembangunan Lintas Sektor Di Kampung KB				0	3.543.750,00		13.300.000,00		0,00	0	0,00	0%	3.543.750,00			Dinas Sosial PPKB PPPA
Pelaksanaan Dan Pengelolaan Program Bangga Kencana Di Kampung Keluarga Berkualitas				0	188.607.900,00		76.300.000,00		0,00	0	0,00	0%	188.607.900,00			Dinas Sosial PPKB PPPA

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (output)	Target RPD pada akhir periode Akhir RPD (2026)		Realisasi Capaian Kinerja RPD Sampai Dengan RKPD Tahun Lalu		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun Berjalan (Tahun n-1 = 2024) yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPD s/d Tahun lalu		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPD s/d Tahun lalu (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								I								
4	5	6		7		8		9		11		12		13=12/6 x 100%		16
		K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
Program Pemberdayaan dan Peningkatan Keluarga Sejahtera (KS)	Persentase Keluarga yang mengikuti kegiatan Ketahanan Keluarga	67,00%	1.832.680.000,00		1.018.190.811,00	100,00%	1.156.309.400,00	25,00%	55.890.925,00	25,00%	55.890.925,00		1.018.190.811,00			
Pelaksanaan Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan Kesejahteraan Keluarga	Jumlah kelompok ketahanan dan kesejahteraan keluarga yang dibina		0,00		274.456.812,00	100%	731.558.000,00	25,00%	1.167.750,00	25,00%	1.167.750,00		274.456.812,00			
Promosi dan Sosialisasi Kelompok Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (Menjadi Orang Tua Hebat, Generasi Berencana, Kelanjutusiaan serta Pengelolaan Keuangan Keluarga)	Jumlah Laporan Hasil Promosi dan Sosialisasi Kelompok Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (Menjadi Orang Tua Hebat, Generasi Berencana, Kelanjutusiaan serta Pengelolaan Keuangan Keluarga)			3 Laporan	122.620.812,00	1	30.000.000,00		0,00	0	0,00	3 Laporan	122.620.812,00			Dinas Sosial PPKB PPPA
Pengelolaan Ketahanan Keluarga Melalui Pusat Pelayanan Keluarga Sejahtera (PPKS)				0	151.836.000,00		9.598.000,00		1.167.750,00	0	1.167.750,00	0%	151.836.000,00			Dinas Sosial PPKB PPPA
Pengadaan Sarana Kelompok Kegiatan Ketahanan Dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R Dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA)				0	151.836.000,00		130.000.000,00		0,00	0	0,00	0%	151.836.000,00			Dinas Sosial PPKB PPPA
Penyediaan Biaya Operasional bagi Pengelola dan Pelaksana (Kader) Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA)				0	151.836.000,00	223	561.960.000,00		0,00	0	0,00	0%	151.836.000,00			Dinas Sosial PPKB PPPA
Pelaksanaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota dalam Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga	Persentase OPD yang berpartisipasi dalam program kampung KB		0,00	100,00%	743.733.999,00	100,00%	424.751.400,00	25,00%	54.723.175,00	25,00%	54.723.175,00	100%	743.733.999,00			
Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Mitra dan Organisasi Kemasyarakatan dalam Pengelolaan Program Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	Jumlah Organisasi yang Mengikuti Peningkatan Kapasitas Mitra dan Organisasi Kemasyarakatan dalam Pengelolaan Program Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)			23 Organisasi	492.733.999,00	23 Organisasi	140.751.400,00		40.563.175,00	0	40.563.175,00	23 Organisasi	492.733.999,00			Dinas Sosial PPKB PPPA

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (output)	Target RPD pada akhir periode Akhir RPD (2026)		Realisasi Capaian Kinerja RPD Sampai Dengan RKPD Tahun Lalu		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun Berjalan (Tahun n-1 + 2024) yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPD s/d Tahun lalu		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPD s/d Tahun lalu (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
								/									
4	5	6	Rp	7	Rp	8	Rp	9	Rp	13	Rp	14=7*13	Rp	15=14/6 x 100%	K	Rp	16
Promosi dan Sosialisasi Program Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga bagi Mitra Kerja	Jumlah Laporan Hasil Promosi dan Sosialisasi Program Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga bagi Mitra Kerja				0,00		20.000.000,00		0,00	0	0,00		0,00				Dinas Sosial PPKB PPPA
Pemantauan Data Dan Informasi Keluarga Berisiko Stunting (Termasuk Remaja Calon Pengantin/Calon Pus, Ibu Hamil, Pasca Salin/Kelahiran, Baduta/Balita)				120 orang	119.000.000,00		120.000.000,00		0,00	0	0,00	120 orang	119.000.000,00				
Pendampingan Keluarga Berisiko Stunting (Termasuk Remaja Calon Pengantin/Calon Pus, Ibu Hamil, Pasca Salin/Kelahiran, Baduta/Balita)				40 TPK	132.000.000,00		144.000.000,00		14.160.000,00	0	14.160.000,00	40 TPK	132.000.000,00				
DINAS PANGAN DAN PERTANIAN			28.775.960.098,00	97,90%	12.595.336.661,55	100,00%	11.532.994.236,00	15,49%	2.119.680.042,00	15,49%	2.119.680.042,00	98%	12.595.336.661,55				
URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR																	
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PANGAN		100,00%	23.863.503.698,00	99,24%	8.440.744.352,00	100,00%	9.007.392.036,00	6,47%	2.092.357.452,00	6,47%	2.092.357.452,00	99%	8.440.744.352,00				
Program Penunjang Urusan Pemerintahan Kabupaten/ Kota	Persentase Pemenuhan Penunjang yang Dipenuhi	100,00%	23.210.183.698,00	100,00%	8.128.596.307,00	100,00%	8.797.842.036,00	19,40%	2.092.357.452,00	19,40%	2.092.357.452,00	100%	8.128.596.307,00				
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan layanan administrasi keuangan perangkat daerah			100%	6.877.037.384,00	100%	6.406.468.292,00	25,00%	1.636.759.905,00	25,00%	1.636.759.905,00	100%	6.877.037.384,00				
Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN			756 Orang/bulan	6.877.037.384,00	756	6.406.468.292,00	189	1.636.759.905,00	189	1.636.759.905,00	756 Orang/bulan	6.877.037.384,00				Dinas Pangan dan Pertanian
Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan layanan administrasi kepegawaian perangkat daerah			100%	24.000.000,00		0,00		0,00	0,00%	0,00	100%	24.000.000,00				
Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan			54 Paket	24.000.000,00					0	0,00	54 Paket	24.000.000,00				Dinas Pangan dan Pertanian
Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan layanan administrasi umum perangkat daerah			100%	272.340.137,00	100%	361.033.555,00	25,00%	29.272.820,00	25,00%	29.272.820,00	100%	272.340.137,00				
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan			4 Paket	9.364.000,00	4	16.000.000,00	1	0,00	1	0,00	4 Paket	9.364.000,00				Dinas Pangan dan Pertanian
Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan			4 Paket	68.704.650,00	4	71.505.945,00	1	4.655.900,00	1	4.655.900,00	4 Paket	68.704.650,00				Dinas Pangan dan Pertanian
Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan			12 Paket	6.863.700,00	12	17.193.350,00	3	3.064.320,00	3	3.064.320,00	12 Paket	6.863.700,00				Dinas Pangan dan Pertanian
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD			24 Laporan	187.407.787,00	24	256.334.260,00	6	21.552.600,00	6	21.552.600,00	24 Laporan	187.407.787,00				Dinas Pangan dan Pertanian
Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Pemenuhan Barang Milik Daerah Sesuai Dengan Perencanaan			100%	35.960.000,00	100%	36.981.300,00		0,00	0,00%	0,00	100%	35.960.000,00				

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (output)	Target RPD pada akhir periode Akhir RPD (2026)		Realisasi Capaian Kinerja RPD Sampai Dengan RKPD Tahun Lalu		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun Berjalan (Tahun n-1 = 2024) yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPD s/d Tahun lalu		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPD s/d Tahun lalu (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
								I									
4	5	6	Rp	7	Rp	8	Rp	9	Rp	11	Rp	12	Rp	13=14/6 x 100%	K	Rp	16
Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan			3 unit	35.960.000,00	4	36.981.300,00		0,00	0	0,00	3 unit	35.960.000,00				Dinas Pangan dan Pertanian
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang terpenuhi			100%	605.364.386,00	100%	1.572.305.734,00	25,00%	362.707.277,00	25,00%	362.707.277,00	100%	605.364.386,00				
Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat			12 Laporan	5.570.000,00	12	4.003.700,00	3	800.000,00	3	800.000,00	12 Laporan	5.570.000,00				Dinas Pangan dan Pertanian
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan			36 Laporan	157.439.634,00	36	199.999.034,00	9	30.933.045,00	9	30.933.045,00	36 Laporan	157.439.634,00				Dinas Pangan dan Pertanian
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan			12 Laporan	442.354.752,00	12	1.368.303.000,00	3	330.974.232,00	3	330.974.232,00	12 Laporan	442.354.752,00				Dinas Pangan dan Pertanian
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase ketersediaan Barang Milik Daerah berkondisi baik			100%	313.894.400,00	100%	421.053.155,00	22,00%	63.617.450,00	22,00%	63.617.450,00	100%	313.894.400,00				
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya			55 unit	264.084.650,00	55	315.000.000,00	900,00%	48.752.150,00	9	48.752.150,00	55 unit	264.084.650,00				Dinas Pangan dan Pertanian
Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara			5 unit	25.669.250,00	5	45.000.000,00	300,00%	8.024.300,00	3	8.024.300,00	5 unit	25.669.250,00				Dinas Pangan dan Pertanian
Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi			3 unit	24.140.500,00	7	61.053.155,00	100,00%	6.841.000,00	1	6.841.000,00	3 unit	24.140.500,00				Dinas Pangan dan Pertanian
Pemeliharaan/Rehabilitasi Tanah	Luas Tanah yang Dilakukan Pemeliharaan/Rehabilitasi			0,5 Ha	0,00					0	0,00	0,5 Ha	0,00				Dinas Pangan dan Pertanian
PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT	Persentase Angka Kecukupan Energi (AKE)	100,00%	563.320.000,00		303.077.070,00	100,00%	182.061.800,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00		303.077.070,00				
	Persentase Angka Kecukupan Protein (AKP)	100,00%			0,00			0,00%		0,00%	0,00		0,00				
Penyediaan dan Penyaluran Pangan Pokok atau Pangan Lainnya sesuai dengan Kebutuhan Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan	Ketersediaan Pangan untuk Dikonsumsi Penduduk			284417 Kkal/kap/hr	58.674.172,00	2.400 Kkal/kap/ hr)	142.435.000,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	284417 Kkal/kap/hr	58.674.172,00				
Penyediaan Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal	Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal yang Tersedia			1 Dokumen	29.792.000,00	1 laporan	142.435.000,00		0,00	0	0,00	1 Dokumen	29.792.000,00				Dinas Pangan dan Pertanian
Pengembangan Kelembagaan Usaha Pangan Masyarakat dan Toko Tani Indonesia	Jumlah Kelembagaan Usaha Pangan Masyarakat dan Toko Tani Indonesia yang Dikembangkan			0	0,00					0	0,00	0%	0,00				
Pemantauan Harga dan Pasokan Pangan	Informasi Harga dan Pasokan Pangan			0	0,00					0	0,00	0%	0,00				
Penyusunan Neraca Bahan Makanan (NBM)	Informasi Neraca Bahan Makanan (NBM)			1 Dokumen	28.882.172,00					0	0,00	1 Dokumen	28.882.172,00				Dinas Pangan dan Pertanian
Pengelolaan dan Keseimbangan Cadangan Pangan Kabupaten/Kota	Jumlah Cadangan Pangan Pemerintah Daerah			15612 ton	192.776.976,00		0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	15612 ton	192.776.976,00				

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (output)	Target RPD pada akhir periode Akhir RPD (2026)		Realisasi Capaian Kinerja RPD Sampai Dengan RKPD Tahun Lalu		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun Berjalan (Tahun n-1 = 2024) yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPD s/d Tahun lalu		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPD s/d Tahun lalu (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab			
								I											
								/											
4	5	6	Rp	7	Rp	8	Rp	9	Rp	10	Rp	11	Rp	12	Rp	13	14=7x13	15=14/6 x 100%	16
Pengadaan Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten/Kota	Jumlah Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten/Kota			15612 ton	192.776.976,00					0	0,00	15612 ton	192.776.976,00						Dinas Pangan dan Pertanian
Pelaksanaan Pencapaian Target Konsumsi Pangan Perkapita/Tahun sesuai dengan Angka Kecukupan Gizi	Angka Kecukupan Energi (AKE)			1852 kkal/kapita/hari	51.625.922,00	1.853 kkal/kapita/hari	39.626.800,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	1852 kkal/kapita/hari	51.625.922,00						
	Angka Kecukupan Protein (AKP)			629 gram/kapita/hari	0,00	63 gram/kapita/hari		0,00%		0,00%	0,00	629 gram/kapita/hari	0,00						
Penyusunan dan Penetapan Target Konsumsi Pangan Per Kapita Per Tahun	Target Konsumsi Pangan Per Kapita Per Tahun			0	0,00					0	0,00	0	0,00						Dinas Pangan dan Pertanian
Pemberdayaan Masyarakat dalam Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal	Jumlah Pemberdayaan Kelompok Masyarakat dalam Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal			1 Laporan	51.625.922,00	1 Laporan	39.626.800,00		0,00	0	0,00	1 Laporan	51.625.922,00						Dinas Pangan dan Pertanian
PROGRAM PENGAWASAN KEAMANAN PANGAN	Persentase Pengawasan Pangan Segar	100,00%	90.000.000,00	100,00%	9.070.975,00	100,00%	27.488.200,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	100%	9.070.975,00						
Pelaksanaan Pengawasan Keamanan Pangan Segar Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Pengawasan Keamanan Pangan Segar Daerah Kabupaten/Kota			1 laporan	9.070.975,00	1 laporan	27.488.200,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	1 laporan	9.070.975,00						
Rekomendasi Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Rekomendasi Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan Daerah Kabupaten/Kota			1 Dokumen	9.070.975,00	1 Dokumen	27.488.200,00		0,00	0	0,00	1 Dokumen	9.070.975,00						Dinas Pangan dan Pertanian
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN		100,00%	1.753.356.400,00	100,00%	59.052.992.755,00	100,00%	412.798.400,00	25,00%	0,00	25,00%	0,00	100%	59.052.992.755,00						
PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA	Produksi budidaya ikan	753 ton/tahun	1.621.036.400,00	100,00%	53.145.234.955,00	752 Ton/Tahun	340.422.000,00	150,92 Ton/Tahun	0,00	0,00%	0,00	100%	53.145.234.955,00						
Pengelolaan Pembudidayaan Ikan	Jumlah Pelaku Perikanan yang menerapkan teknologi perikanan			20 orang	53.145.234.955,00	20 orang	340.422.000,00	5 orang	0,00	5 orang	0,00	20 orang	53.145.234.955,00						
Penyediaan Prasarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Prasarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota			1 Unit	442.837.460,00	1 Unit	305.524.000,00		0,00	0	0,00	1 Unit	442.837.460,00						Dinas Pangan dan Pertanian
Penjaminan Ketersediaan Sarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Sarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota			1 Unit	8.861.488.955,00	1 Unit	34.898.000,00		0,00	0	0,00	1 Unit	8.861.488.955,00						
Program Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan	Jumlah Jenis Produk Olahan Perikanan	1 jenis	132.320.000,00	100,00%	59.077.578,00	1 jenis	72.376.400,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	100%	59.077.578,00						
Penerbitan Tanda Daftar Usaha Pengolahan Hasil Perikanan bagi Usaha Skala Mikro dan Kecil	Jumlah Forum Peningkatan Konsumsi Ikan (FORIKAN) di Kota Padang Panjang dan Provinsi			2 kali	59.077.578,00	2 kali	72.376.400,00		0,00	0,00%	0,00	2 kali	59.077.578,00						
Penyediaan Data dan Informasi Usaha Pemasaran dan Pengolahan Hasil Perikanan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Data dan Informasi Usaha Pemasaran dan Pengolahan Hasil Perikanan berdasarkan Skala Usaha dan Risiko			1 Dokumen	59.077.578,00	1 Dokumen	72.376.400,00		0,00	0	0,00	1 Dokumen	59.077.578,00						Dinas Pangan dan Pertanian
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN		152,80%	3.159.100.000,00	94,45%	3.564.062.382,00	71,52%	2.112.803.800,00	15,00%	27.322.590,00	15,00%	27.322.590,00	94,45%	3.564.062.382,00						
Program Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian	Persentase Pemenuhan Sarana Pertanian	85,0%	1.134.582.000,00	93,75%	2.752.954.973,00	80,00%	1.701.848.450,00	25,00%	13.231.040,00	25,00%	13.231.040,00	93,75%	2.752.954.973,00						

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (output)	Target RPD pada akhir periode Akhir RPD (2026)		Realisasi Capaian Kinerja RPD Sampai Dengan RKPd Tahun Lalu		Target Kinerja dan Anggaran RKPd Tahun Berjalan (Tahun n-1 = 2024) yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPD s/d Tahun lalu		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPD s/d Tahun lalu (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
								I										
								/										
4	5	6		7		8		9		11		12		13=14/6 x 100%	K	Rp	16	
		K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp			
	Persentase Pemenuhan Sarana Peternakan	85%		25,00%	0	77,00%				0,00%	0,00	25%	0,00					
Pengawasan Penggunaan Sarana Pertanian	Jumlah Jenis Sarana Pertanian yang Tersedia			2 jenis	379.103.775,00	2 jenis	403.025.000,00		0,00	0,00%	0,00	2 jenis	379.103.775,00					
Pendampingan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian	Jumlah Pengawasan Pupuk dan Pestisida yang dilaksanakan			12 laporan	379.103.775,00	12 laporan	403.025.000,00	3 laporan	0,00	3 laporan	0,00	12 laporan	379.103.775,00				Dinas Pangan dan Pertanian	
Pengelolaan Sumber Daya Genetik (SDG) Hewan, Tumbuhan dan Mikro Organisme Kewenangan Kabupaten/ Kota	Produksi Tanaman Hias			2 kelompok	75.726.516,00	80.055 Tangkai	123.600.000,00	17.362 Tangkai	0,00	0,00%	0,00	2 kelompok	75.726.516,00					
	Produksi Padi			86136 ton	0,00	8.573,4 Ton		2.280,18 Ton		0,00%	0,00	86136 ton	0,00					
	Luas Lahan Pertanian Organik			73039 tangkai	0,00	2 kelompok		2 kelompok		0,00%	0,00	73039 tangkai	0,00					
Peningkatan Kualitas SDG Hewan/Tanaman	Jumlah Pelaksanaan Peningkatan Kualitas SDG Hewan/Tanaman			0	75.726.516,00	1 Dokumen	123.600.000,00		0,00	0	0,00	0%	75.726.516,00				Dinas Pangan dan Pertanian	
Peningkatan Mutu dan Peredaran Benih/Bibit Ternak dan Tanaman Pakan Ternak serta Pakan dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Sapi Rearing Unit dan Pembibitan			8 ekor	288.816.232,00	10 ekor	167.883.300,00	7 ekor	13.231.040,00	7 ekor	13.231.040,00	8 ekor	288.816.232,00					
Pengawasan Mutu dan Benih/Bibit Ternak, Bahan Pakan/Pakan/Tanaman Skala Kecil	Jumlah Pengawasan Mutu Benih/Bibit Ternak, Bahan Pakan/Pakan/Tanaman Skala Kecil			1 Laporan	288.816.232,00	1 Laporan	167.883.300,00		13.231.040,00	0	13.231.040,00	1 Laporan	288.816.232,00				Dinas Pangan dan Pertanian	
Penyediaan Benih/Bibit Ternak dan Hijauan Pakan Ternak yang Sumbernya dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota Lain	Jumlah KK Miskin yang Dibantu			59 kk	2.009.308.450,00	65 kk	1.007.340.150,00		0,00	0,00%	0,00	59 kk	2.009.308.450,00					
Pengadaan Bibit Ternak yang Sumbernya dari Daerah Kabupaten/Kota Lain	Jumlah bibit ternak yang sumbernya dari daerah kabupaten/kota lain			485 Ekor	2.009.308.450,00	485 Ekor	1.007.340.150,00		0,00	0	0,00	485 Ekor	2.009.308.450,00				Dinas Pangan dan Pertanian	
Program Penyediaan dan Pengembangan Prasarana Pertanian	Persentase Pemenuhan Prasarana Pertanian	85%	495.100.000,00	100,00%	109.429.025,00	80,00%	99.142.400,00	25,00%	11.073.600,00	25,00%	11.073.600,00	100%	109.429.025,00					
	Persentase Pemenuhan Prasarana Peternakan	85%		25,00%	0,00	75,00%		0,00%		0,00%	0,00	25%	0,00					
Pembangunan Prasarana Pertanian	Jumlah Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Usaha Tani				10065452500,00	1 unit	67.605.000,00	0,00%	11.073.600,00	0,00%	11.073.600,00		10.065.452.500,00					
	Jumlah Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jalan Usaha Tani			1 unit	0%	1 unit		0,00%			0,00	1 unit	0,00					
	Jumlah Prasarana Peternakan Yang Disediakan			1 unit	0%	1 unit		0,00%			0,00	1 unit	0,00					
Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jalan Usaha Tani	Jalan Usaha Tani yang Dibangun, Direhabilitasi dan Dipelihara			0	0,00	1 unit	20.000.000,00		0,00	0	0,00	0%	0,00				Dinas Pangan dan Pertanian	
Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana Pertanian Lainnya	Jumlah Prasarana Pertanian Lainnya yang Dibangun, Direhabilitasi dan Dipelihara			1 Unit	100.654.525,00	1 unit	30.805.000,00	1 unit	11.073.600,00	1 unit	11.073.600,00	1 Unit	100.654.525,00					

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (output)	Target RPD pada akhir periode Akhir RPD (2026)		Realisasi Capaian Kinerja RPD Sampai Dengan RKPD Tahun Lalu		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun Berjalan (Tahun n-1 = 2024) yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPD s/d Tahun lalu		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPD s/d Tahun lalu (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
								I										
4	5	6	Rp	7	Rp	8	Rp	9	Rp	10	Rp	11	Rp	12	13	14=12/13	15=14/6 x 100%	16
Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Usaha Tani						1 unit	16.800.000,00		0,00	0		0,00						
Pengelolaan Wilayah Sumber Bibit Ternak dan Rumpun/Galur Ternak dalam Daerah Kabupaten/ Kota	Jumlah Kelahiran Ternak Hasil IB			127 ekor	8.774.500,00	41 ekor	31.537.400,00	44 ekor	0,00	0,00%	0,00	127 ekor	8.774.500,00					
Pelestarian dan Pemanfaatan Wilayah Sumber Bibit Ternak dan Rumpun/Galur Ternak	Jumlah Wilayah Sumber Bibit Ternak dan Rumpun/Galur Ternak yang Dilestarikan dan Dimanfaatkan			1 Laporan	8.774.500,00	1 Laporan	31.537.400,00		0,00	0	0,00	1 Laporan	8.774.500,00					Dinas Pangan dan Pertanian
PROGRAM PENGENDALIAN KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER	Persentase Penurunan Penyakit Ternak/ Hewan/ Kasus	95,00%	1.215.252.000,00		353.873.161,00	90,00%	162.795.800,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00		353.873.161,00					
Penjaminan Kesehatan Hewan, Penutupan dan Pembukaan Daerah Wabah Penyakit Hewan Menular Dalam daerah Kabupaten/Kota	Persentase Pelayanan Medis Veteriner			100%	174.250.259,00	100%	128.485.800,00		0,00	0,00%	0,00	100%	174.250.259,00					
Penanggulangan Daerah Terdampak Wabah Penyakit Hewan Menular	Jumlah Daerah Terdampak Wabah yang Terkendali			1 Laporan	105.569.812,00	1 Laporan	8.485.800,00		0,00	0	0,00	1 Laporan	105.569.812,00					Dinas Pangan dan Pertanian
Pemberantasan Penyakit Hewan Menular dan Zoonosis dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah wilayah atau kawasan yang mengalami penurunan kasus penyakit hewan menular dan zoonosis dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/kota			1 Laporan	68.680.447,00	1 Laporan	120.000.000,00		0,00	0	0,00	1 Laporan	68.680.447,00					
Pengelolaan Pelayanan Jasa Laboratorium dan Jasa Medik Veteriner dalam Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Pelayanan Pusat Kesehatan Hewan (PUSKESWAN)			100%	46.170.696,00	100%	0,00		0,00	0,00%	0,00	100%	46.170.696,00					
Penyediaan Pelayanan Jasa Medik Veteriner	Jumlah Pelayanan Jasa Medik Veteriner			1 Laporan	46.170.696,00					0	0,00	1 Laporan	46.170.696,00					Dinas Pangan dan Pertanian
Penerapan dan Pengawasan Persyaratan Teknis Kesehatan Masyarakat Veteriner	Jumlah Livestock Expo yang Diikuti				133.452.206,00	1 kali	34.310.000,00		0,00	0,00%	0,00		133.452.206,00					
	Jumlah Sertifikasi Produk Susu			1 sertifikat	0,00	1 sertifikat					0,00	1 sertifikat	0,00					
Pengawasan Peredaran Hewan dan Produk Hewan	Jumlah Pengawasan Peredaran Hewan dan Produk Hewan			1 Laporan	133.452.206,00	1 Laporan	11.310.000,00		0,00	0	0,00	1 Laporan	133.452.206,00					Dinas Pangan dan Pertanian
Pembinaan Penerapan persyaratan hygiene sanitasi pada unit usaha produk hewan	Jumlah unit usaha produk hewan yang telah dibina untuk penerapan persyaratan hygiene sanitasi			0	0,00	1 unit usaha	23.000.000,00		0,00	0	0,00	0%	0,00					
PROGRAM PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA PERTANIAN	Persentase Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian yang Tertangani	85,00%	61.846.000,00		50.687.980,00	80,00%	10.000.000,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00		50.687.980,00					
Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian Kabupaten/Kota	Premi Asuransi Usaha Tanaman Padi (AUTP)			4198 ha	50.687.980,00	147 ha	10.000.000,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	4198 ha	50.687.980,00					

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (output)	Target RPD pada akhir periode Akhir RPD (2026)		Realisasi Capaian Kinerja RPD Sampai Dengan RKPD Tahun Lalu		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun Berjalan (Tahun n-1 = 2024) yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPD s/d Tahun lalu		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPD s/d Tahun lalu (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								I								
4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14=7x13	15=14/6 x 100%	16				
		K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
Pengendalian Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan	Jumlah Luas Serangan Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan yang Dikendalikan			10 Ha	45.908.000,00					0	0,00	10 Ha	45.908.000,00			Dinas Pangan dan Pertanian
Penanggulangan Pasca Bencana Alam Bidang Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan	Jumlah penanggulangan pasca bencana alam bidang tanaman pangan, hortikultura dan perkebunan			1 Laporan	4.779.980,00	1 Laporan	10.000.000,00		0,00	0	0,00	1 Laporan	4.779.980,00			
PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN	Persentase kelompok tani yang mendapatkan penyuluhan Inovasi Teknologi Pertanian	414,00%	252.320.000,00	100,00%	297.117.243,00	27,60%	139.017.150,00	25,00%	3.017.950,00	25,00%	3.017.950,00	100%	297.117.243,00			
Pelaksanaan Penyuluhan Pertanian	Jumlah Kelompok Tani yang Mendapat Penyuluhan			20 keltan	297.117.243,00	20 keltan	139.017.150,00	5 keltan	3.017.950,00	5 keltan	3.017.950,00	20 keltan	297.117.243,00			
Pengembangan Kapasitas Kelembagaan Petani di Kecamatan dan Desa	Jumlah Kelembagaan Petani di Kecamatan dan Desa yang Ditingkatkan Kapasitasnya			1 Unit	29.498.125,00	1 Unit	31.001.000,00		3.017.950,00	0	3.017.950,00	1 Unit	29.498.125,00			Dinas Pangan dan Pertanian
Penyediaan dan Pemanfaatan Sarana dan Prasarana Penyuluhan Pertanian	Jumlah Sarana dan Prasarana Penyuluhan Pertanian			1 Unit	267.619.118,00	1 Unit	108.016.150,00		0,00	0	0,00	1 Unit	267.619.118,00			
DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL			11.814.719.669,00	100,00%	3.912.943.036,00	100,00%	3.941.070.161,00	25,47%	721.241.042,00	25,47%	721.241.042,00	100%	3.912.943.036,00			
URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR																
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL		100,00%	11.814.719.669,00	100,00%	3.912.943.036,00	100,00%	3.941.070.161,00	25,47%	721.241.042,00	25,47%	721.241.042,00	100%	3.912.943.036,00			
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN / KOTA	Persentase pemenuhan urusan penunjang yang dipenuhi	100%	8.936.025.569,00	100%	3.480.541.758,00	100,00%	3.137.818.511,00	19,00%	663.127.142,00	19,00%	663.127.142,00	100%	3.480.541.758,00			
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan layanan administrasi keuangan perangkat daerah			100%	2.584.765.405,00	100%	2.337.287.819,00	25,00%	597.520.521,00	25,00%	597.520.521,00	100%	2.584.765.405,00			
Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN			42 orang / bulan	2.584.765.405,00	294 orang / bulan	2.337.287.819,00	294 orang / bulan	597.520.521,00	294 orang / bulan	597.520.521,00	42 orang / bulan	2.584.765.405,00			Disdukcapil
Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan layanan administrasi kepegawaian perangkat daerah			100%	8.500.000,00		0,00		0,00	0,00%	0,00	100%	8.500.000,00			
Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan			17 Paket	8.500.000,00					0	0,00	17 Paket	8.500.000,00			Disdukcapil
Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan layanan administrasi umum perangkat daerah			100%	240.627.202,00	100%	220.099.180,00	25,00%	22.858.602,00	25,00%	22.858.602,00	100%	240.627.202,00			
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan			10 paket	1.295.000,00	4 paket	3.522.700,00	4 paket	0,00	4 paket	0,00	10 paket	1.295.000,00			Disdukcapil
Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan			2 paket	20.042.450,00	4 paket	27.685.980,00	4 paket	620.000,00	4 paket	620.000,00	2 paket	20.042.450,00			Disdukcapil
Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan			2 Paket	6.273.000,00	12 Paket	9.995.500,00	12 Paket	0,00	12 Paket	0,00	2 Paket	6.273.000,00			Disdukcapil

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (output)	Target RPD pada akhir periode Akhir RPD (2026)		Realisasi Capaian Kinerja RPD Sampai Dengan RKPD Tahun Lalu		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun Berjalan (Tahun n-1 + 2024) yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPD s/d Tahun lalu		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPD s/d Tahun lalu (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								I								
4	5	6	Rp	7	Rp	8	Rp	9	Rp	10	Rp	11	Rp	12=7+10	13=106 x 100%	14
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD			24 Laporan	213.016.752,00	24 Laporan	178.895.000,00	6 Laporan	22.238.602,00	6 Laporan	22.238.602,00	24 Laporan	213.016.752,00			Disdukcapil
Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pemenuhan Barang Milik Daerah sesuai dengan perencanaan			100%	198.866.400,00	100%	24.109.800,00		0,00	0,00%	0,00	100%	198.866.400,00			
Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan			13 Unit	198.866.400,00	2 unit	24.109.800,00		0,00	0	0,00	13 Unit	198.866.400,00			
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah yang terpenuhi			100%	183.471.855,00	100%	236.393.712,00	20,00%	33.214.019,00	20,00%	33.214.019,00	100%	183.471.855,00			
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan			36 laporan	27.043.589,00	48 laporan	54.333.712,00	12 Laporan	6.384.019,00	12 Laporan	6.384.019,00	36 laporan	27.043.589,00			Disdukcapil
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan			6 Laporan	156.428.266,00	12 Laporan	182.060.000,00	12 Laporan	26.830.000,00	12 Laporan	26.830.000,00	6 Laporan	156.428.266,00			Disdukcapil
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase ketersediaan barang milik daerah kondusif baik			100%	264.310.896,00	100%	319.928.000,00	25,00%	9.534.000,00	25,00%	9.534.000,00	100%	264.310.896,00			
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya			9 Unit	198.116.296,00	9 Unit	243.030.000,00	9 Unit	8.834.000,00	9 Unit	8.834.000,00	9 Unit	198.116.296,00			Disdukcapil
Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara			19 Unit	5.125.000,00	17 Unit	27.030.000,00	3 unit	700.000,00	3 unit	700.000,00	19 Unit	5.125.000,00			Disdukcapil
Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi			1 Unit	61.069.600,00	1 Unit	49.868.000,00		0,00	0	0,00	1 Unit	61.069.600,00			Disdukcapil
PROGRAM PENDAFTARAN PENDUDUK	Persentase kepemilikan dokumen pendaftaran penduduk	100%	1.744.507.300,00	100,00%	156.675.700,00	100,00%	458.864.100,00	33,33%	21.001.600,00	33,33%	21.001.600,00	100%	156.675.700,00			
Pelayanan Pendaftaran Penduduk	Persentase penduduk yang terlayani terhadap dokumen pendaftaran penduduk			100%	57.819.700,00	99%	54.744.000,00	25,00%	0,00	25,00%	0,00	100%	57.819.700,00			
Peningkatan Pelayanan Pendaftaran Penduduk	Jumlah Laporan Hasil Peningkatan Pelayanan Pendaftaran Penduduk			9 Laporan	25.608.100,00	13 laporan	44.392.000,00	3 laporan	0,00	3 laporan	0,00	9 Laporan	25.608.100,00			Disdukcapil
Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen Atas Pelaporan Peristiwa Kependudukan	Jumlah Dokumen Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen Atas Pelaporan Peristiwa Kependudukan			4500 Dokumen	32.211.600,00	4500 Dokumen	10.352.000,00	1383 Dokumen	0,00	1383 Dokumen	0,00	4500 Dokumen	32.211.600,00			Disdukcapil
Penataan Pendaftaran Penduduk	Persentase pendaftaran penduduk yang terlaksana			100%	79.850.000,00	100%	236.213.100,00	50,00%	0,00	50,00%	0,00	100%	79.850.000,00			
Penyusunan Tata Cara Perencanaan, Pelaksanaan, Pemantauan, Evaluasi, Pengendalian, dan Pelaporan Penyelenggaraan Adminduk Terkait Pendaftaran Penduduk						1 dokumen	42.166.700,00	1 dokumen	0,00	1 dokumen	0,00					Disdukcapil

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (output)	Target RPD pada akhir periode Akhir RPD (2026)		Realisasi Capaian Kinerja RPD Sampai Dengan RKPD Tahun Lalu		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun Berjalan (Tahun n-1 = 2024) yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPD s/d Tahun lalu		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPD s/d Tahun lalu (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
								I									
								/									
4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	
		K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	15=14/6 x 100%	
Pengadaan Dokumen Kependudukan selain Blangko KTP-El, Formulir, dan Buku Terkait Pendaftaran Penduduk Sesuai dengan Kebutuhan	Jumlah Dokumen Kependudukan selain Blangko KTP-El, Formulir, dan Buku Terkait Pendaftaran Penduduk Sesuai dengan Kebutuhan yang Tersedia			5500 Dokumen	79.850.000,00	10000 dokumen	194.046.400,00		0,00	0	0,00	5500 Dokumen	79.850.000,00				Disdukcapil
Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk	Jumlah jenis penyelenggaraan pendaftaran penduduk			1 jenis	19.006.000,00	1 jenis	167.907.000,00	25,00%	21.001.600,00	25,00%	21.001.600,00	1 jenis	19.006.000,00				
Sosialisasi Pendaftaran Penduduk	Jumlah Laporan Hasil Sosialisasi Pendaftaran Penduduk			1 Laporan	19.006.000,00	1 Laporan	167.907.000,00	1 Laporan	21.001.600,00	1 Laporan	21.001.600,00	1 Laporan	19.006.000,00				Disdukcapil
PROGRAM PENCATATAN SIPIL	Persentase penduduk yang memiliki dokumen pencatatan sipil usia 0-18 Tahun	100%	469.064.300,00	1	119.053.904,00	100,00%	139.668.050,00	25,00%	17.600.000,00	25,00%	17.600.000,00	100%	119.053.904,00				
Pelayanan Pencatatan Sipil	Jumlah kepemilikan akte kelahiran usia 0-18 Tahun			1017 akta	119.053.904,00	2000 Akta	139.668.050,00	429 Akta	17.600.000,00	0,00%	17.600.000,00	1017 akta	119.053.904,00				
Peningkatan dalam Pelayanan Pencatatan Sipil	Jumlah Layanan Pencatatan Sipil yang Ditingkatkan			1764 layanan	119.053.904,00	2000 Layanan	139.668.050,00	429 Layanan	17.600.000,00	429 Layanan	17.600.000,00	1764 layanan	119.053.904,00				Disdukcapil
PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN	Persentase Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	100%	590.122.500,00	100,00%	141.480.374,00	100%	179.752.500,00	25,00%	18.794.100,00	25,00%	18.794.100,00	100%	141.480.374,00				
Penyelenggaraan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Jumlah penyelenggaraan informasi administrasi kependudukan			100%	141.480.374,00	12 Laporan	143.005.100,00	25,00%	18.794.100,00	25,00%	18.794.100,00	100%	141.480.374,00				
Fasilitasi Terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan			12 Laporan	20.090.200,00	12 Laporan	31.989.900,00	3 laporan	2.334.150,00	3 laporan	2.334.150,00	12 Laporan	20.090.200,00				Disdukcapil
Penyelenggaraan Pemanfaatan Data Kependudukan	Jumlah Dokumen Penyelenggaraan Pemanfaatan Data Kependudukan			1 Dokumen	1.228.500,00					0	0,00	1 Dokumen	1.228.500,00				Disdukcapil
Sosialisasi Terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan						1 laporan	20.027.600,00		0,00	0	0,00						Disdukcapil
Komunikasi, Informasi, dan Edukasi kepada Pemangku Kepentingan dan Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Komunikasi, Informasi, dan Edukasi kepada Pemangku Kepentingan dan Masyarakat			5 Dokumen	120.161.674,00	5 Dokumen	90.987.600,00	1 laporan	16.459.950,00	1 laporan	16.459.950,00	5 Dokumen	120.161.674,00				Disdukcapil
Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan			0%	0,00	1 laporan	36.747.400,00	25,00%	0,00	25,00%	0,00	0%	0,00				
Bimbingan Teknis Terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan dan Pendayagunaan Data Kependudukan	Jumlah Laporan Hasil Bimbingan Teknis Terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan dan Pendayagunaan Data Kependudukan			0	0,00	1 laporan	36.747.400,00		0,00	0	0,00	0%	0,00				Disdukcapil
PROGRAM PENGELOLAAN PROFIL KEPENDUDUKAN	Jumlah dokumen profil dan agregat kependudukan	3 dokumen	75.000.000,00	100,00%	15.191.300,00	100,00%	24.967.000,00	25,00%	718.200,00	25,00%	718.200,00	100%	15.191.300,00				
Penyusunan Profil Kependudukan	Jumlah dokumen profil dan agregat kependudukan			100%	15.191.300,00	3 Dokumen	24.967.000,00	2 Dokumen	718.200,00	0,00%	718.200,00	100%	15.191.300,00				

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (output)	Target RPD pada akhir periode Akhir RPD (2026)		Realisasi Capaian Kinerja RPD Sampai Dengan RKPd Tahun Lalu		Target Kinerja dan Anggaran RKPd Tahun Berjalan (Tahun n-1 = 2024) yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPd yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPD s/d Tahun lalu		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPD s/d Tahun lalu (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								I								
4	5	6	Rp	7	Rp	8	Rp	9	Rp	10	Rp	11	Rp	12=11/6 x 100%	13=12/6 x 100%	14
Penyediaan Data Kependudukan Kabupaten/Kota	Jumlah Data Kependudukan Kabupaten/Kota			3 Dokumen	15.191.300,00	3 Dokumen	24.967.000,00	2 Dokumen	718.200,00	2 Dokumen	718.200,00	3 Dokumen	15.191.300,00			Disdukcapil
DINAS PERHUBUNGAN			32.076.401.649,00	99%	12.025.092.411,00	100,00%	11.835.405.260,00	20,83%	2.458.871.157,00	20,83%	2.458.871.157,00	99%	12.025.092.411,00			
URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR																
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN		373,50%	32.076.401.649,00	99%	12.025.092.411,00	100,00%	11.835.405.260,00	20,83%	2.458.871.157,00	20,83%	2.458.871.157,00	99%	12.025.092.411,00			
Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Persentase pemenuhan urusan penunjang yang dipenuhi	100,00%	18.947.308.300,00	100%	7.390.667.528,00	100,00%	8.216.121.440,00	25,00%	1.959.928.839,00	25,00%	1.959.928.839,00	100%	7.390.667.528,00			
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan layanan administrasi keuangan perangkat daerah			100%	6.143.975.763,00	100%	5.777.449.609,00	25,00%	1.522.259.836,00	25,00%	1.522.259.836,00	100%	6.143.975.763,00			
Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN			100%	6.143.975.763,00	8	5.777.449.609,00	3	1.522.259.836,00	3	1.522.259.836,00	100%	6.143.975.763,00			Dinas Perhubungan
Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan layanan administrasi kepegawaian perangkat daerah			100%	72.080.000,00		0,00		0,00	0,00%	0,00	100%	72.080.000,00			
Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan			85 paket	72.080.000,00					0	0,00	85 paket	72.080.000,00			Dinas Perhubungan
Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan layanan administrasi umum perangkat daerah			100%	232.863.877,00	100%	282.966.051,00	25,00%	62.665.891,00	25,00%	62.665.891,00	100%	232.863.877,00			
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan			12 paket	8.237.000,00	15	10.000.000,00	3	138.000,00	3	138.000,00	12 paket	8.237.000,00			Dinas Perhubungan
Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan			6 paket	40.553.600,00	6	45.401.500,00	6	5.882.000,00	6	5.882.000,00	6 paket	40.553.600,00			Dinas Perhubungan
Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan			2 paket	34.091.000,00	2	25.899.850,00	2	11.926.500,00	2	11.926.500,00	2 paket	34.091.000,00			Dinas Perhubungan
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD			12 laporan	149.982.277,00	12	201.664.701,00	12	44.719.391,00	12	44.719.391,00	12 laporan	149.982.277,00			Dinas Perhubungan
Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase pemenuhan barang milik daerah sesuai dengan perencanaan			100%	50.200.000,00	100%	112.211.860,00	25,00%	0,00	25,00%	0,00	100%	50.200.000,00			
Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan			5 unit	50.200.000,00	5	112.211.860,00	4	0,00	4	0,00	5 unit	50.200.000,00			Dinas Perhubungan
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Penyediaan Jasa Penunjang Pemerintahan Daerah yang terpenuhi			100%	512.623.338,00	100%	1.624.436.520,00	25,00%	318.107.212,00	25,00%	318.107.212,00	100%	512.623.338,00			

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (output)	Target RPD pada akhir periode Akhir RPD (2026)		Realisasi Capaian Kinerja RPD Sampai Dengan RKPD Tahun Lalu		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun Berjalan (Tahun n-1 = 2024) yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPD s/d Tahun lalu		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPD s/d Tahun lalu (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								I								
								K	Rp							
4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
		K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan			18 laporan	50.450.906,00	6	60.000.000,00	6	14.557.212,00	6	14.557.212,00	18 laporan	50.450.906,00			Dinas Perhubungan
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan			18 laporan	462.172.432,00	6	1.564.436.520,00	6	303.550.000,00	6	303.550.000,00	18 laporan	462.172.432,00			Dinas Perhubungan
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase ketersediaan Barang Milik Daerah berkondisi baik			99%	378.924.550,00	100%	419.057.400,00	25,00%	56.895.900,00	25,00%	56.895.900,00	99%	378.924.550,00			
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Perorangan dan Pajak Kendaraan Dinas Jabatan atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Dinas atau Perorangan Dinas yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya			11 unit	63.633.700,00	11	80.000.000,00	11	8.937.100,00	11	8.937.100,00	11 unit	63.633.700,00			Dinas Perhubungan
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Operasional dan Pajak Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya			15 Unit	153.877.250,00	15	150.500.000,00	15	23.772.650,00	15	23.772.650,00	15 Unit	153.877.250,00			Dinas Perhubungan
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Operasional dan Perizinan Alat Besar	Jumlah Alat Besar yang Dipelihara dan dibayarkan Perizinannya			2 unit	113.783.600,00	1	149.992.000,00	2	23.635.650,00	2	23.635.650,00	2 unit	113.783.600,00			Dinas Perhubungan
Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara			6 unit	26.724.500,00	2	8.565.400,00	2	400.500,00	2	400.500,00	6 unit	26.724.500,00			Dinas Perhubungan
Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi			2 unit	20.905.500,00	15	30.000.000,00	2	150.000,00	2	150.000,00	2 unit	20.905.500,00			Dinas Perhubungan
Program Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ)	Persentase layanan angkutan Darat	647,00%	13.129.093.349,00	98,27%	4.634.424.883,00	100,00%	3.619.283.820,00	16,67%	498.942.318,00	16,67%	498.942.318,00	98,27%	4.634.424.883,00			
	Persentase Kepemilikan keur kendaraan bermotor	705,00%		0,00%	0,00			0,00%		0,00%	0,00	0%	0,00			
	Rasio panjang jalan perjumlah kendaraan	000367 angka		0,00%	0,00			0,00%		0,00%	0,00	0%	0,00			
Penyediaan Perlengkapan Jalan di Kabupaten/Kota	Persentase perlengkapan jalan yang berkualitas baik			95%	3.086.940.566,00	100,00%	2.846.473.120,00	25,00%	482.373.318,00	25,00%	482.373.318,00	95%	3.086.940.566,00			
Penyediaan Perlengkapan Jalan di Kabupaten/Kota	Jumlah Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota yang Tersedia			1500 unit	2.821.593.415,00	1500	2.721.473.120,00	1500	476.178.318,00	1500	476.178.318,00	1500 unit	2.821.593.415,00			Dinas Perhubungan
Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana Jalan	Jumlah Prasarana Jalan yang Terehabilitasi dan Terpelihara			2 unit	265.347.151,00	2	125.000.000,00	2	6.195.000,00	2	6.195.000,00	2 unit	265.347.151,00			Dinas Perhubungan
Pengelolaan Terminal Penumpang Tipe C	Jumlah terminal Tipe C yang di kelola			95%	3.970.350,00	100,00%	38.407.700,00		0,00	0,00%	0,00	95%	3.970.350,00			
Pengawasan Operasional Terminal Penumpang Tipe C	Jumlah Terminal Penumpang Tipe C yang diawasi			2	3.970.350,00	1	38.407.700,00		0,00	0	0,00	2	3.970.350,00			Dinas Perhubungan
Penerbitan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir	Jumlah Lokasi Parkir tepi Jalan Umum			16 titik	449.115.768,00	100%	17.410.000,00	25,00%	2.310.000,00	25,00%	2.310.000,00	16 titik	449.115.768,00			

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (output)	Target RPD pada akhir periode Akhir RPD (2026)		Realisasi Capaian Kinerja RPD Sampai Dengan RKPD Tahun Lalu		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun Berjalan (Tahun n-1 = 2024) yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPD s/d Tahun lalu		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPD s/d Tahun lalu (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								I						15=14/6 x 100%		
								K	Rp					K	Rp	
4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14=7*13	15	16	17	18	19	
Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir Kewenangan Kabupaten/Kota			12 Laporan	449.115.768,00	12 Laporan	17.410.000,00	3 Laporan	2.310.000,00	3 Laporan	2.310.000,00	12 Laporan	449.115.768,00			Dinas Perhubungan
Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	persentase kendaraan yang terlayani melakukan pengujian berkala			100%	127.914.000,00	100,00%	109.020.000,00		0,00	0,00%	0,00	100%	127.914.000,00			
Penyediaan Bukti Lulus Uji Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Jumlah Dokumen Bukti Lulus Uji Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor			1000 dokumen	25.000.000,00	1000	25.020.000,00		0,00	0	0,00	1000 dokumen	25.000.000,00			Dinas Perhubungan
Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Jumlah Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor yang Terpelihara			10 unit	102.914.000,00	10	84.000.000,00		0,00	0	0,00	10 unit	102.914.000,00			Dinas Perhubungan
Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Kabupaten/Kota	Jumlah kegiatan pelaksanaan manajemen rekayasa lalu lintas			100%	685.327.327,00	100%	453.469.000,00	25,00%	8.799.000,00	25,00%	8.799.000,00	100%	685.327.327,00			
Pengawasan dan Pengendalian Efektivitas Pelaksanaan Kebijakan untuk Jalan Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Pengawasan dan Pengendalian Efektivitas Pelaksanaan Kebijakan untuk Jalan Kabupaten/Kota			12 Laporan	397.628.082,00	12 Laporan	72.644.000,00	3 Laporan	2.887.500,00	3 Laporan	2.887.500,00	12 Laporan	397.628.082,00			Dinas Perhubungan
Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota	Jumlah laporan Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota			2 Laporan	26.447.500,00	2 Laporan	30.630.000,00		0,00	0	0,00	2 Laporan	26.447.500,00			Dinas Perhubungan
Pengadaan dan Pemasangan Perlengkapan Jalan dalam rangka Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas	Jumlah Perlengkapan Jalan dalam Rangka Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas yang dilaksanakan pengadaan dan Pemasangan			3 Dokumen	207.805.245,00	2 Dokumen	255.340.000,00	1 dokumen	0,00	1 dokumen	0,00	3 Dokumen	207.805.245,00			Dinas Perhubungan
Penataan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota	Jumlah laporan pelaksanaan Penataan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas Untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Provinsi			12 laporan	53.446.500,00	3 laporan	94.855.000,00	3 laporan	5.911.500,00	3 laporan	5.911.500,00	12 laporan	53.446.500,00			Dinas Perhubungan
Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Ketersediaan angkutan orang dan barang			100%	281.156.872,00	100,00%	154.504.000,00	25,00%	5.460.000,00	25,00%	5.460.000,00	100%	281.156.872,00			
Pengendalian dan Pengawasan Ketersediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Pengendalian dan Pengawasan Ketersediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota			9 laporan	281.156.872,00	3	154.504.000,00	3	5.460.000,00	3	5.460.000,00	9 laporan	281.156.872,00			Dinas Perhubungan
DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA			20.885.917.655,00	97%	8.432.293.664,00	100,00%	8.377.522.415,00	25,00%	1.575.645.292,00	25,00%	1.575.645.292,00	97%	8.432.293.664,00			
URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR																
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA		61,25%	20.850.067.655,00	99%	8.422.468.414,00	100,00%	8.297.636.415,00	25,00%	1.573.945.517,00	25,00%	1.573.945.517,00	99%	8.422.468.414,00			
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase pemenuhan urusan penunjang yang dipenuhi	100,00%	10.687.474.255,00	100,00%	4.526.489.475,00	100,00%	5.346.475.965,00	25,00%	1.271.101.167,00	25,00%	1.271.101.167,00	100%	4.526.489.475,00			

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (output)	Target RPD pada akhir periode Akhir RPD (2026)		Realisasi Capaian Kinerja RPD Sampai Dengan RKPD Tahun Lalu		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun Berjalan (Tahun n-1 = 2024) yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPD s/d Tahun lalu		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPD s/d Tahun lalu (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								I								
4	5	6	7	8	9	11	12	13	14	15	16					
		K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan layanan administrasi keuangan perangkat daerah			100%	3.688.809.771,00		3.518.508.865,00	25,00%	899.531.271,00	25,00%	899.531.271,00	100%	3.688.809.771,00			
Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN			784 orang	3.688.809.771,00		3.518.508.865,00	168	899.531.271,00	168	899.531.271,00	784 orang	3.688.809.771,00			Dinas Komunikasi dan Informatika
Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	persentase pemenuhan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah			100%	14.000.000,00		0,00		0,00	0,00%	0,00	100%	14.000.000,00			
Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan			28 paket	14.000.000,00					0	0,00	28 paket	14.000.000,00			Dinas Komunikasi dan Informatika
Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Pemenuhan Layanan Administrasi Umum Perangkat Daerah			100%	287.591.257,00	100%	278.455.100,00	25,00%	40.297.098,00	25,00%	40.297.098,00	100%	287.591.257,00			
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan			4 Paket	7.766.000,00	4 Paket	7.921.500,00	1 paket	0,00	1 paket	0,00	4 Paket	7.766.000,00			Dinas Komunikasi dan Informatika
Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan			4 Paket	33.164.500,00	4 Paket	31.778.000,00	1 paket	3.349.500,00	1 paket	3.349.500,00	4 Paket	33.164.500,00			Dinas Komunikasi dan Informatika
Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan			12 Paket	3.940.200,00	12 Paket	16.969.000,00	3 paket	1.134.000,00	3 paket	1.134.000,00	12 Paket	3.940.200,00			Dinas Komunikasi dan Informatika
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD			24 Laporan	242.720.557,00	24 Laporan	221.786.600,00	6 laporan	35.813.598,00	6 laporan	35.813.598,00	24 Laporan	242.720.557,00			Dinas Komunikasi dan Informatika
Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Pemenuhan Barang Milik Daerah Sesuai Dengan Perencanaan			100%	34.250.000,00	100%	12.300.000,00	25,00%	6.225.000,00	25,00%	6.225.000,00	100%	34.250.000,00			
Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan			35 Unit	34.250.000,00	1 unit	12.300.000,00	1 unit	6.225.000,00	1 unit	6.225.000,00	35 Unit	34.250.000,00			Dinas Komunikasi dan Informatika
Penyediaan Jasa Penunjang Pemerintahan Daerah	Persentase Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang terpenuhi			100%	296.200.247,00	100%	1.393.254.000,00	25,00%	307.122.098,00	25,00%	307.122.098,00	100%	296.200.247,00			
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan			36 Laporan	99.597.987,00	36 Laporan	107.030.000,00	9 laporan	16.445.494,00	9 laporan	16.445.494,00	36 Laporan	99.597.987,00			Dinas Komunikasi dan Informatika
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan			12 Laporan	196.602.260,00	12 Laporan	1.286.224.000,00	3 laporan	290.676.604,00	3 laporan	290.676.604,00	12 Laporan	196.602.260,00			
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase ketersediaan Barang Milik Daerah berkondisi baik			100%	205.638.200,00	100%	143.958.000,00	25,00%	17.925.700,00	25,00%	17.925.700,00	100%	205.638.200,00			
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Perorangan Dinas atau Pemeliharaan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan atau Pemeliharaan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan atau Kendaraan Dinas Jabatan			7 unit	165.850.200,00	7 unit	91.280.000,00	7 unit	17.240.700,00	7 unit	17.240.700,00	7 unit	165.850.200,00			Dinas Komunikasi dan Informatika
Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi			1 unit	26.658.000,00	1 unit	26.908.000,00	1 unit	0,00	1 unit	0,00	1 unit	26.658.000,00			Dinas Komunikasi dan Informatika

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (output)	Target RPD pada akhir periode Akhir RPD (2026)		Realisasi Capaian Kinerja RPD Sampai Dengan RKPD Tahun Lalu		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun Berjalan (Tahun n-1 = 2024) yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPD s/d Tahun lalu		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPD s/d Tahun lalu (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								I								
4	5	6	7		8		9		13		14=7+13		15=14/6 x 100%		16	
		K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi			54 unit	13.130.000,00	54 unit	25.770.000,00	30 unit	685.000,00	30 unit	685.000,00	54 unit	13.130.000,00			Dinas Komunikasi dan Informatika
PROGRAM PENGLOLAAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK	Persentase masyarakat yang menjadi sasaran penyebaran informasi publik	45,00%	3.608.803.900,00	98,97%	2.063.195.688,00	100,00%	1.370.723.450,00	25,00%	283.271.000,00	25,00%	283.271.000,00	9897%	2.063.195.688,00			
Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Kabupaten/Kota	Jumlah follower pada laman resmi kominfo padang panjang (instagram)			42067 followers	2.063.195.688,00	28000 followers	1.370.723.450,00	37014 followers	283.271.000,00	37014 followers	283.271.000,00	42067 followers	2.063.195.688,00			
Relasi Media						8 laporan	1.174.807.000,00	1 laporan	280.485.400,00	1 laporan	280.485.400,00					Dinas Komunikasi dan Informatika
Kemitraan Komunikasi dengan Komunitas Informasi Masyarakat						2 komunitas	14.199.450,00		0,00	0	0,00					Dinas Komunikasi dan Informatika
Pengelolaan Media Komunikasi Publik	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Pengelolaan Media Komunikasi Publik			1 dokumen	305.444.806,00		168.471.000,00		2.785.600,00	0	2.785.600,00	1 dokumen	305.444.806,00			Dinas Komunikasi dan Informatika
	Jumlah rilis berita mengenai informasi aktual di lingkungan pemerintah Kota Padang Panjang melalui media sosial			1150 rilis	0,00	330 rilis		330 rilis		330 rilis	0,00	1150 rilis	0,00			
Pelayanan Informasi Publik	Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Informasi Publik			1 dokumen	156.261.382,00	1 dokumen	13.246.000,00		0,00	0	0,00	1 dokumen	156.261.382,00			Dinas Komunikasi dan Informatika
	Jumlah konten informasi publik (pps dan videotron)			717 konten	0,00	213 konten		300 konten		300 konten	0,00	717 konten	0,00			
	Jumlah PPID pembantu yang sudah dilakukan movev keterbukaan informasi publik			0	0,00	5 OPD				0	0,00	0%	0,00			
Layanan Hubungan Media	Jumlah Layanan Hubungan Media			5 layanan	1.485.526.500,00	5 layanan		5 layanan		5 layanan	0,00	5 layanan	1.485.526.500,00			Dinas Komunikasi dan Informatika
	Jumlah pertemuan jumpa pers			6 kali	0,00	2 kali		2 kali		2 kali	0,00	6 kali	0,00			
	Jumlah penerbitan majalah serambi mekkah			1 edisi	0,00					0	0,00	1 edisi	0,00			

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (output)	Target RPD pada akhir periode Akhir RPD (2026)		Realisasi Capaian Kinerja RPD Sampai Dengan RKPD Tahun Lalu		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun Berjalan (Tahun n-1 = 2024) yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPD s/d Tahun lalu		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPD s/d Tahun lalu (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab			
								I						15=14/6 x 100%					
								K	Rp					K	Rp		K	Rp	K
4	5	6	Rp	7	Rp	8	Rp	9	Rp	10	Rp	11	Rp	12	Rp	13	14=7+13	15=14/6 x 100%	16
Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat, Media dan Kemitraan Komunitas	Jumlah Dokumen Kemitraan dengan Masyarakat, Media dan Komunitas dalam Mendiseminasikan Informasi Program atau Kebijakan			1 Dokumen	9.486.000,00	1 Dokumen				0	0,00	1 Dokumen	9.486.000,00						Dinas Komunikasi dan Informatika
	Jumlah web KIM			2 website	0,00	2 website				0	0,00	2 website	0,00						
	Jumlah pelatihan bakohumas yang diadakan			1 pelatihan	0,00	1 pelatihan				0	0,00	1 pelatihan	0,00						
Penyediaan/ Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/ Kota					106.477.000,00					0	0,00		106.477.000,00						Dinas Komunikasi dan Informatika
PROGRAM PENGELOLAAN APLIKASI INFORMATIKA	Indeks domain tata kelola SPBE	3,80 Indeks	6.463.789.500,00	98%	1.826.694.501,00	3,60 indeks	1.580.437.000,00	25,00%	19.573.350,00	25,00%	19.573.350,00	98%	1.826.694.501,00						
Pengelolaan E-government di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Aplikasi dan Proses Bisnis Pemerintahan Berbasis Elektronik yang Dikembangkan			2 aplikasi	1.826.694.501,00	2 aplikasi	1.580.437.000,00		19.573.350,00		19.573.350,00	2 aplikasi	1.826.694.501,00						
	Tingkat Kematangan Layanan SPBE			0%	0,00					0,00%	0,00	0%	0,00						
	Tingkat Kematangan Manajemen SPBE			0%	0,00					0,00%	0,00	0%	0,00						
Penyelenggaraan Sistem Penghubung Layanan Pemerintah Daerah	Jumlah Aplikasi SPBE yang terhubung dengan sistem Penghubung Layanan Pemerintah Daerah					4 aplikasi	248.263.000,00	2 aplikasi	1.070.000,00	2 aplikasi	1.070.000,00								Dinas Komunikasi dan Informatika
Penyediaan Akses Internet untuk Perangkat Daerah dalam rangka penyelenggaraan SPBE	Jumlah Perangkat Daerah yang memanfaatkan Akses Internet yang di sediakan oleh dinas					23 OPD	1.332.174.000,00	23 OPD	18.503.350,00	23 OPD	18.503.350,00								Dinas Komunikasi dan Informatika
Penatalaksanaan dan Pengawasan E-government dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Penatalaksanaan dan Pengawasan E-Government dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota			1 Dokumen	110.129.041,00	1 Dokumen				0	0,00	1 Dokumen	110.129.041,00						Dinas Komunikasi dan Informatika
	Jumlah Aplikasi dan Proses Bisnis Pemerintahan Berbasis Elektronik yang Dikembangkan			2 aplikasi	0,00					0	0,00	2 aplikasi	0,00						

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (output)	Target RPD pada akhir periode Akhir RPD (2026)		Realisasi Capaian Kinerja RPD Sampai Dengan RKPD Tahun Lalu		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun Berjalan (Tahun n-1 = 2024) yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPD s/d Tahun lalu		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPD s/d Tahun lalu (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								I								
4	5	6	Rp	7	Rp	8	Rp	9	Rp	10	Rp	11	Rp	12=7+13	13=10+11 x 100%	16
Pengembangan dan Pengelolaan Sumber Daya Teknologi Informasi dan Komunikasi Pemerintah Daerah	Jumlah Dokumen Pelaksanaan Pengembangan dan Pengelolaan Sumber Daya Teknologi Informasi dan Komunikasi Pemerintah Daerah			1 Dokumen	1.716.565.460,00					0	0,00	1 Dokumen	1.716.565.460,00			Dinas Komunikasi dan Informatika
	Jumlah jenis infrastruktur teknologi informasi yang dikelola			7 jenis	0,00					0	0,00	7 jenis	0,00			
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG STATISTIK		100%	90.000.000,00			100%	19.480.000,00	25,00%	404.775,00	25,00%	404.775,00					
PROGRAM PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL	Persentase data statistik sektoral yang berkualitas	100,00%	90.000.000,00		6.088.750,00	35,00%	19.480.000,00	25,00%	404.775,00	25,00%	404.775,00		6.088.750,00			
Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah dokumentasi statistik sektoral yang diadakan			3 dokumen	6.088.750,00	1 dokumen	19.480.000,00		404.775,00		404.775,00	3 dokumen	6.088.750,00			
	Persentase Ketersediaan Data Statistik Sektoral			35%	0,00	35%				0,00%	0,00	35%	0,00			
Peningkatan Peran Statistik Sektoral terhadap Sistem Statistik Nasional							19.480.000,00		404.775,00	0	404.775,00					Dinas Komunikasi dan Informatika
Koordinasi dan Sinkronisasi Pengumpulan, Pengolahan, Analisis dan Diseminasi Data Statistik Sektoral	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Sinkronisasi Pengumpulan, Pengolahan, Analisis dan Diseminasi Data Statistik Sektoral			1 Dokumen	6.088.750,00	1 Dokumen				0	0,00	1 Dokumen	6.088.750,00			Dinas Komunikasi dan Informatika
	Jumlah jenis dokumentasi statistik sektoral yang diadakan			3 dokumen	0,00	3 dokumen				0	0,00	3 dokumen	0,00			
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERSANDIAN		100%	35.850.000,00	94%	9.825.250,00	100,00%	60.406.000,00	25,00%	1.295.000,00	25,00%	1.295.000,00	94%	9.825.250,00			
PROGRAM PENYELENGGARAAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI	Indeks Keamanan Informasi	400 indeks	35.850.000,00	222 indeks	9.825.250,00	375 indeks	60.406.000,00	25,00%	1.295.000,00	25,00%	1.295.000,00	222 indeks	9.825.250,00			
Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah pelatihan persandian yang dilaksanakan			1 pelatihan	9.825.250,00	1 pelatihan	60.406.000,00		1.295.000,00		1.295.000,00	1 pelatihan	9.825.250,00			
	Tingkat Kesiapan Keamanan Informasi			0%	0,00	0%				0,00%	0,00	0%	0,00			
Pelaksanaan Keamanan Informasi Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Berbasis Elektronik dan Non Elektronik	Jumlah Laporan Pelaksanaan Keamanan Informasi Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Berbasis Elektronik dan Non Elektronik			1 Laporan	9.825.250,00	1 Laporan	60.406.000,00		1.295.000,00	0	1.295.000,00	1 Laporan	9.825.250,00			Dinas Komunikasi dan Informatika
	Jumlah pelatihan persandian yang dilaksanakan			1 pelatihan						0		1 pelatihan				
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU				97%	6.506.069.935,00	100,00%	5.786.228.743,00	6,67%	915.999.435,00	6,67%	915.999.435,00	97%	6.506.069.935,00			
URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR																
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA		45,33%	11.030.359.220,00	100%	4.809.151.209,00	100,00%	5.586.228.293,00	5,00%	915.999.435,00	5,00%	915.999.435,00	100%	4.809.151.209,00			
Program Penunjang urusan pemerintahan daerah kab/kota	Persentase pemenuhan urusan penunjang yang dipenuhi	100%	9.052.031.620,00	99,00%	4.275.163.051,00	100,00%	4.156.003.993,00	20,00%	915.999.435,00	20,00%	915.999.435,00	99%	4.275.163.051,00			

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (output)	Target RPD pada akhir periode Akhir RPD (2026)		Realisasi Capaian Kinerja RPD Sampai Dengan RKPD Tahun Lalu		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun Berjalan (Tahun n-1 + 2024) yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPD s/d Tahun lalu		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPD s/d Tahun lalu (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
								I									
4	5	6	Rp	7	Rp	8	Rp	9	Rp	10	Rp	11	Rp	12=11/6 x 100%	K	Rp	16
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan layanan administrasi keuangan perangkat daerah			100,00%	3.113.420.351,00	100,00%	2.867.627.593,00	25,00%	760.913.538,00	25,00%	760.913.538,00	100%	3.113.420.351,00				
Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN			336 Orang/bulan	3.113.420.351,00	336 Orang/bulan	2.867.627.593,00	336 Orang/bulan	760.913.538,00	336 Orang/bulan	760.913.538,00	336 Orang/bulan	3.113.420.351,00				DPMPTSP
Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan layanan administrasi kepegawaian perangkat daerah			95,00%	11.000.000,00		0,00		0,00	0,00%	0,00	95%	11.000.000,00				
Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan			22 Paket	11.000.000,00					0	0,00	22 Paket	11.000.000,00				DPMPTSP
Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan layanan administrasi umum perangkat daerah			100,00%	380.651.587,00	100,00%	297.337.600,00	25,00%	36.659.142,00	25,00%	36.659.142,00	100%	380.651.587,00				
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan			4 Paket	2.589.000,00	4 Paket	3.000.000,00		0,00	0	0,00	4 Paket	2.589.000,00				DPMPTSP
Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan			4 Paket	37.191.900,00	4 Paket	30.337.600,00	4 Paket	2.559.500,00	4 Paket	2.559.500,00	4 Paket	37.191.900,00				DPMPTSP
Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan			3 Paket	51.269.600,00	12 Paket	34.000.000,00	12 Paket	350.000,00	12 Paket	350.000,00	3 Paket	51.269.600,00				DPMPTSP
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Rapat Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD			48 Laporan	281.573.137,00	24 Laporan	220.000.000,00	24 Laporan	33.749.642,00	24 Laporan	33.749.642,00	48 Laporan	281.573.137,00				DPMPTSP
Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD			4 Dokumen	8.027.950,00	4 Dokumen	10.000.000,00	1 Dokumen	0,00	1 Dokumen	0,00	4 Dokumen	8.027.950,00				DPMPTSP
Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah						100,00%	201.820.600,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	100%					
Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya						2 unit	201.820.600,00			0	0,00						DPMPTSP
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang terpenuhi			100,00%	210.828.128,00	100,00%	562.456.200,00	25,00%	112.956.755,00	25,00%	112.956.755,00	100%	210.828.128,00				
Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat			12 Laporan	2.990.000,00	12 Laporan	3.000.000,00		0,00	0	0,00	12 Laporan	2.990.000,00				DPMPTSP
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan			48 Laporan	74.804.819,00	48 Laporan	253.993.500,00	48 Laporan	56.581.755,00	48 Laporan	56.581.755,00	48 Laporan	74.804.819,00				DPMPTSP
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan			12 Laporan	133.033.309,00	12 Laporan	305.462.700,00	12 Laporan	56.375.000,00	12 Laporan	56.375.000,00	12 Laporan	133.033.309,00				DPMPTSP
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase ketersediaan Barang Milik Daerah berkondisi baik			100,00%	559.262.985,00	100,00%	226.762.000,00	25,00%	5.470.000,00	25,00%	5.470.000,00	100%	559.262.985,00				
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya			11 Unit	113.716.098,00	11 Unit	174.380.000,00	11 Unit	2.230.000,00	11 Unit	2.230.000,00	11 Unit	113.716.098,00				DPMPTSP
Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara			5 Unit	27.340.617,00	12 Unit	32.170.000,00	12 Unit	3.070.000,00	12 Unit	3.070.000,00	5 Unit	27.340.617,00				DPMPTSP

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (output)	Target RPD pada akhir periode Akhir RPD (2026)		Realisasi Capaian Kinerja RPD Sampai Dengan RKPD Tahun Lalu		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun Berjalan (Tahun n-1 = 2024) yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPD s/d Tahun lalu		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPD s/d Tahun lalu (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
								I									
4	5	6	Rp	7	Rp	8	Rp	9	Rp	10	Rp	11	Rp	12	Rp	13=14/6 x 100%	16
Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi			1 Unit	418.206.270,00	1 Unit	20.212.000,00	1 Unit	170.000,00	1 Unit	170.000,00	1 Unit	418.206.270,00				DPMPTSP
Program Pelatihan kerja dan produktifitas tenaga kerja	persentase pencari kerja yang dilatih	12,00%	1.003.327.600,00	100,00%	344.354.058,00	100,00%	509.250.000,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	100%	344.354.058,00				
Pelaksanaan Pelatihan berdasarkan Unit Kompetensi	Persentase pemenuhan pelaksanaan pelatihan sesuai perencanaan			100,00%	344.354.058,00	100,00%	509.250.000,00		0,00	0,00%	0,00	100%	344.354.058,00				
Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan bagi Pencari Kerja berdasarkan Klaster Kompetensi	Jumlah Tenaga Kerja yang Mendapat Pelatihan Berbasis Kompetensi pada Tahun n			53 Orang	196.850.000,00	120 Orang	374.250.000,00		0,00	0	0,00	53 Orang	196.850.000,00				DPMPTSP
Koordinasi Lintas Lembaga dan Kerja Sama dengan Sektor Swasta untuk Penyediaan Instruktur serta Sarana dan Prasarana Lembaga Pelatihan Kerja	Jumlah Kesepakatan/Koordinasi dalam rangka Optimalisasi Kapasitas Instruktur dan Peningkatan Sarana Prasarana Pelatihan Vokasi dan Produktivitas pada Tahun n			1 Lembaga	147.504.058,00	1 Lembaga	135.000.000,00		0,00	0	0,00	1 Lembaga	147.504.058,00				DPMPTSP
Program penempatan tenaga kerja	Besaran pencari kerja yang terdaftar yang ditempatkan	24,00%	975.000.000,00	100,00%	189.634.100,00	100,00%	140.000.000,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	100%	189.634.100,00				
Pelayanan antar Kerja di Daerah Kabupaten/Kota	Persentase pemenuhan Pelayanan antar Kerja di Daerah Kabupaten/Kota			100,00%	18.266.000,00	100,00%	25.000.000,00		0,00	0,00%	0,00	100%	18.266.000,00				
Penyuluhan dan Bimbingan Jabatan bagi Pencari Kerja	Jumlah Pencari Kerja yang Mendapatkan Penyuluhan dan Bimbingan Jabatan			112 Orang	18.266.000,00	150 Orang	25.000.000,00		0,00	0	0,00	112 Orang	18.266.000,00				DPMPTSP
Perluasan Kesempatan Kerja	Jumlah Tenaga Kerja yang Diberdayakan Melalui program Perluasan Kesempatan Kerja			10 Orang	0,00	10 Orang				0	0,00	10 Orang	0,00				DPMPTSP
Pengelolaan Informasi Pasar Kerja	Jumlah Job Fair yang Dilaksanakan			100,00%	171.368.100,00	1 job fair	115.000.000,00		0,00	0,00%	0,00	100%	171.368.100,00				
Job Fair/Bursa Kerja	Jumlah Pencari Kerja yang Mendapatkan Pekerjaan Melalui Job Fair/Bursa Kerja			1 orang	171.368.100,00	30 orang	115.000.000,00		0,00	0	0,00	1 orang	171.368.100,00				DPMPTSP
Program Hubungan Industrial	Persentase peningkatan jumlah peserta BPJS Ketenagakerjaan yang aktif	32%	840.000.000,00	100,00%	716.301.600,00	100,00%	780.974.300,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	100%	716.301.600,00				
Pencegahan dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja dan Penutupan Perusahaan di Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah tenaga Kerja sektor informal yang diberikan perlindungan BPJS Kesehatan			8736 Orang	716.301.600,00	100,00%	780.974.300,00		0,00		0,00	8736 Orang	716.301.600,00				
	Persentase pemenuhan layanan Pencegahan dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial			75,00%	0,00					0,00%	0,00	75%	0,00				
Pencegahan Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat/Berdampak pada Kepentingan di 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Perselisihan yang Dicegah			10 Perkara	0,00					0	0,00	10 Perkara	0,00				DPMPTSP

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (output)	Target RPD pada akhir periode Akhir RPD (2026)		Realisasi Capaian Kinerja RPD Sampai Dengan RKPd Tahun Lalu		Target Kinerja dan Anggaran RKPd Tahun Berjalan (Tahun n-1 = 2024) yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPd yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPD s/d Tahun lalu		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPD s/d Tahun lalu (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
								I									
4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	
		K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp
Pengembangan Pelaksanaan Jaminan Sosial Tenaga Kerja dan Fasilitas Kesejahteraan Pekerja	Terlaksananya Program Jaminan Sosial Tenaga Kerja dan Fasilitas Kesejahteraan Pekerja			6568 Orang	716.301.600,00	8000 orang	780.974.300,00		0,00	0	0,00	6568 Orang	716.301.600,00				DPMPTSP
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENANAMAN MODAL		66,67%	504.600.000,00	91,41%	980.617.126,00	100,00%	200.000.450,00	8,33%	0,00	8,33%	0,00	91,41%	980.617.126,00				
PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL						100%	75.000.450,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00						
Pembuatan Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota						1 dokumen	75.000.450,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00						
Penyusunan Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota						1 dokumen	75.000.450,00		0,00	0	0,00						DPMPTSP
PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL	Persentase penerbitan izin yang dikeluarkan sesuai SOP	100%	324.600.000,00	100,00%	451.663.894,00	100,00%	50.000.000,00	25,00%	0,00	25,00%	0,00	100%	451.663.894,00				
Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Secara Terpadu Satu Pintu dibidang Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota	Persentase penerbitan izin yang dikeluarkan sesuai SOP			100,00%	451.663.894,00	100,00%	50.000.000,00	25,00%	0,00	25,00%	0,00	100%	451.663.894,00				
Penyediaan Pelayanan Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik	Jumlah Pelaku Usaha yang Mendapatkan Pelayanan Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik			262 Pelaku Usaha	354.256.650,00	40 Pelaku Usaha	15.000.000,00	357 orang	0,00	357 orang	0,00	262 Pelaku Usaha	354.256.650,00				DPMPTSP
Penyediaan dan pengelolaan Layanan konsultasi perizinan berusaha berbasis risiko	Jumlah Pelaku usaha yang Memperoleh Layanan Konsultasi Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik			53 Pelaku Usaha	91.392.319,00	85 Pelaku Usaha	10.000.000,00	335 pelaku usaha	0,00	335 pelaku usaha	0,00	53 Pelaku Usaha	91.392.319,00				DPMPTSP
Pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan di bidang perizinan berusaha berbasis risiko	Jumlah Kegiatan Usaha yang mendapat pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan di bidang perizinan berusaha berbasis risiko Lintas Daerah Kabupaten/Kota bagi Kegiatan Usaha Dari Pelaku Usaha			12 Kegiatan Usaha	6.014.925,00	12 Kegiatan Usaha	25.000.000,00		0,00	0	0,00	12 Kegiatan Usaha	6.014.925,00				DPMPTSP
PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL	Nilai Investasi	87000000000 Rupiah	180.000.000,00	75,00%	0,00	100,00%	75.000.000,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	75%	0,00				
Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah promosi yang dilaksanakan			2 dokumen	0,00	2 dokumen	75.000.000,00		0,00	0,00%	0,00	2 dokumen	0,00				
Pelaksanaan Kegiatan Promosi Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Kegiatan Promosi Penanaman Modal Kabupaten/Kota			2 Dokumen	0,00	2 dokumen	75.000.000,00		0,00	0	0,00	2 Dokumen	0,00				DPMPTSP
PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL				99,23%	528.953.232,00		0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	99,23%	528.953.232,00				
Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal Yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota				99,23%	528.953.232,00		0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	99,23%	528.953.232,00				

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (output)	Target RPD pada akhir periode Akhir RPD (2026)		Realisasi Capaian Kinerja RPD Sampai Dengan RKPD Tahun Lalu		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun Berjalan (Tahun n-1 = 2024) yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPD s/d Tahun lalu		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPD s/d Tahun lalu (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
								I						15=146 x 100%			
								/									
4	5	6	Rp	7	Rp	8	Rp	9	Rp	11	Rp	12	Rp	13	14=7x13	15	16
Penyelesaian Permasalahan dan Hambatan yang Dihadapi Pelaku Usaha dalam Merealisasikan Kegiatan Usahanya	Jumlah penyelesaian permasalahan dan hambatan yang dihadapi pelaku usaha dalam merealisasikan kegiatan usahanya			33 kegiatan usaha	56.483.500,00					0	0,00	33 kegiatan usaha	56.483.500,00				DPMPTSP
Bimbingan Teknis Kepada Pelaku Usaha	Jumlah pelaku usaha yang mengikuti bimbinganTeknis/ Sosialisasi implementasi perizinan berusaha berbasis resiko			359 pelaku usaha	302.337.982,00					0	0,00	359 pelaku usaha	302.337.982,00				DPMPTSP
Pengawasan Penanaman Modal	Jumlah kegiatan usaha dari pelaku usaha yang telah dianalisa dan diverifikasi data, profil dan informasi kegiatan usaha dari pelaku usaha dilakukan inspeksi lapangan serta dilakukan evaluasi penilaian kepatuhan pelaksanaan perizinan berusaha			188 kegiatan usaha	170.131.750,00					0	0,00	188 kegiatan usaha	170.131.750,00				DPMPTSP
DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN			13.475.229.645,00	100,00%	5.105.101.957,00	100,00%	5.923.890.660,00	18,75%	1.180.891.496,00	18,75%	1.180.891.496,00	100%	5.105.101.957,00				
URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR																	
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERPUSTAKAAN		100,00%	1.983.822.000,00	100,00%	477.811.271,00	100,00%	1.430.572.250,00	25,00%	166.805.335,00	25,00%	166.805.335,00	100%	477.811.271,00				
Program Pembinaan Perpustakaan	Jumlah anggota pustaka	3500 Orang	1.983.822.000,00	100,00%	477.811.271,00	100,00%	1.329.195.200,00	25,00%	152.555.975,00	25,00%	152.555.975,00	100%	477.811.271,00				
Pengelolaan Perpustakaan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah kunjungan ke Perpustakaan			37418 orang	283.471.366,00	32000 orang	392.754.450,00	2722 orang	8.406.450,00	2722 orang	8.406.450,00	37418 orang	283.471.366,00				
Pengembangan Bahan Pustaka	Jumlah Bahan Perpustakaan Tercetak yang Dicetak dan Diadakan			786 eksempl r	107.386.200,00					0	0,00	786 eksemplar	107.386.200,00				
Penyusunan Data dan Informasi Perpustakaan						50 dokumen	48.622.850,00		0,00	0	0,00						
Pengelolaan dan Pengembangan Perpustakaan	Jumlah Bahan Perpustakaan yang Dilakukan Pengelolaan dan Pengembangan untuk Mewujudkan Keberagaman Koleksi Perpustakaan			786 eksempl r	176.085.166,00	700 eksempl r	175.679.700,00	125 eksemplar	8.406.450,00	125 eksemplar	8.406.450,00	786 eksemplar	176.085.166,00				
Pengembangan Kekhasan Koleksi Perpustakaan Daerah Tingkat Kabupaten/Kota						145 eksempl r	158.471.900,00		0,00	0	0,00						
Pengembangan dan Pemeliharaan Layanan Perpustakaan Elektronik						1 perpusta kaan	9.980.000,00		0,00	0	0,00						
Pembudayaan Membaca Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase minat baca masyarakat			0,00	100,00%	194.339.905,00	100,00%	936.440.750,00	25,00%	144.149.525,00	25,00%	144.149.525,00	100%	194.339.905,00			
Sosialisasi Budaya Baca dan Literasi pada Satuan Pendidikan Dasar dan Pendidikan Khusus serta Masyarakat	Jumlah Lokus Pembudayaan Kegemaran Membaca dan Literasi pada Satuan Pendidikan			68 Lokus	157.514.125,00	68 lokus	331.469.200,00	10	110.824.525,00	10	110.824.525,00	68 Lokus	157.514.125,00				Dinas Perpustakaan dan Kearsipan

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (output)	Target RPD pada akhir periode Akhir RPD (2026)		Realisasi Capaian Kinerja RPD Sampai Dengan RPKD Tahun Lalu		Target Kinerja dan Anggaran RPKD Tahun Berjalan (Tahun n-1 = 2024) yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RPKD yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPD s/d Tahun lalu		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPD s/d Tahun lalu (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
								I										
4	5	6	Rp	7	Rp	8	Rp	9	Rp	10	Rp	11	Rp	12	13	14	15=14/6 x 100%	16
Pengembangan Literasi Berbasis Inklusi Sosial	Jumlah Perpustakaan Berbasis Inklusi Sosial di Wilayah Kabupaten/Kota yang Dikembangkan			5 Perpustakaan	36.825.780,00	6 perpustakaan	101.892.700,00	1	3.000.000,00	1	3.000.000,00	5 Perpustakaan	36.825.780,00					
Pembangunan dan Pemeliharaan Sarana Perpustakaan di Tempat-Tempat Umum yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah sarana Perpustakaan yang dibangun dan dipelihara ditempat-tempat umum yang menjadi kewenangan daerah kabupaten/kota					1 perpustakaan	39.750.000,00	1	30.325.000,00	1	30.325.000,00							
Pemberian Penghargaan Gerakan Budaya Gemar Membaca	Jumlah orang yang mendapatkan penghargaan gerakan budaya gemar membaca tingkat kabupaten/kota					9 orang	463.328.850,00		0,00	0	0,00							
PROGRAM PELESTARIAN KOLEKSI NASIONAL DAN NASKAH KUNO						100,00%	101.377.050,00	25,00%	14.249.360,00	25,00%	14.249.360,00							
Pelestarian Naskah Kuno Milik Daerah Kabupaten/Kota						100 orang	101.377.050,00	25,00%	14.249.360,00	25,00%	14.249.360,00							
Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Penyimpanan, Perawatan, Pelestarian, dan Pendaftaran Naskah Kuno	Jumlah masyarakat yang berperan dalam dalam penyimpanan, perawatan, pelestarian dan pendaftaran naskah kuno					100 orang	101.377.050,00	1	14.249.360,00	1	14.249.360,00							
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEARSIPAN		90,00%	11.491.407.645,00	100,00%	4.627.290.686,00	100,00%	4.493.318.410,00	12,50%	1.014.086.161,00	12,50%	1.014.086.161,00	100%	4.627.290.686,00					
Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase pemenuhan urusan penunjang yang dipenuhi	100%	11.088.994.045,00	100,00%	4.404.395.251,00	100,00%	4.396.873.900,00	25,00%	1.011.085.761,00	25,00%	1.011.085.761,00	100%	4.404.395.251,00					
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan layanan administrasi keuangan perangkat daerah			100,00%	3.491.202.053,00	100,00%	3.299.338.919,00	25,00%	854.789.291,00	25,00%	854.789.291,00	100%	3.491.202.053,00					
Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN			26 Orang/bulan	3.491.202.053,00	364 orang/bulan	3.299.338.919,00	104 orang/bulan	854.789.291,00	104 orang/bulan	854.789.291,00	26 Orang/bulan	3.491.202.053,00					Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan layanan administrasi kepegawaian perangkat daerah			100,00%	13.000.000,00		0,00	0,00	0,00%	0,00	100%	13.000.000,00						
Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya			26 Paket	13.000.000,00				0	0,00	26 Paket	13.000.000,00						Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan layanan administrasi umum perangkat daerah			100,00%	224.373.159,00	100,00%	138.476.831,00	25,00%	11.636.955,00	25,00%	11.636.955,00	100%	224.373.159,00					
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan			8 paket	3.623.800,00	4 paket	4.522.300,00		0,00	0	0,00	8 paket	3.623.800,00					Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan			25 paket	27.135.588,00	4 paket	25.866.531,00	1 paket	50.000,00	1 paket	50.000,00	25 paket	27.135.588,00					Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan			7 paket	10.236.600,00	4 paket	9.342.000,00	1 paket	175.000,00	1 paket	175.000,00	7 paket	10.236.600,00					Dinas Perpustakaan dan Kearsipan

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (output)	Target RPD pada akhir periode Akhir RPD (2026)		Realisasi Capaian Kinerja RPD Sampai Dengan RKPD Tahun Lalu		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun Berjalan (Tahun n-1 = 2024) yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPD s/d Tahun lalu		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPD s/d Tahun lalu (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
								I									
4	5	6	Rp	7	Rp	8	Rp	9	Rp	11	Rp	12	Rp	13	14=11/13 x 100%	15=11/16 x 100%	16
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD			200 laporan	183.377.171,00	24 laporan	98.746.000,00	6 laporan	11.411.955,00	6 laporan	11.411.955,00	200 laporan	183.377.171,00				Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						100,00%	15.000.000,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00						
Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya						1 unit	15.000.000,00		0,00	0	0,00						Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang terpenuhi			100,00%	525.306.971,00	100,00%	691.383.150,00	25,00%	135.397.115,00	25,00%	135.397.115,00	100%	525.306.971,00				
Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat			2 laporan	1.000.000,00	12 laporan	785.800,00	1 laporan	300.000,00	1 laporan	300.000,00	2 laporan	1.000.000,00				Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan			60 laporan	25.604.422,00	48 laporan	27.795.350,00	12 laporan	4.515.187,00	12 laporan	4.515.187,00	60 laporan	25.604.422,00				Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan			16 laporan	498.702.549,00	12 laporan	662.802.000,00	4 laporan	130.581.928,00	4 laporan	130.581.928,00	16 laporan	498.702.549,00				Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase ketersediaan Barang Milik Daerah berondisi baik			100,00%	150.513.068,00	100,00%	252.675.000,00	25,00%	9.262.400,00	25,00%	9.262.400,00	100%	150.513.068,00				
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Dinas Jabatan atau Kendaraan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Jasa Pemeliharaan, Biaya Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya			11 unit	118.461.818,00	1 unit	53.140.000,00	1 unit	3.159.000,00	1 unit	3.159.000,00	11 unit	118.461.818,00				Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan						10 unit	137.435.000,00	3 unit	5.722.400,00	3 unit	5.722.400,00						Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara			46 unit	14.165.000,00	46 unit	22.400.000,00	1 unit	381.000,00	1 unit	381.000,00	46 unit	14.165.000,00				Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi			3 Unit	17.886.250,00	3 unit	39.700.000,00		0,00	0	0,00	3 Unit	17.886.250,00				Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
Program Pengelolaan Arsip	Persentase OPD yang menerapkan arsip secara baku	70%	125.000.000,00	100%	133.664.305,00	100,00%	50.033.450,00	12,50%	3.000.400,00	12,50%	3.000.400,00	100%	133.664.305,00				
Pengelolaan Arsip Dinamis Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah OPD yang melaksanakan pengolahan arsip dinamis			15 OPD	133.664.305,00	20 OPD	24.999.850,00	25%	3.000.400,00	25,00%	3.000.400,00	15 OPD	133.664.305,00				
Pengawasan Arsip Dinamis Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Arsip Dinamis Kewenangan Kabupaten/Kota			23 laporan	133.664.305,00	23 laporan	24.999.850,00		3.000.400,00	0	3.000.400,00	23 laporan	133.664.305,00				Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
Pengelolaan Simpul Jaringan Informasi Kearsipan Nasional Tingkat Kabupaten/Kota	Persentase jumlah arsip statis yang telah tersedia di JIKN					100,00%	25.033.600,00		0,00	0,00%	0,00						

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (output)	Target RPD pada akhir periode Akhir RPD (2026)		Realisasi Capaian Kinerja RPD Sampai Dengan RKPD Tahun Lalu		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun Berjalan (Tahun n-1 = 2024) yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPD s/d Tahun lalu		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPD s/d Tahun lalu (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
								I									
4	5	6	Rp	7	Rp	8	Rp	9	Rp	10	Rp	11	Rp	12	13	14=12/6 x 100%	16
Penyediaan Informasi, Akses dan Layanan Kearsipan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Melalui JIKN	Jumlah layanan penyediaan informasi, akses dan layanan kearsipan tingkat daerah kabupaten/kota melalui JIKN					400 pengguna	25.033.600,00		0,00	0	0,00						Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
Program Perlindungan dan Penyelamatan Arsip	Jumlah arsip statis yang terselamatkan (Jumlah arsip yang tersimpan pada LKD)	5000 dokumen	277.413.600	100%	89.231.130,00	100,00%	46.411.060,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	100%	89.231.130,00				
Perlindungan dan Penyelamatan Arsip Akibat Bencana yang Berskala Kabupaten/Kota	Persentase jumlah arsip yang diperbaiki			100%	22.531.550,00	100,00%	14.421.260,00		0,00	0,00%	0,00	100%	22.531.550,00				
Pemulihan dan Penyimpanan Arsip Akibat Bencana	Jumlah Arsip yang Dilakukan Pemulihan dan Penyimpanan Akibat Bencana			20 arsip	22.531.550,00	15 arsip	14.421.260,00		0,00	0	0,00	20 arsip	22.531.550,00				Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
Autentikasi Arsip Statis dan Hasil Alih Media Kabupaten/Kota	Persentase autentifikasi arsip statis dan arsip alihmedia kota			100,00%	66.699.580,00	100,00%	31.989.800,00		0,00	0,00%	0,00	100%	66.699.580,00				
Penilaian dan Penetapan Autentisitas Arsip Statis Sesuai Persyaratan Penjaminan Keabsahan Arsip	Jumlah Daftar Autentisitas Arsip Sesuai Persyaratan Penjaminan Keabsahan Arsip yang Dinilai dan Ditetapkan			1644 arsip	66.699.580,00	1000 Arsip	31.989.800,00		0,00	0	0,00	1644 arsip	66.699.580,00				Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
DINAS PEMUDA, OLAHRAGA DAN PARIWISATA			29.478.242.100,00	99%	30.070.947.060,13	100,00%	11.418.203.963,00	13,28%	1.756.508.446,00	13,28%	1.756.508.446,00	99%	30.070.947.060,13				
URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR																	
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA		100,00%	25.968.242.100,00	99%	28.349.990.824,13	100,00%	10.174.258.863,00	17,81%	1.708.694.265,00	17,81%	1.708.694.265,00	99%	28.349.990.824,13				
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase pemenuhan urusan penunjang yang dipenuhi	100%	15.035.026.100,00	99%	4.997.903.174,00	100,00%	5.542.768.093,00	25,00%	1.265.278.194,00	25,00%	1.265.278.194,00	99%	4.997.903.174,00				
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan layanan administrasi keuangan perangkat daerah			95%	3.989.675.116,00	100,00%	3.707.633.330,00	25,00%	941.403.419,00	25,00%	941.403.419,00	95%	3.989.675.116,00				
Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN			324 Orang / Bulan	3.989.675.116,00	406 Orang/Bulan	3.707.633.330,00	104 orang/ bulan	941.403.419,00	104 orang/ bulan	941.403.419,00	324 Orang / Bulan	3.989.675.116,00				Disporapar
Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan layanan administrasi kepegawaian perangkat daerah			100,00%	13.500.000,00		0,00		0,00	0,00%	0,00	100%	13.500.000,00				
Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan			27 Paket	13.500.000,00					0	0,00	27 Paket	13.500.000,00				Disporapar
Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan layanan administrasi umum perangkat daerah			100,00%	290.264.432,00	100,00%	199.909.140,00	25,00%	41.202.710,00	25,00%	41.202.710,00	100%	290.264.432,00				
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan			1 Paket	11.923.400,00	4 paket	14.988.920,00	1 paket	1.680.000,00	1 paket	1.680.000,00	1 Paket	11.923.400,00				Disporapar
Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan			1 Paket	27.795.000,00	4 paket	28.919.470,00	1 paket	2.496.400,00	1 paket	2.496.400,00	1 Paket	27.795.000,00				Disporapar
Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan			1 Paket	15.461.300,00	12 paket	20.999.750,00	4 paket	4.179.000,00	4 paket	4.179.000,00	1 Paket	15.461.300,00				Disporapar

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (output)	Target RPD pada akhir periode Akhir RPD (2026)		Realisasi Capaian Kinerja RPD Sampai Dengan RKPD Tahun Lalu		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun Berjalan (Tahun n-1 = 2024) yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPD s/d Tahun lalu		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPD s/d Tahun lalu (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								I								
4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
		K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD			100 Laporan	235.084.732,00	100 laporan	135.001.000,00	25 laporan	32.847.310,00	25 laporan	32.847.310,00	100 Laporan	235.084.732,00			Disporapar
Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pemenuhan Barang Milik Daerah sesuai dengan perencanaan			100,00%	50.402.285,00	100,00%	35.003.400,00	25,00%	0,00	25,00%	0,00	100%	50.402.285,00			
Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan			2 unit	4.610.000,00	4 unit	11.438.200,00	2 unit	0,00	2 unit	0,00	2 unit	4.610.000,00			Disporapar
Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan			5 unit	45.792.285,00	3 unit	23.565.200,00	0	0,00	0	0,00	5 unit	45.792.285,00			
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Penyediaan Jasa Penunjang Pemerintahan Daerah yang terpenuhi			100,00%	440.064.406,00	100,00%	1.394.317.423,00	25,00%	264.930.065,00	25,00%	264.930.065,00	100%	440.064.406,00			
Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat			1 Laporan	2.140.000,00	12 laporan	2.997.400,00	4 laporan	1.390.000,00	4 laporan	1.390.000,00	1 Laporan	2.140.000,00			Disporapar
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan			36 Laporan	89.706.557,00	36 laporan	114.765.000,00	9 laporan	25.958.337,00	9 laporan	25.958.337,00	36 Laporan	89.706.557,00			Disporapar
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan			12 Laporan	348.217.849,00	12 laporan	1.276.555.023,00	1 laporan	237.581.728,00	1 laporan	237.581.728,00	12 Laporan	348.217.849,00			Disporapar
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase ketersediaan barang milik daerah berkategori baik			100,00%	213.996.935,00	100,00%	205.904.800,00	25,00%	17.742.000,00	25,00%	17.742.000,00	100%	213.996.935,00			
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Dinas Jabatan atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya			7 unit	98.184.550,00	7 unit	115.960.000,00	3 unit	15.687.000,00	3 unit	15.687.000,00	7 unit	98.184.550,00			Disporapar
Pemeliharaan Mebel	Jumlah Mebel yang Dipelihara			0	0,00	20 unit	4.000.000,00	0	0,00	0	0,00	0%	0,00			Disporapar
Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara			5 unit	15.754.750,00	60 unit	35.972.800,00	5 unit	2.055.000,00	5 unit	2.055.000,00	5 unit	15.754.750,00			Disporapar
Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi			4 unit	100.057.635,00	4 unit	49.972.000,00	0	0,00	0	0,00	4 unit	100.057.635,00			
Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Kepemudaan	Pemenuhan indikator kota layak pemuda	5 indikator	450.000.000	100,00%	169.109.584,00	4 indikator	243.396.950,00	2,50%	409.500,00	2,50%	409.500,00	100%	169.109.584,00			
Penyadaran, Pemberdayaan, dan Pengembangan Pemuda dan Kepemudaan Terhadap Pemuda Pelopor Kabupaten/Kota, Wirausaha Muda Pemula, dan Pemuda Kader Kabupaten/Kota	Jumlah kegiatan kader pemuda pelopor dan wirausaha muda			100,00%	169.109.584,00	2 kegiatan	143.396.950,00	5,00%	409.500,00	5,00%	409.500,00	100%	169.109.584,00			

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (output)	Target RPD pada akhir periode Akhir RPD (2026)		Realisasi Capaian Kinerja RPD Sampai Dengan RKPD Tahun Lalu		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun Berjalan (Tahun n-1 = 2024) yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPD s/d Tahun lalu		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPD s/d Tahun lalu (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
								I										
								/										
4	5	6	Rp	7	Rp	8	Rp	9	Rp	10	Rp	11	Rp	12	13	14=10/6 x 100%	15=10/6 x 100%	16
Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelenggaraan Peningkatan Kapasitas Daya Saing Pemuda Pelopor	Jumlah Pemuda Pelopor Kabupaten/Kota dari Seluruh Kecamatan yang Ditingkatkan Kapasitas Daya Saingnya			30 Orang	110.829.334,00	30 orang	78.149.900,00		0,00	0	0,00	30 Orang	110.829.334,00					Disporapar
Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelenggaraan Peningkatan Kapasitas Daya Saing Wira Usaha Pemula	Jumlah Wirausaha Pemuda Kabupaten/Kota dari Seluruh Kecamatan yang Ditingkatkan Kapasitas Daya Saingnya			30 Orang	58.280.250,00	30 orang	65.247.050,00		409.500,00	0	409.500,00	30 Orang	58.280.250,00					Disporapar
Pemberdayaan dan Pengembangan Organisasi Kepemudaan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota						1 OKP	100.000.000,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00							
Koordinasi, sinkronisasi, dan penyelenggaraan pengembangan organisasi kepemudaan tingkat kabupaten/kota						1 organisasi	100.000.000,00		0,00	0	0,00							Disporapar
Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Keolahragaan	Jumlah cabang olahraga yang dibangun	46 cabang	10.083.216.000	98%	2.307.513.755.913,00	45 cabang	4.238.093.820,00	18,75%	343.006.571,00	18,75%	343.006.571,00	98%	2.307.513.755.913,00					
Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Pendidikan pada Jenjang Pendidikan yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah pembinaan dan pengembangan olahraga pendidikan			95%	2.140.633.179.413,00	1 kali	2.434.627.720,00	25,00%	29.818.571,00	25,00%	29.818.571,00	95%	2.140.633.179.413,00					
Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Penyediaan Sarana dan Prasarana Olahraga Kabupaten/Kota yang Tersedia dan Termanfaatkan	Jumlah Sarana dan Prasarana Olahraga Kabupaten/Kota yang Tersedia dan Termanfaatkan			4 Unit	2.140.633.179.413,00	4 unit	2.434.627.720,00	1 unit	29.818.571,00	1 unit	29.818.571,00	4 Unit	2.140.633.179.413,00					Disporapar
Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah kompetisi / even olahraga yang diselenggarakan			96%	760.209.407,00	5 kompetisi /even	336.679.500,00		0,00	0,00%	0,00	96%	760.209.407,00					
Penyelenggaraan Kejuaraan dan Pekan Olahraga Tingkat Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Penyelenggaraan Kejuaraan dan Pekan Olahraga Tingkat Kabupaten/Kota			1 Dokumen	351.504.884,00	2 kegiatan	336.679.500,00	0,00%	0,00	0	0,00	1 Dokumen	351.504.884,00					Disporapar
Partisipasi dan Keikutsertaan dalam Penyelenggaraan Kejuaraan	Jumlah Peserta yang Berpartisipasi dalam Kegiatan Penyelenggaraan Kejuaraan			30 Orang	408.704.523,00	0		0,00%		0	0,00	30 Orang	408.704.523,00					
Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Prestasi Tingkat Daerah Provinsi	Jumlah pembinaan dan pengembangan olahraga prestasi tingkat daerah provinsi			1 cabang olahraga	102.770.000,00	1 cabang olahraga	802.486.500,00	25,00%	300.000.000,00	25,00%	300.000.000,00	1 cabang olahraga	102.770.000,00					
Pembinaan dan Pengembangan Atlet Berprestasi Kabupaten/Kota yang Dilakukan Pembinaan dan Pengembangan	Jumlah Atlet Berprestasi Kabupaten/Kota yang Dilakukan Pembinaan dan Pengembangan			30 Orang	100.520.000,00	200 Orang	802.486.500,00	50 orang	300.000.000,00	50 orang	300.000.000,00	30 Orang	100.520.000,00					Disporapar
Koordinasi dan Sinkronisasi Penyediaan Data dan Informasi Sektor Olahraga	Jumlah Data dan Informasi Sektor Olahraga yang Tersedia dan Termanfaatkan			1 Dokumen	2.250.000,00	0		0,00%		0	0,00	1 Dokumen	2.250.000,00					
Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Rekreasi	Jumlah pelaksanaan senam dan olahraga rekreasi yang dilaksanakan			2 kegiatan	805.826.358,00	2 kegiatan	664.300.100,00	25,00%	13.188.000,00	25,00%	13.188.000,00	2 kegiatan	805.826.358,00					

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (output)	Target RPD pada akhir periode Akhir RPD (2026)		Realisasi Capaian Kinerja RPD Sampai Dengan RKPD Tahun Lalu		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun Berjalan (Tahun n-1 = 2024) yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPD s/d Tahun lalu		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPD s/d Tahun lalu (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
								I									
4	5	6	Rp	7	Rp	8	Rp	9	Rp	11	Rp	12	Rp	13	14=11/13	15=14/6 x 100%	16
Penyelenggaraan, Pengembangan dan Pemasaran Festival dan Olahraga Rekreasi	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan, Pengembangan dan Pemasaran Festival dan Olahraga Rekreasi			2 Dokumen	124.967.500,00					0	0,00	2 Dokumen	124.967.500,00				Disporapar
Penyediaan, Pengembangan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Olahraga Rekreasi	Jumlah Penyediaan dan Pemanfaatan Sarana dan Prasarana Olahraga Rekreasi yang Memadai			2 Unit	680.858.858,00					0	0,00	2 Unit	680.858.858,00				Disporapar
Penyediaan prasarana dan sarana olahraga rekreasi melalui perencanaan, pengadaan, pemanfaatan, pemeliharaan, pengembangan, dan pengawasan						3 unit	364.300.000,00	1 unit	5.988.000,00	1 unit	5.988.000,00						Disporapar
Pemassalan olahraga dan penyelenggaraan festival Olahraga Rekreasi yang berjenjang dan berkelanjutan pada tingkat daerah, nasional, dan internasional						1 dokumen	300.000.100,00		7.200.000,00	0	7.200.000,00						Disporapar
Program Pengembangan Kapasitas Kepramukaan	Jumlah organisasi kepramukaan yang dibina	1 organisasi	400.000.000,00	100,00%	107.840.507,00	1 Organisasi	150.000.000,00	25,00%	100.000.000,00	25,00%	100.000.000,00	100%	107.840.507,00				
Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Kepramukaan	Jumlah pembinaan terhadap organisasi kepramukaan			100,00%	107.840.507,00	1 Organisasi	150.000.000,00	1 Organisasi	100.000.000,00	0,00%	100.000.000,00	100%	107.840.507,00				
Peningkatan Kapasitas Organisasi Kepramukaan Tingkat Daerah	Jumlah Organisasi Kepramukaan Tingkat Daerah yang Meningkatkan Kapasitasnya			1 Organisasi	107.840.507,00	1 Organisasi	150.000.000,00	1 Organisasi	100.000.000,00	1 Organisasi	100.000.000,00	1 Organisasi	107.840.507,00				Disporapar
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEPARWISATAAN		100,00%	3.510.000.000,00	99,42%	1.720.956.236,00	100,00%	1.243.945.100,00	8,75%	47.814.181,00	8,75%	47.814.181,00	99%	1.720.956.236,00				
Program Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata	Rasio Lama kunjungan wisata	15	1.910.000.000,00	100,00%	1.333.764.732,00	1,20	574.705.950,00	20,00%	15.271.800,00	20,00%	15.271.800,00	100%	1.333.764.732,00				
Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	Jumlah destinasi wisata yang dikelola			4 destinasi	1.333.764.732,00	4 destinasi	574.705.950,00	20,00%	15.271.800,00	20,00%	15.271.800,00	4 destinasi	1.333.764.732,00				
Pengembangan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	Jumlah Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota yang Dikembangkan Sesuai dengan Tahapan Pengembangan (Rintisan, Berkembang, Pemantapan, Revitalisasi)			2 Lokasi	571.988.650,00	2 lokasi	83.601.200,00		0,00	0	0,00	2 Lokasi	571.988.650,00				Disporapar
Pengadaan/Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	Jumlah Sarana dan Prasarana Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota yang Tersedia dan Terpelihara			2 Unit	712.920.832,00	2 unit	287.080.000,00	1 unit	15.271.800,00	1 unit	15.271.800,00	2 Unit	712.920.832,00				
Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Hasil Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota			1 Laporan	48.855.250,00	1 laporan	114.024.900,00		0,00	0	0,00	1 Laporan	48.855.250,00				Disporapar
Penerapan Destinasi Pariwisata Berkelanjutan dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota						1 lokasi	89.999.850,00		0,00	0	0,00						Disporapar

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (output)	Target RPD pada akhir periode Akhir RPD (2026)		Realisasi Capaian Kinerja RPD Sampai Dengan RKPD Tahun Lalu		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun Berjalan (Tahun n-1 = 2024) yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPD s/d Tahun lalu		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPD s/d Tahun lalu (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								I						15=146 x 100%		
4	5	6	Rp	7	Rp	8	Rp	9	Rp	10	Rp	11	Rp	12=7+13	13	14
Program Pemasaran Pariwisata	Jumlah kunjungan wisatawan	700000 orang	785.000.000,00	98%	173.355.500,00	660000	339.239.750,00	5,00%	500.000,00	5,00%	500.000,00	98%	173.355.500,00			
Pemasaran Pariwisata Dalam dan Luar Negeri Daya Tarik, Destinasi dan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota	Persentase cakupan pelayanan promosi wisata			98%	173.355.500,00	90,00%	339.239.750,00	5,00%	500.000,00	5,00%	500.000,00	98%	173.355.500,00			
Penyediaan Data dan Penyebaran Informasi Pariwisata Kabupaten/Kota, Baik Dalam dan Luar Negeri	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Penyediaan Data dan Penyebaran Informasi Pariwisata Kabupaten/Kota, Baik Dalam dan Luar Negeri			1 Dokumen	7.997.500,00	0				0	0,00	1 Dokumen	7.997.500,00			Disporapar
Peningkatan Kerja Sama dan Kemitraan Pariwisata Dalam dan Luar Negeri	Jumlah Dokumen Kerja Sama dan Kemitraan Pariwisata Dalam dan Luar Negeri			3 Dokumen	57.750.000,00	3 dokumen	62.990.000,00		0,00	0	0,00	3 Dokumen	57.750.000,00			Disporapar
Fasilitasi Kegiatan Pemasaran Pariwisata Baik Dalam dan Luar Negeri Pariwisata Kabupaten/Kota	Jumlah Kegiatan Pemasaran Pariwisata Baik Dalam dan Luar Negeri			1 Kegiatan	107.608.000,00	7 kegiatan	276.249.750,00		500.000,00	0	500.000,00	1 Kegiatan	107.608.000,00			Disporapar
Program pengembangan ekonomi kreatif melalui pemanfaatan dan perlindungan hak kekayaan intelektual	Jumlah pemanfaatan dan perlindungan Hak Kekayaan Intelektual	110 pelaku usaha Ekonomi kreatif	210.000.000,00	100,00%	92.704.500,00	90 pelaku usaha ekonomi kreatif	80.000.000,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	100%	92.704.500,00			
Penyediaan Prasarana (Zona Kreatif/Ruang Kreatif/Kota Kreatif) sebagai Ruang Berekspresi, Berpromosi dan Berinteraksi bagi Insan Kreatif di Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah prasana kreatif yang disediakan			1 Kreatif Hub	25.620.000,00	1 kreatif hub	50.000.000,00		0,00	0,00%	0,00	1 Kreatif Hub	25.620.000,00			
Pengembangan dan Revitalisasi Prasarana Kota Kreatif	Jumlah Sarana dan Prasarana Kota Kreatif yang tersedia			10 Unit	25.620.000,00	10 unit	50.000.000,00		0,00	0	0,00	10 Unit	25.620.000,00			Disporapar
Pengembangan Ekosistem Ekonomi Kreatif	Jumlah produk Ekraf yang memiliki HAKI			100,00%	67.084.500,00	40 oroduk	30.000.000,00		0,00	0,00%	0,00	100%	67.084.500,00			
Fasilitasi Pemberian Insentif				10 pelaku usaha	46.980.000,00					0	0,00	10 pelaku usaha	46.980.000,00			Disporapar
Fasilitasi Pendaftaran Kekayaan Intelektual	Jumlah produk Hasil Pencatatan atas Hak Cipta dan Hak Terkait, Pendaftaran Hak Kekayaan Industri kepada Pelaku Ekonomi Kreatif, serta Pemanfaatan Kekayaan Intelektual kepada Pelaku Ekonomi Kreatif			30 produk	20.104.500,00	40 produk	30.000.000,00		0,00	0	0,00	30 produk	20.104.500,00			Disporapar
Program Pengembangan Sumber Daya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	Jumlah sub sektor ekonomi kreatif yang sudah dibina	15 Sub sektor	605.000.000,00	100,00%	121.131.504,00	14 sub sektor	249.999.400,00	10,00%	32.042.381,00	10,00%	32.042.381,00	100%	121.131.504,00			
Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Dasar	Jumlah Sub Sektor Ekraf yang dibina			14 sub sektor	121.131.504,00	14 sub sektor	199.999.450,00		32.042.381,00	0,00%	32.042.381,00	14 sub sektor	121.131.504,00			

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (output)	Target RPD pada akhir periode Akhir RPD (2026)		Realisasi Capaian Kinerja RPD Sampai Dengan RKPd Tahun Lalu		Target Kinerja dan Anggaran RKPd Tahun Berjalan (Tahun n-1 = 2024) yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPd yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPD s/d Tahun lalu		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPD s/d Tahun lalu (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
								I									
4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	
		K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp
Fasilitasi Proses Kreasi, Produksi, Distribusi Konsumsi dan Konservasi Ekonomi Kreatif	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Proses Kreasi, Produksi, Distribusi Konsumsi, dan Konservasi Ekonomi Kreatif			1 Laporan	52.748.000,00	3 laporan	159.999.750,00	1 laporan	12.500.000,00	1 laporan	12.500.000,00	1 Laporan	52.748.000,00				Disporapar
Fasilitasi Pengembangan Kompetensi Sumber Daya Manusia Ekonomi Kreatif	Jumlah SDM Ekonomi Kreatif yang Mengikuti Fasilitas Pengembangan Kompetensi Sumber Daya Manusia Ekonomi Kreatif			30 Orang	68.383.504,00	30 orang	39.999.700,00		19.542.381,00	0	19.542.381,00	30 Orang	68.383.504,00				Disporapar
Pengembangan Kapasitas Pelaku Ekonomi Kreatif						4 kelompok	49.999.950,00		0,00	0,00%	0,00						
Pelatihan, Bimbingan Teknis, dan Pendampingan Ekonomi Kreatif						50 orang	49.999.950,00		0,00	0	0,00						Disporapar
DINAS PERDAGANGAN, KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH			39.743.693.738,00	93,27%	20.680.885.509,46	100,00%	21.952.410.387,00	22,50%	3.235.540.619,00	22,50%	3.235.540.619,00	93%	20.680.885.509,46				
URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR																	
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH			23.170.363.099,00	89,03%	13.786.297.822,00	100,00%	12.509.769.648,00	20,00%	1.978.975.140,00	20,00%	1.978.975.140,00	89%	13.786.297.822,00				
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase pemenuhan urusan penunjang yang dipenuhi	100%	21.867.163.099,00	100,00%	8.369.744.997,00	100,00%	8.076.000.949,00	25,00%	1.924.758.740,00	25,00%	1.924.758.740,00	100%	8.369.744.997,00				
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan layanan administrasi keuangan perangkat daerah			100,00%	6.653.958.061,00	100,00%	6.045.087.102,00	25,00%	1.550.025.180,00	25,00%	1.550.025.180,00	100%	6.653.958.061,00				
Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN			770 Orang/bulan	6.653.958.061,00	770 Orang/bulan	6.045.087.102,00	144	1.550.025.180,00	144	1.550.025.180,00	770 Orang/bulan	6.653.958.061,00				Dinas Perdagkop UMKM
Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan layanan administrasi kepegawaian perangkat daerah			100,00%	24.000.000,00		0,00		0,00	0,00%	0,00	100%	24.000.000,00				
Pengadaan Pakalan Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakalan Dinas beserta Atribut Kelengkapan			48 Paket	24.000.000,00					0	0,00	48 Paket	24.000.000,00				Dinas Perdagkop UMKM
Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan layanan administrasi umum perangkat daerah			100,00%	472.988.300,00	100,00%	599.120.450,00	25,00%	59.831.079,00	25,00%	59.831.079,00	100%	472.988.300,00				
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan			7 Paket	7.712.200,00	4 Paket	17.888.700,00		0,00	0	0,00	7 Paket	7.712.200,00				Dinas Perdagkop UMKM
Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan			7 Paket	36.199.200,00	4 paket	84.986.650,00		253.000,00	0	253.000,00	7 Paket	36.199.200,00				Dinas Perdagkop UMKM
Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan			14 Paket	7.420.200,00	12 paket	23.046.100,00		582.500,00	0	582.500,00	14 Paket	7.420.200,00				Dinas Perdagkop UMKM
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Rapat Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD			24 Laporan	421.656.700,00	24 laporan	473.199.000,00	6	58.995.579,00	6	58.995.579,00	24 Laporan	421.656.700,00				Dinas Perdagkop UMKM

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (output)	Target RPD pada akhir periode Akhir RPD (2026)		Realisasi Capaian Kinerja RPD Sampai Dengan RKPd Tahun Lalu		Target Kinerja dan Anggaran RKPd Tahun Berjalan (Tahun n-1 = 2024) yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPd yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPD s/d Tahun lalu		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPD s/d Tahun lalu (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
								I									
4	5	6	Rp	7	Rp	8	Rp	9	Rp	11	Rp	12	Rp	13=14/6 x 100%	K	Rp	16
Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pemenuhan Barang Milik Daerah Sesuai Dengan Perencanaan			100,00%	71.400.000,00	100,00%	199.438.800,00	25,00%	21.650.000,00	25,00%	21.650.000,00	100%	71.400.000,00				
Pengadaan Mebel						1 Unit	115.000.000,00		21.650.000,00	0	21.650.000,00						Dinas Perdagkop UMKM
Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan			9 Unit	71.400.000,00	1 unit	84.438.800,00		0,00	0	0,00	9 Unit	71.400.000,00				Dinas Perdagkop UMKM
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang terpenuhi			100,00%	571.320.535,00	100,00%	624.235.550,00	25,00%	117.376.096,00	25,00%	117.376.096,00	100%	571.320.535,00				
Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat			7 Laporan	2.500.000,00	12 laporan	5.996.800,00	1 laporan	1.490.000,00	1 laporan	1.490.000,00	7 Laporan	2.500.000,00				Dinas Perdagkop UMKM
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan			36 Laporan	44.911.521,00	36 laporan	62.456.750,00	9 laporan	9.506.096,00	9 laporan	9.506.096,00	36 Laporan	44.911.521,00				Dinas Perdagkop UMKM
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan			12 Laporan	523.909.014,00	12 laporan	555.782.000,00	3 laporan	106.380.000,00	3 laporan	106.380.000,00	12 Laporan	523.909.014,00				Dinas Perdagkop UMKM
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase ketersediaan Barang Milik Daerah berkondisi baik			100,00%	576.078.101,00	100,00%	608.119.047,00	25,00%	175.876.385,00	25,00%	175.876.385,00	100%	576.078.101,00				
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Perorangan Dinas atau Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Dinas Jabatan atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Dinas Perorangan Dinas atau Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya			1 Unit	141.055.800,00	1 Unit	122.412.000,00	1 Unit	3.625.650,00	1 Unit	3.625.650,00	1 Unit	141.055.800,00				Dinas Perdagkop UMKM
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Operasional atau Lapangan Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya			27 Unit	86.928.450,00	27 Unit	141.971.600,00	27 Unit	25.119.300,00	27 Unit	25.119.300,00	27 Unit	86.928.450,00				Dinas Perdagkop UMKM
Pemeliharaan Mebel						2 Unit	35.000.000,00		0,00	0	0,00						Dinas Perdagkop UMKM
Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara			20 Unit	22.935.200,00	20 Unit	83.017.200,00		4.615.000,00	0	4.615.000,00	20 Unit	22.935.200,00				Dinas Perdagkop UMKM
Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi			3 Unit	325.158.651,00	3 Unit	225.718.247,00		142.516.435,00	0	142.516.435,00	3 Unit	325.158.651,00				Dinas Perdagkop UMKM
Program Pengawasan dan Pemeriksaan Koperasi	Persentase penurunan koperasi yang bermasalah	22%	115.000.000,00	100,00%	5.230.450,00	100,00%	3.829.000,00	25,00%	0,00	25,00%	0,00	100%	5.230.450,00				

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (output)	Target RPD pada akhir periode Akhir RPD (2026)		Realisasi Capaian Kinerja RPD Sampai Dengan RKPD Tahun Lalu		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun Berjalan (Tahun n-1 = 2024) yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPD s/d Tahun lalu		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPD s/d Tahun lalu (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
								I									
4	5	6	Rp	7	Rp	8	Rp	9	Rp	10	Rp	11	Rp	12	13	14=12 x 100%	16
Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi, Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah pengawasan koperasi			20 Unit Usaha	5.230.450,00	20 Unit Usaha	3.829.000,00	10 unit usaha	0,00	0,00%	0,00	20 Unit Usaha	5.230.450,00				
Pelaksanaan Proses dan Pengawasan Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Koperasi yang telah dilakukan Pemeriksaan dan Pengawasan			20 Unit Usaha	5.230.450,00	20 Unit Usaha	3.829.000,00	10 unit usaha	0,00	10 unit usaha	0,00	20 Unit Usaha	5.230.450,00				Dinas Perdagkop UMKM
Program Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi	Persentase Koperasi yang dibina	3157,00%	150.000.000,00	95,00%	18.059.850,00	100,00%	56.120.600,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	95%	18.059.850,00				
Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi yang Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah koperasi yang dibina			15 koperasi	18.059.850,00	15 koperasi	56.120.600,00		0,00	0,00%	0,00	15 koperasi	18.059.850,00				
Peningkatan Produktivitas, Nilai Tambah, Akses Pasar, Akses Pembiayaan, Penguatan Kelembagaan, Penataan Manajemen, Standarisasi, dan Restrukturisasi Usaha	Jumlah Unit Usaha yang Produktif, Bernilai Tambah, Memiliki Akses Pasar, Akses Pembiayaan, Penguatan Kelembagaan, Penataan Manajemen, Standarisasi, dan Restrukturisasi Usaha			15 Unit Usaha	18.059.850,00	15 Unit Usaha	56.120.600,00		0,00	0	0,00	15 Unit Usaha	18.059.850,00				Dinas Perdagkop UMKM
Program Pemberdayaan usaha menengah,usaha kecil, dan usaha mikro (UMKM)	Persentase peningkatan omset usaha	15,00%	812.600.000,00	81%	1.007.943.675,00	100,00%	763.502.099,00	25,00%	45.400.000,00	25,00%	45.400.000,00	81%	1.007.943.675,00				
Pemberdayaan Usaha Mikro yang Dilakukan Melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perizinan, Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi dengan Para Pemangku Kepentingan	Persentase peningkatan omset usaha			81%	1.007.943.675,00	15,00%	763.502.099,00		45.400.000,00	0,00%	45.400.000,00	81%	1.007.943.675,00				
Pemberdayaan Melalui Kemitraan Usaha Mikro	Jumlah Unit Usaha yang Telah Melaksanakan Kemitraan Usaha Mikro			3 Unit Usaha	224.600.000,00	20 Unit Usaha	505.044.099,00		40.000.000,00	0	40.000.000,00	3 Unit Usaha	224.600.000,00				Dinas Perdagkop UMKM
Pemberdayaan Kelembagaan Potensi dan Pengembangan Usaha Mikro	Jumlah Unit Usaha yang Telah Menerima Pembinaan dan Pendampingan Terhadap Usaha Mikro			95 Unit Usaha	783.343.675,00	40 Unit Usaha	258.458.000,00		5.400.000,00	0	5.400.000,00	95 Unit Usaha	783.343.675,00				Dinas Perdagkop UMKM
Program Pengembangan UMKM	Persentase Kenaikan pendapatan UMKM yang di bantu	50%	225.600.000	69%	4.385.318.850,00	100,00%	3.610.317.000,00	25,00%	8.816.400,00	25,00%	8.816.400,00	69%	4.385.318.850,00				
Pengembangan Usaha Mikro dengan Orientasi Peningkatan Skala Usaha Menjadi Usaha Kecil	Persentase Kenaikan Pendapatan UMKM yang dibantu			69%	4.385.318.850,00	45,00%	3.610.317.000,00		8.816.400,00	0,00%	8.816.400,00	69%	4.385.318.850,00				
Pengembangan Usaha Mikro	Jumlah Usaha Mikro yang Terfasilitasi			1133 Unit Usaha	4.385.318.850,00	200 Unit Usaha	3.610.317.000,00		8.816.400,00	0	8.816.400,00	1133 Unit Usaha	4.385.318.850,00				Dinas Perdagkop UMKM
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERDAGANGAN		54,75%	14.529.431.239,00	95%	619.275.158.746,00	100,00%	8.665.327.551,00	25,00%	1.154.246.729,00	25,00%	1.154.246.729,00	95%	619.275.158.746,00				

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (output)	Target RPD pada akhir periode Akhir RPD (2026)		Realisasi Capaian Kinerja RPD Sampai Dengan RKPD Tahun Lalu		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun Berjalan (Tahun n-1 = 2024) yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPD s/d Tahun lalu		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPD s/d Tahun lalu (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								I								
4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14=7x13	15=14/6 x 100%	16				
		K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
Program Perizinan dan Pendaftaran Perusahaan	Persentase peningkatan pelaku usaha yang memiliki izin usaha di bidang perdagangan	40%	140.000.000,00	100,00%	67.976.250,00	37%	24.592.500,00	25,00%	4.273.500,00	25,00%	4.273.500,00	100%	67.976.250,00			
Penerbitan Izin Pengelolaan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan, dan Izin Usaha Toko Swalayan	Jumlah pelaku usaha yang memiliki izin usaha			152 Dokumen	5.313.750,00	100 pelaku ushaa	5.396.000,00	30 dokumen	0,00	0,00%	0,00	152 Dokumen	5.313.750,00			
Fasilitasi Pemenuhan Komitmen Perolehan Perizinan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan, dan Toko Swalayan Melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	Jumlah Rekomendasi Pemenuhan Komitmen Perolehan Perizinan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan, dan Toko Swalayan Melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik			152 Dokumen	5.313.750,00	100 dokumen	5.396.000,00	30 dokumen	0,00	30 dokumen	0,00	152 Dokumen	5.313.750,00			Dinas Perdagkop UMKM
Pengendalian Fasilitas Penyimpanan Bahan Berbahaya dan Pengawasan Distribusi, Pengemasan dan Pelabelan Bahan Berbahaya di Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota	Jumlah pengendalian fasilitas penyimpanan bahan berbahaya dan pengawasan distribusi ,pengemasan dan pelabelan bahan berbahaya ditingkat daerah kab/kota			1 kali	62.662.500,00	2 kali	19.196.500,00	1 kali	4.273.500,00	0,00%	4.273.500,00	1 kali	62.662.500,00			
Pengawasan Distribusi, Pengemasan dan Pelabelan Bahan Berbahaya Terhadap Pengguna Akhir Bahan Berbahaya (PA-B2) maupun Produsen B2 (P-B2)	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Distribusi, Pengemasan dan Pelabelan Bahan Berbahaya Terhadap Distributor B2, Pengguna Akhir Bahan Berbahaya (PA-B2) maupun Produsen B2 (P-B2)			2 Laporan	62.662.500,00	2 Laporan	19.196.500,00	1 Laporan	4.273.500,00	1 Laporan	4.273.500,00	2 Laporan	62.662.500,00			Dinas Perdagkop UMKM
Program Peningkatan Sarana Distribusi Perdagangan	Persentase pasar ber-SNI	100%	12.934.788.900,00		539.196.197.546,00	100,00%	7.516.396.650,00	25,00%	1.031.538.078,00	25,00%	1.031.538.078,00		539.196.197.546,00			
Pembangunan dan Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan	Jumlah pasar yang dipelihara dan di kelola				539.196.197.546,00	2 unit	7.516.396.650,00		1.031.538.078,00	0,00%	1.031.538.078,00		539.196.197.546,00			
Penyediaan Sarana Distribusi Perdagangan	Jumlah Sarana Distribusi Perdagangan				274.754.825.446,00	2 Unit	4.115.230.000,00		410.529.598,00	0	410.529.598,00		274.754.825.446,00			Dinas Perdagkop UMKM
Fasilitasi Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan	Jumlah Fasilitas Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan				2.644.413.721,00	1 Unit	3.401.166.650,00		621.008.480,00	0	621.008.480,00		2.644.413.721,00			Dinas Perdagkop UMKM
PROGRAM STABILISASI HARGA BARANG KEBUTUHAN POKOK DAN BARANG PENTING	Persentase Kebutuhan Variasi Harga antar waktu barang kebutuhan pokok			100,00%	156.785.600,00	6,00%	239.702.800,00	25,00%	7.523.750,00	25,00%	7.523.750,00	100%	156.785.600,00			
Pengendalian Harga, dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Pasar Kabupaten/ Kota	Persentase Kebutuhan Variasi Harga antar waktu barang kebutuhan pokok			2 kali	156.785.600,00	6,00%	239.702.800,00	25,00%	7.523.750,00	25,00%	7.523.750,00	2 kali	156.785.600,00			
Pekaksanaan Operasi Pasar Reguler dan Pasar Khusus yang Berdampak dalam 1 (Satu) Kabupaten/ Kota	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kegiatan Operasi Pasar dalam rangka stabilitasi harga barang kebutuhan pokok			1 laporan	156.785.600,00	250 laporan				0	0,00	1 laporan	156.785.600,00			Dinas Perdagkop UMKM

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (output)	Target RPD pada akhir periode Akhir RPD (2026)		Realisasi Capaian Kinerja RPD Sampai Dengan RKPD Tahun Lalu		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun Berjalan (Tahun n-1 = 2024) yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPD s/d Tahun lalu		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPD s/d Tahun lalu (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
								I										
4	5	6	Rp	7	Rp	8	Rp	9	Rp	11	Rp	12	Rp	13	14	15=14/6 x 100%	16	
		K		K		K		K		K		K		K		K		
Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pelaku Usaha Distribusi Barang dalam 1 (Satu) Kabupaten/kota						6%	239.702.800,00	4,1%	7.523.750,00	4,1%	7.523.750,00							Dinas Perdagkop UMKM
Program Standarisasi dan Perlindungan Konsumen	Persentase Pengawasan alat UTTP yang bertanda tera sah	70%	579.642.339,00	88%	138.203.255,00	65,00%	113.556.100,00	25,00%	6.638.000,00	25,00%	6.638.000,00	88%	138.203.255,00					
Pelaksanaan Metrologi Legal, Berupa Tera, Tera Ulang, dan Pengawasan	Jumlah Pelaksanaan tera ulang alat UTTP			4 kali	138.203.255,00	6 kali	113.556.100,00	1 kali	6.638.000,00	0,00%	6.638.000,00	4 kali	138.203.255,00					
Pelaksanaan Metrologi Legal, Berupa Tera, Tera Ulang	Jumlah Alat Ukur, Alat Takar, Alat Timbang, dan Alat Perlengkapan Ditera Ulang			625 Unit	138.203.255,00	1400 unit	113.556.100,00	215 unit	6.638.000,00	215 unit	6.638.000,00	625 Unit	138.203.255,00					Dinas Perdagkop UMKM
Program Penggunaan dan Pemasaran Produk Dalam Negeri	Persentase IKM yang Dapat Meningkatkan Akses Pemasaran Produknya melalui digital	9%	875.000.000	97%	437.824.507	20%	884.635.600,00	25,00%	104.273.401,00	25,00%	104.273.401,00	97%	437.824.507,00					
Pelaksanaan Promosi, Pemasaran dan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri	Jumlah Pelaku usaha yang bertransaksi digital			97%	437.824.507,00	75 pelaku usaha	884.635.600,00	20 pelaku usaha	104.273.401,00	0,00%	104.273.401,00	97%	437.824.507,00					
Pelaksanaan Promosi Penggunaan Produk Dalam Negeri di Tingkat Kabupaten/Kota	Jumlah UMKM yang memperoleh fasilitasi Promosi Penggunaan Produk Dalam Negeri di Tingkat Kabupaten/Kota			5 UMKM	363.424.507,00	15 UMKM	214.000.000,00	2 UMKM	37.823.401,00	2 UMKM	37.823.401,00	5 UMKM	363.424.507,00					Dinas Perdagkop UMKM
Pemasaran dan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri di Tingkat Kabupaten/Kota	Jumlah UMKM yang memperoleh fasilitasi pemasaran produk dalam negeri melalui kemitraan dengan retail, marketplace, perhotelan dan jasa akomodasi			75 UMKM	74.400.000,00	60 UMKM	670.635.600,00		66.450.000,00	0	66.450.000,00	75 UMKM	74.400.000,00					Dinas Perdagkop UMKM
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERINDUSTRIAN		10,00%	2.043.899.400,00	95,51%	701.836.100,00	100,00%	777.313.188,00	22,50%	102.318.750,00	22,50%	102.318.750,00	96%	701.836.100,00					
Program Perencanaan dan Pembangunan Industri	Persentase IKM yang difasilitasi mendapatkan sertifikat dan standarisasi produk industri (sertifikat halal,MD,GMPSNI dan Merk)	10%	2.043.899.400,00		701.836.100,00	8,00%	774.958.188,00	20,00%	101.268.750,00	20,00%	101.268.750,00		701.836.100,00					
Penyusunan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota	Terlaksananya pembinaan IKM nbaik melalui workshop, pendampingan maupun pembinaan lainnya			6 kali	701.836.100,00	12 kali	774.958.188,00		101.268.750,00	0,00%	101.268.750,00	6 kali	701.836.100,00					

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (output)	Target RPD pada akhir periode Akhir RPD (2026)		Realisasi Capaian Kinerja RPD Sampai Dengan RKPd Tahun Lalu		Target Kinerja dan Anggaran RKPd Tahun Berjalan (Tahun n-1 = 2024) yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPd yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPD s/d Tahun lalu		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPD s/d Tahun lalu (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								I								
4	5	6	Rp	7	Rp	8	Rp	9		11	Rp	12	Rp	14=7/11	15=14/6 x 100%	16
Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sumber Daya Industri	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan pelaksanaan Pembangunan Sumber Daya Industri			0	631.814.600,00	1 Dokumen	674.958.088,00		99.046.950,00	0	99.046.950,00	0%	631.814.600,00			Dinas Perdagkop UMKM
Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat			1 Dokumen	70.021.500,00	1 Dokumen	100.000.100,00		2.221.800,00	0	2.221.800,00	1 Dokumen	70.021.500,00			Dinas Perdagkop UMKM
PROGRAM PENGENDALIAN IZIN USAHA INDUSTRI							2.355.000,00	25,00%	1.050.000,00	25,00%	1.050.000,00					
Penerbitan Izin Usaha Industri (IUI), Izin Perluasan Usaha Industri (IPUI), Izin Usaha Kawasan Industri (IUKI) dan Izin Perluasan Kawasan Industri (IPKI) Kewenangan Kabupaten/Kota							2.355.000,00		1.050.000,00	0,00%	1.050.000,00					
Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan terhadap Perizinan Berusaha sektor perindustrian yang menjadi kewenangan Kabupaten/Kota							2.355.000,00		1.050.000,00	0	1.050.000,00					Dinas Perdagkop UMKM
INSPEKTORAT DAERAH			16.407.108.880,00	100%	6.940.832.662,00	100,00%	7.217.546.499,00	12,11%	1.409.530.008,00	12,11%	1.409.530.008,00	100%	6.940.832.662,00			
UNSUR PENGAWASAN URUSAN PEMERINTAHAN																
INSPEKTORAT DAERAH		94,33%	16.407.108.880,00	100%	6.940.832.662,00	100,00%	7.217.546.499,00	12,11%	1.409.530.008,00	12,11%	1.409.530.008,00	100%	6.940.832.662,00			
Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota	Persentase pemenuhan urusan penunjang yang dipenuhi	95%	14.436.828.880,00	99%	6.286.034.267,00	100,00%	6.173.076.299,00	20,83%	1.285.800.008,00	20,83%	1.285.800.008,00	99%	6.286.034.267,00			
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan layanan administrasi keuangan perangkat daerah			100,00%	5.068.934.189,00	100,00%	4.748.304.519,00	25,00%	1.199.922.038,00	25,00%	1.199.922.038,00	100%	5.068.934.189,00			
Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN			1	5.068.934.189,00	31 Orang/ Bulan	4.748.304.519,00	31 Orang/ Bulan	1.199.922.038,00	31 Orang/ Bulan	1.199.922.038,00	100%	5.068.934.189,00			Inspektorat
Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan layanan administrasi kepegawaian perangkat daerah			100,00%	327.377.550,00	100,00%	200.000.000,00	25,00%	9.350.000,00	25,00%	9.350.000,00	100%	327.377.550,00			
Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya			1	15.500.000,00					0	0,00	100%	15.500.000,00			Inspektorat
Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan			40 Orang	311.877.550,00	31 Orang/ Bulan	200.000.000,00	31 Orang/ Bulan	9.350.000,00	31 Orang/ Bulan	9.350.000,00	40 Orang	311.877.550,00			Inspektorat
Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan layanan administrasi umum perangkat daerah			100,00%	308.766.508,00	100,00%	315.717.580,00	25,00%	20.042.985,00	25,00%	20.042.985,00	100%	308.766.508,00			
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan			1 Paket	2.007.000,00	4 Paket	1.201.100,00		0,00	0	0,00	1 Paket	2.007.000,00			Inspektorat

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (output)	Target RPD pada akhir periode Akhir RPD (2026)		Realisasi Capaian Kinerja RPD Sampai Dengan RKPD Tahun Lalu		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun Berjalan (Tahun n-1 = 2024) yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPD s/d Tahun lalu		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPD s/d Tahun lalu (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								I								
4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16				
		K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan			1 Paket	2.050.000,00	1 Paket	1.958.800,00		0,00	0	0,00	1 Paket	2.050.000,00			Inspektorat
Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan			1 Paket	40.594.900,00	4 Paket	49.696.280,00		0,00	0	0,00	1 Paket	40.594.900,00			
Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan			2 Paket	12.454.450,00	12 Paket	16.723.400,00	1 Paket	225.000,00	1 Paket	225.000,00	2 Paket	12.454.450,00			Inspektorat
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Rapat Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD			83 Laporan	251.660.158,00	150 Laporan	246.138.000,00	22 Laporan	19.817.985,00	22 Laporan	19.817.985,00	83 Laporan	251.660.158,00			
Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase pemenuhan Barang Milik Daerah sesuai dengan perencanaan			100,00%	163.750.000,00	100,00%	168.444.600,00		0,00	0,00%	0,00	100%	163.750.000,00			
Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan			2 Unit	163.750.000,00	10 Unit	168.444.600,00		0,00	0	0,00	2 Unit	163.750.000,00			Inspektorat
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang terpenuhi			97%	216.000.150,00	80,00%	219.023.600,00	25,00%	42.206.435,00	25,00%	42.206.435,00	97%	216.000.150,00			
Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat			1 Laporan	500.000,00	12 Laporan	1.040.000,00		0,00	0	0,00	1 Laporan	500.000,00			Inspektorat
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan			1 Laporan	12.956.592,00	48 Laporan	17.808.400,00	1 Laporan	2.748.615,00	1 Laporan	2.748.615,00	1 Laporan	12.956.592,00			Inspektorat
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan			1 Laporan	202.543.558,00	12 Laporan	200.175.200,00	1 Laporan	39.457.820,00	1 Laporan	39.457.820,00	1 Laporan	202.543.558,00			Inspektorat
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase ketersediaan Barang Milik Daerah berkondisi baik			100,00%	201.205.870,00	100,00%	521.586.000,00	25,00%	14.278.550,00	25,00%	14.278.550,00	100%	201.205.870,00			
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Perorangan Dinas atau Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Dinas Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya			8 Unit	165.017.170,00	8 Unit	184.406.000,00	8 Unit	11.398.550,00	8 Unit	11.398.550,00	8 Unit	165.017.170,00			Inspektorat
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya			1 Unit	22.392.700,00	1 Unit	30.100.000,00	1 Unit	2.880.000,00	1 Unit	2.880.000,00	1 Unit	22.392.700,00			Inspektorat
Pemeliharaan Mebel	Jumlah Mebel yang Dipelihara				0,00					0	0,00		0,00			Inspektorat
Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara			20 Unit	8.893.000,00	20 Unit	9.790.000,00		0,00	0	0,00	20 Unit	8.893.000,00			
Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi			1 Unit	4.903.000,00	1 Unit	297.290.000,00		0,00	0	0,00	1 Unit	4.903.000,00			
Program Penyelenggaraan Pengawasan	Persentase Pengawasan yang Tuntas Dilaksanakan	95%	1.340.000.000	100,00%	516.038.800,00	100,00%	672.172.000,00	12,50%	111.850.000,00	12,50%	111.850.000,00	100%	516.038.800,00			

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (output)	Target RPD pada akhir periode Akhir RPD (2026)		Realisasi Capaian Kinerja RPD Sampai Dengan RKPD Tahun Lalu		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun Berjalan (Tahun n-1 = 2024) yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPD s/d Tahun lalu		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPD s/d Tahun lalu (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
								I									
4	5	6	Rp	7	Rp	8	Rp	9	Rp	10	Rp	11	Rp	12	13	14=14a x 100%	15
Penyelenggaraan Pengawasan Internal	Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan Internal yang Ditindaklanjuti oleh Auditor			100,00%	459.108.800,00	100,00%	585.922.000,00	25,00%	111.850.000,00	25,00%	111.850.000,00	100%	459.108.800,00				
Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah			6 Laporan	30.250.000,00	6 Laporan	65.100.000,00		0,00	0	0,00	6 Laporan	30.250.000,00			Inspektorat	
Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah			194 Laporan	344.265.000,00	120 Laporan	406.800.000,00	31 Laporan	78.665.000,00	31 Laporan	78.665.000,00	194 Laporan	344.265.000,00			Inspektorat	
Reviu Laporan Kinerja	Jumlah Laporan Hasil Reviu Laporan Kinerja			2 Laporan	17.690.000,00	2 Laporan	22.200.000,00	1 Laporan	18.225.000,00	1 Laporan	18.225.000,00	2 Laporan	17.690.000,00			Inspektorat	
Reviu Laporan Keuangan	Jumlah Laporan Hasil Reviu Laporan Keuangan			1 Laporan	15.365.000,00	1 Laporan	16.650.000,00	1 Laporan	14.960.000,00	1 Laporan	14.960.000,00	1 Laporan	15.365.000,00			Inspektorat	
Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP	Jumlah Dokumen Hasil Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP			6 laporan	51.538.800,00	4 Laporan	75.172.000,00		0,00	0	0,00	6 laporan	51.538.800,00			Inspektorat	
Penyelenggaraan Pengawasan dengan Tujuan Tertentu	Persentase Pengawasan dengan Tujuan Tertentu yang tuntas dilaksanakan			100,00%	56.930.000,00	100,00%	86.250.000,00		0,00	0,00%	0,00	100%	56.930.000,00				
Penanganan Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah	Jumlah Laporan Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah yang Ditangani			0	0,00	1 laporan	22.050.000,00		0,00	0	0,00	0%	0,00			Inspektorat	
Pengawasan dengan Tujuan Tertentu	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu			6 Laporan	56.930.000,00	6 Laporan	64.200.000,00		0,00	0	0,00	6 Laporan	56.930.000,00			Inspektorat	
Program Perumusan Kebijakan, Pendampingan dan Asistensi	Persentase Capaian Aksi pada Aplikasi MCP	93,00%	630.280.000	100,00%	138.759.595,00	6 Laporan	372.298.200,00	3,00%	11.880.000,00	3,00%	11.880.000,00	100%	138.759.595,00				
Pendampingan dan Asistensi	Persentase Pendampingan dan Asistensi yang tuntas dilakukan			100,00%	138.759.595,00	87,00%	372.298.200,00	3,00%	11.880.000,00	3,00%	11.880.000,00	100%	138.759.595,00				
Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintahan Daerah			23 perangkat daerah	60.770.000,00	23 Perangkat Daerah	106.725.000,00	23 Perangkat Daerah	11.880.000,00	23 Perangkat Daerah	11.880.000,00	23 perangkat daerah	60.770.000,00			Inspektorat	
Pendampingan, Asistensi, Verifikasi, dan Penilaian Reformasi Birokrasi	Jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan Pendampingan, Asistensi, Verifikasi, dan Penilaian Reformasi Birokrasi			23 perangkat daerah	3.885.000,00	23 Perangkat Daerah	19.000.000,00		0,00	0	0,00	23 perangkat daerah	3.885.000,00			Inspektorat	
Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi	Jumlah Kegiatan Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi			3 Kegiatan	14.289.125,00	2 Kegiatan	122.148.800,00		0,00	0	0,00	3 Kegiatan	14.289.125,00			Inspektorat	

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (output)	Target RPD pada akhir periode Akhir RPD (2026)		Realisasi Capaian Kinerja RPD Sampai Dengan RKPD Tahun Lalu		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun Berjalan (Tahun n-1 = 2024) yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPD s/d Tahun lalu		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPD s/d Tahun lalu (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								I								
4	5	6	Rp	7	Rp	8	Rp	9	Rp	10	Rp	11	Rp	12	13	14
Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi Pengakuan Integritas	Jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi Pengakuan Integritas			23 perangkat daerah	59.815.470,00	23 Perangkat Daerah	124.424.400,00		0,00	0	0,00	23 perangkat daerah	59.815.470,00			Inspektorat
BADAN PERENCANAAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH			72.650.169.698,00	100,00%	6.056.879.013,00	100,00%	6.788.688.665,00	12,57%	1.221.803.802,00	12,57%	1.221.803.802,00	100%	6.056.879.013,00			
UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN																
PERENCANAAN		92,67%	72.280.169.698,00	100,00%	5.976.685.978,00	100,00%	6.471.188.665,00	16,81%	1.215.264.302,00	16,81%	1.215.264.302,00	100%	5.976.685.978,00			
Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota	Persentase pemenuhan urusan penunjang yang dipenuhi	100%	15.499.169.698,00	100,00%	5.503.276.027,00	100,00%	5.759.261.165,00	16,67%	1.195.589.052,00	16,67%	1.195.589.052,00	100%	5.503.276.027,00			
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan layanan administrasi keuangan perangkat daerah			100,00%	4.492.158.652,00	100,00%	4.442.640.605,00	25,00%	1.105.311.960,00	25,00%	1.105.311.960,00	100%	4.492.158.652,00			
Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN			462 orang/bulan	4.492.158.652,00	462 orang/bulan	4.442.640.605,00	99 orang/bulan	1.105.311.960,00	99 orang/bulan	1.105.311.960,00	462 orang/bulan	4.492.158.652,00			BAPPEDA
Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan layanan administrasi kepegawaian perangkat daerah				34.650.000,00	0,00%	0,00		0,00%		0,00		34.650.000,00			
Pengadaan Pakaiian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaiian Dinas beserta Atribut Kelengkapan			79 Paket	34.650.000,00	0			0		0,00	79 Paket	34.650.000,00			BAPPEDA
Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan layanan administrasi umum perangkat daerah			100,00%	501.340.412,00	100,00%	430.792.560,00	25,00%	39.532.117,00	25,00%	39.532.117,00	100%	501.340.412,00			
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan			4 Paket	4.403.300,00	4 Paket	4.100.000,00		0,00	0	0,00	4 Paket	4.403.300,00			BAPPEDA
Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan			4 Paket	49.619.600,00	4 Paket	50.488.560,00		0,00	0	0,00	4 Paket	49.619.600,00			BAPPEDA
Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan			4 Paket	11.694.400,00	4 Paket	15.000.000,00		0,00	0	0,00	4 Paket	11.694.400,00			BAPPEDA
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD			24 Laporan	435.623.112,00	24 Laporan	361.204.000,00	6 Laporan	39.532.117,00	6 Laporan	39.532.117,00	24 Laporan	435.623.112,00			BAPPEDA
Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Pemenuhan Barang Milik Daerah Sesuai Dengan Perencanaan			100,00%	127.050.000,00	100,00%	400.360.000,00		0,00	0,00%	0,00	100%	127.050.000,00			
Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan			37 Unit	127.050.000,00				0		0,00	37 Unit	127.050.000,00			BAPPEDA
Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan						1 Unit	350.000.000,00		0,00	0	0,00					BAPPEDA
Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya						6 Unit	50.360.000,00		0,00	0	0,00					BAPPEDA
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang terpenuhi			100,00%	167.703.027,00	100,00%	207.750.000,00	25,00%	35.850.995,00	25,00%	35.850.995,00	100%	167.703.027,00			
Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat			4 Laporan	1.750.000,00	4 Laporan	3.000.000,00		0,00	0	0,00	4 Laporan	1.750.000,00			BAPPEDA
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan			4 Laporan	10.477.248,00	0			0		0,00	4 Laporan	10.477.248,00			BAPPEDA

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (output)	Target RPD pada akhir periode Akhir RPD (2026)		Realisasi Capaian Kinerja RPD Sampai Dengan RKPD Tahun Lalu		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun Berjalan (Tahun n-1 = 2024) yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPD s/d Tahun lalu		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPD s/d Tahun lalu (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								I						15=146 x 100%		
4	5	6	Rp	7	Rp	8	Rp	9	Rp	10	Rp	11	Rp	12=7+13	13	14
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan			12 Laporan	155.475.779,00	12 Laporan	204.750.000,00	3 Laporan	35.850.995,00	3 Laporan	35.850.995,00	12 Laporan	155.475.779,00			BAPPEDA
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase ketersediaan Barang Milik Daerah berkondisi baik			100,00%	180.373.936,00	100,00%	277.718.000,00	25,00%	14.893.980,00	25,00%	14.893.980,00	100%	180.373.936,00			
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Dinas Jabatan atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya			20 Unit	168.085.936,00	20 Unit	237.718.000,00	9 Unit	14.893.980,00	9 Unit	14.893.980,00	20 Unit	168.085.936,00			BAPPEDA
Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara			50 Unit	12.288.000,00	50 Unit	40.000.000,00		0,00	0	0,00	50 Unit	12.288.000,00			BAPPEDA
Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi			1 Unit	0,00	0				0	0,00	1 Unit	0,00			BAPPEDA
Program Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah	Persentase konsistensi perencanaan pembangunan daerah	86%	56.331.000.000	100,00%	395.448.701,00	82,00%	552.079.550,00	13,75%	18.651.500,00	13,75%	18.651.500,00	100%	395.448.701,00			
Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan	Jumlah dokumen perencanaan pembangunan daerah yang ditetapkan			2 dokumen	376.183.701,00	4 dokumen	512.079.550,00	20,00%	18.328.100,00	20,00%	18.328.100,00	2 dokumen	376.183.701,00			
Koordinasi Penelaahan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Dokumen Kebijakan Lainnya	Jumlah Telaahan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Daerah			0	0,00					0	0,00	0%	0,00			BAPPEDA
Pelaksanaan Musrenbang Kabupaten/Kota	Jumlah Berita Acara Musrenbang Kabupaten/Kota			2 Berita Acara	84.854.550,00	2 Berita Acara	100.000.000,00	2 Berita Acara	411.600,00	2 Berita Acara	411.600,00	2 Berita Acara	84.854.550,00			BAPPEDA
Koordinasi Penyusunan dan Penetapan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota yang Ditetapkan (RPJPD/RPJMD/RKPD)			5 Dokumen	291.329.151,00	6 Dokumen	412.079.550,00	1 Dokumen	17.916.500,00	1 Dokumen	17.916.500,00	5 Dokumen	291.329.151,00			BAPPEDA
Analisis Data dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	Tingkat ketersediaan data perencanaan pembanguinan pada OPD dalam sistem pengelolaan data			100,00%	3.175.000,00	86,00%	10.000.000,00	10,00%	323.400,00	10,00%	323.400,00	100%	3.175.000,00			
Analisis Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Analisis Data untuk Penyusunan Kebijakan Perencanaan Pembangunan Daerah (Semua Perencanaan Pembangunan Daerah)			1 Dokumen	3.175.000,00	1 Dokumen	10.000.000,00		323.400,00	0	323.400,00	1 Dokumen	3.175.000,00			BAPPEDA
Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	Jumlah dokumen pengendalian dan evaluasi perencanaan pembangunan daerah			4 dokumen	9.887.650,00	4 Dokumen	15.000.000,00	20,00%	0,00	20,00%	0,00	4 dokumen	9.887.650,00			
Monitoring, Evaluasi dan Penyusunan Laporan Berkala Pelaksanaan Pembangunan Daerah	Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Kinerja Pembangunan Daerah			10 Laporan	9.887.650,00	10 Laporan	15.000.000,00		0,00	0	0,00	10 Laporan	9.887.650,00			BAPPEDA
Implementasi Sistem Informasi Pemerintahan Daerah di Bidang Pembangunan Daerah	Jumlah modul aplikasi yang dikembangkan			5 modul	6.202.350,00	5 Modul	15.000.000,00	5,00%	0,00	5,00%	0,00	5 modul	6.202.350,00			

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (output)	Target RPD pada akhir periode Akhir RPD (2026)		Realisasi Capaian Kinerja RPD Sampai Dengan RKPD Tahun Lalu		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun Berjalan (Tahun n-1 = 2024) yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPD s/d Tahun lalu		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPD s/d Tahun lalu (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								I								
4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
		K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
Pengelolaan Data dalam Sistem Informasi Pemerintahan Daerah di Bidang Pembangunan Daerah	Jumlah Data dalam Sistem Informasi Pemerintahan Daerah di Bidang Pembangunan Daerah yang Dikelola			41 Dokumen	6.202.350,00	41 Dokumen	15.000.000,00		0,00	0	0,00	41 Dokumen	6.202.350,00			BAPPEDA
Program Koordinasi Dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah	Persentase perangkat daerah yang telah memiliki dokumen perencanaan yang baik	92%	450.000.000,00	100,00%	77.961.250,00	88,00%	159.847.950,00	20,00%	1.023.750,00	20,00%	1.023.750,00	100%	77.961.250,00			
Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	Persentase koordinasi perencanaan dibawah bidang pemerintahan dan pembangunan manusia			100,00%	43.571.040,00	88,00%	75.000.000,00	20,00%	1.023.750,00	20,00%	1.023.750,00	100%	43.571.040,00			
Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia			13 Laporan	12.850.750,00	13 Laporan	35.000.000,00		0,00	0	0,00	13 Laporan	12.850.750,00			BAPPEDA
Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Pembangunan Manusia			13 Laporan	30.720.290,00	13 Laporan	40.000.000,00		1.023.750,00	0	1.023.750,00	13 Laporan	30.720.290,00			BAPPEDA
Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan	Persentase koordinasi perencanaan dibawah bidang infrastruktur dan kewilayahan			100,00%	24.951.760,00	88,00%	50.000.000,00	20,00%	0,00	20,00%	0,00	100%	24.951.760,00			
Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Kewilayahan			2 Laporan	24.951.760,00	2 Laporan	50.000.000,00		0,00	0	0,00	2 Laporan	24.951.760,00			BAPPEDA
Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam)	Persentase koordinasi perencanaan dibawah bidang perekonomian dan SDA			100,00%	9.438.450,00	88,00%	34.847.950,00	20,00%	0,00	20,00%	0,00	100%	9.438.450,00			
Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang SDA			8 Laporan	9.438.450,00	8 Laporan	34.847.950,00		0,00	0	0,00	8 Laporan	9.438.450,00			BAPPEDA
PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN		76,00%	370.000.000	100,00%	80.193.035	72,00%	317.500.000	8,33%	6.539.500	8,33%	6.539.500,00	100%	80.193.035			
Program Penelitian Dan Pengembangan Daerah	Persentase inovasi daerah yang memiliki nilai kematangan di atas 90	76%	370.000.000	100,00%	80.193.035,00	72,00%	317.500.000,00	8,33%	6.539.500,00	8,33%	6.539.500,00	100%	80.193.035,00			
	Jumlah dokumen kelitbangan yang dihasilkan	24 dokumen		0,00%	0,00	6 Dokumen				0,00%	0,00	0%	0,00			
Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan	Jumlah dokumen kelitbangan daerah bidang penyelenggaraan pemerintahan dan pengkajian peraturan yang disusun			0,00%	0,00		0,00		0,00	0,00%	0,00	0%	0,00			

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (output)	Target RPD pada akhir periode Akhir RPD (2026)		Realisasi Capaian Kinerja RPD Sampai Dengan RKPD Tahun Lalu		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun Berjalan (Tahun n-1 = 2024) yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPD s/d Tahun lalu		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPD s/d Tahun lalu (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab							
								I															
								K	Rp														
4	5	6	Rp	7	Rp	8	Rp	9	Rp	10	Rp	11	Rp	12	Rp	13	Rp	14=7x13	15=146 x 100%	K	Rp	16	
Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Pemerintahan Umum	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Pemerintahan Umum			0	0,00					0	0,00	0%	0,00										BAPPEDA
Penelitian dan Pengembangan Bidang Sosial dan Kependudukan	Jumlah dokumen kelitbangan daerah bidang sosial dan kependudukan yang disusun			100,00%	11.857.250,00	1 dokumen	22.500.000,00		0,00	0,00%	0,00	100%	11.857.250,00										
Penelitian dan Pengembangan Pendidikan dan Kebudayaan	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Pendidikan dan Kebudayaan			2 Dokumen	11.857.250,00	1 dokumen	22.500.000,00		0,00	0	0,00	2 Dokumen	11.857.250,00										BAPPEDA
Penelitian dan Pengembangan Bidang Ekonomi dan Pembangunan	Jumlah dokumen kelitbangan daerah bidang ekonomi dan pembangunan yang disusun			100,00%	13.891.025,00	1 dokumen	215.000.000,00		0,00	0,00%	0,00	100%	13.891.025,00										
Penelitian dan Pengembangan Perindustrian dan Perdagangan	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Perindustrian dan Perdagangan			2 dokumen	13.891.025,00	1 dokumen	215.000.000,00		0,00	0	0,00	2 dokumen	13.891.025,00										BAPPEDA
Pengembangan Inovasi dan Teknologi	Persentase inovasi daerah yang masuk pengukuran indeks inovasi daerah			100,00%	54.444.760,00	100,00%	80.000.000,00	25,00%	6.539.500,00	25,00%	6.539.500,00	100%	54.444.760,00										
Penelitian, Pengembangan, dan Perekrayaan di Bidang Teknologi dan Inovasi	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian, Pengembangan, dan Perekrayaan di Bidang Teknologi dan Inovasi			1 Dokumen	54.444.760,00	1 Dokumen	80.000.000,00		6.539.500,00	0	6.539.500,00	1 Dokumen	54.444.760,00										BAPPEDA
BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH			34.003.114.104,00	100,00%	10.251.420.772,00	100,00%	11.487.167.033,00	21,38%	1.961.804.162,00	21,38%	1.961.804.162,00	100,00%	10.251.420.772,00										
UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN																							
KEUANGAN		75,50%	34.003.114.104,00	100,00%	10.251.420.772,00	100,00%	11.487.167.033,00	21,38%	1.961.804.162,00	21,38%	1.961.804.162,00	100,00%	10.251.420.772,00										
Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota	Persentase pemenuhan urusan penunjang yang dipenuhi	100%	20.452.935.628,00	100,00%	8.350.386.639,00	100,00%	8.523.642.833,00	20,00%	1.804.492.112,00	20,00%	1.804.492.112,00	100%	8.350.386.639,00										
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan layanan administrasi keuangan perangkat daerah			100,00%	6.546.330.062,00	100,00%	6.790.845.581,00	25,00%	1.524.804.144,00	25,00%	1.524.804.144,00	100%	6.546.330.062,00										
Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN			630 Orang/bulan	6.546.330.062,00	630 org/bln	6.790.845.581,00	180 org/bln	1.524.804.144,00	180 org/bln	1.524.804.144,00	630 Orang/bulan	6.546.330.062,00										BPKD
Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan layanan administrasi kepegawaian perangkat daerah				22.500.000,00		0,00		0,00	0,00%	0,00		22.500.000,00										
Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan			45 Paket	22.500.000,00					0	0,00	45 Paket	22.500.000,00										BPKD
Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan layanan administrasi umum perangkat daerah			100,00%	712.189.297,00	100,00%	509.008.552,00	25,00%	78.059.990,00	25,00%	78.059.990,00	100%	712.189.297,00										
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan			7 Paket	9.317.000,00	45 paket	15.488.000,00	45 paket	1.543.000,00	45 paket	1.543.000,00	7 Paket	9.317.000,00										BPKD
Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan			45 Paket	117.696.018,00	8 paket	145.156.552,00	2 paket	25.908.800,00	2 paket	25.908.800,00	45 Paket	117.696.018,00										BPKD

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (output)	Target RPD pada akhir periode Akhir RPD (2026)		Realisasi Capaian Kinerja RPD Sampai Dengan RKPd Tahun Lalu		Target Kinerja dan Anggaran RKPd Tahun Berjalan (Tahun n-1 = 2024) yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPd yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPD s/d Tahun lalu		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPD s/d Tahun lalu (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
								I									
4	5	6 K	Rp	7 K	Rp	8 K	Rp	9 K	Rp	11 K	Rp	12 K	Rp	13 K	Rp	14 15=14/6 x 100%	16
Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan			8 Paket	17.796.100,00	7 paket	23.728.000,00	7 paket	3.200.000,00	7 paket	3.200.000,00	8 Paket	17.796.100,00				BPKD
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD			512 Laporan	567.380.179,00	512 laporan	324.636.000,00	40 laporan	47.408.190,00	40 laporan	47.408.190,00	512 Laporan	567.380.179,00				BPKD
Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase pemenuhan Barang Milik Daerah sesuai dengan perencanaan			100,00%	175.340.000,00	100,00%	152.713.100,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	100%	175.340.000,00				
Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan						1 unit	90.000.000,00		0,00	0	0,00						BPKD
Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan			26 unit	175.340.000,00	26 unit	62.713.100,00		0,00	0	0,00	26 unit	175.340.000,00				BPKD
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Penyediaan Jasa Penunjang Pemerintahan Daerah yang terpenuhi			100,00%	645.014.331,00	100,00%	692.445.400,00	25,00%	149.917.828,00	25,00%	149.917.828,00	100%	645.014.331,00				
Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat			3 laporan	2.750.000,00	3 laporan	4.379.000,00	3 laporan	1.000.000,00	3 laporan	1.000.000,00	3 laporan	2.750.000,00				BPKD
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan			60 laporan	130.207.273,00	60 laporan	163.000.000,00	15 laporan	28.848.544,00	15 laporan	28.848.544,00	60 laporan	130.207.273,00				BPKD
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan			2 laporan	512.057.058,00	2 laporan	525.066.400,00	2 laporan	120.069.284,00	2 laporan	120.069.284,00	2 laporan	512.057.058,00				BPKD
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase ketersediaan barang milik daerah berkategori baik			100,00%	249.012.949,00	100,00%	378.630.200,00	25,00%	51.710.150,00	25,00%	51.710.150,00	100%	249.012.949,00				
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya			33 unit	198.948.449,00	33 Unit	242.629.000,00	11 unit	45.552.150,00	11 unit	45.552.150,00	33 unit	198.948.449,00				BPKD
Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara			30 unit	9.000.000,00	56 unit	43.490.000,00	7 unit	3.650.000,00	7 unit	3.650.000,00	30 unit	9.000.000,00				BPKD
Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi			1 unit	41.064.500,00	1 unit	92.511.200,00	1 unit	2.508.000,00	1 unit	2.508.000,00	1 unit	41.064.500,00				BPKD
Program Pengelolaan Keuangan Daerah	Penyusunan anggaran yang tertib efisien dan tepat waktu	Tepat waktu	8.595.000.000	100,00%	1.534.809.043,00	100,00%	1.891.608.300,00	15,50%	108.783.750,00	15,50%	108.783.750,00	100%	1.534.809.043,00				
Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah	Penyusunan APBD APBDP berdasarkan ketentuan baik secara tanggal/ waktu maupun ketentuan lainnya			100,00%	681.827.650,00	100,00%	716.323.500,00	20,00%	104.663.550,00	20,00%	104.663.550,00	100%	681.827.650,00				
Koordinasi dan Penyusunan KUA dan PPAS	Jumlah Dokumen KUA dan PPAS yang Disusun			2 dokumen	106.609.650,00	2 dokumen	118.290.400,00		0,00	0	0,00	2 dokumen	106.609.650,00				BPKD

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (output)	Target RPD pada akhir periode Akhir RPD (2026)		Realisasi Capaian Kinerja RPD Sampai Dengan RKPD Tahun Lalu		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun Berjalan (Tahun n-1 = 2024) yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPD s/d Tahun lalu		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPD s/d Tahun lalu (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								I								
4	5	6	Rp	7	Rp	8	Rp	9	Rp	10	Rp	11	Rp	12=10/11	13=10/6 x 100%	14
Koordinasi dan Penyusunan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS	Jumlah Dokumen Perubahan KUA dan Perubahan PPAS yang Disusun			2 dokumen	106.064.300,00	2 dokumen	119.863.400,00		0,00	0	0,00	2 dokumen	106.064.300,00			BPKD
Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD	Jumlah Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD			6 dokumen	349.239.750,00	6 Dokumen	349.154.500,00		104.663.550,00	0	104.663.550,00	6 dokumen	349.239.750,00			BPKD
Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD	Jumlah Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD			4 dokumen	119.913.950,00	4 dokumen	129.015.200,00		0,00	0	0,00	4 dokumen	119.913.950,00			BPKD
Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah	Realisasi pencairan anggaran tepat waktu sesuai RAK			100,00%	12.500.000,00	100,00%	61.830.000,00	17,00%	294.000,00	17,00%	294.000,00	100%	12.500.000,00			
Rekonsiliasi Data Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Pemotongan dan Pemotongan atas SP2D dengan Instansi Terkait	Jumlah Dokumen Hasil Rekonsiliasi Data Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Pemotongan dan Pemotongan atas SP2D dengan Instansi Terkait			6 dokumen	12.500.000,00	6 dokumen	61.830.000,00	1 dokumen	294.000,00	1 dokumen	294.000,00	6 dokumen	12.500.000,00			BPKD
Penyusunan Petunjuk Teknis Administrasi Keuangan yang Berkaitan dengan Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Penatausahaan dan Pertanggungjawaban Sub Kegiatan	Jumlah Petunjuk Teknis Administrasi Keuangan yang Berkaitan dengan Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Penatausahaan dan Pertanggungjawaban Sub Kegiatan			0	0,00					0	0,00	0%	0,00			BPKD
Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah	Penyusunan Laporan Keuangan Daerah yang tepat waktu sesuai dan SAP			100,00%	41.824.200,00	100,00%	113.454.800,00	25,00%	3.826.200,00	25,00%	3.826.200,00	100%	41.824.200,00			
Koordinasi Pelaksanaan Akuntansi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Pelaksanaan Akuntansi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah			8 laporan	6.642.250,00	8 laporan	6.553.400,00	2 laporan	0,00	2 laporan	0,00	8 laporan	6.642.250,00			BPKD
Konsolidasi Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah	Jumlah Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah yang Terkonsolidasi			7 laporan	27.279.050,00	7 laporan	93.104.400,00	7 laporan	3.826.200,00	7 laporan	3.826.200,00	7 laporan	27.279.050,00			BPKD

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (output)	Target RPD pada akhir periode Akhir RPD (2026)		Realisasi Capaian Kinerja RPD Sampai Dengan RKPD Tahun Lalu		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun Berjalan (Tahun n-1 = 2024) yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPD s/d Tahun lalu		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPD s/d Tahun lalu (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
								I										
								/										
4	5	6		7		8		9		11		12		13	14=7/13	15=14/6 x 100%	16	
		K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
Koordinasi dan Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota	Jumlah Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota			2 dokumen	7.902.900,00	2 dokumen	13.797.000,00		0,00	0	0,00	2 dokumen	7.902.900,00					BPKD
Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah	Persentase kegiatan penunjang urusan kewenangan pengelolaan keuangan daerah yang dilaksanakan				798.657.193,00	100,00%	1.000.000.000,00		0,00	0,00%	0,00		798.657.193,00					
Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak	Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak			1 Laporan	798.657.193,00	1 Laporan	1.000.000.000,00		0,00	0	0,00	1 Laporan	798.657.193,00					BPKD
Pengelolaan Barang Milik Daerah	Penyajian Laporan Barang Milik Daerah secara akurat dan tepat waktu	Tepat waktu	3.905.000.000	100,00%	112.823.300,00		471.337.800,00	25,00%	9.914.100,00	25,00%	9.914.100,00	100%	112.823.300,00					
Pengelolaan Barang Milik Daerah	Persentase ketepatan waktu pelaporan penyajian data BMD tepat waktu			100,00%	112.823.300,00	100,00%	471.337.800,00	25,00%	9.914.100,00	25,00%	9.914.100,00	100%	112.823.300,00					
Penyusunan Standar Harga	Jumlah Standar Harga yang Disusun			2 dokumen	6.591.850,00	2 dokumen	27.803.000,00	1 dokumen	0,00	1 dokumen	0,00	2 dokumen	6.591.850,00					BPKD
Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah			2 Dokumen	8.752.550,00	2 dokumen	16.635.000,00		3.398.850,00	0	3.398.850,00	2 Dokumen	8.752.550,00					BPKD
Penatausahaan Barang Milik Daerah	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah			2 laporan	8.961.350,00	2 laporan	112.107.000,00	1 laporan	0,00	1 laporan	0,00	2 laporan	8.961.350,00					BPKD
Pengamanan Barang Milik Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pengamanan Barang Milik Daerah			1 Laporan	76.045.150,00	1 laporan	93.670.000,00		0,00	0	0,00	1 Laporan	76.045.150,00					BPKD
Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah			4 Dokumen	7.690.700,00	4 Dokumen	203.843.000,00		1.606.500,00	0	1.606.500,00	4 Dokumen	7.690.700,00					
Rekonsiliasi dalam rangka Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah	Jumlah Laporan Hasil Rekonsiliasi dalam rangka Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah			2 laporan	4.781.700,00	2 Laporan	17.279.800,00	1 Laporan	4.908.750,00	1 Laporan	4.908.750,00	2 laporan	4.781.700,00					

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (output)	Target RPD pada akhir periode Akhir RPD (2026)		Realisasi Capaian Kinerja RPD Sampai Dengan RKPD Tahun Lalu		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun Berjalan (Tahun n-1 = 2024) yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPD s/d Tahun lalu		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPD s/d Tahun lalu (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
								I									
4	5	6	Rp	7	Rp	8	Rp	9	Rp	11	Rp	12	Rp	13=14/6 x 100%	14	15	16
K		K		K		K		K		K		K		K		K	
Program Pengelolaan Pendapatan Daerah	Persentase peningkatan pajak dan retribusi daerah	2%	1.050.178.476,00	100,00%	253.401.790,00	100,00%	600.578.100,00	25,00%	38.614.200,00	25,00%	38.614.200,00	100%	253.401.790,00				
Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah	Jumlah Pencapaian Pendapatan Daerah dari Pajak Daerah			100,00%	253.401.790,00	100,00%	600.578.100,00	25,00%	38.614.200,00	25,00%	38.614.200,00	100%	253.401.790,00				
Analisa dan Pengembangan Pajak Daerah, serta Penyusunan Kebijakan Pajak Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Analisa Pajak Daerah serta Pengembangan Pajak Daerah dan Kebijakan Pajak Daerah			9 dokumen	88.428.550,00	9 dokumen	168.639.300,00	3 dokumen	1.052.800,00	3 dokumen	1.052.800,00	9 dokumen	88.428.550,00				BPKD
Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah, Subjek Pajak dan Wajib Pajak Daerah			2 Laporan	30.204.600,00	2 Laporan	240.970.000,00		0,00	0	0,00	2 Laporan	30.204.600,00				BPKD
Penilaian Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2) serta Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)	Jumlah Objek Pajak yang Disesuaikan NJOP nya			400 objek pajak	96.289.650,00	400 objek pajak	89.261.900,00		37.561.400,00	0	37.561.400,00	400 objek pajak	96.289.650,00				BPKD
Pengendalian, Pemeriksaan dan Pengawasan Pajak Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Pemeriksaan serta Pengendalian dan Pengawasan Pajak Daerah			72 dokumen	38.478.990,00	72 dokumen	101.706.900,00	18 dokumen	0,00	18 dokumen	0,00	72 dokumen	38.478.990,00				BPKD
BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA			65.242.455.173,00	92,01%	9.333.468.956,00	100,00%	9.835.957.664,00	25,00%	1.603.117.291,00	25,00%	1.603.117.291,00	92%	9.333.468.956,00				
UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN																	
KEPEGAWAIAN		100,00%	60.682.455.173,00	84,03%	8.200.907.920,00	100,00%	8.315.957.714,00	25,00%	1.321.850.525,00	25,00%	1.321.850.525,00	84%	8.200.907.920,00				
Program Penunjang Urusan Pemerintahan Kabupaten/Kota	Persentase pemenuhan urusan penunjang yang dipenuhi	100%	58.522.455.173,00	68,06%	7.633.432.608,00	100,00%	7.557.399.064,00	25,00%	1.290.012.142,00	25,00%	1.290.012.142,00	68%	7.633.432.608,00				
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan layanan administrasi keuangan perangkat daerah			100,00%	6.709.190.504,00	100,00%	6.260.172.564,00	25,00%	1.154.519.284,00	25,00%	1.154.519.284,00	100%	6.709.190.504,00				
Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN			576 Orang / bulan	6.709.190.504,00	1540	6.260.172.564,00	144	1.154.519.284,00	144	1.154.519.284,00	576 Orang / bulan	6.709.190.504,00				BKPSDM
Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan layanan administrasi kepegawaian perangkat daerah			100,00%	17.500.000,00		0,00		0,00	0,00%	0,00	100%	17.500.000,00				
Pengadaan Pakaian Dinas Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan			40 paket	17.500.000,00					0	0,00	40 paket	17.500.000,00				BKPSDM
Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan layanan administrasi umum perangkat daerah			100,00%	307.207.835,00	90,00%	357.288.765,00	22,50%	31.947.880,00	22,50%	31.947.880,00	100%	307.207.835,00				
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan			4 paket	6.185.100,00	4	7.314.000,00	1	0,00	1	0,00	4 paket	6.185.100,00				BKPSDM

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (output)	Target RPD pada akhir periode Akhir RPD (2026)		Realisasi Capaian Kinerja RPD Sampai Dengan RKPd Tahun Lalu		Target Kinerja dan Anggaran RKPd Tahun Berjalan (Tahun n-1 = 2024) yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPd yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPD s/d Tahun lalu		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPD s/d Tahun lalu (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
								I										
4	5	6	Rp	7	Rp	8	Rp	9	Rp	10	Rp	11	Rp	12	13	14=12/13	15=14/6 x 100%	16
Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan			4 paket	58.281.500,00	4	70.002.765,00	1	0,00	1	0,00	4 paket	58.281.500,00					BKPSDM
Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan			12 paket	17.668.250,00	12	29.972.000,00	3	1.334.000,00	3	1.334.000,00	12 paket	17.668.250,00					BKPSDM
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD			24 paket	225.072.985,00	24	250.000.000,00	6	30.613.880,00	6	30.613.880,00	24 paket	225.072.985,00					BKPSDM
Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Pemenuhan Barang Milik Daerah sesuai dengan perencanaan				163.040.000,00	100,00%	131.637.800,00	25,00%	0,00	25,00%	0,00		163.040.000,00					
Pengadaan Mebel						10	27.749.800,00	0,00%	0,00	0	0,00							BKPSDM
Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan			12 unit	163.040.000,00	5	103.888.000,00	0,00%	0,00	0	0,00	12 unit	163.040.000,00					BKPSDM
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Penyediaan Jasa Penunjang Pemerintahan Daerah yang terpenuhi			100,00%	225.822.714,00	90,00%	408.544.935,00	22,50%	62.504.078,00	22,50%	62.504.078,00	100%	225.822.714,00					
Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat			12 laporan	2.000.000,00	12	5.250.000,00	3	1.250.000,00	3	1.250.000,00	12 laporan	2.000.000,00					BKPSDM
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan			24 laporan	85.809.312,00	24	89.998.935,00	6	21.454.078,00	6	21.454.078,00	24 laporan	85.809.312,00					BKPSDM
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan			12 laporan	138.013.402,00	12	313.296.000,00	3	39.800.000,00	3	39.800.000,00	12 laporan	138.013.402,00					BKPSDM
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase ketersediaan Barang Milik Daerah berkondisi baik			100,00%	210.671.555,00	90,00%	399.755.000,00	22,50%	41.040.900,00	22,50%	41.040.900,00	100%	210.671.555,00					
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan atau Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya			17 unit	89.644.850,00	17	109.765.000,00	17	26.110.900,00	17	26.110.900,00	17 unit	89.644.850,00					BKPSDM
Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara			26 unit	25.261.250,00	26	39.990.000,00	26	6.760.000,00	26	6.760.000,00	26 unit	25.261.250,00					BKPSDM
Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi			1 unit	95.765.455,00	1	250.000.000,00	1	8.170.000,00	1	8.170.000,00	1 unit	95.765.455,00					BKPSDM
PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH	Nilai Sistem Merit	340	2.160.000.000,00	100,00%	567.475.312,00	335 Nilai	758.558.650,00	25,00%	31.838.383,00	25,00%	31.838.383,00	100%	567.475.312,00					
Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian ASN	Jumlah dokumen kepegawaian yang tertata dengan baik			400 file	219.404.358,00	400 file	324.991.550,00	100	6.278.333,00	10000,00%	6.278.333,00	400 file	219.404.358,00					
	Jumlah usulan ASN Per tahun			200 orang	0,00	200				0,00%	0,00	200 orang	0,00					
Koordinasi dan Fasilitasi Pengadaan PNS dan PPPK	Jumlah Dokumen Kegiatan Koordinasi dan Fasilitasi Pengadaan PNS dan PPPK			1 Dokumen	212.884.933,00	1	299.995.700,00	25,00%	5.978.333,00	25%	5.978.333,00	1 Dokumen	212.884.933,00					BKPSDM
Pengelolaan Sistem Informasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Sistem Informasi Kepegawaian			1 Dokumen	6.519.425,00	1	24.995.850,00	25,00%	300.000,00	25%	300.000,00	1 Dokumen	6.519.425,00					BKPSDM

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (output)	Target RPD pada akhir periode Akhir RPD (2026)		Realisasi Capaian Kinerja RPD Sampai Dengan RKPD Tahun Lalu		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun Berjalan (Tahun n-1 = 2024) yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPD s/d Tahun lalu		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPD s/d Tahun lalu (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
								I									
4	5	6 K	Rp	7 K	Rp	8 K	Rp	9 K	Rp	10 K	Rp	11 K	Rp	12 K	Rp	13 12=14/6 x 100%	14
Mutasi dan Promosi ASN	Persentase pengisian jabatan sesuai peraturan perundang undangan			100,00%	293.671.222,00	100,00%	363.568.600,00	25,00%	25.398.140,00	25,00%	25.398.140,00	100%	293.671.222,00				
Pengelolaan Mutasi ASN	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Mutasi Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Administrasi, Jabatan Pelaksana dan Mutasi ASN antar Daerah			1 Dokume n	262.670.782,00	1	299.990.000,00	25,00%	25.398.140,00	25%	25.398.140,00	1 Dokumen	262.670.782,00				BKPSDM
Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN	Jumlah Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN			1 Dokume n	31.000.440,00	100,00%	63.578.600,00	25,00%	0,00	25%	0,00	1 Dokumen	31.000.440,00				BKPSDM
Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	Persentase jumlah ASN yang berkinerja baik			100,00%	54.399.732,00	100,00%	69.998.500,00	25,00%	161.910,00	25,00%	161.910,00	100%	54.399.732,00				
Pelaksanaan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur			100%	6.414.450,00	100,00%	9.999.500,00	25,00%	161.910,00	25%	161.910,00	100%	6.414.450,00				BKPSDM
Pengelolaan Pemberian Penghargaan bagi Pegawai						5	16.040.000,00	0	0,00	0%	0,00						BKPSDM
Pembinaan Disiplin ASN	Jumlah ASN yang Mendapatkan Pembinaan Kedisiplinan			15 Orang	47.985.282,00	10	43.959.000,00	6	0,00	600%	0,00	15 Orang	47.985.282,00				BKPSDM
PENDIDIKAN DAN PELATIHAN		228,00%	4.560.000.000,00	100,00%	1.132.561.036,00	100,00%	1.519.999.950,00	25,00%	281.266.766,00	25,00%	281.266.766,00	100%	1.132.561.036,00				
PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	Persentase ASN yang memperoleh peningkatan kompetensi melalui diklat, bimtek, dan sosialisasi	228,00%	4.560.000.000	100,00%	1.132.561.036,00	7,60%	1.519.999.950,00	25,00%	281.266.766,00	25,00%	281.266.766,00	100%	1.132.561.036,00				
Pengembangan Kompetensi Teknis	Jumlah peserta yang telah tuntas mengikuti diklat tugas dan fungsi PNS				510.236.062,00	120	799.999.900,00	70	275.206.766,00	70	275.206.766,00		510.236.062,00				
Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi Teknis Umum, Inti, dan Pilihan bagi Jabatan Administrasi Penyelenggara Urusan Pemerintahan Konkuren, Perangkat Daerah Penunjang, dan Urusan Pemerintahan Umum	Jumlah ASN yang Mengikuti Pengembangan Kompetensi			120 orang	510.236.062,00	120	799.999.900,00	70	275.206.766,00	70	275.206.766,00	120 orang	510.236.062,00				BKPSDM
Sertifikasi, Kelembagaan, Pengembangan Kompetensi Manajerial dan Fungsional	jumlah CPNS yang lulus latsar CPNS			4 orang	622.324.974,00	20	720.000.050,00	25,00%	6.060.000,00	25%	6.060.000,00	4 orang	622.324.974,00				
Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi bagi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Fungsional, Kepemimpinan, dan Prajabatan	Jumlah Laporan Hasil Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi bagi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Fungsional, Kepemimpinan, dan Prajabatan			1	622.324.974,00	1	720.000.050,00	25,00%	6.060.000,00	25%	6.060.000,00	100%	622.324.974,00				BKPSDM
SEKRETARIAT DAERAH			111.561.633.605,00	99,28%	39.414.915.957,00	100,00%	46.673.221.196,00	12,81%	7.309.258.261,00	12,81%	7.309.258.261,00	99%	39.414.915.957,00				
UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN																	

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (output)	Target RPD pada akhir periode Akhir RPD (2026)		Realisasi Capaian Kinerja RPD Sampai Dengan RKPD Tahun Lalu		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun Berjalan (Tahun n-1 = 2024) yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPD s/d Tahun lalu		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPD s/d Tahun lalu (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
								I									
4	5	6	Rp	7	Rp	8	Rp	9	Rp	10	Rp	11	Rp	12	13	14=14/6 x 100%	16
SEKRETARIAT DAERAH		93,33%	111.561.633.605,00	99,28%	39.414.915.957,00	100,00%	46.673.221.196,00	12,81%	7.309.258.261,00	12,81%	7.309.258.261,00	99%	39.414.915.957,00				
Program Penunjang Urusan Pemerintah Kabupaten / Kota	Persentase pemenuhan urusan penunjang yang dipenuhi	100%	87.166.339.605,00	98,15%	27.194.446.948,00	100,00%	32.563.005.796,00	19,78%	5.700.654.383,00	19,78%	5.700.654.383,00	98%	27.194.446.948,00				
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan layanan administrasi keuangan perangkat daerah			100,00%	15.737.815.055,00	90%	14.540.209.670,00	25,00%	3.723.637.865,00	25,00%	3.723.637.865,00	100%	15.737.815.055,00				
Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN			101 orang	15.737.815.055,00	1540 orang/bulan	14.540.209.670,00	385 orang/bulan	3.723.637.865,00	385 orang/bulan	3.723.637.865,00	101 orang	15.737.815.055,00				Sekretariat Daerah
Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan layanan administrasi kepegawaian perangkat daerah			100,00%	51.000.000,00		0,00		0,00	0,00%	0,00	100%	51.000.000,00				
Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya			107 Paket	51.000.000,00					0%	0,00	107 Paket	51.000.000,00				Sekretariat Daerah
Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan layanan administrasi umum perangkat daerah			100,00%	4.181.530.195,00	90%	4.341.583.283,00	25,00%	737.155.854,00	25,00%	737.155.854,00	100%	4.181.530.195,00				
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan			1 Paket	49.961.750,00	4 Paket	50.000.000,00		0,00	0%	0,00	1 Paket	49.961.750,00				Sekretariat Daerah
Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan			3 Paket	17.496.400,00	3 Paket	30.000.000,00		890.000,00	0%	890.000,00	3 Paket	17.496.400,00				Sekretariat Daerah
Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan			1 Paket	154.184.561,00	4 Paket	144.978.283,00		0,00	0%	0,00	1 Paket	154.184.561,00				Sekretariat Daerah
Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan			1 Paket	19.996.650,00	1 Paket	20.000.000,00		658.500,00	0%	658.500,00	1 Paket	19.996.650,00				Sekretariat Daerah
Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu			500 Laporan	801.653.715,00	500 Laporan	950.000.000,00	50 Laporan	50.657.850,00	50 Laporan	50.657.850,00	500 Laporan	801.653.715,00				Sekretariat Daerah
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD			1 Laporan	3.138.237.119,00	200 Laporan	3.146.605.000,00	50 Laporan	684.949.504,00	50 Laporan	684.949.504,00	1 Laporan	3.138.237.119,00				Sekretariat Daerah
Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Pemenuhan Barang Milik Daerah					80,00%	3.298.564.500,00	25,00%	0,00	25,00%	0,00						
Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan					2 Unit	2.800.000.000,00		0,00	0%	0,00						Sekretariat Daerah
Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan					1 Unit	3.160.100,00		0,00	0%	0,00						Sekretariat Daerah
Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan					20 Unit	395.404.400,00	10 Unit	0,00	10 Unit	0,00						Sekretariat Daerah
Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan					10 Unit	100.000.000,00		0,00	0%	0,00						Sekretariat Daerah

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (output)	Target RPD pada akhir periode Akhir RPD (2026)		Realisasi Capaian Kinerja RPD Sampai Dengan RKPD Tahun Lalu		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun Berjalan (Tahun n-1 = 2024) yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPD s/d Tahun lalu		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPD s/d Tahun lalu (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								I								
								6	Rp					7	8	
4	5	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	16
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Penyediaan Jasa Penunjang Pemerintahan Daerah yang terpenuhi			100,00%	167.381.731.406,00	90,00%	1.874.077.280,00	14,00%	276.612.922,62	14,00%	276.612.922,62	100%	167.381.731.406,00			
Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat			1 Laporan	8.522.000,00	1 Laporan	10.000.000,00		0,00	0%	0,00	1 Laporan	8.522.000,00			Sekretariat Daerah
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan			1 Laporan	260.381.269,00	1 Laporan	313.500.000,00		57.001.380,00	0%	57.001.380,00	1 Laporan	260.381.269,00			Sekretariat Daerah
Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan			1 Laporan	57.080.523.953,00	1 Laporan	659.979.680,00		47.869.318,63	0%	47.869.318,63	1 Laporan	57.080.523.953,00			Sekretariat Daerah
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan			1 Laporan	83.410.880.553,00	1 Laporan	890.597.600,00		171.742.223,99	0%	171.742.223,99	1 Laporan	83.410.880.553,00			Sekretariat Daerah
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Ketersediaan Barang Milik Daerah Berkondisi Baik			100,00%	204.991.638.746,00	80,00%	3.054.462.800,00	25,00%	327.892.880,19	25,00%	327.892.880,19	100%	204.991.638.746,00			
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya			82 Unit	165.092.533.746,00	82 Unit	2.310.408.800,00		327.892.880,19	0%	327.892.880,19	82 Unit	165.092.533.746,00			Sekretariat Daerah
Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara			9 unit	60.135.450,00	100 unit	100.000.000,00	25 unit	0,00	25 unit	0,00	9 unit	60.135.450,00			Sekretariat Daerah
Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi			4 Unit	338.855.600,00	4 Unit	644.054.000,00		0,00	0%	0,00	4 Unit	338.855.600,00			Sekretariat Daerah
Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Jumlah Pejabat Negara yang difasilitasi			100%	597.506.890,00	2 orang	779.904.723,00	25%	125.043.524,00	25,00%	125.043.524,00	100%	597.506.890,00			
Penyediaan Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah			1 orang/Bulan	56.410.967,00	28 orang/Bulan	180.129.723,00	7 orang/Bulan	24.593.525,00	7 orang/Bulan	24.593.525,00	1 orang/Bulan	56.410.967,00			Sekretariat Daerah
Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut Kelengkapan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Jumlah Paket Pakaian Dinas dan Atribut Kelengkapan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah yang Disediakan			1 Paket	141.095.927,00	1 Paket	199.775.000,00	0,00%	450.000,00	0%	450.000,00	1 Paket	141.095.927,00			Sekretariat Daerah
Penyediaan Dana Penunjang Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Jumlah Orang yang Menerima Dana Penunjang Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah			1 orang/Bulan	399.999.996,00	24 orang/Bulan	400.000.000,00	6 orang/Bulan	99.999.999,00	6 orang/Bulan	99.999.999,00	1 orang/Bulan	399.999.996,00			Sekretariat Daerah
Fasilitasi Kerumahtanggaan Sekretariat Daerah	Jumlah Rumah Tangga yang difasilitasi			100%	175.768.970.348,00	3 Objek	3.522.600.340,00	12,00%	413.844.196,19	12,00%	413.844.196,19	100%	175.768.970.348,00			
Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Kepala Daerah	Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga Kepala Daerah yang Disediakan			1 Paket	156.998.207.456,00	1 Paket	2.290.133.800,00		335.062.916,93	0%	335.062.916,93	1 Paket	156.998.207.456,00			Sekretariat Daerah
Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Wakil Kepala Daerah	Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga Wakil Kepala Daerah yang Disediakan			1 Paket	15.723.013.892,00	1 Paket	1.162.466.540,00		71.356.839,26	0%	71.356.839,26	1 Paket	15.723.013.892,00			Sekretariat Daerah

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (output)	Target RPD pada akhir periode Akhir RPD (2026)		Realisasi Capaian Kinerja RPD Sampai Dengan RKPD Tahun Lalu		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun Berjalan (Tahun n-1 = 2024) yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPD s/d Tahun lalu		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPD s/d Tahun lalu (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
								I									
4	5	6	Rp	7	Rp	8	Rp	9	Rp	11	Rp	12	Rp	13	14=7/11	15=14/6 x 100%	16
Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Sekretariat Daerah	Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga Sekretariat Daerah yang Disediakan			1 Paket	30.477.490,00	1 Paket	70.000.000,00		7.424.440,00	0%	7.424.440,00	1 Paket	30.477.490,00				Sekretariat Daerah
Penataan Organisasi	Persentase Penataan Organisasi Yang Tepat Sesuai Peraturan Yang Berlaku				321.175.573,00	0,75	356.500.000,00	2,00%	6.688.710,00	2,00%	6.688.710,00		321.175.573,00				
Pengelolaan Kelembagaan dan Analisis Jabatan	Jumlah Dokumen Pengelolaan Kelembagaan dan Analisis Jabatan			5 Dokumen	46.576.184,00	5 Dokumen	46.500.000,00		2.780.210,00	0%	2.780.210,00	5 Dokumen	46.576.184,00				Sekretariat Daerah
Fasilitasi Pelayanan Publik dan Tata Laksana	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Pelayanan Publik dan Tata Laksana			4 Laporan	200.578.786,00	4 Laporan	260.000.000,00		1.870.000,00	0%	1.870.000,00	4 Laporan	200.578.786,00				Sekretariat Daerah
Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi	Jumlah Dokumen Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi			5 Dokumen	74.020.603,00	5 Dokumen	50.000.000,00		2.038.500,00	0%	2.038.500,00	5 Dokumen	74.020.603,00				Sekretariat Daerah
Pelaksanaan Protokol dan Komunikasi Pimpinan	Meningkatnya Pelayanan Keprotokolan Walikota dan Wakil Walikota			100,00%	823.995.830,00	100%	795.103.200,00	25,00%	89.778.431,00	25,00%	89.778.431,00	100%	823.995.830,00				
Fasilitasi Keprotokolan	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Keprotokolan			300 Laporan	567.622.470,00	300 Laporan	536.263.600,00	50 Laporan	64.667.350,00	50 Laporan	64.667.350,00	300 Laporan	567.622.470,00				Sekretariat Daerah
Fasilitasi Komunikasi Pimpinan	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Komunikasi Pimpinan			1 Laporan	80.920.000,00	1 Laporan	70.000.000,00		0,00	0%	0,00	1 Laporan	80.920.000,00				Sekretariat Daerah
Pendokumentasian Tugas Pimpinan	Jumlah Laporan Pendokumentasian Tugas Pimpinan			1 Laporan	175.453.360,00	6 Laporan	188.839.600,00		25.111.081,00	0%	25.111.081,00	1 Laporan	175.453.360,00				Sekretariat Daerah
Program Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat	Persentase terselenggaranya kebijakan/ kegiatan sektor pemerintahan dan kesejahteraan rakyat	90%	23.215.294.000,00		11.769.433.065,00	100%	13.493.021.400,00	13,67%	1.583.482.579,00	13,67%	1.583.482.579,00		11.769.433.065,00				
Administrasi Pemerintahan	Persentase terlaksananya fasilitasi kegiatan Tata Administrasi Pemerintahan				735.028.156,00	10 Orang 100%	350.006.100,00	15,00%	51.144.950,00	15,00%	51.144.950,00		735028156				
Penataan Administrasi Pemerintahan	Jumlah Dokumen Hasil Penataan Administrasi Pemerintahan			2 Dokumen	112.697.050,00	10 Dokumen	75.006.100,00		2.555.050,00	0%	2.555.050,00	2 Dokumen	112.697.050,00				Sekretariat Daerah
Pengelolaan Administrasi Kewilayahan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Administrasi Kewilayahan			3 Dokumen	22.450.300,00	1 Dokumen	25.000.000,00		0,00	0%	0,00	3 Dokumen	22.450.300,00				Sekretariat Daerah
Fasilitasi Pelaksanaan Otonomi Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pelaksanaan Otonomi Daerah			6 Dokumen	599.880.806,00	3 Dokumen	250.000.000,00		48.589.900,00	0%	48.589.900,00	6 Dokumen	599.880.806,00				Sekretariat Daerah
Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat	Persentase Terlaksananya Kebijakan Kesejahteraan Rakyat				10.777.980.136,00	100,00%	12.775.665.300,00	12,00%	1.526.684.879,00	12,00%	1.526.684.879,00		10.777.980.136,00				
Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual			7 Dokumen	2.273.070.568,00	9 Dokumen	3.638.056.800,00		184.649.450,00	0%	184.649.450,00	7 Dokumen	2.273.070.568,00				Sekretariat Daerah

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (output)	Target RPD pada akhir periode Akhir RPD (2026)		Realisasi Capaian Kinerja RPD Sampai Dengan RKPD Tahun Lalu		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun Berjalan (Tahun n-1 = 2024) yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPD s/d Tahun lalu		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPD s/d Tahun lalu (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								I								
								/								
4	5	6	Rp	7	Rp	8	Rp	9	Rp	11	Rp	12	Rp	13=11x13	14=12x100%	16
Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Sosial	Jumlah Dokumen Hasil Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Sosial yang Meliputi Urusan Sosial, Transmigrasi, Kesehatan, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Administrasi Kependudukan Dan Pencatatan Sipil, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pengendalian Penduduk dan KB			5 Dokumen	1.492.900.482,00	5 Dokumen	1.685.252.000,00		521.942.500,00	0%	521.942.500,00	5 Dokumen	1.492.900.482,00			Sekretariat Daerah
Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Masyarakat yang Meliputi Urusan Kepemudaan dan Olahraga, Pariwisata, Pendidikan, Kebudayaan, Perpustakaan, Kearsipan, Trantibum Linmas			2 Dokumen	7.012.009.086,00	7 Dokumen	7.452.356.500,00		820.092.929,00	0%	820.092.929,00	2 Dokumen	7.012.009.086,00			Sekretariat Daerah
Fasilitasi dan Koordinasi Hukum	Persentase Fasilitasi dan Koordinasi Hukum Yang Terlaksana				256.424.773,00	100,00%	367.350.000,00	14,00%	5.652.750,00	14,00%	5.652.750,00		256.424.773,00			
Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Daerah	Jumlah Produk Hukum Daerah yang Disusun			50 Dokumen	42.848.480,00	35 Dokumen	65.100.000,00	5 Dokumen	4.262.750,00	5 Dokumen	4.262.750,00	50 Dokumen	42.848.480,00			Sekretariat Daerah
Fasilitasi Bantuan Hukum	Jumlah Kasus yang Mendapatkan Fasilitasi Bantuan Hukum			3 Kasus	189.873.043,00	10 Kasus	279.000.000,00		1.390.000,00	0%	1.390.000,00	3 Kasus	189.873.043,00			Sekretariat Daerah
Pendokumentasian Produk Hukum dan Pengelolaan Informasi Hukum	Jumlah Produk Hukum dan Pengelolaan Informasi Hukum yang Didokumentasi			2 Dokumen	23.703.250,00	2 Dokumen	23.250.000,00		0,00	0%	0,00	2 Dokumen	23.703.250,00			Sekretariat Daerah
PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN	Persentase terselenggaranya kebijakan /kegiatan pada bagian perekonomian dan pembangunan	90%	1.180.000.000,00		451.035.944,00	100%	617.194.000,00	5,00%	25.121.299,00	5,00%	25.121.299,00		451.035.944,00			
Pelaksanaan Kebijakan Perekonomian	Persentase Terlaksananya Monev BUMD, BLUD, Monev Pengendalian Inflasi Dan Monev Kebijakan Perekonomian				102.320.554,00	90% 75%	119.939.000,00	10,00%	11.576.869,00	10,00%	11.576.869,00		102.320.554,00			
Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan BUMD dan BLUD	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan BUMD dan BLUD			1 Dokumen	12.518.000,00	1 Dokumen	30.000.000,00		3.234.101,00	0%	3.234.101,00	1 Dokumen	12.518.000,00			Sekretariat Daerah
Pengendalian dan Distribusi Perekonomian	Jumlah Laporan Hasil Pengendalian dan Distribusi Perekonomian			1 Laporan	89.802.554,00	1 Laporan	89.939.000,00		8.342.768,00	0%	8.342.768,00	1 Laporan	89.802.554,00			Sekretariat Daerah

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (output)	Target RPD pada akhir periode Akhir RPD (2026)		Realisasi Capaian Kinerja RPD Sampai Dengan RKPD Tahun Lalu		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun Berjalan (Tahun n-1 = 2024) yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPD s/d Tahun lalu		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPD s/d Tahun lalu (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab			
								I											
4	5	6	Rp	7	Rp	8	Rp	9	Rp	10	Rp	11	Rp	12	Rp	13	14	15=14/6 x 100%	16
Pelaksanaan Administrasi Pembangunan	Persentase Rekomendasi Hasil Pelaksanaan Evaluasi Kegiatan Pembangunan Yang Dikeluarkan				118.100.373,00	90% 100%	200.400.000,00	2,00%	4.150.000,00	2,00%	4.150.000,00		118.100.373,00						
Pengendalian dan Evaluasi Program Pembangunan	Jumlah Laporan Hasil Pengendalian dan Evaluasi Program Pembangunan			12 Laporan	118.100.373,00	12 Laporan	200.400.000,00		4.150.000,00	0%	4.150.000,00	12 Laporan	118.100.373,00						Sekretariat Daerah
Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	Persentase Proses Pelaksanaan Pengadaan Barang dan Jasa				205.378.642,00	90% 90%	241.800.000,00	3,00%	6.908.430,00	3,00%	6.908.430,00		205.378.642,00						
Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa			250 Dokumen	7.589.750,00	250 Dokumen	10.000.000,00		1.475.000,00	0%	1.475.000,00	250 Dokumen	7.589.750,00						Sekretariat Daerah
Pengelolaan Layanan Pengadaan Secara Elektronik	Jumlah Dokumen Hasil Layanan Pengadaan Secara Elektronik			90 Dokumen	96.602.057,00	90 Dokumen	100.000.000,00		1.050.000,00	0%	1.050.000,00	90 Dokumen	96.602.057,00						Sekretariat Daerah
Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa			220 Orang	101.186.835,00	300 Orang	131.800.000,00		4.383.430,00	0%	4.383.430,00	220 Orang	101.186.835,00						Sekretariat Daerah
Pemantauan Kebijakan Sumber Daya Alam	Persentase Pemantauan Kebijakan Sumber Daya Alam Yang Dilaksanakan				25.236.375,00	90% 100%	55.055.000,00	5,00%	2.486.000,00	5,00%	2.486.000,00		25.236.375,00						
Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Energi dan Air	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Evaluasi Kebijakan Urusan Energi dan Air, Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman, Pertanahan			1 Dokumen	25.236.375,00	1 Dokumen	55.055.000,00		2.486.000,00	0%	2.486.000,00	1 Dokumen	25.236.375,00						Sekretariat Daerah
SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH			102.776.395.775,00	95,52%	39.194.795.777,00	100,00%	41.560.530.985,00	17,35%	6.327.146.969,00	17,35%	6.327.146.969,00	96%	39.194.795.777,00						
UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN																			
SEKRETARIAT DPRD		95,00%	102.776.395.775,00	95,52%	39.194.795.777,00	100,00%	41.560.530.985,00	17,35%	6.327.146.969,00	17,35%	6.327.146.969,00	96%	39.194.795.777,00						
Program Penunjang Urusan daerah	Persentase kualitas tata kelola sekretariat DPRD	100%	50.165.269.375,00	99,27%	19.489.571.740,00	100,00%	18.928.695.185,00	17,37%	3.542.595.348,00	17,37%	3.542.595.348,00	99%	19.489.571.740,00						
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan layanan administrasi keuangan perangkat daerah			100,00%	3.412.978.807,00	100,00%	3.403.264.629,00	28,56%	848.004.893,00	28,56%	848.004.893,00	100%	3.412.978.807,00						
Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN			350 Orang / bulan	3.412.978.807,00	294 org/bln	3.403.264.629,00	100 org/ bln	848.004.893,00	100 org/ bln	848.004.893,00	350 Orang / bulan	3.412.978.807,00						Sekretariat DPRD
Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase pengadaan pakaian dinas beserta kelengkapannya yang terpenuhi			100,00%	12.500.000,00		0,00		0,00	0,00%	0,00	100%	12.500.000,00						
Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan			25 Paket	12.500.000,00					0%	0,00	25 Paket	12.500.000,00						Sekretariat DPRD

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (output)	Target RPD pada akhir periode Akhir RPD (2026)		Realisasi Capaian Kinerja RPD Sampai Dengan RPKD Tahun Lalu		Target Kinerja dan Anggaran RPKD Tahun Berjalan (Tahun n-1 = 2024) yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RPKD yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPD s/d Tahun lalu		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPD s/d Tahun lalu (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								I								
4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
		K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan layanan administrasi umum perangkat daerah			100,00%	584.839.458,00	90,00%	766.528.350,00	17,20%	67.748.400,00	17,20%	67.748.400,00	100%	584.839.458,00			
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan			4 Paket	17.649.000,00	4 Paket	37.823.500,00	1 Paket	0,00	1 Paket	0,00	4 Paket	17.649.000,00			Sekretariat DPRD
Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan			4 Paket	138.614.700,00	4 Paket	135.374.600,00	1 Paket	7.173.350,00	1 Paket	7.173.350,00	4 Paket	138.614.700,00			
Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan			4 Paket	75.535.100,00	4 Paket	145.957.250,00	1 Paket	3.744.800,00	1 Paket	3.744.800,00	4 Paket	75.535.100,00			Sekretariat DPRD
Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu			112 Laporan	109.634.012,00	180 Laporan	132.550.000,00	30 Laporan	12.231.650,00	30 Laporan	12.231.650,00	112 Laporan	109.634.012,00			Sekretariat DPRD
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD			24 Laporan	243.406.646,00	24 Laporan	314.823.000,00	5 Laporan	44.598.600,00	5 Laporan	44.598.600,00	24 Laporan	243.406.646,00			Sekretariat DPRD
Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase pemenuhan Barang Milik Daerah sesuai dengan perencanaan			100,00%	2.593.640.004,00	100,00%	479.652.800,00	3,33%	0,00	3,33%	0,00	100%	2.593.640.004,00			
Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan			4 Unit	2.470.240.000,00					0%	0,00	4 Unit	2.470.240.000,00			Sekretariat DPRD
Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan			4 Unit	49.700.000,00	8 Unit	358.042.800,00		0,00	0%	0,00	4 Unit	49.700.000,00			Sekretariat DPRD
Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan			8 Unit	73.700.004,00	8 Unit	121.610.000,00		0,00	0%	0,00	8 Unit	73.700.004,00			Sekretariat DPRD
Penyediaan Jasa Penunjang Pemerintahan Daerah	Persentase jasa penunjang urusan Sekretariat DPRD yang terpenuhi			100,00%	1.757.563.069,00	100,00%	1.965.538.700,00	20,00%	456.437.334,00	20,00%	456.437.334,00	100%	1.757.563.069,00			
Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat			12 Laporan	18.250.000,00	12 Laporan	13.839.500,00	3 Laporan	1.000.000,00	3 Laporan	1.000.000,00	12 Laporan	18.250.000,00			Sekretariat DPRD
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan			36 Laporan	109.370.090,00	36 Laporan	151.700.000,00	9 Laporan	33.817.334,00	9 Laporan	33.817.334,00	36 Laporan	109.370.090,00			
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan			12 Laporan	1.629.942.979,00	12 Laporan	1.799.999.200,00	3 Laporan	421.620.000,00	3 Laporan	421.620.000,00	12 Laporan	1.629.942.979,00			
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase ketersediaan Barang Milik Daerah berkondisi baik			99,75%	809.479.892,00	70,00%	1.929.096.000,00	15,75%	74.055.199,00	15,75%	74.055.199,00	99,75%	809.479.892,00			
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Dinas Perorangan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya			4 Unit	291.769.037,00	4 Unit	426.875.000,00	4 Unit	40.717.299,00	4 Unit	40.717.299,00	4 Unit	291.769.037,00			Sekretariat DPRD
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya			29 unit	106.027.895,00	29 unit	204.800.000,00	7 unit	23.831.700,00	7 unit	23.831.700,00	29 unit	106.027.895,00			
Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara			239 unit	27.141.500,00	725 unit	67.580.000,00	145 unit	9.226.200,00	145 unit	9.226.200,00	239 unit	27.141.500,00			Sekretariat DPRD
Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi			1 Unit	384.541.460,00	1 Unit	1.229.841.000,00	1 Unit	280.000,00	1 Unit	280.000,00	1 Unit	384.541.460,00			Sekretariat DPRD

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (output)	Target RPD pada akhir periode Akhir RPD (2026)		Realisasi Capaian Kinerja RPD Sampai Dengan RKPD Tahun Lalu		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun Berjalan (Tahun n-1 = 2024) yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPD s/d Tahun lalu		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPD s/d Tahun lalu (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
								I									
								/									
4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	
		K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	15=14/6 x 100%	
Pelaksanaan Protokol dan Komunikasi Pimpinan	Persentase Fasilitas Pelaksanaan Protokol dan Komunikasi Pimpinan			100,00%	583.234.750,00	100,00%	831.938.100,00	45,00%	49.862.500,00	45,00%	49.862.500,00	100%	583.234.750,00				
Fasilitasi Keprotokolan	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Keprotokolan			1 Laporan	583.234.750,00	1 Laporan	831.938.100,00	1 Laporan	49.862.500,00	1 Laporan	49.862.500,00	1 Laporan	583.234.750,00				Sekretariat DPRD
Layanan Keuangan dan Kesejahteraan DPRD	Persentase Terfasilitasinya Layanan Keuangan dan Kesejahteraan DPRD			100,00%	8.366.974.018,00	100,00%	8.271.770.606,00	9,52%	1.881.412.225,00	9,52%	1.881.412.225,00	100%	8.366.974.018,00				
Penyelenggaraan Administrasi Keuangan DPRD	Jumlah Anggota DPRD yang Menerima Hak Keuangan DPRD			280 Orang / Bulan	7.776.348.018,00	280 Orang / Bulan	8.006.840.606,00	80 Orang / Bulan	1.881.412.225,00	80 Orang / Bulan	1.881.412.225,00	280 Orang / Bulan	7.776.348.018,00				Sekretariat DPRD
Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut DPRD	Jumlah Paket Pakaian Dinas dan Atribut DPRD yang Disediakan			120 Paket	587.350.000,00	120 Paket	239.430.000,00	0,00%	0,00	0%	0,00	120 Paket	587.350.000,00				Sekretariat DPRD
Pelaksanaan Medical Check Up DPRD	Jumlah Orang yang Mengikuti Medical Check Up DPRD			3 Orang	3.276.000,00	20 Orang	25.500.000,00	0,00%	0,00	0%	0,00	3 Orang	3.276.000,00				Sekretariat DPRD
Layanan Administrasi DPRD	Persentase Layanan Administrasi DPRD yang terpenuhi				1.368.361.742,00	100,00%	1.280.906.000,00	17,00%	165.074.797,00	17,00%	165.074.797,00	9367%	1.368.361.742,00				
Penyelenggaraan Administrasi Keanggotaan DPRD	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Administrasi Keanggotaan DPRD			1 Dokumen	414.776.350,00	2 Dokumen	241.410.000,00	0,00%	0,00	0%	0,00	1 Dokumen	414.776.350,00				Sekretariat DPRD
Fasilitasi Rapat Koordinasi dan Konsultasi DPRD	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Rapat Koordinasi dan Konsultasi DPRD			12 Laporan	174.028.500,00	12 Laporan	218.097.600,00	3 Laporan	26.906.250,00	3 Laporan	26.906.250,00	12 Laporan	174.028.500,00				Sekretariat DPRD
Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga DPRD	Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga DPRD yang Disediakan			12 Paket	779.556.892,00	12 Paket	821.398.400,00	3 Paket	138.168.547,00	3 Paket	138.168.547,00	12 Paket	779.556.892,00				Sekretariat DPRD
Program Dukungan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD	Persentase terfasilitasinya tugas dan fungsi DPRD secara kelembagaan sebagai fungsi anggaran, fungsi pengawasan, dan fungsi legisiasi	90%	52.611.126.400,00	91,77%	19.705.224.037,00	90,00%	22.631.835.800,00	17,33%	2.784.551.621,00	17,33%	2.784.551.621,00	91,77%	19.705.224.037,00				
Pembentukan Peraturan Daerah dan Peraturan DPRD	Persentase fasilitas peraturan daerah dan peraturan DPRD			75,00%	8.578.500,00	90,00%	86.890.400,00		0,00	0,00%	0,00	75%	8.578.500,00				
Penyusunan dan Pembahasan Program Peraturan Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Penyusunan dan Pembahasan Program Pembentukan Peraturan Daerah			1 Dokumen	1.575.000,00	1 Dokumen	7.078.000,00		0,00	0%	0,00	1 Dokumen	1.575.000,00				Sekretariat DPRD
Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah			1 Dokumen	7.003.500,00	1 Dokumen	8.749.900,00		0,00	0%	0,00	1 Dokumen	7.003.500,00				Sekretariat DPRD
Fasilitasi Penyusunan Penjelasan/Keterangan Naskah Akademik	Jumlah Dokumen Hasil Penyusunan Penjelasan atau Keterangan dan/atau Naskah Akademik yang Difasilitasi			0	0,00	1 Dokumen	59.964.000,00		0,00	0%	0,00	0%	0,00				Sekretariat DPRD
Penyusunan Tata Tertib DPRD	Jumlah Dokumen Tata Tertib DPRD yang Disusun			0	0,00	1 Dokumen	11.098.500,00		0,00	0%	0,00	0%	0,00				Sekretariat DPRD
Pembahasan Kebijakan Anggaran	Persentase pembahasan kebijakan anggaran			90,00%	147.961.750,00	90,00%	171.218.000,00		0,00	0,00%	0,00	90%	147.961.750,00				
Pembahasan KUA dan PPAS	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan KUA dan PPAS			2 Dokumen	61.104.250,00	2 Dokumen	35.941.000,00		0,00	0%	0,00	2 Dokumen	61.104.250,00				Sekretariat DPRD

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (output)	Target RPD pada akhir periode Akhir RPD (2026)		Realisasi Capaian Kinerja RPD Sampai Dengan RKPD Tahun Lalu		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun Berjalan (Tahun n-1 = 2024) yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPD s/d Tahun lalu		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPD s/d Tahun lalu (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
								I						15=14/6 x 100%				
4	5	6	Rp	7	Rp	8	Rp	9	Rp	11	Rp	12	Rp	13	14=7x13	15	16	
Pembahasan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS			2 Dokumen	14.579.250,00	2 Dokumen	25.936.000,00			0,00	0%		0,00	2 Dokumen	14.579.250,00			Sekretariat DPRD
Pembahasan APBD	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan APBD			2 Dokumen	36.906.250,00	2 Dokumen	51.911.000,00			0,00	0%		0,00	2 Dokumen	36.906.250,00			Sekretariat DPRD
Pembahasan Perubahan APBD	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan APBD Perubahan			2 Dokumen	26.466.250,00	2 Dokumen	35.853.000,00			0,00	0%		0,00	2 Dokumen	26.466.250,00			Sekretariat DPRD
Pembahasan Pertanggungjawaban APBD	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan Pertanggungjawaban APBD			2 Dokumen	8.905.750,00	2 Dokumen	21.577.000,00			0,00	0%		0,00	2 Dokumen	8.905.750,00			Sekretariat DPRD
Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan	Persentase terfasilitasinya pengawasan penyelenggaraan pemerintahan			90,00%	20.854.750,00	90,00%	22.806.000,00			0,00	0,00%		0,00	90%	20.854.750,00			
Pembahasan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah	Jumlah Rekomendasi Hasil Pembahasan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah			2 Dokumen	20.854.750,00	2 Dokumen	22.806.000,00			0,00	0%		0,00	2 Dokumen	20.854.750,00			
Peningkatan Kapasitas DPRD	Persentase peningkatan kapasitas pimpinan dan anggota DPRD			99,00%	4.261.034.649,00	90,00%	4.222.786.000,00	20,00%	130.929.500,00	20,00%	130.929.500,00	99%	4.261.034.649,00					
Orientasi DPRD	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Orientasi DPRD			1 Dokumen	238.475.200,00	1 Dokumen					0%		0,00	1 Dokumen	238.475.200,00			Sekretariat DPRD
Pendalaman Tugas DPRD	Jumlah Dokumen Hasil Pendalaman Tugas DPRD			8 Dokumen	3.145.156.149,00	6 Dokumen	3.221.139.000,00			0,00	0%		0,00	8 Dokumen	3.145.156.149,00			
Penyediaan Tenaga Ahli Fraksi	Jumlah Tenaga Ahli Fraksi			5 Orang	162.000.000,00	6 Orang	216.000.000,00	6 Orang	30.000.000,00	6 Orang	30.000.000,00	5 Orang	162.000.000,00					Sekretariat DPRD
Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat			1 Dokumen	317.439.200,00	1 Dokumen	332.621.500,00	1 Dokumen	44.584.500,00	1 Dokumen	44.584.500,00	1 Dokumen	317.439.200,00					Sekretariat DPRD
Publikasi dan Dokumentasi DPRD	Jumlah Dokumen Publikasi dan Dokumentasi DPRD			1 Dokumen	397.964.100,00	1 Dokumen	453.025.500,00	1 Dokumen	56.345.000,00	1 Dokumen	56.345.000,00	1 Dokumen	397.964.100,00					Sekretariat DPRD
Penyerapan dan Penghimpunan Aspirasi Masyarakat	Persentase aspirasi masyarakat yang terhimpun				1.395.500.700,00	90,00%	1.686.753.400,00	15,00%	124.294.850,00	15,00%	124.294.850,00		1.395.500.700,00					
Kunjungan Kerja dalam Daerah	Jumlah Laporan Kunjungan Kerja DPRD			7 Laporan	1.030.702.900,00	6 Laporan	938.130.000,00	2 Laporan	124.294.850,00	2 Laporan	124.294.850,00	7 Laporan	1.030.702.900,00					Sekretariat DPRD
Pelaksanaan Reses	Jumah Dokumen Hasil Pelaksanaan Reses			36 Dokumen	364.797.800,00	60 Dokumen	748.623.400,00			0,00	0%		0,00	36 Dokumen	364.797.800,00			
Fasilitasi Tugas DPRD	Persentase terfasilitasinya tugas pimpinan dan anggota DPRD			95,00%	13.871.293.688,00	90,00%	16.441.382.000,00	39,00%	2.529.327.271,00	39,00%	2.529.327.271,00	95,00%	13.871.293.688,00					
Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Tugas DPRD	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Tugas DPRD			30 Dokumen	10.728.617.157,00	23 Dokumen	12.868.568.000,00	6 Dokumen	1.809.689.536,00	6 Dokumen	1.809.689.536,00	30 Dokumen	10.728.617.157,00					Sekretariat DPRD
Fasilitasi Tugas Pimpinan DPRD	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Tugas Pimpinan DPRD			25 Dokumen	3.142.676.531,00	15 Dokumen	3.572.814.000,00	4 Dokumen	719.637.735,00	4 Dokumen	719.637.735,00	25 Dokumen	3.142.676.531,00					Sekretariat DPRD
KECAMATAN PADANG PANJANG TIMUR			48.745.319.427,00	99,00%	18.516.344.374,00	100,00%	18.983.722.109,00	15,00%	3.722.897.545,00	15,00%	3.722.897.545,00	99%	18.516.344.374,00					
UNSUR KEWILAYAHAN																		

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (output)	Target RPD pada akhir periode Akhir RPD (2026)		Realisasi Capaian Kinerja RPD Sampai Dengan RKPd Tahun Lalu		Target Kinerja dan Anggaran RKPd Tahun Berjalan (Tahun n-1 = 2024) yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPd yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPD s/d Tahun lalu		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPD s/d Tahun lalu (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
								I									
4	5	6	Rp	7	Rp	8	Rp	9	Rp	10	Rp	11	Rp	12	13	14=12/6 x 100%	15
KECAMATAN		88,00%	48.745.319.427,00	99,00%	18.516.344.374,00	100,00%	18.983.722.109,00	15,00%	3.722.897.545,00	15,00%	3.722.897.545,00	99%	18.516.344.374,00				
PENUNJANG PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN / KOTA	Persentase pemenuhan urusan penunjang yang dipenuhi	100%	31.521.279.427,00	95,00%	11.643.353.546,00	100,00%	13.027.236.169,00	25,00%	2.908.874.695,00	25,00%	2.908.874.695,00	95%	11.643.353.546,00				
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Pemenuhan Layanan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah			100,00%	9.597.525.322,00	100,00%	9.018.801.269,00	25,00%	2.183.617.461,00	25,00%	2.183.617.461,00	100%	9.597.525.322,00				
Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN			994 orang	9.597.525.322,00	994 orang	9.018.801.269,00	195 orang	2.183.617.461,00	195 orang	2.183.617.461,00	994 orang	9.597.525.322,00				Kecamatan PPT
Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan layanan administrasi kepegawaian daerah				35.500.000,00		0,00		0,00	0,00%	0,00		35.500.000,00				
Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan			71 paket	35.500.000,00					0%	0,00	71 paket	35.500.000,00				Kecamatan PPT
Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan layanan administrasi umum perangkat daerah			100,00%	355.695.550,00	100,00%	469.950.000,00	25,00%	44.944.175,00	25,00%	44.944.175,00	100%	355.695.550,00				
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan			36 Paket	13.402.200,00	4 Paket	17.000.000,00	3 paket	1.959.000,00	3 paket	1.959.000,00	36 Paket	13.402.200,00				Kecamatan PPT
Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan			36 Paket	94.780.065,00	4 Paket	103.950.000,00	3 paket	28.972.300,00	3 paket	28.972.300,00	36 Paket	94.780.065,00				Kecamatan PPT
Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan			108 paket	23.693.550,00	12 Paket	31.000.000,00	3 paket	6.079.400,00	3 paket	6.079.400,00	108 paket	23.693.550,00				Kecamatan PPT
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Rapat Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD			120 laporan	223.819.735,00	24 laporan	318.000.000,00	6 laporan	7.933.475,00	6 laporan	7.933.475,00	120 laporan	223.819.735,00				Kecamatan PPT
Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase pemenuhan Barang Milik Daerah sesuai dengan perencanaan			100,00%	181.825.000,00	100,00%	53.093.300,00	10,00%	9.925.000,00	10,00%	9.925.000,00	100%	181.825.000,00				
Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan			17 unit	181.825.000,00	21 unit	53.093.300,00	2 unit	9.925.000,00	2 unit	9.925.000,00	17 unit	181.825.000,00				Kecamatan PPT
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang terpenuhi			100,00%	1.014.030.004,00	100,00%	2.661.555.100,00	25,00%	509.625.309,00	25,00%	509.625.309,00	100%	1.014.030.004,00				
Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat			12 laporan	2.760.000,00	12 laporan	3.120.000,00		0,00	0%	0,00	12 laporan	2.760.000,00				Kecamatan PPT
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan			276 laporan	51.233.669,00	12 laporan	105.441.500,00	3 laporan	12.010.579,00	3 laporan	12.010.579,00	276 laporan	51.233.669,00				Kecamatan PPT
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan			108 laporan	960.036.335,00	12 laporan	2.552.993.600,00	3 laporan	497.614.730,00	3 laporan	497.614.730,00	108 laporan	960.036.335,00				Kecamatan PPT

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (output)	Target RPD pada akhir periode Akhir RPD (2026)		Realisasi Capaian Kinerja RPD Sampai Dengan RKPD Tahun Lalu		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun Berjalan (Tahun n-1 = 2024) yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPD s/d Tahun lalu		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPD s/d Tahun lalu (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
								I									
								/									
4	5	6	Rp	7	Rp	8	Rp	9	Rp	11	Rp	12	Rp	13	14=11/13 x 100%	15=14/16 x 100%	16
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase ketersediaan Barang Milik Daerah berkondisi baik			100,00%	458.777.670,00	100,00%	823.836.500,00	25,00%	160.762.750,00	25,00%	160.762.750,00	100%	458.777.670,00				
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya			46 unit	132.624.300,00	46 unit	252.865.000,00	43 unit	102.974.750,00	43 unit	102.974.750,00	46 unit	132.624.300,00				Kecamatan PPT
Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara			100 unit	24.200.000,00	100 unit	49.500.000,00	10 unit	2.050.000,00	10 unit	2.050.000,00	100 unit	24.200.000,00				Kecamatan PPT
Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi			9 unit	301.953.370,00	9 unit	521.471.500,00	1 unit	55.738.000,00	1 unit	55.738.000,00	9 unit	301.953.370,00				Kecamatan PPT
PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Persentase Tingkat Layanan	100%	8.036.520.000,00	100,00%	3.530.639.653,00	100,00%	1.168.995.400,00	25,00%	168.273.000,00	25,00%	168.273.000,00	100%	3.530.639.653,00				
Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah koordinasi yang dilaksanakan ditingkat kecamatan					12 kali	30.000.000,00		0,00	0,00%	0,00						
Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan					1 dokumen	30.000.000,00		0,00	0%	0,00						Kecamatan PPT
Koordinasi Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum	Jumlah Rapat Koordinasi Layanan Persampahan			100,00%	1.671.184.908,00	12 kali	219.440.000,00	3 kali	39.416.550,00	0,00%	39.416.550,00	100%	1.671.184.908,00				
Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang Terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum	Jumlah Dokumen Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang Terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum			576 dokumen	1.671.184.908,00	8 dokumen	219.440.000,00	8 dokumen	39.416.550,00	8 dokumen	39.416.550,00	576 dokumen	1.671.184.908,00				Kecamatan PPT
Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	Jumlah urusan pemerintahan yang dilimpahkan			100,00%	1.859.454.745,00	8 urusan	919.555.400,00	2 urusan (PMT Posyandu, Posyandu)	128.856.450,00	0,00%	128.856.450,00	100%	1.859.454.745,00				
Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan			8 lap (FKKS, pokja kelsehat, PKK, karang taruna, posyandu, dasawisma, PMT, Himpaud i)	1.859.454.745,00	8 laporan	919.555.400,00	2 laporan (PMT Posyandu, Posyandu)	128.856.450,00	2 laporan (PMT Posyandu, Posyandu)	128.856.450,00	8 lap (FKKS, pokja kelsehat, PKK, karang taruna, posyandu, dasawisma, PMT, Himpaud i)	1.859.454.745,00				Kecamatan PPT
PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Tingkat Partisipasi dan Pemberdayaan Masyarakat Kecamatan / Kelurahan	40%	9.017.520.000,00	100,00%	3.090.042.550,00	100,00%	4.739.480.540,00	25,00%	645.749.850,00	25,00%	645.749.850,00	100%	3.090.042.550,00				
Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Jumlah jenis pemberdayaan kelurahan yang dilaksanakan			100,00%	775.192.225,00	3 jenis	2.491.196.540,00	2 jenis	285.349.850,00	0,00%	285.349.850,00	100%	775.192.225,00				

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (output)	Target RPD pada akhir periode Akhir RPD (2026)		Realisasi Capaian Kinerja RPD Sampai Dengan RKPD Tahun Lalu		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun Berjalan (Tahun n-1 = 2024) yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPD s/d Tahun lalu		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPD s/d Tahun lalu (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								I								
								/								
4	5	6	Rp	7	Rp	8	Rp	9	Rp	10	Rp	11	Rp	12=10/11	13=12/12 x 100%	14
Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan			9 lembaga	103.164.825,00	9 lembaga	149.429.500,00	5 lembaga (RT,LPM,P KK,Karang Taruna,Po syandu)	129.447.575,00	5 lembaga (RT,LPM,PKK ,Karang Taruna,Posy andu)	129.447.575,00	9 lembaga	103.164.825,00			Kecamatan PPT
Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun			3 paket baju adat (minang, jawa, batak)	93.136.000,00	8 unit	391.570.000,00		0,00	0%	0,00	3 paket baju adat (minang, jawa, batak)	93.136.000,00			Kecamatan PPT
Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan			6 pokmas/ ormas	578.891.400,00	6 pokmas/ ormas	1.950.197.040,00		155.902.275,00	0%	155.902.275,00	6 pokmas/or mas	578.891.400,00			Kecamatan PPT
Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Kecamatan	Jumlah Rukun Tetangga (RT)			107 RT	2.314.850.325,00	107 RT	2.248.284.000,00	107 RT	360.400.000,00	0,00%	360.400.000,00	107 RT	2.314.850.325,00			
Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan			1 lembaga (RT)	2.314.850.325,00	1 lembaga (RT)	2.248.284.000,00	1 lembaga (RT)	360.400.000,00	1 lembaga (RT)	360.400.000,00	1 lembaga (RT)	2.314.850.325,00			Kecamatan PPT
KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Jumlah laporan kasus pelanggaran trantibum	8 laporan	50.000.000,00		7.750.000,00	100%	18.010.000,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00		7.750.000,00			
Koordinasi Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Jumlah jenis kegiatan koordinasi trantib			2 Jenis	7.750.000,00	2 Jenis	18.010.000,00		0,00		0,00	2 Jenis	7.750.000,00			
Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia, dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia, dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan			108 Laporan	7.750.000,00	12 laporan	18.010.000,00		0,00	0%	0,00	108 Laporan	7.750.000,00			Kecamatan PPT
PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Persentase penyelenggaraan urusan pemerintah daerah yang dilaksanakan	100%	120.000.000,00	100,00%	244.558.625,00	100,00%	30.000.000,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	100%	244.558.625,00			
Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	Jumlah urusan pemerintahan umum yang dilaksanakan sesuai penugasan kepala daerah			100,00%	244.558.625,00	4 kegiatan	30.000.000,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	100%	244.558.625,00			
Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku , Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional			340 orang	219.000.100,00	80 orang	20.000.000,00		0,00	0%	0,00	340 orang	219.000.100,00			Kecamatan PPT
Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan			2 dokumen	25.558.525,00	6 dokumen	10.000.000,00		0,00	0%	0,00	2 dokumen	25.558.525,00			Kecamatan PPT
KECAMATAN PADANG PANJANG BARAT			50.761.402.486,00	100,00%	18.719.714.527,00	100,00%	19.423.040.682,00	23,33%	3.751.647.106,00	23,33%	3.751.647.106,00	100%	18.719.714.527,00			
UNSUR KEWILAYAHAN																
KECAMATAN		85,60%	50.761.402.486,00	100,00%	18.719.714.527,00	100,00%	19.423.040.682,00	23,33%	3.751.647.106,00	23,33%	3.751.647.106,00	100%	18.719.714.527,00			
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA		Persentase pemenuhan urusan penunjang yang dienuhi	100%	29.716.910.786,00	100,00%	10.891.330.230,00	100,00%	12.383.814.088,00	25,00%	2.618.116.169,00	25,00%	2.618.116.169,00	100%	10.891.330.230,00		

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (output)	Target RPD pada akhir periode Akhir RPD (2026)		Realisasi Capaian Kinerja RPD Sampai Dengan RKPD Tahun Lalu		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun Berjalan (Tahun n-1 + 2024) yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPD s/d Tahun lalu		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPD s/d Tahun lalu (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
								I									
4	5	6	Rp	7	Rp	8	Rp	9	Rp	10	Rp	11	Rp	12	13	14=12/6 x 100%	15
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan layanan administrasi keuangan perangkat daerah			100,00%	8.867.929.732,00	100,00%	8.165.987.501,00	25,00%	2.000.566.373,00	25,00%	2.000.566.373,00	100%	8.867.929.732,00				
Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN			1125 Orang / bulan	8.867.929.732,00	440 Orang/ bulan	8.165.987.501,00	440 Orang/ bulan	2.000.566.373,00	440 Orang/ bulan	2.000.566.373,00	1125 Orang / bulan	8.867.929.732,00				Kecamatan PPB
Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan layanan administrasi kepegawaian perangkat daerah			100,00%	33.180.000,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	100%	33.180.000,00						
Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan			62 Paket	33.180.000,00					0%	0,00	62 Paket	33.180.000,00				Kecamatan PPB
Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan layanan administrasi umum perangkat daerah			100,00%	413.717.530,00	100,00%	680.879.103,00	25,00%	46.004.509,00	25,00%	46.004.509,00	100%	413.717.530,00				
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan			36 Paket	21.953.900,00	9 Paket	31.040.200,00	9 Paket	2.813.300,00	9 Paket	2.813.300,00	36 Paket	21.953.900,00				Kecamatan PPB
Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan			36 Paket	106.233.900,00	9 Paket	174.795.703,00	9 Paket	16.418.925,00	9 Paket	16.418.925,00	36 Paket	106.233.900,00				Kecamatan PPB
Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan			36 Paket	17.326.750,00	9 Paket	52.188.200,00	9 Paket	3.230.300,00	9 Paket	3.230.300,00	36 Paket	17.326.750,00				Kecamatan PPB
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD			120 Laporan	268.202.980,00	10 Laporan	422.855.000,00	10 Laporan	23.541.984,00	10 Laporan	23.541.984,00	120 Laporan	268.202.980,00				Kecamatan PPB
Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase pemenuhan Barang Milik Daerah sesuai dengan perencanaan			100,00%	142.980.000,00	100,00%	101.500.000,00	25,00%	0,00	25,00%	0,00	100%	142.980.000,00				
Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan			24 Unit	142.980.000,00	20 unit	101.500.000,00		0,00	0%	0,00	24 Unit	142.980.000,00				Kecamatan PPB
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang terpenuhi			100,00%	1.022.314.563,00	100,00%	2.516.058.084,00	25,00%	484.958.347,00	25,00%	484.958.347,00	100%	1.022.314.563,00				
Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat			150 Laporan	1.250.000,00	27 Laporan	2.000.000,00	27 Laporan	500.000,00	27 Laporan	500.000,00	150 Laporan	1.250.000,00				Kecamatan PPB
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan			24 Laporan	93.560.763,00	54 Laporan	102.156.084,00	54 Laporan	12.144.426,00	54 Laporan	12.144.426,00	24 Laporan	93.560.763,00				Kecamatan PPB
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan			12 laporan	927.503.800,00	27 Laporan	2.411.902.000,00	27 Laporan	472.313.921,00	27 Laporan	472.313.921,00	12 laporan	927.503.800,00				Kecamatan PPB
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase ketersediaan Barang Milik Daerah berkondisi baik			100,00%	411.208.405,00	100,00%	919.389.400,00	25,00%	86.586.940,00	25,00%	86.586.940,00	100%	411.208.405,00				
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya			47 Unit	156.302.100,00	47 Unit	337.843.000,00	47 Unit	40.090.900,00	47 Unit	40.090.900,00	47 Unit	156.302.100,00				Kecamatan PPB

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (output)	Target RPD pada akhir periode Akhir RPD (2026)		Realisasi Capaian Kinerja RPD Sampai Dengan RKPD Tahun Lalu		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun Berjalan (Tahun n-1 = 2024) yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPD s/d Tahun lalu		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPD s/d Tahun lalu (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
								I									
								/									
4	5	6	7		8		9		11		12		13		14	15=14/6 x 100%	16
		K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara			21 unit	46.020.000,00	21 unit	107.820.000,00	21 unit	4.345.000,00	21 unit	4.345.000,00	21 unit	46.020.000,00				Kecamatan PPB
Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi			1 Unit	0,00	1 Unit	174.328.000,00		0,00	0%	0,00	1 Unit	0,00				Kecamatan PPB
Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi			13 Unit	208.886.305,00	13 Unit	299.398.400,00	2 Unit	42.151.040,00	2 Unit	42.151.040,00	13 Unit	208.886.305,00				
PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Presentase tingkat layanan	100%	10.443.120.000,00	100,00%	4.107.797.302,00	100,00%	1.479.596.129,00	16,67%	214.591.625,00	16,67%	214.591.625,00	100%	4.107.797.302,00				
Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah Koordinasi yang dilaksanakan di tingkat kecamatan					1 dokumen	6.759.900,00		0,00	0%	0,00						
Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan					1 dokumen	6.759.900,00		0,00	0%	0,00						Kecamatan PPB
Koordinasi Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum	Jumlah Rapat Koordinasi Layanan Persampahan			12 kali	1.623.715.194,00	168 dokumen	186.555.800,00	25,00%	39.641.750,00	25%	39.641.750,00	12 kali	1.623.715.194,00				
Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang Terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum	Jumlah Dokumen Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang Terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum			680 Dokumen	1.623.715.194,00	168 dokumen	186.555.800,00		39.641.750,00	0%	39.641.750,00	680 Dokumen	1.623.715.194,00				Kecamatan PPB
Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	Jumlah Koordinasi yang dilaksanakan di tingkat kecamatan			8 Urusan	2.484.082.108,00	8 Laporan	1.286.280.429,00	25,00%	174.949.875,00	25%	174.949.875,00	8 Urusan	2.484.082.108,00				
Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan			8 Laporan	2.484.082.108,00	8 Laporan	1.286.280.429,00	8 Laporan	174.949.875,00	8 Laporan	174.949.875,00	8 Laporan	2.484.082.108,00				Kecamatan PPB
PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Presentase partisipasi dan pemberdayaan masyarakat Kecamatan/kelurahan	28%	10.377.371.700,00	100,00%	3.482.027.970,00	100,00%	5.474.764.815,00	25,00%	918.939.312,00	25,00%	918.939.312,00	100%	3.482.027.970,00				
Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Jumlah jenis pemberdayaan kelurahan yang dilaksanakan			3 jenis	617.198.170,00	3 jenis	2.624.562.865,00	3 jenis	453.279.315,00	0%	453.279.315,00	3 jenis	617.198.170,00				
Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan			9 Lembaga Kemasyarakatan	173.938.750,00	9 Lembaga Kemasyarakatan	211.484.250,00	9 Lembaga Kemasyarakatan	132.199.115,00	9 Lembaga Kemasyarakatan	132.199.115,00	9 Lembaga Kemasyarakatan	173.938.750,00				Kecamatan PPB
Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun			8 Unit	45.000.000,00	8 Unit	359.000.000,00	8 Unit	0,00	8 Unit	0,00	8 Unit	45.000.000,00				Kecamatan PPB
Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan			8 Pokmas / Ormas	398.259.420,00	8 Pokmas / Ormas	2.054.078.615,00	8 Pokmas / Ormas	321.080.200,00	8 Pokmas / Ormas	321.080.200,00	8 Pokmas / Ormas	398.259.420,00				Kecamatan PPB

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (output)	Target RPD pada akhir periode Akhir RPD (2026)		Realisasi Capaian Kinerja RPD Sampai Dengan RKPd Tahun Lalu		Target Kinerja dan Anggaran RKPd Tahun Berjalan (Tahun n-1 = 2024) yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPd yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPD s/d Tahun lalu		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPD s/d Tahun lalu (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
								I									
4	5	6	Rp	7	Rp	8	Rp	9	Rp	10	Rp	11	Rp	12	13	14=12/13 x 100%	16
Pemberdayaan Masyarakat Kecamatan	Lembaga Tingkat	Jumlah Rukun Tetangga (RT)		133 RT	2.864.829.800,00	133 RT	2.850.201.950,00	133 RT	465.659.997,00	0%	465.659.997,00	133 RT	2.864.829.800,00				
Penyelenggaraan Kemasyarakatan	Lembaga Kemasyarakatan yang diselenggarakan	Jumlah Lembaga		1 Lembaga Kemasya rakatan	2.864.829.800,00	1 Lembaga Kemasyar akatan	2.850.201.950,00	1 Lembaga Kemasyara katan	465.659.997,00	1 Lembaga Kemasyarak atan	465.659.997,00	1 Lembaga Kemasyara katan	2.864.829.800,00				Kecamatan PPB
PROGRAM KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	KOORDINASI	Penurunan tingkat pelanggaran ketertibatan umum	8 laporan	94.000.000,00	10 laporan	15.424.550,00	10 laporan	30.477.000,00	25,00%	0,00	25,00%	0,00	10 laporan	15.424.550,00			
Koordinasi Penyelenggaraan Ketertibatan Umum	Upaya dan	Jumlah jenis kegiatan koordinasi trantib		2 jenis	15.424.550,00	2 jenis	30.477.000,00	2 jenis	0,00	2 jenis	0,00	2 jenis	15.424.550,00				
Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan			108 Laporan	15.424.550,00	108 Laporan	30.477.000,00	108 Laporan	0,00	108 Laporan	0,00	108 Laporan	15.424.550,00				Kecamatan PPB
PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM		Persentase penyelenggaraan urusan pemerintah daerah yang dilaksanakan	100%	130.000.000,00	100,00%	223.134.475,00	100,00%	54.388.650,00	25,00%	0,00	25,00%	0,00	100%	223.134.475,00			
Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	Jumlah kegiatan pemerintahan umum yang dilaksanakan sesuai penugasan kepala daerah			5 Kegiatan	223.134.475,00	5 Kegiatan	54.388.650,00	5 Kegiatan	0,00	5 Kegiatan	0,00	5 Kegiatan	223.134.475,00				
Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku , Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional			0	215.955.675,00	170 orang	39.994.000,00		0,00	0%	0,00	0%	215.955.675,00				Kecamatan PPB
Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan			4 Dokumen	7.178.800,00	2 Dokumen	14.394.650,00		0,00	0%	0,00	4 Dokumen	7.178.800,00				Kecamatan PPB
BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH, KESBANGPOL			33.514.309.133,00	98,12%	20.444.848.907,00	100,00%	9.471.364.248,00	18,75%	1.427.593.250,00	18,75%	1.427.593.250,00	98%	20.444.848.907,00				
URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR																	
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT			97,14%	33.514.309.133,00	98,12%	20.444.848.907,00	100,00%	9.471.364.248,00	18,75%	1.427.593.250,00	18,75%	1.427.593.250,00	98%	20.444.848.907,00			
Program Penunjang Urusan Pemerintah Kabupaten/Kota	Persentase Pemenuhan Urusan Penunjang yang dipenuhi	100%	13.215.822.085,00	100,00%	5.247.945.626,00	100,00%	5.041.271.812,00	20,00%	1.153.539.222,00	20,00%	1.153.539.222,00	100%	5.247.945.626,00				
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan layanan administrasi keuangan perangkat daerah			100,00%	4.463.955.448,00	100,00%	4.192.595.326,00	25,00%	1.052.071.820,00	25,00%	1.052.071.820,00	100%	4.463.955.448,00				
Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN			261 orang	4.463.955.448,00	32 orang	4.192.595.326,00	32 orang	1.052.071.820,00	32 orang	1.052.071.820,00	261 orang	4.463.955.448,00				BPBD Kesbangpol

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (output)	Target RPD pada akhir periode Akhir RPD (2026)		Realisasi Capaian Kinerja RPD Sampai Dengan RKPd Tahun Lalu		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun Berjalan (Tahun n-1 = 2024) yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPD s/d Tahun lalu		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPD s/d Tahun lalu (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								I								
4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
		K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan layanan administrasi kepegawaian perangkat daerah			100,00%	17.500.000,00		0,00		0,00%	0,00	100%	17.500.000,00				
Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan			35 Paket	17.500.000,00				0%	0,00	35 Paket	17.500.000,00				BPBD Kesbangpol
Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan layanan administrasi umum perangkat daerah			100,00%	245.058.376,00	100,00%	257.331.470,00	25,00%	34.225.431,00	25,00%	34.225.431,00	100%	245.058.376,00			
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan			10 Jenis	3.792.500,00	10 Jenis	5.805.200,00		0,00	0%	0,00	10 Jenis	3.792.500,00			BPBD Kesbangpol
Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan			31 Jenis	34.903.200,00	60 Jenis	40.464.570,00	14 Jenis	0,00	14 Jenis	0,00	31 Jenis	34.903.200,00			BPBD Kesbangpol
Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan			2 Jenis	9.323.200,00	2 Jenis	15.494.700,00	2 Jenis	1.580.700,00	2 Jenis	1.580.700,00	2 Jenis	9.323.200,00			BPBD Kesbangpol
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD			189 Kali	197.039.476,00	200 kali	195.567.000,00	71 Kali	32.644.731,00	71 Kali	32.644.731,00	189 Kali	197.039.476,00			BPBD Kesbangpol
Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase pemenuhan Barang Milik Daerah sesuai dengan perencanaan			100%	73.795.000,00	100,00%	25.994.000,00		0,00	0,00%	0,00	100%	73.795.000,00			
Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan			1 Unit	35.595.000,00				0%	0,00	1 Unit	35.595.000,00				
Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan			6 unit	38.200.000,00		25.994.000,00		0,00	0%	0,00	6 unit	38.200.000,00			
Penyediaan Jasa Penunjang Pemerintahan Daerah	Persentase Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang terpenuhi			100,00%	148.187.984,00	90,00%	182.042.116,00	25,00%	30.590.471,00	25,00%	30.590.471,00	100%	148.187.984,00			
Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat			4 jenis	3.250.000,00	3 Laporan	3.494.400,00	1 jenis	0,00	1 jenis	0,00	4 jenis	3.250.000,00			BPBD Kesbangpol
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan			12 rekening	25.285.184,00	36 Laporan	34.997.716,00	3 rekening	6.191.671,00	3 rekening	6.191.671,00	12 rekening	25.285.184,00			BPBD Kesbangpol
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan			12 Orang	119.652.800,00	4 Laporan	143.550.000,00	4 Orang	24.398.800,00	4 Orang	24.398.800,00	12 Orang	119.652.800,00			BPBD Kesbangpol
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase ketersediaan Barang Milik Daerah berondisi baik			100,00%	299.448.818,00	100,00%	383.308.900,00	25,00%	36.651.500,00	25,00%	36.651.500,00	100%	299.448.818,00			
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Perorangan dan Pajak Kendaraan Dinas Jabatan atau Kendaraan Dinas yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	Jumlah Kendaraan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya			20 Unit	265.242.818,00	20 Unit	341.778.400,00	20 Unit	35.121.500,00	20 Unit	35.121.500,00	20 Unit	265.242.818,00			BPBD Kesbangpol
Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara			20 unit	13.639.000,00	20 Unit	26.241.000,00	4 unit	1.530.000,00	4 unit	1.530.000,00	20 unit	13.639.000,00			BPBD Kesbangpol
Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi			1 Unit	20.567.000,00	1 Unit	15.289.500,00	-	0,00	-	0,00	1 Unit	20.567.000,00			BPBD Kesbangpol

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (output)	Target RPD pada akhir periode Akhir RPD (2026)		Realisasi Capaian Kinerja RPD Sampai Dengan RKPD Tahun Lalu		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun Berjalan (Tahun n-1 = 2024) yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPD s/d Tahun lalu		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPD s/d Tahun lalu (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								I								
4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
		K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
Program Penanggulangan Bencana	Persentase warga yang mendapat pelayanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana	100%	4.099.201.248,00		1.453.846.675,00	100,00%	1.288.694.470,00	12,50%	162.198.228,00	12,50%	162.198.228,00		1.453.846.675,00			
Pelayanan Informasi Rawan Bencana Kabupaten/Kota	peesentase warga yang mendapat pelayanan informasi rawan bencana			100,00%	259.837.050,00	100,00%	49.999.960,00	5,00%	0,00	5,00%	0,00	100%	259.837.050,00			
Penyusunan Kajian Risiko Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah dokumen Kajian Risiko Bencana (KRB) sampai dengan dinyatakan sah/legal			1 Dokumen	259.837.050,00	1 dokumen		1 dokumen		1 dokumen	0,00	1 Dokumen	259.837.050,00			BPBD Kesbangpo
Sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Rawan Bencana Kabupaten/Kota (Per Jenis Ancaman Bencana)	Jumlah warga negara termasuk kelompok rentan di kawasan rawan bencana Kabupaten/Kota yang memperoleh sosialisasi, komunikasi, informasi dan edukasi sesuai jenis ancaman bencana yang ada di kawasan tempat tinggalnya selama 1 (satu) tahun			0	0,00	160 orang	49.999.960,00		0,00	0%	0,00	0%	0,00			
Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	persentase kesiapan masyarakat terhadap risiko bencana				905.853.355,00	5,00%	1.025.854.450,00	15,00%	147.594.000,00	15,00%	147.594.000,00		905.853.355,00			
Penyediaan Peralatan Perlindungan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana kabupaten/kota	Jumlah Peralatan Penyelamatan Diri bagi Individu Warga Negara, Keluarga, maupun Petugas sesuai dengan jenis ancaman bencana di kawasan tempat tinggalnya			9 unit, 22 pcs	47.880.000,00	105 unit				0%	0,00	9 unit, 22 pcs	47.880.000,00			BPBD Kesbangpo
Pelatihan Pencegahan dan Mitigasi Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah warga negara termasuk kelompok rentan di kawasan rawan bencana Kabupaten/Kota yang mengikuti pelatihan pencegahan dan mitigasi bencana			40 orang	44.005.350,00	160 orang	119.999.450,00		0,00	0%	0,00	40 orang	44.005.350,00			BPBD Kesbangpo
Pengendalian Operasi dan Penyediaan Sarana Prasarana Kesiapsiagaan Terhadap Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah laporan layanan pusat pengendalian operasi (pusdalops) dengan Maklumat Pelayanan yang sah dan legal sesuai dengan jenis ancaman bencana yang ada di kawasan tempat tinggalnya			22 orang	813.968.005,00	12 Dokumen	905.855.000,00	22 orang	147.594.000,00	22 orang	147.594.000,00	22 orang	813.968.005,00			BPBD Kesbangpo
Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	presentase warga yang mendapat pelayanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana				61.696.550,00	100,00%	89.997.000,00	5,00%	3.850.000,00	5,00%	3.850.000,00		61.696.550,00			
Respon Cepat Darurat Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen SK Penetapan Status Darurat Bencana dan SKPDB yang Ditetapkan Paling Lama 1x24 Jam berdasarkan Hasil Dokumen Laporan Kaji Cepat			59 kejadian	61.696.550,00	85 kajian	89.997.000,00		3.850.000,00	0%	3.850.000,00	59 kejadian	61.696.550,00			BPBD Kesbangpo

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (output)	Target RPD pada akhir periode Akhir RPD (2026)		Realisasi Capaian Kinerja RPD Sampai Dengan RKPD Tahun Lalu		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun Berjalan (Tahun n-1 = 2024) yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPD s/d Tahun lalu		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPD s/d Tahun lalu (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								I								
4	5	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	16
	Jumlah laporan kejadian penyelematan dan evakuasi korban bencana yang ditangani				0,00					0%	0,00		0,00			BPBD Kesbangpo
Penataan Sistem Dasar Penanggulangan Bencana	Persentase jumlah kerusakan yang tertangani			100,00%	226.459.720,00	100,00%	122.843.060,00	25%	10.754.228,00	25,00%	10.754.228,00	100%	226.459.720,00			
Koordinasi penanganan Pascabencana Kabupaten/Kota	Jumlah penyelesaian kegiatan pascabencana di semua sektor sesuai berdasarkan Rencana Rehabilitasi dan Rekontruksi Pascabencana (R3P) Provinsi yang dilegalkan			1 Kegiatan	226.459.720,00	1 Kegiatan	122.843.060,00		10.754.228,00	0%	10.754.228,00	1 Kegiatan	226.459.720,00			BPBD Kesbangpo
PROGRAM PENGUATAN IDEOLOGI PANCASILA DAN KARAKTER KEBANGSAAN	Persentase pemahaman terhadap Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	80%	1.790.000.000,00	100,00%	1.037.869.569,00	100,00%	711.022.000,00	25,00%	1.458.975,00	25,00%	1.458.975,00	100%	1.037.869.569,00			
Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	presentase pencegahan terhadap peristiwa gangguan keamanan berlatar belakang ideologi radikal dan isu-isu di daerah			100,00%	1.037.869.569,00	80,00%	711.022.000,00	25,00%	1.458.975,00	25,00%	1.458.975,00	100%	1.037.869.569,00			
Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan			65 org	1.037.869.569,00	80 org	711.022.000,00	65 org	1.458.975,00	65 org	1.458.975,00	65 org	1.037.869.569,00			BPBD Kesbangpo
Program Peningkatan Peran Partai Politik Dan Lembaga Pendidikan Melalui Pendidikan Politik Dan Pengembangan Etika Serta Budaya Politik	Persentase Peningkatan Stabilitas Daerah	100%	12.195.410.800,00	100,00%	12.161.929.039,00	100,00%	1.816.083.966,00	25,00%	60.547.000,00	25,00%	60.547.000,00	100%	12.161.929.039,00			
Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik	presentase pencegahan terhadap perkembangan politik di daerah yang tidak sesuaidengan etika dan budaya			100,00%	12.161.929.039,00	23,00%	1.816.083.966,00	25,00%	60.547.000,00	25,00%	60.547.000,00	100%	12.161.929.039,00			

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (output)	Target RPD pada akhir periode Akhir RPD (2026)		Realisasi Capaian Kinerja RPD Sampai Dengan RKPD Tahun Lalu		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun Berjalan (Tahun n-1 = 2024) yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPD s/d Tahun lalu		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPD s/d Tahun lalu (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
								I										
4	5	6 K	Rp	7 K	Rp	8 K	Rp	9 K	Rp	10 K	Rp	11 K	Rp	12 K	13 Rp	14 %	15 %	16
Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitas Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitas Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah			7 Orang	10.954.703.655,00	45 orang	812.999.966,00	1 dokumen	0,00	1 dokumen	0,00	7 Orang	10.954.703.655,00					
Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitas Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitas Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah			15 Orang/ 3 hibah	1.207.225.384,00	15 orang	1.003.084.000,00	8 partai	60.547.000,00	8 partai	60.547.000,00	15 Orang/ 3 hibah	1.207.225.384,00					BPBD Kesbangpo
PROGRAM PENGBERDAYAAN DAN PENGAWASAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN	Persentase pencegahan terhadap aktivitas ormas yang bertentangan dengan peraturan yang berlaku	100%	150.000.000,00	0,00%	0,00		0,00		0,00	0,00%	0,00	0%	0,00					
Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan	presentase pencegahan potensi konflik akibat gejolak ekonomi, masalah sosial dan budaya dikalangan masyarakat			0,00%	0,00		0,00		0,00	0,00%	0,00	0%	0,00					
Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitas Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitas Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah			0	0,00					0%	0,00	0%	0,00					BPBD Kesbangpo
Program Pembinaan Dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial Dan Budaya	Persentase Konflik yang tertangani	100%	416.800.000,00		123.547.100,00	100,00%	113.950.000,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00		123.547.100,00					

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (output)	Target RPD pada akhir periode Akhir RPD (2026)		Realisasi Capaian Kinerja RPD Sampai Dengan RKPD Tahun Lalu		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun Berjalan (Tahun n-1 = 2024) yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPD s/d Tahun lalu		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPD s/d Tahun lalu (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
								I										
4	5	6	Rp	7	Rp	8	Rp	9	Rp	10	Rp	11	Rp	12=14/6 x 100%	13=14/6 x 100%	14	15	16
Kegiatan Perumusan Kebijakan Teknis dan pemantapan Pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial dan budaya	Persentase pencegahan potensi konflik akibat gejala ekonomi, masalah sosial dan budaya di kalangan masyarakat			K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp			
					123.547.100,00	100,00%	113.950.000,00		0,00	0,00%	0,00		123.547.100,00					
Penyusunan Program Kerja di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitas Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitas Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	Jumlah Pertemuan FKUB dan P4GN yang di adakan			43 org	123.547.100,00	43 org	113.950.000,00	1 kali	0,00	1 kali	0,00	43 org	123.547.100,00					BPBD Kesbangpo
Program Peningkatan Kewaspadaan Nasional dan Peningkatan Kualitas dan Fasilitas Penanganan Konflik Sosial	Persentase kewaspadaan nasional yang tertangani di daerah	100%	1.647.075.000,00	90,00%	419.710.898,00	100,00%	500.342.000,00	30,00%	49.849.825,00	30,00%	49.849.825,00	90%	419.710.898,00					
Perumusan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial	presentase pencegahan konflik sosial yang berkembang ditengah masyarakat			90,00%	419.710.898,00	100,00%	500.342.000,00	30,00%	49.849.825,00	30,00%	49.849.825,00	90%	419.710.898,00					
Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitas Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	Jumlah Orang yang Mengikuti pelaksanaan Kebijakan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitas Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah			43 Orang	419.710.898,00	100%	500.342.000,00	30,00%	49.849.825,00	30%	49.849.825,00	43 Orang	419.710.898,00					

REKAPITULASI HASIL EVALUASI PELAKSANAAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH KOTA PADANG PANJANG
SAMPAI DENGAN TRIWULAN I TAHUN 2025

KODE	URAIAN	Target RPD pada akhir periode Akhir RPD (2026)		Realisasi Capaian Kinerja RPD Sampai Dengan RKPD Tahun Lalu		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun Berjalan (Tahun n-1 = 2024) yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja PD yang Di Evaluasi			Kriteria Penilaian Realisasi Kinerja
		K	Rp	K	Rp.	K	Rp.	I		II		III		IV		K	Rp	% (Rp.)	
								K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.				
1.	URUSAN WAJIB	-	951.911.302.663,00	97,48%	406.160.080.989,01	-	392.731.108.787,00	16,17%	72.317.637.416,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	16,17%	72.317.637.416,00	18,41%	
1.01	URUSAN WAJIB PELAYANAN DASAR	-	844.883.073.947,00	96,50%	357.583.243.324,46	-	345.333.997.312,00	13,65%	63.345.308.952,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	13,65%	63.345.308.952,00	18,34%	
1.01.01	PENDIDIKAN	-	236.514.482.557	99,24%	115.444.454.615	-	109.274.348.959	11,25%	16.629.761.284	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	-	11,25%	16.629.761.284,00	15,22%	
1.01.01.0	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	-	236.514.482.557	99,24%	115.444.454.614,86	-	109.274.348.959	11,25%	16.629.761.284,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	-	11,25%	16.629.761.284,00	15,22%	Rendah
1.01.02	KESEHATAN	-	424.151.712.408	95,54%	167.225.424.920	-	164.982.580.049	11,67%	35.751.775.052	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	-	11,67%	35.751.775.052,00	21,67%	
1.01.02.0	DINAS KESEHATAN		424.151.712.408	95,54%	167.225.424.920,13		164.982.580.049	11,67%	35.751.775.052,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	-	11,67%	35.751.775.052,00	21,67%	Rendah
1.01.03	PEKERJAAN UMUM	-	81.826.147.175	93,73%	21.368.287.487	-	18.920.888.286	2,50%	2.041.928.615	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	-	2,50%	2.041.928.615,00	10,79%	
1.01.03.0	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG		81.826.147.175	93,73%	21.368.287.487,47		18.920.888.286	2,50%	2.041.928.615,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	-	2,50%	2.041.928.615,00	10,79%	Sedang
1.01.04	PERUMAHAN RAKYAT	-	45.162.024.928	94,88%	28.988.237.175	-	27.186.922.319	14,20%	4.195.614.539	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	-	14,20%	4.195.614.539,00	15,43%	
1.01.04.0	DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN LINGKUNGAN HIDUP		45.162.024.928	94,88%	28.988.237.175,00		27.186.922.319	14,20%	4.195.614.539,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	-	14,20%	4.195.614.539,00	15,43%	Rendah
1.01.05	KETENTRAMAN, KETERTIBAN UMUM DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT	-	29.364.777.780	100,00%	11.932.322.299	-	12.367.084.245	21,67%	2.606.147.309	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	-	21,67%	2.606.147.309,00	21,07%	
1.01.05.0	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN		29.364.777.780	100,00%	11.932.322.299,00		12.367.084.245	21,67%	2.606.147.309,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	21,67%	2.606.147.309,00	21,07%	Tinggi
1.01.06	SOSIAL	-	27.863.929.099	95,63%	12.624.516.828	-	12.602.173.454	20,60%	2.120.082.153	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	-	20,60%	2.120.082.153,00	16,82%	
1.01.06.0	DINAS SOSIAL PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK		27.863.929.099	95,63%	12.624.516.828,00		12.602.173.454	20,60%	2.120.082.153,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	20,60%	2.120.082.153,00	16,82%	Sedang
1.02	URUSAN WAJIB NON PELAYANAN DASAR	-	107.028.228.716	98,45%	48.576.837.665	-	47.397.111.475	18,70%	8.972.328.464	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	-	18,70%	8.972.328.464,00	18,93%	
1.02.03	PANGAN	-	28.775.960.098	97,90%	12.595.336.662	-	11.532.994.236	15,49%	2.119.680.042	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	-	15,49%	2.119.680.042,00	18,38%	
1.02.03.0	DINAS PANGAN DAN PERTANIAN		28.775.960.098	97,90%	12.595.336.661,55		11.532.994.236	15,49%	2.119.680.042,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	15,49%	2.119.680.042,00	18,38%	Rendah
1.02.06	ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENDATANGAN SIPIL	-	11.814.719.669	100,00%	3.912.943.036	-	3.941.070.161	25,47%	721.241.042	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	-	25,47%	721.241.042,00	18%	
1.02.06.0	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENDATATAN SIPIL		11.814.719.669	100,00%	3.912.943.036,00		3.941.070.161	25,47%	721.241.042,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	25,47%	721.241.042,00	18,30%	Rendah
1.02.09	PERHUBUNGAN	-	32.076.401.649	99,08%	12.025.092.411	-	11.835.405.260	20,83%	2.458.871.157	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	-	20,83%	2.458.871.157,00	20,78%	

KODE	URAIAN	Target RPD pada akhir periode Akhir RPD (2026)		Realisasi Capaian Kinerja RPD Sampai Dengan RKPD Tahun Lalu		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun Berjalan (Tahun n-1 = 2024) yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja PD yang Di Evaluasi			Kriteria Penilaian Realisasi Kinerja
		K	Rp	K	Rp.	K	Rp.	I		II		III		IV		K	Rp	% (Rp.)	
								K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.				
1.02.09.0	DINAS PERHUBUNGAN		32.076.401.649	99,08%	12.025.092.411,00		11.835.405.260	20,83%	2.458.871.157,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	20,83%	2.458.871.157,00	20,78%	Rendah
1.02.10	KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	-	20.885.917.655	96,69%	8.432.293.664	-	8.377.522.415	25,00%	1.575.645.292	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	-	25,00%	1.575.645.292,00	18,81%	
1.02.10.0	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA		20.885.917.655	96,69%	8.432.293.664,00		8.377.522.415	25,00%	1.575.645.292,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	25,00%	1.575.645.292,00	18,81%	Rendah
1.02.12	PENANAMAN MODAL	-	-	97,03%	6.506.069.935	-	5.786.228.743	6,67%	915.999.435	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	-	6,67%	915.999.435,00	15,83%	
1.02.12.0	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU		-	97,03%	6.506.069.935,00		5.786.228.743	6,67%	915.999.435,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	6,67%	915.999.435,00	15,83%	Rendah
1.02.17	PERPUSTAKAAN	-	13.475.229.645	100,00%	5.105.101.957	-	5.923.890.660	18,75%	1.180.891.496	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	-	18,75%	1.180.891.496,00	19,93%	
1.02.17.0	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN		13.475.229.645	100,00%	5.105.101.957,00		5.923.890.660	18,75%	1.180.891.496,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	18,75%	1.180.891.496,00	19,93%	Rendah
2.	URUSAN PILIHAN	-	69.221.935.838	96,29%	50.751.832.570	-	33.370.614.350	17,89%	4.992.049.065	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	-	17,89%	4.992.049.065,00	14,96%	
2.XX	URUSAN PILIHAN	-	69.221.935.838	96,29%	50.751.832.570	-	33.370.614.350	17,89%	4.992.049.065	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	-	17,89%	4.992.049.065,00	14,96%	
2.XX.02	PARIWISATA	-	29.478.242.100	99,31%	30.070.947.060	-	11.418.203.963	13,28%	1.756.508.446	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	-	13,28%	1.756.508.446,00	15,38%	
2.XX.02.0	DINAS PEMUDA OLAH RAGA DAN PARIWISATA		29.478.242.100	99,31%	30.070.947.060,13		11.418.203.963	13,28%	1.756.508.446,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	13,28%	1.756.508.446,00	15,38%	Rendah
2.XX.06	PERDAGANGAN	-	39.743.693.738	93,27%	20.680.885.509	-	21.952.410.387	22,50%	3.235.540.619	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	-	22,50%	3.235.540.619,00	14,74%	
2.XX.06.0	DINAS PERDAGANGAN, KOPERASI DAN USAHA KECIL MENENGAH		39.743.693.738	93,27%	20.680.885.509,46		21.952.410.387	22,50%	3.235.540.619,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	22,50%	3.235.540.619,00	14,74%	Rendah
3.	PENUNJANG URUSAN	-	188.302.847.855	97,96%	32.582.601.403	-	35.329.359.861	17,76%	6.196.255.263	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	-	17,76%	6.196.255.263,00	17,54%	
3.XX	PENUNJANG URUSAN	-	188.302.847.855	97,96%	32.582.601.403	-	35.329.359.861	17,76%	6.196.255.263	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	-	17,76%	6.196.255.263,00	17,54%	
3.XX.01	INSPEKTORAT	-	16.407.108.880	99,81%	6.940.832.662	-	7.217.546.499	12,11%	1.409.530.008	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	-	12,11%	1.409.530.008,00	20%	
3.XX.01.0	INSPEKTORAT DAERAH		16.407.108.880	99,81%	6.940.832.662,00		7.217.546.499	12,11%	1.409.530.008,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	12,11%	1.409.530.008,00	19,53%	Rendah
3.XX.02	PERENCANAAN	-	72.650.169.698	100,00%	6.056.879.013	-	6.788.688.665	12,57%	1.221.803.802	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	-	12,57%	1.221.803.802,00	18,00%	
3.XX.02.0	BADAN PERENCANAAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH		72.650.169.698	100,00%	6.056.879.013,00		6.788.688.665	12,57%	1.221.803.802,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	12,57%	1.221.803.802,00	18,00%	Rendah
3.XX.03	KEUANGAN	-	34.003.114.104	100,00%	10.251.420.772	-	11.487.167.033	21,38%	1.961.804.162	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	-	21,38%	1.961.804.162,00	17,08%	
3.XX.03.0	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAERAH		34.003.114.104	100,00%	10.251.420.772,00		11.487.167.033	21,38%	1.961.804.162,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	21,38%	1.961.804.162,00	17,08%	Rendah
3.XX.04	KEPEGAWAIAN	-	65.242.455.173	92,01%	9.333.468.956	-	9.835.957.664	25,00%	1.603.117.291	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	-	25,00%	1.603.117.291,00	16,30%	
3.XX.04.0	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA		65.242.455.173	92,01%	9.333.468.956,00		9.835.957.664	25,00%	1.603.117.291,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	25,00%	1.603.117.291,00	16,30%	Rendah
4.	PENDUKUNG	-	214.338.029.380	97,40%	78.609.711.734	-	88.233.752.181	15,08%	13.636.405.230	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	-	15,08%	13.636.405.230,00	15,45%	

KODE	URAIAN	Target RPD pada akhir periode Akhir RPD (2026)		Realisasi Capaian Kinerja RPD Sampai Dengan RKPD Tahun Lalu		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun Berjalan (Tahun n-1 = 2024) yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Trivulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja PD yang Di Evaluasi			Kriteria Penilaian Realisasi Kinerja
								I		II		III		IV					
		K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	%(Rp.)	
4.XX	PENDUKUNG	-	214.338.029.380	97,40%	78.609.711.734	-	88.233.752.181	15,08%	13.636.405.230	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	-	15,08%	13.636.405.230,00	15,45%	
4.XX.01	SEKRETARIAT DAERAH	-	111.561.633.605	99,28%	39.414.915.957	-	46.673.221.196	12,81%	7.309.258.261	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	-	12,81%	7.309.258.261,00	15,66%	
4.XX.01.0	SEKRETARIAT DAERAH		111.561.633.605	99,28%	39.414.915.957,00		46.673.221.196	12,81%	7.309.258.261,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	12,81%	7.309.258.261,00	15,66%	Rendah
4.XX.01	SEKRETARIAT DPRD	-	102.776.395.775	95,52%	39.194.795.777	-	41.560.530.985	17,35%	6.327.146.969	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	-	17,35%	6.327.146.969,00	15,22%	
4.XX.01.0	SEKRETARIAT DPRD		102.776.395.775	95,52%	39.194.795.777,00		41.560.530.985	17,35%	6.327.146.969,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	17,35%	6.327.146.969,00	15,22%	Rendah
5.	KEWILAYAHAN	-	99.506.721.913	99,50%	37.236.058.901	-	38.406.762.791	19,17%	7.474.544.651	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	-	19,17%	7.474.544.651,00	19,46%	
5.XX	KEWILAYAHAN	-	99.506.721.913	99,50%	37.236.058.901	-	38.406.762.791	19,17%	7.474.544.651	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	-	19,17%	7.474.544.651,00	19,46%	
5.XX.01	KECAMATAN	-	99.506.721.913	99,50%	37.236.058.901	-	38.406.762.791	19,17%	7.474.544.651	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	-	19,17%	7.474.544.651,00	19,46%	
5.XX.01.0	KECAMATAN PADANG PANJANG TIMUR		48.745.319.427	99,00%	18.516.344.374,00		18.983.722.109	15,00%	3.722.897.545,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	15,00%	3.722.897.545,00	19,61%	Rendah
5.XX.01.0	KECAMATAN PADANG PANJANG BARAT		50.761.402.486	100,00%	18.719.714.527,00		19.423.040.682	23,33%	3.751.647.106,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	23,33%	3.751.647.106,00	19,32%	Rendah
6.	URUSAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	-	33.514.309.133	98,12%	20.444.848.907	-	9.471.364.248	18,75%	1.427.593.250	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	-	18,75%	1.427.593.250,00	15,07%	
6.XX	URUSAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	-	33.514.309.133	98,12%	20.444.848.907	-	9.471.364.248	18,75%	1.427.593.250	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	-	18,75%	1.427.593.250,00	15,07%	
6.XX.01	KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	-	33.514.309.133	98,12%	20.444.848.907	-	9.471.364.248	18,75%	1.427.593.250	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	-	18,75%	1.427.593.250,00	15,07%	
6.XX.01.0	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH DAN KESATUAN BANGSA POLITIK		33.514.309.133	98,12%	20.444.848.907,00		9.471.364.248	18,75%	1.427.593.250,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	18,75%	1.427.593.250,00	15,07%	Rendah
JUMLAH			1.556.795.146.782	97,65%	625.785.134.504		597.542.962.218	16,88%	106.044.484.875,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	16,88%	106.044.484.875,00	17,75%	

BAB III

KERANGKA EKONOMI DAN KEUANGAN DAERAH

Kerangka ekonomi daerah dan keuangan daerah merupakan salah satu bagian penting dalam Perubahan RKPD Tahun 2025. Melalui analisis kondisi ekonomi terkini dapat diketahui berapa kapasitas riil keuangan daerah yang dapat dikelola dan dimanfaatkan untuk pelaksanaan pembangunan sampai dengan akhir Tahun 2025.

3.1. Kerangka Ekonomi Daerah

Tahun 2025 merupakan tahun pertama pelaksanaan RPJMD Kota Padang Panjang Tahun 2025-2029. Tema pembangunan Kota Padang Panjang tahun 2025 adalah ***“Peningkatan Produktivitas Ekonomi Sektor Unggulan Daerah dan Kualitas SDM Berkarakter, Maju dan Berdaya Saing”***. maka pembangunan ekonomi Kota Padang Panjang diarahkan pada lapangan usaha perdagangan besar dan eceran; reparasi mobil dan sepeda motor; dan lapangan usaha yang terkait dengan kepariwisataan (penyediaan akomodasi dan makan minum, industri pengolahan, transportasi dan pergudangan, informasi dan komunikasi) sesuai dengan potensi yang ada di Kota Padang Panjang. Lapangan usaha pertanian, kehutanan dan perikanan juga perlu mendapatkan prioritas untuk ditingkatkan lebih lanjut karena terbukti memiliki ketahanan tersendiri. Sedangkan lapangan usaha jasa pendidikan tetap harus dipertahankan sebagai salah satu ikonnya Kota Padang Panjang.

3.1.1 Kondisi Ekonomi Daerah Tahun 2023 dan 2024

Kota Padang Panjang terus bergerak dalam arus perkembangan ekonomi nasional dan regional. Sebagai sebuah kota berukuran kecil namun dengan karakteristik yang unik (meliputi sektor pendidikan serta pariwisata alam dan budaya) pemahaman terhadap kondisi ekonominya menjadi sangat penting. Pemantauan kinerja ekonomi daerah bukan hanya menjadi acuan bagi perencanaan pembangunan dan pengambilan kebijakan oleh pemerintah setempat, tetapi juga memberikan informasi berharga bagi pelaku usaha, investor, dan masyarakat luas dalam melihat peluang serta tantangan.

Tahun 2023 dan 2024 merupakan periode krusial yang menandai fase pemulihan dan adaptasi menuju pertumbuhan yang lebih berkelanjutan. Berbagai faktor eksternal, seperti fluktuasi harga komoditas global, dinamika ekonomi nasional, dan perubahan iklim, turut memberikan warna pada perjalanan ekonomi kota ini. Di sisi internal, upaya Pemerintah Kota Padang Panjang dalam

mendorong investasi, meningkatkan daya saing UMKM, mengembangkan sektor pariwisata, serta memperkuat ketahanan pangan, menjadi pendorong utama yang perlu dicermati kinerjanya. Berikut dijelaskan capaian kinerja makro daerah Kota Padang Panjang Tahun 2023 dan 2024 sebagai landasan dalam perumusan kebijakan ekonomi pada perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah tahun 2025.

Tabel III.1 ... Capaian Kinerja Makro Kota Padang Panjang Tahun 2023-2024

No	Indikator	Realisasi	
		2023	2024
1	2	3	4
1.	Pertumbuhan ekonomi (%)	4,84	4,52
2	PDRB Perkapita (Rp juta)		
3	ADHK	49,12	50,63
4	ADHB	76,31	80,01
5.	Tingkat Kemiskinan (%)	5,24	5,31
6.	Tingkat Pengangguran Terbuka (%)	5,49	4,94
7.	Indeks Pembangunan Manusia	79,76	80,60
8.	Angka Harapan Hidup (tahun)	74,24	74,24
9.	Harapan Lama Sekolah (tahun)	15,29	15,47
10.	Rata-Rata Lama Sekolah (tahun)	11,94	12,00
11.	Pengeluaran Per Kapita (Rp.ribu)	11.310	11.840
12.	Indeks Gini	0,273	0,266

Dari tabel diatas terlihat bahwa pertumbuhan Ekonomi 2023 adalah 4,84% dan turun menjadi 4,52% pada tahun 2024. Terjadi perlambatan pertumbuhan ekonomi pada 2024, dipengaruhi oleh tekanan ekonomi nasional dan global. PDRB Per Kapita ADHK tahun 2023 adalah Rp49,12 juta naik menjadi Rp50,63 juta pada tahun 2024 sedangkan PDRB Per Kapita ADHK tahun 2023 sebesar Rp76,31 juta naik menjadi Rp80,01 juta pada tahun 2024. Peningkatan ini menunjukkan kenaikan daya beli rata-rata penduduk.

Sementara itu, tingkat kemiskinan tahun 2023 sudah mencapai 5,24% namun sedikit naik di tahun 2024 menjadi 4,86%. Kenaikan ini menunjukkan tantangan penanggulangan kemiskinan, terutama di sektor informal dan rumah tangga rentan yang terdampak perlambatan ekonomi sehingga diperlukan penguatan program perlindungan sosial dan pemberdayaan ekonomi produktif. Disisi lain, tingkat pengangguran terbuka tahun 2023 adalah 5,49% dan turun (membaik) menjadi 4,94%. Penurunan TPT ini mengindikasikan **penyerapan** tenaga kerja yang lebih baik,didorong oleh semakin meningkatkan upaya peningkatan kapastias dan penyaluran tenaga kerja melalui kerjasama dengan Balai Pelatihan Kerja, Bursa Kerja Khusus, pelaksanaan job fair dan lain-lain.

Capaian indikator Indeks Pembangunan Manusia (IPM) tahun 2023 adalah 79,76 dan naik cukup signifikan pada tahun 2024 menjadi 80,60

menunjukkan kemajuan signifikan pada dimensi pendidikan, kesehatan, dan daya beli sejalan dengan peningkatan Harapan Hidup (74,64 tahun) dan Harapan Lama Sekolah (15,47 tahun). Gini rasio tahun 2024 juga lebih baik dibanding tahun 2023 (dari 0,273 menjadi 0,266 mengindikasikan pemerataan ekonomi yang lebih baik dibanding tahun sebelumnya). Konsumsi Rumah Tangga yang dilihat dari pengeluaran per kapita meningkat dari Rp11.310 ribu (2023) menjadi Rp11.840 ribu (2024). Hal ini menunjukkan daya beli masyarakat masih terjaga, meski tekanan inflasi dan biaya hidup mungkin mempengaruhi kelompok menengah bawah.

Secara umum peningkatan IPM, pengeluaran per kapita, dan penurunan pengangguran menunjukkan fondasi ekonomi dan kualitas hidup yang relatif membaik. Namun demikian tantangan yang perlu menjadi perhatian khusus adalah perlambatan pertumbuhan ekonomi dan sedikit naiknya angka kemiskinan.

3.1.2 Prospek Perekonomian Daerah Tahun 2025

Ketidakpastian global yang semakin kompleks menjadi latar belakang penting dalam memproyeksikan arah perekonomian Kota Padang Panjang tahun 2025. Sepanjang 2023 hingga awal 2025, perekonomian global berada dalam tekanan akibat risiko ekonomi, keuangan, geopolitik, dan lingkungan. Pertumbuhan global stagnan pada angka 3,2 persen, dan perdagangan dunia mengalami kontraksi akibat tingginya suku bunga, ketegangan geopolitik seperti konflik Rusia-Ukraina dan eskalasi di Timur Tengah, serta pergeseran pola konsumsi. Tekanan global ini turut berdampak ke dalam negeri. Meskipun begitu, perekonomian Indonesia tetap menunjukkan ketahanan dengan pertumbuhan sebesar 4,87 persen pada triwulan I-2025. Sektor pertanian, industri pengolahan, dan perdagangan menjadi pendorong utama, didukung oleh konsumsi rumah tangga dan peningkatan ekspor. Kondisi ini menciptakan lingkungan makro yang cukup kondusif bagi daerah-daerah untuk tetap tumbuh, meskipun dengan berbagai penyesuaian.

Di Sumatera Barat, pertumbuhan ekonomi pada tahun 2024 tercatat sebesar 4,36 persen, melambat dibandingkan 2023 (4,62 persen). Perlambatan ini didorong oleh kinerja sektor pertanian yang menurun akibat bencana alam serta penurunan aktivitas transportasi dan konsumsi rumah tangga. Namun, daya tahan ekonomi daerah tetap terjaga, ditandai dengan membaiknya kondisi ketenagakerjaan dan menurunnya angka kemiskinan. Inflasi juga terkendali, dan pertumbuhan konsumsi masyarakat serta pariwisata menjadi penopang utama. Dinamika ini menjadi kerangka penting dalam memahami kondisi Padang Panjang sebagai salah satu kota strategis di provinsi ini.

Sebagai bagian dari struktur ekonomi Sumatera Barat, Kota Padang

Panjang diproyeksikan akan mengalami pertumbuhan positif pada tahun 2025, meskipun dengan sejumlah tantangan. Pada tahun 2024, pertumbuhan ekonomi kota ini tercatat sebesar 4,52%, lebih tinggi dari rata-rata provinsi (4,36%), namun masih di bawah nasional (5,03%). Sektor perdagangan, jasa pendidikan, transportasi, dan pertanian menjadi tulang punggung ekonomi kota, di mana sektor jasa terus menunjukkan peran dominan seiring posisi strategis kota sebagai pusat pendidikan dan perlintasan antarwilayah.

Salah satu tantangan utama adalah dampak dari bencana alam yang mengganggu aktivitas ekonomi pada akhir 2023 hingga awal 2024. Meski demikian, prospek pemulihan ekonomi terlihat cukup kuat, seiring dengan membaiknya kondisi ketenagakerjaan. Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) di Padang Panjang turun dari 5,49% pada tahun 2023 menjadi 4,94% pada tahun 2024. Penurunan ini menunjukkan adanya keberhasilan dalam penciptaan lapangan kerja baru, didukung oleh aktivitas sektor jasa dan perdagangan yang kembali tumbuh.

Dari sisi sosial, perbaikan kesejahteraan penduduk juga menjadi sinyal positif. Menurunnya angka kemiskinan di Sumatera Barat memberi gambaran bahwa distribusi pertumbuhan ekonomi mulai lebih merata, termasuk di kota-kota kecil seperti Padang Panjang. Hal ini memberikan dasar optimisme bahwa pada tahun 2025, Kota Padang Panjang memiliki peluang untuk mempertahankan atau bahkan meningkatkan laju pertumbuhan ekonomi, asalkan didukung oleh stabilitas makro, mitigasi risiko bencana, serta intervensi kebijakan yang mendorong investasi dan daya saing sektor unggulan.

Berdasarkan kondisi dan situasi perekonomian daerah Kota Padang Panjang dan melihat prospek perekonomian global dan Nasional Tahun 2024 dan triwulan I tahun 2025, maka percepatan transformasi ekonomi dan investasi daerah menjadi hal yang mendasar yang harus diwujudkan pada Tahun 2025 guna meningkatkan stabilitas perekonomian dan daya saing daerah. Fokus kebijakan perekonomian Kota Padang Panjang tahun 2025 adalah :

1. Peningkatan Produktivitas Sektor Unggulan seperti Perdagangan besar dan eceran, Reparasi mobil dan sepeda motor, Kepariwisata, termasuk penyediaan akomodasi dan makan minum, Industri pengolahan, Transportasi dan pergudangan, Informasi dan komunikasi, Pertanian, kehutanan, dan perikanan, Jasa pendidikan
2. Pemberdayaan UMKM dan Investasi, Pemko Padang Panjang menargetkan investasi baru sebesar Rp35 miliar pada tahun 2025. Untuk mencapai target tersebut, pemerintah akan melakukan mempermudah proses perizinan usaha, termasuk penerbitan Nomor Induk Berusaha (NIB) secara langsung setelah persyaratan terpenuhi, menyediakan layanan perizinan online dan jemput bola untuk masyarakat dan kelompok rentan, meningkatkan

sosialisasi dan bimbingan teknis bagi pelaku UMKM untuk memahami regulasi dan peraturan terbaru terkait perizinan usaha. Sektor pertanian akan tetap dioptimalkan, dengan fokus pada peningkatan nilai tambah untuk mendukung sektor industri lainnya.

3. Peningkatan Infrastruktur dan Layanan Publik yang meliputi: Revitalisasi Pasar Sayur Bukik Surungan menjadi pasar sayur yang unggul, pembenahan pasar pusat, menciptakan wisata baru, satu kelurahan satu even

Dalam memproyeksikan prospek perekonomian Kota Padang Panjang tahun 2025, prediksi dilakukan tidak hanya berdasarkan asumsi-asumsi dari kondisi tahun 2023 dan 2024, tetapi juga mempertimbangkan dampak yang ditimbulkan terhadap perekonomian global dan regional. Hal ini dilakukan untuk menilai sejauh mana target pertumbuhan ekonomi yang telah direncanakan sebelumnya dapat dicapai. Berdasarkan evaluasi terhadap perkembangan ekonomi makro yang telah dijelaskan pada bagian sebelumnya serta dalam Bab II, dilakukan pula penyesuaian terhadap target beberapa indikator makro. Koreksi ini mempertimbangkan arahan dari Pemerintah Provinsi Sumatera Barat guna mendukung pencapaian target makro baik di tingkat provinsi maupun nasional. Sebagai bagian dari proses perencanaan dan penyesuaian dalam perubahan RKPD Tahun 2025, maka ditetapkan asumsi indikator-indikator makro ekonomi daerah. Secara ringkas, perkembangan indikator makro Kota Padang Panjang selama tahun 2023 hingga 2024, serta proyeksi tahun 2025, disajikan dalam tabel berikut:

Tabel 1.1
Perubahan Asumsi Indikator Makro Daerah Kota Padang Panjang

No	Indikator	Realisasi		Target 2025		Ket
		2023	2024	RKPD Awal	RKPD Perubahan	
1	2	3	4	5	6	7
1.	Pertumbuhan ekonomi (%)	4,84	4,52	5,60	5,15	turun
2	PDRB Perkapita (Rp juta)					
3	ADHK	49,12	50,63	52,56	51,83	Turun
4	ADHB	76,31	80,01	89,32	84,24	Turun
5.	Tingkat Kemiskinan (%)	5,24	5,31	4,86	4,71	Turun
6.	Tingkat Pengangguran Terbuka (%)	5,49	4,94	4,48	4,43	Tetap
7.	Indeks Pembangunan Manusia	79,76	80,60	80,78	81,5	Tetap
8.	Angka Harapan Hidup (tahun)	74,24	74,24	74,51	76,17	Tetap
9.	Harapan Lama Sekolah (tahun)	15,29	15,47	15,42	15,67	Naik
10.	Rata-Rata Lama Sekolah (tahun)	11,94	12,00	12,14	12,16	Tetap
11.	Pengeluaran Per Kapita (Rp.ribu)	11.310	11.840	12.010	11.643	turun
12.	Indeks Gini	0,273	0,266	0,269	0,266	Tetap

Sumber: BPS Provinsi Sumatera Barat, 2025

RKPD 2025

Penyesuaian proyeksi Indikator Makro Kota Padang Panjang untuk tahun 2025 dilakukan dengan mempertimbangkan beberapa hal diantaranya, Pertama,

kebijakan fiskal pemerintah pusat melalui UU APBN 2025 membatasi ruang gerak daerah yang harus sinergi dengan ASTA CITA RPJMD 2025-2029. Disamping itu, tingkat ketergantungan daerah terhadap alokasi Dana Transfer Umum (DTU) sebesar 80,20% hal ini menunjukkan tingkat kemandirian daerah yang masih rendah (Kapasitas Fiskal Rendah (1,103 tahun 2024)) mengurangi kapasitas belanja infrastruktur pendukung pariwisata dan pendidikan. Kedua, perlambatan ekonomi regional Sumatera Barat (akibat penurunan investasi sektor pertambangan dan inflasi pangan, melemahkan daya beli masyarakat, berimplikasi pada konsumsi wisatawan domestik dan permintaan jasa pendidikan. Ketiga, tingkat kemiskinan lokal yang masih tinggi menciptakan multiplier effect negatif. Dalam konteks ini, target-target yang telah disesuaikan merupakan proyeksi realistis yang mempertimbangkan trade-off antara potensi sektor unggulan (pendidikan-pariwisata) dan keterbatasan fiskal-regional.

3.2. Perubahan Arah Kebijakan Keuangan Daerah

Keuangan daerah merupakan komponen yang sangat penting dalam perencanaan pembangunan, sehingga analisis mengenai kondisi dan proyeksi keuangan daerah perlu dilakukan untuk mengetahui kemampuan daerah dalam mendanai rencana pembangunan dan kesadaran untuk secara efektif memberikan perhatian kepada isu dan permasalahan strategis secara tepat. Dengan melakukan analisis keuangan daerah yang tepat akan menghasilkan kebijakan yang efektif dalam pengelolaan keuangan daerah. Keuangan daerah meliputi penerimaan atau pendapatan daerah, pengeluaran daerah atau belanja daerah dan pembiayaan daerah. Keuangan daerah dikelola dengan menganut azas tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan rasa keadilan, kepatutan dan manfaat untuk masyarakat.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 mengatur tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah. Kewenangan yang diberikan setiap daerah otonom baik ditingkat Provinsi maupun ditingkat Kabupaten dan Kota memiliki hak dan kewenangan yang telah diberikan pemerintah pusat untuk mengelola keuangan daerahnya masing - masing. Tujuannya antara lain agar setiap daerah dapat mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan. Untuk lebih mendekatkan pelayanan pemerintah kepada masyarakatnya, menciptakan alokasi sumber daya nasional yang efektif dan efisien, perlu diatur tata kelola hubungan keuangan antara pemerintah pusat dan pemerintahan daerah yang adil, selaras, dan akuntabel berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Pengelolaan Transfer ke daerah (TKD) salah satunya bertujuan

mendorong perbaikan kualitas belanja yang efisien dan efektif, melalui TKD yang berbasis kinerja. Instrumen TKD sendiri terdiri dari Dana Bagi Hasil (DBH), Dana Alokasi Khusus (DAK), Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Otsus, Dana Desa, dan Insentif Fiskal. Pada perubahan APBD Tahun Anggaran 2025, kebijakan pendapatan dan belanja serta pembiayaan daerah tetap mengacu kepada Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Pusat dan Daerah. Tujuan dari Undang-Undang Hubungan Keuangan Pusat dan Daerah adalah untuk mewujudkan alokasi sumber daya nasional yang efisien dan efektif melalui Hubungan Keuangan Pusat dan Daerah yang transparan akuntabel dan berkeadilan, guna pemerataan kesejahteraan masyarakat di seluruh pelosok NKRI dengan beberapa strategi guna pencapaian tujuan yaitu:

1. Memperkuat Sistem Perpajakan Daerah;

Mendorong kemudahan berusaha di daerah dengan mengurangi retribusi atas layanan wajib yang akan memberi peluang tambahan pajak sesuai persentase bagi daerah antara Provinsi dan Kabupaten/Kota memberi bersinergi antara Pajak Pusat dan Daerah.

2. Meminimumkan Ketimpangan Vertikal dan Horizontal;

Mereformulasikan Dana Alokasi Umum (DAU) agar lebih presisi, mendorong kinerja dan memperhatikan karakteristik daerah. Dana Bagi Hasil (DBH) yang berkeadilan, mendorong kinerja dengan memperhatikan eksternalitas. Memfokuskan Dana Alokasi Khusus (DAK) untuk prioritas nasional, menintegrasikan pengelolaan TKD berbasis kinerja serta perluasan skema pembiayaan daerah secara terkendali dan hati-hati, sehingga terbentuknya Dana Abadi Daerah untuk pemanfaatan lintas generasi yang bersinergi antar sumber pendanaannya.

3. Meningkatkan Kualitas Belanja Daerah;

Penguatan disiplin dan sinergi belanja daerah serta peningkatan kapasitas Sumber Daya Manusia Daerah, penguatan pengawasan internal di daerah, TKD diarahkan untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik.

4. Harmonisasi Belanja Pusat dan Daerah.

Fungsi Transfer TKD yang sebagai counter-cyclical policy memberi keselarasan dalam kebijakan fiskal Pusat dan Daerah. Pengendalian defisit APBD melalui refocusing APBD, untuk itu kebutuhan belanja pembangunan daerah selalu mempertimbangkan kapasitas fiskal daerah sebagai salah satu penopang strategis dalam implementasi RKPD, yang akan selalu berdampingan dengan sumber-sumber pendanaan Non APBD seperti APBN, hibah dan swadaya masyarakat.

Pemerintah Kota Padang Panjang melakukan perubahan RKPD Tahun Anggaran 2025 disebabkan adanya perbedaan asumsi Kebijakan Umum APBD, yaitu perubahan rencana pendapatan, perubahan rencana belanja, dan perubahan rencana penggunaan/pemanfaatan Sisa Lebih/Kurang Perhitungan Anggaran (SiLPA) APBD tahun sebelumnya. Perubahan rencana pendapatan disebabkan adanya perubahan target PAD dan perubahan alokasi dana transfer pemerintahan pusat. Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 bahwa Perubahan APBD dapat dilakukan apabila terjadi:

1. Perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi Kebijakan Umum APBD (KUA);
2. Keadaan yang menyebabkan harus dilakukan pergeseran anggaran antar unit organisasi, antar kegiatan, dan antar jenis belanja;
3. Keadaan yang menyebabkan saldo anggaran lebih tahun sebelumnya harus digunakan dalam tahun berjalan;
4. Keadaan darurat; dan
5. Keadaan luar biasa.

Perubahan rencana belanja daerah meliputi penambahan maupun penyesuaian alokasi belanja baik melalui penggeseran anggaran antar belanja maupun antar program dan kegiatan. Perubahan rencana belanja dipengaruhi adanya perubahan peraturan perundang-undangan atau pedoman teknis belanja tertentu, seperti DAK, DBHCHT, dan dipengaruhi juga ketersediaan dana yang bersumber dari peningkatan pendapatan maupun penerimaan SiLPA (Sisa Lebih Perhitungan Anggaran) tahun sebelumnya.

3.2.1. Arah Kebijakan Pendapatan Daerah

Pendapatan Daerah terdiri dari Pendapatan Asli Daerah, Pendapatan Transfer, dan Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah. Pendapatan Asli Daerah meliputi Pajak Daerah, Retribusi Daerah, Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan dan Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah. Pendapatan Transfer terdiri dari pendapatan transfer dari pemerintah pusat dan pendapatan transfer antar daerah. Sedangkan Lain-lain Pendapatan Daerah yang sah (berdasarkan tabel, komponen ini tidak memiliki nilai atau tidak dijabarkan lebih lanjut di ringkasan tabel utama, namun narasi awal menyebutkan bersumber dari dana kapitasi JKN pada FKTP).

Memenuhi amanat Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 mengamanatkan bahwa Jenis Pajak dan Retribusi, Subjek Pajak dan Wajib Pajak, Subjek Retribusi dan Wajib Retribusi, objek Pajak dan Retribusi, dasar pengenaan Pajak, tingkat penggunaan jasa Retribusi, saat terutang Pajak, wilayah pemungutan Pajak, serta tarif Pajak dan Retribusi, untuk seluruh jenis Pajak dan Retribusi ditetapkan dalam 1 (satu) Perda dan menjadi dasar pemungutan Pajak dan Retribusi di Daerah, maka Pemerintah Kota Padang

Panjang menetapkan Perda Nomor 1 Tahun 2024 Peraturan Daerah tentang Pajak Daerah dan retribusi Daerah sebagai dasar pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah di Kota Padang Panjang.

Oleh sebab itu dilakukan beberapa penyesuaian seiring dengan perkembangan yang terjadi dalam semester pertama tahun anggaran 2024 serta penyesuaian dilakukan karena terdapat beberapa target pendapatan asli daerah (PAD) yang realisasinya diprediksi berubah dari target yang ditetapkan pada Pergeseran I APBD 2025. Pada jenis pendapatan Lain-lain PAD yang sah diprediksi mengalami kenaikan, sementara Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan diprediksi mengalami penurunan. Untuk Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, tidak ada perubahan target antara Pergeseran I APBD 2025 dan P.RKPD 2025.

Untuk meningkatkan pendapatan maka kebijakan umum pengelolaan pendapatan daerah diarahkan sebagai upaya untuk meningkatkan kapasitas fiskal daerah. Upaya tersebut dilakukan melalui peningkatan intensitas dan efektifitas program intensifikasi dan ekstensifikasi pengelolaan sumber-sumber pendapatan daerah dengan mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan dan memperhatikan aspek kewenangan, potensi daerah, aspek keadilan dan kepatutan, serta kemampuan masyarakat sebagaimana Perda Nomor 1 Tahun 2024.

Secara keseluruhan pendapatan daerah pada Perubahan RKPD Tahun 2025 mengalami peningkatan sebesar Rp 824.815.286 atau 0,144 persen, yakni dari Rp572.715.798.317 pada Pergeseran I APBD 2025 menjadi Rp573.540.613.603 pada Perubahan RKPD 2025. Peningkatan pendapatan ini terjadi karena penyesuaian target pada berbagai komponen pendapatan dengan memperhatikan realisasi pada Triwulan I tahun 2025, seperti peningkatan pada Lain-lain PAD yang sah dan Pendapatan Transfer Antar Daerah, yang diimbangi sebagian oleh penurunan pada Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat dan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan.

Pada kelompok Pendapatan Asli Daerah terjadi peningkatan sebesar Rp 5.114.153 yakni dari Rp112.737.235.317 pada Pergeseran I APBD 2025 menjadi Rp112.742.349.470 setelah perubahan atau naik 0,005 persen. Kenaikan ini terutama disebabkan oleh peningkatan pada objek Pendapatan Lain-lain PAD yang sah (bertambah Rp13.334.897), sedangkan objek Pajak Daerah dan Retribusi Daerah tidak mengalami perubahan target. Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan mengalami penurunan sebesar Rp 8.220.744.

Pada kelompok Pendapatan Transfer mengalami kenaikan sebesar Rp 819.701.133 atau naik sebesar 0,178 persen dari Rp 459.978.563.000 (pada Pergeseran I APBD 2025) menjadi Rp 460.798.264.133 (pada P.RKPD 2025)

dengan rincian sebagai berikut:

1. Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat turun sebesar Rp 3.364.781.120 atau turun 0,765 persen dari Rp 439.787.517.000 sebelum perubahan menjadi Rp 436.422.735.880, hal ini sesuai dengan Inpres Nomor 1 Tahun 2025 tentang Efisiensi Belanja Dalam Pelaksanaan Anggaran pendapatan dan Belanja Negara dan Anggaran pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025;
2. Pendapatan transfer antar daerah mengalami kenaikan sebesar Rp 4.184.482.253 atau 20,724 persen dari Rp 20.191.046.000 sebelum perubahan menjadi Rp 24.375.528.253 setelah perubahan yang berasal dari Pendapatan Bagi Hasil Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor sebesar Rp4.037.556.219, Pendapatan Bagi Hasil Pajak Air Permukaan Rp36.403.490 dan Pendapatan Bagi Hasil Pajak Rokok sebesar Rp110.522.544.

Untuk melihat gambaran umum perubahan Pendapatan Daerah Kota Padang Panjang Tahun Anggaran 2025 seperti terdapat pada Tabel di bawah ini:

Tabel 1.2
Perubahan Pendapatan Kota Padang Panjang Tahun 2025

URAIAN	RKPD 2025	APBD 2025	PERGESERAN I APBD 2025	PERUBAHAN RKPD 2025	BERTAMBAH/ (BERKURANG)	%
2	3	4	5	6	7=6-5	8=7/5
PENDAPATAN DAERAH	538.158.680.000	572.656.518.317	572.715.798.317	573.540.613.603	824.815.286	0,144
Pendapatan Asli Daerah (PAD)	117.293.681.000	112.737.235.317	112.737.235.317	112.742.349.470	5.114.153	0,005
Pajak daerah	23.862.970.000	20.372.697.142	20.372.697.142	20.372.697.142	-	-
Retribusi daerah	81.125.711.000	76.740.473.872	76.740.473.872	76.740.473.872	-	-
Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan	8.000.000.000	8.000.000.000	8.000.000.000	7.991.779.256	(8.220.744)	(0,103)
Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah	4.305.000.000	7.624.064.303	7.624.064.303	7.637.399.200	13.334.897	0,175
					-	
Pendapatan Transfer	420.864.999.000	459.919.283.000	459.978.563.000	460.798.264.133	819.701.133	0,178
Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	400.673.953.000	439.728.237.000	439.787.517.000	436.422.735.880	(3.364.781.120)	(0,765)
Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil (DBH)	8.119.004.000	8.355.761.000	8.355.761.000	8.341.473.000	(14.288.000)	(0,171)
Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Umum (DAU)	376.230.893.000	388.267.301.000	388.267.301.000	384.916.807.880	(3.350.493.120)	(0,863)
Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik	-	5.633.448.000	5.633.448.000	5.633.448.000	-	-
Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik	-	37.471.727.000	37.531.007.000	37.531.007.000	-	-
Insentif FISKAL	16.324.056.000	-	-	-	-	
Pendapatan Transfer Antar Daerah	20.191.046.000	20.191.046.000	20.191.046.000	24.375.528.253	4.184.482.253	20,724
					-	
Lain Lain Pendapatan Daerah yang Sah	-	-	-	-	-	
					-	

Sumber : BPKD Kota Padang Panjang, 2025

3.2.2. Arah Kebijakan Belanja Daerah

Perubahan Kebijakan Belanja Daerah dengan mempertimbangkan terjadinya perubahan target pendapatan daerah, maka dalam penyusunan Perubahan RKPD Tahun Anggaran 2025 sesuai dengan Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor: 900.1.1/640/SJ tanggal 11 Februari 2025 tentang Penyesuaian Arah Kebijakan Pembangunan Daerah Melalui Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah dan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 menyesuaikan arah kebijakan pembangunan dengan memperhatikan hal-hal sebagai berikut :

1. Memastikan Program/Kegiatan dan Sub Kegiatan kesesuaian dengan Visi, Misi dan Program Prioritas Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah terpilih, dan diselaraskan dengan rumusan Prioritas Pembangunan Daerah, serta didalamnya mengakomodir kebijakan Asta Cita Presiden dan Wakil Presiden yang menjadi Prioritas Nasional antara lain :
 - a) Penguatan SDM, Pendidikan dan Kesehatan;
 - b) Program Makan Bergizi Gratis (MBG);
 - c) Pemeriksaan Kesehatan Gratis
 - d) Pembentukan Koperasi Kelurahan Merah Putih
 - e) Pencegahan stunting dan kemiskinan ekstrim;
 - f) Pengendalian inflasi di daerah;
 - g) Peningkatan pertumbuhan perekonomian daerah;
 - h) Dukungan swasembada pangan; dan
 - i) Pengembangan industri kerajinan dan memfasilitasi dalam mempromosikan dan memasarkan hasil industri kerajinan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM)
2. Melakukan efisiensi Belanja Dalam Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2025 antara lain :
 - a) Membatasi belanja yang bersifat seremonial, kajian, studi banding, pencetakan, publikasi dan seminar/FGD;
 - b) Mengurangi belanja perjalanan dinas ;
 - c) Membatasi belanja honorarium melalui pembatasan jumlah tim dan besaran honorarium mengacu Peraturan Presiden mengenai Standar Harga Satuan Regional;
 - d) Mengurangi belanja yang bersifat pendukung dan tidak memiliki output yang terukur;
 - e) Memfokuskan alokasi anggaran belanja pada target kinerja pelayanan publik;
 - f) Lebih selektif dalam memberikan hibah langsung baik berupa uang, barang maupun jasa; dan
 - g) Melakukan penyesuaian belanja APBD Tahun Anggaran 2025 yang bersumber dari Dana Transfer ke Daerah.

3. Pemenuhan belanja BLUD RSUD, BLUD Puskesmas, belanja yang didanai dari DAK dan belanja-belanja yang wajib untuk ditambahkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
4. Untuk perubahan belanja pelaksanaan program, kegiatan dan sub kegiatan setiap OPD dilakukan evaluasi terhadap semua kegiatan yang telah direalisasikan serta melakukan efisiensi pada kegiatan yang belum dilaksanakan dan tidak memberikan kontribusi yang signifikan terhadap pencapaian target RPJMD
5. Penyesuaian belanja daerah berdasarkan hasil Pergeseran Anggaran Tahun 2025, dimana dilakukan efisiensi secara menyeluruh terhadap belanja-belanja yang tidak berkontribusi langsung terhadap pencapaian target kinerja daerah pada seluruh OPD yang belum direalisasikan sampai dengan akhir Triwulan I dikarenakan asumsi silpa pada APBD Tahun 2025 tidak tercapai.
6. Pemenuhan Asumsi Silpa yang tidak tercapai
7. Penganggaran kembali sisa DAK yang telah ditransfer ke kas daerah dari tahun 2028-2023

Perubahan/penyesuaian belanja yang dilakukan pada perubahan RKPD Tahun 2025 ini tetap mempertahankan kategori belanja bersifat wajib dan mengikat sebagaimana diamanatkan pada Permendagri 77 Tahun 2020 tentang Pedoman teknis Pengelolaan Keuangan daerah yakni:

- a. **Belanja wajib** : belanja yang harus dikeluarkan dalam rangka pemenuhan pelayanan dasar masyarakat (dalam hal ini adalah pencapaian target Standar Pelayanan Minimal pada 6 Bidang yaitu Pendidikan, Kesehatan, Pekerjaan Umum, Perumahan Rakyat, ketenteraman, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat dan Sosial)
- b. **Belanja mengikat** : belanja yang dibutuhkan secara terus menerus dan harus dialokasikan dengan jumlah yang cukup untuk keperluan setiap bulan dalam tahun anggaran yang berkenaan, seperti belanja pegawai, belanja barang dan jasa.

Secara keseluruhan perubahan Belanja Daerah Tahun 2025 mengalami penurunan sebesar Rp17.723.779.044 dari Rp597.715.798.317 pada Pergeseran I APBD Tahun 2025 menjadi Rp579.992.019.273 pada Perubahan RKPD 2025. Pengurangan belanja ini adalah untuk menutupi asumsi SiLPA yang tidak tercapai.

Pengurangan belanja terjadi pada Belanja Pegawai sebesar Rp49.703.076.434 dan Belanja Tidak Terduga sebesar Rp19.767.966.378,00. Untuk lebih jelasnya Belanja pada Perubahan RKPD Tahun 2025 dapat terlihat pada Tabel berikut:

Tabel 1.3
Perubahan Belanja Kota Padang Panjang Tahun 2024

NO	URAIAN	RKPD 2025	APBD 2025	PERGESERAN I APBD 2025	PERUBAHAN .RKPD 2025	BERTAMBAH/ (BERKURANG)	%
1	2	3	4	5	6	7=6-5	8=7/5
5	BELANJA DAERAH	561.658.680.000	597.656.518.317	597.715.798.317	579.992.019.272,94	(17.723.779.044)	(2,965)
5.1	BELANJA OPERASI	519.538.638.000	551.124.020.551	526.216.276.217	508.916.330.674	(17.299.945.543)	(3,288)
5.1.0 1	Belanja Pegawai	287.000.000.000	297.618.557.196	305.359.707.815	255.656.631.381	(49.703.076.434)	(16,277)
5.1.0 2	Belanja Barang dan Jasa	227.184.785.620	236.795.964.070	204.859.520.224	236.912.651.115	32.053.130.891	15,646
5.1.0 4	Belanja Subsidi	-	268.494.099	268.494.099	268.494.099	-	-
5.1.0 5	Belanja Hibah	3.853.852.380	7.656.991.136	7.206.554.916	7.556.554.916	350.000.000	4,857
5.1.0 6	Belanja Bantuan Sosial	1.500.000.000	8.784.014.050	8.521.999.163	8.521.999.163	-	-
5.2	BELANJA MODAL	40.120.042.000	45.532.497.766	50.731.555.722	68.975.688.599	18.244.132.877	35,962
	Belanja Modal Tanah	5.000.000.000	-	-	-	-	
5.2.0 2	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	9.000.000.000	17.205.858.440	15.786.562.385	18.616.562.385	2.830.000.000	17,927
5.2.0 3	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	10.000.000.000	16.009.258.500	18.287.062.900	29.895.015.777	11.607.952.877	63,476
5.2.0 4	Belanja Modal Jalan, Jaringan dan Irigasi	15.000.000.000	12.317.380.826	16.004.258.864	16.004.258.864	-	-
5.2.0 5	Belanja Modal aset Tetap lainnya	1.120.042.000	-	653.671.573	4.459.851.573	3.806.180.000	582,277
5.3	BELANJA TAK TERDUGA	2.000.000.000	1.000.000.000	20.767.966.378	1.500.000.000	(19.267.966.378)	(92,777)
5.3.0 1	Belanja Tidak Terduga	2.000.000.000	1.000.000.000	20.767.966.378	1.500.000.000	(19.267.966.378)	(92,777)
5.4	BELANJA TRANSFER	-	-	-	600.000.000	600.000.000	
5.4.2	Belanja Bantuan Keuangan	-	-	-	600.000.000	600.000.000	

Sumber : BPKD Kota Padang Panjang tahun 2025

Dari tabel tersebut diatas terjadi penambahan rincian belanja dimana pada APBD awal Tahun 2025 Belanja Bantuan Keuangan belum dianggarkan namun pada perubahan RKPD tahun 2025 dianggarkan sebesar Rp.600.000.000,- yang akan digunakan sebagai Bantuan Keuangan yang bersifat khusus kepada Pemerintah Provinsi Sumatera Barat yakni untuk biaya komite gratis bagi warga Padang Panjang pada jenjang SMA yang terdaftar dalam data DTKS.

3.2.3. Arah Kebijakan Pembiayaan Daerah

Penerimaan pembiayaan mengalami perubahan karena adanya penyesuaian SiLPA dengan hasil perhitungan pada Laporan Keuangan Pemerintah Kota Padang Panjang Audited. Pada tahun 2025 ini hasil proyeksi SiLPA tidak tercapai, di mana dari Rp25.000.000.000 yang telah ditetapkan (pada Pergeseran I APBD 2025), ternyata yang tercapai hanya Rp6.451.405.670 (proyeksi P.RKPD 2025). Ini berarti SiLPA yang tercapai adalah sebesar 25,81% dari yang ditetapkan, atau mengalami penurunan sebesar Rp18.548.594.330 (74,194%). Oleh sebab itu, pada perubahan RKPD tahun 2025 harus disesuaikan kembali dengan realisasi hasil audit BPK RI yang telah dilaksanakan pada tahun 2025 ini.

Secara lebih detail berkaitan dengan realisasi dan proyeksi pembiayaan daerah pada Perubahan RKPD tahun 2025 dapat dilihat pada Tabel berikut:

Tabel 1.4
Target Proyeksi Pembiayaan pada Perubahan RKPD Kota Padang Panjang
Tahun 2025

NO	URAIAN	RKPD 2025	APBD 2025	PERGESERAN APBD 2025	PERUBAHAN .RKPD 2025	BERTAMBAH/ (BERKURANG)	%
1	2	3	4	5	6	7=6-5	8=7/5
6	PEMBIAYAAN	25.000.000.000	25.000.000.000	25.000.000.000	6.451.405.670	(18.548.594.330)	(74,194)
6.1	PENERIMAAN PEMBIAYAAN DAERAH	25.000.000.000	25.000.000.000	25.000.000.000	6.451.405.670	(18.548.594.330)	(74,194)
6.1.0 1	Sisa lebih perhitungan anggaran tahun sebelumnya	25.000.000.000	25.000.000.000	25.000.000.000	6.451.405.670	(18.548.594.330)	(74,194)
	PENGELUARAN PEMBIAYAAN	-	-	-	-	-	
	Penyertaan Modal Daerah		-	-		-	
	PEMBIAYAAN NETTO	25.000.000.000	25.000.000.000	25.000.000.000	6.451.405.670	(18.548.594.330)	(74,194)
6.3	Sisa lebih perhitungan anggaran tahun bderkenan	25.000.000.000	25.000.000.000	25.000.000.000	6.451.405.670	(18.548.594.330)	(74,194)

Sumber : BPKD Kota Padang Panjang tahun 2025

Berdasarkan tabel tersebut di atas dapat dijelaskan bahwa penerimaan pembiayaan pada perubahan RKPD 2025 adalah sebesar Rp6.451.405.670, yang bersumber dari SiLPA tahun 2024 sesuai dengan Laporan Keuangan Pemerintah Kota Padang Panjang Audited. Pengeluaran pembiayaan pada perubahan RKPD tidak dialokasikan. Sehingga, pembiayaan netto pada Perubahan RKPD ini adalah sebesar Rp6.451.405.670. Pembiayaan netto ini digunakan untuk menutup defisit Keuangan APBD Kota Padang Panjang pada perubahan tahun 2025 agar rencana kerangka keuangan pada perubahan RKPD Kota Padang Panjang perubahan Tahun 2025 akan berimbang.

BAB IV

SASARAN DAN PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH

Sasaran pembangunan RKPD merupakan turunan dari sasaran RPJMD, yang menerjemahkan tujuan dari visi dan misi kepala daerah terpilih, kemudian menjadi arah kebijakan serta pedoman dalam menyusun prioritas dan sasaran pembangunan RKPD.

Tahun 2025 merupakan tahap pembangunan kedua dari RPD Kota Padang Panjang Tahun 2024-2026. Akan tetapi, dengan dilaksanakannya pemilihan kepala daerah secara serentak pada tahun 2024 dan pelantikan serentak kepala daerah terpilih pada awal tahun 2025, maka tahun 2025 ini menjadi awal dari rencana pembangunan jangka menengah daerah periode tahun 2025-2029.

Mengingat bahwa perencanaan pembangunan daerah merupakan bagian integral dari perencanaan pembangunan nasional, maka penyusunan dokumen perencanaan pembangunan daerah harus selaras dengan dokumen perencanaan nasional yang mencakup penyelarasan kinerja dan periodenya. Hal ini dipertegas dengan diterbitkannya Instruksi Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025-2029.

Surat edaran Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor: 900.1.1/640/SJ tentang Penyesuaian Arah Kebijakan Pembangunan Daerah Melalui Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah dan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025, menginstruksikan pemerintah daerah untuk melakukan penyesuaian arah kebijakan pembangunan daerah dengan visi, misi, dan program kepala daerah dan wakil kepala daerah terpilih, guna memastikan kesesuaian penyelenggaraan pembangunan daerah dan dengan visi, misi, dan program kepala daerah dan wakil kepala daerah terpilih, serta untuk menyinergikan program Asta Cita Presiden dan Wakil Presiden.

Menyikapi hal-hal tersebut, maka perubahan RKPD Kota Padang Panjang Tahun 2025 dilaksanakan dengan mempedomani RPJMD Kota Padang Panjang tahun 2025-2029, yang diselaraskan dengan RPJPD Kota Padang Panjang Tahun 2025-2045 dan program Asta Cita Presiden dan Wakil Presiden, dengan tetap memperhatikan tema atau isu pembangunan nasional, serta dengan memperhatikan hasil evaluasi pelaksanaan RKPD sampai dengan triwulan I Tahun 2025.

4.1. Tujuan Dan Sasaran Pembangunan Daerah

Tahun 2025 merupakan tahun pertama dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Padang Panjang Tahun 2025-2029. Menindaklanjuti surat edaran Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia tentang penyesuaian arah kebijakan pembangunan daerah dengan visi, misi, dan program. kepala daerah dan wakil kepala daerah terpilih, maka Perubahan RKPD Kota Padang Panjang Tahun 2025 disusun dengan mengacu kepada visi, misi, serta program pembangunan kepala daerah dan wakil kepala daerah terpilih.

Visi pembangunan jangka menengah Kota Padang Panjang Tahun 2025-2029 adalah **“PADANG PANJANG KOTA SERAMBI MEKAH YANG MAJU, SEJAHTERA DAN BERMARWAH”**.

Penjabaran dari arti Visi Padang Panjang Kota Serambi Mekah yang Maju, Sejahtera, dan Bermarwah adalah sebagai berikut :

- Maju** : Memiliki makna bahwa pembangunan yang akan dicapai adalah pembangunan yang pesat dalam berbagai aspek, seperti ekonomi, infrastruktur, pendidikan, kesehatan yang benar-benar dirasakan manfaatnya. Yaitu dalam bentuk Memiliki kualitas SDM yang tangguh dan inovatif, ketahanan ekonomi yang tinggi, infrastruktur yang memadai didukung adopsi teknologi yang mendorong inovasi, tata kelola pemerintahan yang baik berintegritas dalam penyediaan layanan publik berkualitas. Padang Panjang tumbuh dengan ekonomi yang stabil dan merata ditandai dengan peningkatan sektor unggulan yang berdaya saing dan memiliki nilai tambah.
- Sejahtera** : Adanya perbaikan kesejahteraan rakyat yang lebih baik, merata dan berkeadilan. Pembangunan kota diselenggarakan dalam semangat mewujudkan masyarakat kota yang berdaya / mandiri / berdaulat yang ditandai dengan akses setiap individu terhadap pemenuhan kebutuhan dasar seperti pendidikan, kesehatan, dan perumahan yang layak. Infrastruktur kota mendukung kemajuan ekonomi yang inklusif, menciptakan lapangan kerja dan kesempatan ekonomi bagi semua warga. Selain itu, terjalin hubungan sosial di antara masyarakat.
- Bermarwah** : Kota yang menjunjung tinggi martabat, kehormatan, dan integritas dalam setiap aspek kehidupan masyarakatnya dan pemerintahan yang berlandaskan nilai-nilai luhur agama, kearifan lokal dan adat istiadat berfalsafah Adat Basandi Syarak, Syarak Basandi Kitabullah. Keadilan,

kesetaraan, dan kemanusiaan dijunjung tinggi yang mencerminkan kesadaran kolektif masyarakat akan pentingnya hidup harmonis dan beradab

Dalam upaya mencapai Visi “PADANG PANJANG KOTA SERAMBI MEKAH YANG MAJU, SEJAHTERA, DAN BERMARWAH”, dan dengan memperhatikan perubahan paradigma pembangunan Nasional, Provinsi dan isu-isu strategis serta kondisi yang akan dihadapi Kota Padang Panjang pada masa yang akan datang maka dirumuskanlah 5 (lima) misi yang akan menjadi panduan dalam penyusunan tujuan pembangunan. Adapun misi pembangunan Kota Padang Panjang tahun 2025-2029 adalah sebagai berikut.

- ❖ **Misi 1** : Mewujudkan Sumber Daya Manusia (SDM) yang Berkualitas, Kreatif dan Inovatif, Berakhlak dan Berdaya Saing Tinggi
- ❖ **Misi 2** : Meningkatkan Perekonomian Daerah yang berkelanjutan berbasis Potensi Lokal
- ❖ **Misi 3** : Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan yang Profesional, Transparan, Akuntabel, Inovatif, Responsif dan Melayani
- ❖ **Misi 4** : Mewujudkan Masyarakat Kota Padang Panjang yang Rukun, Aman, Berbudaya dan Berkarakter Berbasis Nilai Agama, Adat Istiadat dan Kearifan Lokal
- ❖ **Misi 5** : Mewujudkan Pemerataan Pembangunan Infrastruktur dan Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup Untuk Menjadikan Padang Panjang Kota Hijau Berkelanjutan

Guna mengakomodir dan menyelaraskan dengan tujuan dan sasaran pembangunan yang tercantum dalam RPJMD Kota Padang Panjang Tahun 2025-2029, tujuan dan sasaran pembangunan Kota Padang Panjang Tahun 2025 disesuaikan kembali dengan tetap memperhatikan hasil evaluasi pelaksanaan RKPD sampai dengan Triwulan I tahun 2025 dalam menentukan target pembangunan yang ingin dicapai.

Di dalam dokumen RPJMD Kota Padang Panjang tahun 2025-2029 telah dirumuskan 6 (enam) tujuan dengan 19 (sembilan belas) sasaran pembangunan daerah. Selanjutnya, dalam rangka pencapaian sasaran pembangunan tersebut, disusun strategi sebagai kerangka kerja yang akan ditempuh oleh seluruh perangkat daerah di Kota Padang Panjang yang berisikan program prioritas untuk mewujudkan tujuan dan sasaran pembangunan yang telah ditetapkan.

Tujuan dan sasaran pembangunan Kota Padang Panjang Tahun 2025 dapat dilihat pada tabel berikut ini.

Tabel 4.1
Tujuan, Sasaran dan Strategi Pembangunan Kota Padang Panjang Tahun 2025

No	Tujuan/Sasaran	Strategi	
T.1	Terwujudnya Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas dan Berdaya Saing		
S.1.1	Meningkatnya Kualitas Pendidikan Masyarakat	1	Meningkatkan pengembangan mutu dan manajemen pendidikan
		2	Meningkatkan akses pendidikan bagi masyarakat
S.1.2.	Meningkatnya Derajat Kesehatan masyarakat	1	Meningkatkan layanan primer kesehatan masyarakat
		2	Pengembangan Layanan Unggulan di RSUD
		3	Meningkatkan upaya percepatan penurunan stunting
		4	Meningkatkan Layanan Pencegahan Penyakit.
S.1.3	Meningkatnya Kesempatan dan Produktivitas Tenaga Kerja	1	Peningkatan kualitas tenaga kerja melalui pelatihan pendidikan vokasi
		2	Membangun jejaring global dalam peningkatan kesempatan kerja
S.1.4.	Meningkatnya Peran Pemuda Dalam Pembangunan dan Prestasi Olah Raga	1	Pengembangan sarana prasarana pendukung kegiatan kepemudaan
		2	Peningkatan kapasitas pemuda dalam pembangunan
		3	Peningkatan kualitas pembinaan atlet sejak usia dini
		4	Peningkatan manajemen dan kerjasama pengelolaan atlet daerah
S.1.5.	Meningkatnya Literasi Masyarakat	.1	Intensifikasi literasi digital masyarakat Kota Padang Panjang.
		2	Peningkatan sarana dan prasarana pendukung perpustakaan digital
S.1.6.	Meningkatnya Upaya Pembangunan dan Kesetaraan Gender	1	Penguatan layanan kesejahteraan keluarga fokus pada peningkatan aksesibilitas dan kualitas layanan kesehatan, pendidikan, dan ekonomi bagi keluarga
		2	Peningkatan upaya pemberdayaan keluarga dalam pembangunan
		3	Peningkatan upaya perlindungan hukum terhadap perempuan dan anak
		4	Peningkatan upaya kesadaran masyarakat terhadap pentingnya kesetaraan gender
T.2	Terwujudnya Pertumbuhan Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan		
S.2.1	Meningkatnya Pertumbuhan Ekonomi dan Ketahanan Pangan Berbasis Potensi Lokal	1	Pengembangan kewirausahaan
		2	Pengembangan usaha ekonomi kreatif
		3	Peningkatan pengembangan dan promosi pariwisata
		4	Peningkatan sektor pertanian dan peternakan

No	Tujuan/Sasaran	Strategi	
		5	Pengembangan industri pengolahan, pertanian, peternakan pertambangan, makanan ringan
		6	Peningkatan daya saing koperasi dan UKM
S.2.2.	Meningkatkan Iklim Investasi yang Kompetitif	1	Meningkatkan kualitas pelayanan penanaman modal dan perizinan
		2	Meningkatkan promosi penanaman modal
		3	Meningkatkan kesempatan kerja bagi usia produktif
T.3	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Profesional, Transparan, Akuntabel, Inovatif, Responsif dan Melayani		
S.3.1	Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	1	Meningkatkan kualitas pelayanan publik
		2	Meningkatkan pelaksanaan Reformasi Birokrasi
		3	Meningkatkan akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan daerah
		4	Peningkatan pendapatan daerah
		5	Optimalisasi pemanfaatan tanah negara/eks tanah milik negara
S.3.2	Meningkatnya Implementasi Transformasi Digital	1	Peningkatan utilitas dan pemanfaatan Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK)
		2	Sinergitas kegiatan pembangunan TIK di Kabupaten/kota
		3	Sosialisasi untuk peningkatan literasi digital di lingkungan Pemerintah Daerah dan sektor publik
S.3.3	Meningkatnya Kualitas SDM ASN	1	Meningkatkan kapasitas dan kompetensi ASN
		2	Penataan ASN berdasarkan kompetensi / manajemen talenta
T.4	Terwujudnya Keamanan Melalui Internalisasi dan Aktualisasi Nilai Nilai Agama dan Budaya Dalam Kehidupan Masyarakat		
S.4.1.	Meningkatnya Internalisasi Nilai-nilai Agama dan Adat Dalam Masyarakat	1	Memperkuat karakter dan identitas masyarakat berbasis nilai agama
		2	Optimalisasi pelestarian nilai-nilai adat dan budaya
S.4.2	Meningkatnya Ketentraman dan Ketertiban Umum	1	Meningkatkan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat
		2	Penegakan peraturan perundang-undangan
T.5	Meningkatnya Perlindungan Sosial Masyarakat		
S.5.1	Meningkatnya Keluarga Berkualitas, Kesenjangan Gender dan Masyarakat Inklusif	1	Penyediaan wadah atau ruang bagi warga lansia dan disabilitas
		2	Meningkatkan upaya perlindungan perempuan dan anak

No	Tujuan/Sasaran	Strategi	
T.6	Meningkatkan Kualitas Infrastruktur dan Lingkungan Hidup yang Berkelanjutan		
S.6.1	Meningkatkan Pengembangan Infrastruktur yang Berkelanjutan	1	Penyediaan sarana fasilitas umum dan fasilitas sosial
		2	Pengembangan sistem transportasi perkotaan
		3	Pengembangan sistem air minum perkotaan
S.6.2	Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Lingkungan Hidup yang Berkelanjutan	1	Meningkatkan kualitas dan pengelolaan lingkungan hidup
		2	Optimalisasi pemanfaatan lingkungan hidup berkelanjutan
S.6.3	Resiliensi Terhadap Bencana dan Perubahan Iklim	1	Meningkatkan kesiapsiagaan daerah dalam menghadapi bencana
		2	Meningkatkan kemampuan masyarakat dalam penanggulangan bencana

Untuk mengukur ketercapaian tujuan dan sasaran pembangunan, ditetapkanlah 9 (sembilan) indikator tujuan dan 41 (empat puluh satu) indikator sasaran. Penetapan indikator tujuan dan sasaran yang akan menjadi indikator kinerja utama ini telah disesuaikan dengan RPJMD dan memperhatikan hasil evaluasi pelaksanaan RKPD sampai dengan Triwulan I Tahun 2025 sebagaimana terlihat pada tabel berikut ini.

Tabel 4.2
Indikator Kinerja Utama Kota Padang Panjang Tahun 2025

No	Tujuan	Sasaran	Indikator Tujuan / Sasaran	Satuan	Target Tahun 2025		
					RPJMD	RKPD Awal	RKPD Perubahan
1	2	3	4	5	7	8	9
1.	Terwujudnya Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas dan Berdaya Saing		Indeks Pembangunan Manusia	Indeks	80.78	80.78	80.78
		Meningkatnya Kualitas Pendidikan Masyarakat	Harapan Lama Sekolah	Tahun	15.48	15.42	15.48
			Rata-Rata lama Sekolah	Tahun	12.14	12.14	12.14
		Meningkatnya Derajat Kesehatan masyarakat	Umur Harapan Hidup	Tahun	74.51	74.64	74.51
			Prevalensi Stunting	%	9.39	12.6	9.39
		Meningkatnya kesempatan dan produktivitas tenaga kerja	Tingkat produktivitas tenaga kerja	(Rp. Juta/ Tenaga Kerja)	137.78	na	137.78
		Meningkatnya peran pemuda dalam pembangunan dan prestasi olah raga	Indeks Pembangunan Pemuda	Indeks	55.77	na	55.77
			Rasio Daya Saing Keolahragaan	Indeks	0.55	0.25	0.55
		Meningkatnya literasi masyarakat	Indeks pembangunan literasi masyarakat	%	97.88	na	97.88

No	Tujuan	Sasaran	Indikator Tujuan / Sasaran	Satuan	Target Tahun 2025		
					RPJMD	RKPD Awal	RKPD Perubahan
2	Terwujudnya Pertumbuhan Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan	Meningkatnya Upaya pembangunan dan kesetaraan gender	Indeks Pembangunan Gender (IPG)	Indeks	98.28	na	98.28
			Indeks Ketimpangan Gender (IKG)	Indeks	0.079	na	0.079
			Laju Pertumbuhan Ekonomi	%	5.6	5.6	5.6
			Tingkat Kemiskinan	%	3,68-4,23	4.86	4.86
			Gini Ratio	Indeks	0.262	0.269	0.262
		Meningkatnya pertumbuhan ekonomi dan ketahanan pangan berbasis Potensi Lokal	Rasio PDRB Industri Pengolahan	%	9.54	na	9.54
			Rasio PDRB Akomodasi Mamin	%	2.94	na	2.94
			Rasio PDRB Ekonomi Kreatif	%	5.17	na	5.17
			Rasio PDRB Perdagangan Besar, kecil dan Eceran	%	18.41	na	18.41
			Rasio PDRB Sektor Pertanian, kehutanan dan Perikanan	%	5.2	na	5.2
			Rasio Pajak Daerah terhadap PDRB	%	0.04	na	0.04
		Meningkatkan iklim investasi yang kompetitif	Pembentukan Modal Tetap Bruto	(% PDRB)	30.19	na	30.19
			Persentase peningkatan investasi atau nilai investasi	%	42	6	42
3	Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan yang Profesional, Transparan, Akuntabel, Inovatif, Responsif dan Melayani.		Indeks Reformasi Birokrasi	Indeks	78.66	70,10 (BB)	78.66
			Nilai Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah	Nilai	3.38	na	3.38
		Meningkatnya kualitas tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik	Indeks Pelayanan Publik	Indeks	4.2	na	4.2
			Indeks Reformasi Hukum	Indeks	96.82	na	96.82
			Indeks Kualitas Perencanaan Pembangunan Daerah	Indeks	73	na	73
			Indeks Inovasi Daerah	Indeks	Sangat Inovatif (81,55)	na	Sangat Inovatif (81,55)
			Indeks pengelolaan keuangan daerah	Indeks	68.4	71.5	68.4
		Meningkatnya implementasi transformasi digital	Indeks Transformasi Digital	Indeks	3,25	na	3,25
		Meningkatnya kualitas transparansi penyelenggaraan pemerintahan	Indeks Integritas Kota	Indeks	79.5	na	79.5
		Meningkatnya profesionalitas ASN	Indeks Profesionalitas ASN	Indeks	86.4	na	86.4
4	Terwujudnya Keamanan		Indeks Rasa Aman	Indeks	84.04	Aman (92.57)	84.04

No	Tujuan	Sasaran	Indikator Tujuan / Sasaran	Satuan	Target Tahun 2025		
					RPJMD	RKPD Awal	RKPD Perubahan
	Melalui Internalisasi dan Aktualisasi Nilai Nilai Agama dan Budaya Dalam Kehidupan Masyarakat	Meningkatnya internalisasi nilai-nilai Agama dan Adat dalam masyarakat	Indeks Kerukunan Umat Beragama (IKUB)	Indeks	80	na	80
			Indeks Pembangunan Kebudayaan (IPK)	Indeks	57,33-57,35	na	57,33-57,35
		Meningkatnya ketenteraman dan ketertiban umum	Persentase penurunan pelanggaran Perda	Indeks	26	na	26
	Meningkatnya Perlindungan Sosial Masyarakat		Angka PPKS	%	3.34	4.49	3.34
		Meningkatnya keluarga berkualitas, kesetaraan gender dan masyarakat inklusif	Indeks Pembangunan Keluarga (Ibangga)	Indeks	70	na	70
			Indeks Perlindungan Anak (IPA)	Indeks	82.36	na	82.36
5	Meningkatkan Kualitas Infrastruktur dan Lingkungan Hidup yang Berkelanjutan		Indeks Kualitas Layanan Infrastruktur (IKLI)	Indeks	74.41	92.90	
			Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)	Indeks	74.34	74.71	74.71
		Meningkatnya penyediaan dan pengelolaan infrastruktur berkualitas	IKLI KePUan	Nilai	96.8	98	98
			IKLI perkim	Nilai	96,92	100	96,92
			IKLI Perhubungan	Nilai	96,83	98	98
		Terpenuhinya akses hunian layak terjangkau dan berkelanjutan	Persentase Rumah Tangga dengan akses hunian layak dan terjangkau dan berkelanjutan	%	73.63	na	73.63
		Meningkatnya kualitas pengelolaan lingkungan hidup yang berkelanjutan	Indeks Kualitas Udara	Indeks	78,68*	92	78,68*
			Indeks Kualita Air	Indeks	72,47*	48.5	72,47*
			Indeks Kualitas Lahan	Indeks	69,51*	63	69,51*
		Resiliensi terhadap bencana dan perubahan iklim	Indeks Risiko Bencana (IRBI)	Indeks	113.2	na	113.2

4.2. Prioritas Pembangunan Daerah

Dalam rangka terwujudnya pembangunan yang terpadu dan bersinergi antara pembangunan nasional dan pembangunan daerah, diperlukan adanya sinkronisasi antara prioritas nasional dan daerah dengan memperhatikan visi dan misi serta prioritas pembangunan nasional dan daerah. Sehingga dalam penyusunan Perubahan RKPD Kota Padang Panjang tahun 2025 diselaraskan dengan prioritas nasional dan provinsi Sumatera Barat Tahun 2025.

Tabel 4.3
Keselarasan Prioritas Pembangunan Nasional, Provinsi Sumatera Barat,
dan Kota Padang Panjang Tahun 2025

Prioritas Nasional	Prioritas Provinsi Sumatera Barat	Kota Padang Panjang
PN 1 Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi dan hak asasi manusia (HAM)	PP 2 Meningkatkan tata kehidupan sosial kemasyarakatan berdasarkan falsafah AdaiK Basandi Syara' – Syara' Basandi Kitabullah	PD 9 Meningkatnya pengamalan nilai-nilai agama dan adat dalam kehidupan masyarakat
	PP 7 Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel serta berkualitas	PD 5 Meningkatkan kualitas penyelenggaraan pemerintahan daerah dan pelayanan publik yang inovatif
PN 2 Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi syariah, ekonomi digital, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	PP 3 Meningkatkan nilai tambah dan produktifitas pertanian, perkebunan, peternakan dan perikanan	PD 4 Meningkatnya produktivitas dan ketersediaan pangan daerah
PN 3 Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif, serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi	PP 4 Meningkatkan usaha perdagangan dan industri kecil/menengah serta ekonomi berbasis digital	PD 4 Meningkatkan produktivitas ekonomi sektor unggulan daerah
	PP 5 Meningkatkan ekonomi kreatif dan berdaya saing kepariwisataan	PD 4 Meningkatnya kontribusi sektor pariwisata dan ekonomi kreatif terhadap ekonomi daerah
	PP 6 Meningkatkan pembangunan infrastruktur yang berkeadilan dan berkelanjutan	PD 8 Meningkatnya Kualitas dan Pemerataan Akses Infrastruktur serta Hunian Layak
PN 4 Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan,	PP 1 Mewujudkan sumber daya manusia berakhlak mulia, sehat, unggul dan berdaya saing	PD 2 Meningkatnya kualitas dan akses pendidikan masyarakat

prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda, dan penyandang disabilitas	PP 2 Meningkatkan tata kehidupan sosial kemasyarakatan berdasarkan falsafah AdaiK Basandi Syara' – Syara' Basandi Kitabullah	PD 3 Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat
Prioritas Nasional	Prioritas Provinsi Sumatera Barat	Kota Padang Panjang
PN 5 Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri	PP 4 Meningkatkan usaha perdagangan dan industri kecil/ menengah serta ekonomi berbasis digital	PD 4 Meningkatnya pertumbuhan Ekonomi berbasis Potensi Lokal
PN 6 Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan	PP 3 Meningkatkan nilai tambah dan produktifitas pertanian, perkebunan, peternakan dan perikanan	PD 1 Menurunnya tingkat kemiskinan daerah
	PP 4 Meningkatkan usaha perdagangan dan industri kecil/ menengah serta ekonomi berbasis digital	Meningkatnya kesempatan dan produktivitas tenaga kerja
	PP 6 Meningkatkan pembangunan infrastruktur yang berkeadilan dan berkelanjutan	
PN 7 Memperkuat reformasi politik, hukum, dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi dan penyelundupan	PP 7 Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel serta berkualitas	PD 5 Meningkatkan kualitas penyelenggaraan pemerintahan daerah dan pelayanan publik yang inovatif
		Meningkatnya kualitas pengawasan, perencanaan dan pengelolaan keuangan dan aset daerah
		Meningkatnya profesionalisme ASN

PN 8 Memperkuat penyalarsan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya, serta peningkatan toleransi antar umat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur	PP 2 Meningkatkan tata kehidupan sosial kemasyarakatan berdasarkan falsafah Adaik Basandi Syara' – Syara' Basandi Kitabullah	PD 9 Meningkatnya pengamalan nilai-nilai agama dan adat dalam kehidupan masyarakat
		Meningkatnya perlindungan sosial terhadap masyarakat

Prioritas pembangunan daerah tersebut selanjutnya dijabarkan melalui program-program prioritas pembangunan daerah sebagaimana terlihat pada tabel berikut ini

Tabel 4.4
Program Prioritas Pembangunan Kota Padang Panjang Tahun 2025

TUJUAN/ SASARAN/ PROGRAM		INDIKATOR KINERJA	Target RKPD Awal	Target P-RKPD	APBD 2025	P-RKPD 2025
1		2	3	4	5	6
T1	Terwujudnya Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas dan Berdaya Saing	Indeks Pembangunan Manusia	80.78	80.78	80.78	80.78
S1	Meningkatnya kualitas pendidikan Masyarakat	Rata-Rata Lama Sekolah	12.14	12.14	12.14	12.14
		Harapan Lama Sekolah	15.42	15.48	15.48	15.48
	1	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Persentase capaian Standar Pelayanan Minimal Kependidikan	100%	100%	31.405.788.702,00
	2	PROGRAM PEMBINAAN PERPUSTAKAAN	Jumlah anggota pustaka	3325 Orang	3325 Orang	1.329.195.200,00
	3	PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT	Persentase terselenggaranya kebijakan/kegiatan sektor pemerintahan dan kesejahteraan rakyat	100%	100%	13.493.021.400,00
S2	Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat	Usia Harapan Hidup	74.64	74.51	74.51	74.51
		Prevalensi Stunting	12.6	9.39	9.39	9.39
	1	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Capaian Kinerja UKP dan UKM pada Fasilitas Kesehatan	91 Persen	91 Persen	16.342.416.889,00
	2	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN	Indeks Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan	68,75 %	68,75 %	380.252.800,00
	3	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	Persentasi upaya kesehatan bersumber masyarakat yang aktif	98.13%	98.13%	374.362.000,00
S3	Meningkatnya peran pemuda dalam pembangunan dan prestasi olah raga	Indeks Pembangunan Pemuda	na	55.77		
		Indeks Partisipasi Olahraga	0.25	0.55		
	1	PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEPEMUDAAN	Pemenuhan indikator kota layak pemuda	4 Indikator	4 Indikator	143.396.950,00
	2	PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEOLAHRAGAAN	Jumlah cabang olahraga yang dibina	45 Cabang	45 Cabang	4.238.093.820,00

TUJUAN/ SASARAN/ PROGRAM			INDIKATOR KINERJA	Target RKPD Awal	Target P-RKPD	APBD 2025	P-RKPD 2025
1			2	3	4	5	6
T2		Terwujudnya Pertumbuhan Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan	Laju Pertumbuhan Ekonomi	5.6	5.6	5.6	5.6
S4		Meningkatnya pertumbuhan Ekonomi sektor unggulan daerah	Rasio PDRB Industri Pengolahan	na	9.54	9.54	9.54
			Rasio PDRB Akomodasi Mamin	na	2.94	2.94	2.94
			Rasio PDRB Ekonomi Kreatif	na	5.17	5.17	5.17
			Rasio PDRB Perdagangan Besar, kecil dan Eceran	na	18.41	18.41	18.41
			Rasio PDRB Sektor Pertanian, kehutanan dan Perikanan	na	5.2	5.2	5.2
			Rasio Pajak Daerah terhadap PDRB	na	0.04	0.04	0.04
	1	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN	Persentase pasar ber-SNI	95 Persen	95 Persen	7.516.396.650,00	6.494.190.760,00
	2	PROGRAM PENGGUNAAN DAN PEMASARAN PRODUK DALAM NEGERI	Persentase IKM yang Dapat Meningkatkan Akses Pemasaran Produknya melalui digital	20 Persen	20 Persen	884.635.600,00	547.162.500,00
	3	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN	Persentase Pemenuhan Sarana Pertanian	80.00%	80.00%	1.701.848.450,00	1.565.137.880,00
			Persentase Pemenuhan Sarana Peternakan				
	4	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN	Persentase Pemenuhan Prasarana Pertanian	80.00%	80.00%	1.701.848.450,00	1.565.137.880,00
			Persentase pemenuhan Prasarana peternakan				
	5	PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN	Persentase jumlah Kelompok tani yang mendapatkan penyuluhan tentang penerapan inovasi teknologi pertanian	27,6 %	27,6 %	139.017.150,00	125.957.400,00
	6	PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA	Rasio lama kunjungan wisata	1,20 -	1,20 -	574.705.950,00	401.675.400,00
	7	PROGRAM PEMASARAN PARIWISATA	PAD Sektor Pariwisata			339.239.750,00	262.528.150,00
	8	PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF	Jumlah sub sektor ekonomi kreatif yang sudah dibina	14 BJT 14 Sub sektor	15Sub sekto	249.999.400,00	157.215.150,00
S5			Gini Ratio	0.269	0.262	0.262	0.262

TUJUAN/ SASARAN/ PROGRAM		INDIKATOR KINERJA	Target RKPD Awal	Target P-RKPD	APBD 2025	P-RKPD 2025
1		2	3	4	5	6
	Meningkatkan pendapatan masyarakat dan mengurangi kemiskinan		4.86	4.86	4.86	4.86
	1	PROGRAM PENGEMBANGAN UMKM	Persentase Kenaikan pendapatan UMKM yang di bantu	45 Persen	45 Persen	3.610.317.000,00
	2	PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN	Persentase pengurangan kawasan kumuh	97,26 %	97,26 %	2.678.231.920,00
	3	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN	Persentase Pemenuhan Sarana Pertanian	80.00%	80.00%	1.701.848.450,00
			Persentase Pemenuhan Sarana Peternakan			1.565.137.880,00
	4	PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVAS TENAGA KERJA	persentase pencari kerja yang dilatih	0.30%	0.30%	509.250.000,00
S6	5	PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA	Besaran pencari kerja yang terdaftar yang ditempatkan (%)	0.08%	0.08%	140.000.000,00
	Meningkatkan nilai investasi dan kesempatan kerja		Pembentukan Modal Tetap Bruto (% PDRB)	na	30.19	
			Tingkat produktivitas tenaga kerja	na	137.78	
			Tingkat Pengangguran Terbuka	4.48	4.48	
	1	PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL	Persentase capaian fasilitasi pengembangan iklim penanaman modal	12.00%	12.00%	75.000.450,00
	2	PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL	Nilai Investasi	37.000.000.000 Rupiah	37.000.000.000 Rupiah	75.000.000,00
T3	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Profesional, Transparan, Akuntabel, Inovatif, Responsif dan Melayani.		Indeks Reformasi Birokrasi	70,10 (BB)	78.66	78.66
S7	Peningkatan kualitas tata kelola pemerintahan, reformasi birokrasi dan pelayanan publik		Nilai Indeks Transformasi Digital Pilar Pemerintah	na	3,25	3,25
			Indeks Pelayanan Publik	na	79.5	79.5
	1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase pemenuhan urusan penunjang yang dipenuhi	100.00%	100.00%	32.563.005.796,00
	2	PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH	Persentase konsistensi perencanaan pembangunan daerah	84.00%	84.00%	552.079.550,00
	3	PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH	Penyusunan Produk anggaran yang tertib efisien dan tepat waktu	Tepat Waktu	Tepat Waktu	1.891.608.300,00

TUJUAN/ SASARAN/ PROGRAM			INDIKATOR KINERJA	Target RKPD Awal	Target P-RKPD	APBD 2025	P-RKPD 2025
1			2	3	4	5	6
	4	PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN	Persentase Pengawasan yang Tuntas Dilaksanakan	90.00%	90.00%	672.172.000,00	446.096.000,00
	5	PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI	Persentase Capaian Aksi pada Aplikasi MCP	92.00%	92.00%	372.298.200,00	87.366.600,00
	6	PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH	Persentase konsistensi perencanaan pembangunan daerah	84.00%	84.00%	552.079.550,00	306.303.900,00
	7	PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN	Persentase terselenggaranya kebijakan /kegiatan pada bagian perekonomian dan pembangunan	75.00%	75.00%	617.194.000,00	427.541.800,00
	8	PROGRAM PENGELOLAAN APLIKASI INFORMATIKA	Indeks domain tata kelola SPBE	3,70 Indeks	3,70 Indeks	1.580.437.000,00	859.527.000,00
	9	PROGRAM PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL	Persentase data statistik sektoral yang berkualitas	70.00%	70.00%	19.480.000,00	5.505.000,00
S8	Meningkatnya kualitas SDM ASN			IP ASN	na	86.4	
	1	PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH	Nilai Sistem Merit	335 Nilai	335 Nilai	758.558.650,00	603.232.600,00
	2	PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	Persentase ASN yang memperoleh peningkatan kompetensi melalui diklat, bimtek, dan sosialisasi	7,60 %	7,60 %	1.519.999.950,00	972.914.000,00
T4		Terwujudnya keamanan melalui Internalisasi dan Aktualisasi Nilai Nilai Agama dan Budaya dalam kehidupan masyarakat	Indeks Rasa Aman	Aman (92,57)	84.04	Aman (92,57)	84.04
S9		Meningkatnya internalisasi nilai-nilai Agama dan Adat dalam masyarakat	Indeks Kerukunan Umat Beragama (IKUB)	na	80	na	80
			Indeks Pembangunan Kebudayaan (IPK)	na	57,33-57,35		
	1	PROGRAM PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN	Persentase pelestarian objek pemajuan kebudayaan yang dilindungi, dikembangkan, dimanfaatkan dan dibina	4 Objek	4 Objek	736.776.000,00	437.582.000,00
	2	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN KETAHANAN EKONOMI, SOSIAL, DAN BUDAYA	presentase pencegahan potensi konflik akibat gejolak ekonomi, masalah sosial dan masyarakat	100.00%	0.00%	113.950.000,00	0
S10		Meningkatnya ketentraman dan ketertiban umum	Indeks Penyelenggaraan Trantibumlinmas				

TUJUAN/ SASARAN/ PROGRAM			INDIKATOR KINERJA	Target RKPD Awal	Target P-RKPD	APBD 2025	P-RKPD 2025
1			2	3	4	5	6
	1	PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase warga negara yang terlindungi dari dampak pelanggaran perda dan trantibum	100%	100%	3.888.261.100,00	3.762.261.400,00
S11		Meningkatnya keluarga berkualitas, kesetaraan gender dan masyarakat inklusif	Indeks Pembangunan Keluarga	na	70		
			Indeks Ketimpangan Gender (IKG)	na	82.36		
	1	PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN	Proporsi kursi yang diduduki perempuan di DPRD	100 % 20 %	20% 100%	253.580.000,00	233.940.600,00
	2		Persentase organisasi perempuan yang aktif				
	3	PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN	Cakupan perempuan korban kekerasan yang mendapatkan penanganan dan pengaduan oleh petugas terlatih didalam unit pelayanan terpadu	100 BTJ	100 BTJ	202.390.300,00	147.632.000,00
	4	PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK	Cakupan anak korban kekerasan yang mendapatkan penanganan dan pengaduan oleh petugas terlatih didalam unit pelayanan terpadu	100 BTJ	100 BTJ	397.972.300,00	321.150.700,00
T5		Meningkatkan kualitas infrastruktur dan lingkungan hidup yang berkelanjutan	Indeks Kualitas Layanan Infrastruktur (IKLI)	92.90	74.41	74.41	74.41
			Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)	74.71	74.34	74.34	74.34
S12		Meningkatkan pengembangan infrastruktur yang berkelanjutan	IKLI KePUan	98	98	98	98
			IKLI perkim	100	96,92	96,92	96,92
			IKLI Perhubungan	98	98	98	98
		PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM DRAINASE	Persentase sarana infrastruktur drainase perkotaan dalam kondisi baik	87,92 %	87,92 %	3.940.773.850,00	3.862.186.850,00
		PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH	Persentase Rumah Tinggal dengan bersanitasi Layak	94,46 % 90,7 %	94,47% 91,3%	872.731.600,00	841.951.100,00
		PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN	Persentase pengurangan kawasan kumuh	97,26 %	97,26 %	2.678.231.920,00	2.678.231.920,00
		PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU)	Persentase ketersediaan PSU kawasan permukiman yang sesuai standard	87,11 %	87,11 %	5.309.257.196,00	5.880.575.196,00
			Persentase layanan angkutan darat	69.50%	69.50%	3.619.283.820,00	2.680.691.460,00

TUJUAN/ SASARAN/ PROGRAM			INDIKATOR KINERJA	Target RKPD Awal	Target P-RKPD	APBD 2025	P-RKPD 2025
1			2	3	4	5	6
		PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)	Persentase Kepemilikan keur kendaraan bermotor	0.003681	0.003681		
			Rasio panjang jalan perjumlah kendaraan	0.06%	0.06%		
S13		Meningkatnya kualitas pengelolaan lingkungan hidup yang berkelanjutan	IKU	92	78,68*		
		PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN	Persentase pengelolaan sampah	98.00%	98.00%	8.340.917.192,00	8.179.461.292,00
		PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP	Persentase kegiatan pencegahan dan penanggulangan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup	100%	100%	474.432.800,00	474.432.800,00
		PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN TERHADAP IZIN LINGKUNGAN DAN IZIN PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP (PPLH)	Persentase ketaatan pelaku usaha/kegiatan yang memiliki persetujuan lingkungan terhadap dokumen persetujuan lingkungan	60.00%	60.00%	22.543.250,00	17.987.420,00
		PROGRAM PENGELOLAAN KEANEKARAGAMAN HAYATI (KEHATI)	Persentase luas RTH Publik	4,23 %	4,23 %	2.000.506.370,00	1.842.175.970,00
S14		Resiliensi Terhadap Bencana dan Perubahan Iklim	Indeks Risiko Bencana (IRBI)	na	113.2		
	1	PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA	Persentase warga yang mendapat pelayanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana	100.00%	100.00%	1.288.694.470,00	843.710.760,00

BAB V

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DAERAH

Rencana Kerja dan Pendanaan Daerah merupakan komponen krusial dalam dokumen Perubahan RKPD Kota Padang Panjang Tahun 2025, yang mencerminkan keterpaduan antara kebijakan perencanaan tahunan dengan arah pembangunan jangka menengah. Penyesuaian terhadap RKPD ini dilakukan guna memastikan keselarasan antara program dan kegiatan pembangunan daerah dengan visi dan misi Wali Kota Padang Panjang terpilih untuk periode 2025-2029. Perubahan ini bersifat strategis, karena tidak hanya merespons dinamika kebutuhan masyarakat dan perkembangan regulasi, tetapi juga didasarkan pada hasil evaluasi pelaksanaan RKPD sebelumnya.

Sebagai bentuk komitmen dalam mendukung pencapaian visi nasional menuju Indonesia Emas 2045, Pemerintah Kota Padang Panjang telah menyelaraskan berbagai program dan kegiatan prioritas daerah dengan delapan misi pembangunan nasional yang dikenal sebagai Asta Cita. Misi ini meliputi penguatan ideologi dan demokrasi, peningkatan pertahanan dan keamanan, penciptaan lapangan kerja, penguatan pembangunan sumber daya manusia, hilirisasi industri, pemerataan ekonomi melalui pembangunan desa, reformasi birokrasi dan hukum, serta harmonisasi lingkungan dan budaya.

Pelaksanaan program-program prioritas di Kota Padang Panjang difokuskan untuk mendukung secara langsung agenda-agenda tersebut, khususnya dalam bidang ketahanan pangan, pengentasan kemiskinan, peningkatan kesejahteraan ekonomi kerakyatan, serta peningkatan kualitas layanan dasar seperti kesehatan dan pendidikan. Kegiatan yang dilaksanakan menjangkau seluruh lapisan masyarakat, mulai dari pelajar, kelompok rentan, hingga masyarakat umum, dengan melibatkan perangkat daerah terkait yang berperan aktif dalam realisasi kegiatan di lapangan.

Tabel berikut menyajikan berbagai kegiatan yang telah dirancang oleh perangkat daerah Kota Padang Panjang, lengkap dengan sasaran kegiatan, jenis program, alokasi anggaran, serta dinas pelaksana, yang semuanya disusun untuk mendukung capaian Asta Cita di tingkat daerah. Data ini menjadi cerminan komitmen Pemerintah Kota dalam mewujudkan pembangunan yang inklusif, berkeadilan, dan berkelanjutan sejalan dengan arah kebijakan pembangunan nasional.

Tabel 5.1
Dukungan Pemerintah Kota Padang Panjang terhadap Asta Cita

Asta Cita	Kegiatan	Sasaran Kegiatan	Program	Anggaran	PD Pelaksana
Ketahanan Pangan	Koperasi Merah Putih	16 Kelurahan	Program Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi	75.000.000	Dinas Perdagangan UKM
Pengentasan Kemiskinan	Koperasi Merah Putih	16 Kelurahan	Program Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi		Dinas Perdagangan UKM
Peningkatan Kesejahteraan dan Ekonomi Kerakyatan	Koperasi Merah Putih	16 Kelurahan	Program Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi		Dinas Perdagangan UKM
Peningkatan Kesehatan dan Kualitas SDM	BMG	Peserta Didik SD-SMP	Program Pengawasan Keamanan Pangan	27.488.200	Dinas Pangan dan Pertanian
Pengentasan Kemiskinan melalui peningkatan kesejahteraan masyarakat rentan	BMG	Peserta Didik SD-SMP	Program Pengawasan Keamanan Pangan		Dinas Pangan dan Pertanian
Peningkatan kualitas hidup masyarakat melalui pelayanan kesehatan yang merata, terjangkau, dan preventif	PKG	Seluruh Masyarakat	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat	988.027.642	Dinas Kesehatan
Penguatan pelayanan dasar dan pencegahan penyakit sebagai bagian dari pembangunan sumber daya manusia yang sehat dan produktif.	PKG	Seluruh Masyarakat	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat		Dinas Kesehatan

Penyesuaian serta penambahan pada struktur program, kegiatan, dan subkegiatan dalam dokumen ini mencerminkan upaya pemerintah daerah untuk menghadirkan perencanaan pembangunan yang lebih responsif dan adaptif. Rincian perubahan jumlah program, kegiatan, dan sub kegiatan pada masing-masing perangkat daerah dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 5.2
Rekapitulasi Jumlah Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan pada Perubahan RKPD Kota Padang Panjang Tahun 2025

NO	OPD	RKPD 2025			APBD 2025			P-RKPD 2025		
		PROG	KEG	SUBKEG	PROG	KEG	SUBKEG	PROG	KEG	SUBKEG
1	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	3	13	77	3	13	71	3	13	68
2	DINAS KESEHATAN	5	15	44	5	17	59	5	17	63
3	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	10	18	37	10	18	36	10	18	35
4	DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PEMUKIMAN DAN LINGKUNGAN HIDUP	13	21	33	13	21	33	13	21	31
5	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN	3	10	23	3	10	23	3	9	18
6	DINAS SOSIAL, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	13	29	55	13	31	73	13	30	69
7	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN	7	12	24	7	12	23	7	11	20

NO	OPD	RKPD 2025			APBD 2025			P-RKPD 2025		
		PROG	KEG	SUBKEG	PROG	KEG	SUBKEG	PROG	KEG	SUBKEG
	TERPADU SATU PINTU									
8	DINAS PANGAN DAN PERTANIAN	10	21	38	10	20	33	9	19	31
9	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENDATANGAN SIPIL	5	12	23	5	12	22	5	11	21
10	DINAS PERHUBUNGAN	2	12	25	2	11	24	2	11	24
11	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	5	9	19	5	9	19	5	9	18
12	DINAS PERDAGANGAN, KOPERASI DAN USAHA KECIL MENENGAH	12	17	31	12	17	31	12	17	30
13	DINAS PEMUDA, OLAH RAGA DAN PARIWISATA	8	18	36	8	18	34	8	18	34
14	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN	4	11	21	5	12	26	4	8	21
15	SEKRETARIAT DAERAH	3	16	46	3	16	46	3	16	46
16	SEKRETARIAT DPRD	2	14	40	2	14	40	2	14	40
17	BADAN PERENCANAAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH	4	16	25	4	15	23	4	13	20
18	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAERAH	4	11	32	4	11	32	4	11	32
19	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	3	10	22	3	10	22	3	10	22
20	INSPEKTORAT DAERAH	3	9	26	3	9	26	3	9	24
21	KECAMATAN PADANG PANJANG TIMUR	5	12	22	5	12	22	5	10	19
22	KECAMATAN PADANG PANJANG BARAT	5	12	23	5	12	23	5	10	19
23	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH DAN KESATUAN BANGSA POLITIK	7	14	27	6	13	22	5	10	17
TOTAL		136	332	749	136	333	763	133	315	722

Sumber: SIPD-RI, 2025, Diolah

Berdasarkan tabel di atas, terdapat sejumlah subkegiatan baru yang ditambahkan dalam Perubahan RKPD Kota Padang Panjang Tahun 2025 sebagai respons terhadap kebutuhan pembangunan serta penyesuaian terhadap kebijakan pendanaan dari pemerintah pusat. Penambahan ini terutama dipicu oleh adanya alokasi Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik dan Nonfisik, yang mensyaratkan penyesuaian struktur subkegiatan agar anggaran tersebut dapat dimanfaatkan secara optimal. Di samping itu, penambahan subkegiatan juga diarahkan untuk mendukung pencapaian visi dan misi Wali Kota Padang Panjang terpilih. Rangkuman subkegiatan baru yang dimuat dalam dokumen Perubahan RKPD Tahun 2025 disajikan secara lebih rinci pada tabel berikut.

Tabel 5.3
Rekapitulasi Sub Kegiatan Baru pada Perubahan RKPD Kota Padang
Panjang Tahun 2025

NO	KODE	OPD/ SUB KEGIATAN	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD Perubahan 2025	KET.
1	2	3	4	5	6	7
A DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN						
1	1.01.02.2.01.0029	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	0	5.618.000.000,00	5.618.000.000,00	DAK Non Fisik-BOS Reguler DAK Non Fisik-BOS Kinerja
2	1.01.02.2.02.0042	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama	0	3.865.275.000,00	3.865.275.000,00	DAK Non Fisik-BOS Reguler DAK Non Fisik-BOS Kinerja
3	1.01.02.2.03.0018	Pengelolaan Dana BOP PAUD	0	1.363.800.000,00	1.363.800.000,00	DAK Non Fisik-BOP PAUD
4	1.01.02.2.04.0017	Pengelolaan Dana BOP Sekolah Nonformal/Kesetaraan	0	437.900.000,00	437.900.000,00	DAK Non Fisik-BOP Pendidikan Kesetaraan
5	1.01.02.2.04.0039	Pembangunan Ruang Kelas Baru	0	1.457.737.900,00	1.408.906.400,00	
B DINAS KESEHATAN						
1	1.02.01.2.07.0001	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	0	90.000.000,00	90.000.000,00	
2	1.02.02.2.01.0002	Pembangunan Puskesmas	0	936.000.000,00	936.000.000,00	Dana Alokasi Umum (DAU) DAK Fisik-Bidang Kesehatan dan KB-Reguler-Pelayanan Kesehatan Dasar
3	1.02.02.2.01.0007	Pengembangan Fasilitas Kesehatan Lainnya	0	0	1.396.317.920,00	DAK Fisik-Bidang Kesehatan dan KB-Reguler-Pelayanan Kesehatan Dasar
4	1.02.02.2.01.0010	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Fasilitas Kesehatan Lainnya	0	0	322.910.000,00	DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Kesehatan
5	1.02.02.2.01.0014	Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan	0	0	1.180.500.000,00	DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Kesehatan DAK Fisik-Bidang Kesehatan dan KB-Reguler-Pelayanan Kesehatan Dasar
6	1.02.02.2.01.0020	Pemeliharaan Rutin dan Berkala Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan	0	0	103.982.400,00	DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Kesehatan
7	1.02.02.2.02.0018	Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	0	117.156.000,00	117.156.000,00	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Dinas-BOK Kabupaten/Kota
8	1.02.02.2.02.0020	Pengelolaan Surveilans Kesehatan	0	17.640.000,00	17.640.000,00	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Dinas-BOK Kabupaten/Kota
9	1.02.02.2.02.0028	Pengambilan dan Pengiriman Spesimen Penyakit Potensial KLB ke Laboratorium Rujukan/Nasional	0	5.380.000,00	5.380.000,00	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Dinas-BOK Kabupaten/Kota

NO	KODE	OPD/ SUB KEGIATAN	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD Perubahan 2025	KET.
1	2	3	4	5	6	7
10	1.02.02.2.02.0040	Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan Tuberkulosis	0	34.998.100,00	267.940.900,00	Dana Alokasi Umum (DAU) DAU yang Ditetapkan Penggunaannya Bidang Kesehatan
11	1.02.02.2.02.0046	Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak	0	277.760.000,00	277.760.000,00	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Dinas-BOK Kabupaten/Kota
12	1.02.02.2.03.0002	Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan	0	20.200.000,00	20.200.000,00	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Dinas-BOK Kabupaten/Kota
13	1.02.05.2.03.0001	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	0	44.000.000,00	143.345.600,00	DAU yang Ditetapkan Penggunaannya Bidang Kesehatan DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Dinas-BOK Kabupaten/Kota
C PUSKESMAS KOTO KATIK						
1	1.02.02.2.02.0001	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	0	71.632.000,00	37.184.000,00	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas
2	1.02.02.2.02.0005	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	0	51.400.000,00	51.400.000,00	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas
3	1.02.02.2.02.0010	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat	0	6.600.000,00	6.600.000,00	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas
4	1.02.02.2.02.0011	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	0	12.600.000,00	21.000.000,00	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas
5	1.02.02.2.02.0016	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	0	4.550.000,00	4.500.000,00	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas
6	1.02.02.2.02.0017	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	0	8.250.000,00	11.550.000,00	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas
7	1.02.02.2.02.0020	Pengelolaan Surveilans Kesehatan	0	16.000.000,00	16.900.000,00	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas
8	1.02.02.2.02.0021	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK)	0	11.000.000,00	9.000.000,00	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas
9	1.02.02.2.02.0033	Operasional Pelayanan Puskesmas	0	187.294.000,00	175.776.000,00	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas
10	1.02.02.2.02.0044	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi	0	12.636.000,00	12.636.000,00	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas
11	1.02.02.2.02.0046	Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak	0	500.000,00	500.000,00	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas
12	1.02.02.2.02.0047	Pengelolaan Pelayanan Kelanjutan	0	4.800.000,00	4.800.000,00	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas
13	1.02.02.2.02.0048	Pengelolaan Layanan Imunisasi	0	48.800.000,00	48.800.000,00	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas
14	1.02.05.2.03.0001	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	0	2.000.000,00	17.176.000,00	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas

NO	KODE	OPD/ SUB KEGIATAN	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD Perubahan 2025	KET.
1	2	3	4	5	6	7
D PUSKESMAS KEBUN SIKOLOS						
1	1.02.02.2.02.0001	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	0	52.928.000,00	52.928.000,00	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas
2	1.02.02.2.02.0005	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	0	25.600.000,00	25.600.000,00	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas
3	1.02.02.2.02.0010	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat	0	9.000.000,00	9.000.000,00	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas
4	1.02.02.2.02.0011	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	0	3.000.000,00	3.000.000,00	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas
5	1.02.02.2.02.0016	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	0	16.400.000,00	16.400.000,00	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas
6	1.02.02.2.02.0017	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	0	18.000.000,00	18.000.000,00	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas
7	1.02.02.2.02.0020	Pengelolaan Surveilans Kesehatan	0	7.710.000,00	8.410.000,00	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas
8	1.02.02.2.02.0021	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK)	0	8.800.000,00	8.800.000,00	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas
9	1.02.02.2.02.0033	Operasional Pelayanan Puskesmas	0	185.420.000,00	185.420.000,00	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas
10	1.02.02.2.02.0044	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi	0	9.000.000,00	9.000.000,00	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas
11	1.02.02.2.02.0046	Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak	0	600.000,00	600.000,00	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas
12	1.02.02.2.02.0047	Pengelolaan Pelayanan Kelanjutan	0	3.000.000,00	3.000.000,00	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas
13	1.02.02.2.02.0048	Pengelolaan Layanan Imunisasi	0	21.700.000,00	21.700.000,00	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas
14	1.02.05.2.03.0001	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	0	18.479.000,00	18.479.000,00	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas
E PUSKESMAS BUKIT SURUNGAN						
1	1.02.02.2.02.0001	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	0	37.400.000,00	35.600.000,00	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas
2	1.02.02.2.02.0005	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	0	34.250.000,00	40.250.000,00	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas
3	1.02.02.2.02.0010	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat	0	7.200.000,00	7.200.000,00	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas
4	1.02.02.2.02.0011	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	0	3.600.000,00	3.600.000,00	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas
5	1.02.02.2.02.0016	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	0	8.700.000,00	8.700.000,00	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas
6	1.02.02.2.02.0017	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	0	10.300.000,00	10.300.000,00	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas
7	1.02.02.2.02.0020	Pengelolaan Surveilans Kesehatan	0	20.420.000,00	20.020.000,00	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas

NO	KODE	OPD/ SUB KEGIATAN	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD Perubahan 2025	KET.
1	2	3	4	5	6	7
8	1.02.02.2.02.0021	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK)	0	3.800.000,00	3.800.000,00	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas
9	1.02.02.2.02.0033	Operasional Pelayanan Puskesmas	0	202.086.000,00	204.911.115,00	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas
10	1.02.02.2.02.0044	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi	0	15.140.000,00	5.200.000,00	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas
11	1.02.02.2.02.0046	Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak	0	955.000,00	631.000,00	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas
12	1.02.02.2.02.0047	Pengelolaan Pelayanan Kelanjutan	0	10.000.000,00	10.000.000,00	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas
13	1.02.02.2.02.0048	Pengelolaan Layanan Imunisasi	0	9.300.000,00	9.300.000,00	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas
14	1.02.05.2.03.0001	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	0	10.779.000,00	2.400.000,00	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas
F PUSKESMAS GUNUNG						
1	1.02.02.2.02.0001	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	0	26.880.000,00	26.880.000,00	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas
2	1.02.02.2.02.0005	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	0	20.200.000,00	20.200.000,00	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas
3	1.02.02.2.02.0010	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat	0	4.800.000,00	4.800.000,00	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas
4	1.02.02.2.02.0011	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	0	6.000.000,00	6.000.000,00	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas
5	1.02.02.2.02.0016	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	0	2.350.000,00	2.350.000,00	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas
6	1.02.02.2.02.0017	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	0	8.200.000,00	8.200.000,00	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas
7	1.02.02.2.02.0020	Pengelolaan Surveilans Kesehatan	0	8.340.000,00	8.340.000,00	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas
8	1.02.02.2.02.0021	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK)	0	2.000.000,00	2.000.000,00	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas
9	1.02.02.2.02.0033	Operasional Pelayanan Puskesmas	0	140.996.000,00	140.996.000,00	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas
10	1.02.02.2.02.0044	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi	0	3.800.000,00	3.800.000,00	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas
11	1.02.02.2.02.0046	Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak	0	600.000,00	600.000,00	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas
12	1.02.02.2.02.0047	Pengelolaan Pelayanan Kelanjutan	0	19.200.000,00	19.200.000,00	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas
13	1.02.02.2.02.0048	Pengelolaan Layanan Imunisasi	0	15.500.000,00	15.500.000,00	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas
14	1.02.05.2.03.0001	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber	0	35.704.000,00	35.704.000,00	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas

NO	KODE	OPD/ SUB KEGIATAN	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD Perubahan 2025	KET.
1	2	3	4	5	6	7
		Daya Masyarakat (UKBM)				
G	RUMAH SAKIT UMUM DAERAH					
1	1.02.02.2.01.0022	Pengembangan Rumah Sakit	0	4.261.349.000,00	4.261.349.000,00	DAK Fisik- Bidang Kesehatan dan KB-Reguler- Penguatan Sistem Kesehatan
H	DINAS SOSIAL, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK					
1	2.08.03.2.03.0002	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Penanganan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota	0	29.045.000,00	29.045.000,00	DAK Non Fisik- Dana Pelayanan Perlindungan Perempuan dan Anak
2	2.08.07.2.03.0006	Peningkatan kapasitas SDM lembaga penyedia layanan perlindungan dan penanganan bagi AMPK tingkat daerah kabupaten/	0	39.975.000,00	39.975.000,00	DAK Non Fisik- Dana Pelayanan Perlindungan Perempuan dan Anak
3	2.14.02.2.01.0019	Implementasi Pendidikan Kependudukan Jalur Pendidikan Formal dan Nonformal	0	12.302.050,00	7.358.800,00	
4	2.14.02.2.02.0012	Pencatatan dan Pengumpulan Data Keluarga	0	19.200.000,00	19.200.000,00	DAK Non Fisik- BOKB-KB
5	2.14.02.2.02.0013	Pengolahan dan Pelaporan Data Pengendalian Lapangan dan Pelayanan KB	0	24.000.000,00	24.000.000,00	DAK Non Fisik- BOKB-KB
6	2.14.03.2.01.0008	Pengendalian Program KKBPK	0	60.000.000,00	60.000.000,00	DAK Non Fisik- BOKKB-BOK
7	2.14.03.2.01.0010	Pengelolaan Operasional dan Sarana di Balai Penyuluhan Bangsa Kencana	0	97.997.465,00	97.997.465,00	DAK Non Fisik- BOKB-KB
8	2.14.03.2.01.0011	Pelaksanaan Mekanisme Operasional Program Bangga Kencana melalui Rapat Koordinasi Kecamatan (Rakorcam), Rapat Koordinasi Desa (Rakordes), dan Mini Lokakarya (Minilok)	0	40.000.000,00	40.000.000,00	DAK Non Fisik- BOKKB-BOK
9	2.14.03.2.01.0012	Promosi dan KIE Program Bangga Kencana Melalui Media Massa Cetak dan Elektronik serta Media Luar Ruang	0	125.000.000,00	125.000.000,00	DAK Non Fisik- BOKB-KB
10	2.14.03.2.02.0004	Penggerakan Kader Institusi Masyarakat Pedesaan (IMP)	0	128.000.000,00	128.000.000,00	DAK Non Fisik- BOKB-KB
11	2.14.03.2.03.0001	Pengendalian Pendistribusian Alat dan Obat Kontrasepsi dan Sarana Penunjang Pelayanan KB ke Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya	0	7.184.000,00	7.184.000,00	DAK Non Fisik- BOKB-KB

NO	KODE	OPD/ SUB KEGIATAN	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD Perubahan 2025	KET.
1	2	3	4	5	6	7
12	2.14.03.2.03.0003	Peningkatan Kesertaan Penggunaan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)	0	103.659.000,00	103.659.000,00	DAK Non Fisik-BOKB-KB
13	2.14.03.2.03.0008	Pembinaan Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi di Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya	0	17.097.000,00	17.097.000,00	DAK Non Fisik-BOKB-KB
14	2.14.03.2.04.0002	Integrasi Pembangunan Lintas Sektor di Kampung KB	0	13.300.000,00	13.300.000,00	DAK Non Fisik-BOKB-KB
15	2.14.03.2.04.0006	Pelaksanaan dan Pengelolaan Program Bangga Kencana di Kampung Keluarga Berkualitas	0	76.300.000,00	76.300.000,00	DAK Non Fisik-BOKB-KB
16	2.14.04.2.01.0016	Pengelolaan Ketahanan Keluarga Melalui Pusat Pelayanan Keluarga Sejahtera (PPKS)	0	9.598.000,00	9.598.000,00	DAK Non Fisik-BOKB-KB
17	2.14.04.2.01.0018	Pengadaan Sarana Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA)	0	130.000.000,00	130.000.000,00	DAK Non Fisik-BOKB-KB
18	2.14.04.2.02.0005	Pemantauan Data dan Informasi Keluarga Berisiko Stunting (Termasuk remaja Calon Pengantin/Calon PUS, Ibu Hamil, Pasca salin/kelahiran, Baduta/Balita)	0	120.000.000,00	120.000.000,00	DAK Non Fisik-BOKB-KB
19	2.14.04.2.02.0006	Pendampingan Keluarga Berisiko Stunting (Termasuk remaja Calon Pengantin/Calon PUS, Ibu Hamil, Pasca salin/kelahiran, Baduta/Balita)	0	144.000.000,00	144.000.000,00	DAK Non Fisik-BOKB-KB
I DINAS PANGAN DAN PERTANIAN						
1	3.27.07.2.01.0006	Penyediaan dan Peningkatan Kapasitas Penyuluh pertanian	0	0	59.280.000,00	DAK Non Fisik-Bantuan Operasional Penyuluh Pertanian
J DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN						
1	2.23.02.2.01.0017	Penyusunan Data dan Informasi Perpustakaan	0	48.622.850,00	48.622.850,00	DAK Fisik-Bidang Pendidikan-Reguler-Perpustakaan Daerah
2	2.23.02.2.01.0019	Pengembangan Kekhasan Koleksi Perpustakaan Daerah Tingkat Kabupaten/Kota	0	158.471.900,00	158.471.900,00	DAK Fisik-Bidang Pendidikan-Reguler-Perpustakaan Daerah
3	2.23.02.2.01.0020	Pengembangan dan Pemeliharaan Layanan Perpustakaan Elektronik	0	9.980.000,00	9.980.000,00	DAK Fisik-Bidang Pendidikan-Reguler-Perpustakaan Daerah

NO	KODE	OPD/ SUB KEGIATAN	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD Perubahan 2025	KET.
1	2	3	4	5	6	7
4	2.23.02.2.02.0008	Pembangunan dan Pemeliharaan Sarana Perpustakaan di Tempat-Tempat Umum yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	0	39.750.000,00	39.750.000,00	DAK Fisik-Bidang Pendidikan-Reguler-Perpustakaan Daerah
5	2.23.02.2.02.0009	Pemberian Penghargaan Gerakan Budaya Gemar Membaca	0	463.328.850,00	463.328.850,00	DAK Fisik-Bidang Pendidikan-Reguler-Perpustakaan Daerah
6	2.23.03.2.01.0003	Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Penyimpanan, Perawatan, Pelestarian, dan Pendaftaran Naskah Kuno	0	101.377.050,00	101.377.050,00	DAK Fisik-Bidang Pendidikan-Reguler-Perpustakaan Daerah

Sumber: SIPD-RI, 2025, Diolah

Tabel berikut menyajikan rekapitulasi perubahan anggaran pada tingkat program, kegiatan, dan subkegiatan dalam Perubahan RKPD Kota Padang Panjang Tahun 2025, yang disusun berdasarkan masing-masing Perangkat Daerah. Penyajian informasi ini dimaksudkan untuk memberikan gambaran yang lebih komprehensif mengenai perubahan struktur pendanaan antarperangkat daerah dalam rangka mendukung pencapaian sasaran pembangunan daerah secara lebih terarah dan efektif.

Tabel 5.4
Rekapitulasi Perubahan Anggaran Pendanaan pada Perubahan RKPD Kota Padang Panjang Tahun 2025

NO	OPD	RKPD 2025	APBD 2025	P-RKPD 2025	BERTAMBAH/ BERKURANG
1	2	3	4	5	6=5-4
1	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	80.461.113.798	109.274.348.959	112.768.706.654,35	3.494.357.695,35
2	DINAS KESEHATAN	153.372.920.718	164.982.580.049	163.272.878.269,88	-1,709,701,779.12
3	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	23.519.841.379	18.920.888.286	25.806.747.752,00	6,885,859,466.00
4	DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PEMUKIMAN DAN LINGKUNGAN HIDUP	27.754.924.838	27.186.922.319	29.041.667.667,00	1,854,745,528.00
5	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN	11.973.657.998	12.367.084.245	11.484.539.832,00	-1,325,109,115.00
6	DINAS SOSIAL, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	11.468.551.090	12.602.173.454	11.277.064.339,00	-882,544,413.00
7	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	5.961.242.647	5.786.228.743	5.151.694.195,00	-634,534,548.00
8	DINAS PANGAN DAN PERTANIAN	12.835.272.726	11.532.994.236	10.594.480.886,00	-938,513,350.00
9	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	4.243.575.676	3.941.070.161	3.210.784.031,00	-730,286,130.00
10	DINAS PERHUBUNGAN	12.139.592.197	11.835.405.260	11.299.781.282,00	-535,623,978.00
11	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	8.153.848.881	8.377.522.415	7.505.913.153,00	-871,609,262.00
12	DINAS PERDAGANGAN, KOPERASI DAN USAHA KECIL MENENGAH	23.267.045.561	22.065.966.486	19.889.076.226,40	-2,176,890,259.60

NO	OPD	RKPD 2025	APBD 2025	P-RKPD 2025	BERTAMBAH/ BERKURANG
1	2	3	4	5	6=5-4
13	DINAS PEMUDA, OLAH RAGA DAN PARIWISATA	14.203.117.706	11.418.203.963	10.459.604.674,31	-958,599,288.69
14	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN	4.954.748.652	5.923.890.660	5.215.021.218,00	-708,869,442.00
15	SEKRETARIAT DAERAH	43.683.042.032	46.673.221.196	47.404.348.358,00	731,127,162.00
16	SEKRETARIAT DPRD	36.691.695.090	41.560.530.985	31.699.437.865,00	-9,861,093,120.00
17	BADAN PERENCANAAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH	6.643.996.059	6.788.688.665	5.351.515.549,00	-1,437,173,116.00
18	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAERAH	14.820.322.322	11.487.167.033	12.055.271.358,00	568,104,325.00
19	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	10.252.703.653	9.835.957.664	8.336.750.200,00	-1,499,207,464.00
20	INSPEKTORAT DAERAH	6.983.354.635	7.217.546.499	5.796.672.161,00	-2,386,332,980.00
21	KECAMATAN PADANG PANJANG TIMUR	19.733.398.713	18.983.722.109	16.597.389.129,00	-2,325,476,341.00
22	KECAMATAN PADANG PANJANG BARAT	20.358.231.040	19.423.040.682	17.097.564.341,00	-796,254,116.00
23	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH DAN KESATUAN BANGSA POLITIK	8.182.482.589	9.471.364.248	8.675.110.132,00	-17,664,498,864.06
TOTAL		561.658.680.000	597.656.518.317	579.992.019.272.94	-17,664,498,864,06

Sumber: SIPD-RI, 2025, Diolah

Untuk mendapatkan gambaran yang lebih rinci mengenai perubahan rencana kerja dan pendanaan dalam dokumen Perubahan RKPD Kota Padang Panjang Tahun 2025, disajikan rincian program, kegiatan, dan subkegiatan beserta alokasi anggarannya untuk setiap Perangkat Daerah. Rincian tersebut dapat dilihat pada Tabel 5.5 berikut.

TABEL 5.5
PERUBAHAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (RKPD) KOTA PADANG PANJANG TAHUN 2025

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan					Perangkat Daerah Penanggung Jawab				
			Target 2025		Pagu Indikatif (Rp)							
			Sebelum	Sesudah	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD Perubahan 2025					
2	3	4	8	9	10	11	12	20				
		DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN			80.461.113.798,00	109.274.348.959,00	112.768.706.654,35					
1		URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR			79.909.337.798,00	108.537.572.959,00	112.135.194.654,35					
1	01	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN			79.909.337.798,00	108.537.572.959,00	112.135.194.654,35					
1	01	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase pemenuhan urusan penunjang yang dipenuhi pada Dinas Pendidikan	100 %	100 %	59.829.093.798,00	77.131.784.257,00	74.503.344.278,35	
1	01	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan urusan penunjang yang dipenuhi	1 tahun	1 tahun	56.904.044.448,00	74.166.140.209,00	74.166.140.209,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
1	01	01	2.02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN							
					Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	580 Orang/bulan	580 Orang/bulan	56.904.044.448,00	74.166.140.209,00	71.889.079.380,35	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	
1	01	01	2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	-			464.000.000,00	494.530.000,00	494.530.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
1	01	01	2.05	0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya							
					Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	580 Paket	580 Paket	464.000.000,00	494.530.000,00	494.530.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	
1	01	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan urusan penunjang yang dipenuhi	1 tahun	1 tahun	526.707.350,00	526.696.464,00	526.696.464,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
1	01	01	2.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi							
					Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	4 Paket	4 Paket	20.670.650,00	20.663.500,00	12.397.500,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	
1	01	01	2.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor							
					Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	4 Paket	4 Paket	129.050.000,00	129.047.314,00	65.218.622,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	
1	01	01	2.06	0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan							
					Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	5 Paket	5 Paket	76.986.700,00	76.986.650,00	38.453.200,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	
1	01	01	2.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD							
					Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	30 Laporan	30 Laporan	300.000.000,00	299.999.000,00	189.364.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	

1	01	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase pemenuhan urusan penunjang yang dipenuhi	1 tahun	1 tahun	170.000.000,00	169.540.300,00	169.540.300,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
1	01	01	2.07	0002	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan							
						Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	0 Unit	0 Unit	0,00	0,00	0,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
1	01	01	2.07	0005	Pengadaan Mebel							
						Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	10 Unit	10 Unit	100.000.000,00	99.680.000,00	66.680.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
1	01	01	2.07	0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya							
						Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	5 Unit	5 Unit	50.000.000,00	49.931.800,00	49.931.800,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
1	01	01	2.07	0010	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya							
						Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	1 Unit	6 Unit	20.000.000,00	19.928.500,00	45.490.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
1	01	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase pemenuhan urusan penunjang yang dipenuhi	1 Tahun	1 Tahun	1.039.342.000,00	1.050.191.284,00	1.050.191.284,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
1	01	01	2.08	0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat							
						Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	15 Laporan	15 Laporan	6.030.000,00	6.023.700,00	3.005.800,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
1	01	01	2.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik							
						Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	3 Laporan	3 Laporan	150.000.000,00	149.999.584,00	131.385.976,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
1	01	01	2.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor							
						Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	12 Laporan	883.312.000,00	894.168.000,00	894.108.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
1	01	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase pemenuhan urusan penunjang yang dipenuhi	1 tahun	1 tahun	725.000.000,00	724.686.000,00	724.686.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
1	01	01	2.09	0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan							
						Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	17 Unit	17 Unit	190.000.000,00	189.992.000,00	189.288.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
1	01	01	2.09	0005	Pemeliharaan Mebel							
						Jumlah Mebel yang Dipelihara	10 Unit	10 Unit	25.000.000,00	25.000.000,00	25.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
1	01	01	2.09	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya							
						Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	13 Unit	13 Unit	10.000.000,00	9.740.000,00	9.740.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

[illegible]

[illegible]

						Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Tersedia pada Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	56 Orang	56 Orang	1.707.436.000,00	1.369.418.400,00	1.369.418.400,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
1	01	02	2.02	0040	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama							
						Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitas Kenaikan Pangkat/Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi	350 Orang	350 Orang	300.000.000,00	300.000.000,00	363.228.800,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
1	01	02	2.02	0042	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama							
						Jumlah Sekolah Menengah pertama yang Mengelola Dana BOS	-	6 Satuan Pendidikan	0,00	3.865.275.000,00	3.987.082.846,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
1	01	02	2.02	0043	Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama							
						Jumlah Tenaga yang Meningkatkan Kapasitasnya dalam Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama	75 Orang	75 Orang	30.000.000,00	30.000.000,00	13.965.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
1	01	02	2.02	0046	Pemeliharaan Mebel Sekolah							
						Jumlah Mebel Sekolah yang Dilaksanakan Pemeliharaan	6 Unit	6 Unit	40.000.000,00	40.000.000,00	0,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
1	01	02	2.02	0051	Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan							
						Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan	14 Dokumen	14 Dokumen	20.000.000,00	20.000.000,00	20.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
1	01	02	2.02	0058	Penyelenggaraan Proses Belajar bagi Peserta Didik							
						Jumlah Peserta Didik yang Mengikuti Proses Belajar	-	1 Satuan Pendidikan	0,00	0,00	270.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
1	01	02	2.02	0061	Perlengkapan Dasar Buku Teks dan Non Teks Peserta Didik							
						Jumlah Buku Teks dan Non Teks yang Diterima Peserta Didik	-	988 Buku	0,00	0,00	115.254.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
1	01	02	2.02	0062	Pengadaan Perlengkapan Peserta Didik							
						Jumlah Perlengkapan Peserta Didik yang Tersedia	500 Paket	500 Paket	390.000.000,00	390.000.000,00	390.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
1	01	02	2.02	0067	Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik							
						Jumlah Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik yang Tersedia	2 Paket	2 Paket	30.000.000,00	30.000.000,00	30.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
1	01	02	2.02	0068	Penyediaan infrastruktur TIK							
						Jumlah paket infrastruktur TIK yang tersedia	-	130 Paket	0,00	0,00	119.860.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

1	01	02	2.03		Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)	Jumlah Satuan Pendidikan anak usia dini yang dikelola	58 Satuan Pendidikan	58 Satuan Pendidikan	5.099.680.000,00	6.916.579.000,00	6.916.579.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
1	01	02	2.03	0007	Pengadaan Mebel PAUD							
					Jumlah Mebel PAUD yang Tersedia	2 Paket	2 Paket	20.000.000,00	0,00	0,00		DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
1	01	02	2.03	0009	Pengadaan Perlengkapan PAUD							
					Jumlah perlengkapan PAUD yang Tersedia	2 Paket	13 Paket	97.000.000,00	669.099.000,00	910.099.000,00		DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
1	01	02	2.03	0011	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik PAUD							
					Jumlah Peserta Didik PAUD yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik	12 Peserta Didik	12 Peserta Didik	39.000.000,00	40.000.000,00	1.000.000,00		DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
1	01	02	2.03	0015	Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan PAUD							
					Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Tersedia pada PAUD	250 Orang	250 Orang	4.021.200.000,00	4.021.200.000,00	4.021.200.000,00		DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
1	01	02	2.03	0016	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan PAUD							
					Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitas Kenaikan Pangkat/Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi	325 Orang	325 Orang	251.480.000,00	251.480.000,00	168.776.200,00		DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
1	01	02	2.03	0017	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen PAUD							
					Jumlah PAUD yang Dilaksanakan Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen	61 Satuan Pendidikan	61 Satuan Pendidikan	75.000.000,00	75.000.000,00	49.870.000,00		DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
1	01	02	2.03	0018	Pengelolaan Dana BOP PAUD							
					Jumlah PAUD yang Mengelola Dana BOP	-	58 Satuan Pendidikan	0,00	1.363.800.000,00	1.363.800.000,00		DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
1	01	02	2.03	0019	Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOP PAUD							
					Jumlah Tenaga yang Meningkatkan Kapasitasnya dalam Pengelolaan Dana BOP PAUD	120 Orang	120 Orang	15.000.000,00	15.000.000,00	14.115.000,00		DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
1	01	02	2.03	0020	Pemeliharaan Mebel Sekolah							
					Jumlah Mebel Sekolah yang Dipelihara	2 Unit	2 Unit	30.000.000,00	0,00	0,00		DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
1	01	02	2.03	0025	Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan							
					Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan	61 Dokumen	61 Dokumen	30.000.000,00	30.000.000,00	15.760.000,00		DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

1	01	02	2.03	0041	Pengadaan Perlengkapan Peserta Didik		Jumlah Perlengkapan Peserta Didik yang Tersedia	150 Paket	150 Paket	20.000.000,00	20.000.000,00	19.944.496,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
1	01	02	2.03	0042	Pemeliharaan Rutin Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah		Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Dilaksanakan Pemeliharaan	2 Unit	2 Unit	331.000.000,00	331.000.000,00	0,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
1	01	02	2.03	0045	Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD		Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	-	2 Unit	0,00	0,00	325.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
1	01	02	2.03	0046	Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik PAUD		Jumlah Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik PAUD yang Tersedia	2 Paket	2 Paket	40.000.000,00	20.000.000,00	20.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
1	01	02	2.03	0047	Penyelenggaraan Proses Belajar PAUD		Jumlah Peserta Didik PAUD yang Mengikuti Proses Belajar	58 Satuan Pendidikan	58 Satuan Pendidikan	80.000.000,00	80.000.000,00	79.989.330,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
1	01	02	2.03	0051	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah		Jumlah Ruang Kelas Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	2 Ruang	2 Ruang	50.000.000,00	0,00	0,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
1	01	02	2.04		Pengelolaan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan		Jumlah Satuan Pendidikan Non Formal/kesetaraan yang dikelola	3 Satuan Pendidikan	3 Satuan Pendidikan	547.000.000,00	2.250.637.900,00	2.250.637.900,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
1	01	02	2.04	0014	Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan		Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Tersedia bagi Satuan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	5 Orang	5 Orang	112.000.000,00	112.000.000,00	94.466.300,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
1	01	02	2.04	0015	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan		Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitas Kenaikan Pangkat/Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi	30 Orang	30 Orang	62.000.000,00	62.000.000,00	34.651.500,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
1	01	02	2.04	0016	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Nonformal/Kesetaraan		Jumlah Sekolah Nonformal/Kesetaraan yang Dilaksanakan Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen	3 Satuan Pendidikan	3 Satuan Pendidikan	15.000.000,00	15.000.000,00	12.197.800,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
1	01	02	2.04	0017	Pengelolaan Dana BOP Sekolah Nonformal/Kesetaraan		Jumlah Sekolah Nonformal/Kesetaraan yang Mengelola Dana BOP	-	3 Satuan Pendidikan	0,00	437.900.000,00	437.900.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
1	01	02	2.04	0018	Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOP Sekolah Nonformal/Kesetaraan								

					Jumlah Tenaga yang Meningkatkan Kapasitasnya dalam Pengelolaan Dana BOP Sekolah Nonformal/Kesetaraan	30 Orang	30 Orang	15.000.000,00	15.000.000,00	7.677.850,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
1	01	02	2.04	0027	Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan						
					Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan	14 Dokumen	14 Dokumen	20.000.000,00	20.000.000,00	12.143.850,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
1	01	02	2.04	0039	Pembangunan Ruang Kelas Baru						
					Jumlah Ruang Kelas Baru yang Bertambah	0 Ruang	0 Ruang	0,00	1.457.737.900,00	1.408.906.400,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
1	01	02	2.04	0040	Pengadaan Perlengkapan Sekolah						
					Jumlah Perlengkapan Sekolah yang Tersedia	2 Paket	2 Paket	60.000.000,00	0,00	0,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
1	01	02	2.04	0046	Penyelenggaraan Proses Belajar bagi Peserta Didik						
					Jumlah Satuan Pendidikan yang Menyenggarakan Proses Belajar	3 Peserta Didik	3 Peserta Didik	113.000.000,00	131.000.000,00	66.854.280,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
1	01	02	2.04	0048	Pengadaan Mebel Sekolah						
					Jumlah Mebel Sekolah yang Tersedia	6 Paket	6 Paket	150.000.000,00	0,00	0,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
2					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR			551.776.000,00	736.776.000,00	633.512.000,00	
2	22				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN			551.776.000,00	736.776.000,00	633.512.000,00	
2	22	02			PROGRAM PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN	Persentase pelestarian objek pemajuan kebudayaan yang dilindungi, dikembangkan, dimanfaatkan dan dibina	4 Objek	4 Objek	551.776.000,00	736.776.000,00	633.512.000,00
2	22	02	2.01		Pengelolaan Kebudayaan yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah kebudayaan dengan masyarakat pelakunya yang dikelola	2 Objek	2 Objek	175.000.000,00	175.000.000,00	175.000.000,00
2	22	02	2.01	0001	Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Kebudayaan						
					Jumlah Objek Pemajuan Kebudayaan yang Dilakukan Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan	4 Objek	4 Objek	175.000.000,00	175.000.000,00	338.707.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
2	22	02	2.02		Pelestarian Kesenian Tradisional yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah kesenian tradisional dengan masyarakat pelakunya yang dilestarikan	3 nagari	3 nagari	132.000.000,00	132.000.000,00	132.000.000,00
2	22	02	2.02	0001	Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Tradisi Budaya						
					Jumlah Objek Pemajuan Tradisi Budaya yang Dilakukan Pelindungan, Pengembangan dan Pemanfaatan	3 Objek	3 Objek	41.000.000,00	41.000.000,00	26.621.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
2	22	02	2.02	0002	Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Tradisional						

						Jumlah Laporan Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Tradisional	2 Laporan	2 Laporan	91.000.000,00	91.000.000,00	70.248.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
2	22	02	2.03		Pembinaan Lembaga Adat yang Penganutnya dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah lembaga adat yang dibina	3 lembaga	3 lembaga	244.776.000,00	429.776.000,00	429.776.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
2	22	02	2.03	0001	Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Lembaga Adat							
						Jumlah Objek Pemajuan Lembaga Adat yang Telah Dilakukan Pelindungan, Pengembangan dan Pemanfaatan	3 Objek	3 Objek	180.000.000,00	365.000.000,00	178.436.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
2	22	02	2.03	0002	Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Adat							
						Jumlah Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Adat yang Dibina	60 Orang	60 Orang	45.000.000,00	45.000.000,00	0,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
2	22	02	2.03	0003	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pembinaan Lembaga Adat							
						Jumlah Sarana dan Prasarana Lembaga Adat yang Disediakan/Difasilitasi	3 Unit	3 Unit	19.776.000,00	19.776.000,00	19.500.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
					DINAS KESEHATAN							
1					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR							
1	02				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN							
1	02	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase pemenuhan urusan penunjang yang dipenuhi	100 Persen	100 Persen	76.342.156.129,00	77.295.614.213,00	67.251.613.338,00	
1	02	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	-	-	-	70.264.031.611,00	71.437.345.942,00	71.437.345.942,00	DINAS KESEHATAN
1	02	01	2.02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN							
						Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	493 Orang/bulan	579 Orang/bulan	70.264.031.611,00	71.437.345.942,00	60.855.176.550,00	DINAS KESEHATAN
1	02	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan layanan administrasi umum perangkat daerah Terlaksanya Administrasi umum Perangkat Daerah	1 Tahun 95 %	1 Tahun 95 %	391.613.550,00	358.848.603,00	358.848.603,00	DINAS KESEHATAN
1	02	01	2.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi							
						Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	3 Paket	3 Paket	8.000.000,00	7.995.700,00	4.907.820,00	DINAS KESEHATAN
1	02	01	2.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor							
						Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	2 Paket	2 Paket	38.614.000,00	38.607.091,00	26.219.146,00	DINAS KESEHATAN
1	02	01	2.06	0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan							
						Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	5 Paket	1 Paket	24.999.550,00	24.999.550,00	13.299.700,00	DINAS KESEHATAN
1	02	01	2.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD							
						Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	100 Laporan	60 Laporan	320.000.000,00	287.246.262,00	135.367.000,00	DINAS KESEHATAN

1	02	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Pemenuhan Barang Milik Daerah sesuai dengan perencanaan	80 Persen	80 Persen	94.000.000,00	169.099.500,00	169.099.500,00	DINAS KESEHATAN
1	02	01	2.07	0001	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan							
					Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan	0 Unit	1 Unit	0,00	90.000.000,00	0,00		DINAS KESEHATAN
1	02	01	2.07	0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya							
					Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	10 Unit	6 Unit	94.000.000,00	79.099.500,00	30.725.600,00		DINAS KESEHATAN
1	02	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang terpenuhi	100 persen	100 persen	1.595.101.028,00	1.372.315.028,00	1.372.315.028,00	DINAS KESEHATAN
1	02	01	2.08	0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat							
					Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 Laporan	12 Laporan	2.000.000,00	2.000.000,00	997.900,00		DINAS KESEHATAN
1	02	01	2.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik							
					Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	12 Laporan	58.376.238,00	52.076.238,00	40.000.000,00		DINAS KESEHATAN
1	02	01	2.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor							
					Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	12 Laporan	647.341.600,00	437.163.200,00	410.504.000,00		DINAS KESEHATAN
1	02	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase ketersediaan Barang Milik Daerah berkondisi baik	95 Persen	95 Persen	607.207.600,00	567.802.800,00	567.802.800,00	DINAS KESEHATAN
1	02	01	2.09	0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan							
					Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	1 Unit	1 Unit	33.008.000,00	17.008.000,00	11.905.600,00		DINAS KESEHATAN
1	02	01	2.09	0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan							
					Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	26 Unit	26 Unit	279.984.600,00	279.984.600,00	294.115.800,00		DINAS KESEHATAN
1	02	01	2.09	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya							
					Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	50 Unit	50 Unit	50.000.000,00	50.000.000,00	41.470.000,00		DINAS KESEHATAN
1	02	01	2.09	0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya							
					Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	3 Unit	3 Unit	50.000.000,00	50.000.000,00	25.000.000,00		DINAS KESEHATAN
1	02	02			PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Capaian Kinerja UKP dan UKM pada Fasilitas Kesehatan	91 Persen	91 Persen	10.719.027.642,00	16.342.416.889,00	20.499.442.729,00	

1	02	02	2.01		Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Kelengkapan Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan (SPA)	80 Persen	80 Persen	400.000.000,00	1.890.336.000,00	1.890.336.000,00	DINAS KESEHATAN
1	02	02	2.01	0002	Pembangunan Puskesmas							
						Jumlah Pusat Kesehatan Masyarakat (Puskesmas) yang Dibangun	-	1 Unit	0,00	936.000.000,00	936.000.000,00	DINAS KESEHATAN
1	02	02	2.01	0007	Pengembangan Fasilitas Kesehatan Lainnya							
						Jumlah Fasilitas Kesehatan Lainnya yang Ditingkatkan Sarana, Prasarana, Alat Kesehatan dan SDM agar Sesuai Standar	-	2 Unit	0,00	0,00	1.396.317.920,00	DINAS KESEHATAN
1	02	02	2.01	0010	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Fasilitas Kesehatan Lainnya							
						Jumlah Sarana , Prasarana dan Alat Kesehatan yang Telah Dilakukan Rehabilitasi dan Pemeliharaan oleh Fasilitas Kesehatan Lainnya	-	2 Unit	0,00	0,00	322.910.000,00	DINAS KESEHATAN
1	02	02	2.01	0014	Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan							
						Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang Disediakan	-	4 Unit	0,00	0,00	1.180.500.000,00	DINAS KESEHATAN
1	02	02	2.01	0020	Pemeliharaan Rutin dan Berkala Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan							
						Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan yang Terpelihara Sesuai Standar	-	200 Unit	0,00	0,00	103.982.400,00	DINAS KESEHATAN
1	02	02	2.01	0023	Pengadaan Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan							
						Jumlah Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan yang disediakan	3 Paket	4 Paket	400.000.000,00	954.336.000,00	1.352.625.000,00	DINAS KESEHATAN
1	02	02	2.02		Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Pencapaian Standar Pelayanan Minimal	82 Persen	82 Persen	10.319.027.642,00	14.431.880.889,00	14.431.880.889,00	DINAS KESEHATAN
1	02	02	2.02	0001	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil							
						Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	985 Orang	985 Orang	19.999.800,00	0,00	0,00	DINAS KESEHATAN

						Jumlah Penderita Hipertensi yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	7411 Orang	7411 Orang	34.998.800,00	0,00	0,00	DINAS KESEHATAN
						Jumlah Penderita Hipertensi yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	-	6147 Orang	0,00	34.998.800,00	34.998.800,00	DINAS KESEHATAN
1	02	02	2.02	0009	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus							
						Jumlah Penderita Diabetes Melitus yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	676 Orang	676 Orang	19.997.100,00	0,00	0,00	DINAS KESEHATAN
						Jumlah Penderita Diabetes Melitus yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	-	1043 Orang	0,00	19.997.100,00	218.177.100,00	DINAS KESEHATAN
1	02	02	2.02	0010	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat							
						Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar	128 Orang	128 Orang	14.994.600,00	0,00	0,00	DINAS KESEHATAN
						Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar	-	150 Orang	0,00	14.994.600,00	14.994.600,00	DINAS KESEHATAN
1	02	02	2.02	0011	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis							
						Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	1496 Orang	1496 Orang	34.998.100,00	0,00	0,00	DINAS KESEHATAN
1	02	02	2.02	0012	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV							
						Jumlah Orang Terduga Menderita HIV yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	1533 Orang	1533 Orang	25.381.800,00	0,00	0,00	DINAS KESEHATAN
						Jumlah Orang Terduga Menderita HIV yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	-	1510 Orang	0,00	25.381.800,00	67.106.800,00	DINAS KESEHATAN
1	02	02	2.02	0013	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB)							
						Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB) Sesuai Standar	1 Dokumen	1 Dokumen	10.556.400,00	0,00	0,00	DINAS KESEHATAN
						Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB) Sesuai Standar	-	12 Dokumen	0,00	10.556.400,00	41.103.800,00	DINAS KESEHATAN
1	02	02	2.02	0015	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat							
						Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	1 Dokumen	1 Dokumen	35.000.150,00	0,00	0,00	DINAS KESEHATAN

					Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	-	2 Dokumen	0,00	35.000.150,00	198.480.000,00	DINAS KESEHATAN
1	02	02	2.02	0016	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga						
					Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	3 Dokumen	3 Dokumen	22.134.000,00	0,00	0,00	DINAS KESEHATAN
					Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	-	2 Dokumen	0,00	67.898.400,00	67.898.400,00	DINAS KESEHATAN
1	02	02	2.02	0017	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan						
					Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	12 Dokumen	12 Dokumen	52.800.000,00	0,00	0,00	DINAS KESEHATAN
					Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	-	12 Dokumen	0,00	52.800.000,00	112.800.000,00	DINAS KESEHATAN
1	02	02	2.02	0018	Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan						
					Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	-	12 Dokumen	0,00	117.156.000,00	117.156.000,00	DINAS KESEHATAN
1	02	02	2.02	0020	Pengelolaan Surveilans Kesehatan						
					Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan	-	12 Dokumen	0,00	17.640.000,00	17.640.000,00	DINAS KESEHATAN
1	02	02	2.02	0025	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular						
					Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	1 Dokumen	1 Dokumen	29.995.600,00	0,00	0,00	DINAS KESEHATAN
					Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	-	12 Dokumen	0,00	260.137.600,00	277.428.500,00	DINAS KESEHATAN
1	02	02	2.02	0026	Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat						
					Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	15 Dokumen	15 Dokumen	7.896.192.292,00	0,00	0,00	DINAS KESEHATAN
					Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	-	15 Dokumen	0,00	8.631.176.692,00	8.631.176.692,00	DINAS KESEHATAN
1	02	02	2.02	0028	Pengambilan dan Pengiriman Spesimen Penyakit Potensial KLB ke Laboratorium Rujukan/Nasional						

[illegible]

						Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang Dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga	30 Dokumen	102 Dokumen	5.000.500,00	132.963.500,00	132.963.500,00	DINAS KESEHATAN
1	02	04	2.06		Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Post Market pada Produksi dan Produk Makanan Minuman Industri Rumah Tangga	Persentase Pelaksanaan Pemeriksaan Produk dan Sarana Produk Makanan minuman Industri Rumah Tangga	80 persen	80 persen	10.000.250,00	211.645.450,00	211.645.450,00	DINAS KESEHATAN
1	02	04	2.06	0001	Pemeriksaan Post Market pada Produk Makanan-Minuman Industri Rumah Tangga yang Beredar dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan							
						Jumlah Produk dan Sarana Produksi Makanan-Minuman Industri Rumah Tangga Beredar yang Dilakukan Pemeriksaan Post Market dalam rangka Tindak Lanjut Pengawasan	30 Unit	30 Unit	10.000.250,00	211.645.450,00	297.875.350,00	DINAS KESEHATAN
1	02	05			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	persentase upaya kesehatan bersumber masyarakat yang aktif	98.13 %	98.13 %	263.400.000,00	374.362.000,00	480.504.600,00	
1	02	05	2.01		Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Kegiatan Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Kota	5 Kegiatan	5 Kegiatan	238.400.000,00	238.400.000,00	238.400.000,00	DINAS KESEHATAN
1	02	05	2.01	0001	Peningkatan Upaya Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat							
						Jumlah Dokumen Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat	3 Dokumen	3 Dokumen	150.000.000,00	150.000.000,00	150.000.000,00	DINAS KESEHATAN
1	02	05	2.02		Pelaksanaan Sehat dalam rangka Promotif Preventif Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Kelurahan yg mengikuti Germas	16 Kelurahan	16 Kelurahan	25.000.000,00	25.000.000,00	25.000.000,00	DINAS KESEHATAN
1	02	05	2.02	0001	Penyelenggaraan Promosi Kesehatan dan Gerakan Hidup Bersih dan Sehat							
						Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Promosi Kesehatan dan Gerakan Hidup Bersih dan Sehat	1 Dokumen	1 Dokumen	25.000.000,00	25.000.000,00	25.000.000,00	DINAS KESEHATAN
1	02	05	2.03		Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	-	-	-	0,00	110.962.000,00	110.962.000,00	DINAS KESEHATAN
1	02	05	2.03	0001	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)							
						Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	-	12 Dokumen	0,00	44.000.000,00	143.345.600,00	DINAS KESEHATAN
					PUSKESMAS KOTO KATIK				87.459.585.821,00	94.807.896.152,00	89.113.323.517,00	
1					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR				87.459.585.821,00	94.807.896.152,00	89.113.323.517,00	

[illegible]

						Jumlah dokumen hasil pengelolaan upaya kesehatan ibu dan anak	-	12 Dokumen	0,00	500.000,00	500.000,00	DINAS KESEHATAN
1	02	02	2.02	0047	Pengelolaan Pelayanan Kelanjutan							
						Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kelanjutan	-	12 Dokumen	0,00	4.800.000,00	4.800.000,00	DINAS KESEHATAN
1	02	02	2.02	0048	Pengelolaan Layanan Imunisasi							
						Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Layanan Imunisasi	-	12 Dokumen	0,00	48.800.000,00	48.800.000,00	DINAS KESEHATAN
1	02	05			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	persentase upaya kesehatan bersumber masyarakat yang aktif	98.13 %	98.13 %	263.400.000,00	374.362.000,00	480.504.600,00	
1	02	05	2.01		Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Kegiatan Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Kota	5 Kegiatan	5 Kegiatan	238.400.000,00	238.400.000,00	238.400.000,00	DINAS KESEHATAN
1	02	05	2.01	0001	Peningkatan Upaya Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat							
						Jumlah Dokumen Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat	12 Dokumen	12 Dokumen	25.000.000,00	25.000.000,00	25.000.000,00	DINAS KESEHATAN
1	02	05	2.03		Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	-	-	-	0,00	110.962.000,00	110.962.000,00	DINAS KESEHATAN
1	02	05	2.03	0001	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)							
						Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	-	12 Dokumen	0,00	2.000.000,00	17.176.000,00	DINAS KESEHATAN
					PUSKESMAS KEBUN SIKOLOS				87.459.585.821,00	94.807.896.152,00	89.113.323.517,00	
1					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR				87.459.585.821,00	94.807.896.152,00	89.113.323.517,00	
1	02				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN				87.459.585.821,00	94.807.896.152,00	89.113.323.517,00	
1	02	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase pemenuhan urusan penunjang yang dipenuhi pada Dinas Kesehatan Persentase pemenuhan urusan penunjang pada perangkat daerah	100 100 % persen	100 100 % persen	76.342.156.129,00	77.295.614.213,00	67.251.613.338,00	
1	02	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang terpenuhi	100 persen	100 persen	1.595.101.028,00	1.372.315.028,00	1.372.315.028,00	DINAS KESEHATAN
1	02	01	2.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik							
						Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	12 Laporan	48.400.190,00	48.400.190,00	48.400.190,00	DINAS KESEHATAN
1	02	01	2.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor							
						Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	12 Laporan	210.019.200,00	210.019.200,00	209.319.200,00	DINAS KESEHATAN
1	02	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase ketersediaan Barang Milik Daerah berkondisi baik	95 Persen	95 Persen	607.207.600,00	567.802.800,00	567.802.800,00	DINAS KESEHATAN
1	02	01	2.09	0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan							

						Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	-	12 Dokumen	0,00	16.400.000,00	16.400.000,00	DINAS KESEHATAN
1	02	02	2.02	0017	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan							
						Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	-	12 Dokumen	0,00	18.000.000,00	18.000.000,00	DINAS KESEHATAN
1	02	02	2.02	0020	Pengelolaan Surveilans Kesehatan							
						Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan	-	12 Dokumen	0,00	7.710.000,00	8.410.000,00	DINAS KESEHATAN
1	02	02	2.02	0021	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK)							
						Jumlah Orang dengan Masalah Kejiwaan (ODMK) yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan	-	12 Orang	0,00	8.800.000,00	8.800.000,00	DINAS KESEHATAN
1	02	02	2.02	0025	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular							
						Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	12 Dokumen	12 Dokumen	50.400.000,00	105.160.000,00	98.260.000,00	DINAS KESEHATAN
1	02	02	2.02	0033	Operasional Pelayanan Puskesmas							
						Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	-	12 Dokumen	0,00	185.420.000,00	185.420.000,00	DINAS KESEHATAN
1	02	02	2.02	0044	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi							
						Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan reproduksi	-	12 Dokumen	0,00	9.000.000,00	9.000.000,00	DINAS KESEHATAN
1	02	02	2.02	0046	Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak							
						Jumlah dokumen hasil pengelolaan upaya kesehatan ibu dan anak	-	12 Dokumen	0,00	600.000,00	600.000,00	DINAS KESEHATAN
1	02	02	2.02	0047	Pengelolaan Pelayanan Kelanjutan							
						Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kelanjutan	-	12 Dokumen	0,00	3.000.000,00	3.000.000,00	DINAS KESEHATAN
1	02	02	2.02	0048	Pengelolaan Layanan Imunisasi							
						Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Layanan Imunisasi	-	12 Dokumen	0,00	21.700.000,00	21.700.000,00	DINAS KESEHATAN
1	02	05			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	persentase upaya kesehatan bersumber masyarakat yang aktif	98.13 %	98.13 %	263.400.000,00	374.362.000,00	480.504.600,00	
1	02	05	2.01		Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Kegiatan Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Kota	5 Kegiatan	5 Kegiatan	238.400.000,00	238.400.000,00	238.400.000,00	DINAS KESEHATAN
1	02	05	2.01	0001	Peningkatan Upaya Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat							
						Jumlah Dokumen Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat	12 Dokumen	12 Dokumen	25.000.000,00	25.000.000,00	25.000.000,00	DINAS KESEHATAN

1	02	05	2.03		Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	-	-	-	0,00	110.962.000,00	110.962.000,00	DINAS KESEHATAN
1	02	05	2.03	0001	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)							
					Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	-	12 Dokumen	0,00	18.479.000,00	18.479.000,00	DINAS KESEHATAN	
					PUSKESMAS BUKIT SURUNGAN				87.459.585.821,00	94.807.896.152,00	89.113.323.517,00	
1					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR				87.459.585.821,00	94.807.896.152,00	89.113.323.517,00	
1	02				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN				87.459.585.821,00	94.807.896.152,00	89.113.323.517,00	
1	02	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase pemenuhan urusan penunjang yang dipenuhi pada Dinas Kesehatan Persentase pemenuhan urusan penunjang pada perangkat daerah	100 100 % persen	100 100 % persen	76.342.156.129,00	77.295.614.213,00	67.251.613.338,00	
1	02	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang terpenuhi	100 persen	100 persen	1.595.101.028,00	1.372.315.028,00	1.372.315.028,00	DINAS KESEHATAN
1	02	01	2.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik							
					Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	12 Laporan	45.598.200,00	45.598.200,00	43.997.580,00	DINAS KESEHATAN	
1	02	01	2.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor							
					Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	12 Laporan	212.478.000,00	178.976.000,00	178.938.400,00	DINAS KESEHATAN	
1	02	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase ketersediaan Barang Milik Daerah ber kondisi baik	95 Persen	95 Persen	607.207.600,00	567.802.800,00	567.802.800,00	DINAS KESEHATAN
1	02	01	2.09	0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan							
					Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	12 Unit	12 Unit	0,00	50.800.000,00	49.042.800,00	DINAS KESEHATAN	
1					NON URUSAN				87.459.585.821,00	94.807.896.152,00	89.113.323.517,00	
1	02				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX				87.459.585.821,00	94.807.896.152,00	89.113.323.517,00	
1	02	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase pemenuhan urusan penunjang yang dipenuhi pada Dinas Kesehatan Persentase pemenuhan urusan penunjang pada perangkat daerah	100 100 % persen	100 100 % persen	76.342.156.129,00	77.295.614.213,00	67.251.613.338,00	
1	02	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase ketersediaan Barang Milik Daerah ber kondisi baik	95 Persen	95 Persen	607.207.600,00	567.802.800,00	567.802.800,00	DINAS KESEHATAN
1	02	01	2.09	0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan							
1					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR				87.459.585.821,00	94.807.896.152,00	89.113.323.517,00	
1	02				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN				87.459.585.821,00	94.807.896.152,00	89.113.323.517,00	

1		02	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase pemenuhan urusan penunjang yang dipenuhi pada Dinas Kesehatan Persentase pemenuhan urusan penunjang pada perangkat daerah	100 % persen	100 % persen	76.342.156.129,00	77.295.614.213,00	67.251.613.338,00	
1	02	01	2.10			Peningkatan Pelayanan BLUD	Jumlah BLUD yang menyediakan pelayanan dan penunjang pelayanan	1 BLUD	1 BLUD	3.390.202.340,00	3.390.202.340,00	3.390.202.340,00	DINAS KESEHATAN
1	02	01	2.10	0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD								
							Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	1 Unit Kerja	1 Unit Kerja	850.000.000,00	850.000.000,00	1.075.143.861,00	DINAS KESEHATAN
1	02	02				PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Cakupan Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang melaksanakan Program UKM dan UKP Capaian Kinerja UKP dan UKM pada Fasilitas Kesehatan	100 % Persen	100 % Persen	10.719.027.642,00	16.342.416.889,00	20.499.442.729,00	
1	02	02	2.02			Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Pencapaian Standar Pelayanan Minimal	82 Persen	82 Persen	10.319.027.642,00	14.431.880.889,00	14.431.880.889,00	DINAS KESEHATAN
1	02	02	2.02	0001	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil								
							Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	-	218 Orang	0,00	37.400.000,00	35.600.000,00	DINAS KESEHATAN
1	02	02	2.02	0005	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar								
							Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	-	1558 Orang	0,00	34.250.000,00	40.250.000,00	DINAS KESEHATAN
1	02	02	2.02	0007	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut								
							Jumlah Penduduk Usia Lanjut yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	1162 Orang	1162 Orang	93.000.000,00	93.000.000,00	80.555.720,00	DINAS KESEHATAN
1	02	02	2.02	0010	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat								
							Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar	-	33 Orang	0,00	7.200.000,00	7.200.000,00	DINAS KESEHATAN
1	02	02	2.02	0011	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis								
							Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	-	357 Orang	0,00	3.600.000,00	3.600.000,00	DINAS KESEHATAN
1	02	02	2.02	0015	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat								
							Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	12 Dokumen	12 Dokumen	75.000.000,00	342.174.000,00	341.219.850,00	DINAS KESEHATAN
1	02	02	2.02	0016	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga								

						Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	-	12 Dokumen	0,00	8.700.000,00	8.700.000,00	DINAS KESEHATAN
1	02	02	2.02	0017	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan							
						Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	-	12 Dokumen	0,00	10.300.000,00	10.300.000,00	DINAS KESEHATAN
1	02	02	2.02	0020	Pengelolaan Surveilans Kesehatan							
						Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan	-	12 Dokumen	0,00	20.420.000,00	20.020.000,00	DINAS KESEHATAN
1	02	02	2.02	0021	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK)							
						Jumlah Orang dengan Masalah Kejiwaan (ODMK) yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan	-	0 Orang	0,00	3.800.000,00	3.800.000,00	DINAS KESEHATAN
1	02	02	2.02	0025	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular							
						Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	12 Dokumen	12 Dokumen	57.600.000,00	121.274.000,00	119.414.000,00	DINAS KESEHATAN
1	02	02	2.02	0033	Operasional Pelayanan Puskesmas							
						Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	-	12 Dokumen	0,00	202.086.000,00	221.393.000,00	DINAS KESEHATAN
1	02	02	2.02	0044	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi							
						Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan reproduksi	-	12 Dokumen	0,00	15.140.000,00	5.200.000,00	DINAS KESEHATAN
1	02	02	2.02	0046	Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak							
						Jumlah dokumen hasil pengelolaan upaya kesehatan ibu dan anak	-	12 Dokumen	0,00	955.000,00	631.000,00	DINAS KESEHATAN
1	02	02	2.02	0047	Pengelolaan Pelayanan Kelanjutan							
						Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kelanjutan	-	12 Dokumen	0,00	10.000.000,00	10.000.000,00	DINAS KESEHATAN
1	02	02	2.02	0048	Pengelolaan Layanan Imunisasi							
						Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Layanan Imunisasi	-	12 Dokumen	0,00	9.300.000,00	9.300.000,00	DINAS KESEHATAN
1	02	05			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	persentase upaya kesehatan bersumber masyarakat yang aktif	98.13 %	98.13 %	263.400.000,00	374.362.000,00	480.504.600,00	
1	02	05	2.01		Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Kegiatan Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Kota	5 Kegiatan	5 Kegiatan	238.400.000,00	238.400.000,00	238.400.000,00	DINAS KESEHATAN
1	02	05	2.01	0001	Peningkatan Upaya Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat							
						Jumlah Dokumen Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat	12 Dokumen	12 Dokumen	19.200.000,00	19.200.000,00	19.200.000,00	DINAS KESEHATAN

						Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	-	166 Orang	0,00	26.880.000,00	26.880.000,00	DINAS KESEHATAN
1	02	02	2.02	0005	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar							
						Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	-	2090 Orang	0,00	20.200.000,00	20.200.000,00	DINAS KESEHATAN
1	02	02	2.02	0007	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut							
						Jumlah Penduduk Usia Lanjut yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	1171 Orang	1139 Orang	105.600.000,00	105.600.000,00	81.400.000,00	DINAS KESEHATAN
1	02	02	2.02	0010	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat							
						Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar	-	33 Orang	0,00	4.800.000,00	4.800.000,00	DINAS KESEHATAN
1	02	02	2.02	0011	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis							
						Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	-	257 Orang	0,00	6.000.000,00	6.000.000,00	DINAS KESEHATAN
1	02	02	2.02	0015	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat							
						Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	12 Dokumen	12 Dokumen	75.000.000,00	354.132.000,00	327.732.000,00	DINAS KESEHATAN
1	02	02	2.02	0016	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga							
						Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	-	12 Dokumen	0,00	2.350.000,00	2.350.000,00	DINAS KESEHATAN
1	02	02	2.02	0017	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan							
						Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	-	12 Dokumen	0,00	8.200.000,00	8.200.000,00	DINAS KESEHATAN
1	02	02	2.02	0020	Pengelolaan Surveilans Kesehatan							
						Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan	-	12 Dokumen	0,00	8.340.000,00	8.340.000,00	DINAS KESEHATAN
1	02	02	2.02	0021	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK)							
						Jumlah Orang dengan Masalah Kejiwaan (ODMK) yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan	-	8 Orang	0,00	2.000.000,00	2.000.000,00	DINAS KESEHATAN
1	02	02	2.02	0025	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular							
						Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	12 Dokumen	12 Dokumen	43.200.000,00	93.469.000,00	93.469.000,00	DINAS KESEHATAN

1	02	02	2.02	0033	Operasional Pelayanan Puskesmas													
					Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	-	12 Dokumen	0,00	140.996.000,00	140.996.000,00		DINAS KESEHATAN						
1	02	02	2.02	0044	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi													
					Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan reproduksi	-	12 Dokumen	0,00	3.800.000,00	3.800.000,00		DINAS KESEHATAN						
1	02	02	2.02	0046	Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak													
					Jumlah dokumen hasil pengelolaan upaya kesehatan ibu dan anak	-	12 Dokumen	0,00	600.000,00	600.000,00		DINAS KESEHATAN						
1	02	02	2.02	0047	Pengelolaan Pelayanan Kelanjutan													
					Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kelanjutan	-	12 Dokumen	0,00	19.200.000,00	19.200.000,00		DINAS KESEHATAN						
1	02	02	2.02	0048	Pengelolaan Layanan Imunisasi													
					Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Layanan Imunisasi	-	12 Dokumen	0,00	15.500.000,00	15.500.000,00		DINAS KESEHATAN						
1	02	05			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	persentase upaya kesehatan bersumber masyarakat yang aktif	98.13 %	98.13 %	263.400.000,00	374.362.000,00	480.504.600,00							
1	02	05	2.01		Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Kegiatan Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Kota	5 Kegiatan	5 Kegiatan	238.400.000,00	238.400.000,00	238.400.000,00	DINAS KESEHATAN						
1	02	05	2.01	0001	Peningkatan Upaya Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat													
					Jumlah Dokumen Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat	12 Dokumen	12 Dokumen	19.200.000,00	19.200.000,00	19.200.000,00		DINAS KESEHATAN						
1	02	05	2.03		Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	-	-	-	0,00	110.962.000,00	110.962.000,00	DINAS KESEHATAN						
1	02	05	2.03	0001	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)													
					Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	-	12 Dokumen	0,00	35.704.000,00	35.704.000,00		DINAS KESEHATAN						
					RUMAH SAKIT UMUM DAERAH				65.913.334.897,00	70.174.683.897,00	74.159.554.752,88							
1					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR				65.913.334.897,00	70.174.683.897,00	74.159.554.752,88							
1	02				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN				65.913.334.897,00	70.174.683.897,00	74.159.554.752,88							
1	02	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase pemenuhan urusan penunjang yang dipenuhi pada Dinas Kesehatan Persentase pemenuhan urusan penunjang pada perangkat daerah	100 100 % persen	100 100 % persen	65.913.334.897,00	65.913.334.897,00	65.947.503.252,88							
1	02	01	2.10		Peningkatan Pelayanan BLUD	Jumlah BLUD yang menyediakan pelayanan dan penunjang pelayanan	1 BLUD	1 BLUD	65.913.334.897,00	65.913.334.897,00	65.913.334.897,00	DINAS KESEHATAN						
1	02	01	2.10	0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD													
					Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	1 Unit Kerja	1 Unit Kerja	65.913.334.897,00	65.913.334.897,00	65.947.503.252,88		DINAS KESEHATAN						

1	02	02			PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Cakupan Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang Melaksanakan Program UKM dan UKP Capaian Kinerja UKP dan UKM pada Fasilitas Kesehatan	-	100 88 %	0,00	4.261.349.000,00	8.212.051.500,00	
1	02	02	2.01		Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Rumah sakit yang ditingkatkan sarana, prasarana, alat kesehatan dan SDM agar sesuai standar jenis pelayanan rumah sakit berdasarkan kelas rumah sakit yang memenuhi rasio tempat tidur terhadap jumlah penduduk minimal 1:1000 dan/atau dalam rangka peningkatan kapasitas pelayanan rumah sakit	-	1 unit	0,00	4.261.349.000,00	4.261.349.000,00	DINAS KESEHATAN
1	02	02	2.01	0022	Pengembangan Rumah Sakit							
						Jumlah Rumah sakit yang ditingkatkan sarana, prasarana, alat kesehatan dan SDM agar sesuai standar jenis pelayanan rumah sakit berdasarkan kelas rumah sakit yang memenuhi rasio tempat tidur terhadap jumlah penduduk minimal 1:1000 dan/atau dalam rangka peningkatan kapasitas pelayanan rumah sakit	-	1 Unit	0,00	4.261.349.000,00	8.212.051.500,00	DINAS KESEHATAN
					DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG							
1					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR				23.519.841.379,00	18.920.888.286,00	25.806.747.752,00	
1	03				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG				23.469.841.379,00	18.908.238.286,00	25.802.697.752,00	
1	03	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase pemenuhan urusan penunjang pada perangkat daerah	100 %	100 %	7.163.538.129,00	7.420.743.606,00	6.909.310.356,00	
1	03	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan layanan administrasi keuangan perangkat daerah Persentase Terpenuhinya Urusan Penunjang Pemerintah Daerah	100 % 46 orang	100 % 46 orang	5.928.038.129,00	6.187.243.606,00	6.187.243.606,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
1	03	01	2.02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN							
						Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	658 Orang/bulan	658 Orang/bulan	5.928.038.129,00	6.187.243.606,00	6.061.483.456,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
1	03	01	2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan layanan administrasi kepegawaian perangkat daerah	100 %	100 %	0,00	0,00	0,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
1	03	01	2.05	0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya							
						Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	47 Paket	47 Paket	0,00	0,00	0,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
1	03	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan layanan administrasi umum perangkat daerah	100 %	100 %	327.000.000,00	327.000.000,00	327.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
1	03	01	2.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi							
						Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	4 Paket	4 Paket	6.500.000,00	6.500.000,00	2.550.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG

1	03	01	2.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor							
					Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	4 Paket	4 Paket	50.000.000,00	50.000.000,00	25.499.533,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	
1	03	01	2.06	0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan							
					Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	12 Paket	12 Paket	20.500.000,00	20.500.000,00	10.249.700,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	
1	03	01	2.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD							
					Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	24 Laporan	24 Laporan	250.000.000,00	250.000.000,00	135.895.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	
1	03	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang terpenuhi	100 %	100 %	324.500.000,00	317.000.000,00	317.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
1	03	01	2.08	0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat							
					Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 Laporan	12 Laporan	4.000.000,00	4.000.000,00	2.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	
1	03	01	2.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik							
					Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	36 Laporan	36 Laporan	20.500.000,00	20.500.000,00	20.499.116,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	
1	03	01	2.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor							
					Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	13 Laporan	13 Laporan	300.000.000,00	292.500.000,00	292.500.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	
1	03	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase ketersediaan Barang Milik Daerah berkondisi baik	90 %	90 %	584.000.000,00	589.500.000,00	589.500.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
1	03	01	2.09	0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan							
					Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	1 Unit	1 Unit	40.000.000,00	45.500.000,00	34.196.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	
1	03	01	2.09	0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan							
					Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	30 Unit	30 Unit	250.000.000,00	250.000.000,00	230.368.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	
1	03	01	2.09	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya							
					Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	6 Unit	6 Unit	40.000.000,00	40.000.000,00	35.935.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	
1	03	01	2.09	0007	Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya							
					Jumlah Aset Tetap Lainnya yang Dipelihara	1 Unit	1 Unit	4.000.000,00	4.000.000,00	4.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	

1	03	01	2.09	0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya							
					Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	1 Unit	250.000.000,00	250.000.000,00	54.134.551,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	
1	03	02			PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)	Persentase panjang sungai yang dikonservasi Persentase jaringan irigasi dengan kondisi baik	22,82 72,96 % %	22,82 72,96 % %	3.474.435.000,00	2.491.358.910,00	3.581.611.630,00	
1	03	02	2.01		Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai (WS) dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Panjang Sungai yang Dinormalisasi/Direstorasi	0,2 km	0,2 km	1.014.435.000,00	935.000.000,00	935.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
1	03	02	2.01	0093	Normalisasi/Restorasi Sungai							
					Panjang Sungai yang Dinormalisasi/Direstorasi	1.2 KM	1.2 KM	1.014.435.000,00	935.000.000,00	1.550.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	
1	03	02	2.01	0128	Penyusunan Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Bendungan, Embung, dan Bangunan Penampung Air Lainnya							
					Jumlah Dokumen Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Bendungan, Danau dan Bangunan Penampung Air Lainnya yang Disusun	0 Dokumen	0 Dokumen	0,00	0,00	0,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	
1	03	02	2.02		Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Primer dan Sekunder pada Daerah Irigasi yang Luasnya di Bawah 1000 Ha dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Panjang Irigasi yang ditingkatkan dan dipelihara	2,5 km	2,5 km	2.460.000.000,00	1.556.358.910,00	1.556.358.910,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
1	03	02	2.02	0008	Peningkatan Jaringan Irigasi Permukaan							
					Panjang Jaringan Irigasi Permukaan yang Ditingkatkan	0.6 KM	0.6 KM	565.000.000,00	0,00	0,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	
1	03	02	2.02	0014	Rehabilitasi Jaringan Irigasi Permukaan							
					Panjang Jaringan Irigasi Permukaan yang Direhabilitasi	0.8 KM	0.8 KM	1.895.000.000,00	1.556.358.910,00	2.031.611.630,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	
1	03	02	2.02	0035	Penyusunan Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Irigasi dan Rawa							
					Jumlah Dokumen Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Irigasi dan Rawa yang Disusun	0 Dokumen	0 Dokumen	0,00	0,00	0,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	
1	03	03			PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM	Persentase Cakupan Pelayanan Air Minum Persentase Rumah Tangga dengan Akses Berkelanjutan Terhadap Air Minum Layak Persentase Cakupan Pelayanan Air Minum [deleted]	85,36 87,15 89 % % %	85,36 87,15 89 % % %	150.000.000,00	200.500.000,00	373.936.340,00	
1	03	03	2.01		Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Sambungan Rumah Tangga dari Unit Spam yang dibangun	100 SR	100 SR	150.000.000,00	200.500.000,00	200.500.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
1	03	03	2.01	0025	Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM)							

[illegible]

						Jumlah Dokumen Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Pengembangan Jaringan Jalan serta Perencanaan Teknis Penyelenggaraan Jalan dan Jembatan yang Disusun	0 Dokumen	0 Dokumen	0,00	0,00	0,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
1	03	10	2.01	0032	Pembangunan Jalan							
						Panjang Jalan yang Dibangun	1 KM	1 KM	5.000.000.000,00	703.683.000,00	1.057.363.008,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
1	03	10	2.01	0034	Pemeliharaan Berkala Jalan							
						Panjang Jalan yang Dipelihara Secara Berkala	2 KM	3 KM	1.000.000.000,00	1.132.250.000,00	3.710.041.818,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
1	03	10	2.01	0046	Pemeliharaan Rutin Jalan							
						Panjang Jalan yang Dipelihara Secara Rutin	2 KM	2 KM	1.910.000.000,00	926.495.370,00	1.626.290.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
1	03	11			PROGRAM PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI	Persentase Tenaga Konstruksi Yang Bersertifikat	66 %	66 %	242.000.000,00	267.000.000,00	61.460.900,00	
1	03	11	2.01		Penyelenggaraan Pelatihan Tenaga Terampil Konstruksi	Jumlah tenaga kerja konstruksi dan Lembaga Konstruksi yang mengikuti Pelatihan	33 orang	33 orang	200.000.000,00	200.000.000,00	200.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
1	03	11	2.01	0010	Fasilitasi Sertifikasi Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Jabatan Operator dan Teknisi atau Analis							
						Jumlah Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Jabatan Operator dan Teknisi atau Analis yang Difasilitasi Sertifikasi	30 Orang	30 Orang	150.000.000,00	150.000.000,00	25.778.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
1	03	11	2.01	0011	Pembinaan dan Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Jasa Konstruksi							
						Jumlah Lembaga Jasa Konstruksi yang Dibina dan Ditingkatkan Kapasitasnya	3 Lembaga	3 Lembaga	50.000.000,00	50.000.000,00	0,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
1	03	11	2.02		Penyelenggaraan Sistem Informasi Jasa Konstruksi Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Penyelenggaraan Sistem Informasi Jasa Konstruksi	40 dokumen	40 dokumen	30.000.000,00	55.000.000,00	55.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
1	03	11	2.02	0012	Penyediaan Perangkat Pendukung Layanan Informasi Jasa Konstruksi							
						Jumlah Perangkat Pendukung Layanan Informasi Jasa Konstruksi yang Disediakan	1 Perangkat Pendukung	1 Perangkat Pendukung	5.000.000,00	5.000.000,00	2.289.900,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
1	03	11	2.02	0013	Penyediaan Data dan Informasi Jasa Konstruksi Cakupan Kabupaten/Kota							
						Jumlah Dokumen Data dan Informasi Jasa Konstruksi Cakupan Kabupaten/Kota yang Disediakan	40 Dokumen	40 Dokumen	25.000.000,00	50.000.000,00	27.463.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
1	03	11	2.04		Pengawasan Tertib Usaha, Tertib Penyelenggaraan dan Tertib Pemanfaatan Jasa Konstruksi	Jumlah Dokumen pengawasan dan evaluasi tertib usaha, tertib penyelenggaraan dan tertib pemanfaatan jasa konstruksi	30 dokumen	30 dokumen	12.000.000,00	12.000.000,00	12.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
1	03	11	2.04	0004	Pengawasan dan Evaluasi Tertib Penyelenggaraan Jasa Konstruksi Kabupaten/Kota							

						Jumlah Paket Pekerjaan Jasa Konstruksi Kabupaten/Kota yang Diawasi dan Dievaluasi Tertib Penyelenggaraan	30 Paket Pekerjaan	30 Paket Pekerjaan	12.000.000,00	12.000.000,00	5.930.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
1	03	12			PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG	Rasio ketaatan terhadap RTRW pertahun Rasio ketaatan terhadap RTRW per tahun	0,23 0,23 % %	0,23 0,23 % %	400.000.000,00	395.201.950,00	481.968.750,00	
1	03	12	2.01		Penetapan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Rencana Rinci Tata Ruang (RRTR) Kabupaten/Kota	Jumlah dokumen dalam rangka persubstransi RTRW dan RRTR ke KemenATR Jumlah dokumen dalam rangka per Substansi RTRW dan RDTR ke KemenATR	1 dokumen 2 dokumen 2 Dokumen	1 dokumen 2 dokumen 2 Dokumen	0,00	0,00	0,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
1	03	12	2.01	0003	Penetapan Kebijakan dalam rangka Pelaksanaan Penataan Ruang							
						Jumlah Dokumen Kebijakan Perda/Perkada selain RTRW Kabupaten/Kota	0 Dokumen	0 Dokumen	0,00	0,00	0,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
1	03	12	2.02		Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Tata Ruang Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah dokumen RRTR yang disusun Jumlah dokumen RTR yang disusun	0 dokumen 0 Dokumen	0 dokumen 0 Dokumen	200.000.000,00	303.164.000,00	303.164.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
1	03	12	2.02	0005	Penyusunan RDTR Kabupaten/Kota							
						Jumlah materi teknis dan ranperkada RDTR Kabupaten/Kota	0 Dokumen	0 Dokumen	200.000.000,00	303.164.000,00	187.050.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
1	03	12	2.03		Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota	jumlah data dan informasi yang dihasilkan sistem informasi tata ruang jumlah dokumen data dan informasi yang dihasilkan sistem informasi tata ruang	1 dokumen 1 Dokumen	1 dokumen 1 Dokumen	100.000.000,00	52.900.000,00	52.900.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
1	03	12	2.03	0005	Pelaksanaan Sinkronisasi Program Pemanfaatan Ruang							
						Jumlah dokumen sinkronisasi program pemanfaatan ruang	0 Dokumen	0 Dokumen	0,00	0,00	0,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
1	03	12	2.03	0007	Sistem informasi dan komunikasi penataan ruang							
						Jumlah sistem informasi dan komunikasi penataan ruang	1 Sistem Informasi	1 Sistem Informasi	100.000.000,00	52.900.000,00	35.800.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
1	03	12	2.04		Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah dokumen penertiban dan penegakan hukum bidang tata ruang yang dilaksanakan	3 dokumen 3 Dokumen	3 dokumen 3 Dokumen	100.000.000,00	39.137.950,00	39.137.950,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
1	03	12	2.04	0009	Operasionalisasi Tugas dan Fungsi Forum Penataan Ruang							
						Jumlah Laporan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Forum Penataan Ruang	2 Laporan	2 Laporan	50.000.000,00	16.827.950,00	250.538.750,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
1	03	12	2.04	0011	Pengawasan TURBINLAK dan Pengawasan Fungsi dan Manfaat							
						Dokumen hasil Penilaian kinerja Pengaturan, Pembinaan dan Pelaksanaan Penataan Ruang dan Penilaian Kinerja Fungsi dan Manfaat	1 Dokumen	1 Dokumen	50.000.000,00	22.310.000,00	8.580.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG

2					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR				50.000.000,00	12.650.000,00	4.050.000,00	
2	10				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANAHAN				50.000.000,00	12.650.000,00	4.050.000,00	
2	10	10			PROGRAM PENATAGUNAAN TANAH	Persentase Sertifikat Aset Tanah dan Bangunan Pemerintah Kota persentase Sertifikat Aset Tanah dan Bangunan Pemko	85 % 85 %	85 % 85 %	50.000.000,00	12.650.000,00	4.050.000,00	
2	10	10	2.01		Penggunaan Tanah yang Hamparannya dalam satu Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah sertifikat infrastruktur ke-PU an yang diterbitkan Jumlah sertifikat infrastruktur kePUan yang diterbitkan	0 Sertifikat 50 Sertifikat	0 Sertifikat 50 Sertifikat	50.000.000,00	12.650.000,00	12.650.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
2	10	10	2.01	0001	Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Penggunaan Tanah							
						Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Penggunaan Tanah dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota	5 Laporan	5 Laporan	50.000.000,00	12.650.000,00	4.050.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
					DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PEMUKIMAN DAN LINGKUNGAN HIDUP				27.754.924.838,00	27.186.922.319,00	29.041.667.667,00	
1					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR				16.416.655.152,00	15.835.087.697,00	18.245.858.918,00	
1	04				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN				16.416.655.152,00	15.835.087.697,00	18.245.858.918,00	
1	04	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase pemenuhan urusan penunjang yang dipenuhi pada Dinas Perumahan, Kawasan Pemukiman dan Lingkungan Hidup	90 %	90 %	7.492.876.527,00	7.409.333.081,00	6.929.395.532,00	
1	04	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase pembayaran gaji dan penyusunan laporan keuangan yang tepat waktu	100 persen	100 persen	5.961.557.320,00	5.856.711.547,00	5.856.711.547,00	DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PEMUKIMAN DAN LINGKUNGAN HIDUP
1	04	01	2.02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN							
						Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	658 Orang/bulan	658 Orang/bulan	5.961.557.320,00	5.856.711.547,00	5.815.585.223,00	DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PEMUKIMAN DAN LINGKUNGAN HIDUP
1	04	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan layanan administrasi umum perangkat daerah	90 persen	90 persen	477.074.505,00	479.642.034,00	479.642.034,00	DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PEMUKIMAN DAN LINGKUNGAN HIDUP
1	04	01	2.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi							
						Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	4 Paket	4 Paket	6.104.800,00	6.092.800,00	4.006.300,00	DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PEMUKIMAN DAN LINGKUNGAN HIDUP
1	04	01	2.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor							
						Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	4 Paket	4 Paket	72.215.600,00	72.218.728,00	29.762.006,00	DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PEMUKIMAN DAN LINGKUNGAN HIDUP
1	04	01	2.06	0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan							
						Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	12 Paket	12 Paket	20.438.805,00	20.438.150,00	14.645.850,00	DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PEMUKIMAN DAN LINGKUNGAN HIDUP
1	04	01	2.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD							

						Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan	12 Laporan	334.393.000,00	336.993.000,00	124.003.000,00	DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PEMUKIMAN DAN LINGKUNGAN HIDUP
1	04	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase pemenuhan barang milik daerah sesuai dengan perencanaan	90 persen	100 persen	114.949.602,00	118.483.400,00	118.483.400,00	DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PEMUKIMAN DAN LINGKUNGAN HIDUP
1	04	01	2.07	0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya							
						Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	7 Unit	7 Unit	114.949.602,00	118.483.400,00	92.119.100,00	DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PEMUKIMAN DAN LINGKUNGAN HIDUP
1	04	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang terpenuhi	90 persen	90 persen	613.864.100,00	629.065.100,00	629.065.100,00	DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PEMUKIMAN DAN LINGKUNGAN HIDUP
1	04	01	2.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik							
						Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	36 Laporan	36 Laporan	29.454.000,00	26.055.000,00	28.222.500,00	DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PEMUKIMAN DAN LINGKUNGAN HIDUP
1	04	01	2.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor							
						Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	12 Laporan	441.476.000,00	456.356.000,00	401.530.400,00	DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PEMUKIMAN DAN LINGKUNGAN HIDUP
1	04	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase ketersediaan Barang Milik Daerah ber kondisi baik	95 persen	95 persen	325.431.000,00	325.431.000,00	325.431.000,00	DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PEMUKIMAN DAN LINGKUNGAN HIDUP
1	04	01	2.09	0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan							
						Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	1 Unit	1 Unit	41.690.000,00	41.690.000,00	41.690.000,00	DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PEMUKIMAN DAN LINGKUNGAN HIDUP
1	04	01	2.09	0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan							
						Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	12 Unit	12 Unit	139.480.000,00	139.480.000,00	139.480.000,00	DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PEMUKIMAN DAN LINGKUNGAN HIDUP
1	04	01	2.09	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya							
						Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	51 Unit	51 Unit	31.330.000,00	31.330.000,00	31.330.000,00	DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PEMUKIMAN DAN LINGKUNGAN HIDUP
1	04	01	2.09	0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya							
						Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	2 Unit	2 Unit	44.888.000,00	44.888.000,00	5.456.000,00	DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PEMUKIMAN DAN LINGKUNGAN HIDUP

1	04	02			PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN	Persentase Rumah korban bencana atau relokasi program pemerintah yang tertangani	100 %	100 %	428.584.230,00	438.265.500,00	310.942.230,00	
1	04	02	2.01		Pendataan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota	Jumlah dokumen penyediaan hunian dan rehabilitasi rumah korban bencana atau relokasi program pemerintah	2 dokumen	1 dokumen	51.723.650,00	51.723.450,00	51.723.450,00	DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PEMUKIMAN DAN LINGKUNGAN HIDUP
1	04	02	2.01	0009	Identifikasi Perumahan di Lokasi Rawan Bencana Kabupaten/Kota							
						Jumlah Dokumen Data Rumah di Lokasi Rawan Bencana Kabupaten/Kota	1 Dokumen	1 Dokumen	51.723.650,00	51.723.450,00	51.723.450,00	DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PEMUKIMAN DAN LINGKUNGAN HIDUP
1	04	02	2.03		Pembangunan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota	Jumlah rumah korban bencana dan terkena relokasi program pemerintah	4 unit	2 unit	43.030.000,00	43.030.000,00	43.030.000,00	DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PEMUKIMAN DAN LINGKUNGAN HIDUP
1	04	02	2.03	0001	Rehabilitasi Rumah bagi Korban Bencana							
						Jumlah Rumah Korban Bencana Kabupaten/Kota yang Terehabilitasi	2 Unit Rumah	2 Unit Rumah	43.030.000,00	43.030.000,00	2.508.000,00	DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PEMUKIMAN DAN LINGKUNGAN HIDUP
1	04	02	2.03	0011	Pembangunan Rumah Khusus beserta PSU bagi Masyarakat yang Terkena Relokasi Program Kabupaten/Kota							
						Jumlah Rumah Khusus beserta PSU bagi Masyarakat yang Terkena Relokasi Program Kabupaten/Kota	0 Unit Rumah	0 Unit Rumah	0,00	0,00	0,00	DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PEMUKIMAN DAN LINGKUNGAN HIDUP
1	04	02	2.05		Pembinaan Pengelolaan Rumah Susun Umum dan/atau Rumah Khusus	Jumlah laporan hasil fasilitasi pengelolaan kelembagaan bagi pemilik/penghuni rumah susun	1 dokumen	1 dokumen	333.830.580,00	343.512.050,00	343.512.050,00	DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PEMUKIMAN DAN LINGKUNGAN HIDUP
1	04	02	2.05	0001	Fasilitasi Pengelolaan Kelembagaan dan Pemilik/Penghuni Rumah Susun							
						Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Pengelolaan Kelembagaan bagi Pemilik/Penghuni Rumah Susun	1 Laporan	1 Laporan	333.830.580,00	343.512.050,00	256.710.780,00	DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PEMUKIMAN DAN LINGKUNGAN HIDUP
1	04	04			PROGRAM PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN KUMUH	Persentase Rumah Layak Huni	97,26 %	97,26 %	3.382.858.400,00	2.678.231.920,00	2.667.765.960,00	
1	04	04	2.01		Pencegahan Perumahan dan Kawasan Permukiman Kumuh pada Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah rumah tidak layak huni yang direhab	70 unit	122 unit	3.382.858.400,00	2.678.231.920,00	2.678.231.920,00	DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PEMUKIMAN DAN LINGKUNGAN HIDUP
1	04	04	2.01	0001	Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni untuk Pencegahan Terhadap Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman Kumuh di Luar Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha							
						Jumlah Rumah Tidak Layak Huni untuk Pencegahan Terhadap Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman Kumuh di Luar Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha yang Diperbaiki	70 Unit Rumah	122 Unit Rumah	3.382.858.400,00	2.678.231.920,00	2.667.765.960,00	DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PEMUKIMAN DAN LINGKUNGAN HIDUP
1	04	05			PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU)	Persentase ketersediaan PSU kawasan permukiman dalam kondisi baik	87,11 %	87,11 %	5.112.335.995,00	5.309.257.196,00	8.337.755.196,00	

1		04	05	2.01		URUSAN Penyelenggaraan PSU Perumahan	Jumlah lokasi perumahan yang disediakan prasarana, sarana dan utilitas umum yang menunjang fungsi hunian	2 kecamatan	2 kecamatan	5.112.335.995,00	5.309.257.196,00	5.309.257.196,00	DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PEMUKIMAN DAN LINGKUNGAN HIDUP
1	04	05	2.01	0002	Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Perumahan untuk Menunjang Fungsi Hunian								
						Jumlah Lokasi Perumahan yang Disediakan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum yang Menunjang Fungsi Hunian	2 Lokasi	2 Lokasi	5.112.335.995,00	5.309.257.196,00	8.337.755.196,00	DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PEMUKIMAN DAN LINGKUNGAN HIDUP	
2					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR					11.338.269.686,00	11.351.834.622,00	10.795.808.749,00	
2	11				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP					11.338.269.686,00	11.351.834.622,00	10.795.808.749,00	
2	11	02			PROGRAM PERENCANAAN LINGKUNGAN HIDUP	Persentase dokumen perencanaan lingkungan	100 %	100 %	196.841.000,00	221.840.500,00	111.067.200,00		
2	11	02	2.02		Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) Kabupaten/Kota	Jumlah dokumen KLHS yang disusun	1 dokumen	1 dokumen	196.841.000,00	221.840.500,00	221.840.500,00	DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PEMUKIMAN DAN LINGKUNGAN HIDUP	
2	11	02	2.02	0005	Penyelenggaraan KLHS Rencana Tata Ruang								
						Jumlah Dokumen KLHS Rencana Tata Ruang Kabupaten/Kota yang Disusun	1 Dokumen	1 Dokumen	196.841.000,00	221.840.500,00	111.067.200,00	DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PEMUKIMAN DAN LINGKUNGAN HIDUP	
2	11	03			PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP	Presentase Kegiatan pencegahan dan penanggulangan pencemaran dan atau kerusakan lingkungan hidup	100 persen	100 persen	468.675.210,00	474.432.800,00	420.479.500,00		
2	11	03	2.01		Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota	Jumlah jenis pemantauan kualitas air, udara dan tanah yang dilakukan	2 jenis	2 jenis	438.675.410,00	444.433.000,00	444.433.000,00	DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PEMUKIMAN DAN LINGKUNGAN HIDUP	
2	11	03	2.01	0001	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pencegahan Pencemaran Lingkungan Hidup Dilaksanakan Terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut								
						Jumlah Dokumen Uji Kualitas Lingkungan Hidup Dilaksanakan Terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut	0 Dokumen	0 Dokumen	0,00	0,00	0,00	DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PEMUKIMAN DAN LINGKUNGAN HIDUP	
2	11	03	2.01	0002	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pengendalian Emisi Gas Rumah Kaca, Mitigasi dan Adaptasi Perubahan Iklim								
						Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Inventarisasi Gas Rumah Kaca dari Sektor Lingkungan Hidup yang Dilaksanakan	1 Dokumen	1 Dokumen	29.990.600,00	29.990.000,00	17.425.000,00	DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PEMUKIMAN DAN LINGKUNGAN HIDUP	
2	11	03	2.01	0004	Koordinasi dan Sinkronisasi Pencegahan Pencemaran Lingkungan Hidup terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut								
						Jumlah kegiatan koordinasi dan sinkronisasi pencegahan pencemaran lingkungan hidup terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut yang dilaksanakan	0 Kegiatan	0 Kegiatan	0,00	0,00	0,00	DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PEMUKIMAN DAN LINGKUNGAN HIDUP	
2	11	03	2.02		Penanggulangan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota	Jumlah jenis penanggulangan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup yang dilakukan	1 jenis	1 jenis	29.999.800,00	29.999.800,00	29.999.800,00	DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PEMUKIMAN DAN LINGKUNGAN HIDUP	
2	11	03	2.02	0001	Pemberian Informasi Peringatan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup pada Masyarakat								

						Jumlah Laporan Sosialisasi Informasi Peringatan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup pada Masyarakat di Kabupaten/Kota yang Dilaksanakan	4 Laporan	4 Laporan	29.999.800,00	29.999.800,00	32.957.100,00	DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PEMUKIMAN DAN LINGKUNGAN HIDUP
2	11	04			PROGRAM PENGELOLAAN KEANEKARAGAMAN HAYATI (KEHATI)	Persentase RTH Kota Persentase luas RTH Publik	4,23 %	10,45 4,23 % %	1.995.234.750,00	2.000.506.370,00	1.870.363.570,00	
2	11	04	2.01		Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Kabupaten/Kota	Jumlah lokasi RTH publik yang dikelola	2 kecamatan	2 kecamatan	1.995.234.750,00	2.000.506.370,00	2.000.506.370,00	DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PEMUKIMAN DAN LINGKUNGAN HIDUP
2	11	04	2.01	0004	Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH)							
						Luas RTH yang Dikelola Lingkup Kewenangan Kabupaten/Kota	53 Ha	53 Ha	1.995.234.750,00	2.000.506.370,00	1.870.363.570,00	DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PEMUKIMAN DAN LINGKUNGAN HIDUP
2	11	04	2.01	0006	Pengembangan Kapasitas Kelembagaan dan SDM dalam Pengelolaan Keanekaragaman Hayati							
						Jumlah Orang yang Meningkatkan Kapasitasnya dalam Pengelolaan Keanekaragaman Hayati	40 Orang	40 Orang	0,00	0,00	0,00	DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PEMUKIMAN DAN LINGKUNGAN HIDUP
2	11	05			PROGRAM PENGENDALIAN BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (B3) DAN LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (LIMBAH B3)	Persentase pembinaan/verifikasi lapangan terhadap pemenuhan komitmen persetujuan/izin penyimpanan sementara dan pengumpulan limbah B3	32 %	32 %	31.197.900,00	31.197.760,00	28.218.360,00	
2	11	05	2.01		Penyimpanan sementara Limbah B3	Jumlah penghasil limbah B3 yang dibina/diverifikasi lapangan	24 fasyankes	24 fasyankes	14.791.400,00	14.791.310,00	14.791.310,00	DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PEMUKIMAN DAN LINGKUNGAN HIDUP
2	11	05	2.01	0002	Verifikasi Lapangan untuk Memastikan Pemenuhan Persyaratan Administrasi dan Teknis Penyimpanan sementara Limbah B3							
						Jumlah Laporan Kegiatan Verifikasi Lapangan Pemenuhan Komitmen Persetujuan/Izin Penyimpanan sementara dan Pengumpulan Limbah B3	1 Laporan	1 Laporan	14.791.400,00	14.791.310,00	11.415.560,00	DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PEMUKIMAN DAN LINGKUNGAN HIDUP
2	11	05	2.02		Pengumpulan Limbah B3 dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah koordinasi dan sinkronisasi pengelolaan limbah B3	2 kali	2 kali	16.406.500,00	16.406.450,00	16.406.450,00	DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PEMUKIMAN DAN LINGKUNGAN HIDUP
2	11	05	2.02	0002	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengelolaan Limbah B3 dengan Pemerintah Provinsi dalam rangka Pengangkutan, Pemanfaatan, Pengolahan, dan/atau Penimbunan							
						Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi & Sinkronisasi Pengelolaan Limbah B3 dengan Pemerintah dan Pemerintah Provinsi dalam rangka Pengangkutan, Pemanfaatan, Pengolahan, dan/atau Penimbunan yang Bukan Menjadi Kewenangan Pemda Kabupaten/Kota serta Pelaksanaan Pengumpulan dan Penyimpanan sementara Limbah B3 yang Sesuai dengan Kewenangannya	1 Dokumen	1 Dokumen	16.406.500,00	16.406.450,00	16.802.800,00	DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PEMUKIMAN DAN LINGKUNGAN HIDUP

						Jumlah Masyarakat/Kelompok Masyarakat/Pelaku Usaha/Kegiatan yang terlibat	16 Orang	16 Orang	10.000.000,00	9.999.400,00	0,00	DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PEMUKIMAN DAN LINGKUNGAN HIDUP
2	11	08	2.01	0005	Peningkatan Kapasitas dan Kompetensi Sumber Daya Manusia Bidang lingkungan hidup untuk Lembaga pendidikan formal/lembaga masyarakat/komunitas/kelompok masyarakat							
						Jumlah lembaga pendidikan formal/lembaga masyarakat/komunitas/kelompok masyarakat yang meningkat kapasitas dan kompetensinya terkait PPLH	1 Lembaga	1 Lembaga	124.417.650,00	124.417.550,00	117.395.900,00	DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PEMUKIMAN DAN LINGKUNGAN HIDUP
2	11	09			PROGRAM PENGHARGAAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT	Persentase Partisipasi Masyarakat / Dunia Pendidikan dalam Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Jumlah jenis penghargaan lingkungan hidup untuk masyarakat	1 Jenis	1 1 % Jenis	93.300.200,00	93.300.000,00	78.454.650,00	
2	11	09	2.01		Pemberian Penghargaan Lingkungan Hidup Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah masyarakat/lembaga masyarakat/dunia usaha/dunia pendidikan/filantropi yang dinilai kinerja nya	1 kelompok	1 kelompok	93.300.200,00	93.300.000,00	93.300.000,00	DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PEMUKIMAN DAN LINGKUNGAN HIDUP
2	11	09	2.01	0001	Penilaian Kinerja Masyarakat/Lembaga Masyarakat/Dunia Usaha/Dunia Pendidikan/Filantropi dalam Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup							
						Jumlah Masyarakat/Lembaga Masyarakat/Dunia Usaha/Dunia Pendidikan/Filantroph i yang Dinilai Kinerjanya dalam rangka PPLH	1 Entitas	1 Entitas	93.300.200,00	93.300.000,00	78.454.650,00	DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PEMUKIMAN DAN LINGKUNGAN HIDUP
2	11	10			PROGRAM PENANGANAN PENGADUAN LINGKUNGAN HIDUP	Persentase pengaduan masyarakat terhadap PPLH yang tertangani	100 %	100 %	12.680.000,00	12.679.950,00	8.536.700,00	
2	11	10	2.01		Penyelesaian Pengaduan Masyarakat di Bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) Kabupaten/Kota	Jumlah dokumen penyelesaian pengaduan masyarakat di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup (PPLH)	5 dokumen	5 dokumen	12.680.000,00	12.679.950,00	12.679.950,00	DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PEMUKIMAN DAN LINGKUNGAN HIDUP
2	11	10	2.01	0004	Pengelolaan Pengaduan permasalahan Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup tingkat Kabupaten/Kota							
						Jumlah pengaduan permasalahan Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup tingkat Kabupaten/Kota yang ditindaklanjuti/ditangani	5 Pengaduan	5 Pengaduan	12.680.000,00	12.679.950,00	8.536.700,00	DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PEMUKIMAN DAN LINGKUNGAN HIDUP
2	11	10	2.01	0005	Penyelesaian sengketa lingkungan hidup yang ditangani yang menjadi kewenangan kabupaten/kota							
						Jumlah sengketa lingkungan hidup yang ditangani yang menjadi kewenangan kabupaten/kota	5 Perkara	5 Perkara	0,00	0,00	0,00	DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PEMUKIMAN DAN LINGKUNGAN HIDUP
2	11	11			PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN	Persentase pengelolaan sampah	98 %	98 %	8.363.379.526,00	8.340.917.192,00	8.143.305.449,00	
2	11	11	2.01		Pengelolaan Sampah	Persentase penanganan sampah	79 persen	79 persen	8.363.379.526,00	8.340.917.192,00	8.340.917.192,00	DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PEMUKIMAN DAN LINGKUNGAN HIDUP
2	11	11	2.01	0004	Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Pengelolaan Persampahan							

						Jumlah Masyarakat, Kelompok Masyarakat atau Para Pihak Lainnya yang Terlibat Aktif dalam Kegiatan Pengelolaan Sampah Berbasis Masyarakat	7 Kelompok	7 Kelompok	45.203.900,00	45.202.500,00	45.202.500,00	DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PEMUKIMAN DAN LINGKUNGAN HIDUP
2	11	11	2.01	0007	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Persampahan di TPA/TPST/SPA Kabupaten/Kota							
						Jumlah Sarana dan Prasarana Penanganan Sampah untuk Kegiatan Pemilahan, Pengumpulan, Pengangkutan, Pengolahan, dan Pemrosesan Akhir	22 Unit	22 Unit	2.487.735.236,00	2.487.731.452,00	4.318.899.509,00	DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PEMUKIMAN DAN LINGKUNGAN HIDUP
2	11	11	2.01	0020	Penanganan sampah melalui pemrosesan akhir sampah di TPA/TPST kabupaten/kota atau TPA/TPST Regional							
						Jumlah sampah yang tertangani melalui pemrosesan akhir sampah di TPA/TPST kabupaten/kota atau TPA/TPST Regional	15000-20000 Ton	15000-20000 Ton	5.830.440.390,00	5.807.983.240,00	3.779.203.440,00	DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PEMUKIMAN DAN LINGKUNGAN HIDUP
					UPTD Laboratorium Lingkungan Hidup				27.754.924.838,00	27.186.922.319,00	29.041.667.667,00	
1					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR				16.416.655.152,00	15.835.087.697,00	18.245.858.918,00	
1	04				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN				16.416.655.152,00	15.835.087.697,00	18.245.858.918,00	
1	04	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase pemenuhan urusan penunjang yang dipenuhi pada Dinas Perumahan, Kawasan Pemukiman dan Lingkungan Hidup	90 %	90 %	7.492.876.527,00	7.409.333.081,00	6.929.395.532,00	
1	04	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan layanan administrasi umum perangkat daerah	90 persen	90 persen	477.074.505,00	479.642.034,00	479.642.034,00	DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PEMUKIMAN DAN LINGKUNGAN HIDUP
1	04	01	2.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi							
						Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	4 Paket	4 Paket	2.548.500,00	2.539.900,00	1.456.900,00	DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PEMUKIMAN DAN LINGKUNGAN HIDUP
1	04	01	2.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor							
						Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	10 Paket	10 Paket	10.564.300,00	10.563.956,00	7.004.153,00	DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PEMUKIMAN DAN LINGKUNGAN HIDUP
1	04	01	2.06	0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan							
						Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	12 Paket	12 Paket	934.500,00	934.500,00	458.400,00	DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PEMUKIMAN DAN LINGKUNGAN HIDUP
1	04	01	2.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD							
						Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan	12 Laporan	29.875.000,00	29.861.000,00	15.235.000,00	DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PEMUKIMAN DAN LINGKUNGAN HIDUP
1	04	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang terpenuhi	90 persen	90 persen	613.864.100,00	629.065.100,00	629.065.100,00	DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PEMUKIMAN DAN LINGKUNGAN HIDUP

1	04	01	2.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik							
					Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	24 Laporan	24 Laporan	34.532.500,00	34.532.500,00	34.532.500,00	DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PEMUKIMAN DAN LINGKUNGAN HIDUP	
1	04	01	2.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor							
					Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	12 Laporan	108.401.600,00	112.121.600,00	74.835.200,00	DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PEMUKIMAN DAN LINGKUNGAN HIDUP	
1	04	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase ketersediaan Barang Milik Daerah berkondisi baik	95 persen	95 persen	325.431.000,00	325.431.000,00	325.431.000,00	DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PEMUKIMAN DAN LINGKUNGAN HIDUP
1	04	01	2.09	0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan							
					Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	2 Unit	2 Unit	34.045.000,00	34.045.000,00	34.045.000,00	DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PEMUKIMAN DAN LINGKUNGAN HIDUP	
1	04	01	2.09	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya							
					Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	14 Unit	14 Unit	3.990.000,00	3.990.000,00	3.990.000,00	DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PEMUKIMAN DAN LINGKUNGAN HIDUP	
1	04	01	2.09	0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya							
					Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	1 Unit	30.008.000,00	30.008.000,00	30.008.000,00	DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PEMUKIMAN DAN LINGKUNGAN HIDUP	
2					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR			11.338.269.686,00	11.351.834.622,00	10.795.808.749,00		
2	11				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP			11.338.269.686,00	11.351.834.622,00	10.795.808.749,00		
2	11	03			PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP	Persentase kegiatan pencegahan dan penanggulangan pencemaran dan atau kerusakan lingkungan hidup	100 %	100 %	468.675.210,00	474.432.800,00	420.479.500,00	
2	11	03	2.01		Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota	Jumlah jenis pemantauan kualitas air, udara dan tanah yang dilakukan	2 jenis	2 jenis	438.675.410,00	444.433.000,00	444.433.000,00	DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PEMUKIMAN DAN LINGKUNGAN HIDUP
2	11	03	2.01	0015	Pengelolaan Laboratorium Lingkungan Hidup kabupaten/kota							
					Jumlah pengujian yang dilaksanakan oleh laboratorium lingkungan	2 Dokumen	2 Dokumen	408.684.810,00	414.443.000,00	370.097.400,00	DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PEMUKIMAN DAN LINGKUNGAN HIDUP	
					SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN			11.973.657.998,00	12.367.084.245,00	11.484.539.832,00		
1					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR			11.973.657.998,00	12.367.084.245,00	11.484.539.832,00		
1	05				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT			11.973.657.998,00	12.367.084.245,00	11.484.539.832,00		
1	05	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase pemenuhan urusan penunjang yang dipenuhi pada Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran	100 %	100 %	6.841.281.698,00	7.538.537.145,00	6.653.297.632,00	

1	05	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan layanan administrasi keuangan perangkat daerah	90 %	90 %	5.333.431.498,00	6.029.567.805,00	6.029.567.805,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN
1	05	01	2.02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN							
						Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	574 Orang/bulan	574 Orang/bulan	5.333.431.498,00	6.029.567.805,00	5.839.973.852,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN
1	05	01	2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	-	-	-	0,00	0,00	0,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN
1	05	01	2.05	0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya							
						Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	174 Paket	174 Paket	0,00	0,00	0,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN
1	05	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan layanan administrasi umum perangkat daerah	90 %	90 %	242.195.200,00	280.704.740,00	280.704.740,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN
1	05	01	2.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi							
						Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	4 Paket	3.162.000,00	2.715.400,00	4.287.300,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN
1	05	01	2.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor							
						Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	12 Paket	4 Paket	23.966.700,00	14.739.340,00	23.828.940,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN
1	05	01	2.06	0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan							
						Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	5 Paket	5 Paket	15.079.500,00	15.007.000,00	14.769.660,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN
1	05	01	2.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD							
						Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	15 Laporan	24 Laporan	199.987.000,00	248.243.000,00	99.830.440,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN
1	05	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Pemenuhan Barang Milik Daerah sesuai dengan perencanaan	90 %	90 %	141.872.600,00	149.349.600,00	149.349.600,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN
1	05	01	2.07	0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya							
						Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	2 Unit	4 Unit	141.872.600,00	149.349.600,00	35.593.900,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN
1	05	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang terpenuhi	90 %	90 %	132.432.000,00	136.655.200,00	136.655.200,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN
1	05	01	2.08	0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat							
						Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 Laporan	12 Laporan	4.148.000,00	3.880.000,00	1.843.700,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN
1	05	01	2.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik							
						Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	36 Laporan	36 Laporan	35.384.000,00	35.384.000,00	19.867.240,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN

1		05	01	2.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	12 Laporan	92.900.000,00	97.391.200,00	97.391.200,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN
1		05	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase ketersediaan Barang Milik Daerah berkondisi baik	90 %	90 %	991.350.400,00	942.259.800,00	942.259.800,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN
1		05	01	2.09	0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan							
							Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	26 Unit	26 Unit	0,00	864.847.000,00	448.331.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN
1						NON URUSAN				11.973.657.998,00	12.367.084.245,00	11.484.539.832,00	
1		05				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX				11.973.657.998,00	12.367.084.245,00	11.484.539.832,00	
1		05	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase pemenuhan urusan penunjang yang dipenuhi pada Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran	100 %	100 %	6.841.281.698,00	7.538.537.145,00	6.653.297.632,00	
1		05	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase ketersediaan Barang Milik Daerah berkondisi baik	90 %	90 %	991.350.400,00	942.259.800,00	942.259.800,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN
1		05	01	2.09	0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan							
1						URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR				11.973.657.998,00	12.367.084.245,00	11.484.539.832,00	
1		05				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT				11.973.657.998,00	12.367.084.245,00	11.484.539.832,00	
1		05	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase pemenuhan urusan penunjang yang dipenuhi pada Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran	100 %	100 %	6.841.281.698,00	7.538.537.145,00	6.653.297.632,00	
1		05	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase ketersediaan Barang Milik Daerah berkondisi baik	90 %	90 %	991.350.400,00	942.259.800,00	942.259.800,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN
1		05	01	2.09	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya							
							Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	30 Unit	30 Unit	27.557.200,00	29.252.800,00	16.508.400,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN
1		05	01	2.09	0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya							
							Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	2 Unit	2 Unit	200.878.200,00	48.160.000,00	51.072.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN
1		05	02			PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase warga negara yang terlindungi dari dampak pelanggaran perda dan trantibum	100 %	100 %	4.161.774.000,00	3.888.261.100,00	3.977.263.900,00	
1		05	02	2.01		Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah operasi pencegahan dan penanganan gangguan tranitubum	3 operasi	3 operasi	3.881.788.800,00	3.670.296.300,00	3.670.296.300,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN
1		05	02	2.01	0015	Pencegahan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Pelaksanaan Patroli, Pengamanan, dan Pengawasan							

						Jumlah Aparatur Pemadam Kebakaran yang Memiliki Sertifikasi Keterampilan Teknis dan Analis Dalam Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran	0 Orang	0 Orang	0,00	0,00	0,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN
1	05	04	2.01	0017	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pencegahan, Penanggulangan Kebakaran dan Alat Pelindung Diri							
						Jumlah Sarana dan Prasarana Untuk Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran dan Alat Pelindung Diri yang Sah dan Legal Sesuai Standar Teknis Terkait	15 Unit	4 Unit	91.130.000,00	251.470.000,00	279.175.700,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN
1	05	04	2.01	0019	Pelatihan Keluarga Tanggap Kebakaran Rumah Tangga							
						Jumlah Keluarga yang Mengikuti Pelatihan Keluarga Tanggap Kebakaran Rumah Tangga	0 Keluarga	0 Keluarga	0,00	0,00	0,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN
1	05	04	2.04		Pemberdayaan Masyarakat dalam Pencegahan Kebakaran	Jumlah kegiatan pemberdayaan	2 kegiatan	2 kegiatan	105.239.500,00	66.515.150,00	66.515.150,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN
1	05	04	2.04	0001	Pemberdayaan Masyarakat dalam Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran Melalui Sosialisasi dan Edukasi Masyarakat							
						Jumlah Warga Masyarakat yang Mendapatkan Sosialisasi Edukasi Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran Setiap Tahunnya	50 Orang	50 Orang	60.008.000,00	25.728.350,00	0,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN
1	05	04	2.04	0002	Pembentukan dan Pembinaan Relawan Pemadam Kebakaran							
						Jumlah Desa/Kelurahan yang Terbentuk dan Terbina Relawan Pemadam Kebakaran pada Lingkup Sistem Ketahanan Kebakaran Lingkungan (SKKL) Setiap Tahunnya	16 Desa/Kelurahan	16 Desa/Kelurahan	45.231.500,00	40.786.800,00	40.832.100,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN
1	05	04	2.05		Penyelenggaraan Operasi Pencarian dan Pertolongan Terhadap Kondisi Membahayakan Manusia	Persentase pencarian dan pertolongan terhadap kondisi membahayakan manusia	100 %	100 %	92.180.000,00	84.424.250,00	84.424.250,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN
1	05	04	2.05	0001	Penyelenggaraan Operasi Pencarian dan Pertolongan pada Peristiwa yang Menimpa, Membahayakan, dan/atau Mengancam Keselamatan Manusia							
						Jumlah Laporan Hasil Penyelenggaraan Operasi Penyelamatan yang Mengancam Keselamatan Manusia	12 Laporan	12 Laporan	25.000.000,00	17.740.000,00	5.259.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN
1	05	04	2.05	0005	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pencarian dan Pertolongan Terhadap Kondisi Membahayakan Manusia/Penyelamatan dan Evakuasi							
						Jumlah Sarana dan Prasarana yang Tersedia untuk Pencarian dan Pertolongan Terhadap Kondisi Membahayakan Manusia/Penyelamatan dan Evakuasi Sesuai dengan Standar Teknis	5 Unit	1 Unit	67.180.000,00	66.684.250,00	8.362.500,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN
					DINAS SOSIAL, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN				11.468.551.090,00	12.602.173.454,00	11.277.064.339,00	
1					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR				9.325.682.090,00	9.128.626.643,00	8.144.876.093,00	
1	06				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL				9.325.682.090,00	9.128.626.643,00	8.144.876.093,00	
1	06	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase pemenuhan urusan penunjang pada perangkat daerah	100 %	100 %	6.568.934.322,00	6.464.715.625,00	5.792.358.172,00	

1	06	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase layanan keuangan perangkat daerah Persentase pemenuhan layanan administrasi keuangan perangkat daerah	100 persen	100 persen	5.179.297.765,00	5.115.796.725,00	5.115.796.725,00	DINAS SOSIAL, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
1	06	01	2.02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN							
						Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	560 Orang/bulan	560 Orang/bulan	5.179.297.765,00	5.115.796.725,00	4.675.865.490,00	DINAS SOSIAL, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
1	06	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan layanan administrasi perkantoran	100 persen	100 persen	336.075.545,00	287.592.235,00	287.592.235,00	DINAS SOSIAL, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
1	06	01	2.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi							
						Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	4 Paket	4 Paket	5.391.700,00	5.391.700,00	5.391.700,00	DINAS SOSIAL, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
1	06	01	2.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor							
						Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	7 Paket	7 Paket	73.159.345,00	73.132.145,00	11.520.170,00	DINAS SOSIAL, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
1	06	01	2.06	0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan							
						Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	4 Paket	4 Paket	24.499.500,00	20.013.390,00	42.645.522,00	DINAS SOSIAL, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
1	06	01	2.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD							
						Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	24 Laporan	24 Laporan	233.025.000,00	189.055.000,00	94.756.000,00	DINAS SOSIAL, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK

						Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	27 Unit	27 Unit	75.000.000,00	77.205.800,00	59.200.000,00	DINAS SOSIAL, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
1	06	01	2.09	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya							
						Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	55 Unit	55 Unit	50.000.000,00	20.800.000,00	20.800.000,00	DINAS SOSIAL, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
1	06	01	2.09	0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya							
						Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	6 Unit	6 Unit	40.000.000,00	40.000.000,00	49.999.950,00	DINAS SOSIAL, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
1	06	02			PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL	Persentasi sumber kesejahteraan sosial dan kelembagaan sosial yang aktif	80 %	80 %	1.299.684.600,00	1.210.700.100,00	1.055.710.050,00	
1	06	02	2.03		Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah potensi sumber kesejahteraan sosial yang dibina	148 lembaga	148 lembaga	1.299.684.600,00	1.210.700.100,00	1.210.700.100,00	DINAS SOSIAL, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
1	06	02	2.03	0001	Peningkatan Kemampuan Potensi Pekerja Sosial Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota							
						Jumlah Orang Mendapat Peningkatan Kapasitas Pekerja Sosial Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	92 Orang	92 Orang	297.222.800,00	315.404.300,00	279.110.300,00	DINAS SOSIAL, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
1	06	02	2.03	0002	Peningkatan Kemampuan Potensi Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan Kewenangan Kabupaten/Kota							
						Jumlah Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan Kewenangan Kabupaten/Kota yang Meningkatkan Kapasitasnya Kewenangan Kabupaten/Kota	2 Orang	2 Orang	8.650.000,00	5.700.000,00	2.850.000,00	DINAS SOSIAL, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
1	06	02	2.03	0004	Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Kelembagaan Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota							

						Jumlah Lembaga Kesejahteraan Sosial yang Meningkatkan Kapasitasnya Kewenangan Kabupaten/Kota	60 Lembaga	60 Lembaga	900.000.000,00	791.207.500,00	683.206.150,00	DINAS SOSIAL, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
1	06	02	2.03	0005	Peningkatan Kemampuan Sumber Daya Manusia dan Penguatan Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga (LK3)							
						Jumlah Sertifikat yang dari Hasil Peningkatan Sumber Daya Manusia dan Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga (LK3) Kewenangan Kabupaten/Kota	5 Sertifikat	3 Sertifikat	93.811.800,00	98.388.300,00	90.543.600,00	DINAS SOSIAL, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
1	06	04			PROGRAM REHABILITASI SOSIAL	Persentase PPKS yang tertangani	90 %	90 %	1.049.911.249,00	1.079.811.249,00	1.015.300.584,00	
1	06	04	2.01		Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial	Jumlah penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gelandangan pengemis yang terpenuhi kebutuhan dasarnya diluar panti	750 orang	750 orang	676.199.545,00	646.099.545,00	646.099.545,00	DINAS SOSIAL, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
1	06	04	2.01	0001	Penyediaan Permakanan							
						Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Permakanan Sesuai dengan Standar Gizi Minimal Kewenangan Kabupaten/Kota	459 Orang	459 Orang	376.199.545,00	376.199.545,00	488.018.450,00	DINAS SOSIAL, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
1	06	04	2.01	0002	Penyediaan Sandang							
						Jumlah Orang yang Menerima Pakaian dan Kelengkapan Lainnya yang Tersedia dalam 1 Tahun Kewenangan Kabupaten/Kota	75 Orang	75 Orang	150.000.000,00	150.000.000,00	98.365.000,00	DINAS SOSIAL, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
1	06	04	2.01	0003	Penyediaan Alat Bantu							
						Jumlah Orang yang Mendapatkan Alat Bantu dan Alat Bantu Peraga Sesuai kebutuhan Kewenangan Kabupaten/Kota	22 Orang	22 Orang	80.000.000,00	55.900.000,00	35.186.000,00	DINAS SOSIAL, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
1	06	04	2.01	0005	Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual, dan Sosial							

						Jumlah Peserta Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial Kewenangan Kabupaten/Kota	50 Orang	50 Orang	50.000.000,00	44.000.000,00	28.974.000,00	DINAS SOSIAL, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
1	06	04	2.01	0006	Pemberian Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis dan Masyarakat							
						Jumlah Peserta Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis dan Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	20 Orang	20 Orang	20.000.000,00	20.000.000,00	10.399.000,00	DINAS SOSIAL, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
1	06	04	2.02		Rehabilitasi Sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA di Luar Panti Sosial	Jumlah PPKS terpenuhi kebutuhan dasarnya diluar panti	2710 orang	2710 orang	373.711.704,00	433.711.704,00	433.711.704,00	DINAS SOSIAL, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
1	06	04	2.02	0003	Penyediaan Permakanan							
						Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Permakanan Sesuai dengan Standar Gizi Minimal Kewenangan Kabupaten/Kota	75 Orang	75 Orang	75.000.000,00	55.000.000,00	47.300.000,00	DINAS SOSIAL, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
1	06	04	2.02	0004	Penyediaan Sandang							
						Jumlah orang yang Menerima pakaian dan kelengkapan lainnya yang Tersedia dalam 1 tahun Kewenangan Kabupaten/Kota	75 Orang	75 Orang	75.000.000,00	55.000.000,00	44.000.000,00	DINAS SOSIAL, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
1	06	04	2.02	0005	Penyediaan Alat Bantu							
						Jumlah Orang yang Mendapatkan Alat Bantu dan Alat Bantu Peraga sesuai Kebutuhan Kewenangan Kabupaten/Kota	5 Orang	5 Orang	10.000.000,00	10.000.000,00	7.500.000,00	DINAS SOSIAL, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
1	06	04	2.02	0007	Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual, dan Sosial							
						Jumlah Peserta Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial Kewenangan Kabupaten/Kota	30 Orang	30 Orang	120.000.000,00	220.000.000,00	166.756.330,00	DINAS SOSIAL, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK

[illegible]

						Jumlah Orang yang Mendapatkan Pakaian dan Kelengkapan Lainnya yang Tersedia pada Masa Tanggap Darurat (Pengungsian) dan Pasca Bencana Kewenangan Kabupaten/Kota	300 Orang	300 Orang	30.000.000,00	20.000.000,00	13.100.000,00	DINAS SOSIAL, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
1	06	06	2.01	0005	Pelayanan Dukungan Psikososial							
						Jumlah Korban Bencana yang Mendapatkan Layanan Dukungan Psikososial Kewenangan Kabupaten/Kota	300 Orang	300 Orang	20.000.000,00	6.500.000,00	1.443.000,00	DINAS SOSIAL, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
1	06	06	2.02		Penyelenggaraan Pemberdayaan Masyarakat Terhadap Kesiapsiagaan Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah anggota TAGANA yang dibina	30 orang	30 orang	103.503.319,00	73.499.719,00	73.499.719,00	DINAS SOSIAL, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
1	06	06	2.02	0002	Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Taruna Siaga Bencana							
						Jumlah Orang yang Melaksanakan Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Taruna Siaga Bencana Kewenangan Kabupaten/Kota	30 Orang	30 Orang	103.503.319,00	73.499.719,00	76.369.037,00	DINAS SOSIAL, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
1	06	07			PROGRAM PENGELOLAAN TAMAN MAKAM PAHLAWAN	Persentase TMP yang dipelihara	100 %	100 %	25.000.000,00	51.785.900,00	114.617.500,00	
1	06	07	2.01		Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota	Jumlah makam yang dipelihara	98 Makam	98 Makam	25.000.000,00	51.785.900,00	51.785.900,00	DINAS SOSIAL, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
1	06	07	2.01	0002	Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota							
						Jumlah Makam yang Terpenuhi Pemeliharaannya pada Taman Makam Pahlawan Kabupaten/Kota	98 Makam	98 Makam	25.000.000,00	51.785.900,00	114.617.500,00	DINAS SOSIAL, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
2					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR				2.142.869.000,00	3.473.546.811,00	3.132.188.246,00	
2	08				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK				745.869.000,00	1.124.318.200,00	819.009.181,00	
2	08	02			PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN	Persentase organisasi perempuan yang aktif Proporsi kursi yang diduduki perempuan di DPRD	100 20 % %	100 20 % %	253.580.000,00	253.580.000,00	263.935.440,00	

2	08	02	2.01		Pelebagaan Pengarusutamaan Gender (PUG) pada Lembaga Pemerintah Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah OPD yang memiliki data terpilah Jumlah OPD yang menyusun GAP dan GBS	23 OPD	23 OPD	74.000.000,00	74.000.000,00	74.000.000,00	DINAS SOSIAL, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
2	08	02	2.01	0008	Sosialisasi kebijakan penyelenggaraan PUG kewenangan Kab/Kota							
						Jumlah peserta sosialisasi kebijakan penyelenggaraan PUG tingkat Kab/Kota	23 Orang	23 Orang	74.000.000,00	74.000.000,00	33.368.100,00	DINAS SOSIAL, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
2	08	02	2.02		Pemberdayaan Perempuan Bidang Politik, Hukum, Sosial, dan Ekonomi pada Organisasi Kemasyarakatan Kewenangan Kabupaten/Kota	Persentase perempuan partai politik yang memperoleh advokasi dan pendampingan kebijakan partisipasi perempuan di bidang politik, hukum, sosial dan ekonomi kewenangan kabupaten/kota	50 Persen	50 Persen	30.000.000,00	30.000.000,00	30.000.000,00	DINAS SOSIAL, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
2	08	02	2.02	0003	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Peningkatan Partisipasi Perempuan dalam Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi							
						Jumlah organisasi kemasyarakatan/ profesi/ dunia usaha/ media yg diadvokasi dan didampingi dalam rangka peningkatan partisipasi perempuan di bidang politik, hukum, sosial dan ekonomi	26 Lembaga	26 Lembaga	30.000.000,00	30.000.000,00	0,00	DINAS SOSIAL, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
2	08	02	2.03		Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Organisasi Perempuan yang dibina Persentase lembaga penyedia layanan yang telah mengikuti sosialisasi tentang penanganan kasus	100 persen 26 Organisasi	100 persen 26 Organisasi	149.580.000,00	149.580.000,00	149.580.000,00	DINAS SOSIAL, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
2	08	02	2.03	0003	Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota							
						Jumlah Dokumen Komunikasi Informasi dan Edukasi (KIE) Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota yang Tersedia	15 Dokumen	15 Dokumen	149.580.000,00	149.580.000,00	230.567.340,00	DINAS SOSIAL, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
2	08	03			PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN	Cakupan perempuan korban kekerasan yang mendapatkan penanganan dan pengaduan oleh petugas terlatih didalam unit pelayanan terpadu	100 BTJ	100 BTJ	149.532.000,00	202.390.300,00	147.632.000,00	
2	08	03	2.01		Pencegahan Kekerasan Terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah lembaga penyedia layanan perlindungan perempuan yang mendukung perlindungan perempuan	8 Lembaga	8 Lembaga	30.000.000,00	68.345.300,00	68.345.300,00	DINAS SOSIAL, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK

2	08	03	2.01	0001	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Kebijakan, Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan Terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten/Kota							
					Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Kebijakan, Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan Terhadap Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	6 Dokumen	6 Dokumen	30.000.000,00	68.345.300,00	50.000.000,00	DINAS SOSIAL, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	
2	08	03	2.02		Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan yang Memerlukan Koordinasi Kewenangan Kabupaten/Kota	Persentase kasus yang ditindaklanjuti	100 Persen	100 Persen	104.502.000,00	95.000.000,00	95.000.000,00	DINAS SOSIAL, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
2	08	03	2.02	0002	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota							
					Jumlah Layanan Tindak Lanjut Pengaduan yang Memerlukan Koordinasi dan Sinkronisasi bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota	12 Layanan	12 Layanan	104.502.000,00	95.000.000,00	68.587.000,00	DINAS SOSIAL, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	
2	08	03	2.03		Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah layanan perlindungan perempuan tingkat kab/kota Jumlah produk hukum yang diterbitkan Persentase lembaga penyedia layanan yang telah mengikuti sosialisasi tentang penanganan kasus	100 Persen 10 layanan 1 Dokumen	100 Persen 10 layanan 1 Dokumen	15.030.000,00	39.045.000,00	39.045.000,00	DINAS SOSIAL, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
2	08	03	2.03	0002	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Penanganan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota							
					Jumlah sumber Daya Manusia Lembaga Penyedia Layanan Penanganan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota yang Mendapat Peningkatan Kapasitas	-	3 Orang	0,00	29.045.000,00	29.045.000,00	DINAS SOSIAL, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	
2	08	03	2.03	0004	Penguatan Jejaring antar Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota							
					Jumlah Dokumen Hasil Penguatan Jejaring Antar Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	15 Dokumen	15 Dokumen	15.030.000,00	10.000.000,00	0,00	DINAS SOSIAL, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	
2	08	06			PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PHA)	Persentase indikator KLA yang terpenuhi	83 %	83 %	120.620.000,00	270.375.600,00	86.291.041,00	
2	08	06	2.01		Pelembagaan PHA pada Lembaga Pemerintah, Nonpemerintah, dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah lembaga yang berpartisipasi dalam PHA	35 Lembaga	35 Lembaga	43.855.000,00	135.587.400,00	135.587.400,00	DINAS SOSIAL, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK

2	08	06	2.01	0002	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelembagaan Pemenuhan Hak Anak Kewenangan Kabupaten/Kota							
					Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pelembagaan Pemenuhan Hak Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	15 Dokumen	15 Dokumen	43.855.000,00	135.587.400,00	26.310.400,00	DINAS SOSIAL, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	
2	08	06	2.02		Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	Persentase forum anak aktif 2. Persentase lembaga pendidikan yang telah mengembangkan SRA 3.Persentase lembaga kesehatan yang telah mengembangkan PRA	70 Persen	70 Persen	76.765.000,00	134.788.200,00	134.788.200,00	DINAS SOSIAL, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
2	08	06	2.02	0004	Penguatan Jejaring antar Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota							
					Jumlah Dokumen Hasil Penguatan Jejaring Antar Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	5 Dokumen	5 Dokumen	76.765.000,00	134.788.200,00	59.980.641,00	DINAS SOSIAL, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	
2	08	07			PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK	Cakupan anak korban kekerasan yang mendapatkan penanganan dan pengaduan oleh petugas terlatih didalam unit pelayanan terpadu	100 BTJ	100 BTJ	222.137.000,00	397.972.300,00	321.150.700,00	
2	08	07	2.01		Pencegahan Kekerasan Terhadap Anak yang Melibatkan para Pihak Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	Persentase kasus yang ditindak lanjuti	100 persen	100 persen	62.137.000,00	147.857.300,00	147.857.300,00	DINAS SOSIAL, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
2	08	07	2.01	0004	Advokasi dan pendampingan Perangkat Daerah dalam pelaksanaan kebijakan /program/ kegiatan pencegahan KTA							
					Jumlah SDM yang memperoleh advokasi dan Pendampingan dalam pelaksanaan kebijakan /program/ kegiatan pencegahan KTA	10 Orang	10 Orang	22.137.000,00	61.500.000,00	57.000.000,00	DINAS SOSIAL, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	
2	08	07	2.01	0005	Penyusunan kebijakan perlindungan khusus anak kewenangan kab/ kota							
					Jumlah kebijakan perlindungan khusus anak di tingkat kab/ kota	6 Dokumen	6 Dokumen	40.000.000,00	86.357.300,00	46.224.800,00	DINAS SOSIAL, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	

[illegible]

						Jumlah pelaksanaan Pendidikan Kependudukan Jalur Informal di Kelompok Kegiatan Masyarakat Binaan	25 Kegiatan	25 Kegiatan	23.000.000,00	0,00	0,00	DINAS SOSIAL, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
2	14	02	2.01	0019	Implementasi Pendidikan Kependudukan Jalur Pendidikan Formal dan Nonformal							
					Jumlah Pelaksanaan Pendidikan Kependudukan Jalur Pendidikan Formal dan Nonformal	-	1 Kegiatan	0,00	12.302.050,00	7.358.800,00		DINAS SOSIAL, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
2	14	02	2.02		Pemetaan Perkiraan Pengendalian Penduduk Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah rumah dataku yang dikembangkan	16 unit	16 unit	30.000.000,00	73.199.696,00	73.199.696,00	DINAS SOSIAL, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
2	14	02	2.02	0012	Pencatatan dan Pengumpulan Data Keluarga							
					Jumlah Laporan Pencatatan dan Pengumpulan Data Keluarga	-	12 Laporan	0,00	19.200.000,00	19.200.000,00		DINAS SOSIAL, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
2	14	02	2.02	0013	Pengolahan dan Pelaporan Data Pengendalian Lapangan dan Pelayanan KB							
					Jumlah Dokumen Pengolahan dan Pelaporan Data Pengendalian Lapangan dan Pelayanan KB	-	4 Dokumen	0,00	24.000.000,00	24.000.000,00		DINAS SOSIAL, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
2	14	02	2.02	0015	Pembentukan dan operasionalisasi Rumah Data Kependudukan di Kampung KB Untuk Memperkuat Integrasi Program Bangga Kencana di Sektor Lain							
					Jumlah Rumah Data Kependudukan di Kampung KB yang aktif Untuk Memperkuat Integrasi Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) di Sektor Lain yang dibentuk	16 Unit	16 Unit	30.000.000,00	29.999.696,00	22.785.800,00		DINAS SOSIAL, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
2	14	03			PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB)	Persentase CPR	65 %	65 %	248.880.000,00	1.107.417.465,00	1.005.030.465,00	
2	14	03	2.01		Pelaksanaan Advokasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk dan KB Sesuai Kearifan Budaya Lokal	Jumlah Peserta KB Baru dan Pembinaan Peserta KB Aktif	2300 orang	2300 orang	55.000.000,00	477.997.465,00	477.997.465,00	DINAS SOSIAL, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK

2	14	03	2.01	0008	Pengendalian Program KKBPK						
					Jumlah Laporan Hasil Pengendalian Program KKBPK	-	12 Laporan	0,00	60.000.000,00	60.000.000,00	DINAS SOSIAL, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
2	14	03	2.01	0010	Pengelolaan Operasional dan Sarana di Balai Penyuluhan Bangsa Kencana						
					Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Operasional dan Sarana di Balai Penyuluhan Bangsa Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana)	-	0 Laporan	0,00	97.997.465,00	97.997.465,00	DINAS SOSIAL, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
2	14	03	2.01	0011	Pelaksanaan Mekanisme Operasional Program Bangsa Kencana melalui Rapat Koordinasi Kecamatan (Rakorcam), Rapat Koordinasi Desa (Rakordes), dan Mini Lokakarya (Minilok)						
					Jumlah Laporan Mekanisme Operasional Program Bangsa Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) Melalui Rapat Koordinasi Kecamatan (Rakorcam), Rapat Koordinasi Desa (Rakordes), dan Mini Lokakarya (Minilok)	-	12 Laporan	0,00	40.000.000,00	40.000.000,00	DINAS SOSIAL, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
2	14	03	2.01	0012	Promosi dan KIE Program Bangsa Kencana Melalui Media Massa Cetak dan Elektronik serta Media Luar Ruang						
					Jumlah Dokumen Promosi dan KIE Program Bangsa Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) Melalui Media Massa Cetak dan Elektronik serta Media Luar Ruang	-	4 Dokumen	0,00	125.000.000,00	125.000.000,00	DINAS SOSIAL, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
2	14	03	2.01	0013	Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Program Bangsa Kencana sesuai Kearifan Budaya Lokal						
					Jumlah Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Program Bangsa Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) sesuai Kearifan Budaya Lokal yang dilaksanakan	7 Dokumen	7 Dokumen	40.000.000,00	40.000.000,00	0,00	DINAS SOSIAL, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
2	14	03	2.01	0014	Advokasi Program Bangsa kencana oleh pokja advokasi kepada Stakeholders dan Mitra Kerja						
					Jumlah Organisasi yang Mendapatkan Advokasi Program Bangsa Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) kepada Stakeholders dan Mitra Kerja	30 Organisasi	30 Organisasi	15.000.000,00	115.000.000,00	105.978.000,00	DINAS SOSIAL, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK

2	14	03	2.02		Pendayagunaan Tenaga Penyuluh KB/Petugas Lapangan KB (PKB/PLKB)	Jumlah PKB, Kader IMP yang dibina	99 orang	99 orang	137.880.000,00	355.880.000,00	355.880.000,00	DINAS SOSIAL, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
2	14	03	2.02	0004	Penggerakan Kader Institusi Masyarakat Pedesaan (IMP)							
						Jumlah Kader yang Mengikuti Penggerakan Kader Institusi Masyarakat Pedesaan (IMP)	-	94 Orang	0,00	128.000.000,00	128.000.000,00	DINAS SOSIAL, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
2	14	03	2.02	0005	Pembinaan IMP dan Program Bangga Kencana di Lini Lapangan oleh PKB/PLKB							
						Jumlah Organisasi yang Mengikuti Pembinaan IMP dan Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) di Lini Lapangan oleh PKB/PLKB	40 Organisasi	40 Organisasi	137.880.000,00	227.880.000,00	216.000.000,00	DINAS SOSIAL, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
2	14	03	2.03		Pengendalian dan Pendistribusian Kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi serta Pelaksanaan Pelayanan KB di Daerah Kabupaten/Kota	-	-	-	0,00	127.940.000,00	127.940.000,00	DINAS SOSIAL, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
2	14	03	2.03	0001	Pengendalian Pendistribusian Alat dan Obat Kontrasepsi dan Sarana Penunjang Pelayanan KB ke Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya							
						Jumlah Laporan Pengendalian Pendistribusian Alat dan Obat Kontrasepsi dan Sarana Penunjang Pelayanan KB ke Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya	-	1 Laporan	0,00	7.184.000,00	7.184.000,00	DINAS SOSIAL, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
2	14	03	2.03	0003	Peningkatan Kesertaan Penggunaan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)							
						Jumlah Orang yang Mengikuti Kesertaan Penggunaan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)	-	25 Orang	0,00	103.659.000,00	103.659.000,00	DINAS SOSIAL, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
2	14	03	2.03	0008	Pembinaan Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi di Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya							
						Jumlah Laporan Hasil Pembinaan Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi di Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya	-	12 Laporan	0,00	17.097.000,00	17.097.000,00	DINAS SOSIAL, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK

						Jumlah laporan hasil pengelolaan Ketahanan Keluarga Melalui Pusat Pelayanan Keluarga Sejahtera (PPKS)	-	12 Laporan / Dokumen	0,00	9.598.000,00	9.598.000,00	DINAS SOSIAL, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
2	14	04	2.01	0018	Pengadaan Sarana Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA)							
						Jumlah Unit Sarana Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA) yang tersedia	-	10 Unit	0,00	130.000.000,00	130.000.000,00	DINAS SOSIAL, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
2	14	04	2.01	0024	Penyediaan Biaya Operasional bagi Pengelola dan Pelaksana (Kader) Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA)							
						Jumlah Kader Pengelola dan Pelaksana (Kader) Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA) yang mendapat biaya operasional kegiatan	223 Orang	223 Orang	522.560.000,00	561.960.000,00	561.960.000,00	DINAS SOSIAL, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
2	14	04	2.02		Pelaksanaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota dalam Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga	Persentase OPD yang berpartisipasi dalam program kampung KB	54 persen	54 persen	542.560.000,00	424.751.400,00	424.751.400,00	DINAS SOSIAL, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
2	14	04	2.02	0003	Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Mitra dan Organisasi Kemasyarakatan dalam Pengelolaan Program Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)							
						Jumlah Organisasi yang Mengikuti Peningkatan Kapasitas Mitra dan Organisasi Kemasyarakatan dalam Pengelolaan Program Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	23 Organisasi	23 Organisasi	522.560.000,00	140.751.400,00	185.666.000,00	DINAS SOSIAL, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
2	14	04	2.02	0004	Promosi dan Sosialisasi Program Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga bagi Mitra Kerja							
						Jumlah Laporan Hasil Promosi dan Sosialisasi Program Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga bagi Mitra Kerja	1 Laporan	1 Laporan	20.000.000,00	20.000.000,00	9.580.000,00	DINAS SOSIAL, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
2	14	04	2.02	0005	Pemantauan Data dan Informasi Keluarga Berisiko Stunting (Termasuk remaja Calon Pengantin/Calon PUS, Ibu Hamil, Pasca salin/kelahiran, Baduta/Balita)							

						Cakupan Pemantauan Data dan Informasi Keluarga Berisiko Stunting (Termasuk remaja Calon Pengantin/Calon PUS, Ibu Hamil, Pasca salin/kelahiran, Baduta/Balita)	-	12 laporan	0,00	120.000.000,00	120.000.000,00	DINAS SOSIAL, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
2	14	04	2.02	0006	Pendampingan Keluarga Berisiko Stunting (Termasuk remaja Calon Pengantin/Calon PUS, Ibu Hamil, Pasca salin/kelahiran, Baduta/Balita)							
						Jumlah Keluarga Berisiko Stunting (Termasuk remaja Calon Pengantin/Calon PUS, Ibu Hamil, Pasca salin/kelahiran, Baduta/Balita) yang mendapat pendampingan	-	12 laporan	0,00	144.000.000,00	144.000.000,00	DINAS SOSIAL, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
					DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU							
2					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR							
2	07				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA							
2	07	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase pemenuhan urusan penunjang pada perangkat daerah	100 %	100 %	3.844.871.197,00	4.156.003.993,00	3.872.577.195,00	
2	07	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan layanan administrasi keuangan perangkat daerah	-	100 %	2.920.701.197,00	2.867.627.593,00	2.867.627.593,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
2	07	01	2.02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN							
						Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	336 Orang/bulan	336 Orang/bulan	2.920.701.197,00	2.867.627.593,00	2.894.607.281,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

						Terlaksananya Program Jaminan Sosial Tenaga Kerja dan Fasilitas Kesejahteraan Pekerja	8000 Orang	4000 Orang	1.158.121.000,00	780.974.300,00	403.200.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
2	18				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENANAMAN MODAL				200.000.450,00	200.000.450,00	98.800.000,00	
2	18	02			PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL	Realisasi Total terhadap target investasi	12 %	100 %	75.000.450,00	75.000.450,00	56.000.000,00	
2	18	02	2.02		Pembuatan Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota	Jumlah Pra Studi Kelayakan dan Video Promosi Investasi	1 Dokumen	1 Dokumen	75.000.450,00	75.000.450,00	75.000.450,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
2	18	02	2.02	0004	Penyusunan Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota							
						Jumlah Dokumen Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota	1 Dokumen	1 Dokumen	75.000.450,00	75.000.450,00	56.000.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
2	18	03			PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL	Persentase Peningkatan Investor yang Berinvestasi	37.000.000.000 Rupiah	3 %	75.000.000,00	75.000.000,00	42.300.000,00	

2	18	03	2.01		Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah promosi yang dilaksanakan	2 dokumen	1 dokumen	75.000.000,00	75.000.000,00	75.000.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
2	18	03	2.01	0002	Pelaksanaan Kegiatan Promosi Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota							
						Jumlah Dokumen Hasil Kegiatan Promosi Penanaman Modal Kabupaten/Kota	2 Dokumen	1 Dokumen	75.000.000,00	75.000.000,00	42.300.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
2	18	04			PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL	Persentase pelaku usaha yang memperoleh izin sesuai ketentuan	96,88 %	100 %	50.000.000,00	50.000.000,00	500.000,00	
2	18	04	2.01		Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Secara Terpadu Satu Pintu dibidang Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota	Persentase penerbitan izin yang dikeluarkan sesuai SOP	100 %	100 %	50.000.000,00	50.000.000,00	50.000.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
2	18	04	2.01	0006	Penyediaan Pelayanan Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik							

						Jumlah Pelaku Usaha yang Mendapatkan Pelayanan Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik	40 Pelaku Usaha	410 Pelaku Usaha	15.000.000,00	15.000.000,00	0,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
2	18	04	2.01	0007	Penyediaan dan pengelolaan Layanan konsultasi perizinan berusaha berbasis risiko							
						Jumlah Pelaku usaha yang Memperoleh Layanan Konsultasi Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik	85 Pelaku Usaha	260 Pelaku Usaha	10.000.000,00	10.000.000,00	500.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
2	18	04	2.01	0008	Pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan di bidang perizinan berusaha berbasis risiko							
						Jumlah Kegiatan Usaha yang mendapat pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan di bidang perizinan berusaha berbasis risiko Lintas Daerah Kabupaten/Kota bagi Kegiatan Usaha Dari Pelaku Usaha	12 Kegiatan Usaha	36 Kegiatan Usaha	25.000.000,00	25.000.000,00	0,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
					DINAS PANGAN DAN PERTANIAN				12.835.272.726,00	11.532.994.236,00	10.594.480.886,00	
2					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR				9.449.254.626,00	9.007.392.036,00	8.125.946.726,00	
2	09				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PANGAN				9.449.254.626,00	9.007.392.036,00	8.125.946.726,00	
2	09	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Pemenuhan Urusan Penunjang yang Dipenuhi pada Dinas Pangan dan Pertanian	100 %	100 %	9.191.602.526,00	8.797.842.036,00	8.029.343.426,00	

[illegible]

[illegible]

						Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	5 Unit	5 Unit	45.000.000,00	45.000.000,00	40.791.900,00	DINAS PANGAN DAN PERTANIAN
2	09	01	2.09	0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya							
						Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	7 Unit	2 Unit	111.724.000,00	61.053.155,00	71.053.155,00	DINAS PANGAN DAN PERTANIAN
2	09	01	2.09	0012	Pemeliharaan/Rehabilitasi Tanah							
						Luas Tanah yang Dilakukan Pemeliharaan/Rehabilitasi	0 Ha	0 Ha	0,00	0,00	0,00	DINAS PANGAN DAN PERTANIAN
2	09	03			PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT	Persentase Angka Kecukupan Energi (AKE) Persentase Angka Kecukupan Protein (AKP) Skor Pola Pangan Harapan (PPH)	100 %	0 0 85,19 - % -	230.163.900,00	182.061.800,00	96.603.300,00	
2	09	03	2.01		Penyediaan dan Penyaluran Pangan Pokok atau Pangan Lainnya sesuai dengan Kebutuhan Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan	Ketersediaan Pangan untuk Dikonsumsi Penduduk	2400 Kkal/kap/hr	2400 Kkal/kap/hr	52.420.700,00	142.435.000,00	142.435.000,00	DINAS PANGAN DAN PERTANIAN
2	09	03	2.01	0002	Penyediaan Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal							

						Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal yang Tersedia	1 Laporan	1 Laporan	28.435.000,00	142.435.000,00	76.175.000,00	DINAS PANGAN DAN PERTANIAN
2	09	03	2.01	0006	Pengembangan Kelembagaan Usaha Pangan Masyarakat dan Toko Tani Indonesia							
						Jumlah Kelembagaan Usaha Pangan Masyarakat dan Toko Tani Indonesia yang Dikembangkan	0 Unit	0 Unit	0,00	0,00	0,00	DINAS PANGAN DAN PERTANIAN
2	09	03	2.01	0015	Pemantauan Harga dan Pasokan Pangan							
						Informasi Harga dan Pasokan Pangan	1 Dokumen	0 Dokumen	18.486.200,00	0,00	0,00	DINAS PANGAN DAN PERTANIAN
2	09	03	2.01	0016	Penyusunan Neraca Bahan Makanan (NBM)							
						Informasi Neraca Bahan Makanan (NBM)	1 Dokumen	0 Dokumen	5.499.500,00	0,00	0,00	DINAS PANGAN DAN PERTANIAN

[illegible]

						Jumlah Prasarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	1 Unit	1 Unit	389.664.000,00	305.524.000,00	320.145.900,00	DINAS PANGAN DAN PERTANIAN
3	25	04	2.04	0009	Penjaminan Ketersediaan Sarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota							
						Jumlah Sarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	1 Unit	1 Unit	34.898.000,00	34.898.000,00	25.000.000,00	DINAS PANGAN DAN PERTANIAN
3	25	06			PROGRAM PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN	Jumlah Jenis Produk Olahan Perikanan Angka Konsumsi Ikan	1 jenis	0 42,16 jenis kg/kapita/tahun	72.376.400,00	72.376.400,00	45.000.000,00	
3	25	06	2.01		Penerbitan Tanda Daftar Usaha Pengolahan Hasil Perikanan bagi Usaha Skala Mikro dan Kecil	Jumlah Forum Peningkatan Konsumsi Ikan (FORIKAN) di Kota Padang Panjang dan Provinsi	2 kali	1 kali	72.376.400,00	72.376.400,00	72.376.400,00	DINAS PANGAN DAN PERTANIAN
3	25	06	2.01	0005	Penyediaan Data dan Informasi Usaha Pemasaran dan Pengolahan Hasil Perikanan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota berdasarkan skala usaha dan risiko							
						Jumlah Data dan Informasi Usaha Pemasaran dan Pengolahan Hasil Perikanan berdasarkan skala usaha dan risiko	1 Dokumen	1 Dokumen	72.376.400,00	72.376.400,00	45.000.000,00	DINAS PANGAN DAN PERTANIAN
3	27				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN				2.889.079.700,00	2.112.803.800,00	2.078.388.260,00	
3	27	02			PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN	Persentase pemenuhan sarana peternakan Peningkatan Produksi Komoditas Peternakan	80 %	0 80 % %	2.348.592.350,00	1.701.848.450,00	1.595.137.880,00	

3	27	02	2.01		Pengawasan Penggunaan Sarana Pertanian	Jumlah Jenis Sarana Pertanian yang Tersedia	2 jenis	2 jenis	641.609.200,00	403.025.000,00	403.025.000,00	DINAS PANGAN DAN PERTANIAN
3	27	02	2.01	0002	Pendampingan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian							
						Jumlah Pendampingan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian	12 Laporan	12 Laporan	641.609.200,00	403.025.000,00	373.895.000,00	DINAS PANGAN DAN PERTANIAN
3	27	02	2.02		Pengelolaan Sumber Daya Genetik (SDG) Hewan, Tumbuhan, dan Mikro Organisme Kewenangan Kabupaten/Kota	Kelompok Tani Pembudidaya Pertanian Organik Produksi Padi Produksi Tanaman Hias	2 kelompok 82055 tangkai 8573,4 ton	2 kelompok 82055 tangkai 8534,4 ton	13.600.000,00	123.600.000,00	123.600.000,00	DINAS PANGAN DAN PERTANIAN
3	27	02	2.02	0002	Peningkatan Kualitas SDG Hewan/Tanaman							
						Jumlah Pelaksanaan Peningkatan Kualitas SDG Hewan/Tanaman	1 Dokumen	1 Dokumen	13.600.000,00	123.600.000,00	57.875.000,00	DINAS PANGAN DAN PERTANIAN
3	27	02	2.03		Peningkatan Mutu dan Peredaran Benih/Bibit Ternak dan Tanaman Pakan Ternak serta Pakan dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Sapi Rearing Unit dan Pembibitan	10 ekor	7 ekor	167.883.300,00	167.883.300,00	167.883.300,00	DINAS PANGAN DAN PERTANIAN

						Jalan Usaha Tani yang Dibangun, Direhabilitasi dan Dipelihara	1 Unit	1 Unit	20.000.000,00	20.000.000,00	20.000.000,00	DINAS PANGAN DAN PERTANIAN
3	27	03	2.02	0009	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana Pertanian Lainnya							
						Jumlah Prasarana Pertanian Lainnya yang Dibangun, Direhabilitasi dan Dipelihara	1 Unit	1 Unit	110.375.000,00	30.805.000,00	19.073.600,00	DINAS PANGAN DAN PERTANIAN
3	27	03	2.02	0010	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Usaha Tani							
						Jumlah jaringan irigasi usaha tani yang direhabilitasi	1 Unit	1 Unit	50.000.000,00	16.800.000,00	8.400.000,00	DINAS PANGAN DAN PERTANIAN
3	27	03	2.03		Pengelolaan Wilayah Sumber Bibit Ternak dan Rumpun/Galur Ternak dalam Daerah Kabupaten/ Kota	Jumlah Kelahiran Ternak Hasil IB	41 ekor	25 ekor	31.537.400,00	31.537.400,00	31.537.400,00	DINAS PANGAN DAN PERTANIAN
3	27	03	2.03	0001	Pelestarian dan Pemanfaatan Wilayah Sumber Bibit Ternak dan Rumpun/Galur Ternak							

						Jumlah Wilayah Sumber Bibit Ternak dan Rumpun/Galur Ternak yang Dilestarikan dan Dimanfaatkan	1 Laporan	1 Laporan	31.537.400,00	31.537.400,00	22.076.180,00	DINAS PANGAN DAN PERTANIAN
3	27	04			PROGRAM PENGENDALIAN KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER	Persentase Penurunan Penyakit Ternak/ Hewan/ Kasus Tingkat Pengendalian Penyakit Hewan Menular Strategis (PHMS)	9,0 %	0 11,11 % %	162.795.800,00	162.795.800,00	105.143.200,00	
3	27	04	2.01		Penjaminan Kesehatan Hewan, Penutupan dan Pembukaan Daerah Wabah Penyakit Hewan Menular Dalam daerah Kabupaten/Kota	Persentase Pelayanan Medis Veteriner	100 %	100 %	128.485.800,00	128.485.800,00	128.485.800,00	DINAS PANGAN DAN PERTANIAN
3	27	04	2.01	0003	Penanggulangan Daerah Terdampak Wabah Penyakit Hewan Menular							
						Jumlah Daerah Terdampak Wabah yang Terkendali	1 Laporan	1 Laporan	8.485.800,00	8.485.800,00	1.975.800,00	DINAS PANGAN DAN PERTANIAN
3	27	04	2.01	0008	Pemberantasan Penyakit Hewan Menular dan Zoonosis dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota							
						Jumlah wilayah atau kawasan yang mengalami penurunan kasus penyakit hewan menular dan zoonosis dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/kota	1 Laporan	1 Laporan	120.000.000,00	120.000.000,00	94.968.400,00	DINAS PANGAN DAN PERTANIAN

[illegible]

						Jumlah unit usaha produk hewan yang telah dibina untuk penerapan persyaratan higiene sanitasi	1 Unit Usaha	1 Unit Usaha	23.000.000,00	23.000.000,00	0,00	DINAS PANGAN DAN PERTANIAN
3	27	05			PROGRAM PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA PERTANIAN	Persentase Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian yang Tertangani Persentase Penanganan Bencana Pertanian	80 %	0 80 % %	16.762.000,00	10.000.000,00	7.600.000,00	
3	27	05	2.01		Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian Kabupaten/Kota	Premi Asuransi Usaha Tanaman Padi (AUTP)	147 ha	147 ha	16.762.000,00	10.000.000,00	10.000.000,00	DINAS PANGAN DAN PERTANIAN
3	27	05	2.01	0001	Pengendalian Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan							
						Jumlah Luas Serangan Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan yang Dikendalikan	10 Ha	0 Ha	6.762.000,00	0,00	0,00	DINAS PANGAN DAN PERTANIAN
3	27	05	2.01	0006	Penanggulangan Pasca Bencana Alam Bidang Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan							
						Jumlah penanggulangan pasca bencana alam bidang tanaman pangan, hortikultura dan perkebunan	1 Laporan	1 Laporan	10.000.000,00	10.000.000,00	7.600.000,00	DINAS PANGAN DAN PERTANIAN
3	27	07			PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN	Persentase kelompok tani yang mendapatkan penyuluhan Inovasi Teknologi Pertanian Persentase SDM Penyuluh Pertanian yang Ditingkatkan	27,6 %	0 100 % %	149.017.150,00	139.017.150,00	300.957.400,00	

3	27	07	2.01		Pelaksanaan Penyuluhan Pertanian	Jumlah Kelompok Tani yang Mendapat Penyuluhan	20 keltan	20 keltan	149.017.150,00	139.017.150,00	139.017.150,00	DINAS PANGAN DAN PERTANIAN
3	27	07	2.01	0002	Pengembangan Kapasitas Kelembagaan Petani di Kecamatan dan Desa							
						Jumlah Kelembagaan Petani di Kecamatan dan Desa yang Ditingkatkan Kapasitasnya	1 Unit	1 Unit	31.001.000,00	31.001.000,00	8.587.400,00	DINAS PANGAN DAN PERTANIAN
3	27	07	2.01	0003	Penyediaan dan Pemanfaatan Sarana dan Prasarana Penyuluhan Pertanian							
						Jumlah Sarana dan Prasarana Penyuluhan Pertanian	1 Unit	1 Unit	118.016.150,00	108.016.150,00	233.090.000,00	DINAS PANGAN DAN PERTANIAN
3	27	07	2.01	0006	Penyediaan dan Peningkatan Kapasitas Penyuluh pertanian							
						Jumlah penyuluh pertanian yang tersedia dan ditingkatkan kapasitasnya	-	13 Orang	0,00	0,00	59.280.000,00	DINAS PANGAN DAN PERTANIAN
					DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENDATATAN SIPIL							
2					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR							
2	12				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENDATATAN SIPIL							
2	12	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase pemenuhan urusan penunjang pada perangkat daerah	100 %	100 %	3.389.789.226,00	3.137.818.511,00	2.795.534.191,00	

[illegible]

						Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	2 Unit	1 Unit	25.122.512,00	24.109.800,00	5.564.900,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
2	12	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah yang terpenuhi	100 %	100 %	245.712.940,00	236.393.712,00	236.393.712,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
2	12	01	2.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik							
						Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	48 Laporan	48 Laporan	54.333.740,00	54.333.712,00	41.461.524,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
2	12	01	2.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor							
						Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	5 Laporan	191.379.200,00	182.060.000,00	182.060.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
2	12	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase ketersediaan barang milik daerah berkondisi baik	100 %	100 %	320.090.000,00	319.928.000,00	319.928.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
2	12	01	2.09	0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan							
						Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	9 Unit	9 Unit	243.030.000,00	243.030.000,00	204.598.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
2	12	01	2.09	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya							
						Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	17 Unit	17 Unit	27.060.000,00	27.030.000,00	27.030.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
2	12	01	2.09	0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya							
						Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	1 Unit	50.000.000,00	49.868.000,00	49.868.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
2	12	02			PROGRAM PENDAFTARAN PENDUDUK	Persentase kepemilikan dokumen pendaftaran kependudukan	100 %	100 %	489.419.400,00	458.864.100,00	200.474.680,00	

2	12	02	2.01		Pelayanan Pendaftaran Penduduk	Persentase penduduk yang terlayani terhadap dokumen pendaftaran penduduk	99 %	99 %	54.744.000,00	54.744.000,00	54.744.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
2	12	02	2.01	0002	Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen Atas Pendaftaran Penduduk							
						Jumlah Dokumen Hasil Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen Atas Pendaftaran Penduduk	4500 Dokumen	4500 Dokumen	10.352.000,00	10.352.000,00	788.840,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
2	12	02	2.01	0004	Peningkatan Pelayanan Pendaftaran Penduduk							
						Jumlah Laporan Hasil Peningkatan Pelayanan Pendaftaran Penduduk	13 Laporan	13 Laporan	44.392.000,00	44.392.000,00	5.430.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
2	12	02	2.02		Penataan Pendaftaran Penduduk	Persentase pendaftaran penduduk yang terlaksana	100 %	100 %	266.768.400,00	236.213.100,00	236.213.100,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
2	12	02	2.02	0001	Penyusunan Tata Cara Perencanaan, Pelaksanaan, Pemantauan, Evaluasi, Pengendalian, dan Pelaporan Penyelenggaraan Adminduk Terkait Pendaftaran Penduduk							
						Jumlah Dokumen Tata Cara Perencanaan, Pelaksanaan, Pemantauan, Evaluasi, Pengendalian, dan Pelaporan Penyelenggaraan Adminduk Terkait Pendaftaran Penduduk yang Disusun	1 Dokumen	1 Dokumen	72.722.000,00	42.166.700,00	5.564.900,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
2	12	02	2.02	0002	Pengadaan Dokumen Kependudukan selain Blangko KTP-EI, Formulir, dan Buku Terkait Pendaftaran Penduduk Sesuai dengan Kebutuhan							
						Jumlah Dokumen Kependudukan selain Blangko KTP-EI, Formulir, dan Buku Terkait Pendaftaran Penduduk Sesuai dengan Kebutuhan yang Tersedia	10000 Dokumen	6000 Dokumen	194.046.400,00	194.046.400,00	155.490.740,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
2	12	02	2.03		Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk	Jumlah jenis penyelenggaraan pendaftaran penduduk	1 jenis	1 jenis	167.907.000,00	167.907.000,00	167.907.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
2	12	02	2.03	0005	Sosialisasi Pendaftaran Penduduk							
						Jumlah Laporan Hasil Sosialisasi Pendaftaran Penduduk	1 Laporan	1 Laporan	167.907.000,00	167.907.000,00	33.200.200,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL

2	12	03			PROGRAM PENCATATAN SIPIL	Persentase penduduk yang memiliki dokumen pencatatan sipil usia 0-18 Tahun	100 %	100 %	139.668.050,00	139.668.050,00	101.779.310,00	
2	12	03	2.01		Pelayanan Pencatatan Sipil	Jumlah kepemilikan akte kelahiran usia 0-18 Tahun	2000 akta	2000 akta	139.668.050,00	139.668.050,00	139.668.050,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
2	12	03	2.01	0002	Peningkatan dalam Pelayanan Pencatatan Sipil							
						Jumlah Layanan Pencatatan Sipil yang Ditingkatkan	2000 Layanan	1300 Layanan	139.668.050,00	139.668.050,00	101.779.310,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
2	12	04			PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN	Presentase Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	100 %	100 %	199.723.000,00	179.752.500,00	103.014.850,00	
2	12	04	2.03		Penyelenggaraan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Jumlah laporan penyelenggaran informasi administrasi kependudukan	12 laporan	12 laporan	162.975.600,00	143.005.100,00	143.005.100,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
2	12	04	2.03	0003	Fasilitasi Terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan							
						Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	12 Laporan	12 Laporan	32.000.000,00	31.989.900,00	25.152.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
2	12	04	2.03	0004	Penyelenggaraan Pemanfaatan Data Kependudukan							
						Jumlah Dokumen Penyelenggaraan Pemanfaatan Data Kependudukan	2 Dokumen	2 Dokumen	19.960.000,00	0,00	0,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
2	12	04	2.03	0005	Sosialisasi Terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan							
						Jumlah Laporan Hasil Sosialisasi Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	1 Laporan	1 Laporan	20.027.600,00	20.027.600,00	9.336.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
2	12	04	2.03	0007	Komunikasi, Informasi, dan Edukasi kepada Pemangku Kepentingan dan Masyarakat							
						Jumlah Dokumen Hasil Komunikasi, Informasi, dan Edukasi kepada Pemangku Kepentingan dan Masyarakat	5 Laporan	5 Laporan	90.988.000,00	90.987.600,00	68.526.850,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL

2	12	04	2.04		Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Informasi Administrasi kependudukan	1 laporan	1 laporan	36.747.400,00	36.747.400,00	36.747.400,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
2	12	04	2.04	0003	Bimbingan Teknis Terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan dan Pendayagunaan Data Kependudukan							
						Jumlah Laporan Hasil Bimbingan Teknis Terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan dan Pendayagunaan Data Kependudukan	1 Laporan	1 Laporan	36.747.400,00	36.747.400,00	0,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
2	12	05			PROGRAM PENGELOLAAN PROFIL KEPENDUDUKAN	Jumlah dokumen profil dan agregat kependudukan	3 Dokumen	3 Dokumen	24.976.000,00	24.967.000,00	9.981.000,00	
2	12	05	2.01		Penyusunan Profil Kependudukan	Jumlah dokumen profil dan aggregat kependudukan	3 dokumen	3 dokumen	24.976.000,00	24.967.000,00	24.967.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
2	12	05	2.01	0001	Penyediaan Data Kependudukan Kabupaten/Kota							
						Jumlah Data Kependudukan Kabupaten/Kota	3 Dokumen	3 Dokumen	24.976.000,00	24.967.000,00	9.981.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
					DINAS PERHUBUNGAN				12.139.592.197,00	11.835.405.260,00	11.299.781.282,00	
2					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR				12.139.592.197,00	11.835.405.260,00	11.299.781.282,00	
2	15				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN				12.139.592.197,00	11.835.405.260,00	11.299.781.282,00	
2	15	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase pemenuhan urusan penunjang yang dipenuhi pada Dinas Perhubungan	100 %	100 %	8.025.116.497,00	8.216.121.440,00	7.894.086.217,00	
2	15	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan layanan adminstrasi keuangan perangkat daerah	100 %	100 %	5.658.626.946,00	5.777.449.609,00	5.777.449.609,00	DINAS PERHUBUNGAN
2	15	01	2.02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN							
						Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	714 Orang/bulan	728 Orang/bulan	5.658.626.946,00	5.777.449.609,00	5.865.068.336,00	DINAS PERHUBUNGAN
2	15	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan layanan adminstrasi umum perangkat daerah	100 %	100 %	282.966.051,00	282.966.051,00	282.966.051,00	DINAS PERHUBUNGAN
2	15	01	2.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi							
						Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	4 Paket	4 Paket	10.000.000,00	10.000.000,00	5.940.580,00	DINAS PERHUBUNGAN
2	15	01	2.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor							
						Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	4 Paket	4 Paket	45.401.500,00	45.401.500,00	28.843.636,00	DINAS PERHUBUNGAN

2	15	01	2.06	0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan		Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	12 Paket	2 Paket	25.899.850,00	25.899.850,00	40.177.095,00	DINAS PERHUBUNGAN
2	15	01	2.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD								
							Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan	12 Laporan	201.664.701,00	201.664.701,00	115.813.000,00	DINAS PERHUBUNGAN
2	15	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		Persentase pemenuhan barang milik daerah sesuai dengan perencanaan Persentase pemenuhan sarana dan prasarana aparatur	90 %	90 %	114.996.500,00	112.211.860,00	112.211.860,00	DINAS PERHUBUNGAN
2	15	01	2.07	0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya								
							Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	36 Unit	3 Unit	114.996.500,00	112.211.860,00	7.523.700,00	DINAS PERHUBUNGAN
2	15	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Persentase Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang terpenuhi	100 %	100 %	1.594.447.000,00	1.624.436.520,00	1.624.436.520,00	DINAS PERHUBUNGAN
2	15	01	2.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik								
							Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	12 Laporan	60.000.000,00	60.000.000,00	59.999.700,00	DINAS PERHUBUNGAN
2	15	01	2.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor								
							Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	12 Laporan	1.534.447.000,00	1.564.436.520,00	1.417.519.320,00	DINAS PERHUBUNGAN
2	15	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Persentase ketersediaan Barang Milik Daerah berkondisi baik	100 %	100 %	374.080.000,00	419.057.400,00	419.057.400,00	DINAS PERHUBUNGAN
2	15	01	2.09	0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan								
							Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	11 Unit	8 Unit	80.000.000,00	80.000.000,00	66.790.000,00	DINAS PERHUBUNGAN
2	15	01	2.09	0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan								
							Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	5 Unit	4 Unit	150.500.000,00	150.500.000,00	140.210.000,00	DINAS PERHUBUNGAN
2	15	01	2.09	0003	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya								
							Jumlah Alat Besar yang Dipelihara dan dibayarkan Perizinannya	2 Unit	2 Unit	105.000.000,00	149.992.000,00	125.234.850,00	DINAS PERHUBUNGAN
2	15	01	2.09	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya								
							Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	15 Unit	8 Unit	8.580.000,00	8.565.400,00	8.565.400,00	DINAS PERHUBUNGAN
2	15	01	2.09	0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya								

[illegible]

						Jumlah Dokumen Bukti Lulus Uji Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	2000 Dokumen	0 Dokumen	50.000.000,00	25.020.000,00	20.000.000,00	DINAS PERHUBUNGAN
2	15	02	2.05	0007	Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor							
						Jumlah Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor yang Terpelihara	10 Unit	10 Unit	50.000.000,00	84.000.000,00	84.000.000,00	DINAS PERHUBUNGAN
2	15	02	2.06		Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota	Jumlah kegiatan pelaksanaan manajemen rekayasa lalu lintas Persentase kegiatan pelaksanaan manajemen rekayasa lalu lintas yang dilaksanakan	4 kegiatan	4 kegiatan 90 %	558.663.000,00	453.469.000,00	453.469.000,00	DINAS PERHUBUNGAN
2	15	02	2.06	0004	Pengawasan dan Pengendalian Efektivitas Pelaksanaan Kebijakan untuk Jalan Kabupaten/Kota							
						Jumlah Laporan Pengawasan dan Pengendalian Efektivitas Pelaksanaan Kebijakan untuk Jalan Kabupaten/Kota	12 Laporan	12 Laporan	127.338.000,00	72.644.000,00	105.913.000,00	DINAS PERHUBUNGAN
2	15	02	2.06	0015	Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota							
						Jumlah laporan Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota	2 Laporan	2 Laporan	41.130.000,00	30.630.000,00	19.583.500,00	DINAS PERHUBUNGAN
2	15	02	2.06	0016	Pengadaan dan Pemasangan Perlengkapan Jalan dalam rangka Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas							
						Jumlah Perlengkapan Jalan dalam Rangka Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas yang dilaksanakan pengadaan dan Pemasangan	2 Dokumen	2 Dokumen	295.340.000,00	255.340.000,00	112.155.000,00	DINAS PERHUBUNGAN
2	15	02	2.06	0017	Penataan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota							
						Jumlah laporan pelaksanaan Penataan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas Untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Provinsi	12 Laporan	12 Laporan	94.855.000,00	94.855.000,00	68.459.400,00	DINAS PERHUBUNGAN
2	15	02	2.09		Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Ketersediaan angkutan orang dan barang	1215 unit	1058 unit	210.504.000,00	154.504.000,00	154.504.000,00	DINAS PERHUBUNGAN
2	15	02	2.09	0002	Pengendalian dan Pengawasan Ketersediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota							
						Jumlah Laporan Pengendalian dan Pengawasan Ketersediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota	12 Laporan	12 Laporan	210.504.000,00	154.504.000,00	386.377.500,00	DINAS PERHUBUNGAN
					DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA							
2					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR							
2	16				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA							
2	16	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase pemenuhan urusan penunjang pada perangkat daerah	100 %	100 %	5.322.794.431,00	5.346.475.965,00	4.934.313.753,00	

[illegible]

						Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	5 Unit	5 Unit	12.300.000,00	12.300.000,00	6.289.900,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
2	16	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase penyediaan jasa penunjang urusan pemerintah daerah yang terpenuhi	100 %	100 %	1.393.254.000,00	1.393.254.000,00	1.393.254.000,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
2	16	01	2.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik							
						Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	36 Laporan	36 Laporan	107.030.000,00	107.030.000,00	103.600.269,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
2	16	01	2.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor							
						Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	12 Laporan	1.286.224.000,00	1.286.224.000,00	1.170.249.048,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
2	16	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase ketersediaan barang milik daerah berkondisi baik	100 %	100 %	143.958.000,00	143.958.000,00	143.958.000,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
2	16	01	2.09	0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan							
						Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	7 Unit	7 Unit	91.280.000,00	91.280.000,00	73.127.200,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
2	16	01	2.09	0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya							
						Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	1 Unit	26.908.000,00	26.908.000,00	13.454.000,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
2	16	01	2.09	0011	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya							
						Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	54 Unit	54 Unit	25.770.000,00	25.770.000,00	24.270.000,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

2	16	02			PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK	Persentase masyarakat yang menjadi sasaran penyebaran informasi publik persentase kepuasan masyarakat terhadap akses dan kualitas informasi publik pemerintah daerah (survei)	44,50 %	44,50 77 %	970.731.450,00	1.370.723.450,00	1.202.717.400,00	
2	16	02	2.01		Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Persentase capaian pengelolaan informasi dan komunikasi publik pemerintah daerah	28000 followers	100 %	970.731.450,00	1.370.723.450,00	1.370.723.450,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
2	16	02	2.01	0014	Relasi Media							
						Jumlah aktivitas relasi media kepada media yang memenuhi kriteria sebagai berikut: 1. terverifikasi dewan pers, dan 2. terdaftar di Dinas Kominfo, dan 3. aktif dalam kegiatan relasi media	8 Laporan	8 Laporan	734.807.000,00	1.174.807.000,00	1.127.515.500,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
2	16	02	2.01	0015	Kemitraan Komunikasi dengan Komunitas Informasi Masyarakat							
						Jumlah Komunitas Informasi yang aktif mendiseminasikan informasi dan terdaftar di Dinas Kominfo	2 Komunitas	2 Komunitas	14.199.450,00	14.199.450,00	0,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
2	16	02	2.01	0017	Pelayanan Informasi Publik							
						Jumlah permohonan Informasi Publik yang diselesaikan sesuai peraturan perundangan	1 Permohonan	1 Permohonan	13.246.000,00	13.246.000,00	3.552.000,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
2	16	02	2.01	0021	Pengelolaan Media Komunikasi Publik							
						Jumlah media komunikasi publik milik pemerintah daerah yang dikelola maupun pemanfaatan media berbayar sesuai kriteria/juknis	4 Media	4 Media	208.479.000,00	168.471.000,00	71.649.900,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
2	16	03			PROGRAM PENGELOLAAN APLIKASI INFORMATIKA	Indeks domain tata kelola sistem pemerintahan berbasis elektronik tingkat kematangan pembangunan aplikasi	3,70 Indeks	3,70 4 Indeks nilai	1.780.437.000,00	1.580.437.000,00	1.359.527.000,00	
2	16	03	2.02		Pengelolaan E-government di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah aplikasi dan proses bisnis pemerintahan berbasis elektronik yang di kembangkan persentase capaian pengelolaan e government Tingkat kematangan layanan sistem pemerintahan berbasis elektronik Tingkat kematangan manajemen sistem pemerintahan berbasis elektronik	3 Level 4 Aplikasi 4 Level	100 % 3 Level 4 Aplikasi 4 Level	1.780.437.000,00	1.580.437.000,00	1.580.437.000,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

2	16	03	2.02	0021	Penyelenggaraan Sistem Penghubung Layanan Pemerintah Daerah							
						Jumlah Aplikasi SPBE yang terhubung dengan Sistem Penghubung Layanan Pemerintah Daerah	4 Aplikasi	4 Aplikasi	248.263.000,00	248.263.000,00	14.685.000,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
2	16	03	2.02	0030	Penyediaan Akses Internet untuk Perangkat Daerah dalam rangka penyelenggaraan SPBE							
						Jumlah Perangkat Daerah yang memanfaatkan akses internet yang disediakan oleh Dinas	23 Perangkat Daerah	23 Perangkat Daerah	1.532.174.000,00	1.332.174.000,00	1.344.842.000,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
2	20				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG STATISTIK				19.480.000,00	19.480.000,00	5.505.000,00	
2	20	02			PROGRAM PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL	Indeks Pembangunan Statistik Domain Prinsip SDI Persentase Data Statistik Sektoral yang berkualitas	70 %	1.50 70 Indeks %	19.480.000,00	19.480.000,00	5.505.000,00	
2	20	02	2.01		Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah dokumentasi statistik sektoral yang di adakan Persentase capaian penyelenggaraan Statistik Sektoral Persentase ketersediaan data statistik sektoral	3 Dokumen 90 Persen	100 % 3 Dokumen 90 Persen	19.480.000,00	19.480.000,00	19.480.000,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
2	20	02	2.01	0008	Peningkatan Peran Statistik Sektoral terhadap Sistem Statistik Nasional							
						Persentase Perangkat Daerah yang menggunakan data Statistik untuk Perencanaan, Monitoring, dan Evaluasi Pembangunan dan/atau Penyusunan Kebijakan	100 Persentase	100 Persentase	19.480.000,00	19.480.000,00	5.505.000,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
2	21				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERSANDIAN				60.406.000,00	60.406.000,00	3.850.000,00	
2	21	02			PROGRAM PENYELENGGARAAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI	tingkat kematangan penerapan manajemen keamanan informasi indeks Keamanan Informasi	385 indeks	2 385 nilai indeks	60.406.000,00	60.406.000,00	3.850.000,00	
2	21	02	2.01		Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Persentase capaian penyelenggaraan persandian untuk pengamanan informasi pemerintah daerah	1 pelatihan 3 undefined	100 %	60.406.000,00	60.406.000,00	60.406.000,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
2	21	02	2.01	0003	Pelaksanaan Keamanan Informasi Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Berbasis Elektronik dan Non Elektronik							
						Jumlah Laporan Pelaksanaan Keamanan Informasi Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Berbasis Elektronik dan Non Elektronik	1 Laporan	1 Laporan	60.406.000,00	60.406.000,00	3.850.000,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
					DINAS PERDAGANGAN, KOPERASI DAN USAHA KECIL MENENGAH				23.267.045.561,00	22.065.966.486,00	19.889.076.226,40	
2					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR				13.149.565.008,00	12.509.769.648,00	11.541.569.164,40	
2	17				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH				13.149.565.008,00	12.509.769.648,00	11.541.569.164,40	

[illegible]

						Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	13 Laporan	12 Laporan	569.536.000,00	555.782.000,00	565.960.800,00	DINAS PERDAGANGAN, KOPERASI DAN USAHA KECIL MENENGAH
2	17	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase barang milik daerah yang dipelihara	100 persentase	100 %	776.307.247,00	608.119.047,00	608.119.047,00	DINAS PERDAGANGAN, KOPERASI DAN USAHA KECIL MENENGAH
2	17	01	2.09	0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan							
						Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	1 Unit	1 Unit	164.412.000,00	122.412.000,00	113.136.000,00	DINAS PERDAGANGAN, KOPERASI DAN USAHA KECIL MENENGAH
2	17	01	2.09	0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan							
						Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	27 Unit	20 Unit	127.445.000,00	141.971.600,00	102.630.000,00	DINAS PERDAGANGAN, KOPERASI DAN USAHA KECIL MENENGAH
2	17	01	2.09	0005	Pemeliharaan Mebel							
						Jumlah Mebel yang Dipelihara	2 Unit	3 Unit	29.794.000,00	35.000.000,00	35.000.000,00	DINAS PERDAGANGAN, KOPERASI DAN USAHA KECIL MENENGAH
2	17	01	2.09	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya							
						Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	20 Unit	20 Unit	105.910.000,00	83.017.200,00	45.337.200,00	DINAS PERDAGANGAN, KOPERASI DAN USAHA KECIL MENENGAH
2	17	01	2.09	0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya							
						Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	3 Unit	3 Unit	348.746.247,00	225.718.247,00	225.718.247,00	DINAS PERDAGANGAN, KOPERASI DAN USAHA KECIL MENENGAH
2	17	03			PROGRAM PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN KOPERASI	Persentase Pengawasan dan Pemeriksaan Koperasi	27 Persen	32,25 Persen	25.651.100,00	3.829.000,00	1.610.000,00	
2	17	03	2.01		Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi, Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/ Kota	Persentase Koperasi yang Diawasi	12 koperasi 20 koperasi	45,45 %	25.651.100,00	3.829.000,00	3.829.000,00	DINAS PERDAGANGAN, KOPERASI DAN USAHA KECIL MENENGAH

2	17	03	2.01	0004	Pelaksanaan Proses Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya Daerah Kabupaten/Kota							
						Jumlah Koperasi yang telah dilakukan Pemeriksaan dan Pengawasan	20 Unit Usaha	20 Unit Usaha	25.651.100,00	3.829.000,00	1.610.000,00	DINAS PERDAGANGAN, KOPERASI DAN USAHA KECIL MENENGAH
2	17	06			PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PERLINDUNGAN KOPERASI	Persentase peningkatan koperasi yang berkualitas	26,31 Persen	9,09 %	105.987.500,00	56.120.600,00	111.200.000,00	
2	17	06	2.01		Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi yang Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/Kota	Persentase koperasi yang dibina	10 koperasi 15 koperasi	22.73 %	105.987.500,00	56.120.600,00	56.120.600,00	DINAS PERDAGANGAN, KOPERASI DAN USAHA KECIL MENENGAH
2	17	06	2.01	0005	Peningkatan Produktivitas, Nilai Tambah, Akses Pasar, Akses Pembiayaan, Penguatan Kelembagaan, Penataan Manajemen, Standarisasi, dan Restrukturisasi Usaha							
						Jumlah Unit Usaha yang Produktif, Bernilai Tambah, Memiliki Akses Pasar, Akses Pembiayaan, Penguatan Kelembagaan, Penataan Manajemen, Standarisasi, dan Restrukturisasi Usaha	15 Unit Usaha	16 Unit Usaha	105.987.500,00	56.120.600,00	111.200.000,00	DINAS PERDAGANGAN, KOPERASI DAN USAHA KECIL MENENGAH
2	17	07			PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM)	Persentase usaha kecil yang bertransformasi dari informal ke formal Pertumbuhan wirausaha	15 Persen	19,04 25 % %	645.458.000,00	763.502.099,00	682.180.599,00	
2	17	07	2.01		Pemberdayaan Usaha Mikro yang Dilakukan Melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perizinan, Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi dengan Para Pemangku Kepentingan	Persentase peningkatan usaha mikro yang terfasilitasi	10 persentase 15 persentase	1,25 %	645.458.000,00	763.502.099,00	763.502.099,00	DINAS PERDAGANGAN, KOPERASI DAN USAHA KECIL MENENGAH
2	17	07	2.01	0002	Pemberdayaan Melalui Kemitraan Usaha Mikro							
						Jumlah Unit Usaha yang Telah Melaksanakan Kemitraan Usaha Mikro	20 Unit Usaha	20 Unit Usaha	537.000.000,00	505.044.099,00	483.514.099,00	DINAS PERDAGANGAN, KOPERASI DAN USAHA KECIL MENENGAH
2	17	07	2.01	0004	Pemberdayaan Kelembagaan Potensi dan Pengembangan Usaha Mikro							
						Jumlah Unit Usaha yang Telah Menerima Pembinaan dan Pendampingan Terhadap Usaha Mikro	40 Unit Usaha	40 Unit Usaha	108.458.000,00	258.458.000,00	198.666.500,00	DINAS PERDAGANGAN, KOPERASI DAN USAHA KECIL MENENGAH
2	17	08			PROGRAM PENGEMBANGAN UMKM	Indeks proporsi UKM menjalin kemitraan	45 Persen	0,2	3.612.333.000,00	3.610.317.000,00	3.346.379.162,50	
2	17	08	2.01		Pengembangan Usaha Mikro dengan Orientasi Peningkatan Skala Usaha Menjadi Usaha Kecil	Persentase peningkatan produktivitas usaha mikro	45 persentase	18 %	3.612.333.000,00	3.610.317.000,00	3.610.317.000,00	DINAS PERDAGANGAN, KOPERASI DAN USAHA KECIL MENENGAH
2	17	08	2.01	0002	Pengembangan Usaha Mikro							
						Jumlah Usaha Mikro yang Terfasilitasi	1662 Unit Usaha	878 Unit Usaha	3.612.333.000,00	3.610.317.000,00	3.346.379.162,50	DINAS PERDAGANGAN, KOPERASI DAN USAHA KECIL MENENGAH
3					URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN				10.117.480.553,00	9.556.196.838,00	8.347.507.062,00	
3	30				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERDAGANGAN				9.258.055.450,00	8.778.883.650,00	7.731.304.960,00	
3	30	02			PROGRAM PERIZINAN DAN PENDAFTARAN PERUSAHAAN	Persentase Izin Usaha Perdagangan yang Difasilitasi	37 Persen	37 Persen	34.293.000,00	24.592.500,00	13.397.300,00	
3	30	02	2.01		Penerbitan Izin Pengelolaan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan, dan Izin Usaha Toko Swalayan	Jumlah pelaku usaha yang memiliki izin usaha	100 pelaku usaha 200 pelaku usaha	100 pelaku usaha 200 pelaku usaha	13.396.500,00	5.396.000,00	5.396.000,00	DINAS PERDAGANGAN, KOPERASI DAN USAHA KECIL MENENGAH

3	30	02	2.01	0001	Fasilitasi Pemenuhan Komitmen Perolehan Perizinan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan, dan Toko Swalayan Melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik							
						Jumlah Rekomendasi Pemenuhan Komitmen Perolehan Perizinan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan, dan Toko Swalayan Melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	100 Dokumen	100 Dokumen	13.396.500,00	5.396.000,00	1.500.000,00	DINAS PERDAGANGAN, KOPERASI DAN USAHA KECIL MENENGAH
3	30	02	2.06		Pengendalian Fasilitas Penyimpanan Bahan Berbahaya dan Pengawasan Distribusi, Pengemasan dan Pelabelan Bahan Berbahaya di Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota	Jumlah pengendalian fasilitas penyimpanan bahan berbahaya dan pengawasan distribusi pengemasan dan pelabelan bahan berbahaya di tingkat daerah kabupaten/kota	2 kali	2 kali	20.896.500,00	19.196.500,00	19.196.500,00	DINAS PERDAGANGAN, KOPERASI DAN USAHA KECIL MENENGAH
3	30	02	2.06	0003	Pengawasan Distribusi, Pengemasan dan Pelabelan Bahan Berbahaya Terhadap Pengguna Akhir Bahan Berbahaya (PA-B2) maupun Produsen B2 (P-B2)							
						Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Distribusi, Pengemasan dan Pelabelan Bahan Berbahaya Terhadap Distributor B2, Pengguna Akhir Bahan Berbahaya (PA-B2) maupun Produsen B2 (P-B2)	2 Laporan	2 Laporan	20.896.500,00	19.196.500,00	11.897.300,00	DINAS PERDAGANGAN, KOPERASI DAN USAHA KECIL MENENGAH
3	30	03			PROGRAM PENINGKATAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN	Persentase sarana perdagangan yang ditingkatkan kualitasnya	95 Persen	90 Persen	8.016.396.650,00	7.516.396.650,00	6.719.191.560,00	
3	30	03	2.01		Pembangunan dan Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan	Persentase pasar ber SNI	2 unit 95 persentase	100 persentase	8.016.396.650,00	7.516.396.650,00	7.516.396.650,00	DINAS PERDAGANGAN, KOPERASI DAN USAHA KECIL MENENGAH
3	30	03	2.01	0001	Penyediaan Sarana Distribusi Perdagangan							
						Jumlah Sarana Distribusi Perdagangan	2 Unit	2 Unit	4.615.230.000,00	4.115.230.000,00	3.796.060.800,00	DINAS PERDAGANGAN, KOPERASI DAN USAHA KECIL MENENGAH
3	30	03	2.01	0002	Fasilitasi Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan							
						Jumlah Fasilitas Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan	1 Unit	1 Unit	3.401.166.650,00	3.401.166.650,00	2.923.130.760,00	DINAS PERDAGANGAN, KOPERASI DAN USAHA KECIL MENENGAH
3	30	04			PROGRAM STABILISASI HARGA BARANG KEBUTUHAN POKOK DAN BARANG PENTING	Persentase Stabilisasi harga barang kebutuhan pokok dan barang penting	6 Persen	100 %	403.307.000,00	239.702.800,00	73.986.300,00	
3	30	04	2.02		Pengendalian Harga, dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Pasar Kabupaten/Kota	Persentase koefisien variasi harga antar waktu barang kebutuhan pokok	250 kali 6 persentase	8 persentase	403.307.000,00	239.702.800,00	239.702.800,00	DINAS PERDAGANGAN, KOPERASI DAN USAHA KECIL MENENGAH
3	30	04	2.02	0001	Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pelaku Usaha Distribusi Barang dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota							
						Jumlah Laporan Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pelaku Usaha Distribusi Barang dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota	250 Laporan	250 Laporan	403.307.000,00	239.702.800,00	73.986.300,00	DINAS PERDAGANGAN, KOPERASI DAN USAHA KECIL MENENGAH
3	30	06			PROGRAM STANDARDISASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN	Persentase penanganan pengaduan konsumen terkait metrologi legal	65 Persen	90 Persen	211.558.800,00	113.556.100,00	59.386.100,00	
3	30	06	2.01		Pelaksanaan Metrologi Legal, Berupa Tera, Tera Ulang, dan Pengawasan	Persentase alat UTPP yang bertanda tera sah	65 persentase 6 kali	55 persentase	211.558.800,00	113.556.100,00	113.556.100,00	DINAS PERDAGANGAN, KOPERASI DAN USAHA KECIL MENENGAH
3	30	06	2.01	0001	Pelaksanaan Metrologi Legal, Berupa Tera, Tera Ulang							

[illegible]

						-Jumlah dokumen hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan terhadap Perizinan Berusaha industri dengan skala usaha Industri Kecil dan Industri Menengah yang berlokasi di satu Kab./Kota sepanjang merupakan Penanaman Modal Dalam Negeri dan selain bidang usaha tertentu yang menjadi kewenangan pemerintah pusat	1 Dokumen	1 Dokumen	3.195.000,00	2.355.000,00	1.093.250,00	DINAS PERDAGANGAN, KOPERASI DAN USAHA KECIL MENENGAH	
						DINAS PEMUDA, OLAH RAGA DAN PARIWISATA			14.203.117.706,00	11.418.203.963,00	10.459.604.674,31		
2						URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR			12.370.296.756,00	10.174.258.863,00	8.884.012.904,31		
2	19					URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA			12.370.296.756,00	10.174.258.863,00	8.884.012.904,31		
2	19	01				PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase pemenuhan urusan penunjang yang dipenuhi	100 %	100 %	4.707.515.716,00	5.542.768.093,00	5.315.461.618,00	
2	19	01	2.02			Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan urusan penunjang yang dipenuhi	-	100 %	3.883.099.416,00	3.707.633.330,00	3.707.633.330,00	DINAS PEMUDA, OLAH RAGA DAN PARIWISATA
2	19	01	2.02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN								
							Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	406 Orang/bulan	364 Orang/bulan	3.883.099.416,00	3.707.633.330,00	3.738.007.155,00	DINAS PEMUDA, OLAH RAGA DAN PARIWISATA
2	19	01	2.06			Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan layanan administrasi umum perangkat daerah	100 %	100 %	199.912.300,00	199.909.140,00	199.909.140,00	DINAS PEMUDA, OLAH RAGA DAN PARIWISATA
2	19	01	2.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi								
							Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	4 Paket	4 Paket	14.991.100,00	14.988.920,00	11.920.720,00	DINAS PEMUDA, OLAH RAGA DAN PARIWISATA
2	19	01	2.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor								
							Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	4 Paket	4 Paket	28.920.200,00	28.919.470,00	28.919.470,00	DINAS PEMUDA, OLAH RAGA DAN PARIWISATA
2	19	01	2.06	0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan								
							Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	12 Paket	12 Paket	21.000.000,00	20.999.750,00	20.999.750,00	DINAS PEMUDA, OLAH RAGA DAN PARIWISATA
2	19	01	2.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD								
							Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	100 Laporan	50 Laporan	135.001.000,00	135.001.000,00	73.024.000,00	DINAS PEMUDA, OLAH RAGA DAN PARIWISATA
2	19	01	2.07			Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase pemenuhan barang milik daerah sesuai dengan perencanaan	100 %	100 %	36.951.500,00	35.003.400,00	35.003.400,00	DINAS PEMUDA, OLAH RAGA DAN PARIWISATA
2	19	01	2.07	0005	Pengadaan Mebel								
							Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	4 Unit	1 Unit	12.000.000,00	11.438.200,00	4.619.100,00	DINAS PEMUDA, OLAH RAGA DAN PARIWISATA
2	19	01	2.07	0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya								

[illegible]

						Jumlah Wirausaha Muda Tingkat kabupaten/kota Yang Difasilitasi Pengembangan Kewirausahaan Pemuda	30 Orang	30 Orang	178.150.000,00	78.149.900,00	71.465.900,00	DINAS PEMUDA, OLAH RAGA DAN PARIWISATA
2	19	02	2.01	0015	Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelenggaraan Pengembangan Kepeloporan Pemuda bagi Pemuda Pelopor Tingkat Kabupaten/kota							
						Jumlah Pemuda Pelopor Tingkat kabupaten/kota dari Seluruh Kabupaten/Kota yang difasilitasi dalam Pengembangan Kepeloporan Pemuda	30 Orang	30 Orang	96.967.050,00	65.247.050,00	61.047.050,00	DINAS PEMUDA, OLAH RAGA DAN PARIWISATA
2	19	02	2.02		Pemberdayaan dan Pengembangan Organisasi Kepemudaan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah organisasi yang diberdayakan dan dikembangkan Persentase organisasi kepemudaan yang difasilitasi tingkat daerah	1 OKP	100 Persen 1 OKP	50.000.000,00	100.000.000,00	100.000.000,00	DINAS PEMUDA, OLAH RAGA DAN PARIWISATA
2	19	02	2.02	0003	Koordinasi, sinkronisasi, dan penyelenggaraan pengembangan organisasi kepemudaan tingkat kabupaten/kota							
						Jumlah Organisasi Kepramukaan Tingkat Daerah yang Meningkatkan Kapasitasnya	1 Organisasi	1 Organisasi	50.000.000,00	100.000.000,00	100.000.000,00	DINAS PEMUDA, OLAH RAGA DAN PARIWISATA
2	19	03			PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEOLAHRAGAAN	Jumlah cabang olahraga yang dibina	45 Cabang	45 Cabang	7.187.663.990,00	4.238.093.820,00	3.236.038.336,31	
2	19	03	2.01		Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Pendidikan pada Jenjang Pendidikan yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah pembinaan dan pengembangan olahraga pendidikan	1 kali	1 kali	3.040.264.000,00	2.434.627.720,00	2.434.627.720,00	DINAS PEMUDA, OLAH RAGA DAN PARIWISATA
2	19	03	2.01	0005	Koordinasi dan sinkronisasi penyediaan prasarana olahraga melalui perencanaan, pengadaan, pemanfaatan, pemeliharaan, dan pengawasan Prasarana Olahraga di tingkat kabupaten/kota							
						Jumlah sarana dan prasarana olahraga di tingkat kabupaten/kota yang tersedia	4 Unit	4 Unit	3.040.264.000,00	2.434.627.720,00	1.410.769.446,31	DINAS PEMUDA, OLAH RAGA DAN PARIWISATA
2	19	03	2.02		Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah kejuaraan olahraga tingkat daerah yang dilaksanakan	5 kompetisi/eve n	17 kegiatan	2.936.690.090,00	336.679.500,00	336.679.500,00	DINAS PEMUDA, OLAH RAGA DAN PARIWISATA
2	19	03	2.02	0004	Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga Multi Event dan Single Event Tingkat Kabupaten/Kota							
						Jumlah Kejuaraan Olahraga Multi Event dan Single Event Tingkat Kabupaten/Kota	2 Kegiatan	17 Kegiatan	436.679.900,00	336.679.500,00	332.188.000,00	DINAS PEMUDA, OLAH RAGA DAN PARIWISATA
2	19	03	2.02	0006	Keikutsertaan anggota kontingen kabupaten/kota dalam Penyelenggaraan pekan dan kejuaraan olahraga							
						Jumlah Peserta pada Penyelenggaraan Kejuaraan Tingkat kabupaten/kota	400 Orang	400 Orang	2.500.010.190,00	0,00	0,00	DINAS PEMUDA, OLAH RAGA DAN PARIWISATA
2	19	03	2.03		Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Prestasi Tingkat Daerah Provinsi	Jumlah pembinaan dan pengembangan olahraga prestasi tingkat daerah provinsi	1 cabang olahraga	1 cabang olahraga	533.670.000,00	802.486.500,00	802.486.500,00	DINAS PEMUDA, OLAH RAGA DAN PARIWISATA
2	19	03	2.03	0009	Pembinaan dan Pengembangan Olahragawan Berprestasi kabupaten/kota							
						Jumlah Olahragawan Berprestasi kabupaten/kota yang Dibina dan Diberikan Pengembangan	200 Orang	200 Orang	533.670.000,00	802.486.500,00	402.486.500,00	DINAS PEMUDA, OLAH RAGA DAN PARIWISATA
2	19	03	2.05		Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Rekreasi	Jumlah pelaksanaan senam dan olahraga rekreasi yang dilaksanakan	2 kegiatan	2 kegiatan	677.039.900,00	664.300.100,00	664.300.100,00	DINAS PEMUDA, OLAH RAGA DAN PARIWISATA
2	19	03	2.05	0009	Penyediaan prasarana dan sarana olahraga rekreasi melalui perencanaan, pengadaan, pemanfaatan, pemeliharaan, pengembangan, dan pengawasan							

						Jumlah Prasarana dan Sarana Kepramukaan kabupaten/kota yang Tersedia dan Termanfaatkan	3 Unit	3 Unit	577.040.000,00	364.300.000,00	716.814.290,00	DINAS PEMUDA, OLAH RAGA DAN PARIWISATA
2	19	03	2.05	0010	Pemassalan olahraga dan penyelenggaraan festival Olahraga Rekreasi yang berjenjang dan berkelanjutan pada tingkat daerah, nasional, dan internasional							
						Jumlah Lembaga yang terfasilitasi dalam Pengembangan dan Pemasalan Festival dan Olahraga Rekreasi	1 Lembaga	1 Lembaga	99.999.900,00	300.000.100,00	373.780.100,00	DINAS PEMUDA, OLAH RAGA DAN PARIWISATA
2	19	04			PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS KEPRAMUKAAN	Jumlah organisasi Kepramukaan yang dibina	1 Organisasi	1 Organisasi	150.000.000,00	150.000.000,00	100.000.000,00	
2	19	04	2.01		Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Kepramukaan	Jumlah pembinaan terhadap organisasi kepramukaan	1 organisasi	1 organisasi	150.000.000,00	150.000.000,00	150.000.000,00	DINAS PEMUDA, OLAH RAGA DAN PARIWISATA
2	19	04	2.01	0002	Peningkatan Kapasitas Organisasi Kepramukaan Tingkat Daerah							
						Jumlah Organisasi Kepramukaan Tingkat Daerah yang Meningkatkan Kapasitasnya	1 Organisasi	1 Organisasi	150.000.000,00	150.000.000,00	100.000.000,00	DINAS PEMUDA, OLAH RAGA DAN PARIWISATA
3					URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN				1.832.820.950,00	1.243.945.100,00	1.575.591.770,00	
3	26				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PARIWISATA				1.832.820.950,00	1.243.945.100,00	1.575.591.770,00	
3	26	02			PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA	Rasio lama kunjungan wisata Persentase Pertumbuhan Kunjungan Wisatawan	1,20 -	1,20 25 - Persen	1.106.580.950,00	574.705.950,00	541.673.470,00	
3	26	02	2.03		Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	Jumlah destinasi wisata yang dikelola	4 destinasi	4 destinasi	1.106.580.950,00	574.705.950,00	574.705.950,00	DINAS PEMUDA, OLAH RAGA DAN PARIWISATA
3	26	02	2.03	0003	Pengembangan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota							
						Jumlah Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota yang Dikembangkan Sesuai dengan Tahapan Pengembangan (Rintisan, Berkembang, Pemantapan, Revitalisasi)	2 Lokasi	4 Lokasi	498.001.200,00	83.601.200,00	117.615.450,00	DINAS PEMUDA, OLAH RAGA DAN PARIWISATA
3	26	02	2.03	0004	Pengadaan/Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota							
						Jumlah Sarana dan Prasarana Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota yang Tersedia dan Terpelihara	2 Unit	2 Unit	454.080.000,00	287.080.000,00	281.520.970,00	DINAS PEMUDA, OLAH RAGA DAN PARIWISATA
3	26	02	2.03	0006	Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota							
						Jumlah Laporan Hasil Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	1 Laporan	1 Laporan	64.499.900,00	114.024.900,00	63.637.450,00	DINAS PEMUDA, OLAH RAGA DAN PARIWISATA
3	26	02	2.03	0007	Penerapan Destinasi Pariwisata Berkelanjutan dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota							
						Jumlah Lokasi yang Menerapkan Destinasi Pariwisata Berkelanjutan dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	1 Lokasi	1 Lokasi	89.999.850,00	89.999.850,00	78.899.600,00	DINAS PEMUDA, OLAH RAGA DAN PARIWISATA
3	26	03			PROGRAM PEMASARAN PARIWISATA	Persentase peningkatan media pemasaran pariwisata Jumlah kunjungan wisatawan	660000 660000 orang	25 660000 Persentase orang	214.240.000,00	339.239.750,00	262.528.150,00	

3	26	03	2.01		Pemasaran Pariwisata Dalam dan Luar Negeri Daya Tarik, Destinasi dan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan pemasaran Informasi Pariwisata Kabupaten/Kota, Baik Dalam dan Luar Negeri Persentase cakupan pelayanan promosi wisata	90 %	1 dokumen 90 %	214.240.000,00	339.239.750,00	339.239.750,00	DINAS PEMUDA, OLAH RAGA DAN PARIWISATA
3	26	03	2.01	0003	Penyediaan Data dan Penyebaran Informasi Pariwisata Kabupaten/Kota, Baik Dalam dan Luar Negeri							
						Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Penyediaan Data dan Penyebaran Informasi Pariwisata Kabupaten/Kota, Baik Dalam dan Luar Negeri	0 Dokumen	0 Dokumen	0,00	0,00	0,00	DINAS PEMUDA, OLAH RAGA DAN PARIWISATA
3	26	03	2.01	0004	Peningkatan Kerja Sama dan Kemitraan Pariwisata Dalam dan Luar Negeri							
						Jumlah Dokumen Kerja Sama dan Kemitraan Pariwisata Dalam dan Luar Negeri	3 Dokumen	1 Dokumen	62.990.000,00	62.990.000,00	32.016.000,00	DINAS PEMUDA, OLAH RAGA DAN PARIWISATA
3	26	03	2.01	0006	Fasilitasi Kegiatan Pemasaran Pariwisata Baik Dalam dan Luar Negeri Pariwisata Kabupaten/Kota							
						Jumlah Kegiatan Pemasaran Pariwisata Baik Dalam dan Luar Negeri	7 Kegiatan	2 Kegiatan	151.250.000,00	276.249.750,00	230.512.150,00	DINAS PEMUDA, OLAH RAGA DAN PARIWISATA
3	26	04			PROGRAM PENGEMBANGAN EKONOMI KREATIF MELALUI PEMANFAATAN DAN PERLINDUNGAN HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL	Jumlah pemanfaatan dan perlindungan Hak Kekayaan Intelektual	90 pelaku usaha Ekonomi kreatif	90 pelaku usaha Ekonomi kreatif	132.000.000,00	80.000.000,00	44.175.000,00	
3	26	04	2.01		Penyediaan Prasarana (Zona Kreatif/Ruang Kreatif/Kota Kreatif) sebagai Ruang Berekspresi, Berpromosi dan Berinteraksi bagi Insan Kreatif di Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah prasarana kreatif yang disediakan	1 Kreatif Hub	1 Kreatif Hub	102.000.000,00	50.000.000,00	50.000.000,00	DINAS PEMUDA, OLAH RAGA DAN PARIWISATA
3	26	04	2.01	0001	Pengembangan dan Revitalisasi Prasarana Kota Kreatif							
						Jumlah Sarana dan Prasarana Kota Kreatif yang tersedia	10 unit Unit	8 Unit	102.000.000,00	50.000.000,00	30.000.000,00	DINAS PEMUDA, OLAH RAGA DAN PARIWISATA
3	26	04	2.02		Pengembangan Ekosistem Ekonomi Kreatif	Jumlah produk Ekraf yang memiliki HAKI	40 produk	25 produk	30.000.000,00	30.000.000,00	30.000.000,00	DINAS PEMUDA, OLAH RAGA DAN PARIWISATA
3	26	04	2.02	0022	Fasilitasi Pendaftaran Kekayaan Intelektual							
						Jumlah produk Hasil Pencatatan atas Hak Cipta dan Hak Terkait, Pendaftaran Hak Kekayaan Industri kepada Pelaku Ekonomi Kreatif, serta Pemanfaatan Kekayaan Intelektual kepada Pelaku Ekonomi Kreatif	40 Produk	25 Produk	30.000.000,00	30.000.000,00	14.175.000,00	DINAS PEMUDA, OLAH RAGA DAN PARIWISATA
3	26	05			PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF	Persentase Pelaku Pariwisata dan Ekonomi Kreatif yang Aktif dan Tervalidasi Jumlah sub sektor ekonomi kreatif yang sudah dibina	14 14 BJT Sub sektor	100 14 Persentase Sub sektor	380.000.000,00	249.999.400,00	727.215.150,00	
3	26	05	2.01		Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Dasar	Jumlah Dokumen Laporan Hasil Fasilitasi Proses Kreasi, Produksi, Distribusi Konsumsi, dan Konservasi Ekonomi Kreatif Jumlah Sub Sektor Ekraf yang dibina	14 sub sektor	14 sub sektor 1 dokumen	330.000.000,00	199.999.450,00	199.999.450,00	DINAS PEMUDA, OLAH RAGA DAN PARIWISATA

3	26	05	2.01	0005	Fasilitasi Proses Kreasi, Produksi, Distribusi Konsumsi dan Konservasi Ekonomi Kreatif							
						Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Proses Kreasi, Produksi, Distribusi Konsumsi, dan Konservasi Ekonomi Kreatif	3 Laporan	2 Laporan	240.000.000,00	159.999.750,00	663.280.500,00	DINAS PEMUDA, OLAH RAGA DAN PARIWISATA
3	26	05	2.01	0006	Fasilitasi Pengembangan Kompetensi Sumber Daya Manusia Ekonomi Kreatif							
						Jumlah SDM Ekonomi Kreatif yang Mengikuti Fasilitasi Pengembangan Kompetensi Sumber Daya Manusia Ekonomi Kreatif	30 Orang	2 Orang	40.000.000,00	39.999.700,00	36.749.700,00	DINAS PEMUDA, OLAH RAGA DAN PARIWISATA
3	26	05	2.01	0010	Fasilitasi Sertifikasi Kompetensi bagi Tenaga Kerja Bidang Pariwisata							
						Jumlah Orang yang Mengikuti Fasilitasi Sertifikasi Kompetensi bagi Tenaga Kerja Bidang Pariwisata	60 Orang	60 Orang	50.000.000,00	0,00	0,00	DINAS PEMUDA, OLAH RAGA DAN PARIWISATA
3	26	05	2.02		Pengembangan Kapasitas Pelaku Ekonomi Kreatif	Jumlah pengembangan kapasitas pelaku ekonomi kreatif	4 kelompok	4 kelompok	50.000.000,00	49.999.950,00	49.999.950,00	DINAS PEMUDA, OLAH RAGA DAN PARIWISATA
3	26	05	2.02	0001	Pelatihan, Bimbingan Teknis, dan Pendampingan Ekonomi Kreatif							
						Jumlah Orang yang Mengikuti Pelatihan, Bimbingan Teknis, dan Pendampingan Ekonomi Kreatif	50 orang Orang	50 orang Orang	50.000.000,00	49.999.950,00	27.184.950,00	DINAS PEMUDA, OLAH RAGA DAN PARIWISATA
					DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN				4.954.748.652,00	5.923.890.660,00	5.215.021.218,00	
2					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR				4.954.748.652,00	5.923.890.660,00	5.215.021.218,00	
2	23				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERPUSTAKAAN				4.850.805.032,00	5.827.446.150,00	5.199.353.368,00	
2	23	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase pemenuhan urusan penunjang yang dipenuhi pada Dinas Perpustakaan Dan Kearsipan	100 %	100 %	4.349.940.982,00	4.396.873.900,00	4.061.613.493,00	
2	23	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan layanan administrasi keuangan perangkat daerah	95 %	95 %	3.228.673.662,00	3.299.338.919,00	3.299.338.919,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
2	23	01	2.02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN							
						Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	364 Orang/bulan	364 Orang/bulan	3.228.673.662,00	3.299.338.919,00	3.229.825.218,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
2	23	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan layanan administrasi umum perangkat daerah	90 %	90 %	144.153.330,00	138.476.831,00	138.476.831,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
2	23	01	2.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi							

						Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	48 Laporan	48 Laporan	48.011.790,00	27.795.350,00	27.895.325,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
2	23	01	2.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor							
						Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	12 Laporan	639.440.000,00	662.802.000,00	639.602.000,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
2	23	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase ketersediaan Barang Milik Daerah berkondisi baik	80 %	80 %	273.315.000,00	252.675.000,00	252.675.000,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
2	23	01	2.09	0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan							
						Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	1 Unit	1 Unit	53.140.000,00	53.140.000,00	31.646.000,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
2	23	01	2.09	0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan							
						Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	10 Unit	6 Unit	125.285.000,00	137.435.000,00	81.104.000,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
2	23	01	2.09	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya							
						Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	46 Unit	16 Unit	24.890.000,00	22.400.000,00	8.240.000,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
2	23	01	2.09	0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya							
						Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	3 Unit	0 Unit	70.000.000,00	39.700.000,00	0,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
2	23	02			PROGRAM PEMBINAAN PERPUSTAKAAN	Jumlah anggota pustaka	3325 Orang	3325 Orang	500.864.050,00	1.329.195.200,00	1.036.362.825,00	
2	23	02	2.01		Pengelolaan Perpustakaan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah kunjungan ke Perpustakaan	32000 Orang	32000 Orang	242.216.500,00	392.754.450,00	392.754.450,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
2	23	02	2.01	0004	Pembinaan Perpustakaan pada Satuan Pendidikan Dasar di Seluruh Wilayah Kabupaten/Kota Sesuai dengan Standar Nasional Perpustakaan							

						Jumlah Perpustakaan pada Satuan Pendidikan Dasar dan yang Dilakukan Pembinaan dalam Mewujudkan Standar Nasional Perpustakaan	5 Perpustakaan	5 Perpustakaan	48.495.000,00	0,00	0,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
2	23	02	2.01	0017	Penyusunan Data dan Informasi Perpustakaan							
						Jumlah Data dan informasi Perpustakaan	-	50 Dokumen	0,00	48.622.850,00	48.622.850,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
2	23	02	2.01	0018	Pengelolaan dan Pengembangan Bahan Perpustakaan							
						Jumlah Bahan Perpustakaan yang dikelola dan dikembangkan untuk Mewujudkan Keberagaman Koleksi Perpustakaan	700 Eksemplar	700 Eksemplar	193.721.500,00	175.679.700,00	28.165.900,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
2	23	02	2.01	0019	Pengembangan Kekhasan Koleksi Perpustakaan Daerah Tingkat Kabupaten/Kota							
						Jumlah Koleksi Perpustakaan Khas Daerah Tingkat Kabupaten/Kota yang Dikembangkan	-	145 Eksemplar	0,00	158.471.900,00	158.471.900,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
2	23	02	2.01	0020	Pengembangan dan Pemeliharaan Layanan Perpustakaan Elektronik							
						Jumlah Layanan Perpustakaan Elektronik yang Dikembangkan dengan Manajemen Layanan TIK	-	1 Perpustakaan	0,00	9.980.000,00	9.980.000,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
2	23	02	2.02		Pembudayaan Gemar Membaca Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase minat baca masyarakat	60 %	60 %	258.647.550,00	936.440.750,00	936.440.750,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
2	23	02	2.02	0007	Pengembangan Literasi Berbasis Inklusi Sosial							
						Jumlah layanan perpustakaan berbasis inklusi sosial di wilayah Kabupaten/Kota yang dikembangkan	6 Perpustakaan	6 Perpustakaan	58.649.750,00	101.892.700,00	43.097.425,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
2	23	02	2.02	0008	Pembangunan dan Pemeliharaan Sarana Perpustakaan di Tempat-Tempat Umum yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota							
						Jumlah sarana Perpustakaan yang Dibangun dan dipelihara di Tempat-Tempat Umum yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	-	1 Perpustakaan	0,00	39.750.000,00	39.750.000,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
2	23	02	2.02	0009	Pemberian Penghargaan Gerakan Budaya Gemar Membaca							
						Jumlah Orang yang Mendapatkan Penghargaan Gerakan Budaya Gemar Membaca Tingkat Kabupaten Kota	-	9 Orang	0,00	463.328.850,00	463.328.850,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
2	23	02	2.02	0010	Sosialisasi Budaya Baca dan Literasi pada Satuan Pendidikan Dasar dan Masyarakat							
						Jumlah Lokus Pembudayaan Kegemaran Membaca dan Literasi pada Satuan Pendidikan Dasar dan Masyarakat	68 Lokus	68 Lokus	199.997.800,00	331.469.200,00	244.945.900,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
2	23	03			PROGRAM PELESTARIAN KOLEKSI NASIONAL DAN NASKAH KUNO	Persentase peningkatan koleksi naskah kuno	-	33 %	0,00	101.377.050,00	101.377.050,00	

2	23	03	2.01		Pelestarian Naskah Kuno Milik Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Koleksi naskah kuno	-	3 Naskah	0,00	101.377.050,00	101.377.050,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
2	23	03	2.01	0003	Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Penyimpanan, Perawatan, Pelestarian, dan Pendaftaran Naskah Kuno							
						Jumlah masyarakat yang berperan dalam penyimpanan, perawatan, pelestarian dan pendaftaran naskah kuno	-	100 Orang	0,00	101.377.050,00	101.377.050,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
2	24				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEARSIPAN				103.943.620,00	96.444.510,00	15.667.850,00	
2	24	02			PROGRAM PENGELOLAAN ARSIP	Persentase OPD yang menerapkan arsip secara barku	60 %	60 %	50.009.000,00	50.033.450,00	15.667.850,00	
2	24	02	2.01		Pengelolaan Arsip Dinamis Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah OPD yang melaksanakan pengolahan arsip dinamis	20 OPD	20 OPD	25.000.000,00	24.999.850,00	24.999.850,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
2	24	02	2.01	0003	Pengawasan Arsip Dinamis Kewenangan Kabupaten/Kota							
						Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Arsip Dinamis Kewenangan Kabupaten/Kota	23 Laporan	23 Laporan	25.009.000,00	24.999.850,00	15.667.850,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
2	24	02	2.03		Pengelolaan Simpul Jaringan Informasi Kearsipan Nasional Tingkat Kabupaten/Kota	Persentase jumlah arsip statis yang telah tersedia di JIKN	60 %	0 %	25.009.000,00	25.033.600,00	25.033.600,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
2	24	02	2.03	0001	Penyediaan Informasi, Akses dan Layanan Kearsipan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Melalui JIKN							
						Jumlah Layanan Penyediaan Informasi, Akses dan Layanan Kearsipan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Melalui JIKN	400 Pengguna	0 Pengguna	25.009.000,00	25.033.600,00	0,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
2	24	03			PROGRAM PERLINDUNGAN DAN PENYELAMATAN ARSIP	Jumlah arsip statis yang terselamatkan/jumlah arsip yang tersimpan pada LKD	5000 Dokumen	0 Dokumen	53.934.620,00	46.411.060,00	0,00	
2	24	03	2.02		Perlindungan dan Penyelamatan Arsip Akibat Bencana yang Berskala Kabupaten/Kota	Persentase jumlah arsip yang diperbaiki	60 %	0 %	21.943.120,00	14.421.260,00	14.421.260,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
2	24	03	2.02	0002	Pemulihan dan Penyimpanan Arsip Akibat Bencana							
						Jumlah Arsip yang Dilakukan Pemulihan dan Penyimpanan Akibat Bencana	15 Arsip	0 Arsip	21.943.120,00	14.421.260,00	0,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
2	24	03	2.04		Autentikasi Arsip Statis dan Arsip Hasil Alih Media Kabupaten/Kota	Persentase autentifikasi arsip statis dan arsip alihmedia kota	75 %	0 %	31.991.500,00	31.989.800,00	31.989.800,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN

2	24	03	2.04	0001	Penilaian dan Penetapan Autentisitas Arsip Statis Sesuai Persyaratan Penjaminan Keabsahan Arsip							
						Jumlah Daftar Autentisitas Arsip Sesuai Persyaratan Penjaminan Keabsahan Arsip yang Dinilai dan Ditetapkan	1000 Arsip	0 Arsip	31.991.500,00	31.989.800,00	0,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
					SEKRETARIAT DAERAH				43.683.042.032,00	46.673.221.196,00	47.404.348.358,00	
4					UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN				43.683.042.032,00	46.673.221.196,00	47.404.348.358,00	
4	01				SEKRETARIAT DAERAH				43.683.042.032,00	46.673.221.196,00	47.404.348.358,00	
4	01	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase pemenuhan urusan penunjang yang dipenuhi pada Sekretariat Daerah	100 %	100 %	30.716.685.532,00	32.563.005.796,00	33.875.791.528,00	
4	01	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Pemenuhan Layanan Adminstrasi Keuangan Perangkat Daerah	90 %	90 %	15.096.445.532,00	14.540.209.670,00	14.540.209.670,00	SEKRETARIAT DAERAH
4	01	01	2.02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN							
						Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	1540 Orang/bulan	1540 Orang/bulan	15.096.445.532,00	14.540.209.670,00	14.416.670.049,00	SEKRETARIAT DAERAH
4	01	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Pemenuhan Layanan Administrasi Umum Perangkat Daerah	90 %	90 %	3.395.000.000,00	4.341.583.283,00	4.341.583.283,00	SEKRETARIAT DAERAH
4	01	01	2.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi							
						Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	4 Paket	4 Paket	50.000.000,00	50.000.000,00	65.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
4	01	01	2.06	0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga							
						Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	3 Paket	3 Paket	30.000.000,00	30.000.000,00	30.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
4	01	01	2.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor							
						Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	4 Paket	4 Paket	145.000.000,00	144.978.283,00	164.978.283,00	SEKRETARIAT DAERAH

4	01	01	2.06	0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan							
						Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	1 Paket	20.000.000,00	20.000.000,00	20.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
4	01	01	2.06	0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu							
						Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	500 Laporan	500 Laporan	950.000.000,00	950.000.000,00	1.100.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
4	01	01	2.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD							
						Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	200 Laporan	200 Laporan	2.200.000.000,00	3.146.605.000,00	2.736.354.500,00	SEKRETARIAT DAERAH
4	01	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Pemenuhan Barang Milik Daerah	80 %	80 %	3.050.000.000,00	3.298.564.500,00	3.298.564.500,00	SEKRETARIAT DAERAH
4	01	01	2.07	0001	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan							
						Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan	2 Unit	2 Unit	2.300.000.000,00	2.800.000.000,00	3.667.010.443,00	SEKRETARIAT DAERAH
4	01	01	2.07	0002	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan							
						Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	1 Unit	0 Unit	450.000.000,00	3.160.100,00	3.160.100,00	SEKRETARIAT DAERAH
4	01	01	2.07	0005	Pengadaan Mebel							
						Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	20 Unit	20 Unit	200.000.000,00	395.404.400,00	395.404.400,00	SEKRETARIAT DAERAH
4	01	01	2.07	0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya							

[illegible]

[illegible]

						Jumlah Laporan Hasil Fasilitas Komunikasi Pimpinan	1 Laporan	1 Laporan	70.000.000,00	70.000.000,00	75.694.200,00	SEKRETARIAT DAERAH
4	01	01	2.14	0003	Pendokumentasian Tugas Pimpinan							
						Jumlah Laporan Pendokumentasian Tugas Pimpinan	6 Laporan	6 Laporan	165.400.000,00	188.839.600,00	263.005.800,00	SEKRETARIAT DAERAH
4	01	02			PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT	Persentase terselenggaranya kebijakan / kegiatan sektor pemerintahan dan kesejahteraan rakyat	100 %	100 %	12.581.356.500,00	13.493.021.400,00	13.101.015.030,00	
4	01	02	2.01		Administrasi Tata Pemerintahan	Jumlah orang yang mendapatkan gelar kehormatan/penghargaan daerah Persentase terlaksananya fasilitas kegiatan Administrasi Tata Pemerintahan	100 % 10 Orang	100 % 10 Orang	250.000.000,00	350.006.100,00	350.006.100,00	SEKRETARIAT DAERAH
4	01	02	2.01	0001	Penataan Administrasi Pemerintahan							
						Jumlah Dokumen Hasil Penataan Administrasi Pemerintahan	10 Dokumen	10 Dokumen	75.000.000,00	75.006.100,00	39.351.350,00	SEKRETARIAT DAERAH
4	01	02	2.01	0002	Pengelolaan Administrasi Kewilayahan							
						Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Administrasi Kewilayahan	1 Dokumen	1 Dokumen	25.000.000,00	25.000.000,00	72.401.120,00	SEKRETARIAT DAERAH
4	01	02	2.01	0003	Fasilitasi Pelaksanaan Otonomi Daerah							
						Jumlah Dokumen Hasil Fasilitas Pelaksanaan Otonomi Daerah	3 Dokumen	3 Dokumen	150.000.000,00	250.000.000,00	349.398.650,00	SEKRETARIAT DAERAH
4	01	02	2.02		Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat	Persentase Terlaksananya Kebijakan Kesejahteraan Rakyat	100 %	100 %	11.936.356.500,00	12.775.665.300,00	12.775.665.300,00	SEKRETARIAT DAERAH
4	01	02	2.02	0001	Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual							

						Jumlah Dokumen Hasil Fasilitas Pengelolaan Bina Mental Spiritual	9 Dokumen	9 Dokumen	3.500.000.000,00	3.638.056.800,00	3.561.144.800,00	SEKRETARIAT DAERAH
4	01	02	2.02	0002	Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Sosial							
						Jumlah Dokumen Hasil Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Sosial yang Meliputi Urusan Sosial, Transmigrasi, Kesehatan, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Administrasi Kependudukan Dan Pencatatan Sipil, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pengendalian Penduduk dan KB	5 Dokumen	5 Dokumen	1.344.000.000,00	1.685.252.000,00	1.660.198.690,00	SEKRETARIAT DAERAH
4	01	02	2.02	0003	Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Masyarakat							
						Jumlah Dokumen Hasil Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Masyarakat yang Meliputi Urusan Kepemudaan dan Olahraga, Pariwisata, Pendidikan, Kebudayaan, Perpustakaan, Kearsipan, Trantibum Linmas	7 Dokumen	7 Dokumen	7.092.356.500,00	7.452.356.500,00	7.032.531.400,00	SEKRETARIAT DAERAH
4	01	02	2.03		Fasilitasi dan Koordinasi Hukum	Persentase Fasilitasi dan Koordinasi Hukum Yang Terlaksana	100 %	100 %	395.000.000,00	367.350.000,00	367.350.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
4	01	02	2.03	0001	Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Daerah							
						Jumlah Produk Hukum Daerah yang Disusun	35 Dokumen	35 Dokumen	70.000.000,00	65.100.000,00	31.194.720,00	SEKRETARIAT DAERAH
4	01	02	2.03	0002	Fasilitasi Bantuan Hukum							
						Jumlah Kasus yang Mendapatkan Fasilitasi Bantuan Hukum	10 Kasus	3 Kasus	300.000.000,00	279.000.000,00	343.606.800,00	SEKRETARIAT DAERAH
4	01	02	2.03	0003	Pendokumentasian Produk Hukum dan							
						Jumlah Produk Hukum dan Pengelolaan Informasi Hukum yang Didokumentasi	2 Dokumen	2 Dokumen	25.000.000,00	23.250.000,00	11.187.500,00	SEKRETARIAT DAERAH

4	01	03			PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN	Persentase terselenggaranya kebijakan /kegiatan pada bagian perekonomian dan pembangunan	75 %	75 %	385.000.000,00	617.194.000,00	427.541.800,00	
4	01	03	2.01		Pelaksanaan Kebijakan Perekonomian	Persentase Terlaksananya Monev BUMD, BLUD, Monev Pengendalian Inflasi Dan Monev Kebijakan Perekonomian Persentase terselenggaranya kebijakan/kegiatan pada bagian perekonomian dan pembangunan	75 % 90 %	75 % 90 %	55.000.000,00	119.939.000,00	119.939.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
4	01	03	2.01	0001	Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan BUMD dan BLUD							
						Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan BUMD dan BLUD	1 Dokumen	1 Dokumen	30.000.000,00	30.000.000,00	20.946.600,00	SEKRETARIAT DAERAH
4	01	03	2.01	0002	Pengendalian dan Distribusi Perekonomian							
						Jumlah Laporan Hasil Pengendalian dan Distribusi Perekonomian	1 Laporan	1 Laporan	25.000.000,00	89.939.000,00	46.243.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
4	01	03	2.02		Pelaksanaan Administrasi Pembangunan	Persentase pelayanan administrasi pembangunan yang dilaksanakan Persentase Rekomendasi Hasil Pelaksanaan Evaluasi Kegiatan Pembangunan Yang Dikeluarkan	100 % 95 %	100 % 95 %	50.000.000,00	200.400.000,00	200.400.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
4	01	03	2.02	0002	Pengendalian dan Evaluasi Program Pembangunan							
						Jumlah Laporan Hasil Pengendalian dan Evaluasi Program Pembangunan	12 Laporan	12 Laporan	50.000.000,00	200.400.000,00	173.688.860,00	SEKRETARIAT DAERAH
4	01	03	2.03		Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	Persentase pencapaian kegiatan pembangunan Persentase Proses Pelaksanaan Pengadaan Barang dan Jasa	90 %	90 %	260.000.000,00	241.800.000,00	241.800.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
4	01	03	2.03	0001	Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa							
						Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	250 Dokumen	250 Dokumen	10.000.000,00	10.000.000,00	4.313.240,00	SEKRETARIAT DAERAH
4	01	03	2.03	0002	Pengelolaan Layanan Pengadaan Secara Elektronik							
						Jumlah Dokumen Hasil Layanan Pengadaan Secara Elektronik	90 Dokumen	90 Dokumen	100.000.000,00	100.000.000,00	72.134.000,00	SEKRETARIAT DAERAH

4		01	03	2.03	0003	Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa	300 Orang	300 Orang	150.000.000,00	131.800.000,00	83.016.700,00	SEKRETARIAT DAERAH
4		01	03	2.04		Pemantauan Kebijakan Sumber Daya Alam	Persentase Pemantauan Kebijakan Sumber Daya Alam Yang Dilaksanakan Presentase pemenuhan urusan dipenuhi	100 % 90 %	100 % 90 %	20.000.000,00	55.055.000,00	55.055.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
4		01	03	2.04	0003	Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Energi dan Air	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Evaluasi Kebijakan Urusan Energi dan Air, Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman, Pertanahan	1 Dokumen	1 Dokumen	20.000.000,00	55.055.000,00	27.199.400,00	SEKRETARIAT DAERAH
						SEKRETARIAT DPRD				36.691.695.090,00	41.560.530.985,00	31.699.437.865,00	
4						UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN				36.691.695.090,00	41.560.530.985,00	31.699.437.865,00	
4		02				SEKRETARIAT DPRD				36.691.695.090,00	41.560.530.985,00	31.699.437.865,00	
4		02	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase kualitas tata kelola Sekretariat DPRD	100 %	100 %	16.717.246.690,00	18.928.695.185,00	17.453.422.960,00	
4		02	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan layanan administrasi keuangan perangkat daerah	100 %	100 %	3.020.944.340,00	3.403.264.629,00	3.403.264.629,00	SEKRETARIAT DPRD
4		02	01	2.02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	350 Orang/bulan	350 Orang/bulan	3.020.944.340,00	3.403.264.629,00	3.243.640.083,00	SEKRETARIAT DPRD
4		02	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan layanan administrasi umum perangkat daerah	100 %	100 %	661.528.350,00	766.528.350,00	766.528.350,00	SEKRETARIAT DPRD
4		02	01	2.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	4 Paket	4 Paket	37.823.500,00	37.823.500,00	20.679.100,00	SEKRETARIAT DPRD
4		02	01	2.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	4 Paket	4 Paket	135.374.600,00	135.374.600,00	169.396.124,00	SEKRETARIAT DPRD
4		02	01	2.06	0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggunaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggunaan yang Disediakan	4 Paket	4 Paket	40.957.250,00	145.957.250,00	18.460.750,00	SEKRETARIAT DPRD
4		02	01	2.06	0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	180 Laporan	180 Laporan	132.550.000,00	132.550.000,00	65.650.000,00	SEKRETARIAT DPRD
4		02	01	2.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD							

[illegible]

						Jumlah Dokumen Hasil Penyusunan Penjelasan atau Keterangan dan/atau Naskah Akademik yang Difasilitasi	1 Dokumen	1 Dokumen	59.964.000,00	59.964.000,00	59.964.000,00	SEKRETARIAT DPRD
4	02	02	2.01	0005	Penyusunan Tata Tertib DPRD							
						Jumlah Dokumen Tata Tertib DPRD yang Disusun	1 Dokumen	1 Dokumen	11.098.500,00	11.098.500,00	11.098.500,00	SEKRETARIAT DPRD
4	02	02	2.02		Pembahasan Kebijakan Anggaran	Persentase pembahasan kebijakan anggaran	90 %	90 %	171.218.000,00	171.218.000,00	171.218.000,00	SEKRETARIAT DPRD
4	02	02	2.02	0001	Pembahasan KUA dan PPAS							
						Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan KUA dan PPAS	2 Dokumen	2 Dokumen	35.941.000,00	35.941.000,00	18.642.500,00	SEKRETARIAT DPRD
4	02	02	2.02	0002	Pembahasan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS							
						Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS	2 Dokumen	2 Dokumen	25.936.000,00	25.936.000,00	18.047.500,00	SEKRETARIAT DPRD
4	02	02	2.02	0003	Pembahasan APBD							
						Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan APBD	2 Dokumen	2 Dokumen	51.911.000,00	51.911.000,00	26.529.400,00	SEKRETARIAT DPRD
4	02	02	2.02	0004	Pembahasan APBD Perubahan							
						Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan APBD Perubahan	2 Dokumen	2 Dokumen	35.853.000,00	35.853.000,00	19.329.350,00	SEKRETARIAT DPRD
4	02	02	2.02	0006	Pembahasan Pertanggungjawaban APBD							
						Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan Pertanggungjawaban APBD	2 Dokumen	2 Dokumen	21.577.000,00	21.577.000,00	13.337.600,00	SEKRETARIAT DPRD
4	02	02	2.03		Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan	Persentase terfasilitasinya pengawasan penyelenggaraan pemerintahan	90 %	90 %	22.806.000,00	22.806.000,00	22.806.000,00	SEKRETARIAT DPRD
4	02	02	2.03	0008	Pembahasan Laporan Keterangan							
						Jumlah Rekomendasi Hasil Pembahasan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah	2 Dokumen	2 Dokumen	22.806.000,00	22.806.000,00	14.579.700,00	SEKRETARIAT DPRD
4	02	02	2.04		Peningkatan Kapasitas DPRD	Persentase peningkatan kapasitas pimpinan dan anggota DPRD	90 %	90 %	4.222.786.000,00	4.222.786.000,00	4.222.786.000,00	SEKRETARIAT DPRD
4	02	02	2.04	0002	Pendalaman Tugas DPRD							
						Jumlah Dokumen Hasil Pendalaman Tugas DPRD	5 Dokumen	5 Dokumen	3.221.139.000,00	3.221.139.000,00	2.023.237.000,00	SEKRETARIAT DPRD
4	02	02	2.04	0005	Penyediaan Tenaga Ahli Fraksi							
						Jumlah Tenaga Ahli Fraksi	6 Orang	6 Orang	216.000.000,00	216.000.000,00	216.000.000,00	SEKRETARIAT DPRD
4	02	02	2.04	0006	Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat							
						Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat	1 Dokumen	1 Dokumen	332.621.500,00	332.621.500,00	238.590.200,00	SEKRETARIAT DPRD
4	02	02	2.04	0008	Publikasi dan Dokumentasi DPRD							
						Jumlah Dokumen Publikasi dan Dokumentasi DPRD	1 Dokumen	1 Dokumen	453.025.500,00	453.025.500,00	395.386.400,00	SEKRETARIAT DPRD

4	02	02	2.05		Penyerapan dan Penghimpunan Aspirasi Masyarakat	Persentase aspirasi masyarakat yang terhimpun	90 %	90 %	2.454.784.000,00	1.686.753.400,00	1.686.753.400,00	SEKRETARIAT DPRD
4	02	02	2.05	0001	Kunjungan Kerja dalam Daerah							
						Jumlah Laporan Hasil Kunjungan Kerja DPRD	5 Laporan	5 Laporan	1.706.160.600,00	938.130.000,00	986.230.000,00	SEKRETARIAT DPRD
4	02	02	2.05	0003	Pelaksanaan Reses							
						Jumah Dokumen Hasil Pelaksanaan Reses	60 Dokumen	60 Dokumen	748.623.400,00	748.623.400,00	748.623.400,00	SEKRETARIAT DPRD
4	02	02	2.08		Fasilitasi Tugas DPRD	Persentase terfasilitasinya tugas pimpinan dan anggota DPRD	90 %	90 %	13.015.964.000,00	16.441.382.000,00	16.441.382.000,00	SEKRETARIAT DPRD
4	02	02	2.08	0001	Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Tugas DPRD							
						Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Tugas DPRD	21 Dokumen	21 Dokumen	10.061.105.000,00	12.868.568.000,00	6.830.667.000,00	SEKRETARIAT DPRD
4	02	02	2.08	0004	Fasilitasi Tugas Pimpinan DPRD							
						Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Tugas Pimpinan DPRD	17 Dokumen	17 Dokumen	2.954.859.000,00	3.572.814.000,00	2.609.924.455,00	SEKRETARIAT DPRD
					BADAN PERENCANAAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH				6.643.996.059,00	6.788.688.665,00	5.351.515.549,00	
5					UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN				6.643.996.059,00	6.788.688.665,00	5.351.515.549,00	
5	01				PERENCANAAN				6.518.996.059,00	6.471.188.665,00	5.247.917.999,00	
5	01	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase pemenuhan urusan penunjang pada Badan Perencanaan, Penelitian Dan Pengembangan Daerah	100 %	100 %	5.723.607.869,00	5.759.261.165,00	4.916.245.499,00	
5	01	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan layanan administrasi keuangan perangkat daerah	100 %	100 %	4.320.901.309,00	4.442.640.605,00	4.442.640.605,00	BADAN PERENCANAAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
5	01	01	2.02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN							
						Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	462 Orang/bulan	462 Orang/bulan	4.320.901.309,00	4.442.640.605,00	4.155.960.264,00	BADAN PERENCANAAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
5	01	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan layanan administrasi umum perangkat daerah	100 %	100 %	419.588.560,00	430.792.560,00	430.792.560,00	BADAN PERENCANAAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
5	01	01	2.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi							
						Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	4 Paket	4 Paket	4.100.000,00	4.100.000,00	3.091.800,00	BADAN PERENCANAAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
5	01	01	2.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor							

[illegible]

[illegible]

						Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Kewilayahan	2 Laporan	2 Laporan	50.000.000,00	50.000.000,00	11.350.000,00	BADAN PERENCANAAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH	
5	05					PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN			125.000.000,00	317.500.000,00	103.597.550,00		
5	05	02				PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH	Persentase inovasi daerah yang memiliki nilai kematangan di atas 90 Jumlah dokumen kelitbangan yang dihasilkan	74 8 % Dokumen	74 8 % Dokumen	125.000.000,00	317.500.000,00	103.597.550,00	
5	05	02	2.01			Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan	Jumlah dokumen kelitbangan daerah bidang penyelenggaraan pemerintahan dan pengkajian peraturan yang disusun	1 dokumen	1 dokumen	15.000.000,00	0,00	0,00	BADAN PERENCANAAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
5	05	02	2.01	0002	Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Pemerintahan Umum								
							Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Pemerintahan Umum	1 Laporan	1 Laporan	15.000.000,00	0,00	0,00	BADAN PERENCANAAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
5	05	02	2.02			Penelitian dan Pengembangan Bidang Sosial dan Kependudukan	Jumlah dokumen kelitbangan daerah bidang sosial dan kependudukan yang disusun	1 dokumen	1 dokumen	22.500.000,00	22.500.000,00	22.500.000,00	BADAN PERENCANAAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
5	05	02	2.02	0003	Penelitian dan Pengembangan Pendidikan dan Kebudayaan								
							Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Pendidikan dan Kebudayaan	1 Dokumen	1 Dokumen	22.500.000,00	22.500.000,00	0,00	BADAN PERENCANAAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
5	05	02	2.03			Penelitian dan Pengembangan Bidang Ekonomi dan Pembangunan	Jumlah dokumen kelitbangan daerah bidang ekonomi dan pembangunan yang disusun	1 dokumen	1 dokumen	22.500.000,00	215.000.000,00	215.000.000,00	BADAN PERENCANAAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
5	05	02	2.03	0002	Penelitian dan Pengembangan Perindustrian dan Perdagangan								
							Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Perindustrian dan Perdagangan	1 Dokumen	1 Dokumen	22.500.000,00	215.000.000,00	10.888.590,00	BADAN PERENCANAAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH

[illegible]

						Jumlah Dokumen KUA dan PPAS yang Disusun	2 Dokumen	2 Dokumen	118.339.400,00	118.290.400,00	115.739.400,00	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAERAH
5	02	02	2.01	0002	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS							
						Jumlah Dokumen Perubahan KUA dan Perubahan PPAS yang Disusun	2 Dokumen	2 Dokumen	119.912.400,00	119.863.400,00	116.192.400,00	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAERAH
5	02	02	2.01	0007	Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD							
						Jumlah Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD	6 Dokumen	6 Dokumen	349.176.000,00	349.154.500,00	333.618.400,00	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAERAH
5	02	02	2.01	0008	Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD							
						Jumlah Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD	4 Dokumen	4 Dokumen	129.056.000,00	129.015.200,00	118.734.400,00	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAERAH
5	02	02	2.02		Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah	Realisasi pencairan anggaran tepat waktu sesuai RAK	84 %	84 %	61.948.000,00	61.830.000,00	61.830.000,00	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAERAH
5	02	02	2.02	0009	Rekonsiliasi Data Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Pemungutan dan Potongan atas SP2D dengan Instansi Terkait							
						Jumlah Dokumen Hasil Rekonsiliasi Data Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Pemungutan dan Potongan atas SP2D dengan Instansi Terkait	9 Dokumen	6 Dokumen	61.948.000,00	61.830.000,00	11.872.000,00	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAERAH
5	02	02	2.03		Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah	Penyusunan Laporan Keuangan Daerah yang tepat waktu sesuai dengan SAP	Tepat Waktu	Tepat Waktu	113.457.300,00	113.454.800,00	113.454.800,00	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAERAH
5	02	02	2.03	0001	Koordinasi Pelaksanaan Akuntansi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah							

						Jumlah Standar Harga yang Disusun	2 Dokumen	2 Dokumen	114.626.000,00	27.803.000,00	6.531.800,00	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAERAH
5	02	03	2.01	0003	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah							
						Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah	2 Dokumen	2 Dokumen	16.635.000,00	16.635.000,00	6.578.000,00	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAERAH
5	02	03	2.01	0005	Penatausahaan Barang Milik Daerah							
						Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah	2 Laporan	2 Laporan	151.849.000,00	112.107.000,00	41.504.200,00	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAERAH
5	02	03	2.01	0007	Pengamanan Barang Milik Daerah							
						Jumlah Laporan Hasil Pengamanan Barang Milik Daerah	3 Laporan	1 Laporan	290.930.000,00	93.670.000,00	43.100.000,00	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAERAH
5	02	03	2.01	0010	Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah							
						Jumlah Dokumen Hasil Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah	4 Dokumen	4 Dokumen	218.850.000,00	203.843.000,00	213.571.200,00	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAERAH
5	02	03	2.01	0011	Rekonsiliasi dalam rangka Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah							
						Jumlah Laporan Hasil Rekonsiliasi dalam rangka Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah	2 Laporan	2 Laporan	17.280.000,00	17.279.800,00	6.495.900,00	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAERAH
5	02	04			PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH	Persentase Penerapan Sistem Informasi Keuangan Berbasis Digital Cakupan pembinaan dan pengawasan pengelolaan pendapatan Persentase PAD terhadap Pendapatan Daerah Persentase Peningkatan Pajak daerah dan Retribusi daerah	2 %	100 14 16,28 2 % OPD % %	556.841.250,00	600.578.100,00	778.714.899,00	

[illegible]

[illegible]

						Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	10 Unit	10 Unit	27.749.800,00	27.749.800,00	27.000.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
5	03	01	2.07	0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya							
						Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	5 Unit	5 Unit	103.888.000,00	103.888.000,00	111.813.600,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
5	03	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang terpenuhi	90 %	90 %	408.544.935,00	408.544.935,00	408.544.935,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
5	03	01	2.08	0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat							
						Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 Laporan	12 Laporan	5.250.000,00	5.250.000,00	2.615.800,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
5	03	01	2.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik							
						Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	24 Laporan	24 Laporan	89.998.935,00	89.998.935,00	89.998.935,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
5	03	01	2.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor							
						Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	12 Laporan	313.296.000,00	313.296.000,00	160.961.600,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
5	03	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase ketersediaan Barang Milik Daerah berkondisi baik	90 %	90 %	399.755.000,00	399.755.000,00	399.755.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
5	03	01	2.09	0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan							
						Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	17 Unit	17 Unit	109.765.000,00	109.765.000,00	109.485.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
5	03	01	2.09	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya							

						Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	26 Unit	26 Unit	39.990.000,00	39.990.000,00	39.990.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
5	03	01	2.09	0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya							
						Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	1 Unit	0,00	250.000.000,00	116.844.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
5					NON URUSAN				10.252.703.653,00	9.835.957.664,00	8.336.750.200,00	
5	03				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX				8.732.703.703,00	8.315.957.714,00	7.363.836.200,00	
5	03	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase pemenuhan urusan penunjang pada perangkat daerah	100 %	100 %	7.974.145.053,00	7.557.399.064,00	6.760.603.600,00	
5	03	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase ketersediaan Barang Milik Daerah berkondisi baik	90 %	90 %	399.755.000,00	399.755.000,00	399.755.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
5	03	01	2.09	0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya							
5					UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN				10.252.703.653,00	9.835.957.664,00	8.336.750.200,00	
5	03				KEPEGAWAIAN				8.732.703.703,00	8.315.957.714,00	7.363.836.200,00	
5	03	02			PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH	Nilai Sistem Merit	335 Nilai	335 Nilai	758.558.650,00	758.558.650,00	603.232.600,00	
5	03	02	2.01		Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian ASN	Jumlah dokumen kepegawaian yang tertata dengan baik Jumlah usulan ASN Per tahun	200 Orang 400 File	200 Orang 400 File	324.991.550,00	324.991.550,00	324.991.550,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
5	03	02	2.01	0003	Koordinasi dan Fasilitasi Pengadaan PNS dan PPPK							
						Jumlah Dokumen Kegiatan Koordinasi dan Fasilitasi Pengadaan PNS dan PPPK	1 Dokumen	1 Dokumen	299.995.700,00	299.995.700,00	244.747.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
5	03	02	2.01	0010	Pengelolaan Sistem Informasi Kepegawaian							
						Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Sistem Informasi Kepegawaian	1 Dokumen	1 Dokumen	24.995.850,00	24.995.850,00	9.291.100,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA

5	03	02	2.02		Mutasi dan Promosi ASN	Persentase pengisian jabatan sesuai peraturan perundang undangan	100 %	100 %	363.568.600,00	363.568.600,00	363.568.600,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
5	03	02	2.02	0001	Pengelolaan Mutasi ASN							
						Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Mutasi Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Administrasi, Jabatan Pelaksana dan Mutasi ASN antar Daerah	1 Dokumen	1 Dokumen	299.990.000,00	299.990.000,00	265.881.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
5	03	02	2.02	0002	Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN							
						Jumlah Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN	1 Dokumen	1 Dokumen	63.578.600,00	63.578.600,00	51.782.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
5	03	02	2.04		Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	Persentase jumlah ASN yang berkinerja baik	100 %	100 %	69.998.500,00	69.998.500,00	69.998.500,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
5	03	02	2.04	0002	Pelaksanaan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur							
						Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	1 Dokumen	1 Dokumen	9.999.500,00	9.999.500,00	4.200.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
5	03	02	2.04	0004	Pengelolaan Pemberian Penghargaan bagi Pegawai							
						Jumlah ASN yang Diberikan Penghargaan	5 Orang	5 Orang	16.040.000,00	16.040.000,00	6.220.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
5	03	02	2.04	0007	Pembinaan Disiplin ASN							
						Jumlah ASN yang Mendapatkan Pembinaan Kedisiplinan	10 Orang	10 Orang	43.959.000,00	43.959.000,00	21.111.500,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
5	04				PENDIDIKAN DAN PELATIHAN				1.519.999.950,00	1.519.999.950,00	972.914.000,00	
5	04	02			PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	Persentase ASN yang memperoleh peningkatan kompetensi melalui diklat, bimtek, dan sosialisasi	7,60 %	7,60 %	1.519.999.950,00	1.519.999.950,00	972.914.000,00	

[illegible]

						Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah	6 Laporan	6 Laporan	37.200.000,00	65.100.000,00	29.925.000,00	INSPEKTORAT DAERAH
6	01	02	2.01	0002	Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah							
						Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah	120 Laporan	125 Laporan	405.600.000,00	406.800.000,00	336.430.000,00	INSPEKTORAT DAERAH
6	01	02	2.01	0003	Reviu Laporan Kinerja							
						Jumlah Laporan Hasil Reviu Laporan Kinerja	2 Laporan Laporan	2 Laporan Laporan	22.200.000,00	22.200.000,00	18.225.000,00	INSPEKTORAT DAERAH
6	01	02	2.01	0004	Reviu Laporan Keuangan							
						Jumlah Laporan Hasil Reviu Laporan Keuangan	1 Laporan	1 Laporan	16.650.000,00	16.650.000,00	14.960.000,00	INSPEKTORAT DAERAH
6	01	02	2.01	0007	Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP							
						Jumlah Dokumen Hasil Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP	4 Dokumen	5 Dokumen	75.172.000,00	75.172.000,00	33.586.000,00	INSPEKTORAT DAERAH
6	01	02	2.02		Penyelenggaraan Pengawasan dengan Tujuan Tertentu	Persentase Pengawasan dengan Tujuan Tertentu yang tuntas dilaksanakan	100 %	100 %	86.250.000,00	86.250.000,00	86.250.000,00	INSPEKTORAT DAERAH
6	01	02	2.02	0001	Penanganan Penyelesaian Kerugian							
						Jumlah Laporan Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah yang Ditangani	1 Laporan	1 Laporan	22.050.000,00	22.050.000,00	0,00	INSPEKTORAT DAERAH
6	01	02	2.02	0002	Pengawasan dengan Tujuan Tertentu							
						Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu	6 Laporan	6 Laporan	64.200.000,00	64.200.000,00	47.770.000,00	INSPEKTORAT DAERAH
6	01	03			PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI	Persentase Capaian Aksi pada Aplikasi MCP	92 %	92 %	372.298.200,00	372.298.200,00	82.764.400,00	

6	01	03	2.02		Pendampingan dan Asistensi	Persentase Pendampingan dan Asistensi yang tuntas dilakukan	88 %	88 %	372.298.200,00	372.298.200,00	372.298.200,00	INSPEKTORAT DAERAH
6	01	03	2.02	0001	Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintahan Daerah							
						Jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintahan Daerah	23 perangkat daerah	23 perangkat daerah	106.725.000,00	106.725.000,00	30.970.000,00	INSPEKTORAT DAERAH
6	01	03	2.02	0002	Pendampingan, Asistensi, Verifikasi, dan Penilaian Reformasi Birokrasi							
						Jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan Pendampingan, Asistensi, Verifikasi, dan Penilaian Reformasi Birokrasi	23 perangkat daerah	23 perangkat daerah	19.000.000,00	19.000.000,00	10.440.000,00	INSPEKTORAT DAERAH
6	01	03	2.02	0003	Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi							
						Jumlah Kegiatan Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi	2 Kegiatan	2 Kegiatan	122.148.800,00	122.148.800,00	19.004.400,00	INSPEKTORAT DAERAH
6	01	03	2.02	0004	Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi Penegakan Integritas							
						Jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi Penegakan Integritas	23 perangkat daerah	23 perangkat daerah	124.424.400,00	124.424.400,00	22.350.000,00	INSPEKTORAT DAERAH
					KECAMATAN PADANG PANJANG TIMUR				19.733.398.713,00	18.983.722.109,00	16.597.389.129,00	
7					UNSUR KEWILAYAHAN				19.733.398.713,00	18.983.722.109,00	16.597.389.129,00	
7	01				KECAMATAN				19.733.398.713,00	18.983.722.109,00	16.597.389.129,00	
7	01	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Pemenuhan Urusan Penunjang Yang Dipenuhi pada Kecamatan Padang Panjang Timur	95 %	95 %	13.488.740.213,00	13.027.236.169,00	11.311.377.679,00	
7	01	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Pemenuhan Layanan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	95 %	95 %	9.405.394.813,00	9.018.801.269,00	9.018.801.269,00	KECAMATAN PADANG PANJANG TIMUR
7	01	01	2.02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN							
						Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	1078 Orang/bulan	910 Orang/bulan	9.405.394.813,00	9.018.801.269,00	8.263.495.984,00	KECAMATAN PADANG PANJANG TIMUR

[illegible]

						Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 Laporan	1 Laporan	3.120.000,00	3.120.000,00	500.000,00	KECAMATAN PADANG PANJANG TIMUR
7	01	01	2.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik							
						Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	40 Laporan	12 Laporan	105.441.500,00	105.441.500,00	74.896.800,00	KECAMATAN PADANG PANJANG TIMUR
7	01	01	2.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor							
						Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	12 Laporan	2.483.903.200,00	2.552.993.600,00	2.200.492.480,00	KECAMATAN PADANG PANJANG TIMUR
7	01	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Ketersediaan Barang Milik Daerah Berkondisi Baik	80 %	80 %	971.595.000,00	823.836.500,00	823.836.500,00	KECAMATAN PADANG PANJANG TIMUR
7	01	01	2.09	0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan							
						Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	55 Unit	46 Unit	217.595.000,00	252.865.000,00	210.001.000,00	KECAMATAN PADANG PANJANG TIMUR
7	01	01	2.09	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya							
						Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	100 Unit	50 Unit	94.000.000,00	49.500.000,00	27.380.000,00	KECAMATAN PADANG PANJANG TIMUR
7	01	01	2.09	0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya							
						Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	10 Unit	9 Unit	660.000.000,00	521.471.500,00	311.476.000,00	KECAMATAN PADANG PANJANG TIMUR
7	01	02			PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Persentase Tingkat Layanan pada Kecamatan Padang Panjang Timur	100 %	100 %	1.211.440.000,00	1.168.995.400,00	998.134.400,00	

7	01	02	2.01		Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah Koordinasi yang dilaksanakan di tingkat kecamatan	4 kali	4 kali	30.000.000,00	30.000.000,00	30.000.000,00	KECAMATAN PADANG PANJANG TIMUR
7	01	02	2.01	0002	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan							
						Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	1 Dokumen	0 Dokumen	30.000.000,00	30.000.000,00	0,00	KECAMATAN PADANG PANJANG TIMUR
7	01	02	2.03		Koordinasi Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum	Jumlah Rapat Koordinasi Layanan Persampahan	12 kali	12 kali	219.440.000,00	219.440.000,00	219.440.000,00	KECAMATAN PADANG PANJANG TIMUR
7	01	02	2.03	0001	Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang Terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum							
						Jumlah Dokumen Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang Terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum	576 Dokumen	8 Dokumen	219.440.000,00	219.440.000,00	191.474.400,00	KECAMATAN PADANG PANJANG TIMUR
7	01	02	2.04		Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	Jumlah urusan pemerintahan yang dilimpahkan	10 urusan	10 urusan	962.000.000,00	919.555.400,00	919.555.400,00	KECAMATAN PADANG PANJANG TIMUR
7	01	02	2.04	0003	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan							
						Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	8 Laporan	8 Laporan	962.000.000,00	919.555.400,00	806.660.000,00	KECAMATAN PADANG PANJANG TIMUR
7	01	03			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Tingkat Partisipasi dan Pemberdayaan Masyarakat Kecamatan/ Kelurahan pada Kecamatan Padang Panjang Timur	39.99 %	39.99 %	4.966.218.500,00	4.739.480.540,00	4.284.677.050,00	
7	01	03	2.02		Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Jumlah jenis pemberdayaan kelurahan yang dilaksanakan	3 jenis	3 jenis	2.717.934.500,00	2.491.196.540,00	2.491.196.540,00	KECAMATAN PADANG PANJANG TIMUR
7	01	03	2.02	0001	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan							

						Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku , Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional	80 Orang	0 Orang	20.000.000,00	20.000.000,00	0,00	KECAMATAN PADANG PANJANG TIMUR
7	01	05	2.01	0008	Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan							
						Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	4 Dokumen	4 Dokumen	10.000.000,00	10.000.000,00	3.200.000,00	KECAMATAN PADANG PANJANG TIMUR
					KECAMATAN PADANG PANJANG BARAT				20.358.231.040,00	19.423.040.682,00	17.097.564.341,00	
7					UNSUR KEWILAYAHAN				20.358.231.040,00	19.423.040.682,00	17.097.564.341,00	
7	01				KECAMATAN				20.358.231.040,00	19.423.040.682,00	17.097.564.341,00	
7	01	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase pemenuhan urusan penunjang yang dipenuhi pada Kecamatan Padang Panjang Barat	100 %	100 %	12.563.442.150,00	12.383.814.088,00	10.759.233.082,00	
7	01	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Pemenuhan Layanan Administrasi Keuangan pada Kecamatan Padang Panjang Barat Terlaksananya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	90 Persen	90 Persen 95 Persen	8.453.928.480,00	8.165.987.501,00	8.165.987.501,00	KECAMATAN PADANG PANJANG BARAT
7	01	01	2.02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN							
						Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	1125 Orang/bulan	1125 Orang/bulan	8.453.928.480,00	8.165.987.501,00	7.562.658.031,00	KECAMATAN PADANG PANJANG BARAT
7	01	01	2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan layanan administrasi kepegawaian pada Kecamatan Padang Panjang Barat Terlaksananya Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	90 Persen	100 Persen 90 Persen	0,00	0,00	0,00	KECAMATAN PADANG PANJANG BARAT
7	01	01	2.05	0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya							
						Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	75 Paket	75 Paket	0,00	0,00	0,00	KECAMATAN PADANG PANJANG BARAT
7	01	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan layanan administrasi umum pada Kecamatan Padang Panjang Barat Terlaksananya Administrasi Umum Perangkat Daerah	90 Persen	90 Persen	650.345.534,00	680.879.103,00	680.879.103,00	KECAMATAN PADANG PANJANG BARAT
7	01	01	2.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi							

						Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	4 Paket	4 Paket	0,00	31.040.200,00	17.914.250,00	KECAMATAN PADANG PANJANG BARAT	
7						NON URUSAN			20.358.231.040,00	19.423.040.682,00	17.097.564.341,00		
7	01					URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX			20.358.231.040,00	19.423.040.682,00	17.097.564.341,00		
7	01	01				PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase pemenuhan urusan penunjang yang dipenuhi pada Kecamatan Padang Panjang Barat	100 %	100 %	12.563.442.150,00	12.383.814.088,00	10.759.233.082,00	
7	01	01	2.06			Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan layanan administrasi umum pada Kecamatan Padang Panjang Barat Terlaksananya Administrasi Umum Perangkat Daerah	90 Persen	90 Persen	650.345.534,00	680.879.103,00	680.879.103,00	KECAMATAN PADANG PANJANG BARAT
7	01	01	2.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi								
7						UNSUR KEWILAYAHAN			20.358.231.040,00	19.423.040.682,00	17.097.564.341,00		
7	01					KECAMATAN			20.358.231.040,00	19.423.040.682,00	17.097.564.341,00		
7	01	01				PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase pemenuhan urusan penunjang yang dipenuhi pada Kecamatan Padang Panjang Barat	100 %	100 %	12.563.442.150,00	12.383.814.088,00	10.759.233.082,00	
7	01	01	2.06			Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan layanan administrasi umum pada Kecamatan Padang Panjang Barat Terlaksananya Administrasi Umum Perangkat Daerah	90 Persen	90 Persen	650.345.534,00	680.879.103,00	680.879.103,00	KECAMATAN PADANG PANJANG BARAT
7	01	01	2.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor								
						Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	4 Paket	4 Paket	0,00	174.795.703,00	83.515.017,00	KECAMATAN PADANG PANJANG BARAT	
7						NON URUSAN			20.358.231.040,00	19.423.040.682,00	17.097.564.341,00		
7	01					URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX			20.358.231.040,00	19.423.040.682,00	17.097.564.341,00		
7	01	01				PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase pemenuhan urusan penunjang yang dipenuhi pada Kecamatan Padang Panjang Barat	100 %	100 %	12.563.442.150,00	12.383.814.088,00	10.759.233.082,00	
7	01	01	2.06			Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan layanan administrasi umum pada Kecamatan Padang Panjang Barat Terlaksananya Administrasi Umum Perangkat Daerah	90 Persen	90 Persen	650.345.534,00	680.879.103,00	680.879.103,00	KECAMATAN PADANG PANJANG BARAT
7	01	01	2.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor								
7						UNSUR KEWILAYAHAN			20.358.231.040,00	19.423.040.682,00	17.097.564.341,00		
7	01					KECAMATAN			20.358.231.040,00	19.423.040.682,00	17.097.564.341,00		

						Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	9 Unit	9 Unit	0,00	174.328.000,00	0,00	KECAMATAN PADANG PANJANG BARAT	
7					NON URUSAN				20.358.231.040,00	19.423.040.682,00	17.097.564.341,00		
7	01				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX				20.358.231.040,00	19.423.040.682,00	17.097.564.341,00		
7	01	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase pemenuhan urusan penunjang yang dipenuhi pada Kecamatan Padang Panjang Barat	100 %	100 %	12.563.442.150,00	12.383.814.088,00	10.759.233.082,00		
7	01	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase ketersediaan Barang Milik Daerah berkondisi baik Terpeliharanya Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	90 %	80 Persen 90 %	832.879.000,00	919.389.400,00	919.389.400,00	KECAMATAN PADANG PANJANG BARAT	
7	01	01	2.09	0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya								
7					UNSUR KEWILAYAHAN				20.358.231.040,00	19.423.040.682,00	17.097.564.341,00		
7	01				KECAMATAN				20.358.231.040,00	19.423.040.682,00	17.097.564.341,00		
7	01	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase pemenuhan urusan penunjang yang dipenuhi pada Kecamatan Padang Panjang Barat	100 %	100 %	12.563.442.150,00	12.383.814.088,00	10.759.233.082,00		
7	01	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase ketersediaan Barang Milik Daerah berkondisi baik Terpeliharanya Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	90 %	80 Persen 90 %	832.879.000,00	919.389.400,00	919.389.400,00	KECAMATAN PADANG PANJANG BARAT	
7	01	01	2.09	0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya								
						Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	1 Unit	35.000.000,00	299.398.400,00	389.732.000,00	KECAMATAN PADANG PANJANG BARAT	
7	01	02			PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Persentase Tingkat Layanan pada Kecamatan Padang Panjang Barat	100 %	100 %	377.137.338,00	1.479.596.129,00	1.346.361.023,00		
7	01	02	2.01		Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah koordinasi yang dilaksanakan ditingkat kecamatan	1 koordinasi 9 dokumen	4 koordinasi	6.760.238,00	6.759.900,00	6.759.900,00	KECAMATAN PADANG PANJANG BARAT	
7	01	02	2.01	0002	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan								
						Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	1 Dokumen	1 Dokumen	6.760.238,00	6.759.900,00	0,00	KECAMATAN PADANG PANJANG BARAT	

[illegible]

[illegible]

					Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	6 Dokumen	6 Dokumen	9.999.850,00	14.394.650,00	4.723.500,00	KECAMATAN PADANG PANJANG BARAT	
					BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH DAN KESATUAN BANGSA POLITIK			8.182.482.589,00	9.471.364.248,00	8.675.110.132,00		
1					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR			6.292.592.005,00	6.329.966.282,00	5.453.338.666,00		
1	05				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT			6.292.592.005,00	6.329.966.282,00	5.453.338.666,00		
1	05	03			PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA	Persentase warga yang mendapat pelayanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana	100 %	100 %	1.595.301.900,00	1.288.694.470,00	817.577.110,00	
1	05	03	2.01		Pelayanan Informasi Rawan Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah dokumen rencana penanggulangan bencana yang dilegalisasi presentase warga yang mendapat pelayanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana	100 % 1 dokumen	100 % 1 dokumen	155.078.000,00	49.999.960,00	49.999.960,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH DAN KESATUAN BANGSA POLITIK
1	05	03	2.01	0007	Sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Rawan Bencana Kabupaten/Kota (Per Jenis Ancaman Bencana)							
					Jumlah warga negara termasuk kelompok rentan di kawasan rawan bencana bencana Kabupaten/Kota yang memperoleh sosialisasi, komunikasi, informasi dan edukasi sesuai jenis ancaman bencana yang ada di kawasan tempat tinggalnya selama 1 (satu) tahun	160 Orang	160 Orang	50.000.000,00	49.999.960,00	0,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH DAN KESATUAN BANGSA POLITIK	
1	05	03	2.01	0008	Penyusunan Kajian Risiko Bencana Kabupaten/Kota							
					Jumlah dokumen Kajian Risiko Bencana (KRB) sampai dengan dinyatakan sah/legal paling lama dalam 1 (satu) tahun	1 Dokumen	1 Dokumen	105.078.000,00	0,00	0,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH DAN KESATUAN BANGSA POLITIK	
1	05	03	2.02		Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	Jumlah dokumen rencana penanggulangan bencana yang dilegalisasi [deleted] presentase warga yang mendapat pelayanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana	160 orang 1 dokumen	160 orang 1 dokumen	1.287.440.000,00	1.025.854.450,00	1.025.854.450,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH DAN KESATUAN BANGSA POLITIK
1	05	03	2.02	0015	Penyediaan Peralatan Perlindungan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana kabupaten/kota							
					Jumlah Peralatan Penyelamatan Diri bagi Individu Warga Negara, Keluarga, maupun Petugas sesuai dengan jenis ancaman bencana di kawasan tempat tinggalnya	15 Unit	15 Unit	30.000.000,00	0,00	0,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH DAN KESATUAN BANGSA POLITIK	
1	05	03	2.02	0026	Pengendalian Operasi dan Penyediaan Sarana Prasarana Kesiapsiagaan Terhadap Bencana Kabupaten/Kota							

						Jumlah laporan layanan pusat pengendalian operasi (pusdalops) dengan Maklumat Pelayanan yang sah dan legal sesuai dengan jenis ancaman bencana yang ada di kawasan tempat tinggalnya	12 laporan	12 laporan	872.440.000,00	905.855.000,00	779.660.950,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH DAN KESATUAN BANGSA POLITIK
1	05	03	2.02	0027	Penyusunan Rencana Penanggulangan Bencana Kabupaten/Kota							
						Jumlah dokumen Rencana Penanggulangan Bencana (RPB) Kabupaten/Kota sampai dengan dinyatakan sah/legal paling lama dalam 1 (satu) tahun	1 Dokumen	1 Dokumen	265.000.000,00	0,00	0,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH DAN KESATUAN BANGSA POLITIK
1	05	03	2.02	0028	Pelatihan Pencegahan dan Mitigasi Bencana Kabupaten/Kota							
						Jumlah warga negara termasuk kelompok rentan di kawasan rawan bencana Kabupaten/Kota yang mengikuti pelatihan pencegahan dan mitigasi bencana	22 Kawasan	22 Kawasan	120.000.000,00	119.999.450,00	0,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH DAN KESATUAN BANGSA POLITIK
1	05	03	2.03		Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	presentase warga yang mendapat pelayanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana	100 %	100 %	90.000.000,00	89.997.000,00	89.997.000,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH DAN KESATUAN BANGSA POLITIK
1	05	03	2.03	0002	Respon Cepat Darurat Bencana Kabupaten/Kota							
						Jumlah Dokumen SK Penetapan Status Darurat Bencana dan SKPDB yang Ditetapkan Paling Lama 1x24 Jam berdasarkan Hasil Dokumen Laporan Kaji Cepat	1 Dokumen	1 Dokumen	90.000.000,00	89.997.000,00	15.075.000,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH DAN KESATUAN BANGSA POLITIK
1	05	03	2.04		Penataan Sistem Dasar Penanggulangan Bencana	Jumlah dokumen yang disusun	1 dokumen	1 dokumen	62.783.900,00	122.843.060,00	122.843.060,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH DAN KESATUAN BANGSA POLITIK
1	05	03	2.04	0010	Koordinasi penanganan Pascabencana Kabupaten/Kota							
						Jumlah penyelesaian kegiatan pascabencana di semua sektor sesuai berdasarkan Rencana Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana (R3P) Kabupaten/Kota yang dilegalkan	1 Kegiatan	1 Kegiatan	62.783.900,00	122.843.060,00	22.841.160,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH DAN KESATUAN BANGSA POLITIK
1	05	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Realisasi Urusan Pemerintahan pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah Dan Kesatuan Bangsa Politik	100 %	100 %	4.697.290.105,00	5.041.271.812,00	4.635.761.556,00	
1	05	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan urusan penunjang pada perangkat daerah tertib administrasi keuangan	100 persen 12 bulan	100 persen 12 bulan	3.816.750.289,00	4.192.595.326,00	4.192.595.326,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH DAN KESATUAN BANGSA POLITIK

[illegible]

						Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	150 Laporan	150 Laporan	195.567.000,00	195.567.000,00	97.731.000,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH DAN KESATUAN BANGSA POLITIK
1	05	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	persentase pemenuhan barang milik daerah sesuai dengan perencanaan presentase pengadaan BMD yang tuntas dilaksanakan	100 % 100 persen	100 % 100 persen	88.495.600,00	25.994.000,00	25.994.000,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH DAN KESATUAN BANGSA POLITIK
1	05	01	2.07	0005	Pengadaan Mebel							
						Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	5 Unit	5 Unit	50.495.600,00	0,00	0,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH DAN KESATUAN BANGSA POLITIK
1	05	01	2.07	0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya							
						Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	3 Unit	3 Unit	38.000.000,00	25.994.000,00	0,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH DAN KESATUAN BANGSA POLITIK
1	05	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah yang terpenuhi presentase kegiatan penunjang yang tuntas dilaksanakan	100 % 90 persen	100 % 90 persen	162.847.816,00	182.042.116,00	182.042.116,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH DAN KESATUAN BANGSA POLITIK
1	05	01	2.08	0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat							
						Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	3 Laporan	3 Laporan	3.496.500,00	3.494.400,00	1.747.200,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH DAN KESATUAN BANGSA POLITIK
1	05	01	2.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik							
						Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	36 Laporan	36 Laporan	34.997.716,00	34.997.716,00	26.644.872,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH DAN KESATUAN BANGSA POLITIK
1	05	01	2.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor							
						Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	4 Laporan	4 Laporan	124.353.600,00	143.550.000,00	135.768.000,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH DAN KESATUAN BANGSA POLITIK

1	05	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase ketersediaan barang milik daerah berkondisi baik terpelihara barang milik daerah	-- 90 persen	-- 90 persen	371.862.500,00	383.308.900,00	383.308.900,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH DAN KESATUAN BANGSA POLITIK
1	05	01	2.09	0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan							
						Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	20 Unit	20 Unit	339.238.800,00	341.778.400,00	278.816.000,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH DAN KESATUAN BANGSA POLITIK
1	05	01	2.09	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya							
						Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	1 Unit	1 Unit	17.333.800,00	26.241.000,00	35.650.000,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH DAN KESATUAN BANGSA POLITIK
1	05	01	2.09	0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya							
						Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	1 Unit	15.289.900,00	15.289.500,00	0,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH DAN KESATUAN BANGSA POLITIK
8					NON URUSAN				1.889.890.584,00	3.141.397.966,00	3.221.771.466,00	
8	01				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX				1.889.890.584,00	3.141.397.966,00	3.221.771.466,00	
8	01	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Realisasi Urusan Pemerintahan pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah Dan Kesatuan Bangsa Politik Persentase Realisasi Urusan Pemerintahan pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah Dan Kesatuan Bangsa Politik	100 90 % %	100 90 % %	4.697.290.105,00	5.041.271.812,00	4.635.761.556,00	
8	01	01	2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan layanan administrasi kepegawaian perangkat daerah presentase peningkatan disiplin dan kapasitas sumber daya aparatur	100 % 100 persen	100 % 100 persen	0,00	0,00	0,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH DAN KESATUAN BANGSA POLITIK
8	01	01	2.05	0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya							
						Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	0 Paket	0 Paket	0,00	0,00	0,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH DAN KESATUAN BANGSA POLITIK
8					UNSUR PEMERINTAHAN UMUM				1.889.890.584,00	3.141.397.966,00	3.221.771.466,00	
8	01				KESATUAN BANGSA DAN POLITIK				1.889.890.584,00	3.141.397.966,00	3.221.771.466,00	

8	01	02			PROGRAM PENGUATAN IDEOLOGI PANCASILA DAN KARAKTER KEBANGSAAN	Persentase pemahaman terhadap Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	80 %	80 %	605.000.000,00	711.022.000,00	635.440.750,00	
8	01	02	2.01		Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	presentase pencegahan terhadap peristiwa gangguan keamanan berlatar belakang ideologi radikal dan isu-isu di daerah	80 %	80 %	605.000.000,00	711.022.000,00	711.022.000,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH DAN KESATUAN BANGSA POLITIK
8	01	02	2.01	0003	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan							
						Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	80 Orang	80 Orang	605.000.000,00	711.022.000,00	635.440.750,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH DAN KESATUAN BANGSA POLITIK
8	01	03			PROGRAM PENINGKATAN PERAN PARTAI POLITIK DAN LEMBAGA PENDIDIKAN MELALUI PENDIDIKAN POLITIK DAN PENGEMBANGAN ETIKA SERTA BUDAYA POLITIK	Persentase Peningkatan Stabilitas Daerah	100 %	100 %	1.003.084.000,00	1.816.083.966,00	2.333.714.716,00	
8	01	03	2.01		Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik	presentase pencegahan terhadap perkembangan politik di daerah yang tidak sesuai dengan etika dan budaya	23 %	23 %	1.003.084.000,00	1.816.083.966,00	1.816.083.966,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH DAN KESATUAN BANGSA POLITIK
8	01	03	2.01	0003	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah							
						Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	45 Orang	45 Orang	600.000.000,00	812.999.966,00	796.294.916,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH DAN KESATUAN BANGSA POLITIK
8	01	03	2.01	0004	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah							
						Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	15 Orang	15 Orang	403.084.000,00	1.003.084.000,00	1.537.419.800,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH DAN KESATUAN BANGSA POLITIK
8	01	04			PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENGAWASAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN	Persentase pencegahan terhadap aktivitas ormas yang bertentangan dengan peraturan yang berlaku	100 %	100 %	81.806.584,00	0,00	0,00	

8	01	04	2.01		Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan	Jumlah organisasi masyarakat yang diberdayakan dan diawasi	55 ormas	55 ormas	81.806.584,00	0,00	0,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH DAN KESATUAN BANGSA POLITIK
8	01	04	2.01	0003	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah							
						Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	55 Orang	55 Orang	81.806.584,00	0,00	0,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH DAN KESATUAN BANGSA POLITIK
8	01	05			PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN KETAHANAN EKONOMI, SOSIAL, DAN BUDAYA	Persentase Konflik yang tertangani	100 %	100 %	100.000.000,00	113.950.000,00	0,00	
8	01	05	2.01		Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya	presentase pencegahan potensi konflik akibat gejolak ekonomi, masalah sosial dan budaya dikalangan masyarakat	100 %	100 %	100.000.000,00	113.950.000,00	113.950.000,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH DAN KESATUAN BANGSA POLITIK
8	01	05	2.01	0003	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitas Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitas Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah							
						Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitas Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitas Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	43 Orang	43 Orang	100.000.000,00	113.950.000,00	0,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH DAN KESATUAN BANGSA POLITIK
8	01	06			PROGRAM PENINGKATAN KEWASPADAAN NASIONAL DAN PENINGKATAN KUALITAS DAN FASILITASI PENANGANAN KONFLIK SOSIAL	Persentase kewaspadaan nasional yang tertangani di daerah	100 %	100 %	100.000.000,00	500.342.000,00	252.616.000,00	
8	01	06	2.01		Perumusan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial	presentase pencegahan konflik sosial yang berkembang ditengah masyarakat	100 %	100 %	100.000.000,00	500.342.000,00	500.342.000,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH DAN KESATUAN BANGSA POLITIK
8	01	06	2.01	0003	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitas Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah							
						Jumlah Orang yang Mengikuti pelaksanaan Kebijakan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitas Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	59 Orang	59 Orang	100.000.000,00	500.342.000,00	252.616.000,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH DAN KESATUAN BANGSA POLITIK
J U M L A H									561.658.680.000,00	597.656.518.317,00	579.992.019.272,94	

BAB VI

PENUTUP

Penyusunan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Padang Panjang Tahun 2025 dilakukan melalui tahapan sistematis, mulai dari penyusunan rancangan, verifikasi Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja-PD), penyusunan rancangan akhir, reviu oleh APIP, harmonisasi oleh Kanwil Kemenkumham, fasilitasi oleh Gubernur, hingga penetapan melalui Peraturan Kepala Daerah. Perubahan ini merupakan langkah strategis dalam menyesuaikan arah pembangunan daerah dengan dinamika lokal, nasional, dan global, termasuk menindaklanjuti hasil Pilkada Serentak 2024 serta penyesuaian terhadap kebijakan nasional seperti Asta Cita Presiden dan Wakil Presiden.

Selain itu, perubahan RKPD menjadi sarana untuk mengakomodasi kebijakan efisiensi belanja sesuai Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2025, dengan memfokuskan alokasi anggaran pada sektor-sektor prioritas seperti pendidikan, kesehatan, ketahanan pangan, dan pengendalian inflasi. Langkah ini memperkuat efektivitas penggunaan anggaran dan memastikan pembangunan yang berdampak langsung terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Lebih lanjut, Perubahan RKPD Tahun 2025 disusun untuk menjamin keterpaduan antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, dan pengawasan pembangunan, sekaligus pedoman untuk kebijakan pembangunan daerah yang disesuaikan dengan visi, misi, dan program yang telah ditetapkan oleh kepala daerah terpilih pasca Pemilihan Kepala Daerah Serentak 2024. Hasil evaluasi triwulan I menunjukkan perlunya penyesuaian terhadap kondisi yang berkembang. Dokumen ini menjadi pedoman penyusunan KUA-PPAS dan APBD Perubahan Tahun 2025 serta tolok ukur kinerja perangkat daerah. Dengan demikian, Perubahan RKPD Tahun 2025 tidak hanya menjadi dokumen administratif, tetapi juga komitmen nyata dalam mewujudkan pembangunan yang tepat sasaran dan berkelanjutan bagi masyarakat Kota Padang Panjang.

Wali Kota Padang Panjang

Dto

HENDRI ARNIS, BSBA